



ISSN 2986-9205
Vol.6, 2023



PROSIDING **SEMINAR NASIONAL** SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

"Tantangan Peningkatan Daya Saing Indonesia Menuju
Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"

Social Media :



@iespfebuntan



jurusaniesp@ekonomi.untan.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU EKONOMI DAN
STUDI PEMBANGUNAN

“Tantangan Peningkatan Daya Saing Indonesia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”



JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL SEMINAR AKADEMIK TAHUNAN ILMU
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN**

“Tantangan Peningkatan Daya Saing Indonesia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Editor:

Metasari Kartika, Diah Arminingsih, Supriaman

Cover Design and Layout:

Fauzan Risvi

Penerbit:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak – Kalimantan Barat (78121)

Website : <https://feb.untan.ac.id/>

Email : ekis.feb@untan.ac.id

REVIEWER & EDITOR
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

- Steering Committee : Dr. Barkah, S.E., M.Si
Dr. Jumhur, S.E., M.Si.
Dr. Haryono, S.E., M.Si., A.k, C.A., CPA., Asean CPA
Juanda Astarani, S.E., M.SC., CSRS
- Reviewer : Nurul Bariyah, SE, MSi, Phd
(SINTA ID 6041704; SCOPUS ID 57211642141)
Dr. Memet Agustiar, SE, MA
(SINTA ID 6155000; SCOPUS ID 57211000318)
Dr. Rosyadi, SE, MSi
(SINTA ID 6721872)
Dr. Bustami, SE, MSi
(SINTA ID 6721808)
Dr. Windhu Putra, SE, MSi
(SINTA ID 6187202)
Yanto, S.E., M.Sc.
(SINTA ID 6705565)
- Editor : Metasari Kartika, S.E., M.E.
Diah Arminingsih, SEI, ME
Supriaman, S.Pd., M.Si
- Kontributor : Pramushinta Arum Pynanjung, Dwi Septiyarini (Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat)
Wildana Latif M. (Politeknik Negeri Semarang)
Pratika Linanda, Atin Sumaryanti (Universitas OSO)
Atin Sumaryanti, Pratika Linanda, Hence Made Aryasa, Giarti Astriana, Delta Fenisa (Universitas OSO)
Febriati, Ali Afif, Aris Setiawan, Wilda Sari (Universitas Pancha Bhakti)
Febrianawati , Irvan Wibowo W, Nur Hidayat, Rianti Ardana Reswari, Ery Niswan (Universitas Pancha Bhakti)
Windi Pratiwi, Dina Octaviani, Aisyah, Arweni, Naiyun Untung (Universitas Panca Bhakti)
Marhamah (Universitas Nahdlatul Ulama)
Eliza Noviriani, Sri Mulyati (Politeknik Negeri Sambas)
Hasanah (Institut Bisnis dan Ekonomi), Arina Azwani (Universitas Satu)
- Keynote Speaker : Prof. Evan Lau, Ph.D, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kegiatan Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan VI 2023 (SATIESP) dengan tema “Tantangan Peningkatan Daya Saing Indonesia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, dapat terlaksana dengan baik pada tanggal 7 Desember 2023.

Perekonomian dunia yang sebelumnya telah melemah karena Pandemi COVID-19, kembali dihadapkan pada berbagai guncangan, inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi China, dan perang Rusia-Ukraina. Inflasi yang tinggi mengakibatkan turunnya standar hidup, sehingga pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meningkatkan bantuan fiskal untuk mengatasi inflasi. Pada saat yang sama, penerimaan keuangan negara-negara juga sedang mengalami penurunan akibat belum pulihnya kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan pemerintah. Berbagai teori pembangunan yang telah dirumuskan para ahli ekonomi dan sosial untuk menjawab permasalahan yang muncul juga masih menghadapi pro dan kontra di dunia empiris. Mitigasi dan *recovery* demi menata masa depan berkelanjutan harus dilakukan.

Segala upaya bersama perlu dilakukan termasuk oleh para akademisi melalui sumbangsih ide, gagasan, saran yang diaktualisasikan dalam Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam rangka turut serta berperan menghadirkan berbagai bentuk solusi atau model filantropi dalam Ilmu Ekonomi. Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan VI 2023 (SATIESP) merupakan salah satu ajang bagi para Akademisi untuk bertukar hasil penelitian dan PKM di bidang ilmu ekonomi dan praktek/ kebijakan pembangunan secara umum serta pengembangan berbagai sektor ekonomi.

Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti bidang ilmu ekonomi dari Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (IESP) dan dari berbagai perguruan tinggi diluar Universitas Tanjungpura, yang telah membahas berbagai bidang kajian dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran akademisi dalam menata masa depan berkelanjutan. Penghargaan dan ucapan terima kasih istimewa kami sampaikan kepada Prof. Evan Lau, Ph.D,

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Dr. Fariastuti, SE., M.A dari Universitas Tanjungpura yang telah berkenan menjadi *keynote speakers* dalam kegiatan ini. Apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemakalah dan pelaksana Seminar serta seluruh pihak yang turut serta menyelenggarakan dan menyukseskan acara seminar ini. Akhir kata, semoga kebermanfaatan kegiatan ini memberikan dampak seluas-luasnya serta memperoleh ridho dan catatan amal kebaikan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 28 Maret 2024
Dekan FEB UNTAN



Dr. Barkah, S.E., M.Si.
NIP. 196502201990032004

KATA SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ijin-Nya rangkaian kegiatan SATIESP VI Tahun 2023 dapat dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2023 dengan topik “Tantangan Peningkatan Daya Saing Indonesia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan.. Pada SATIESP VI 2023 dipresentasikan artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kalangan dosen dan mahasiswa dengan menghadirkan keynote speakers Prof. Evan Lau, Ph.D., peneliti dari Universiti Malaysia Sarawak dan Dr. Fariastuti, S.E., M.A., peneliti dari Universitas Tanjungpura. Artikel yang telah dipresentasikan selanjutnya dipublikasikan melalui Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 6 Tahun 2023.

Terselenggaranya rangkaian kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura beserta seluruh jajaran, co-host yaitu Universitas Panca Bhakti, Universitas OSO, Universitas Nadlatul Ulama, Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu kami mengucapkan penghargaan atas kontribusinya dalam rangkaian kegiatan SATIESP VI. Menyadari kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan kegiatan ini di masa yang akan datang. Besar harapan agar kegiatan ini membawa manfaat dan meningkatkan atmosfer akademis bagi civitas akademika serta masyarakat secara umum. Semoga Allah SWT berkenan memberikan ridho-Nya atas kegiatan ini. Aamiin YRA.

Pontianak, 28 Maret 2024

Ketua Jurusan IESP FEB UNTAN

Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 196912011994032004

DAFTAR ISI

Bonus Demografi dan Penurunan Kemiskinan di Kalimantan Barat.....	1
Pengaruh Kualitas Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kemiskinan Perempuan Di Kalimantan Barat.....	16
Dinamika Kepatuhan Pajak: Memahami Pengaruh Layanan, Sanksi dan Spritualitas	28
Perkembangan Dan Rekonstruksi Perbankan Syariah Di Indonesia.....	40
<i>Analysis of the Role of People's Business Credit Distribution in Encouraging the Reduction of the Poor Population in Demak Regency, Indonesia</i>	56
<i>Analysis Of International Tanjungpura Port Development Impact On Social Economics Of The People Sungai Kunyit District In Mempawah Regency.....</i>	61
Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Kredit Bermasalah..	77
Modal Manusia dan Ketenagakerjaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	88
Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Umkm Dalam Membuat Produk Pangan Yang Memiliki Gizi Tinggi di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya	106
<i>Democracy and Poverty In Indonesia.....</i>	111
Analisis dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Melawi	137
Kontribusi Stabilitas Politik dan Inflasi Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia.....	146
Apakah <i>unemployment positive productivity trade-off hypothesis</i> terjadi di Indonesia ?	156
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia.....	161
Pengaruh <i>Brand Experience</i> Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan KFC di Kota Pontianak	166
Kinerja UMKM: Pengaruh Literasi Keuangan dan <i>E-Commerce</i>.....	174
Transformasi Struktural dan Ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat.....	180
Alokasi Waktu Kerja Pedagang Sektor Informal Wanita di Kota Pontianak.....	191
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.....	210
Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kawasan Pesisir Dengan Pemanfaatan Tanaman Campur Padi – Kelapa (PALAPA)	222
Pergerakan Bilateral Trade, Tenaga Kerja dan Nilai Tukar Indonesia – Arab Saudi.....	230

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak Mentah, Dan Harga Emas Terhadap Perkembangan Cadangan Emas Di Lima Negara Islam (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, Dan Indonesia)	241
Determinan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Kalimantan Barat.....	251
Kajian Akuntansi Emisi Karbon Dan Gas Rumah Kaca Di Indonesia.....	260
Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (SD, SMP, SMA) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.....	267
Analisis Produksi Beras Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.....	291
Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjungpura Dan Dampaknya Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah)	310
Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.....	330
Eksternalitas Perusahaan Pengolahan Hasil Tambang Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ketapang.....	340
Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanaman Modal Asing Menjelaskan Kemiskinan Dengan Intervensi Pengangguran Sebagai Variabel Mediasi Di Indonesia.....	353
Pengaruh Luas Lahan Dan Harga Jual Padi Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Indonesia.....	367
Strategi Inovatif Pdam: Memperkuat Kinerja Keuangan Melalui Integrasi SDM Dan Aspek Operasional Di Wilayah III.....	375
Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Barat.....	384
Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Di Bengkayang.....	398
Investigasi Teori Heckscher-Ohlin Dan Hipotesis Linder Pada Nilai Ekspor Indonesia.....	405

BONUS DEMOGRAFI DAN PENURUNAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

Nurul Bariyah¹, Rini Sulistiawati², Gigin Auliya³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bonus Demografi terhadap penurunan kemiskinan di Kalimantan Barat. Variabel Bonus Demografi diukur melalui Rasio Ketergantungan, sementara variabel penurunan kemiskinan menggunakan Persentase Penduduk Miskin. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama periode 2015 hingga 2022. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan persentase penduduk yang berada dalam angkatan kerja mencapai lebih dari 90%, sehingga kemampuan untuk menanggung penduduk usia non-produktif relatif tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan Upah Minimum di atas garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang meningkat menandakan peningkatan daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga berkontribusi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan..

JEL: I3, J01, J04.

Kata Kunci: rasio ketergantungan, kemiskinan, upah minimum, pertumbuhan ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dan Berdaya Saing“ yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yang meliputi 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Dari ke 5 (lima) arahan utama presiden ini, pembangunan sumber daya manusia berada pada posisi prioritas pertama dengan strategi pelaksanaannya antara lain meliputi Tata Kelola Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan (Sekretariat Kabinet RI, 2020).

Pengentasan kemiskinan juga merupakan salah satu program kerja yang disepakati dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) disamping program-program lainnya. Program ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak melalui peningkatan harapan hidup, status gizi dan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan khususnya bagi anak-anak dibawah 5 tahun (Balita). (Kementerian PPN/Bappenas.2023).

Menurut Bappenas (2002) dalam Arsyad (2010), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya

¹nurul.Bariyah@ekonomi.untan.ac.id

²rini.sulistiawati@ekonomi.untan.ac.id

³giginauliya19@student.untan.ac.id

sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan tidak boleh hanya dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata karena kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Persoalan yang ditimbulkan oleh kemiskinan juga bersifat multidimensi. Sehingga bagi negara manapun meletakkan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi.

Perkembangan kemiskinan di Kalimantan Barat selama 7 tahun terakhir dilihat dari persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan penurunan yaitu dari 8,30 % pada tahun 2015 menjadi 6,73% tahun 2022 (Tabel 1.1) Sementara dari sisi jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan dari 383,70 ribu jiwa tahun 2015 menjadi 350,25 ribu jiwa pada tahun 2022. sedangkan garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp 323.615 per kapita/bulan menjadi Rp 520.660 per kapita/bulan pada periode yang sama.

Tabel 1. Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 s.d Tahun 2022

Indikator	2015	2018	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin	8,30	7,77	7,17	7,15	6,73
Garis Kemiskinan Rp/Kapita /bulan	323.615	409.287	471.2	483.454	520.66
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	383.70	387.08	366.77	367.89	350.25

Sumber : BPS, 2022 Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013- 2022.

Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Bonus demografi dapat diukur dengan angka *Dependency Ratio* atau Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiaya penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jumlah penduduk Indonesia hingga bulan Juni 2022 mencapai 275.36 juta jiwa (Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2023). Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.83 juta jiwa (69,3%) termasuk kategori usia produktif, sementara sebanyak 84.53 juta jiwa (30,7%) penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif, dengan rincian sebanyak 67.16 juta jiwa (24,39%) berada pada usia 0-14 tahun, dan sebanyak 17.38 juta jiwa (6,31%) merupakan kelompok usia 65 tahun ke atas. Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut, maka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah sebesar 44,3%, yang mempunyai arti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44,3 jiwa penduduk usia produktif. Dengan perkataan lain Indonesia saat ini sudah memasuki era bonus demografi. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka akan menjadi modal penting untuk membangun Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045.

Bonus demografi di Kalimantan Barat dimulai pada tahun 2019 dengan nilai rasio ketergantungan sebesar 49,95 dengan penurunan yang terus berlanjut hingga tahun 2022 sudah berada pada nilai 44,56 (Tabel 2). Kondisi ini mempunyai arti bahwa Kalimantan Barat mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunannya terkait dengan berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Perkembangan Rasio Ketergantungan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang tercantum pada Tabel 1.2 menunjukkan arah hubungan yang positif, dalam arti bahwa penurunan rasio ketergantungan selama periode tersebut diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan

Tabel 2 Perkembangan Rasio Ketergantungan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun	Rasio Ketergantungan	Tingkat Kemiskinan (%)
2015	50,87	8,03
2016	50,60	7,87
2017	50,35	7,88
2018	50,14	7,77
2019	49,95	7,49
2020	49,70	7,17
2021	43,46	7,15
2022	44,56	6,73

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Bonus demografi berkaitan dengan teori transisi demografi yang merupakan fenomena yang mengacu pada pergeseran historis dari angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi menuju ke angka kelahiran dan angka kematian yang rendah, (Todaro & Smith, 2006). Untuk mewujudkan kondisi ini bukanlah sesuatu yang mudah karena memerlukan beberapa tahapan dan jangka waktu yang relatif lama. Pengalaman transisi demografi di Negara Eropa Barat yang berlangsung sejak tahun 1800-an dan belum selesai hingga berakhirnya abad ke sembilan belas merupakan bukti bahwa transisi demografi memerlukan waktu yang cukup lama (Todaro & Smith, 2006).

Pengaruh perkembangan penduduk dalam hal ini kondisi bonus demografi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perdebatan para ahli ekonomi selama beberapa dekade, yang menghasilkan tiga alternatif yaitu perkembangan penduduk akan membatasi pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau tidak tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain perubahan dalam struktur umur juga dapat memiliki pengaruh signifikan pada kinerja ekonomi suatu negara (Bloom; Canning & Savilla, 2001). Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang serta teori pendukungnya, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apakah Bonus Demografi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat?.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Pembangunan Manusia

Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan, Dalam teori ini, pembangunan manusia sebagai pengembangan kemampuan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja, Sen (1995) menegaskan bahwa kemiskinan harus dipahami sebagai ketidakmampuan manusia untuk mencapai standar hidup yang bermartabat dan produktif, bukan hanya sebagai kurangnya pendapatan, Kemiskinan berbasis kekurangan melibatkan ketidakmampuan manusia untuk mengakses sumber daya kesempatan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang diinginkan.

Pengembangan kemampuan manusia menjadi inti dari pembangunan manusia menurut Sen, Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah memberikan manusia untuk mengembangkan potensi mereka, serta meningkatkan kualitas hidup dan kebebasan individu, Pengembangan kemampuan manusia harus difokuskan pada peningkatan akses individu pada sumber daya dan kesempatan untuk mencapai standar hidup yang bermartabat, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting menurut Sen, Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan mempengaruhi kebijakan pembangunan, Terakhir, Sen

menyoroti pentingnya hak asasi manusia dalam pembangunan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang bermartabat, Hak asasi manusia harus menjadi bagian penting dalam setiap strategi pembangunan, Secara keseluruhan, teori pembangunan manusia menurut Amartya Sen menekankan pentingnya melihat pembangunan manusia secara holistik dan memperhatikan aspek-aspek sosial dan kesejahteraan manusia, Pembangunan harus difokuskan pada pengembangan kemampuan manusia, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta menjamin hak asasi manusia.

2.2. Teori Kemiskinan

Menurut Becker (2009) kemiskinan terjadi disebabkan individu tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, Teori ini menghubungkan kemiskinan dengan investasi dalam sumber daya manusia atau human capital, Becker menjelaskan bahwa individu yang memiliki sumber daya manusia yang baik cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, Oleh Karena itu, individu yang kurang memiliki sumber daya manusia akan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan.

Dalam teori ini, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia, Becker menyarankan agar individu yang hidup dalam kemiskinan harus meningkatkan investasi mereka dalam sumber daya manusia, seperti melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, Dengan meningkatkan keterampilan dan pengalaman, individu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat keluar dari kemiskinan,

Namun, teori ini juga mendapat kritik karena mengabaikan faktor-faktor struktural yang membatasi akses individu ke investasi dalam sumber daya manusia, seperti ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan dan pelatihan, serta diskriminasi dalam dunia kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Sinnathurai (2013) di 85 negara berkembang periode 1990-2011, Mafruhah (2021) di Jawa Barat tahun 2000-2011, Ginting et al (2020) di Papua yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kemiskinan, Padahal ketenagakerjaan industri memiliki hubungan negatif dengan kejadian kemiskinan, hal itu tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziana dkk (2022) di 24 negara IKO antara tahun 2010-2019, Chen et al (2014) di China tahun 1995-2007, Fang et al (2013) di Tiongkok tahun 2010 menunjukkan bahwa rasio gini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, Selain itu, terdapat hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa semakin besar ketimpangan pendapatan, semakin besar pula kemiskinan di suatu negara, Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mobilitas pendapatan di beberapa wilayah pada periode tertentu, Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi mobilitas pendapatan, semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara.

H₁: Rasio Ketergantungan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian ini dilakukan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan tahun 2015-2021 tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder berupa data rasio ketergantungan, tingkat kemiskinan, dan rasio gini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu tingkat kemiskinan dan variabel terikat yaitu rasio ketergantungan dan rasio gini.

Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistic yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen (Gujarati, 2019), Pengolahan data menggunakan program Eviews versi 12 dengan ambang kesalahan sebanyak 5%, Estimasi model adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = \beta_0 + \beta_1 DR + \varepsilon$$

Dimana:

$\beta_0\beta_1\beta_2$: koefisien regresi yang mengukur seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen,

DR : Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio),

ε : kesalahan acak (*error term*) yang mengukur selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi yang diperoleh dari model.

Analisis data panel adalah suatu pendekatan statistik yang efektif dalam menggabungkan data lintas waktu (time series) dan lintas pengamatan (cross-sectional) dalam satu model analisis. Dalam konteks penelitian ini, data panel digunakan untuk menganalisis 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dari tahun 2015 hingga 2022. Dalam metode ini, variabel dependen dan independen yang diamati pada unit yang sama pada berbagai waktu dihubungkan melalui model regresi yang memasukkan komponen cross-sectional dan time series.

Analisis data panel melibatkan tiga pendekatan utama dalam pengestimasi model regresi, yaitu Pooled Least Square (Common Effect Model), Random Effect Model, dan Fixed Effect Model. Pendekatan **Common Effect Model** menggabungkan data lintas waktu dan lintas pengamatan tanpa membedakan variasi antara lokasi dan waktu. Namun, kelemahan utama pendekatan ini adalah bahwa ia memiliki intercept yang tetap, sehingga tidak mampu memisahkan efek dari sektor atau waktu, yang dapat mengakibatkan bias dalam hasil analisis. Di sisi lain, **Random Effect Model** memungkinkan variabel gangguan untuk berkorelasi antara waktu dan daerah, dan perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing unit observasi. Pendekatan ini dapat menghemat derajat kebebasan dan meningkatkan efisiensi parameter estimasi. Sementara itu, **Fixed Effect Model** mengasumsikan bahwa setiap unit lintas pengamatan memiliki intercept yang berbeda, sementara slope (kecenderungan) dari setiap unit tetap konstan seiring waktu. Dalam model ini, perbedaan antar individu tercermin melalui perbedaan intercept, sementara perubahan seiring waktu diabaikan. Penggunaan variabel dummy adalah teknik umum dalam mengestimasi data panel dengan model fixed effect. Pemilihan model yang tepat harus didasarkan pada sifat data yang Anda miliki dan pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab. Memahami karakteristik masing-masing model serta tujuan analisis Anda adalah langkah penting dalam memilih pendekatan yang sesuai dalam analisis data panel.

Dalam analisis regresi, terdapat beberapa uji pengujian hipotesis yang penting untuk mengukur sejauh mana model regresi sesuai dengan data yang ada. Salah satu uji yang digunakan adalah Uji Koefisien Determinasi (R^2), yang mengukur proporsi atau persentase dari variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas (X). Semakin mendekati nilai satu, semakin baik regresinya, karena semakin tinggi proporsi variasi yang dapat dijelaskan. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati nol, ini menunjukkan bahwa model regresi kurang baik dalam menjelaskan variasi. Selanjutnya, terdapat Uji Simultan (Uji F) yang digunakan untuk menguji sejumlah parameter secara bersamaan dalam satu model regresi. Uji ini biasanya dilakukan setelah Uji Parsial (Uji t) dan bertujuan untuk menentukan apakah setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini membantu dalam mengevaluasi apakah model regresi secara keseluruhan memiliki kecocokan yang signifikan dengan data. Uji Parsial (Uji t), di sisi lain, digunakan

untuk menguji secara parsial apakah koefisien regresi dari satu variabel independen signifikan terhadap variabel dependen, dengan mengontrol variabel independen lain yang ada dalam model. Uji t ini dilakukan untuk mengukur signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, dengan membandingkan t-statistik yang dihitung dengan nilai kritis dari tabel distribusi t pada tingkat signifikansi tertentu, umumnya 5%. Ketiga uji ini merupakan alat penting dalam analisis regresi untuk memahami sejauh mana variabel penjelas memengaruhi variabel terikat dan bagaimana model regresi sesuai dengan data yang ada.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, digunakan data panel yang merupakan kombinasi dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* mencakup periode tahun 2015 hingga 2022, sedangkan data *cross section* terdiri dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Landak, Sekadau, Melawi, Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak dan Kota Singkawang, Sehingga data yang digunakan berjumlah 112 data.

Uji chow digunakan untuk membandingkan model regresi antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	266.863646	(13,97)	0.0000
Cross-section Chi-square	403.709890	13	0.0000

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh bahwa probabilitas uji chow adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya untuk model regresi disarankan menggunakan *fixed effect model* dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.004504	1	0.3162

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh bahwa tingkat probabilitas uji hausman adalah 0,3162 lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya dalam penelitian ini disarankan untuk menggunakan *random effect model*.

Tabel 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	354.1456 (0.0000)	1.382536 (0.2397)	355.5281 (0.0000)
Honda	18.81876 (0.0000)	-1.175813 (0.8802)	12.47545 (0.0000)
King-Wu	18.81876 (0.0000)	-1.175813 (0.8802)	10.18536 (0.0000)
Standardized Honda	19.88334 (0.0000)	-0.933859 (0.8248)	10.51380 (0.0000)
Standardized King-Wu	19.88334 (0.0000)	-0.933859 (0.8248)	8.154622 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	354.1456 (0.0000)

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh bahwa hasil uji *lagrange multiplier* yang ditunjukkan oleh *Breusch-Pagan* memiliki nilai probabilitas 0,0000 dan hal ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya dalam model regresi disarankan menggunakan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier diperoleh bahwa 2 pengujian menyarankan *random effect model* dan 1 pengujian menyarankan *fixed effect model*, sehingga ditetapkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan model regresi *random effect model*.

Tabel 6 Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/16/23 Time: 08:50
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 14
 Total panel (balanced) observations: 112
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.558185	0.967931	4.709206	0.0000
DEPENDENCY_RATIO	0.066097	0.012667	5.217864	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.766188	0.9714
Idiosyncratic random			0.474364	0.0286
Weighted Statistics				
R-squared	0.198397	Mean dependent var		0.472634
Adjusted R-squared	0.191109	S.D. dependent var		0.527443
S.E. of regression	0.474374	Sum squared resid		24.75336
F-statistic	27.22499	Durbin-Watson stat		0.817687
Prob(F-statistic)	0.000001			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.020521	Mean dependent var		7.809732
Sum squared resid	820.7202	Durbin-Watson stat		0.024662

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2023

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh bahwa persamaan regresi sebagai berikut;

$$\text{Kemiskinan} = 4,558185 + 0,066097 \text{ rasio ketergantungan} + \epsilon$$

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien rasio ketergantungan sebesar 0,066097 yang menunjukkan bahwa apabila rasio ketergantungan meningkat 1 persen maka kemiskinan akan meningkat 0,066097 persen.

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji koefisien determinasi (R^2), nilai R^2 adalah sebesar 0,198397 yang berarti bahwa variabel rasio ketergantungan dapat menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 19,8397 persen dan sisanya sebesar 80,1603 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang diluar variabel yang diteliti. Untuk hasil uji simultan diperoleh sebesar 0,000001 dan nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk uji parsial (uji t) diperoleh bahwa nilai probabilitas rasio ketergantungan sebesar 0,00000 lebih kecil dari taraf signifikan sehingga hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya rasio ketergantungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 mengarahkan Pembangunan Indonesia yang ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja,

Bonus Demografi ditandai oleh jumlah penduduk usia produktif (umur 15 – 64 tahun) yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun), Struktur penduduk Kalimantan Barat selama 8 tahun terakhir menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang cenderung meningkat yaitu dari 66,28 persen tahun 2015 menjadi 69,17 persen di tahun 2022 (Tabel 4.5), Kondisi ini mempunyai arti bahwa penduduk usia produktif yang memasuki pasar kerja semakin bertambah, yang selanjutnya akan dapat menanggung beban hidup dari penduduk usia tidak produktif, Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Kalimantan Barat mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prasyarat utama yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara kuantitatif jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2022 sudah mencapai 5.541.376 Jiwa, bertambah sebanyak 751.802 jiwa dibandingkan tahun 2015. Penduduk pada kelompok umur 15 – 64 tahun mempunyai jumlah yang terbanyak, namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah penduduk lansia yang berada pada kelompok umur ≥ 64 tahun. Persentasenya terus meningkat dari 4,14 persen pada tahun 2015 menjadi 5,42 persen tahun 2022. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama pemerintah terkait dengan pemenuhan kebutuhan penduduk lansia, antara lain dalam hal penyediaan fasilitas umum, jaminan sosial dan jaminan Kesehatan.

Di sisi lain persentase penduduk usia 0 – 14 tahun cenderung mengalami penurunan yaitu dari 29,58 % tahun 2015 menjadi 25,40 % tahun 2022. Kondisi ini bermakna bahwa program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran telah menunjukkan keberhasilan. Dalam jangka panjang, penurunan angka kelahiran ini harus disikapi oleh pemerintah melalui perencanaan kebijakan yang tepat khususnya kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan, karena pembangunan manusia tidak lagi pada kuantitas namun lebih berfokus pada pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

**Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kalimantan Barat
 Tahun 2015 s/d Tahun 2022 (Jiwa)**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk/Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	499.138	497.770	496.046	493.951	491.513	472025	472608	474345
5-9	468.858	476.636	483.314	489.430	494.307	464542	463309	464417
10-14	448.815	451.392	454.518	458.230	462.377	473951	471079	468958
0 - 14	1.416.811	1.425.798	1.433.878	1.441.611	1.448.197	1410518	1406996	1407720
%	29,58	29,33	29,07	28,82	28,57	26,05	25,72	25,40
15-19	438.304	438.902	439.903	440.563	442.248	475528	473001	472478
20-24	426.033	426.693	427.456	428.916	430.260	481654	479793	478176
25-29	412.976	416.319	418.966	419.951	420432	470833	471564	473855
30-34	396.057	399.217	401.121	403.606	405762	458233	460540	463047
35-39	368.948	374.361	380.282	384.982	389106	427834	433066	439565
40-44	323.274	332.242	340.703	349.041	356610	393312	399320	405764
45-49	274.984	283.511	292.081	300.595	308953	343588	352150	361291
50-54	228.077	235.499	243.129	250.929	258852	283890	293387	303917
55-59	178.483	186.864	194.708	202.243	209759	229264	237257	245766
60-64	127.484	134.604	142.372	150.418	158274	173120	180794	189346
15 - 64	3.174.620	3228212	3.280.721	3.331.244	3380256	3737256	3780872	3833205
%	66,28	66,40	66,51	66,60	66,68	69,02	69,11	69,17
65-69	88.143	92.185	96.633	101.566	107081	124158	130987	137511
70-74	56.640	59.544	62.472	65.539	68878	69901	76358	83833
75+	53.360	55.999	58.795	61.704	64715	72557	75584	79107
65 - 75+	198.143	207.728	217.900	228.809	240674	266616	282929	300451
%	4,14	4,27	4,42	4,57	4,75	4,92	5,17	5,42
Total	4789.574	4.861.738	4.932.499	5.001.664	5069127	5414390	5470797	5541376

Sumber: BPS Kalbar, 2023

Sebaran laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota menunjukkan ketidakmerataan, Kabupaten Ketapang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi sejak sensus penduduk tahun 2000 hingga sensus penduduk tahun 2020 yaitu lebih dari 2 %, diikuti dengan kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang, sementara kabupaten Sekadau memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah pada periode yang sama (Tabel 4.6). Fenomena bonus demografi yang ditunjukkan melalui laju pertumbuhan penduduk juga terlihat dalam ruang lingkup provinsi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 1,66 persen per tahun, meningkat menjadi 2,04 persen selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, Hal dapat di capai antara lain dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) nasional sampai pada tingkat *replacement rate* yaitu 2,1. Selama periode 2 kali sensus yaitu tahun 2010 dan tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat telah berada dibawah *replacement rate* yaitu sebesar 1,66 persen (SP 2010) dan 2,04 persen (SP 2020). Penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat *replacement rate* ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk, dengan demikian daya tampung dan daya dukung lingkungan akan tetap terjaga.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Per Tahun / persen		
	2000-2010	2010-2020	2020-2021
Sambas	0,90	2,34	1,68
Bengkayang	2,01	2,80	2,14
Landak	1,59	1,83	1,17
Pontianak	1,42	2,48	1,82
Sanggau	1,65	1,67	1,02
Ketapang	2,15	2,84	2,17
Sintang	1,62	1,40	0,75
Kapuas Hulu	2,00	1,25	0,60
Sekadau	1,22	1,49	0,83
Melawi	1,81	2,40	1,74
Kayong Utara	1,94	2,75	2,09
Kubu Raya	1,69	1,91	1,26
Kota Pontianak	1,81	1,68	1,02
Kota Singkawang	2,11	2,27	1,61
Kalimantan Barat	1,66	2,04	1,39

Sumber: BPS, 2023

Visi Indonesia tahun 2045 yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 yaitu Indonesia Maju akan dicapai melalui berbagai kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, Khusus kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui strategi di bidang Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter. Strategi kebijakan di bidang Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial terdiri dari 1) Tata Kelola Kependudukan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Kesehatan; 4) Pendidikan; 5) Pengentasan Kemiskinan; dan 6) Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.

Perubahan struktur penduduk yang menciptakan bonus demografi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Oleh sebab itu perlu di cermati kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat berkaitan dengan berlakunya bonus demografi saat ini, Selama 8 tahun terakhir persentase penduduk miskin telah berkurang sebanyak 1,3 % yaitu dari 8,03 % pada tahun 2015 menjadi 6,73 % pada tahun 2022. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 33,45 ribu jiwa pada periode yang sama, Di sisi lain, Garis kemiskinan juga menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 323,615 per kapita/bulan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 520,660 per kapita/bulan (Tabel 8).

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator kemiskinan lainnya selain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat (Indeks) Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan mempunyai nilai > 1 (lebih besar dari satu). Hal ini mempunyai arti bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat yang tergolong miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, dengan perkataan lain masyarakat yang tergolong miskin ini semakin kuat daya belinya. Namun perlu diwaspadai bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan ini cenderung melemah

dari tahun ke tahun, Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan bernilai 1,29 dan terus melemah sampai pada nilai indeks 1,04 ditahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, Selain itu kondisi ini juga mencerminkan semakin lemahnya daya beli masyarakat miskin tersebut.

Tabel 8 Perkembangan Kemiskinan Di Kalimantan Barat Tahun 2015-2022

No	Indikator Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	323,615	347,880	377,219	409,287	438,555	471,200	483,454	520,660
2	Penduduk Miskin (%)	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49	7,17	7,15	6,73
3	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	383,7	381,35	387,43	387,08	378,41	366,77	367,89	350,25
4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,29	1,3	1,23	1,18	1,14	1,01	1,03	1,04
5	Tingkat Kearifan Kemiskinan (P2)	0,32	0,31	0,29	0,28	0,26	0,23	0,23	0,24

Sumber : BPS, 2023.

Tingkat (Indeks) Kearifan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, Selama 8 (delapan) tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 0,32 pada tahun 2015 menjadi 0,23 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif semakin mengecil.

Sebaran jumlah penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di desa adalah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin di kota (Tabel 9), Tahun 2015, lebih dari 75 % penduduk miskin bertempat tinggal di desa, Hingga tahun 2022 kondisinya masih tetap sama. Hal ini mempunyai arti bahwa persoalan kemiskinan lebih krusial di pedesaan dibandingkan di perkotaan, dengan demikian strategi kebijakan yang harus disusun untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan ke pedesaan, Potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di pedesaan harus dioptimalkan, Mengacu kepada RPJMN 2020-2024 maka Pembangunan manusia khususnya di pedesaan harus ditekankan pada peningkatan daya saing potensi ekonomi desa yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Tabel 9 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Desa Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2015 sd Tahun 2022

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)		
	Kota	Desa	Kota + Desa
2015	82.050	301.650	383.700
2016	78.290	303.060	381.350
2017	76.160	311.270	387.430
2018	84.520	302.560	387.080
2019	81.640	296.770	378.410
2020	84.360	282.410	366.770
2021	86.900	280.990	367.890
2022	85.040	265.210	350.250

Sumber : BPS, 2023

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan penurunan terus menerus dan tetap berada dibawah angka 10 % (Tabel 9), namun demikian hingga tahun 2021 masih terdapat beberapa kabupaten yang mempunyai persentase

penduduk miskin yang relatif masih tinggi (lebih dari 10 %) yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Melawi. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang telah berkurang menjadi 9,39 %, sementara kabupaten Landak dan kabupaten Melawi masih berkisar pada angka 10%, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang merupakan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin yang relatif rendah yaitu dibawah 5 % pada tahun 2022, walaupun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 persentase penduduk miskinnya masih berada pada angka ≥ 5 %, kecuali Kabupaten Sanggau yang masih dapat mempertahankan persentase penduduk miskinnya di angka 5 %.

Tabel 10 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2015 sd 2022 (Persen)

No	Kabupaten / Kota	Tahun /Persen							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49	7,17	7,15	6,73
2	Sambas	9,42	8,54	8,59	8,55	8,19	7,7	7,66	6,92
3	Bengkayang	6,94	7,46	7,51	7,17	6,96	6,62	6,48	6,03
4	Landak	13,51	12,32	12,23	11,77	11,47	11,12	10,99	10,01
5	Mempawah	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32	4,95	5,18	5,32
6	Sanggau	4,57	4,51	4,52	4,67	4,57	4,46	4,55	4,51
7	Ketapang	11,72	10,99	11,02	10,93	10,54	10,29	10,13	9,39
8	Sintang	9,33	10,07	10,2	10,35	9,65	9,27	9,28	8,57
9	Kapuas Hulu	9,66	9,82	9,45	9,6	9,62	8,99	8,93	8,59
10	Sekadau	6,5	6,14	6,46	6,17	6,11	5,87	6,26	5,85
11	Melawi	12,57	12,63	12,54	12,83	12,38	12,04	12,01	11,44
12	Kayong Utara	9,84	10,19	9,89	10,08	9,98	9,56	9,33	9,04
13	Kubu Raya	5,22	5,04	5,26	5,07	4,74	4,42	4,34	4,12
14	Kota Pontianak	5,22	5,55	5,31	5	4,88	4,7	4,58	4,46
15	Kota Singkawang	5,76	5,33	5,42	5,12	4,91	4,53	4,83	4,67

Sumber : BPS, 2023

Mencermati kondisi kemiskinan yang telah diuraikan di atas, maka perlu diambil kebijakan pengentasan kemiskinan baik yang berskala makro maupun yang berskala mikro. RPJMN 2020-2024 mengarahkan Kerangka kebijakan makro dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sementara kebijakan mikro dalam pengentasan kemiskinan diarahkan kepada 2 (dua) strategi yaitu 1) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif; 2) menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah berbagai strategi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 6 memperoleh hasil bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat, yang bermakna bahwa jika rasio ketergantungan semakin tinggi maka mengindikasikan bahwa

kemiskinan akan semakin meningkat. Rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Persentase bekerja terhadap angkatan kerja sangat besar yaitu lebih dari 90 %, yang bekerja. Bonus demografi mempunyai arti bahwa jumlah penduduk usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Penduduk usia produktif terdiri dari Angkatan dan bukan Angkatan kerja. Angkatan kerja ini ada yang bekerja dan ada yang sedang mencari kerja (menganggur). Lebih dari 90 % Angkatan kerja berstatus bekerja (Tabel 11), dengan demikian kemampuan untuk menanggung penduduk usia non produktif relatif cukup besar, dan pada akhirnya diharapkan bahwa akan mengurangi kondisi kemiskinan.

Tabel 11 Indikator Perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2015 dan Tahun 2022

Indikator	Tahun	
	2015	2022
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	1.025.942	1.212.350
Angkatan Kerja (Jiwa)	2.357.224	2.695.203
Bekerja (Jiwa)	2.235.887	2.557.523
Pengangguran (Jiwa)	121.337	137.68
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)	94,85	94,89
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	69,68	68,97
Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	5,15	5,11
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	5,07
Pengeluaran Per kapita (ribu rupiah/ tahun)	8.279.34	9.355.00
UMP (Rupiah/bulan)	1.560.000	2.434.328.19
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	323.615	520.660

Sumber : www.kalbar.bps.go.id

2. Upah minimum yang semakin meningkat bahkan jauh di atas garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita. Upah minimum mengalami kenaikan yang relatif cukup besar selama 8 tahun terakhir yaitu dari Rp 1.560.000 per bulan di tahun 2015 menjadi Rp 2.434.328,19 per bulan pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 56,05 %, Meningkatnya upah minimum juga diikuti dengan meningkatnya pengeluaran perkapita. Di sisi lain garis kemiskinan juga meningkat pada periode yang sama (Tabel 4.10), kondisi ini menyiratkan bahwa bahwa daya beli pekerja semakin meningkat atau dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya semakin baik. Namun demikian hal ini harus di cermati dengan seksama khususnya yang berkaitan dengan kondisi makro perekonomian terutama inflasi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyiratkan bahwa Pembangunan ekonomi berjalan semakin baik. Produksi barang dan jasa meningkat karena permintaan yang semakin meningkat yang diakibatkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan produksi akan diikuti dengan terciptanya kesempatan kerja yang berarti meningkatnya permintaan akan tenaga kerja. Tabel 4.10 memperlihatkan data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan tahun 2022, serta data angkatan kerja yang bekerja pada kurun waktu yang sama. Data ini secara jelas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pada jumlah penduduk yang bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Artinya, jika rasio ketergantungan meningkat, maka hal ini mengindikasikan peningkatan kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa rasio ketergantungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan di wilayah ini. Pertama, persentase penduduk yang bekerja dalam angkatan kerja sangat besar, mencapai lebih dari 90%. Fenomena ini mencerminkan adanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang relatif besar untuk menanggung penduduk usia non-produktif, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, upah minimum yang terus meningkat dan bahkan melampaui garis kemiskinan menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini harus diawasi secara cermat, terutama dalam konteks faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi.

Terakhir, pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berjalan lebih baik. Peningkatan produksi ekonomi akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ini mengindikasikan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang akhirnya akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi dasar penting untuk perencanaan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks pembangunan kependudukan, peran penduduk menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian serius. Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, penting untuk mengoptimalkan peran penduduk baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini mempertimbangkan bahwa penduduk adalah agen pembangunan yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan suatu negara. Maka dari itu, perlu ditekankan bahwa peran aktif penduduk dalam pembangunan sangat penting. Selain itu, perlunya penyediaan lapangan kerja menjadi hal yang mendesak. Terutama, ketika persentase penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, dibutuhkan upaya serius baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan peluang kerja. Ini bertujuan agar penduduk usia produktif dapat menanggung beban penduduk yang tidak produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketersediaan lembaga pendidikan formal dan non-formal yang mudah diakses oleh masyarakat juga merupakan faktor penting. Dalam konteks ini, pendidikan adalah kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan dalam memfasilitasi dan mendukung penyediaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan cara ini, pendidikan yang berkualitas dapat diberikan kepada calon tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan peningkatan kesejahteraan penduduk..

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, edisi kelima. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Badan Pusat Statistik. (2023), *Data Kemiskinan*, www.kalbar.bps.go.id
- (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Becker, G. S. (2009). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago press.

- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. P. (2001). Economic growth and the demographic transition.
- Chen, J., Si, Y., Li, F., & Zhao, A. (2014, January). An analysis of relationship among income inequality, poverty, and income mobility, based on distribution functions. In *Abstract and Applied Analysis* (Vol. 2014). Hindawi.
- Fang, Z., Zhu, J., & Deng, R. (2013). Estimating gini coefficient based on Hurun report and poverty line.
- Fauziana, H., Wardhana, A. K., & Rusgianto, S. (2022). The effect of education, income, unemployment, and poverty toward the gini ratio in member of OIC countries. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(2), 181-191.
- Ginting, T. A. B., Sudibia, I. K., Dewi, N. P. M., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). The effect of education and dependency ratio on economic growth and poverty in Papua. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(6), 186-195.
- Gujarati, D, N, (2019), Basic Econometrics, McGraw-Hill Education
- Kementerian PPN/Bappenas,2023, Sekilas SDGs, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 109-117.
- Sekretariat Kabinet RI. (2020), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Jakarta : Sekretariat Kabinet RI
- Sen, A. (1999). India: Economic development and social opportunity. *OUP Catalogue*.
- Sen, A. (1995). *Inequality reexamined*. Harvard University Press.
- Sinnathurai, V, (2013), An empirical study on the nexus of poverty, GDP growth, dependency ratio and employment in developing countries, *Journal of competitiveness*
- Todaro, P.M & Smith,S.C.(2006). *Pembangunan Ekonomi* . Jakarta : Penerbit Erlangga

PENGARUH KUALITAS PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP KEMISKINAN PEREMPUAN DI KALIMANTAN BARAT

Yarlina Yacoub^{1*}, Ana Fitriana^{2*}

^{1), 2*)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia*

Pratika Linanda^{3*}, Atin Sumaryanti^{4*}

^{3), 4*)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas OSO, Pontianak, Indonesia*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh usia harapan hidup perempuan, harapan lama sekolah perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan pemberdayaan perempuan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini adalah data panel, dari tahun 2010 sampai tahun 2022), pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dan sumber data BPS. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan program Eviews 12. Temuan dalam penelitian ini, variabel usia harapan hidup perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan, harapan lama sekolah perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan, rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan dan indeks pemberdayaan perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan. Hal ini menandakan bahwa semakin luasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas memberi pengaruh kepada meningkatnya kesejahteraan perempuan dan menurunkan kemiskinan perempuan. Sementara karena masih rendahnya partisipasi perempuan diruang publik sehingga masih belum bisa mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan dan akibatnya masih banyak perempuan yang menderita kemiskinan.

JEL: J16, J22, O17

Keyword : women's education, women's health, gender empowerment, women's poverty.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, karena terkadang merupakan suatu lingkaran yang tak berujung, sehingga perlu kebijakan dan cara yang sangat komprehensif untuk mengendalikan dan mengatasinya. Teori Nurkse yang terkenal dengan lingkaran kemiskinan menggambarkan sulitnya keluar dari jerat kemiskinan. Kemiskinan salah satunya bermula dari keterbelakangan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia sebagai akibat dari rendahnya pendidikan dan kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan memunculkan kemiskinan dan kemiskinan mengakibatkan rendahnya akses pada pendidikan dan kesehatan sehingga memunculkan keterbelakangan, dan seterusnya begitu.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa kemiskinan lebih banyak dirasakan oleh kelompok perempuan. Ini merupakan indikasi adanya ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yang merupakan gambaran dari ketidakadilan gender dan perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Kondisi di Indonesia, tahun 2022 sebanyak 9,68 persen perempuan hidup di

bawah garis kemiskinan, sementara laki-laki 9,40 persen. Menelisik data pengeluaran perkapita sebagai indikator dari kesejahteraan, tahun 2021 jumlah pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 15,77 juta, lebih tinggi dari pengeluaran per kapita perempuan hanya sebesar Rp 9,05 juta. Data ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan gender.

Pembahasan tentang gender sangat didominasi tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan (Raditya, 2021). Ini berakibat bahwa hasil pembangunan tidak dirasakan secara maksimal oleh banyak perempuan. Sehingga kenyataan yang dirasakan bahwa kesejahteraan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini didukung oleh data, dimana sumbangan pendapatan perkapita perempuan terhadap total pendapatan perkapita Indonesia. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sumbangannya pendapatan perkapita perempuan hanya sebesar 37,22% (tahun 2021) dan 37,17% (tahun 2022). Effendi dalam Santoso (2004), kaitannya dengan pembangunan dan kesetaraan gender, ada tiga perspektif dalam melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif mutu modal manusia (*human capital*), perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender.

Secara umum ketidaksetaraan gender dari aspek mutu modal manusia tergambar dari beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses pendidikan, akses kesehatan, diskriminasi dalam norma sosial, partisipasi angkatan kerja, pendapatan, daya tawar suara atau pendapat baik dalam keluarga maupun diruang publik, dan banyak hal lainnya lagi. Hal ini dipertegas Wodon dan De La Briere (2018), bahwa di banyak negara, pencapaian pendidikan, lapangan kerja, partisipasi diruang publik, rata-rata anak perempuan tetap lebih rendah daripada anak laki-laki. Selanjutnya menurut Sabilla (2023), perempuan lebih rentan dari laki-laki, kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan, yang memberikan sumbangan pada kemiskinan perempuan, sulitnya akses kesehatan perempuan dan ini lihat dari indikator kesehatan perempuan yang lebih rendah, sehingga perempuan lebih rentan kepada kemiskinan.

Untuk ketimpangan gender, khususnya untuk melihat kualitas perempuan, peran perempuan dan kesejahteraan perempuan salah satunya menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Tahun 2021 Indonesia pada peringkat 110 IKG dunia dengan nilai IKG 0,390. IKG Kalimantan Barat sebesar 0,483 dan diatas IKG nasional, serta menempatkan Kalimantan Barat pada kelompok 5 (lima) besar dengan IKG diatas nasional (BPS, 2022). Artinya bahwa ketimpangan gender di Kalimantan Barat cukup tinggi dan diatas ketimpangan gender nasional. Memperkuat data IKG, terutama Kalimantan Barat, membandingkan juga dengan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), bahwa IPG sebesar 87,61 dan IDG sebesar 73,18 artinya bahwa nilai untuk keduanya ini masih jauh dari kesetaraan gender yaitu dengan angka yang mendekati 100. Semua data yang ditampilkan menunjukkan posisi kualitas dan kesejahteraan perempuan dalam pembangunan masih jauh dibawah laki-laki.

Pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan. Perbedaan dari pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki dapat digunakan sebagai pembandingan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki aatau kesejahteraan gender dan dapat digunakan sebagai proxy dari kemiskinan gender. Semakin tinggi angka rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki-laki, maka kemiskinan perempuan semakin menurun dan sebaliknya. Sementara ukuran kesetaraan gender terutama perempuan yang berhubungan dengan kualitas SDM adalah dimensi pendidikan perempuan dan dimensi kesehatan perempuan serta peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan dinilai dari indikator pendidikan perempuan dan indikator kesehatan perempuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah (HLS) perempuan, rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan dan usia harapan hidup (UHH)

perempuan, sementara peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dipaparkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Harapan Lama Sekolah Perempuan. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, Usia Harapan Hidup Perempuan, Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (PPP) Laki-laki dan Perempuan di Kalimantan Barat Tahun 2010-2022

Tahun	HLS Pr (Tahun)	RLS Pr (Tahun)	UHH Pr (Tahun)	IDG (Tahun)	PPP Lk (ribu Rp)	PPP Pr (ribu Rp)
2010	10,70	5,61	67,11	55.26	11.478	5.119
2012	11,05	5,97	71,47	59.34	12.036	5.276
2014	11,62	6,29	71,75	64.10	12.341	5.653
2016	12,30	6,44	71,89	64.37	12.474	5.726
2018	12,69	6,62	72,16	64.47	13.240	6.118
2020	12,89	6,84	72,67	68.07	13.314	6.134
2022	12,99	7,18	73,00	73.18	13.950	6.417

Sumber : BPS Indonesia

Dari tahun 2010 – 2022 (Tabel 1.1) di Kalimantan Barat, untuk dimensi kualitas SDM perempuan dan pemberdayaan perempuan serta pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Dari dimensi kualitas SDM perempuan, baik itu indikator pendidikan perempuan maupun indikator kesehatan perempuan mengalami peningkatan kualitas, dimana angka HLS, RLS dan UHP meningkat tiap tahun. HLS perempuan tahun 2010 = 10,70 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 12,99 tahun. RLS perempuan tahun 2010 = 5,61 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 7,18 tahun. UHP perempuan tahun 2010 = 67,11 tahun meningkat menjadi 73,00 ditahun 2022. Sementara IDG juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2010 IDG Kalimantan Barat sebesar 55,26 dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu menjadi 73,18.

Walaupun dari segi kualitas perempuan dan partisipasi atau pemberdayaan perempuan diruang publik meningkat, jika dihubungkan dengan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan di Kalimantan Barat sangat jauh berbeda. Pengeluaran perkapita laki-laki tahun 2010 sebesar Rp 11,48 juta sementara perempuan hanya sebesar Rp 5,12 juta. Kemudian untuk tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi tetap dengan proporsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 13,95 juta dan perempuan sebesar Rp 6,42 juta. Yang artinya bahwa kesejahteraan perempuan di Kalimantan Barat masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan peningkatan pengeluaran perkapita perempuan lebih kecil dari peningkatan pengeluaran perkapita laki-laki.

Adanya fenomena yang saling mendukung antara penelitian yang sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang menelaah hubungan antara kualitas SDM dan partisipasi perempuan dengan pendapatan atau kemiskinan yang diproxy dari pendapatan perkapita seperti penelitian Putrizahrah (2019); Syamsiyah (2015); Tran, Pham dan Nguyen (2021), dan dihubungkan dengan kondisi di Kalimantan Barat sebagai dugaan sementara, maka tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk wilayah Kalimantan Barat. Maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji, apakah yang terjadi dengan kualitas SDM perempuan yang dilihat dari pendidikan perempuan dan kesehatan perempuan dan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat dan bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan perempuan atau kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan dan Kemiskinan Perempuan

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) dalam Todaro (2011) menyatakan bahwa “kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*)”. Dihubungkan dengan kapasitas dan kapabilitas perempuan, penting dilakukan, memastikan adanya lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ada norma dan inklusivitas yang mendukung perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih sebagai strategi keluar dari kemiskinan (Widiastuty, 2021). Word Bank (2003) dalam Indraswari (2009), mengidentifikasi 4 (empat) dimensi kemiskinan perempuan yaitu *women’s lack of empowerment, opportunity, capacity, security*.

Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu: kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang dan kualitasnya rendah menjadi penyebab kemiskinan yang bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circles of poverty*). Lingkaran kemiskinan terutama yang terjadi pada kemiskinan perempuan, menurut Widiastuty (2019), perlu *Copping strategy* jitu apa agar perempuan mampu bertahan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian (Samboel (2012) dalam Widiastuty (2019)) menyebutkan bahwa hambatan sosial dan budaya merupakan faktor utama yang memengaruhi perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam kondisi pandemi saat ini, kiranya hambatan struktural, modal manusia dan institusional juga menjadi penting untuk ditangani.

Kemiskinan perempuan dalam konsep gender dimana pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang perempuan secara rata-rata lebih rendah dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang laki-laki. Semakin jauh perbandingan antara rata-rata pengeluaran perempuan dengan rata-rata pengeluaran laki-laki, maka yang menderita kemiskinan adalah perempuan, demikian sebaliknya. Pembangunan gender dan pemberdayaan gender, harus mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seorang perempuan dan seorang laki-laki seimbang. Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dapat tergambarkan dari pengeluaran perkapita. BPS (2023) mengemukakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* atau PPP).

Menurut Todaro (2011), kemiskinan lebih rentan terjadi pada perempuan. Perempuan memiliki keterbatasan terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, kesejahteraan sosial dan program kesempatan kerja, sehingga terciptalah lingkaran kemiskinan di dalamnya yang menciptakan kemiskinan kembali terutama diderita oleh kaum perempuan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Aripurnami, dkk (2006) yang menghubungkannya dengan kemiskinan perempuan bahwa dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan.

Konsep Gender dari Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Perempuan

Merujuk BPS (2023) tentang Konsep Gender dimulai dengan istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan. Keadilan

gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

BPS menggunakan dua pendekatan umum untuk mengukur kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender, dengan pendekatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Sedangkan indikator IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender pada partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Menurut Widiastuty (2019), peningkatan kualitas hidup perempuan ditujukan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk perempuan. Kualitas hidup yang baik memastikan kehidupan yang sehat dan berpendidikan akan mendukung kesejahteraan bagi seluruh penduduk pada semua usia dan tentunya meningkatkan kualitas ekonomi perempuan.

Kualitas hidup merupakan suatu representasi yang bersifat kompleks karena tidak hanya berupa ukuran yang dapat terlihat saja, tetapi juga termasuk yang tidak dapat diamati secara langsung (Galitsya (2017) dalam Widiastuty (2019)). Mehra (1997) dalam Widiastuty (2019) juga mengemukakan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan tercermin pada indikator kunci yang meliputi peningkatan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan partisipasi sekolah perempuan. Selanjutnya Bappenas (2023), kualitas hidup perempuan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan kesetaraan gender. Chioda dkk. (2011) dalam Widiastuty (2019) menyatakan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan peluang pekerjaan bagi perempuan, serta pengembangan ke dunia luar.

Selanjutnya, berdasarkan dimensi kesetaraan gender di Indonesia, indikator yang signifikan terhadap kualitas hidup perempuan meliputi rasio angka harapan lama sekolah perempuan dibanding laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan dibanding laki-laki, rasio jumlah pekerja dibayar perempuan dibanding laki-laki, rasio upah buruh/karyawan/pegawai perempuan dibanding laki-laki, persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis, angka harapan hidup perempuan (BPS, 2022). Berbagai dimensi kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat erat kaitannya dengan hidup Perempuan (Indraswari, 2009). Sedangkan kualitas hidup perempuan erat kaitannya dengan akses perempuan terhadap ekonomi perempuan.

Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi perempuan dan Kemiskinan Perempuan

Berhubungan dengan kesetaraan gender dan kemiskinan terutama kemiskinan perempuan, Pemerintah Indonesia sudah mempromosikan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di bawah koordinasi Bappenas. Tetapi apakah komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian target-target pengurangan angka kemiskinan, sudah diikuti dengan arah dan perumusan strategi strategi pencapaian target tersebut sudah responsif gender. Artinya pelibatan perempuan untuk semua kebijakan penurunan kemiskinan diikuti oleh peningkatan kesamaan status perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan. Sehingga peran perempuan yang meningkat mengharuskan juga kesejahteraan perempuan meningkat dan perempuan tidak lagi sebagai kelompok yang paling merasakan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan tidak hanya berkenaan dengan masalah ketimpangan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan pengetahuan & ketrampilan, serta kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (Baiduri dan Fisabillah, 2022). Menurut Karl Marx, kebodohan dan kemiskinan saling beriringan, dan Amartya Sen, mengemukakan bahwa

elemen dasar modal manusia adalah dunia pendidikan yang mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan yang baik bagi setiap perempuan menjadi bekal ketrampilan dan pengetahuannya, lebih berpeluang untuk bekerja, dan menjadi produktif dengan begitu akan meningkatkan pendapatan. Semakin banyak perempuan yang mendapatkan Pendidikan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, disebabkan karena perempuan berpendidikan mendapatkan pekerjaan bagus dan menaikkan kesejahteraan keluarga (Baiduri dan Fisabillah, 2022).

Menurut Noerdin, dkk (2006), berdasarkan banyak pengamatan bahwa pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan dan perempuan dibandingkan dengan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, strategi nasional dan lokal yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Masih menurut Noerdin, dkk (2006), apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Kemiskinan pada perempuan terjadi salah satunya karena pendapatan yang diterima perempuan lebih rendah, sebagai akibat dari anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Marshall berusaha menempatkan perempuan dalam pekerjaan dan hubungannya dengan isu gender. Neoklasikisme percaya bahwa produktivitas sangat menentukan output proses produksi pekerja yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pekerja. Dalam hal ini, Neoklasik menekankan perbedaan produktivitas antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Dimana laki-laki cenderung memiliki modal manusia yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. (Ariani & Sari, 2022).

Morrison et al. (2007) dan Kabeer (2016) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Dengan lebih berpartisipasi perempuan dalam tenaga kerja, mengakibatkan penghasilan akan meningkat; dengan demikian sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga meningkat dan berakibat pada peningkatan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Kajian Empiris

Magda I, Torzewska EC, Palczyńska M (2023), penelitian di Polandia, dengan menggunakan data “*Generation and Gender Survey*” menguji hubungan antara kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga dan pembagian pekerjaan rumah tangga antara pasangannya. Penemuan penelitian adanya hubungan negative antara keterlibatan perempuan dalam rumah tangga dengan sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga.

Nisak dan Sugiharti (2020), penelitian kemiskinan perempuan di Indonesia, bahwa variabel kesehatan, tingkat pendidikan terakhir wanita, partisipasi kerja wanita, dan status kerja perempuan terbukti signifikan secara statistik dalam mempengaruhi kemiskinan individu perempuan baik sebagian atau seluruhnya.

Walid dan Pratama (2020), Kajian ini akan fokus pada pengembangan penelitian dalam analisis deskriptif dan inferensial gender pemerataan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil diperoleh bahwa program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah masih mengandung pengaruh perbedaan gender. Kesenjangan gender yang dimaksud terdapat pada variabel IPG, IDG, IPM, TKWP (perempuan sebagai profesional) dan SPP (pendapatan pekerja perempuan) yang pengaruh dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir.

Putrizahrah (2019), penelitian pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan data tahun 2012-2017, yang hasilnya adalah variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan dan variabel jumlah wanita yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Fahmi (2016), penelitian di Provinsi Jambi menggunakan data tahun 2004-2014 bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. METODA PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooled data*), yaitu kombinasi antara data *time series* 12 tahun (2010-2022) dan data *cross section* 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, kecuali tahun 2016 (karena tidak tersedia data), dengan sumber data Badan Pusat Statistik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang berupa Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki hubungan yang sangat terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu kemiskinan perempuan.

UHH Perempuan, HLS Perempuan dan RLS Perempuan mewakili indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah kualitas SDM perempuan, merupakan indikator kesehatan perempuan dan pendidikan perempuan yang angkanya adalah rasio dengan menggunakan konsep BPS (2023).

IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG dapat diinterpretasikan sebagai berikut : (1) Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil perbedaan partisipasi antara perempuan dengan laki-laki. (2) $IDG < 100$, partisipasi perempuan < partisipasi laki-laki. (3) $IDG = 100$, partisipasi perempuan sama dengan laki-laki. (4) $IDG > 100$, partisipasi perempuan > partisipasi laki-laki., menggunakan konsep BPS (2023).

Indikator dari kemiskinan perempuan atau rasio gender PPP adalah rasio pengeluaran perkapita perempuan dengan pengeluaran perkapita laki-laki. Pengeluaran perkapita disini menggunakan konsep BPS (2023), yaitu pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity atau PPP) atau rasio gender PPP. Interpretasi rasio gender PPP sebagai berikut : (1) Nilai rasio < 100, maka perempuan lebih miskin dari laki-laki. Semakin menjauhi angka 100 (lebih kecil dari 100), maka semakin parah kemiskinan perempuan. (2) Nilai rasio > 100, maka laki-laki lebih miskin dari perempuan. Semakin menjauhi angka 100 (lebih besar dari 100), maka kesejahteraan perempuan meningkat. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin rendah kemiskinan perempuan, demikian sebaliknya yaitu semakin rendah rasio ini maka semakin tinggi kemiskinan perempuan.

Dalam penelitian ini dilakukan uji pemilihan model dengan hasil nilai probabilitas pada uji Chow, Uji Hausman, selanjutnya Uji Lagrange Multiplier. Kemudian analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program Eviews 12 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Adapun bentuk regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 UHH Pr_{it} + \beta_2 HLS Pr_{it} + \beta_3 RLS Pr_{it} + \beta_4 IDG_{it} + e_{it}$$

Dimana :

Y = Rasio gender PPP (Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan terhadap Pengeluaran Perkapita Laki-Laki), α = Konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi, $UHH Pr$ = Usia Harapan Hidup Perempuan, $HLS Pr$ = Harapan Lama Sekolah Perempuan, $RLS Pr$ = Rata-Rata lama Sekolah Perempuan, IDG = Indeks Pemberdayaan Gender, i = jumlah sampel, t = periode waktu, e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari uji model diperoleh bahwa *Random Effect Model* direkomendasikan dalam penelitian ini. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan kualitas perempuan yang diwakili oleh usia harapan hidup perempuan (UHH Pr), harapan lama sekolah perempuan (HLS Pr), rata-rata lama sekolah perempuan (RLS Pr) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh signifikan terhadap rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki-laki atau kemiskinan perempuan, dengan tingkat signifikansinya sebesar 49,47%. Berarti apabila kesetaraan gender semakin meningkat yang artinya kualitas sumber daya perempuan dan pemberdayaan perempuan meningkat, maka akan memberi pengaruh pada peningkatan nilai rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki. Berarti jika kualitas perempuan dan pemberdayaan perempuan semakin meningkat akan memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga kemiskinan perempuan turun.

Tabel 4.1. Hasil Uji Regresi Berganda dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.54174	8.922371	-1.853963	0.0656
UHH_X1_	0.443015	0.136998	3.233743	0.0015
HLS_X2_	1.187955	0.644362	1.843614	0.0671
RLS_X3_	2.769636	0.874721	3.166308	0.0018
IDG_X4_	-0.037402	0.053131	-0.703960	0.4825
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			7.651655	0.8687
Idiosyncratic random			2.975088	0.1313
Weighted Statistics				
R-squared	0.506858	Mean dependent var	5.094040	
Adjusted R-squared	0.494756	S.D. dependent var	4.285730	
S.E. of regression	3.012577	Sum squared resid	1479.326	
F-statistic	41.88339	Durbin-Watson stat	0.549818	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.390511	Mean dependent var	45.05292	
Sum squared resid	13262.61	Durbin-Watson stat	0.061327	

Sumber : Hasil olah data Eviews 12 (2023)

Pengaruh Usia Harapan Hidup Perempuan (UHH Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik UHH Pr sebesar 3,233743 dengan probabilitas sebesar 0,0015 hal ini menunjukkan bahwa UHH Pr berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Nilai koefisien UHH Pr sebesar 0,443015 yang artinya jika UHH Pr meningkat 1 persen maka rasio gender PPP akan meningkat sebesar 0,443015 persen. Ini menunjukkan bahwa jika UHH Perempuan meningkat akan meningkatkan nilai pengeluaran perkapita perempuan yang semakin mendekati nilai pengeluaran perkapita laki-laki, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Dan dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan perempuan yang semakin tinggi di Kalimantan Barat dapat menurunkan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Pembangunan kesehatan perempuan yang terbentuk dari meningkatnya akses perempuan terhadap kesehatan di Kalimantan Barat berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan, yang tentunya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Indraswari (2009), Putri (2019), Nisak & Sugiarti (2020) dan Lesetedi (2018) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan pada kesehatan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa ada keterkaitan yang erat antara pembangunan gender bidang kesehatan dalam upaya membentuk kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Sehingga akan

menjadi temuan penting bahwa jika ingin menghilangkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan sumber daya perempuan baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dan upaya peningkatan sumber daya perempuan yang dilakukan pemerintah selama ini adalah terutama adanya upaya peningkatan akses perempuan terhadap kesehatan. Hal ini tergambar dari capaian indikator kesehatan yang salah satunya sebagai pembentuk IPG, seperti usia harapan hidup perempuan, harapan lama sekolah perempuan dan rata-rata lama sekolah perempuan. Dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, terjadi peningkatan indikator sumber daya perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Usia harapan hidup perempuan meningkat dari 67,11 tahun menjadi 73,00 tahun.

Pengaruh Harapan Lama Sekolah Perempuan (HLS Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik HLS Pr sebesar 1,843614 dengan probabilitas sebesar 0,0671 hal ini menunjukkan bahwa HLS Pr berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Tidak signifikan Harapan Lama Sekolah Perempuan terhadap kesejahteraan perempuan dan kemiskinan perempuan ini dikarenakan walaupun HLS perempuan meningkat dimasa akan datang, takan tetapi kesempatan dan akses perempuan pada aktifitas ekonomi dan sosial sekarang ini masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Perlu untuk meningkatkan harapan lama sekolah perempuan dimasa sekarang ini dan seterusnya, karena kedepannya diperlukan perempuan yang berkualitas sehingga suatu saat nanti terjadi kesetaraan gender untuk bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang berkualitas, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa akan datang, sehingga kesejahteraan meningkat dan tidak ada perbedaan lagi antara kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan Nisak & Sugiarti (2020) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan untuk kesehatan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa tidak signifikannya harapan lama sekolah perempuan dan kesejahteraan atau kemiskinan perempuan, tergambar dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2020 dan tahun 2022, terjadi peningkatan HLS perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dan lebih tinggi dari laki-laki. Tahun 2020 HLS perempuan 12,63 lebih tinggi dari laki-laki 12,57 dan tahun 2022 HLS perempuan 12,99 lebih tinggi dari laki-laki 12,69. Sementara tahun 2020 PPP Pr hanya sebesar Rp 6.134.000 dan PPP laki-laki Rp 13.313.000 dan tahun 2022 PPP perempuan 6.417.000 dan laki-laki Rp 13.950.000.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik RLS Pr sebesar 3,166308 dengan probabilitas sebesar 0,0018 hal ini menunjukkan bahwa RLS Pr berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Nilai koefisien RLS Pr sebesar 2,769636 yang artinya jika RLS Pr meningkat 1 persen maka rasio gender PPP akan meningkat sebesar 2,769636 persen. Ini menunjukkan bahwa jika RLS Perempuan meningkat akan meningkatkan nilai pengeluaran perkapita perempuan yang semakin mendekati nilai pengeluaran perkapita laki-laki, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Dan dapat disimpulkan bahwa derajat pendidikan perempuan yang semakin tinggi di Kalimantan Barat dapat menurunkan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Pembangunan kesehatan perempuan yang terbentuk dari meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan di Kalimantan Barat berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan, yang tentunya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Temuan dalam penelitian ini

sejalan dengan temuan Indraswari (2009), Nisak & Sugiarti (2020) dan Lesetedi (2018) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan pada pendidikan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa ada keterkaitan yang erat antara pembangunan gender bidang pendidikan dalam upaya membentuk kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Sehingga akan menjadi temuan penting bahwa jika ingin menghilangkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan sumber daya perempuan baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dan upaya peningkatan sumber daya perempuan yang dilakukan pemerintah selama ini adalah terutama adanya upaya peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan. Hal ini tergambar dari capaian indikator pendidikan yang salah satunya sebagai pembentuk IPG, seperti rata-rata lama sekolah perempuan. Dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, terjadi peningkatan indikator sumber daya perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dimana rata-rata lama sekolah dari 5,61 menjadi 7,18 tahun.

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar $-0,776421$ dengan probabilitas sebesar $0,4387$ yang menunjukkan bahwa IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan. IDG tidak memberi pengaruh pada rasio gender pengeluaran perkapita. Hal ini bisa terjadi karena pemberdayaan gender yang terbentuk dari partisipasi/peran perempuan diparlemen dan perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Barat masih sangat rendah, Dengan kecilnya peran atau kontribusi perempuan diruang publik secara umum yang berakibat pada kontribusi pada kesejahteraan perempuan rendah. Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Walid dan Pratama (2020), dan Prettner dan Strulik (2014), dimana perempuan sebagai profesional dan program pemberdayaan perempuan berpengaruh dengan tingkat kemiskinan perempuan.

Hasil penelitian ini yang menggambarkan tidak signifikannya hubungan antara pemberdayaan gender (IDG) dengan rasio gender PPP atau dengan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat, dikarenakan variabel pembentuk IDG yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen dan masih rendah peran perempuan sebagai profesional, sehingga secara rata-rata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, kiprah perempuan diparlemen pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih sangat rendah. Parlemen di Kalimantan Barat masih didominasi oleh laki-laki. Tahun 2010 hanya 10,77 persen perempuan di Parlemen dan tahun 2022 hanya 18,46%, sementara adalah laki-laki. Tidak ada satu kabupaten/kotapun partisipasi perempuan diparlemen yang mencapai 30% (sebagai dasar kepatutan calon legeslatif pada saat pemilu). Malah masih ada kabupaten/kota dengan jumlah perempuan di DPRD/DPR yaitu Kabupaten Mempawah (8,57%), Kabupaten Ketapang (8,89%), Kabupaten Kapuas Hulu (6,67%), Kabupaten Sekadau (3,33%). Malah Kabupaten Kayong Utara (0,00%) yang sebelumnya tahun 2015 sebesar 8,00%. Sementara perempuan sebagai profesional di Kalimantan Barat juga dengan persentase yang masih dibawah laki-laki. Tahun 2015 sebanyak 46,77% dan tahun 2022 sebanyak 45,26%, dan selama hampir 10 tahun tidak mengalami perubahan.

5. SIMPULAN

Kualitas perempuan dari indikator pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan secara bersama berpengaruh terhadap kemiskinan perempuan. Sementara secara parsial, kualitas kesehatan perempuan yang diwakili oleh usia harapan hidup perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Kualitas pendidikan perempuan yang diwakili

oleh harapan lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat dan pembangunan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Berdasarkan temuan ini maka direkomendasikan untuk melepaskan perempuan dari belenggu kemiskinan, modal awal yang paling harus diperhatikan adalah memperluas akses perempuan miskin terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan upaya peningkatan partisipasi perempuan diruang publik. Menghilangkan atau menurunkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan kesempatan perempuan untuk berkisah, terutama kesempatan yang sama dengan laki-laki di dunia politik, sosial dan ekonomi. Harus ada kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak untuk memberdayakan perempuan dalam semua bidang. Secara umum memperlihatkan bahwa perempuan kurang berdaya, kurang kesempatan dan kurang kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. N., & Sari, A. N. (2022). *Analysing the effect of gender inequality on labor productivity in West Java Province. International Journal Of Research In Business And Social Science*, 11(1), 130-137
- Aripurnami S, Noerdin E, Agustini E, Pakasi DT, Hodijah SN (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute. Jakarta, ISBN/ISSN 979-993-054-5. <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/>
- Badan Pusat Statistik. (2015-2021). *Konsep Gender*. <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/download>.
- Baidury, Almas dan Fisabilillah, Ladi.WP (2022). *Pengaruh Pendidikan Perempuan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Independent : *Journal Of Economics* E-ISSN:2798-5008. Page:102-109. Vol.2. No 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Bappenas (2023). *Sekilas tentang SDGs*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Fahmi, Ali (2016). *Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Development*. Hal 90-121. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2172163&val=21907>
- Indraswari (2009). *Perempuan dan Kemiskinan*. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 14, No.2 Sept 2009. <https://www.neliti.com/id/publications/545/perempuan-dan-kemiskinan>.
- Kabeer, N. (2016). *Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The Endless Variety and Monotonous Similarity of Patriarchal Constraints*. *Feminist Economics*. Volume 22 (1): 295-321.
- Magda I, Torzewska EC, Palczyńska M (2023), *What if She Earns More? Gender Norms, Income Inequality, and the Division of Housework*. *Journal of Family and Economic Issues*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10834-023-09893-0>. May 10, 2023.
- Morrison, A., Raju, D., Sinha, N. (2007). *Gender Equality, Poverty and Economic Growth*". *World Bank Policy Research Working Paper 4349*.
- Noerdin.E., Agustini.E, Pakasi,D.T, Aripurnami.S, Hodijah.S.N. (2006) *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute, ISBN: 979-99305-4-5
- Nisak.S.S dan Sugiharti.L (2020). *Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 11, Issue 9, 2020- hal 375-387. www.ijicc.net.
- Putrizahrah, Anisa (2019), *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita Yang Bekerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, file:///C:/Users/USER/Downloads/5813-11311-1-SM.pdf

- Sabilla.K. (2023), Kemiskinan tidak selalu netral gender, perempuan lebih menderita akan dampaknya. *The Conversation*. 7 Maret 2023. <https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637>.
- Syamsiyah, Dailatus (2015), Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals, *Palastren*, Vol.8,No.2,Des2015,halaman225-242. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/965/879>.
- Todaro, M.P.& Smith,S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tran,D.B; Pham,T.D.N; Nguyen,T.T (2021), *The influence of education on women's well-being: Evidence from Australia*, Research Article. *Plos One*, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247765#sec00>, March 24, 2021. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7990187/>
- Walid dan Pratama.B.R.(2020), *Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program*, *Economics Development Analysis Journal*9(4) (2020), ISSN 2252-6560, 482-297. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>,
- Widiastuty,I.S. (2019). Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup Di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol 14, no. 2. Desember 2019. p-ISSN : 1907-2902 (*Print*), e-ISSN : 2502-8537 (*Online*).
- Widiastuty,I.S. (2021). Perempuan, Kemiskinan, dan Pandemi. *Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat*. 14 Maret 2021. <https://kumparan.com/istilaras/perempuan-kemiskinan-dan-pandemi-1vLudUXp6zd/full>.

DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK: MEMAHAMI PENGARUH LAYANAN, SANKSI DAN SPRITUALITAS

Rachmad Robbi

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Pajak memainkan peran penting dalam mendukung fungsi dan pembangunan sektor-sektor oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini, pertama, untuk memahami dan menganalisis keterkaitan antara layanan petugas pajak, sanksi pajak, strategi partisipasi, dan peran spiritualitas dengan tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Sambas. Kedua, untuk Memahami elemen-elemen yang berperan dalam memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Ketiga, untuk Mengetahui dampak layanan yang disediakan oleh petugas pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Keempat, untuk mengeksplorasi dan mengkaji dampak dari layanan petugas pajak, sanksi pajak, strategi partisipasi, dan peran spiritualitas pada kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sambas, kelima, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan populasi sampling yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang rutin membayar pajak di Kabupaten Sambas, dengan menggunakan metode analisis Uji model SEM, Interpretasi hasil uji model SEM, dan Evaluasi model SEM. Hasil penelitian ini Hubungan Pelayanan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Variabel Layanan Petugas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Strategi Pemerintah memiliki pengaruh positif yang sangat kecil terhadap Kepatuhan Dari hasil penelitian Variabel Peran Agama memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Kesimpulan strategi partisipasi pemerintah melalui sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan. Agama, dengan nilai moral dan sosialnya, juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya mungkin lebih kecil.

JEL: H26, D91, Z12, H71

Kata kunci : kepatuhan , pelayanan dan sanksi pajak, Spritualitas.

1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam mendukung fungsi dan pembangunan sektor-sektor oleh pemerintah. Kepatuhan pembayar pajak dalam membayar pajak sangat krusial untuk memastikan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional tersedia. Namun, ada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, termasuk tingkat kepatuhan yang rendah, pelanggaran hukum, dan penghindaran pajak. Hal ini menuntut pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan strategi efektif untuk mengatasinya. Di Kabupaten Sambas, ada fluktuasi yang mencolok dalam realisasi pajak dari tahun ke tahun. Meskipun ada kenaikan dalam beberapa tahun, namun pada tahun-tahun lainnya cenderung menurun. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membiayai program dan layanan publik yang berkualitas, menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Data dari Kabupaten Sambas pada tahun 2018-2022 menunjukkan hubungan antara kepatuhan pajak dan layanan yang disediakan oleh petugas pajak. Layanan berkualitas dari petugas pajak dapat

meningkatkan kepatuhan pajak, stabilisasi pendapatan pemerintah, dan mendukung layanan publik berkualitas. Upaya peningkatan meliputi informasi yang jelas, proses pembayaran pajak yang efisien, dukungan dalam masalah pajak, layanan berbasis teknologi, dan konsultasi serta pelatihan. Sementara itu, peran sanksi pajak dalam mengatur tingkat kepatuhan wajib pajak tidak bisa diabaikan. Sanksi pajak yang dirancang secara adil dan diterapkan secara merata dapat mendorong pembayar pajak untuk mematuhi peraturan pajak.

Tabel 1 Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 S/D 2022

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH OBJEK PAJAK DAERAH				
		S/D TAHUN 2018	S/D TAHUN 2019	S/D TAHUN 2020	S/D TAHUN 2021	S/D TAHUN 2022
1.	Pajak Hotel	43	45	45	49	53
2.	Pajak Restoran	1549	1685	1772	1893	1995
3.	Pajak Hiburan	160	179	184	188	200
4.	Pajak Parkir	30	32	36	40	43
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	375	377	377	380	390
6.	Pajak Reklame	359	376	391	404	420
7.	Pajak Air Tanah	0	0	0	1	11
8.	Pajak Penerangan Jalan	1	1	1	1	1
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1589	1948	2129	2389	2158
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	165224	180207	182,090	181536	185010
	JUMLAH	169,330	184,850	187,025	186,881	190,281

Sumber: Aplikasi Pajak Daerah dan Aplikasi SIMPATDA

Karenanya, peningkatan dalam kebijakan sanksi pajak perlu dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus mendukung kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dalam hal ini, peran agama dalam kepatuhan pajak dikaji secara mendalam. Menyoroti agama Islam, pembayaran pajak dianggap sebagai bentuk ibadah dan ketaatan, dengan zakat sebagai contoh kewajiban pajak dalam Islam. Sementara itu, dalam agama Kristen, konsep "memberi kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar" diinterpretasikan sebagai dukungan untuk kepatuhan pajak. Dalam agama Hindu, konsep dharma atau tugas suci juga memberikan pandangan serupa. Narasi ini menunjukkan bahwa agama dan keyakinan spiritual memiliki potensi yang signifikan dalam mempengaruhi sikap dan persepsi individu terhadap kewajiban pajak, serta memotivasi kepatuhan dalam membayar pajak.

Dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji kebenaran atau ketepatan doktrin agama tertentu, melainkan mengeksplorasi sejauh mana keyakinan agama dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Selanjutnya, dalam narasi ini tidak ada evaluasi terhadap layanan petugas pajak, sanksi pajak, atau strategi partisipasi dari perspektif agama, tetapi lebih pada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku pembayaran pajak. Penelitian ini memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana kombinasi faktor layanan, sanksi, strategi partisipasi, dan agama dapat berdampak pada kepatuhan pajak di Kabupaten Sambas, serta mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah ini.

2. Tujuan

Dengan hal ini kepercayaan dan praktik keagamaan bisa berdampak pada bagaimana seseorang memandang tugas membayar pajak, mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini menandakan bahwa unsur agama dan spiritualitas memegang peranan signifikan dalam mematuhi pajak, sehingga aspek ini harus diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian terdapat nya tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis keterkaitan antara layanan petugas pajak, sanksi pajak, strategi partisipasi, dan peran spiritualitas dengan tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Sambas.
2. Untuk Memahami elemen-elemen yang berperan dalam memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, termasuk kesadaran mengenai peraturan pajak, aksesibilitas informasi pajak, serta efektivitas layanan perpajakan.
3. Untuk Mengetahui dampak layanan yang disediakan oleh petugas pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, mencakup faktor-faktor seperti mutu layanan, kemudahan proses pembayaran pajak, dukungan yang diberikan, serta penggunaan teknologi dalam layanan pajak
4. Untuk mengeksplorasi dan mengkaji dampak dari layanan petugas pajak, sanksi pajak, strategi partisipasi, dan peran spiritualitas pada kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sambas.
5. Untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Sambas.

3. Manfaat

Dengan demikian adanya tujuan penelitian ini, bahwa penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti layanan pajak dan sanksi pajak, sehingga dapat melengkapi pengetahuan yang ada dan memperkaya teori kepatuhan pajak.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori pelayanan publik. Analisis tentang kualitas layanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak dapat membantu pengembangan teori pelayanan publik dan memberikan wawasan tentang bagaimana penyediaan layanan publik dapat membantu memperkuat kepatuhan pajak
3. Mengevaluasi pengaruh faktor kepatuhan beragama terhadap kepatuhan wajib pajak dapat membantu pemerintah merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori pengawasan dan pemeriksaan pajak.
5. Keempat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori manajemen keuangan publik. Hasil penelitian ini dapat

2. LITERATUR REVIEW

Spiritualitas berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Studi-studi telah menunjukkan bahwa keyakinan agama dan spiritualitas berdampak pada perilaku manusia, termasuk dalam hal membayar pajak. Keyakinan ini dapat mengubah sikap dan pandangan seseorang mengenai tanggung jawab pajak, serta mendorong mereka untuk lebih taat dalam pembayaran pajak. Dalam Islam, pembayaran pajak dianggap sebagai bagian dari ibadah dan penghormatan kepada Tuhan, dengan zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam yang merupakan bentuk kewajiban pajak. Dalam Kristen, konsep "memberikan kepada Kaisar apa yang merupakan hak Kaisar" sering diartikan

sebagai dukungan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, dalam Hindu, konsep dharma atau tugas suci juga mendukung ide kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Hubungan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:

Menurut Kirchgässner (2011), orang akan lebih patuh pada hukum jika mereka merasakan manfaatnya. Untuk urusan pajak, kepatuhan menjadi pilihan rasional bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengakuan hukum dan menghindari sanksi. Di sisi lain, Pertiwi & Rusydi (2013) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Pelayanan pajak yang efisien, termasuk proses yang mudah dan informasi yang jelas, dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak. Jadi, pelayanan berkualitas dari instansi pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan, dengan cara meningkatkan kepercayaan dan kepuasan, serta mengurangi hambatan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hubungan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis dari beberapa studi, hubungan antara sanksi dan tingkat kepatuhan pajak telah diteliti secara mendalam. Menurut Oktavia dan Suryani (2022), di KPP Pratama Pasar Rebo ditemukan bahwa aspek seperti Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian oleh Bahagia dkk. (2021) di KPP Pratama Lubuk Pakam menekankan pada Etika, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak, menunjukkan bahwa etika memainkan peran penting dalam kepatuhan, sedangkan sanksi pajak dan pengetahuan tidak. Di India, penelitian oleh Kushwah dkk. (2021) menemukan bahwa sanksi pajak dan pengajuan elektronik berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan pajak tidak.

Hubungan Strategi Partisipasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penelitian Nwokoye et al. (2022), terungkap bahwa insentif fiskal berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan di Nigeria serta kinerja perusahaan. Fan dan Liu (2020) meneliti efek kebijakan pajak Tiongkok 2014 terhadap investasi perusahaan dan menemukan bahwa kebijakan tersebut efektif khususnya bagi perusahaan besar dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Sementara itu, Andersson dan rekan (2021) menunjukkan bahwa ancaman penyerahan utang pajak dan eksekusi dapat meningkatkan pembayaran pajak.

Hubungan Spiritualitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Contoh dalam agama Kristen seperti ungkapan "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar" (dari Markus 12:17), menunjukkan bahwa ketakutan akan hukuman ilahi atau karma buruk dapat memotivasi orang untuk membayar pajak. Studi-studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara keagamaan dan kepatuhan pajak, tetapi hubungan ini berbeda-beda tergantung pada konteks budaya dan interpretasi keagamaan. Di beberapa daerah, ajaran agama mungkin mendukung pembayaran pajak, sementara di daerah lain mungkin tidak (Hidayat et al., 2022). Dalam konteks negara berkembang, kecintaan terhadap uang berperan besar dalam penggelapan pajak, sedangkan faktor keagamaan tidak. Gender tidak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (Budiarto et al., 2018). Dalam konteks Islam, meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku dalam membayar pajak, pandangan Islam tentang pajak sering diabaikan. Penelitian ini menyarankan agar lebih memperhatikan pandangan umat Islam terhadap pajak dalam studi-studi mendatang (Hassen Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 2015).

3. METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang rutin membayar pajak di Kabupaten Sambas. Dengan menggunakan teknik sampling Stratified Random Sampling yaitu dengan cara membagi wajib pajak ke dalam strata tertentu berdasarkan jenis pajak yang mereka bayar. Penarikan sampel dilakukan dari setiap strata secara acak dan menghasilkan Jumlah Sampel: 250 wajib pajak. Adapun jenis Strata yang digunakan adalah sebagai berikut:

Strata 1: Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

Strata 2: Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame

Strata 3: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan

Strata 4: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Strata 5: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

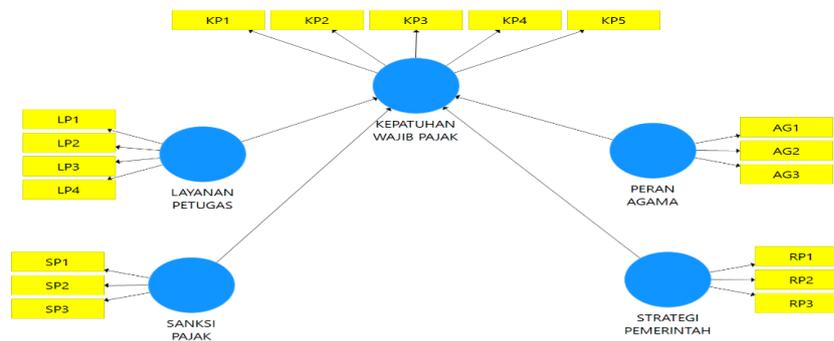
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode stratified random sampling, peneliti berupaya memastikan bahwa sampel yang diperoleh adalah representasi yang akurat dari populasi. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi persepsi wajib pajak terhadap kewajibannya, layanan yang mereka terima, sanksi yang diberlakukan, respons pemerintah, dan pengaruh agama. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel ini nantinya akan memberikan wawasan mendalam tentang apa yang memotivasi atau menghalangi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berikut penggunaan singkatan variabel laten dan observasi dalam model SEM SmartPLS berdasarkan hipotesis:

Tabel 2 Data Objek Pajak Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 S/D 2022

No.	Variabel Laten	Variabel Indikator (Observasi)	Simbol
1	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (KP)	Kesadaran Kewajiban	KP1
		Sikap Positif terhadap Pemerintah	KP2
		Kesadaran atas Manfaat yang Diperoleh	KP3
		Komitmen pada Nilai Sosial	KP4
		Kemudahan dalam membayar	KP5
2	Layanan yang diberikan oleh petugas pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (LP)	Kualitas layanan pajak	LP1
		Kemudahan Layanan	LP2
		Dukungan dan bantuan	LP3
		Layanan berbasis teknologi	LP4
3	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (SP)	Tingkat Kepahaman sanksi pajak	SP1
		Mendengar adanya penerapan sanksi pajak	SP2
		Berat tidaknya sanksi pajak	SP3
4	Strategi pemerintah dalam membangun rasa kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak (RP)	Edukasi dan kampanye	RP1
		Pemberian insentif	RP2
		Tindakan-tindakan lain (Seperti; Penghargaan) yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak	RP3
5	Faktor Spiritualitas dapat memengaruhi membayar pajak (AG)	Keyakinan agama	(AG1)
		Peran tokoh agama	(AG2)
		Sanksi agama	(AG3)

Kerangka Konseptual

Berikut adalah model SEM untuk menggambarkan hubungan antara Kepatuhan Pajak (KP) dengan empat variabel yaitu Lingkungan Pajak (LP), Sanksi Pajak (SP), Strategi Pemerintah (RP), dan Faktor Agama (AG):



Gambar 1-1 Kerangka Konseptual

Metode Analisis

Untuk membuat model Structural Equation Modeling (SEM) dari desain kerangka konsep di atas, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan variabel laten
 - Tentukan variabel laten untuk masing-masing variabel dependen dan independen yang telah diidentifikasi dalam desain kerangka konsep.
 - Variabel laten dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa indikator pengukuran dari masing-masing variabel.
- 2) Mendisain diagram jalur
 - Buat diagram jalur yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dan indikator pengukuran.
 - Tentukan arah hubungan antar variabel.
- 3) Uji model SEM
 - Gunakan teknik statistik untuk menguji model SEM, seperti maximum likelihood estimation.
 - Evaluasi goodness of fit model dengan melihat nilai chi-square, degree of freedom, dan nilai p-value.
 - Analisis koefisien standar dan signifikansi statistik dari setiap hubungan antar variabel.
- 4) Interpretasi hasil uji model SEM
 - Interpretasi hasil uji model SEM dengan melihat koefisien standar dan signifikansi statistik dari setiap hubungan antar variabel.
 - Identifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Evaluasi model SEM
 - Melakukan evaluasi terhadap model SEM yang telah dibuat, termasuk reliabilitas dan validitas pengukuran, serta goodness of fit model.
 - Melakukan perbaikan dan modifikasi model SEM jika diperlukan.

Analisis Strategi Pemerintah

Berikut adalah rumus SEM untuk variabel Strategi Pemerintah (RP) dengan observasi RP1, RP2, dan RP3:

Model Persamaan Struktural:

$$RP = \lambda_1 * RP1 + \lambda_2 * RP2 + \lambda_3 * RP3 + \epsilon_{RP}$$

Di mana:

- RP adalah variabel dependen (Strategi Pemerintah)
- RP1, RP2, dan RP3 adalah variabel independen (observasi)
- λ_1 , λ_2 , dan λ_3 adalah koefisien regresi atau beban faktor (loading factor) yang mengukur pengaruh setiap variabel observasi terhadap variabel dependen RP
- ϵ_{RP} adalah kesalahan pengukuran atau residual yang tidak dapat dijelaskan oleh model

Model Persamaan Pengukuran:

$$RP1 = \gamma_1 * f_1 + \delta_1$$

$$RP2 = \gamma_2 * f_1 + \delta_2$$

$$RP3 = \gamma_3 * f_2 + \delta_3$$

Di mana:

- f_1 dan f_2 adalah faktor laten atau konstruk yang tidak diamati secara langsung, tetapi dapat diukur melalui variabel observasi
- γ_1 , γ_2 , dan γ_3 adalah koefisien faktor yang mengukur hubungan antara faktor laten dan variabel observasi
- δ_1 , δ_2 , dan δ_3 adalah kesalahan pengukuran atau residual yang tidak dapat dijelaskan oleh model

Pengaruh Variabel Agama

Berikut adalah model SEM untuk menggambarkan hubungan antara faktor agama (AG) dengan tiga variabel observasi yaitu Keyakinan agama (AG1), Peran tokoh agama (AG2), dan Sanksi agama (AG3):

Model Persamaan Struktural:

$$AG = \lambda_1 * AG1 + \lambda_2 * AG2 + \lambda_3 * AG3 + \epsilon_{AG}$$

Di mana:

- AG adalah variabel dependen (faktor agama)
- AG1, AG2, dan AG3 adalah variabel independen yang merupakan tiga variabel observasi yang mempengaruhi faktor agama
- λ_1 , λ_2 , dan λ_3 adalah koefisien regresi atau beban faktor (loading factor) yang mengukur pengaruh setiap variabel observasi AG1, AG2, dan AG3 terhadap variabel dependen AG
- ϵ_{AG} adalah kesalahan pengukuran atau residual yang tidak dapat dijelaskan oleh model

Model Persamaan Pengukuran:

$$AG1 = \gamma_1 * f_1 + \delta_1$$

$$AG2 = \gamma_2 * f_1 + \delta_2$$

$$AG3 = \gamma_3 * f_2 + \delta_3$$

Di mana:

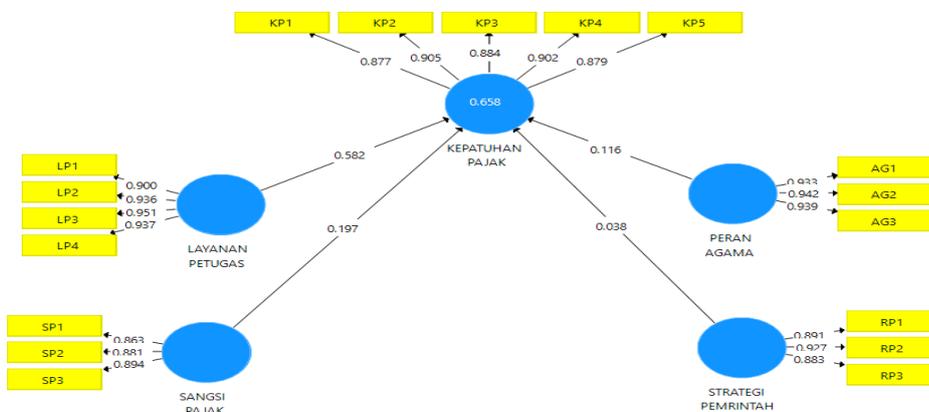
- f_1 dan f_2 adalah faktor laten atau konstruk yang terdiri dari variabel observasi AG1, AG2, dan AG3
- γ_1 , γ_2 , dan γ_3 adalah koefisien faktor yang mengukur hubungan antara faktor laten dan variabel observasi

— δ_1 , δ_2 , dan δ_3 adalah kesalahan pengukuran atau residual yang tidak dapat dijelaskan oleh model

4. Hasil dan Pembahasan

Koefisien Jalur

Analisis koefisien jalur dalam model persamaan struktural (SEM) yang Layanan Petugas, Sangsi Pajak, Strategi Pemerintah, dan Peran Agama.



Gambar 1-2 Nilai Koefisien Jalur Dalam Model Persamaan Struktural (SEM)

Dalam SEM, koefisien jalur adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel lain. Nilainya dapat berkisar dari -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan bahwa jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga akan meningkat. Nilai negatif menunjukkan bahwa jika variabel independen meningkat, variabel dependen akan menurun. Nilai koefisien menunjukkan kekuatan hubungan tersebut.

Tabel 1-3 Koefisien Jalur/Regresi

VARIABEL LATEN	KEPATUHAN PAJAK
LAYANAN PETUGAS	0.582
SANGSI PAJAK	0.197
STRATEGI PEMERINTAH	0.038
PERAN AGAMA	0.116

Berdasarkan Tabel 1-3 dapat interpretasi sebagai berikut:

- 1) Layanan Petugas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.582. Artinya, peningkatan kualitas layanan petugas akan meningkatkan kepatuhan pajak.
- 2) Sangsi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.197. Hal ini berarti, peningkatan penerapan sangsi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
- 3) Strategi Pemerintah memiliki pengaruh positif yang sangat kecil terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.038. Ini berarti, meskipun strategi pemerintah berpengaruh pada kepatuhan pajak, pengaruhnya sangat kecil.
- 4) Peran Agama memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.116. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat Layanan Petugas, peningkatan peran agama juga bisa meningkatkan kepatuhan pajak.

R Square

Adjusted R Square, di sisi lain, merupakan modifikasi dari R Square yang menyesuaikan jumlah variabel dalam model. Seringkali, penambahan variabel dalam model statistik akan meningkatkan R Square meskipun variabel tersebut tidak relevan. Adjusted R Square mengurangi nilai R Square berdasarkan jumlah variabel dalam model, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecocokan model.

Tabel 1-4 Indikator R Square dan Adjusted R Square Kepatuhan Pajak

	R Square	Adjusted R Square
KEPATUHAN PAJAK	0.658	0.652

Dalam konteks ini, R Square untuk variabel 'Kepatuhan Pajak' adalah 0.658. Ini berarti bahwa 65.8% variasi dalam 'Kepatuhan Pajak' dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Adjusted R Square untuk 'Kepatuhan Pajak' adalah 0.652. Ini berarti bahwa setelah penyesuaian untuk jumlah variabel dalam model, 65.2% variasi dalam 'Kepatuhan Pajak' dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dan relevan untuk menjelaskan 'Kepatuhan Pajak'.

f Square

Nilai f Square dalam model PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Modeling) adalah ukuran efek ukuran variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai ini menunjukkan seberapa banyak variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen tertentu.

Tabel 1-5 Nilai f Square Dalam Model PLS-SEM

INDIKATAOR	KEPATUHAN PAJAK
LAYANAN PETUGAS	0.558
PERAN AGAMA	0.027
SANGSI PAJAK	0.030
STRATEGI PEMRINTAH	0.001

Berikut ini adalah penjelasan nilai f Square :

- 1) Layanan Petugas: Nilai f Square adalah 0.558, yang berarti bahwa variabel 'Layanan Petugas' menjelaskan sekitar 55.8% dari variasi dalam variabel 'Kepatuhan Pajak'. Ini menunjukkan bahwa 'Layanan Petugas' memiliki efek yang cukup besar terhadap 'Kepatuhan Pajak'.
- 2) Peran Agama: Nilai f Square adalah 0.027, yang berarti bahwa variabel 'Peran Agama' menjelaskan sekitar 2.7% dari variasi dalam variabel 'Kepatuhan Pajak'. Ini menunjukkan bahwa 'Peran Agama' memiliki efek yang kecil terhadap 'Kepatuhan Pajak'.
- 3) Sangsi Pajak: Nilai f Square adalah 0.030, yang berarti bahwa variabel 'Sangsi Pajak' menjelaskan sekitar 3% dari variasi dalam variabel 'Kepatuhan Pajak'. Ini menunjukkan bahwa 'Sangsi Pajak' memiliki efek yang kecil terhadap 'Kepatuhan Pajak'.
- 4) Strategi Pemerintah: Nilai f Square adalah 0.001, yang berarti bahwa variabel 'Strategi Pemerintah' menjelaskan sekitar 0.1% dari variasi dalam variabel 'Kepatuhan Pajak'. Ini menunjukkan bahwa 'Strategi Pemerintah' memiliki efek yang sangat kecil atau hampir tidak ada terhadap 'Kepatuhan Pajak'.

Hubungan Pelayanan terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Dari hasil penelitian Variabel Layanan Petugas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.582. Artinya, peningkatan kualitas layanan petugas akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dari teori kepatuhan dan pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Teja & Journal (2020) menekankan bahwa kepuasan wajib pajak merupakan mediator penting dari pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sama halnya dengan penelitian Awaluddin & Tamburaka, (2017) yang menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Keduanya mendukung hasil penelitian yang dilakukan yang mana peningkatan kualitas layanan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain mendukung hasil penelitian ini, yaitu bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hubungan Sanksi terhadap Kepatuhan

Dari hasil penelitian penulis Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.197. Hal ini berarti, peningkatan penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sedangkan secara teori menunjukkan hal sebagai berikut; (1) Teori deterrence berpendapat bahwa ancaman atau penerapan sanksi yang tegas dan cepat dapat mencegah atau mengurangi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran dalam membayar pajak.. (2) Teori Kepatuhan; Teori kepatuhan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk patuh pada aturan dan regulasi yang berlaku.(3) Teori Perilaku Sosial; Teori perilaku sosial menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian oleh Oktavia & Suryani, 2022: Penelitian ini mendukung hasil penelitian penulis karena mereka menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penemuan penulis bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hubungan Strategi Partisipasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Strategi Pemerintah memiliki pengaruh positif yang sangat kecil terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.038. Ini berarti, meskipun strategi pemerintah berpengaruh pada kepatuhan pajak, pengaruhnya sangat kecil. Dari satu sisi, ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa strategi partisipasi pemerintah mungkin tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Faktor-faktor lain seperti sanksi pajak, kesadaran pajak, dan pelayanan publik yang baik mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan pajak. Studi lain oleh Nwokoye et al. (2022) juga menemukan bahwa insentif fiskal dan legitimasi politik pemerintah saat ini berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Oleh karena itu, meski pengaruh strategi partisipasi pemerintah mungkin tidak sebesar faktor lainnya, tetap penting untuk terus menjalankan strategi ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong kepatuhan pajak.

Peran Agama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian Variabel Peran Agama memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien 0.116. Meskipun pengaruhnya tidak sekuat Layanan Petugas, peningkatan peran agama juga bisa meningkatkan kepatuhan pajak. Secara teori kepatuhan terhadap agama berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang didukung oleh berbagai teori. (1) Teori nilai sosial dan moral menunjukkan bahwa agama, melalui nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan, mendorong individu untuk membayar pajak. Agama mengajarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, sikap penting dalam kepatuhan pajak. (2) Teori kontrol sosial menyoroti bagaimana hubungan sosial, termasuk yang terbentuk melalui agama. (3) Teori Perilaku Sosial menunjukkan bagaimana agama membentuk lingkungan sosial dan nilai-nilai internal yang mendukung kepatuhan pajak. Akhirnya, (4) Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Sukarela menekankan pentingnya kesadaran dan motivasi dalam membayar pajak. Agama dapat membantu membangun kesadaran dan motivasi ini, misalnya dengan mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya berkontribusi kepada masyarakat.

Penelitian oleh Hidayat et al., (2022) juga mendukung temuan penulis, dengan menemukan bahwa religiusitas memengaruhi niat kepatuhan pajak, dengan penggunaan e-Filing sebagai variabel moderasi. Ini semakin memperkuat argumen bahwa religiusitas mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak.

Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga memiliki peran penting. Penerapan sanksi yang tegas dan efisien dapat mendorong kepatuhan pajak, sesuai dengan teori deterrence, kepatuhan, dan perilaku sosial. Penelitian menunjukkan bahwa meski ada variasi dalam hasil, umumnya sanksi pajak efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami interaksi antara berbagai faktor dan dampaknya pada kepatuhan pajak.

Strategi partisipasi pemerintah, meskipun mungkin tidak seefektif faktor lain, tetap relevan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teori partisipasi pemerintah, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan, dapat menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar. Terakhir, Spiritualitas agama berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya mungkin tidak sekuat layanan petugas pajak. Agama, melalui nilai-nilai moral dan sosial, mekanisme kontrol sosial, dan pengaruh lingkungan, mendukung kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, kualitas layanan petugas pajak, penerapan sanksi pajak, strategi partisipasi pemerintah, dan agama semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2007). Tax Morale and Tax Evasion in Latin America Fiscal incidence View project Coercion and Social Welfare View project. <https://www.researchgate.net/publication/46455679>
- Alm, J., & Torgier, B. T. (2021). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality on JSTOR. *Journal of Business Ethics*.
- Andersson, H., Nordblom, K., Wanander, S., & Engström, P. (2021). Nudges and Threats: Soft vs Hard Incentives for Tax Compliance Nudges and Threats: Soft vs Hard Incentives for Tax Compliance*.
- Austin, W. G. (1979). Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), (pp. 33-37). Monterey, CA Brooks/Cole. -. *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Scientific Research Publishing. [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=757561](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=757561)
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Bahagia, I., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2021). Effect Of Ethics And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance With Taxpayer Knowledge As Moderating Variables In Pratama Lubuk Pakam Tax Office. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24, 116–123.
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Glasow, P. (2005). *Fundamental Of Survey Research Methodologi*. MITRE.
- Hassen, L., Al-Taffi, A., & Abdul-Jabbar, H. (2015). Does Muslim view on tax influence compliance behaviour? www.icas.my
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>

- Kushwah, S. V., Nathani, N., & Vigg, M. (2021). Impact of Tax Knowledge, Tax Penalties, and E-Filing on Tax Compliance in India. *Indian Journal of Finance*, 15(5–7), 61–74. <https://doi.org/10.17010/IJF/2021/V15I5-7/164493>
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (n.d.). THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH KNOWLEDGE AS INTERVENING VARIABLE.
- Mamangkey, M., Liando, D., & Kimbal, M. (2019). Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online Di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/24638>
- Murphy, K. (2004). The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders. In *Law and Human Behavior* (Vol. 28, Issue 2).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice*.
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia. <Http://Www.Editorialmanager.Com/Cogentbusiness>, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- Nwokoye, E. S., Igbanugo, C. I., Ekiesiobi, C., & Dimnwobi, S. K. (2022). Fiscal Incentives and Tax Compliance Behaviour in Industrial Clusters: A Survey of Clusters in South-east Nigeria. <Https://Doi.Org/10.1080/15228916.2022.2031827>. <https://doi.org/10.1080/15228916.2022.2031827>
- Oktavia, A., & Suryani, L. (2022). The Effect Of Tax Knowledge, Tax Payer Awareness, And Tax Penalty On Tax Payer Compliance At Kpp Pratama Pasar Rebo. *Proceedings International Seminar On Accounting Society*, 3(1), 208–217. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PISA/article/view/19893>
- Schneider, F. (2011). *Handbook on the shadow economy. Handbook on the Shadow Economy*. <https://doi.org/10.4337/9780857930880>
- Sondergaard, M. (2001). Geert Hofstede, Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions, and Organizations Across Nations. *International Journal of Cross Cultural Management*, 447–456.
- Susuawu, D., Ofori-Boateng, K., & Amoh, J. K. (2020). Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour Of Smes? A New Perspective From Ghana. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10, 50–56. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10554>
- Teja, A., & journal, I. (2020). The Effect of Service Quality to Build Taxpayer Trust and Satisfaction on Increasing Taxpayer Compliance in Gianyar Regency. *Manuscriptcentral*. <https://doi.org/10.15520/IJCRR.V11I09.842>

PERKEMBANGAN DAN REKONSTRUKSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Romi Suradi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dan perkembangan industri keuangan. Percepatan kemajuan industri perbankan syariah ditandai dengan bergabungnya Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Siring perjalannya waktu, banyak kritik dan saran yang menunjukkan bahwa akad-akad pada perbankan syariah belum murni syariah. Oleh karena itu perlu ada rekonstruksi terhadap akad perjanjian syariah amat diperlukan, mengingat kemurnian perbankan syariah yang seharusnya perwujudan nilai-nilai syariah telah tercemar oleh hal-hal tertentu yang tidak sejalan dengan syariah. Perlu diketahui pula sejauh mana perkembangan dan upaya rekonstruksi Bank Syariah tersebut, agar dapat di evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah dan upaya rekonstruksi terhadap akad-akad yang selama ini digunakan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode library research.

JEL: G21

Keywords: Perkembangan, Rekonstruksi, Perbankan Syariah

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berdasarkan data kementerian dalam negeri tahun 2021 dengan jumlah Muslim sebanyak 237,53 juta jiwa memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non- Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah terus dibutuhkan.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dan perkembangan industri keuangan. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Mulai dari banyaknya jenis-jenis produk perbankan syariah yang inovatif, terjadinya peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan kemajuan industri perbankan syariah ditandai dengan

bergabungnya Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah

Pada 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. (ir.bankbsi.co.id). Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan usaha untuk melahirkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, dan diharapkan juga menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam.

Tabel 1.1 Posisi Keuangan Konsolidasian Bank Syariah Indonesia per 31 Desember 2021

Uraian	2021	2020	2019
Jumlah Liabilitas	61.886.476	66.040.361	44.006.843
Jumlah Dana Syirkah Temporer	178.388.671	151.798.018	142.221.239
Jumlah Ekuitas	25.013.934	21.743.145	19.068.945
Total Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas	265.289.081	239.581.524	205.297.027

Sumber : Laporan Tahunan BSI 2021 (Data Diolah)

Meskipun ditengah tantangan pandemi covid-19 BSI mampu merespon situasi dengan baik melalui beragam inisiatif strategis yang tepat, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana BSI membukukan nilai aset senilai Rp.265,3 Triliun pada tahun buku 2021. Aset tahun 2021 tersebut tumbuh 10.73% dibanding tahun 2020. Dan nilai Ekuitas tumbuh 15.04% dibanding tahun sebelumnya. Di zaman Nabi SAW institusi perbankan memang belum ada, akan tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman terkait aktivitas muamalah. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan, terutama perbankan syariah (Marimin & Romdhoni, 2017)

Pada saat sekarang ini perkembangan perbankan syariah sedang mencapai titik puncak yang luar biasa, perbankan syariah yang dimotori oleh lembaga pembiayaannya merupakan salah satu motor penggerak animo masyarakat terhadap perbankan syariah yang juga dipicu oleh rasa keadilan yang lebih optimal dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang populer selama ini. Namun perlu untuk digarisbawahi hendaknya dunia perbankan syariah haruslah benar-benar implementasi dari tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang tercermin dalam maqoshid syariah. Jangan sampai perbankan syariah hanya sekedar perwujudan dari ekspansi produk perbankan demi menarik nasabah yang bertujuan untuk peningkatan laba semata.

Rekonstruksi terhadap akad perjanjian syariah amat diperlukan, mengingat kemurnian perbankan syariah yang seharusnya perwujudan nilai-nilai syariah telah tercemar oleh hal-hal tertentu yang tidak sejalan dengan syariah. Rekonstruksi akad perjanjian syariah haruslah dilakukan dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling mudah dan yang paling memungkinkan untuk dilakukan segera. Hal ini merupakan upaya yang tidak gampang mengingat sudah menyebarnya pengaruh-pengaruh non-

syariah dalam dunia perbankan syariah. Akan tetapi tidak gampang bukan berarti tidak mungkin, dengan niat yang ikhlas, usaha yang keras dan cara yang tetap segala sesuatunya bisa diwujudkan sesuai dengan harapan. Rekonstruksi akad perjanjian dalam perbankan syariah haruslah berdasarkan pada tujuan syariah yang sesungguhnya sebagaimana yang tercermin dalam maqashid syariah.

Rekonstruksi akad yang pertama adalah memelihara agama, dalam hal ini setiap akad perjanjian haruslah dilandaskan kepada Al Quran dan Sunnah. Prinsip contractuality fairness, social justice dan permissibility haruslah terkandung dalam akad tersebut, sehingga tidak hanya dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak, namun juga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah. Rekonstruksi akad guna memenuhi maqashid yang kedua yaitu memelihara kehidupan, kehidupan yang dimaksud tidak hanya kelangsungan hidup manusia belaka, lebih dari itu haruslah berwawasan lingkungan dengan kata lain harus diterapkan green banking secara utuh. Rekonstruksi akad yang ketiga adalah memelihara akal, akad bank syariah haruslah tidak bertujuan untuk mendukung kegiatan atau usaha langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi kemurnian akal. Rekonstruksi akad yang keempat berkaitan dengan menjaga agama, ialah akad di bank syariah hendaknya menjaga kemurnian syariah. Akadnya harus akad syariah, bukan akad yang di balut oleh syariah, Rekonstruksi akad yang terakhir adalah memelihara harta, secara tegas Islam menganjurkan setiap muslim yang mampu untuk membantu sesamanya yang kurang mampu, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Adz-Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Akad bank syariah harus mencerminkan suatu bentuk tanggung jawab sosial di samping fungsi sosial yang melekat pada bank syariah. Akad syariah yang pada dasarnya mengandung tiga prinsip yaitu Contractual Fairness, Social Justice dan Permissibility, dalam hal ini akad syariah harus dibentuk berdasarkan ketentuan syariah. Akad bank syariah yang dibuat bukanlah akad. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengidentifikasi perkembangan dan rekonstruksi perbankan syariah di Indonesia saat ini. Apakah perbankan syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah atau hanya sekedar label semata? Menelaah bagian apa saja yang bermasalah pada akad-akad syariah juga dilakukan sehingga dapat diperbaiki, revisi atau bahkan di substitusi sehingga menjadi suatu rekonstruksi utuh untuk mencapai tujuan dari maqashid syariah itu sendiri.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep teoritis tentang bank syariah telah ada pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi yang belum memungkinkan dan belum adanya pemikiran tentang bank syariah yang lebih meyakinkan (Soemitro, 1996). Dalam perkembangan selanjutnya proyek keuangan yang berlandaskan syariah baru didirikan di kota Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963 (Schoon, 2009). Mit Ghamr adalah kota dimana Dr Ahmad el-Najjar mendirikan bank Islam pertama yang merupakan pioneer sistem perbankan Islam global (al-Nasser, 2008). Bank tersebut mengambil bentuk suatu bank tabungan yang berbasis bagi hasil (profit Sharing) sebagai bentuk transaksinya.

Gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 – 27 April 1969 (Soemitro, 1996) yang dipelopori oleh Islamic Development Bank (IDB) untuk memobilisasi dana-dana yang digunakan membiayai proyek-proyek dinegara anggota (Schoon, 2009)

Perkembangan institusi keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai prinsip syariah.

Pemerintah telah membuat kemungkinan dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank syariah di Indonesia. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank syariah. Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan asset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun. (Marimin & Romdhoni, 2017)

Perkembangan Bank umum syariah dan Bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. market share dalam bersaing dengan Bank Konvensional yang telah berdiri lebih awal.

Setelah sejarah perbankan syariah modern diawali dengan pendirian Mit Ghamr di Mesir selanjutnya pasar perbankan Islam terus berkembang diseluruh dunia. Perkiraan asset dari bank-bank Islam pada tahun 2008 telah mencapai lebih dari US\$700 Miliar dengan pusat perkembangannya berada di wilayah Timur Tengah (Islam, 2008). Perkembangan perbankan syariah sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu wilayah sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri (Remy, 2018)

Pelopop berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),

pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis.

Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristikasinya. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. Selain itu Prof. Dr. Abdul Manan mengemukakan kata “rekonstruksi” disebut juga dengan istilah pembaharuan atau reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Diantara kata-kata itu yang sering digunakan dalam istilah arab adalah *tajdid* dan *islah*.

Tajdid dalam bahasa arab disebutkan *tajdid 'ahs al-qadim* (*tajdid* kebalikan dari *qadim*), *qadim* berarti lama, jadi *tajdid* berarti baru atau mempunyai arti pembaharuan, maksudnya menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun *islah* berasal dari kata *aslahu-yuslihu* yang berarti memperbaiki. Kata *tajdid* dan *islah* sering digunakan secara berdampingan dengan pengertian yang sama yakni pembaharuan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rekonstruksi yang dalam bahasa arab disebut *tajdid* adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang keliru atau dianggap salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. Jika pengertian ini disangkutken dengan hukum dalam bentuk rekonstruksi hukum dapat dijelaskan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya, tapi juga diperluas maknanya sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. (Rahardjo, 1981)

3. METODA PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data pustaka, dengan menelaah bacaan-bacaan yang berhubungan dengan topik pembahasan serta mencatat dan mengolah hasil bacaan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data sesuai dengan topik penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data). Dari kutipan ini dapat dipahami bahwasanya penelitian ini menekankan akan pentingnya proses dalam penelitian dibandingkan hasilnya. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan rekonstruksi perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

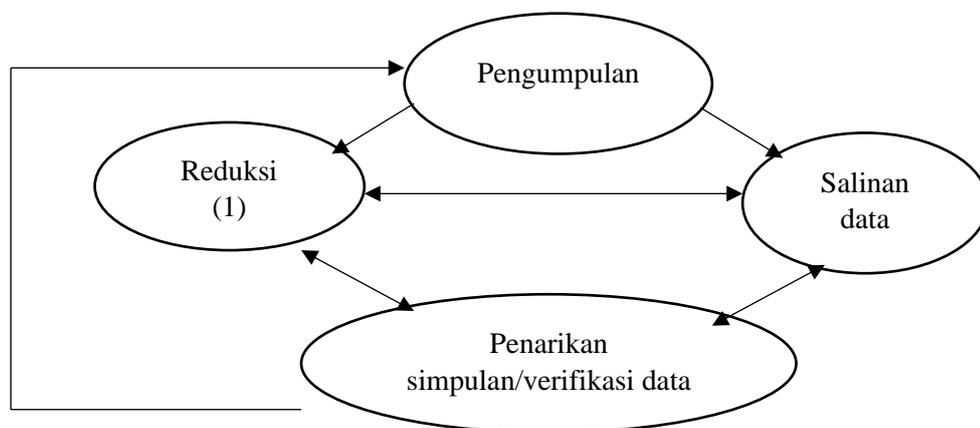
- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni buku berjudul *Perbankan Syariah karya Sutan Remy Sjahdeini dan Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT karya Dwi Condro Triono*. Penulis memilih buku ini karena ada beberapa alasan. Pertama, penulis ingin mengungkapkan sejarah perkembangan perbankan syariah berbasis pengalaman yang ada dalam buku ini. Kedua, penulis ingin mencari relevansi antara aturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI dengan perkembangan perbankan syariah. Ketiga, dalam perkembangan perbankan syariah selama ini penulis menemukan bahwa masih banyak terdapat umat Islam yang masih ragu terhadap produk-produk perbankan sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut atau bahkan di rekonstruksi sehingga tidak ada keraguan dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah.
- b. Sumber Data Sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang

mengkaji tentang perkembangan dan rekonstruksi perbankan syariah. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan perkembangan dan rekonstruksi perbankan syariah di dalam buku primer. Sumber data sekunder tersebut salah satunya adalah Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia yang merupakan karya Zaim Saidi, dan Menggugat Bank Syariah: Kritik atas fatwa produk perbankan syariah karya Hafidz Abdurrahman dan beberapa buku lain dan beberapa jurnal yang mendukung tema penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut. Aktivitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (data reduction), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data dan analisis data model interaktif. Dalam hal ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung (Sutopo, 2006: 95) dan dalam model analisis interaktif ketiga komponen analisis berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data. Begitu peneliti menyusun catatan lapangan lengkap, reduksi data segera dibuat, dan diteruskan dengan pengembangan bentuk susunan sajian data.

Membaca sajian data dengan kelengkapan ragam pendukungnya, peneliti mengusahakan pikiran yang mengarah pada simpulan yang bersifat sementara karena pengumpulan data masih berlangsung. Apabila peneliti menemukan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar simpulan sementara tadi perlu dirubah secara tepat. Apabila data baru lebih memperkuat simpulannya sementara yang telah dikembangkan akan menjadi semakin mantap. Demikian seterusnya hingga pengumpulan data dirasa telah lengkap. Secara sederhana model analisis interaktif ini, dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Model Analisis Interaktif

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep teoritis tentang bank syariah telah ada pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan Kajian Transformasi, Perbankan Syariah yang disusun pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi. Di samping itu, saat ini sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah dipaksa untuk masuk ke dalam era New Normal sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. (OJK, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025).

Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan Syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi.

Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan Syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025 membawa visi mewujudkan perbankan Syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Arah pengembangan perbankan Syariah saat ini dianggap telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, merupakan Langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Adapun visi roadmap Perbankan Syariah periode 2020-2025 berlandaskan pada 3 (tiga) pilar arah pengembangan dengan beberapa inisiatif strategis di dalamnya, yang terdiri dari:

1. Penguatan Identitas Perbankan Syariah,

Sebagai identitas perbankan Syariah yang paling mendasar, nilai-nilai Syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Penerapan nilai-nilai syariah yang lebih menyeluruh akan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat. Dalam hal pengembangan produk, perbankan syariah akan didorong untuk terus menciptakan produk baru yang memiliki ke-khas-an Syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, beberapa hal yang terkait dengan penguatan permodalan dan efisiensi merupakan hal mendasar yang harus terus ditingkatkan untuk bisa terus meningkatkan daya saing dan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Terakhir, kondisi perkembangan teknologi yang semakin

cepat menuntut perbankan syariah untuk selalu mengembangkan infrastrukturnya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik. Untuk itu penerapan digitalisasi yang cepat dan tepat harus bisa diimplementasikan agar juga dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah.

2. Sinergi Ekosistem Ekonomi

Syariah Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sector religius merupakan empat sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat memfasilitasi keempat sektor tersebut dengan menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan Syariah yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Sinergi dan integrasi dalam ekosistem ini sangat diperlukan sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah. Perbankan syariah dituntut untuk bisa memberikan produk dan layanan keuangan Syariah yang berdaya saing tinggi. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah yang memungkinkan perbankan Syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep platform sharing dimana bank syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

3. Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan

Percepatan proses perizinan sangat penting untuk mendukung akselerasi pengembangan industri perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas SDM perizinan dan mengembangkan sistem TI yang mendukung percepatan proses perizinan. Selain itu, pengaturan yang ada juga harus dapat mengawal pengembangan perbankan syariah melalui ketentuan yang sesuai dengan perkembangan best practice industri, teknologi, dan perekonomian terkini. Tentunya ketentuan perbankan syariah akan lebih diharmonisasi dengan berbagai standar internasional seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* untuk semakin meningkatkan kredibilitas pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Pengawasan perbankan syariah akan semakin kuat dengan melakukan pengembangan tools pengawasan, evaluasi organisasi, jumlah SDM, dan peningkatan kapasitas pengawas melalui berbagai kegiatan *capacity building*.

Visi dan roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan perbankan syariah nasional yang resilient, memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Perbankan syariah diharapkan menjadi motor penggerak yang berperan sebagai penghubung berbagai sektor, seperti sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan pada ekosistem ekonomi syariah sehingga sinergi dan semangat berjamaah dapat terbangun dengan baik. Di samping itu, perbankan syariah juga diharapkan menjadi industri perbankan yang terdepan dalam memberikan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value (CSV)* yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan maqashid syariah dalam ekonomi Syariah.

Pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 sebelumnya, terdapat 7 arah kebijakan yang telah ditetapkan. Di penghujung tahun 2019, telah terlaksana berbagai pencapaian dari arah kebijakan tersebut. Arah kebijakan yang pertama adalah memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, hal ini telah dicapai dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang KNKS pada tahun 2016

dan pelantikan Manajemen Eksekutif KNKS dilakukan pada tahun 2019. Selanjutnya dalam rangka memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, telah dilakukan IPO oleh BTPN Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2018. Selain itu, pembentukan Bank BUMD Syariah juga telah terealisasi dengan berdirinya PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 dan PT Bank NTB Syariah pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2019 telah diterbitkan POJK Sinergi Perbankan dalam rangka implementasi kebijakan dan penerapan *business process leveraging*.

Babak perjalanan yang baru bagi industri perbankan syariah Indonesia mulai menemui titik terang. Market share aset perbankan syariah per September 2020 meningkat menjadi 6,24% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. Keterbukaan peluang perbankan syariah dalam meningkatkan market share ini Market share aset perbankan syariah pada September 2020 Peluncuran roadmap ini sebagai katalisator dalam mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, kondisi umum makroekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografis dan mikroekonomi yang berdampak terhadap lanskap industri keuangan di Indonesia.

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun. Pertumbuhan aset perbankan Syariah tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan Syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun pada September 2020.

Berlandaskan hasil survei, *in-depth interview* (IDI), dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan OJK, perbankan syariah saat ini masih memiliki beberapa isu strategis yang menghambat pertumbuhannya. Diantara isu strategis tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis saja, kualitas SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah. Di sisi lain, OJK juga telah mengidentifikasi beberapa peluang dan tantangan yang menjadi factor pendukung perkembangan perbankan syariah ke depannya. Di antara beberapa faktor pendukung tersebut adalah pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

Perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Perkembangan perbankan Syariah juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagai landasan filosofis perbankan syariah, ekonomi Syariah memiliki tujuan utama dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu falah. Falah adalah tercapainya kesejahteraan baik material maupun spiritual, kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan hidup (aspek sosial dan ekonomi) serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*maslahat*).

Ekonomi syariah memiliki visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdiri dari menjaga keimanan dan ketakwaan (*ad Din*), keturunan (*an Nasab*), jiwa dan keselamatan (*an Nafs*), harta benda (*al Maal*), dan pikiran (*al Aql*). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Aksi global ini

dimulai pada tahun 2015 dengan harapan dapat dicapai pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dalam SDGs yang berfokus pada 5 Ps yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnerships. Jauh sebelum adanya SDGs maupun 5 Ps, prinsip-prinsip perbankan Syariah telah mengacu pada nilai-nilai tersebut dalam segala aktivitas yang dilakukan. Perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya.

Hal ini tercermin dari 5 perkara yang ada pada maqasid syariah yang tentunya selaras dengan nilai-nilai pada SDGs maupun 5 Ps. Berkembangnya nilai-nilai sosial-ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan orientasi pada dunia bisnis, dari yang sebelumnya menyisihkan keuntungan untuk aksi sosial yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, menjadi *Creating Shared Value (CSV)* yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya pembangunan sosial dan perekonomian dalam perancangan strategi perusahaan.

Transformasi Bank Syariah

Perbankan syariah harus melakukan transformasi menjadi perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Perbankan syariah Indonesia diharapkan menjadi perbankan yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value (CSV)* yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi syariah.

Perbankan Syariah diharapkan dapat memiliki identitas khas yang membuatnya sangat tangguh diantaranya; memiliki keunikan model bisnis/ produk yang berdaya saing tinggi, dapat mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, memiliki SDM berkualitas, dan TI yang mutakhir. Adapun kondisi saat ini, perbankan syariah belum memiliki diferensiasi model bisnis/ produk yang signifikan, Indeks literasi dan inklusi masih rendah, hanya fokus pada tujuan bisnis saja. Selain itu kuantitas dan kualitas SDM yang kurang optimal serta TI belum memadai. Oleh karena itulah perlu adanya transformasi perbankan Syariah dalam hal ini adalah rekonstruksi perbankan Syariah.

Penguatan Identitas Syariah

Dari 3 pilar dalam rangka mencapai roadmap perbankan Syariah 2020-2025, maka penguatan identitas syariah adalah factor yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu dalam roadmap tersebut menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan identitas Syariah. Penguatan identitas Syariah dilakukan dengan cara memperkuat nilai-nilai Syariah Sebagai identitas perbankan syariah yang paling dasar. Nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Penerapan nilai-nilai syariah yang lebih menyeluruh akan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat yang saat ini semakin memiliki kesadaran menjalankan agama dengan baik.

Nilai syariah tidak hanya harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah tetapi juga harus tertanam pada seluruh pegawai perbankan Syariah sebagai norma sosial yang harus dipenuhi. Nilai syariah tersebut juga perlu terlihat dalam pelayanan kepada nasabah agar nasabah memiliki customer experience yang baik terhadap penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai Syariah kepada pegawai adalah dengan menyusun kode etik bankir syariah sebagai dasar pola aturan, tata cara, dan pedoman etis dalam melakukan pekerjaan sebagai bankir syariah. Selain itu, bankir Syariah juga harus meningkatkan kompetensi dan

profesionalitasnya melalui penerapan sertifikasi kompetensi bankir syariah. Monitoring dan evaluasi berkala atas penerapan kode etik dan standar kompetensi juga sangat diperlukan agar penerapannya dapat berjalan dengan efektif.

Pemenuhan prinsip Syariah pada perbankan Syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga seluruh organ perbankan syariah. Fungsi kepatuhan dan audit intern menjadi sangat vital dalam mendukung proses pengawasan prinsip Syariah yang lebih optimal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak pada bank syariah secara individual tetapi juga risiko reputasi perbankan syariah secara industri. Kebijakan pengawasan yang lebih memperhatikan risiko kepatuhan syariah perlu ditingkatkan agar risiko reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga dengan baik. Mengembangkan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi OJK akan mendorong perbankan syariah untuk terus menciptakan produk baru yang memiliki ke-khasan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Produk perbankan syariah yang unik, unggul, dan tidak dapat diterapkan pada perbankan konvensional merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah.

Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Mendorong pengembangan produk Produk perbankan Syariah dapat menjadi *competitive advantage* melalui produk yang memberikan nilai tambah kepada nasabah, antara lain pengembangan produk yang memiliki *functional benefit* sekaligus memberikan *spiritual benefit* seperti bundling produk perbankan Syariah dengan produk dana social keagamaan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Produk perbankan Syariah juga harus memenuhi kebutuhan nasabah secara universal. Dengan mendorong pengembangan kelengkapan fitur produk bank syariah agar dapat berorientasi kepada kebutuhan dan *life cycle* nasabah, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi pilihan bagi semua nasabah untuk berbagai kebutuhan. Mendorong implementasi produk Sejatinya perbankan Syariah dapat berkontribusi lebih pada perekonomian nasional mengingat karakteristiknya yang lebih dekat dengan sektor riil. Produk-produk perbankan syariah yang telah ada saat ini akan terus dioptimalkan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Perbankan syariah dapat mengoptimalkan perannya dalam pembangunan sektor-sektor prioritas pemerintah dengan memasarkan produk seperti pembiayaan istishna pada sector perumahan rakyat atau pembiayaan salam pada sektor yang berbasis *supply chain* seperti pertanian, pengolahan, tekstil, dan lain sebagainya. Menyiapkan dasar hukum untuk mendukung diferensiasi perbankansyariah melalui keunikan produknya, berbagai inovasi, dan kreativitas sangat dibutuhkan. Pelaku industri dituntut untuk dapat menciptakan berbagai produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekaligus mencerminkan keunikan bank Syariah dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. OJK akan memberikan kerangka regulasi yang kondusif kepada pelaku industri untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk perbankan syariah. Selain review perencanaan model bisnis, penerapan piloting review dalam perizinan produk merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan implementasi produk baru pada periode tertentu sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perizinan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan produk tersebut.

Karakteristik produk pendanaan dan pembiayaan dengan akad syariah yang berbeda dengan produk bank konvensional mengharuskan bank syariah untuk memiliki modul yang berbeda dari modul bank konvensional. Perbedaan modul tersebut terletak pada proses operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya merupakan modul spesifik yang harus dikembangkan bank syariah. Melalui fasilitasi diskusi antara bank syariah dengan penyedia jasa TI, OJK mendorong

bank Syariah untuk mengembangkan modul pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik akad syariah agar prosedur operasional seperti pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dapat sesuai dengan prinsip syariah. Di era digitalisasi dan dominansi milenial, dibutuhkan ide baru yang kreatif. Diharapkan bank syariah bisa menjaring ide-ide tersebut melalui kompetisi inovasi berbasis aplikasi (hackathon) maupun *business matching* dengan *start-up* berbasis teknologi.

Rekonstruksi Penguatan Identitas Perbankan Syariah

Perkembangan Bank Syariah dan BMT di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini, dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat mengagumkan. Apalagi bagi siapapun yang pro terhadap sesuatu yang berbau Syariah, tentu sangat mendukung keberadaan Bank Syariah yang menjadi alternatif bagi yang mereka yang anti dengan Bank Konvensional, karena keharaman bunga dan riba yang ada pada Bank Konvensional. Namun transformasi dan rekonstruksi saat ini belum mampu menjawab berbagai macam keluhan dari para pegiat Perbankan Syariah, yang ada justru mengarah kepada konsep Bank Konvensional namun dengan istilah Syariah. Di sisi lain kemunculan Bank Syariah hanya sekedar untuk mengambil manfaat dan keuntungan dikarenakan kondisi masyarakat secara umum kecenderungannya mengarah kepada produk-produk berbasis Syariah, terlepas dari sisi kesadaran atau pemahaman dari masyarakat.

Hal ini dapat kita lihat pada data OJK diatas yang masih mengarah kepada investasi-investasi yang masih belum syar'i. Padahal penguatan identitas Syariah merupakan perkara yang sangat penting. Oleh sebab itu perlu ada rekonstruksi mendasar terhadap identitas Syariah secara mendasar yang kemudian dapat melakukan rekonstruksi dalam perkara yang lain. Menurut Dwi Condro (2020) salah satu permasalahan yang ada pada konsep Perbankan Syariah adalah bentuk perseroannya. Karena perbankan Syariah harus kuat secara identitas maka dari itu perbaikan terhadap bentuk perseroan Bank Syariah harus dilakukan terlebih dahulu, selain akad-akad bermasalah termasuk dari sisi ekosistem dan produk-produk lainnya.

Permasalahan perseroan dalam perbankan Syariah dapat dilihat dari aspek hukum Syariah. Dalam hukum Syariah secara umum ada dua macam hukum yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i (Abdullah, 2000). Dari dua hukum tersebut yang sering dipahami oleh umat Islam adalah hukum taklifi, sehingga pembahasan sehari-hari yang dikenal hanya seputar hukum taklifi tersebut yaitu seputar halal dan haramnya akad-akad dan muamalah sehari-hari. Termasuk seputar produk-produk apakah ini halal atau haram. Adapun akad-akad yang haram biasanya seputar pembahasan maysir (judi), gharar (ketidakpastian) dan riba. Artinya jika ada produk perbankan Syariah yang mengandung poin-poin tersebut dianggap belum syar'i.

Sedangkan hukum wadhi membahas hukum-hukum seputar sah atau tidak sah (batil) yang berkonsekuensi, jika sesuatu produk itu tidak sah maka turunannya akan menjadi haram diantara turunannya adalah pengangkatan dewan direksi, mengangkat karyawan, bertransaksi jual beli dan lain sebagainya (Condro, 2020 : 285) . Oleh karena itu pembahasan konsep perseroan pada Bank Syariah harus diperbaiki dikarenakan konsep perseroan saat ini adalah tidak sah. Adapun batilnya perseoran pada Bank Syariah dapat dibahas dari hukum wadhi terlebih dahulu. Pembahasan hukum wadhi maka harus diperhatikan rukun dan syarat yang harus ada dalam pembentukan perseroan secara Syariah. Jika rukun dan syaratnya terpenuhi maka dapat dikatakan Syariah, namun jika ada rukun dan syarat yang belum dipenuhi maka dapat dikatakan pembentukan perseroan tersebut tidak sah atau batil.

Menurut Dwi Condro (2020), tidak sahnya persero pada Bank Syariah dari sisi pembentukan perseroan yang berdasarkan perseroan saham. Hal ini perseroan saham dapat juga disebut sebagai akad antar modal saja tanpa ada unsur manusianya. Sehingga modal-modal itulah yang sebenarnya melakukan perseroan, bukan orang-orangnya. Dengan demikian setiap persero tidak berhak mengelola aktivitas perseroan tersebut atas nama persero berapapun jumlah sahamnya. Dalam perseroan saham

juga, yang berhak memimpin, mengendalikan dan bekerja di sana adalah orang-orang yang disebut sebagai direksi yang diangkat oleh dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris dipilih dari kalangan pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikan saham, bukan berdasarkan manusianya, disinilah dikatakan yang melakukan persero adalah modal bukan manusia, karena modal-lah yang menentukan jumlah suara. Sehingga dalam perseroan saham, satu lembar saham berlaku satu suara, bukan satu orang satu suara sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan perseroan dalam Islam. (Condro, 2020 : 287-288)

Selain itu, saham persero tersebut memiliki nilai yang tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung-ruginya perseroan. Dengan demikian saham-saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian persero, tetapi hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli atau pada waktu tertentu saja. Dan ketika perseroan memulai aktivitasnya, maka saham tersebut akan berubah dari modal menjadi kertas nominal yang mempunyai nilai tertentu dan mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, untung-ruginya perseroan, dan penerimaan pasar atau masyarakat. Dengan demikian saham akan tunduk pada hukum demand and supply, yang sama seperti kertas uang yang harganya bisa naik atau turun. (Dwi Condro, 2020 : 288). Batilnya perseroan saham pada perbankan syariah juga dikarenakan perseroan ini bersifat tetap dan tidak terikat dengan hidup dan matinya seorang persero. Sehingga yang terjadi tidak ada pihak yang dapat membubarkan diri, jika perseroan itu sendiri ingin melanjutkan aktivitasnya. Dari penjelasan diatas menurut Condro (2020), maka kebatilan akad perseroan pada perbankan Syariah diantaranya adalah :

1. Pada perseroan saham perbankan Syariah tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna
2. Tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola
3. Keberadaan PT bersifat tetap

Dari hal tersebut, maka perlu direkonstruksi akad-akad pembentukan perseroan saham pada perbankan Syariah, dalam arti lain harus dilakukan akad ulang dalam perseroannya dan harus memenuhi rukun dan syarat sehingga sesuai dengan hukum wadhi yang berdampak pada hukum taklifi. Adapun prinsip-prinsip penting dalam perseroan Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Harus ada dua pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pemodal dan pengelola. Dan yang dimaksud dengan pengelola tidak mendapatkan gaji sebagaimana konsep perseroan saat ini, namun mendapatkan bagi hasil usaha.
2. Dalam perseroan Syariah setiap pihak yang berakad harus siap melebur menjadi satu, baik manusia maupun modalnya, maka dari itu harus mengenal dan memahami karakter, saling percaya, menjaga amanah dan ukhuwah.
3. Jika perseroan Syariah ini bubar maka persentase untung rugi juga harus melihat modal yang sudah disetor pertama kali, dan pemodal harus siap menanggung kerugian dengan mengurangi jumlah modal yang sudah disetor tersebut.
4. Jumlah suara mengikuti jumlah orang, bukan mengikuti modal.
5. Seluruh anggota persero dalam perseroan syariah adalah pemilik perusahaan. Sedangkan yang memiliki kewenangan mengelola adalah pengelola, meskipun dengan peran dan fungsi yang berbeda.
6. Segala keputusan harus disepakati oleh seluruh anggota persero, meskipun modalnya kecil. Sehingga apabila ada yang tidak sepakat maka tidak boleh melaksanakan aktivitas apapun.
7. Dalam perseroan Syariah jika ada penambahan anggota persero baru dengan penyertaan modal baru, maka harus disetujui oleh seluruh anggota persero sebelumnya (lama), jika semua setuju, maka perseroan yang lama dibubarkan terlebih dahulu serta melakukan tutup buku, baru kemudian melakukan akad baru karena ada penambahan jumlah persero dan modal baru.

8. Jika ada satu anggota persero yang tidak setuju dalam suatu keputusan dan tetap dalam ketidaksetujuannya, maka perseoran itu harus dibubarkan dengan mengikuti ketentuan pembubarna perseroan Syariah. Setelah bubar jika persero yang lain ingin melanjutkan kembali perseroannya maka dapat melakukan akad baru lagi.
9. Perseroan Syariah tidak boleh bersifat tetap. Keberlangsungan perseroan Syariah berdasarkan kesepakatan para anggota persero.
10. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan modal, namun dalam hal kerugian didasarkan pada persentase modal yang sudah diertakan diawal. Namun bagi pengelola yang hanya terlibat tenaga tanpa modal, maka tidak menanggung kerugian dari sisi finansial, dikarenakan sudah mengalami kerugian dari sisi waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan tanpa gaji.

Adapun perseroan Syariah yang sesuai dengan akad-akad syari dalam Islam ada 5 macam bentuk, yaitu perseroan inan, perseroan abdan, perseroan mudharabah, perseroan wujuh dan perseroan mufawadhah. Istilah perseroan Syariah juga biasa disebut dengan istilah syirkah

5. SIMPULAN

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun. Pertumbuhan aset perbankan Syariah tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan Syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun pada September 2020.

Pekembangan Perbankan Syariah cukup menjanjikan, namun apa yang dilakukan ternyata memiliki permasalahan mendasar yaitu dari sisi bentuk perbankan Syariah yang mengadopsi konsep perseroan yang tidak syari. Oleh karena itu rekonstruksi perbankan Syariah harus mencakup poin yang utama yaitu memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, dan inilah yang harus dilakukan. Selain itu, poin rekonstruksi selanjutnya adalah memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi perbankan Syariah sudah sesuai dengan pemikiran Qardhawi. Adapun rekonstruksi perbankan syariah di Indonesia yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki akad perseroan yang ada pada perbankan Syariah agar sesuai dengan rukun dan syarat perseroan Syariah, diantaranya ada dua pihak yang berakad, adanya pengelola, dan bentuk perseroan bersifat tidak tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2012). *Menggugat bank syariah : Kritik atas fatwa produk perbankan syariah*. Bogor: Al Azhar Press
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>
- Condro Triono, Dwi. (2020). *Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT*. Yogyakarta : Daaruts Tsaqofi
- Mahmud. (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Manan, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok : Kencana

- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Mestika, Zed. (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1), 25–45. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10808>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025*. Jakarta : Menara Radius Prawiro.
- Saidi, Z. (2010). *Tidak syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*. Yogyakarta : Delokomotif
- Sholahuddin, M. (2018). Rekonstruksi sistem pendanaan ibadah haji dengan gadai emas di perbankan syariah. *The National Conference on Management and Business (NCMAB)*, 2018(30), 601–610. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sRcqq0sAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=sRcqq0sAAAAJ:hFOr9nPyWt4C
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sumitro, warkum. (1996). *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Sjahdeini, Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana.

**ANALYSIS OF THE ROLE OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT DISTRIBUTION IN
ENCOURAGING THE REDUCTION OF THE POOR POPULATION IN DEMAK
REGENCY, INDONESIA**

Supriaman¹, Abd. Mubaraq²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat struktur ekspor. KUR juga memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan UMKM dalam menghasilkan produk yang kemudian dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Salah satu usaha untuk mengembangkan UMKM adalah menyalurkan kredit untuk mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran penyaluran KUR dalam mendorong pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak, Indonesia. Hasil analisis ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan desain dan pelaksanaan program KUR agar program ini benar-benar mampu secara optimal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan *working paper* ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik penyaluran KUR secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi penulis untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antar variabel KUR dengan variabel kinerja UMKM (seperti aset bisnis, kesempatan kerja, dan pendapatan) dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal.

JEL: F61, G21

Kata Kunci : Penyalur Kredit Usaha Mikro, Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin

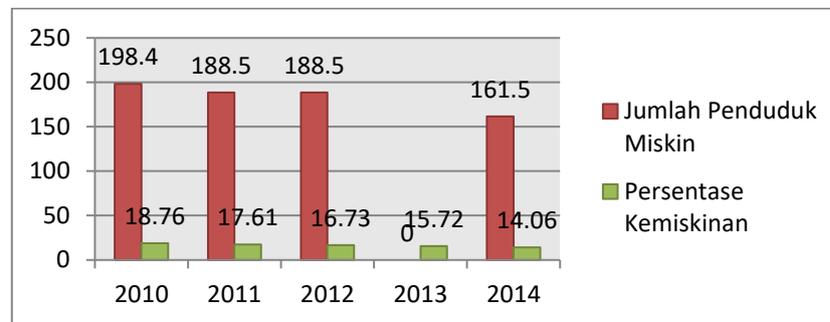
1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sistem ekonomi yang memperhatikan rakyat kecil dan juga merupakan salah satu wujud dari inisiatif pemerintah dalam menanggulangi krisis global. Hal ini disebabkan UMKM memiliki potensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat lokal, sehingga dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Beberapa studi mengenai UKM yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada masa krisis, usaha skala kecil mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding usaha besar. Selain berperan sebagai penyangga perekonomian nasional, UKM berperan positif dalam membuka lapangan kerja maupun mengatasi kemiskinan, terutama di saat banyak usaha besar berguguran (Mangani *et al*, 2019).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Demak, yaitu masih tingginya persentase kemiskinan Kabupaten Demak di bandingkan persentase kemiskinan secara nasional, rata-rata jumlah dan persentase penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan dan merupakan suatu kenyataan yang membuat kita prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan di tujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan

secara bersama-sama, sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Berikut ini bisa kita lihat data perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Demak sebagaimana terlihat pada Grafik 1

Grafik 1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Demak tahun 2010-2014



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2015)

Berdasarkan Grafik 1, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak mengalami trend menurun dari 2010 sampai tahun 2014, tetapi menurunnya persentase kemiskinan di Kabupaten Demak belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, rata-rata kondisi masyarakat kecil yang hidup dibawah garis kemiskinan masih terlihat miskin, karena belum merasakan secara langsung kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, maka dari itu, pemerintah perlu mengambilkan suatu kebijakan yang efektif demi mengeluarkan penduduk dari masalah kemiskinan.

2. KAJIAN LITERATUR

Kredit usaha rakyat telah memiliki peran penting dalam memperluas akses UKM untuk membiayai ekonomi transisi dan pasar negara-negara berkembang, seperti halnya boom pinjaman yang di alami oleh negara-negara di Eropa tengah dan timur selama dekade terakhir (ERBD, 2006). Haiss dan Kichler, (2009), memperkirakan bahwa di seluruh ekonomi transisi program kredit usaha rakyat memiliki peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Relevansi Kredit Usaha Rakyat terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam membangun suatu kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pendapatan bagi pelaku UKM (Beck et al., 2015).

Tujuan diluncurkannya KUR Retnadi, (2008) adalah, (i) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (ii) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; (iii) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Menurut Retnadi, (2008), meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (*grass root*). Sebelum adanya program KUR, pemerintah telah mengeluarkan beberapa program pekreditan bagi UMKM, seperti KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi), KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) , dan KUMK (kredit usaha mikro kecil). Namun, terdapat perbedaan yang mendasar diantara KUR dengan kredit tersebut, yaitu dalam hal agunan, KUR merupakan kredit tanpa agunan

namun dijamin oleh pemerintah, sedangkan kredit tersebut merupakan kredit yang memerlukan agunan untuk mengakses.

KUR menurut Kusmuljono, (2009), adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMK & K harus merupakan usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Dimana sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank. Sasaran KUR adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan. KUR terbagi dua yaitu KUR ritel yaitu KUR yang memiliki plafond maksimal Rp.500 juta dan KUR mikro yaitu KUR yang memiliki plafond maksimal 5 juta Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Ada enam bank yang menjadi penyalur KUR 8 termasuk Mikro yaitu bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Mandiri serta Bank Bukopin.

Kusmuljono, (2009), mengatakan dalam bukunya bahwa dalam UMKM sedikitnya mencakup dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok tersebut. Misalnya, di United Kingdom mengelompokkan usaha dalam kriteria usaha kecil jika mempunyai karyawan 1 sampai dengan 200 orang; di Jepang antara 1 sampai dengan 300 orang; di USA antara 1 sampai dengan 500 orang.

3. METODA PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulis ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan bagaimana dampak penyaluran dana kredit usaha rakyat terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi penulis untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antar variabel KUR dengan variabel pengurangan jumlah penduduk miskin. Untuk mendukung metode deskriptif, dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis komparasi. Teknik komparasi memungkinkan penulis membandingkan penyaluran KUR antar waktu dan kemiskinan antar waktu, serta melihat dampak realisasi dana KUR terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Data dan informasi yang digunakan working paper ini sebagian besar merupakan data sekunder, yang diambil dari dari laporan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk melihat peranan alokasi dana KUR terhadap pengentasan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program KUR merupakan program untuk memperlebar akses UMKM terhadap kredit perbankan melalui skema penjaminan kredit parsial (partial credit guarantee scheme) yang diberikan secara otomatis (automatic guarantee). Dalam program KUR, peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan didesain untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi rumah tangga miskin (RTM). Dalam konteks ini, secara implisit terlihat bahwa program KUR didesain mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi RTM (P2E LIPI, (2014).

KUR merupakan program pemberian akses UMKM terhadap perbankan berbasis tingkat bunga pasar (nonsubsidi bunga). Dana yang disalurkan dalam program KUR sepenuhnya merupakan dana pihak ketiga (DPK) milik perbankan. Pemerintah hanya memberikan insentif dengan menjamin sebagian risiko kredit (70–80 persen) melalui lembaga penjaminan. Perusahaan penjaminan milik pemerintah (Jamkrindo, Askkrindo, Jamkrida Jatim, dan Jamkrida Bali) berperan sebagai lembaga penjaminan KUR. Karena dana KUR merupakan dana milik perbankan, maka mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank pelaksana itu sendiri dengan prinsip-prinsip kredit komersial. Pemerintah hanya menentukan persyaratan umum, misalnya nilai kredit per nasabah untuk KUR Mikro adalah 0–Rp20 juta per debitur dan Rp20 juta–Rp500 juta untuk KUR Retail.

Tabel 1
 Realisasi Alokasi Dana Kur dan Jumlah Penduduk Miskin
 di Kabupaten Demak 2010-2015

Tahun	Realisasi Dana KUR	Jumlah Penduduk Miskin
2010	27,345,287	198,4
2011	37,402,389	188,5
2012	35,026,271	188,5
2013	101,650,304	172,0
2014	28,860,175	161,5
2015	50,610,398	160,9

Sumber: Demak Dalam Angka, (2017).

Sebelum menganalisis dampak realisasi dana KUR terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak, tidak ada salahnya membahas terlebih dahulu secara garis besar perkembangan dana KUR di Kabupaten Demak dari 2010-2015. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 1, perkembangan realisasi alokasi dana KUR di Kabupaten Demak mengalami trend yang fluktuasi, perkembangan realisasi dana KUR di Kabupaten Demak setiap tahunnya memberikan gambaran bahwa rasio dana KUR memberikan dampak atau memiliki peranan dalam mengambil bagian dalam proses pengentasan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak, peran dana KUR paling penting adalah penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM, UMK yang paling banyak menciptakan kesempatan kerja, karena memang selain sangat padat karya, kelompok usaha ini jumlahnya paling banyak dibandingkan jumlah kelompok skala lainnya di Kabupaten Demak.

Sektor industri kini merupakan sektor semakin pesat perkembangannya dimana sumbangan atau kontribusinya menempati urutan paling pertaman menyumbang penyusunan PDRB di Kabupaten Demak pada tahun 2015 sektor industri menyumbang dalam pembentukan PDRB sebesar 27,75 persen (BPS, 2015). Menurut dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak (2015), unit usaha Kabupaten Demak sebanyak 7,580 unit usaha, dengan tenaga kerja sebanyak 24,626 orang tenaga kerja. Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena beberapa alasan. Pertama, sektor-sektor itu memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas. Kedua, *backward* dan *forward linkage* sektor-sektor tersebut terhadap sektor ekonomi lainnya sangat tinggi. Ketiga, khusus untuk sektor industri, berkembangnya sektor ini memungkinkan Kabupaten Demak menikmati secara optimal proses nilai tambah di dalam negeri.

Dalam konteks percepatan pengurangan kemiskinan, berkembangnya sektor-sektor di atas juga menjadi sangat krusial. Sektor pertanian—termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan—menjadi kantong dari konsentrasi orang miskin. Lebih dari itu, studi yang dilakukan Adam (2010), menunjukkan

bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan industri memiliki kemampuan menekan angka kemiskinan masing-masing 4 dan 6,5 kali lebih kuat dibandingkan dengan sektor non-tradable, termasuk perdagangan. Peranan Realisasi dana KUR sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di ekonomi rendah. Pengembangan dan penguatan UMKM selalu berpijak pada berapa besar suntikan dana kredit dari pemerintah, karena UMKM membutuhkan peranan realisasi dana untuk meningkatkan usaha dan akan akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat.

5. SIMPULAN

Kredit usaha rakyat (KUR) memberikan dampak dan kontribusi dalam mengeluarkan kehidupan masyarakat yang hidup di lingkaran kemiskinan, besar dan kecilnya realisasi dana Kredit usaha rakyat (KUR) sangat menentukan kondisi ekonomi masyarakat yang bergerak di industri kecil dan menengah (UMKM). UMKM adalah industri yang langsung menerapkan kegiatan usahanya yang didukung oleh dana KUR, kondisi kemiskinan di Kabupaten Demak memiliki trend yang positif, karena perkembangan realisasi KUR di Kabupaten cukup baik dampaknya terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, sekalipun masih bersifat fluktuasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2010. "The Role of SMEs in the Indonesia Industrialization." *Economic and Finance in Indonesia*. 45 (1):15–30.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, data jumlah dan persentase kemiskinan 2015.
- Demak Dalam Angka, Realisasi Kredit Usaha Rakyat, 2015.
- Haiss, Peter dan Kichler, Elisabeth. 2009. *Leasing, Credits and Economic Growth : Evidence for Central and South Eastern Europe*. EI (Eropa Institute) Working Paper
https://www.researchgate.net/publication/288701733_Kredit_Perbankan_Syariah_Dalam_Pusaran_Stabilitas_dan_Pertumbuhan_Ekonomi.
- Ktut Silvanita Mangani, Yusman Syaukat, Bustanul Arifin and Mangara Tambunan, 2015. *Economic Behavior Of Micro And Small Business Households In A Branchl Ess Banking System, Department of Magister Management, Graduate School, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 10430, Indonesia, Department of Resource and Environmental Economics, FEM, Bogor Agricultural University, Bogor, 16680, Indonesia, Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung, Lampung, 35145, Indonesia., Journal of Indonesian Economy and Business Volume 34, Number 1, 2019, 60– 81*
- Kusmuljono, B.S, (2009), *Menciptakan kesempatan rakyat berusaha*. IPB Press. Bogor.
- Retnadi, Djoko. *Economic Review. Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Hambatan dan Tantangan*. Juni 2008.
- TNP2K.2014. *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans*. Jakarta : TNP2K. Lending," *Journal of Monetary Economics* 53, 2131-63.

**ANALYSIS OF INTERNATIONAL TANJUNGPURA PORT DEVELOPMENT IMPACT ON
SOCIAL ECONOMICS OF THE PEOPLE SUNGAI KUNYIT DISTRICT IN MEMPAWAH
REGENCY**

Ragil Fatin Cempaka¹, Erni Panca Kurniasih²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to calculate whether there are differences in income received by the people of the sungai kunyit district before and after the construction of the tanjungpura international port. The second is to find out whether the change in income can have an impact on the welfare of the community. The form of research is quantitative research using primary data. The data collection method in this study was carried out with interviews, observations, and questionnaires. The sampling technique uses inclusion criteria, criteria by which the subject of the study qualifies to be a sample. The sample in this study was 40 people. Paired sample t-test were used in data processing because the paired samples were about the before and after incomes in sungai kunyit people in the presence of the tanjungpura international port. The results showed that there was a significant difference in income before and after the existence of the tanjungpura international port. The results of the study also showed that in the aspects of education, health facilities, home conditions in the community became better. The number of goods in property ownership is also increasing.

JEL: E24, J21, O18

Keywords: Port, Income, Public Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung apakah terdapat perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat kecamatan sungai kunyit sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura. Kedua untuk mengetahui apakah dari perubahan pendapatan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Bentuk penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuisioner. Teknik penarikan sampel menggunakan kriteria inklusi, kriteria dimana subjek penelitian memenuhi syarat menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Uji-t kelompok berpasangan digunakan dalam pengolahan data karena sampel yang berpasangan mengenai pendapatan sebelum dan sesudah pada masyarakat sungai kunyit dengan adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada aspek pendidikan, fasilitas kesehatan, kondisi rumah pada masyarakat menjadi lebih baik. Jumlah barang pada kepemilikan harta benda juga semakin bertambah.

JEL: E24, J21, O18

Kata Kunci : Pelabuhan, Pendapatan, Kesejahteraan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pelabuhan internasional kijing merupakan salah satu alternatif lokasi pembangunan pelabuhan internasional sebagai lokasi yang paling layak digunakan dengan memiliki aspek 10 penilaian dalam kondisi tempat yang akan dibangun seperti kedalaman pantai, arus dominan, pasang surut, gelombang, sedimentasi, alur pelayaran, aksesibilitas, ketersediaan lahan, fasilitas pendukung dan kondisi lahan (Wahono, 2015). Pada dasarnya pelabuhan mempunyai peran penting dalam perkembangan industri, perdagangan, dan jasa. Hal ini disebabkan karena pelabuhan merupakan salah satu prasarana transportasi yang cukup vital bagi sebuah negara, terutama pada negara maritim seperti Indonesia. Pelabuhan juga merupakan salah satu usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian baik nasional maupun daerah dikarenakan dengan adanya pelabuhan maka kegiatan ekonomi suatu negara atau daerah akan menjadi lebih lancar. Menurut Triatmodjo dalam Zulkifli (2017), berdasarkan pada fakta yang ada pada beberapa negara, barang-barang ekspor dan impor sebagian besar dikirim melalui jalur laut membutuhkan pelabuhan atau tempat untuk bertambat, meskipun rute perjalanan yang dituju dapat dilalui oleh alat transportasi lain.

Pelabuhan Internasional Tanjungpura dulunya dikenal sebagai Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Pelabuhan tersebut akhirnya berganti nama menjadi Pelabuhan Internasional Tanjungpura. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan dua nama pelabuhan, yakni Pelabuhan Kijing Mempawah dan Pelabuhan Internasional Tanjungpura. Nama yang akan ditetapkan sebagai nama pelabuhan, akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan prosedur dan tahapan yang diatur dalam ketentuan penyelenggaraan nama rupabumi dan telah diresmikan pengoperasian Pelabuhan Internasional Tanjungpura oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura di Kalimantan Barat dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat. Pelabuhan ini akan menjadi salah satu dari tujuh terminal penghubung yang dapat memperkuat konektivitas nasional. Juga Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan yang , memiliki peran penting untuk melayani rute alur pelayaran antar negara maupun antar daerah. Keberadaannya juga akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, rancangan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional terletak di pantai kijing, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah. Pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura tentunya dapat memberikan peluang pada daerah tersebut untuk menjadi daerah industri. Ini ditunjukkan dengan munculnya perusahaan yang mulai membangun perusahaan di sekitar pelabuhan. Seperti PT. ANTAM Tbk, PT. Wilmar, Pupuk, perusahaan konstruksi penyimpanan alat berat yang dibangun pada desa yang berbeda-beda di Kecamatan Sungai Kuyit. Hal ini dapat memicu berkembangnya daerah Kecamatan Sungai Kuyit pada sektor industri. Pembangunan ini juga akan memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Selama ini sumber daya alam seperti Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit hanya diekspor melalui provinsi lain dikarenakan Kalimantan Barat belum memiliki pelabuhan besar yang dapat dilabuh kapal besar untuk kegiatan ekspor sehingga tidak ada penerimaan hasil pajak ekspor. Jika pelabuhan telah sepenuhnya beroperasi maka Crude Palm Oil (CPO) dari Kalimantan Barat dapat langsung diekspor dari pelabuhan internasional tanjungpura dan dapat memberikan dampak ekonomi bagi Kalimantan Barat khususnya dari pungutan pajak ekspor.

Kecamatan Sungai Kuyit mencakup 12 desa yang terdiri dari desa Semudun, Semparong Parit Raden, Mendalok, Sungai Dungun, Sungai Limau, Sungai Kuyit Laut, Sungai Kuyit Dalam, Sungai Kuyit Hulu, Bukit Batu, Sungai Bundung Laut, Sungai Duri I, dan Sungai Duri II. Dalam penelitian

ini desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut merupakan desa yang terkena dampak langsung dari pelabuhan internasional karena pelabuhan dibangun diantara dua desa tersebut sehingga menjadi lokasi penelitian dilaksanakan.

Tabel 1 Banyaknya Jenis Usaha di Desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut Tahun 2020

Jenis Usaha	Desa		Total
	SungaiKunyit Laut	Sungai Bundung Laut	
Minimarket/Swalayan	0	0	0
Toko Kelontong dan Sembako	21	15	36
Restoran	1	0	1
Kedai/Warung	15	2	17
Hotel	0	0	0
Motel/Losmen/Wisma	0	0	0

Sumber : BPS Kecamatan Sungai Kunyit

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut membuka usaha toko kelontong dan sembako dengan jumlah total 36 toko. Mayoritas masyarakat memilih untuk mendirikan toko sembako dan kelontong karena bagi mereka usaha ini cukup menguntungkan dengan alasan semua golongan masyarakat akan membutuhkan bahan pokok seperti minyak, beras, gula, peralatan rumah tangga, dan lainnya untuk menunjang aktifitas hidup sehari-hari yang akan didapatkan pada toko sembako dan kelontong. Disusul dengan warung/kedai dengan jumlah total 17 toko. Masyarakat memilih usaha ini dikarenakan dapat dengan mudah mendirikannya dengan modal yang tidak terlalu besar. Hanya terdapat 1 restoran pada desa Sungai Kunyit Laut dikarenakan harga makanan di restoran yang relatif lebih mahal sehingga masyarakat setempat memilih untuk memasak sendiri agar menghemat biaya pengeluaran. Tidak terdapat tempat penginapan seperti hotel dan wisma dikarenakan hampir semua masyarakat disana mempunyai tempat tinggal sendiri. Tidak terdapat swalayan/supermarket di kedua desa tersebut dan hanya terdapat pasar tradisional bagi masyarakat setempat yang tentunya harga beli jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di supermarket/swalayan.

Hasil awal survei terhadap 6 responden, semenjak adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura pendapatan masyarakat desa Sungai Kunyit Laut dan Bundung Laut melalui usaha yang dijalani mengalami kenaikan pendapatan dari sebelumnya. Bahkan pada jenis usaha katering makanan keuntungan bersih yang didapat melebihi angka 100% yakni sebesar 116%. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan jasa katering untuk konsumsi para pegawai perusahaan pada jam makan siang dan menyediakan konsumsi untuk tamu luar yang datang memantau proyek. Diikuti dengan toko sembako yang mengalami kenaikan pendapatan sebesar 80% yang disebabkan oleh penambahan penduduk yang memerlukan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari, dan dibangunnya usaha makan dan minum baru disekitar proyek yang tentunya banyak memakai bahan pokok seperti gula, garam, minyak, telur yang didapatkan dari toko sembako. Untuk jenis usaha rumah makan dan kedai/warung masing-masing mengalami kenaikan pendapatan sebesar 65% dan 63%. Pada jam istirahat proyek sering terlihat pekerja dari pelabuhan menikmati makan dan minum pada rumah makan maupun kedai/warung. Banyak masyarakat yang memerlukan kebutuhan rumah tangga seperti alatmemasak, alat bersih-bersih, dan lain sebagainya yang menyebabkan keuntungan pada toko kelontong hingga mengalami kenaikan sebesar 56%. Jenis usaha kaki lima hanya mengalami peningkatan 46% dikarenakan mayoritas pedagang kaki lima berjualan pada waktu tertentu saja seperti hanya di pagi hari ataupun malam hari.

Pada proses pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura tidak dipungkiri bahwa akan memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa Sungai Kuyit Laut dan Sungai Bundung Laut. Hal ini disebabkan karena mereka terkena langsung dampak dari pembangunan tersebut. Dampak yang ditimbulkan pada pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura antara lain adalah terjadinya perubahan pendapatan masyarakat yang meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan masuknya tenaga kerja luar untuk proyek pembangunan yang menimbulkan penambahan pelanggan pada usaha/toko masyarakat yang akan menguntungkan masyarakat yang membuka usaha seperti usaha warung makan, sewa kontrakan, usaha warung kopi, dan usaha lainnya. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana keberadaan pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura yang ada di Sungai Kuyit dalam memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menghitung apakah terdapat perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan. (2) Untuk mengetahui apakah dari perubahan pendapatan yang diperoleh dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Eksternalitas adalah dampak samping dari tindakan suatu pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan. (Nugraha, dkk. 2018). Istiqomah, dkk (2020) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, suatu kegiatan mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya. Aktivitas yang dilakukan melalui mekanisme pasar tidak akan menimbulkan masalah, namun aktivitas yang dilakukan tidak melalui mekanisme pasar dapat menimbulkan berbagai masalah. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar disebut eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang disebabkan oleh suatu aktivitas atau transaksi yang dikenakan atau ditimpahkan beberapa pihak diluar aktivitas atau transaksi. Fardani (2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah merupakan sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat. lain yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (Disbudpar Banten, 2013) dikelompokkan menjadi tiga indikator :

1. *Direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan.
2. *Indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan.
3. *Induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Langumadi dan Harudu (2017) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Maruwae dan Ardiansyah (2020), menjelaskan kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dapat menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Rosni, 2017). Kesejahteraan adalah keadaan dimana setiap orang, baik individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat hidup aman, tenang, dan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Azzahra, dkk. 2021). Menurut Hanum dan Safuridar (2018), Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang dinilai akan

memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dalam ruang lingkup paling kecil di masyarakat.

Menurut Suciadi, dkk (2020) dengan hadirnya perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan Eksternalitas positif terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar. Seperti meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peluang usaha milik masyarakat (UMKM) seperti penduduk yang berwirausaha dengan membuka toko sembako, rumah makan, warung, bengkel, jasa parkir motor dan masih banyak lagi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. Juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan cara triangulasi dari beberapa sumber seperti jurnal dan buku lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Penelitian oleh Tuaputy et al, (2014) ini membahas dengan adanya Pertambangan Emas di Kabupaten Baru Maluku memberikan dampak positif berupa lapangan pekerjaan dan kenaikan pendapatan. Sedangkan dampak negatif yaitu para penduduk lokal yang semula bekerja sebagai petani dan nelayan malah beralih menjadi penambang. Dampak negatif lainnya penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembuangan limbah yang tidak terkontrol serta penurunan produksi perikanan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Adapun alat analisis untuk menunjang penelitian yaitu berupa aplikasi SPSS dan perhitungan statistik dengan Microsoft Office Excel.

Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak yang timbul antara lain: peningkatan pendapatan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sejahtera yang akan diukur dengan indikator pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kepemilikan harta benda.

3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Sungai Kuyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut yang merupakan desa terdekat dan desa yang terkena dampak langsung dari pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura. Waktu yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga April 2022 yang diperoleh menggunakan data primer yang

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kuisioner. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh masyarakat yang memiliki sebuah usaha di sekitar pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura berjumlah 90 orang. Metode penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Menurut Hidayat (2007) Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian memenuhi syarat menjadi sampel. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura dan pemilik usaha/toko yang sudah mendirikan usaha sejak sebelum adanya proyek pembangunan pelabuhan internasional hingga kini masih tetap berjalan. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah masyarakat dengan kriteria yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel pada penelitian yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 40 orang. Berikut ini adalah variabel yang akan digunakan dalam penelitian :

Variabel	Indikator
Pendapatan Masyarakat	- Perubahan TingkatPendapatan
Kesejahteraan Masyarakat	- Pendidikan - Fasilitas Kesehatan - Bangunan Rumah - Kepemilikan Harta Benda

Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Masyarakat

Seluruh jumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang terkena dampak dari pelabuhan tanjungpura terutama para pelaku usaha di sekitar proyek pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura selama kegiatan pembangunan berlangsung maupun sebelum pembangunan dilaksanakan.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi untuk menunjang kualitas hidup yang dapat menciptakan suasana sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah dengan adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertamadan kedua mengenai perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 40 sampel. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Uji-t kelompok berpasangan (*paired sample t-test*). Paired sampel t-test digunakan untuk uji beda pada sampel yang berpasangan. Pada hal ini mengenai pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura.

$$t = \frac{\bar{X}_D}{s_D/\sqrt{n}} \quad s_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

D = selisih nilai skor X_1 dan X_2

n = jumlah sampel

\bar{X}_D = Rata-rata

S_D = standar deviasi D

Hasil uji beda t dapat dilihat melalui nilai signifikansi t pada hasil output SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis ditolak. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi maka hipotesis diterima (Ghozali, 2006).

Kriteria uji :

- Nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 ditolak.
- Nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_1 diterima.

Hipotesis :

- H_0 : Tidak ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura.
- H_1 : Adanya perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura.

Data yang sudah diperoleh menggunakan kuisioner akan diolah dengan menggunakan program statistik dan analisis data yakni SPSS sebagai alat analisis dalam menjawab tujuan pertama mengenai perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura dan Microsoft Excel sebagai alat analisis dalam menjawab tujuan kedua mengenai kesejahteraan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Sungai Kunit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunit terhadap 40 responden mengenai dampak keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura, maka didapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada tabel yang akan dibagi menjadi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan jenis usaha. Responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak mendominasi dengan persentase sebesar 82% lebih besar dibandingkan responden berjenis kelamin perempuan yang hanya memiliki persentase sebesar 18%. Jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dikarenakan posisinya sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, beberapa perempuan juga ada yang berperan sebagai kepala keluarga dengan beberapa alasan seperti cerai hidup, cerai mati, pasangan tidak bekerja, dan lain sebagainya. Sehingga mereka diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Tingkat umur mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktifitas secara produktif maupun konsep berpikir. Responden pada penelitian ini terbanyak berada pada interval umur 40-49 tahun dengan persentase sebesar 40%. Pada umur tersebut, responden telah memasuki kategori usia senior. Mereka berperan sebagai kepala keluarga yang menjalankan usaha sejak dibangunnya proyek pelabuhan internasional pada tahun 2016 ataupun lebih awal. Mereka dengan usia senior tentunya lebih lama menetap sehingga mereka mengetahui cukup dalam dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA/Sederajat lebih mendominasi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yakni sebesar 53% diikuti dengan tingkat pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan persentase sebesar 30%. Pada tingkat SD/MI/Sederajat hanya terdapat 2 responden dengan persentase sebesar 5%. Faktor ekonomi yang tidak mendukung menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja seperti berkebun, bertani, melaut, membuka usaha, dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang. Tingkat Diploma sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 7%, dan pada tingkat pendidikan sarjana sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 5%. Alasan lain mengapa hanya sedikit responden yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selain terkendala masalah biaya adalah pada saat itu responden mempunyai kesadaran pendidikan yang masih rendah. Mereka beranggapan sekolah hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah sejauh mana pendidikan dapat menghasilkan nilai atau uang. Beberapa dari mereka memilih untuk langsung bekerja.

Toko sembako/toko kelontong dan kedai/warung merupakan jenis usaha terbanyak dari responden dengan masing-masing persentase sebesar 28% dan 20% dikarenakan masyarakat tidak akan terlepas dari belanja kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, minyak, telur dan lain sebagainya. Masyarakat beranggapan bahwa usaha sembako dan kelontong pasti dibutuhkan masyarakat dimanapun dan akhirnya melihat peluang ini untuk membuka usaha kelontong dan sembako. Sedangkan alasan masyarakat yang membuka usaha kedai/warung mereka menyampaikan untuk mendirikan usaha tersebut tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan beberapa responden mendirikan usaha kedai/warung sederhana hanya pada halaman rumah mereka. Disusul dengan jenis usaha kaki lima yang mayoritas berjualan makan dan minum sebesar 18%.

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Responden	(%)
Rumah Makan	3	7%
Kedai/Warung	8	20%
Kaki Lima	7	18%
Toko Sembako dan Toko Kelontong	11	28%
Toko ATK	2	5%
Buah dan Sayur	3	7%
Konter Pulsa dan	3	7%
Ayam Potong	2	5%
Potong Rambut	1	3%
Jumlah	40	100

Sumber : Data primer diolah, 2022

Perbedaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji paired t-test dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan pada masyarakat pelaku usaha sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₀ : Tidak ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura.
- H₁ : Adanya perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura.

Data akan diolah dengan menggunakan SPSS 25.0 untuk kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui apakah secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan, maka dapat dilihat dari tabel uji t berpasangan dibawah.

Tabel 3. T-Test Berpasangan

	Paired Difference		T	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
		Lower				Upper
Sesudah - Sebelum	296.400	201.920,6	390.879,3	6,34	39	0,0005

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25.0

Untuk melihat t tabel, maka berdasarkan degree of freedom (df) dengan besarnya N-1 (40-1) yaitu 39 dan derajat kepercayaan (CI) sebesar 95% dengan tabel dua arah didapatkan angka t tabel sebesar 2,02. Nilai t hitung didapatkan sebesar 6,34 yang diartikan bahwa angka t hitung (6,34) lebih besar dibandingkan t tabel (2,02) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima yang

artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan. Selain itu, perhitungan uji statistik diperoleh Sig (2-tailed) sebesar 0,0005. Karena Sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Pada penelitian ini, rata-rata pendapatan berkisar antara 201.920 hingga 390.879 dengan rata-rata pendapatan 296.400.

Perubahan Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan masyarakat sebelum adanya pelabuhan paling rendah sebesar Rp. 150.000 pada jenis usaha kaki lima dan paling tinggi sebesar Rp. 1.700.000 pada usaha ayam potong. Sedangkan setelah adanya pelabuhan pendapatan paling rendah sebesar Rp. 202.500 pada jenis usaha kaki lima dan paling tinggi sebesar Rp. 3.094.000 pada jenis usaha ayam potong. Kenaikan omzet (%) paling tinggi terdapat pada jenis usaha toko sembako dan ayam potong yakni sebesar 85% dan 82%. Alasan toko sembako dan ayam potong mengalami kenaikan omzet lebih dari 80% dikarenakan terjadinya kenaikan harga pada pasar nasional dan banyak bermunculan usaha makan dan minum baru termasuk catering makanan untuk perusahaan yang memerlukan banyak bahan baku makanan seperti beras, minyak goreng, gula, garam, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya. Begitu juga dengan ayam yang menjadi menu utama dalam usaha catering dan usaha rumah makan. Kenaikan omzet (%) terendah terdapat pada jenis usaha konter pulsa dan kuota yang hanya meningkat 20% dari awal. Ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan pembelian pulsa dan kuota melalui dompet digital seperti aplikasi dana dan m- banking.

Tabel 4 Jumlah Pelanggan Rata – Rata Perhari

Sebelum			Sesudah		
Jumlah Pelanggan/hari (orang)	Responden	%	Jumlah Pelanggan/hari (orang)	Responden	%
1-10	11	27%	1-10	2	5%
11-20	18	45%	11-20	14	35%
21-30	8	20%	21-30	16	40%
31-40	3	8%	31-40	5	12%
≥ 40	-	-	≥ 40	3	8%
Jumlah	40	100	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 4 menunjukkan perbandingan jumlah pelanggan rata – rata perhari sebelum dan sesudah keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura pada usaha responden. Pelanggan terlihat meningkat dikarenakan penambahan jumlah penduduk dan masuknya tenaga kerja luar untuk proyek pembangunan pelabuhan internasional tanjungpura. Sebelum adanya keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura pelanggan dengan jumlah > 40 orang memiliki persentase 0% dikarenakan penduduk pada saat itu belum terlalu ramai dan tidak terdapat pekerja untuk proyek pelabuhan. Setelah adanya pelabuhan internasional tanjungpura jumlah pelanggan > 40 meningkat dengan persentase sebesar 8% yang disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan masuknya masyarakat luar yang bekerja untuk proyek pelabuhan internasional tanjungpura. Pada pelanggan dengan jumlah 31-40 orang pada saat sebelum adanya keberadaan pelabuhan internasional sebesar 8% bertambah menjadi 12%.

Terjadi kenaikan jumlah pelanggan pada jumlah 21-30 dengan persentase sebelum sebesar 20% menjadi 40%. Rata – rata terjadi penambahan jumlah pelanggan pada jenis usaha yang menyediakan makan dan minum seperti kedai/warung, rumah makan, dan kaki lima. Ini dikarenakan banyak pekerjayang mencari makan ketika jam makan mereka di sekitar proyek pelabuhan. Jenis usaha toko sembako dan kelontong juga mengalami banyak penambahan pelanggan dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin bertambah membuat masyarakat banyak yang mendatangi toko sembako dan kelontong untuk mencari barang kebutuhan sehari-hari.

Tabel 5 Perbandingan Pendapatan Perbulan Responden

Sebelum			Setelah		
Pendapatan	Responden	%	Pendapatan	Responden	%
Rp. 1.000.000 - 1.999.999	7	18%	Rp. 1.000.000 - 1.999.999	-	-
Rp. 2.000.000 - 2.999.999	13	33%	Rp. 2.000.000 - 2.999.999	5	13%
Rp. 3.000.000 - 3.999.999	9	22%	Rp. 3.000.000 - 3.999.999	9	22%
Rp. 4.000.000 - 4.999.999	6	15%	Rp. 4.000.000 - 4.999.999	14	35%
Rp. \geq 5.000.000	5	12%	Rp. \geq 5.000.000	12	30%
Jumlah	40	100	Jumlah	40	100

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada tabel 9 menunjukkan perbandingan pendapatan perbulan responden sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Pendapatan masyarakat terlihat meningkat dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar akan peluang ekonomi yang ada di sekitar mereka. Keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha dengan bertambahnya orang yang berdomisili maupun pendatang dari luar daerah, bahkan orang yang sekedar lalu lintas pada daerah pelabuhan tentunya akan menambah aktivitas ekonomi yang berujung pada kenaikan pendapatan masyarakat desa. Dilihat dari tingkatan kelompok pendapatan, rata-rata pendapatan masyarakat dahulu berada pada kelompok Rp. 2.000.000-2.999.999 sebanyak 13 responden dengan persentase sebesar 33%. Sebelum adanya keberadaan pelabuhan internasional tanjungpura pendapatan Rp. 1.000.000 – 1.999.999 memiliki persentase sebesar 18%. Setelah adanya keberadaan pelabuhan tingkat pendapatan tersebut berubah menjadi 0%.

Masyarakat sudah tidak lagi mendapatkan pendapatan pada rentang Rp. 1.000.000 – 1.999.999, melainkan meningkat pada pendapatan yang lebih tinggi. Masyarakat menuturkan keadaan ekonomi keluarga mereka saat ini jauh lebih baik dikarenakan pendapatan mereka juga lebih baik dibandingkan pendapatan sebelumnya. Terjadi kenaikan pendapatan paling tinggi pada kelompok pendapatan Rp. 4.000.000- 4.999.999 dengan persentase sebelum sebesar 15% bertambah menjadi 35%. Pendapatan tertinggi kedua setelah adanya pelabuhan pada kelompok pendapatan Rp. >5.000.000 dengan persentase sebesar 30%. Rata-rata responden yang berada pada kelompok pendapatan tertinggi memiliki usaha toko sembako, toko kelontong, dan usaha makan minum. Dikarenakan pada usaha tersebut terdapat penambahan pelanggan serta penambahan produk/item pada jualan. Seperti rumah makan yang menambahkan lauk pauk dan menu baru. Begitu juga dengan usaha toko sembako dan kelontong yang menambah produk jual mereka lebih lengkap dari sebelumnya.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi mereka untuk menunjang kualitas hidup yang dapat menciptakan suasana sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator kesejahteraan masyarakat akan diukur meliputi aspek pendidikan, fasilitas kesehatan, kondisi rumah, dan kepemilikan harta benda. Pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat berupa pengetahuan, sikap yang bijaksana, pola pikir yang rasional, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan juga mampu memperbaiki kesejahteraan pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73% dari responden beranggapan bahwa pendidikan itu sangat penting dan 27% menjawab bahwa pendidikan itu penting dan selebihnya tidak ada yang menganggap pendidikan itu kurang dan tidak penting.

Hal ini menunjukkan bahwa dari hasil penelitian di atas kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi. Pemikiran responden yang menganggap pendidikan itu sangat

penting didasari oleh faktor banyaknya lowongan kerja yang memakai kualifikasi tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat bekerja. Peluang lapangan kerja untuk tamatan perguruan tinggi tentunya lebih luas dibandingkan dengan tamatan sekolah. Mereka juga berharap anaknya dapat menjadi orang yang terdidik dan tumbuh menjadi anak yang lebih sukses dari orang tua. Mereka juga memberikan fasilitas seperti laptop dan kendaraan untuk menunjang pendidikan demi kesuksesan anaknya di masa depan. Kesadaran masyarakat menjadi meningkat juga didorong faktor ekonomi yang mulai membaik setelah adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Meskipun mayoritas responden lulusan SMA dan SMP, mereka tetap berkeinginan kuat agar anaknya meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Tabel 11 menunjukkan bahwa 20% dari responden menjawab pendidikan cukup hingga tingkat SMA, dan 80% lain menjawab pendidikan cukup jika telah sampai tingkat perguruan tinggi. Melihat fenomena tenaga kerja lokal yang terserap di pelabuhan internasional tanjungpura mayoritas bukan lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai buruh kasar di lapangan menyadarkan beberapa responden untuk lebih peduli dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya agar di masa depan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Karena indikasi yang berkembang bahwa sekolah hanya untuk mendapat pekerjaan, responden yang menjawab pendidikan cukup hingga tingkat SMA berpendapat bahwa anak mereka akan segera bekerja setelah lulus di bangku SMA. Terdapat juga beberapa anak dari responden yang tidak memiliki minat untuk lanjut ke perguruan tinggi dan ingin secepatnya bekerja dan menghasilkan uang.

Tabel 6 Bentuk Pengeluaran pada Pendidikan Setelah Adanya Peningkatan Pendapatan

No.	Pernyataan	Responden	Persentase
1	Melanjutkan Pendidikan Anak ke Perguruan Tinggi	14	35%
2	Menyekolahkan Anak ke Luar Provinsi	3	8%
3	Menyekolahkan Anak pada Sekolah/Universitas Swasta	5	13%
4	Menyanggungpui Kebutuhan Sekolah Anak Seperti Seragam, Buku dan Alat Tulis, SPP, Uang Jajan, dan Kebutuhan Lainnya	37	93%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Sebelum terjadinya perubahan pendapatan, diketahui bahwa beberapa kepala keluarga memiliki kendala untuk melanjutkan pendidikan anak ke perguruan tinggi karena masalah biaya. Seiring berjalannya waktu, banyak responden yang berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. Ditambah lagi, dengan adanya pelabuhan internasional membuat usaha mereka mengalami peningkatan omzet yang dapat memberikan fasilitas untuk mendukung kelancaran pendidikan anak mereka. Pada poin nomor 1, terdapat 14 responden yang melanjutkan pendidikan anaknya ke perguruan tinggi dengan persentase sebesar 45%. Sisanya masih menyelesaikan studi wajib sekolah 12 tahun. Poin nomor 2, terdapat 3 responden yang menyekolahkan anak mereka ke luar provinsi dengan persentase sebesar 8%. Poin nomor 3, terdapat 5 responden dengan persentase sebesar 13% yang menyekolahkan anak mereka pada sekolah/universitas swasta yang pada umumnya sekolah/universitas swasta lebih banyak mengeluarkan biaya pendidikan dibandingkan dengan sekolah negeri. Poin nomor 4, terdapat 37 responden dari total 40 responden yang menyanggungpui kebutuhan sekolah anak mereka dengan persentase cukup besar yakni sebesar 93%. Sisanya terdapat 3 responden yang belum menyekolahkan anak mereka.

Pada awal rencana proyek pembangunan pelabuhan, perusahaan yang terlibat telah menjanjikan bahwa masyarakat lokal akan diprioritaskan menjadi tenaga kerja dalam proyek tersebut. Beberapa anggota keluarga ataupun anak responden yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana direkrut menjadi pekerja pada proyek pelabuhan. Untuk lulusan perguruan tinggi akan ditempatkan pada bagian dalam kantor yang akan disesuaikan dengan pendidikan dan keahliannya masing-masing. Fasilitas kesehatan yang sudah ada sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura mengalami

perubahan dengan pola masyarakat pada kebiasaan berobat. Ini terjadi dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat mengalami perubahan kenaikan pendapatan yang akhirnya mendukung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tabel 7 Perbandingan Penggunaan Fasilitas Kesehatan

Tanggapan	Sebelum		Sesudah	
	Responden	%	Responden	%
Puskesmas	29	72%	13	32%
Rumah Sakit	8	20%	16	40%
Dokter Praktik	3	8%	11	28%
Jumlah	40	100%	40	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat sebelum terjadinya perubahan pendapatan mayoritas memilih puskesmas sebagai tempat berobat dengan persentase sebesar 72%. Jarak yang cukup dekat sehingga tidak memerlukan banyak biaya dengan harga yang cukup terjangkau maka masyarakat lebih memilih berobat ke puskesmas. Setelah hadirnya pelabuhan internasional tanjungpura yang menimbulkan peningkatan pendapatan, masyarakat lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit dikarenakan fasilitas yang lebih lengkap dengan persentase sebesar 40% lebih besar dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar 20%. Namun, hingga kini beberapa masyarakat beranggapan bahwa jika masih dapat ditangani oleh puskesmas atau sakit yang tidak cukup parah, mereka masih memilih untuk berobat ke puskesmas terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat yang memilih berobat pada dokter praktik meningkat dengan persentase sebesar 28% lebih besar dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar 8%. Alasan masyarakat memilih berobat pada dokter praktik dikarenakan antrian yang lebih sedikit dibandingkan dengan puskesmas maupun rumah sakit sehingga lebih cepat ditangani tanpa perlu berdesak-desakan. Terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang, mengunjungi rumah sakit tentu menjadi hal yang mungkin dihindari. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan sebuah keluarga. Hakikatnya, setiap manusia membutuhkan rumah yang layak huni dengan kondisi rumah yang memadai. Dengan rumah yang layak huni dan kondisi rumah yang memadai tentunya dapat menunjang kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 8 Anggapan Responden tentang Perubahan Pendapatan yang Diperoleh Dapat Merenovasi Rumah

Tanggapan	Responden	%
Sangat Setuju	11	28%
Setuju	19	47%
Ragu – Ragu	10	25%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	40	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden dengan persentase sebesar 47% setuju dengan anggapan bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha dapat digunakan untuk merenovasi rumah. Sedangkan 11 responden sangat setuju dengan persentase sebesar 28%. Sisanya, 10 responden dengan persentase sebesar 25% memilih ragu-ragu jika perubahan pendapatan tersebut dapat

merenovasi rumah. Beberapa responden yang memilih tanggapan sangat setuju dan setuju telah melakukan renovasi pada bangunan rumah mereka. Sedangkan yang memilih ragu-ragu belum melakukan renovasi pada bangunan rumah mereka dikarenakan mereka lebih memilih menggunakan uangnya untuk hal lain yang lebih penting. Ada juga yang beranggapan asalkan fasilitas di rumah seperti kipas angin, mesin cuci, setrika, kulkas, dan benda rumah tangga lainnya terpenuhi dan dapat melindungi mereka dari hujan, panas, serta badai itu sudah cukup. Namun, tidak dipungkiri suatu saat mereka juga berkeinginan untuk merenovasi rumah.

Tabel 9 Kondisi Fisik Bangunan Rumah

Tanggapan	Sebelum		Sesudah	
	Responden	%	Responden	%
Rumah Dinding Tembok (Permanen)	27	68%	36	90%
Rumah Dinding Kayu (Semi Permanen)	13	32%	4	10%
Jumlah	40	100%	40	100%

Sumber : Data diolah primer, 2022

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa sebelum adanya pelabuhan internasional yang mengakibatkan perubahan pendapatan, sebanyak 13 responden dengan persentase sebesar 32% masih memiliki kondisi fisik bangunan rumah yang terbuat dari dinding kayu (semi permanen). Setelah adanya peningkatan pendapatan, beberapa masyarakat dapat melakukan renovasi pada rumah mereka dan merubah bentuk rumah menjadi rumah permanen dengan dinding tembok yang lebih kokoh. Dapat dilihat pada tabel diatas, hingga sekarang sudah 36 responden dengan persentase sebesar 90% telah memiliki rumah dengan dinding tembok (permanen). Sebanyak 4 responden lain yang hingga kini masih memiliki kondisi fisik rumah dinding kayu (semi permanen), mereka beranggapan bahwa pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk hal yang lebih penting daripada memperbaiki rumah. Seperti ada yang lebih memprioritaskan pendapatannya untuk hal seperti biaya pengobatan orang tua dan pendidikan anak.

Tabel 10 Kepemilikan Rumah

Tanggapan	Sebelum		Sesudah	
	Responden	%	Responden	%
Milik Pribadi	12	30%	27	68%
Milik Orang Tua/Mertua/Anggota Keluarga	22	55%	13	32%
Kontrak Rumah	6	15%	-	-
Jumlah	40	100%	40	100%

Sumber : Data diolah primer, 2022

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa sebelumnya terdapat 12 responden dengan persentase sebesar 30% yang memiliki rumah milik pribadi. Setelah adanya perubahan pendapatan dapat dilihat sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 68% telah memiliki rumah pribadi dimana secara persentase naik sebesar 38% dari awal. Setelah adanya keberadaan pelabuhan tanjungpura yang menyebabkan perubahan pendapatan tidak terdapat lagi masyarakat yang mengontrak rumah. Padahal sebelum itu terdapat 6 responden dengan persentase sebesar 15% memilih tinggal di rumah kontrakan. Tanggapan masyarakat yang memilih tinggal di rumah milik keluarga/orang tua/mertua sebelumnya terdapat 22 responden yang memilih rumah milik keluarga sebagai tempat tinggal. Setelah adanya pelabuhan hanya tersisa 13 responden dengan persentase sebesar 32% yang masih menempati rumah milik keluarga. Beberapa responden yang memilih untuk tetap menempati rumah milik orang tua/mertua/keluarga memiliki alasan seperti harus menemani dan merawat orang tua mereka.

Kepemilikan harta benda merupakan bentuk kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder keluarga yang akan mempermudah kehidupan. Kepemilikan dan kemudahan untuk membeli harta benda yang dimiliki masyarakat tentunya dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat tersebut apakah sudah cukup baik atau belum.

Tabel 11 Kepemilikan Harta Benda Responden

Nama Barang	Sebelum		Setelah	
	Responden	%	Responden	%
Televisi	34	85%	40	100%
Kulkas	37	93%	40	100%
Mesin Cuci	36	90%	40	100%
Microwave	4	10%	11	28%
Motor	38	96%	40	100%
Mobil	5	13%	17	43%
Handphone	40	100%	40	100%
Komputer/Laptop	9	23%	24	60%
Emas/Perhiasan	16	40%	35	88%
Lahan/Tanah	6	15%	16	40%

Sumber : Data diolah primer, 2022

Tabel 11 menunjukkan bahwa kepemilikan harta benda sesudah adanya pelabuhan mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Dari total 40 responden, dapat dilihat pada jenis barang televisi, kulkas, mesin cuci, motor, dan handphone memiliki persentase sebesar 100%. Responden beranggapan bahwa barang-barang tersebut harus dimiliki pada masa kini karena dapat mempermudah kegiatan sehari-hari. Barang berupa komputer/laptop mengalami kenaikan sebesar 37% dari sebelumnya dan digunakan untuk aktivitas ekonomi dan belajar pada pendidikan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Kepemilikan atas mobil mengalami kenaikan 30% dari sebelumnya dikarenakan beberapa masyarakat telah mampu untuk membeli kendaraan roda empat setelah adanya kenaikan pendapatan.

Sedangkan barang berupa *microwave* hanya mengalami kenaikan sebesar 18% karena dianggap tidak terlalu penting untuk kebutuhan sehari-hari dengan pemakaian listrik yang cukup besar. Kepemilikan harta seperti emas/perhiasan dan lahan/tanah mengalami kenaikan masing – masing sebesar 48% dan 35% dari sebelumnya. Masyarakat membeli emas/perhiasan dan lahan/tanah sebagai bentuk dari investasi. Letak pelabuhan internasional tanjungpura yang strategis menarik perhatian masyarakat untuk membeli lahan/tanah di pedalaman Sungai Kuyit. Walaupun harga tanah/lahan disana masih relatif murah dan terjangkau, mereka beranggapan bahwa beberapa tahun kemudian daerah ini akan berkembang dan semua properti akan naik berkali-kali lipat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan dari tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura. Sesudah adanya pelabuhan internasional tanjungpura kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Terjadi peningkatan pendapatan akibat penambahan jumlah pelanggan di setiap toko/usaha milik masyarakat setempat.
2. Pada indikator pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bangunan rumah pada masyarakat menjadi lebih sejahtera. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan dengan mulai menyekolahkan anggota keluarga pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta mampu mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Masyarakat juga mulai mampu untuk memperbaiki kondisi rumah serta

memiliki rumah bentuk permanen. Pada indikator kepemilikan harta benda terjadi penambahan paling banyak pada jenis barang elektronik karena dianggap dapat mempermudah kehidupan sehari-hari.

Rekomendasi

Adapun hal-hal yang disarankan kepada masyarakat antara lain:

1. Masyarakat hendaknya memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta akibat adanya pelabuhan internasional tanjungpura dengan membuka usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun membuka usaha baru sesuai kebutuhan yang berpotensi maju kedepannya sehingga dapat menambah tingkat pendapatan. Serta menambah jenis/varian pada usaha demi menyesuaikan kebutuhan pelanggan.
2. Masyarakat diharapkan tidak terlalu konsumtif dalam menggunakan pendapatan dan dapat memanfaatkan pendapatan yang dimiliki untuk mulai berinvestasi jangka panjang dengan emas, saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, dkk. (2021). Kajian Dampak Eksternalitas Negatif Limbah Cair Perusahaan Pabrik Tepung Tapioka PT Gunung Sugih Sidokerto Lampung Tengah Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 41-58.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. (2013). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung*. Provinsi Banten.
- Febria, A. (2017). Dampak Pembangunan Pelabuhan Pada Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Kendal Kabupaten Kendal. *Jurnal Departemen Pembangunan Wilayah Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 1-14.
- Hanum, Nurlaila dan Safuridar. (2018) Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 42-49.
- IPC Port Developer. (2017). Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak. Jakarta. Diakses dari <https://www.portdevco.com/terminal-kijing-pelabuhan-pontianak/>
- Istiqomah, dkk. (2020). Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 1(1), 1-23
- Langumadi, Wiwin A.P., dan Harudu, La. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran di UPT Arongo Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Universitas Halu Oleo*, 1(2).
- Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunit Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 101-107.
- Mankiw, N Gregory, Euston Quah, dan Peter Wilson. 2014. Pengantar Ekonomi Mikro Principles of Economics. Jakarta: Salemba Empat.
- Maruwae, Abdulrahim dan Ardiansyah. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran. *Jurnal Oikos-Nomos*, 13(1), 39-53.
- Muhammad Suciadi, E. P. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267-285.
- Nugraha, dkk. (2018). Eksternalitas Industri Semen Di Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 4(1), 69-77.
- Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik: Bagian VII Teori Fiskal Federalisme. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIBRAW
- Provilidis, Vassilios dkk. (2014). Environmental Effects and Externalities from the Transport Sector and Sustainable Transportation Planning – A Review. *International Journal of Energy Economics*

- and Policy*. 4(4), 647-661.
- Samrin, dkk. (2020). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Shautut Tarbiyah*. 26(2), 250-271.
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215–228.
- Sandra, Mai Oni, Ermi Tety dan Evi Maharani. (2015). Dampak Eksternalitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) PT. Tamora Agro Lestari (TAL) terhadap SosialEkonomi Masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom Faperta*. 2(2).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suherman, A. dan Dault, A. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan Jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*, 4(2), 24-32.
- Una Selvi Tuaputy, E. I. (2014). Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, 71-86
- Wahono. (2015). Terminal Petikemas pada Pelabuhan Internasional Pantai Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*. 3(1), 37-55.

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP KREDIT BERMASALAH

Andhika Widya Pratama¹, Erni Panca Kurniasih²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine how the effect of per capita income, inflation and exchange rates on non performing loans at PT. Bank Negara Indonesia (Persero). The data analysis tool method used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study show that per capita income and inflation have a significant negative effect on non performing loans. Meanwhile, the Exchange Rate does not have a significant effect on non-performing loans. Per capita income, inflation and exchange rates simultaneously have a significant effect on non performing loans.

Keywords: *Percapita Income, Inflation, Exchange Rate and Non Performing Loans*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar terhadap kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk. Metode alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan data tahun 2016-2021. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan perkapita dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah, sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah.

Kata Kunci: *Pendapatan Perkapita, Inflasi, Nilai Tukar dan Kredit Bermasalah*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor perbankan masih mendominasi sektor keuangan. Perbankan sendiri adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dan memberikan layanan lainnya. Hal ini menyebabkan ketergantungan sehingga jika sektor perbankan tidak mampu menyalurkan dana ke sektor rill dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Berdasarkan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah organisasi komersial yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dengan cara lainnya untuk kemakmuran masyarakat.

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat dan pemberian pinjaman perorangan dan pemberian pinjaman insitusional atau pinjaman komersial, sehingga pendapatan pinjaman bank dalam bentuk bunga ialah sumber dari pendapatan utama bagi bank. Karena banyaknya fasilitas kredit yang tersedia untuk masyarakat, bank-bank ini akan mengalami kesulitan dalam bentuk kredit bermasalah, yang diwakili oleh rasio Non Performing Loan (NPL) yaitu rasio perbandingan total kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang diberikan.

Tabel 1 Jumlah Nasabah dan Kantor Cabang Bank Konvensional

Bank Konvensional	Jumlah Nasabah (orang)	Kantor Cabang (unit)
Bank Negara Indonesia BNI	63 Juta	1.800
Bank Mandiri	58,6 Juta	2.323
Bank Tabungan Negara BTN	1,4 Juta	529
Bank Rakyat Indonesia BRI	31,1 Juta	8.852
Bank Danamon	1 Juta	879
Bank Permata	4,2 Juta	305
Bank Central Asia BCA	30 Juta	1.241

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah nasabah dan kantor cabang dari masing-masing bank konvensional. Bank Nasional Indonesia (BNI) merupakan salah satu bank yang jumlah nasabahnya terbanyak sebesar 63 Juta daripada jumlah nasabah masing-masing bank konvensional lainnya. Sedangkan kantor cabang yang terbanyak yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 8.852 unit. Penelitian ini focus kepada Bank BNI karena memiliki jumlah nasabah terbesar. Kredit bermasalah yang sangat besar dalam industri perbankan memiliki implikasi yang luas. Tingkat kesehatan bank tidak lebih dari 5% sesuai peraturan Bank Indonesia, jika lebih maka bank perlu berhati-hati ketika mereka menyatakan aset mereka ke sektor riil. Sebagian dana yang dikumpulkan bank digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, kemampuan bank untuk menawarkan pinjaman baru melemah.

Tabel 2 Pendapatan Perkapita, Inflasi, Nilai Tukar dan Kredit Bermasalah Bank BNI tahun 2016-2021

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp)	NPL (%)
2016	47.965.323	3,02	13.436	3,00
2017	51.869.045	3,61	13.548	2,30
2018	56.328.888	3,13	14.481	1,90
2019	59.065.349	2,72	13.901	2,30
2020	56.938.723	1,68	14.105	4,30
2021	62.236.441	1,87	14.269	3,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Bank BNI

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa kredit bermasalah berfluktuasi selama bertahun-tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana terlihat di atas, pada tahun 2020 dan 2021, kredit bermasalah mengalami kenaikan mendadak dan hampir mencapai batas kesehatan rata-rata bank sebesar 5% yang sudah ditetapkan Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bank perlu berhati-hati ketika mereka menyatakan aset mereka ke sektor riil. Pada tahun 2016 sampai 2019 pendapatan perkapita tumbuh setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 pendapatan perkapita turun sebesar 3,70% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 pendapatan perkapita kembali tumbuh sebesar 8,55%.

Salah satu indikator dalam menjaga stabilitas perekonomian adalah perkembangan pendapatan perkapita, pendapatan perkapita ini mencerminkan kapasitas keluaran yang dapat dihasilkan perekonomian dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam perekonomian. Kaitannya dengan kredit bermasalah, jika pendapatan perkapita semakin tinggi, maka negara tersebut bisa dikatakan semakin sejahtera atau makmur. Jika sebaliknya akan mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan pinjamannya yang menyebabkan bertambahnya kredit bermasalah.

Indikator lainnya adalah inflasi dimana terjadi kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Menyebabkan turunnya penjualan dan kondisi dunia usaha atau bisnis pun melemah. Kondisi tersebut menyebabkan nasabah perbankan konvensional mengalami kesulitan untuk mengembalikan kreditnya pada perbankan konvensional, sehingga kredit bermasalah pada perbankan konvensional meningkat. Indikator selanjutnya adalah nilai tukar, nilai tukar dari suatu negara merupakan hal yang penting dimana bersamaan dengan harga-harga domestik, nilai tukar menentukan biaya dari produk suatu negara bagi pembeli luar negeri dan akan mempengaruhi ekspor dari negara tersebut, begitu juga dengan impor.

Perkembangan nilai tukar sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi, dimana ketika semakin tingginya jumlah mata uang lokal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 Dollar akan meningkatkan potensi semakin tingginya rasio NPL. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pelemahan kondisi ekonomi secara umum, dan juga disebabkan oleh besarnya tingkat pinjaman yang ditanggung oleh debitur yang bergerak di bidang bisnis perdagangan internasional maupun perusahaan yang harus memasok bahan baku yang dibayar dengan Dollar. Beban perusahaan akan menjadi semakin besar dan memperbesar peluang tingginya risiko kredit bermasalah atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar terhadap kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk.

2. KAJIAN LITERATUR

Kredit bermasalah yaitu terdiri dari utang-utang yang berlabel kurang lancar, diragukan, dan macet, menurut kamus Bank Indonesia. Kemampuan administrasi bank untuk menangani utang bermasalah merupakan salah satu unsur yang menunjukkan peningkatan aktivitas keuangan, menurut Linda et al (2015). Semakin kecil masalah kredit, semakin efisien bank meminjamkan. Kredit bermasalah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur NPL. Kredit bermasalah berfungsi sebagai tanda apakah klien telah menyelesaikan prosedur penagihan atau belum. Oleh karena itu, nilai NPL pasti meningkat setelah terjadinya indikator jangka pendek atau tidak teratur. Situasi ini berdampak negatif pada bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, sebagai otoritas moneter yang menilai tingkat stabilitas masing-masing bank, jumlah keseluruhan kredit bermasalah harus kurang dari 5% dari total kredit. Bank Indonesia hanya mengizinkan NPL keuangan dengan tingkat keamanan 5%. Jika melebihi 5%, maka akan menurunkan angka yang diperoleh dan berdampak pada peringkat stabilitas bank. Kredit jangka panjang dikategorikan menurut aturan kualitas produksi aset Bank Indonesia sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL dinilai dengan menggunakan:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit yang Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan kredit bermasalah berdampak pada penurunan distribusi keuntungan kepada pemilik keuangan. Kepercayaan dan legislasi, dua elemen yang terkait, membentuk fondasi hubungan antara bisnis dan klien. Pelanggan harus mempercayai bank dengan uang mereka agar dapat beroperasi dan tumbuh. Uang yang dikumpulkan bank dari masyarakat umum sebagai simpanan kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Jika tidak segera diambil tindakan, relatif tingginya jumlah kredit bermasalah atau bahkan informasi yang tidak akurat tentang kredit bermasalah di beberapa bank akan menimbulkan kekhawatiran di antara nasabah bank yang terkena dampak dan mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka negara tersebut akan dipandang sebagai negara yang makmur oleh negara-negara lainnya. Pendapatan per kapita dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit bermasalah dalam suatu negara. Hasil studi Wulandari dan Muljaningsih (2019) menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL), sementara suku bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL, dan *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL.

Hasil studi Ginting (2016) menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL sedangkan suku bunga dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Tanaskovic dan Jandric (2014) dengan menggunakan pendekatan model panel statis menemukan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Loan, sedangkan inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan. Pervetica dan Ahmeti, (2022) alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDB dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Loan. Studi oleh Wairimu dan Gitundu, (2017) menemukan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah demikian pula dengan hasil studi Ahmad dan Bashir (2013). Berdasarkan beberapa studi empiris tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H1 : Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah.

Inflasi

Inflasi yang ditandai dengan kenaikan biaya yang mengurangi daya beli dan seringkali diikuti dengan penurunan tabungan atau investasi karena pengeluaran publik yang lebih besar dan tabungan jangka panjang yang sedikit, didefinisikan oleh kamus Bank Indonesia sebagai situasi ekonomi. Penjelasan paling awal tentang inflasi adalah teori kuantitas. Pertumbuhan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga di masa mendatang, yang merupakan satu-satunya faktor yang dapat menyebabkan inflasi (Latumaerissa, 2011). Menurut Linda et al (2015), berpendapat bahwa inflasi adalah situasi di mana uang suatu negara kehilangan nilainya dan biaya produk dan jasa terus meningkat. Kenaikan biaya umum yang dikenal sebagai inflasi dapat mengganggu keseimbangan antara pergerakan uang dan komoditas. Inflasi disebabkan oleh inflasi di luar negeri, yang menaikkan harga produk dalam negeri. Inflasi yang tinggi telah mengurangi pendapatan aktual masyarakat dan akibatnya kualitas hidup mereka, sehingga tidak memungkinkan bagi kreditur untuk melakukan pembayaran.

Hasil studi Zakik (2022) dengan menggunakan pendekatan *Error Corection Model* (ECM) dan Ginting (2016) menemukan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek inflasi dan suku bunga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, sedangkan nilai tukar dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah tetapi dalam jangka pendek tidak berpengaruh. Hal ini sejalan dengan hasil studi Musdholifah dan Rosita (2016) dimana nilai tukar dan pertumbuhan kredit ditemukan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah, sementara inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Demikian pula hasil studi Saputro, Prasetyo dan Sarumpaet (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan kredit, jenis kredit dan tingkat bunga pinjaman bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Hal ini tidak sejalan dengan hasil studi Hamzah (2018) yang menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah,

sedangkan nilai tukar dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Berdasarkan beberapa studi empiris tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H2: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kredit Bermasalah.

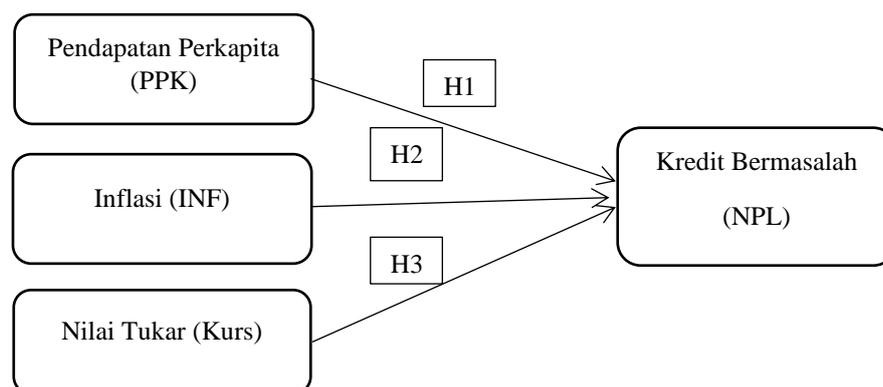
Nilai Tukar

Harga satu mata uang relatif terhadap yang lain adalah definisi umum dari nilai tukar. Nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai suatu uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya, menurut Badar et al (2013). Pasar forex, yang tersedia setiap hari kecuali hari Sabtu dan memiliki berbagai jenis pasar mata uang, menentukan harga pertukaran. Pertukaran produk modal dan jasa dalam perdagangan global memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tukar. Mata uang nasional yang lebih lemah membuat impor lebih mahal, memberi tekanan pada bank komersial untuk membiayai pinjaman korporasi dan meningkatkan risiko gagal bayar.

Hasil studi Khemraj dan Pasha (2009) menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah sedangkan PDB dan suku bunga tidak memberikan pengaruh. Demikian pula hasil studi Hamzah (2018) menunjukkan bahwa nilai tukar dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Di sisi lain hasil studi Musdholifah dan Rosita, (2016) menunjukkan bahwa nilai tukar, inflasi dan pertumbuhan kredit tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah sedangkan pada variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Berdasarkan beberapa studi empiris tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H3 : Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Kredit Bermasalah.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pendapatan Perkapita (PPK), Inflasi (INF) dan Nilai Tukar (Kurs) terhadap Kredit Bermasalah (NPL).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi seperti pendapatan perkapita, inflasi, dan nilai tukar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengolah data berupa angka-angka kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ialah data sekunder yang berasal dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan laporan keuangan yang dipublikasi oleh PT. Bank Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan statistik bulanan untuk setiap variabel dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2021, serta sumber-sumber lain yang menguatkan berupa terbitan berkala yang dibutuhkan dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, variabel pendapatan

perkapaita hanya tersedia setiap tiga bulan (triwulan) dan kemudian diinterpolasikan ke data bulanan menggunakan metode quadratic match sum. Tabel 3 menjelaskan tentang variabel terikat penelitian ini adalah kredit bermasalah, sedangkan pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar merupakan variabel bebas .

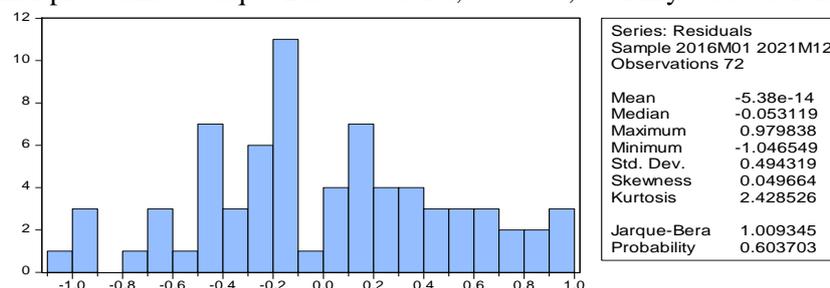
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Kredit Bermasalah (NPL)	Rasio jumlah kredit yang kolektabilitas (kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Informasi tersebut digali dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasi oleh PT. Bank Negara Indonesia dari Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2021.	Persen
Pendapatan Perkapita (PPK)	Jumlah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita yang diperoleh dari distribusi pendapatan nasional suatu negara dengan penduduk negara pendapatan perkapita juga tercermin dalam PENDAPATAN perkapita. Informasi tersebut berasal dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2016 hingga tahun 2021.	Ribuan
Inflasi (INF)	Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga yang naik secara umum dan terus menerus. Data inflasi merupakan data dari Bank Indonesia yang dikumpulkan sejak Januari Tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2021	Persen
Nilai Tukar (Kurs)	Nilai tukar dalam penelitian ini adalah mata uang negara yang diperdagangkan satu sama lain di pasar global dengan kurs yang dikenal sebagai nilai tukar. Konversi mata uang antara rupiah Indonesia (IDR) dan dolar AS (USD) disediakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah nilai tukar dari Januari tahun 2016 hingga Desember tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	Persen

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, inflasi, dan nilai tukar terhadap kredit bermasalah. Dalam penelitian ini memakai metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program Eviews 9.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistic dimulai dengan menguji distribusi data. Untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Jika probabilitas $R^2 > 0,05$ berarti signifikan dan residual berdistribusi normal, sedangkan jika probabilitas $R^2 < 0,05$ berarti tidak signifikan dan residual berdistribusi tidak normal. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $1,0093 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal.



Sumber: data olahan

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera

Selanjutnya akan dilakukan uji multikolinieritas untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dengan melihat nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Centered VIF > 10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4 nilai Centered VIF antara masing-masing variabel bebas yaitu pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar menunjukkan nilai Centered VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas tersebut.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	292.1816	82455.96	NA
Logpendapatan _Perkapita	1.384468	91395.21	3.776735
Inflasi	0.010057	25.46885	2.246998
LogKurs	4.895710	125895.6	2.560588

Sumber: Data diolah

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk apakah ada ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Jika nilai probabilitas > 0.05 berarti signifikan dan tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model, sedangkan jika nilai probabilitas < 0.05 berarti tidak signifikan dan ada masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0.2103 > 0.05 artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.519052	Prob. F(3,68)	0.2174
Obs*R-squared	4.522162	Prob. Chi-Square(3)	0.2103
Scaled explained SS	2.881092	Prob. Chi-Square(3)	0.4103

Sumber: data olahan

Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi untuk melihat apakah antar variabel dalam model saling berkorelasi. Apabila probabilitas Chi Square > 0.05 berarti signifikan maka dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi antar variabel dalam model, sedangkan jika probabilitas Chi Square < 0.05 berarti tidak signifikan maka ada masalah autokorelasi antar variabel. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil Lagrange Multiplier Tes nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.0000 lebih kecil dari α (0.0000 < 0,05) maka dapat disimpulkan dalam model ini ada masalah autokorelasi.

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	57.60512	Prob. F(2,66)	0.0000
Obs*R-squared	45.77632	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: data olahan

Estimasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi Kredit Bermasalah (NPL) dilakukan dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan Tabel 7 maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$NPL = 106.2064 - 5.615744 \text{ PPK} - 1.060118 \text{ INF} - 1.519520 \text{ KURS}$$

Berdasarkan persamaan tersebut apabila pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar tidak mengalami perubahan maka jumlah kredit bermasalah akan mengalami peningkatan sebesar 106.2064. Nilai adjusted R-square yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 0.6117 artinya 61.17% penyebab kredit bermasalah mampu dijelaskan oleh variabel bebas pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar, sedangkan 38.83% tidak berdistribusi normal yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 7
Hasil Olah Data dengan Metode OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	106.2064	17.09332	6.213328	0.0000
LOGPENDAPATAN				
_PERKAPITA	-5.615744	1.176634	-4.772718	0.0000
INFLASI	-1.060118	0.100285	-10.57109	0.0000
LOGKURS	-1.519520	2.212625	-0.686750	0.4946
R-squared	0.628143			
Adjusted R-squared	0.611737			

Sumber: data olahan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kredit bermasalah. Hasil probabilitas F-statistik sebesar $0.000000 < 0.05$ artinya pendapatan perkapita, inflasi dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah dengan nilai koefisien adalah -5.615744. Artinya jika pendapatan perkapita meningkat 1% maka kredit bermasalah akan turun sebesar 5.61%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan perkapita mampu mengurangi jumlah kredit bermasalah karena meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menyebabkan masyarakat mampu melakukan pembayaran atas kredit kepada bank sehingga dampaknya jumlah kredit bermasalah di bank akan semakin berkurang

Pendapatan per kapita yang tinggi cenderung menandakan tingkat kemakmuran yang lebih besar bagi penduduk suatu negara. Ketika pendapatan per kapita meningkat, kemungkinan individu memiliki sumber daya finansial yang lebih besar untuk membayar kembali kredit mereka. Pendapatan per kapita yang tinggi juga sering kali terkait dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi stabil, individu cenderung memiliki kepercayaan lebih besar dalam mengambil kredit dan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar kembali kredit mereka. Di negara-negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi, lembaga keuangan cenderung lebih mampu memberikan kredit dengan syarat yang lebih baik kepada individu dan perusahaan. Ini karena individu dengan pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki catatan kredit yang lebih baik dan lebih banyak jaminan untuk menawarkan.

Pertumbuhan pendapatan perkapita yang ekspansif akan mendorong kondisi ekonomi yang kondusif, kondisi ini akan meningkatkan kemampuan membayar dari masyarakat baik perusahaan maupun perorangan sehingga akan menurunkan terjadinya kredit bermasalah. Di negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi, lembaga keuangan cenderung memberikan kredit kepada individu dengan risiko kredit yang lebih rendah, karena kepercayaan bahwa mereka memiliki kemampuan membayar yang baik. Hal ini dapat mengurangi tingkat kredit bermasalah secara keseluruhan. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wairimu dan Gitundu (2017) yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah.

Pengaruh Inflasi terhadap Kredit Bermasalah

Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Berdasarkan Tabel 7 jika inflasi meningkat 1% maka kredit bermasalah akan turun sebesar 1.060118%. Hubungan negatif terjadi apabila inflasi tinggi, akan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan keuangan sehingga masyarakat akan mengurangi pinjaman kredit karena tidak sanggup membayar atau melunasi hutangnya. Dengan begitu, pinjaman kredit akan perlahan berkurang dan rasio kredit bermasalah juga akan mengalami penurunan. Menurut teori Keynes inflasi disebabkan oleh permintaan total terhadap barang dan jasa yang melebihi jumlah yang tersedia. Apabila hal ini berlangsung lama dan terus menerus akan mengakibatkan naiknya harga dan menurunkan pendapatan riil masyarakat, akibatnya munculnya potensi kredit bermasalah.

Peningkatan inflasi akan menyebabkan peningkatan rasio kredit bermasalah dari berbagai sektor perekonomian. Dan dampak yang paling dirasakan oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor perekonomian adalah meningkatnya beban usaha atau pengeluaran yang mereka harus keluarkan. Kenaikan beban usaha yang dirasakan sedangkan pendapatan tetap maka menyebabkan pelaku usaha tersebut kesulitan memenuhi kewajiban mereka membayar cicilan kredit kepada bank. Untuk itu diperlukan peran serta pihak yang termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan fiskal agar mengeluarkan kebijakan kenaikan harga harus mengakomodir dan meyarap juga kepentingan pelaku usaha dari berbagai sektor perekonomian. Sehingga kenaikan harga terhadap pelaku usaha tidak memberikan dampak yang terlalu parah terhadap pelaku usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pervetica dan Ahmeti (2022) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Musdholifah dan Rosita (2016) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah.

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah dimana nilai probabilitas nilai tukar sebesar $0.4946 > 0.05$. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menandakan semakin besar nilai mata uang lokal dibandingkan negara asing maka akan semakin melemah laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, memiliki kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dan perekonomian secara keseluruhan. Meskipun nilai tukar rupiah dapat mengalami fluktuasi, bank sentral biasanya akan melakukan intervensi untuk mengendalikan fluktuasi yang terlalu ekstrem. Selain itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kredit bermasalah.

Banyak perusahaan dan lembaga keuangan telah menggunakan berbagai strategi untuk mengelola risiko nilai tukar, dengan melakukan ini, mereka dapat mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap pembayaran kembali kredit dalam mata uang asing, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Banyak pinjaman dalam ekonomi domestik Indonesia mungkin diberikan dalam mata uang rupiah, sehingga fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS mungkin tidak langsung mempengaruhi pembayaran kembali kredit. Ini berarti bahwa bagi peminjam yang memiliki kewajiban dalam mata uang rupiah, dampak langsung dari perubahan nilai tukar terhadap dolar AS mungkin tidak begitu terasa.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan Bashir (2013) yang menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2011) yang menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya pendapatan menyebabkan kemampuan masyarakat meningkat dalam pembayaran kredit bank sehingga akan berefek pada penurunan kredit bermasalah. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah. Jika terjadi kenaikan harga atau inflasi maka akan mempengaruhi daya beli dan masyarakat akan lebih memprioritaskan pengeluaran uang untuk keperluan konsumsi dan akan mengurangi pinjaman kredit baru karena ketidakmampuan membayar. Dengan demikian resiko kredit bermasalah di bank akan berkurang. Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Meskipun nilai tukar rupiah dapat mengalami fluktuasi, bank sentral biasanya akan melakukan intervensi untuk mengendalikan fluktuasi yang terlalu ekstrem. Selain itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kredit bermasalah.

Rekomendasi yang diberikan terkait upaya menanggulangi kredit bermasalah dimana pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk mencegah praktik pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab dan untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit bermasalah secara dini. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah stimulus ekonomi yang tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat membantu mengurangi tekanan keuangan pada individu dan perusahaan, dan secara efektif mengurangi risiko kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Bashir, T. (2013). Explanatory Power of Macroeconomic Variables as Determinants of Non-Performing Loan: Evidence from Pakistan. *World Applied Sciences, Vol. 2*, 243-255.
- Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 7*, 159-162.
- Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi, Vol 1*, 711-721.
- Hamzah, A. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). *Jurnal JIFA, Vol 1*, 73-88.
- Khemraj, T., & Pasha, S. (2009). The Determinants of Non-Performing Loans: An Econometric Case Study of Guyana. *New College of Glorida, University of Guyana*, 1-25.
- Linda, M. R., Megawati, & Deflinawati. (2015). Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Padang. *Jurnal ECONOMICA, Vol 3*, 137-145.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musdholifah, & Rosita, M. (2016). Pengaruh Makroekonomi, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Pertumbuhan Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Asing di Indonesia Periode 2013-2014. *Jurnal BISMA, Vol 8*, 124-135.
- Pervetica, A. K., & Ahmeti, S. (2022). the Effect of Macroeconomic Indicators on Non-Performing Loans: The case of Balkan Countries. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, Vol. 14*, 42-49.
- Poetry, Z. D., & Sanrego, Y. D. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Islamic Finance & Business Review Journal, Vol. 6, No. 2*.
- Putra, R. D. (2018). Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Loan Bank Swasta Nasional Indonesia Periode 2009-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 7*.
- Putri, D. M., & Zakik. (2022). Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) di Indonesia Tahun 2016-2020. *Buletin Ekonomika Pembangunan, Vol 3*, 274-286.

- Saputro, A. R., Prasetyo, T. J., & Sarumpaet, S. (2019). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank Dan Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol 11*, 1-11.
- Tanaskovic, S., & Jandric, M. (2015). Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-Performing Loans. *Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 4*, 47-62.
- Wairimu, M. M., & Gitundu, E. W. (2017). Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans in Kenya: 1998-2015. *Journal of Finance and Accounting, Vol. 8*, 97-105.
- Wulandari, R. D., & Muljaningsih, S. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Rasio Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2013-2016. *OECONOMICUS Journal Of Economics, Vol 3*, 153-178.

MODAL MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Aufia Khalila Ahmad¹, Sri Kurniawati², Meiran Panggabean³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Good quality human capital has an important role in increasing economic growth. This study aims to examine and analyze the effect of human capital which includes computer information technology skills, life expectancy and the working workforce on economic growth in Indonesia, using multiple linear regression analysis method with panel data with the Feasible General Least Square (FGLS) model. research shows that if computer information technology has a negative and significant effect on Indonesia's economic growth, the working workforce has a positive and significant effect on Indonesia's economic growth, life expectancy has no significant effect on economic growth.

Keywords: *Human Capital; Information Technology; Life Expectancy; Working Force; Economic growth*

1. PENDAHULUAN

Kualitas modal manusia merujuk pada tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan masyarakat dalam suatu negara. Keterlibatan manusia dalam kegiatan ekonomi menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya beberapa perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia. negara berkembang masih fokus dalam memperbaiki untuk meningkatkan standar tersebut, sementara negara maju sudah fokus terhadap skill dan kemampuan masyarakat dalam melakukan sesuatu sebagai modal penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2011) komponen yang mempengaruhi modal manusia terdiri dari pendidikan dan kesehatan. hal ini karena pendidikan dan kesehatan saling berhubungan dalam memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui angkatan kerja yang memiliki keterampilan untuk melakukan kegiatan produksi.

Modal manusia memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi wilayah ke arah yang lebih baik (Fatimah, 2021). Modal manusia merupakan sumber energi tidak berwujud yang dikelola bersama oleh orang serta kelompok di dalam populasi. modal manusia serta perkembangan ekonomi berintegrasi, sebab ada ikatan jangka panjang antara keduanya. Berikutnya, terdapat kebutuhan untuk berinvestasi pada zona pembelajaran untuk mengoptimalkan modal. Menurut Solow-Swan Perkembangan Teknologi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keterampilan teknologi Informasi memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengembangkan produk layanan baru yang inovatif. Keterampilan seperti pemrograman, pengembangan aplikasi, desain web, analisis data, kecerdasan buatan memungkinkan pengembangan solusi teknologi yang menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan sehingga mampu berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menghasilkan pendapatan baru.

¹aufiakhal@gmail.com

Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan teknologi mampu meningkatkan kualifikasi dan kemampuan tenaga kerja. pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, seperti programmer, analisis data, ahli keamanan cyber, dan spesialis jaringan dengan demikian perlu mempersiapkan individu untuk pekerjaan yang dibutuhkan di era digital. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada faktor produksi berupa modal uang dan tanah, akan tetapi modal manusia yang menjadi faktor produksi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator penyusun modal manusia meliputi pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dasar dari suatu pembangunan. Perhitungan tingkat pendidikan tidak hanya melalui rata-rata lama sekolah namun bagaimana kemampuan dan keterampilan terhadap teknologi dapat di akses secara merata. Saat ini bagi negara berkembang khususnya Indonesia perbaikan kualitas pendidikan masih terfokus di Pulau Jawa sementara provinsi lain masih perlu perhatian.

Demikian juga dengan tingkat kesehatan melalui angka harapan hidup sebagai bagian dari indikator kesehatan yang meningkat setiap tahun akan membuat jumlah usia produktif meningkat dan akan menyebabkan terjadi bonus demografi, peningkatan ini jika tidak sejalan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang belum mampu diserap oleh pasar kerja karena keterbatasan lapangan kerja, hal ini menjadi permasalahan bagi negara berkembang khususnya Indonesia dalam menganalisis pengaruh terhadap kualitas modal manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh modal manusia dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, adapun tujuan spesifik dalam penelitian sebagai berikut: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dan komputer terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur harapan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut Solow-Swan, teori yang telah berkembang sejak 1950-an, teori yang mengacu pada teori neo klasik tentang pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang meliputi modal manusia, tenaga kerja, dan modal. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peran dari kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar oleh karena itu dalam peningkatan kemajuan teknologi tersebut dibutuhkan kualitas manusia yang baik sebagai penggerak perekonomian. Menurut Lucas (1988) dan Romer (1986), pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan cepat jika tenaga kerja memiliki tingkat pengetahuan, wawasan luas serta berpendidikan tinggi, dan pelatihan professional untuk mempercepat perkembangan industri dan teknologi, agar kegiatan produksi dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Lucas dan Romer ini sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Teori yang dikemukakan oleh Lucas dan Romer merupakan teori mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi dikenal dengan istilah *the New Growth Theory*. Todaro (2011) mengungkapkan jika modal manusia diukur dari dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan, menurutnya pendidikan merupakan penentu kualitas manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak kemampuan yang dapat dimiliki oleh seseorang, begitu juga pada aspek kesehatan. kedua aspek tersebut saling berhubungan karena, seseorang yang mampu pendidikan yang tinggi, diasumsikan memiliki tingkat kesehatan yang baik, apabila tingkat kesehatan masyarakat rendah, maka produktifitas juga rendah bahkan bisa tidak berjalan, namun pendidikan yang tinggi juga dapat menyebabkan tingkat kesehatan semakin menurun. Menurut Lewis (1959) tentang ketenagakerjaan jika kelebihan tenaga kerja merupakan kesempatan bukan merupakan suatu masalah, dengan terjadi kelebihan tenaga kerja pada setiap sektor akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output

dan penyediaan kesempatan di sektor lain. Dengan kata lain dapat disimpulkan peningkatan jumlah tenaga kerja dapat menciptakan kesempatan kerja lain di sektor lainnya.

2.1 Pengaruh Pendidikan Melalui Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, beberapa penelitian menjelaskan teknologi informasi terhadap pertumbuhan ekonomi berkontribusi positif serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan penelitian yaitu teori pertumbuhan klasik, Teknologi Informasi memiliki peran positif terhadap kegiatan perekonomian karena teknologi informasi cenderung lebih efisien dalam mendukung produksi barang dan jasa terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. (Almizan,2020). Selain itu perkembangan inovasi teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di China, dengan menggunakan model empiris dan teoritis menyatakan hasil dari penelitian terhadap inovasi teknologi akan membuat perekonomian suatu negara akan terus berkembang, dengan jawaban Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran terhadap teknologi informasi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini karena perekonomian suatu negara memerlukan promosi melalui teknologi dan dukungan dari pemerintah. (Wang Xiaowei,2021).

2.2 Pengaruh Umur Harapan Hidup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Fokus pengembangan sumber daya manusia terhadap negara dengan pendapatan menengah kebawah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeksplorasi serta menguji hubungan yang bersifat dinamis antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan jika modal manusia yang meliputi kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Boadi,2022). Umur harapan hidup berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian tersebut juga didukung dengan fakta yang mengatakan bahwa rasio ketergantungan penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2019 tercatat sebesar 48.79 persen artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 49 orang yang belum produktif atau yang sudah tidak produktif lagi, dengan demikian semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar beban yang akan ditanggung oleh usia produktif, dengan demikian dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di suatu daerah. (Rasnino,2022).

2.3. Pengaruh Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian terkait angkatan kerja yang bekerja dengan tujuan menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini jika angkatan kerja semakin meningkat maka dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu jika pengaruh angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Bawuno dkk,2015). angkatan kerja yang memiliki hubungan yang sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori Solow-Swan jika pertumbuhan ekonomi tergantung terhadap penyediaan faktor-faktor produksi yang meliputi penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. (Prasetyawan,2017).

3. METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji serta menganalisis pengaruh modal manusia yang meliputi pendidikan yang diproksi dengan proporsi keterampilan teknologi informasi dan komputer dan umur harapan hidup dan ketenagakerjaan dengan menggunakan angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, dengan jenis data panel yang memiliki kombinasi antara data time series 2018-2022 dengan cross section 34 provinsi, sehingga total observasi sebanyak 170.

3.1. Uji Data

Uji stasioner merupakan bagian dari pengujian data dengan tujuan untuk membedakan antara variabel independent dengan variabel dependent, untuk menghindari terjadinya spurious regresi, spurious regresi dilihat berdasarkan nilai F-test, t-test, dan segi koefisien determinasi (R Squared), menunjukkan jika variabel independent dapat memperhatikan variabel dependent. Dengan menggunakan model *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF), menghasilkan nilai probability uji uni root test < 0.05 maka data dikatakan stasioner dan bebas dari regresi rancu. pengujian kointegrasi yang merupakan pengujian dengan jangka Panjang dan jangka pendek di dalam model uji data dapat dilakukan, kointegrasi dapat dideteksi dengan menggunakan metode johansen atau *engel- granger* (Widarjono, 2018).

3.2. Uji Model

Uji model dilakukan dengan melakukan uji chow bertujuan untuk menentukan estimasi model data panel terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Kemudian pemilihan model juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM), dan uji model dilakukan Hausman dilakukan bertujuan untuk menentukan model estimasi terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). (Widarjono, 2018)

3.3. Analisis Regresi Berganda Data Panel

Metode analisis regresi berganda merupakan pengujian dengan menggunakan perhitungan general least square atau cross section weight pada FE atau yang disebut dengan *Feasible General Least Square* (FGLS) dengan koefisien estimasi *Cross Section Weight* (PCSE) membuat model menjadi kebal atau *robust* terhadap pelanggaran asumsi antara lain autokorelasi, heteroskedastisitas dan ketergantungan antar *cross sectional*. (Widarjono,2018). Dirumuskan sebagai berikut (Widarjono,2018).

$$PEit = \beta_0 + \beta_1KTIKit + \beta_2UHHit + \beta_3AKBit + \epsilon it \quad (\text{Persamaan 3.1}) \text{ Keterangan :}$$

- PEit* = Pertumbuhan Ekonomi(Persen)
- KTIKit* = Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (Persen)
- UHHit* = Umur Harapan Hidup(Tahun)
- AKBit* = Angkatan Kerja yang Bekerja (Persen)
- β_0 = Konstanta (Intercept)
- ϵit = Unsur Gangguan Populasi
- i* = jumlah cross section dalam penelitian
- t* = jumlah tahun dalam penelitian.

Pengujian t statistik menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau secara individu dengan rumus sebagai berikut (Widarjono,2018):

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{se(\beta_1)} \dots \dots \dots (\text{Persamaan 3.2})$$

Dengan diperoleh hipotesis dari pengujian t adalah :

- Jika nilai prob t > α (0.05) maka Ho ditolak, Ha diterima
- Jika nilai prob t < α (0.05) maka Ho diterima, Ha ditolak

Pengujian F statistik untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan dengan rumus sebagai berikut (Widarjono,2018):

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)} \dots \dots \dots (\text{Persamaan 3.3})$$

Diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- Jika prob $F > \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak, H_a diterima
- Jika prob $F < \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima, H_a ditolak

Pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur presentase total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh garis regresi dengan konsep koefisien determinasi (R^2) dengan rumus sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \dots\dots\dots \text{(Persamaan 3.4)}$$

Dengan demikian nilai koefisien determinasi terletak diantara 1 dan 0

$$0 < R < 1$$

Semakin angka pada pengujian mendekati satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Data

Berdasarkan hasil pengujian data dengan uji stasioner berikut adalah tabel pengujian stasioner *Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test (ADF) test*:

Tabel 1 : Hasil Uji Stasioner ADF test

Keterangan	Uni Root Test Level	Kesimpulan
PE	0.0000	Stasioner
KTIK	0.0000	Stasioner
UHH	0.0317	Stasioner
AKB	0.0000	Stasioner
ADF- Fisher Chi Square	0.0000	Stasioner

Sumber : Eviews 9, Data Diolah

Berdasarkan hasil dari pengujian Augmented Dickey-Fuller dengan nilai probability pada tingkat alpha. Nilai probability $< \alpha$ ($0.0000 < 0.05$), pengujian dilakukan dengan menggabungkan semua variabel dan menunjukkan jika data secara keseluruhan stasioner pada tingkat level. Hal ini menunjukkan jika seluruh data dalam penelitian ini tidak menghasilkan regresi yang rancu. Berdasarkan hasil uji data kointegrasi berikut adalah hasil uji kointegrasi Johansen Test:

Tabel 2 : Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.190382	8.340.048	4.785.613	0.0000
At most 1 *	0.146867	4.749.763	2.979.707	0.0002
At most 2 *	0.083581	2.049.493	1.549.471	0.0081
At most 3 *	0.032729	5.657.000	3.841.466	0.0174

Sumber : Eviews 9, Data diolah

Berdasarkan hasil uji kointegrasi, nilai *trace statistic* ($4.749.763 > 2.979.707$, $2.049.493 > 1.549.471$, $5.657.000 > 3.841.466$). menunjukkan lebih besar dari *critical value*, serta nilai probability lebih kecil dari 0.05 terhadap pengujian kointegrasi Johansen sehingga dapat dinyatakan H_1 diterima dan data terkointegrasi. Dengan demikian variabel yang stasioner memiliki keseimbangan jangka panjang antar variabel.

3.2. Hasil Uji Model

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan maka pengujian model *Fixed Effect Model* sebagai model pilihan terbaik.

3.3. Hasil Analisis Regresi Berganda Data Panel

Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *cross section weights* menggunakan koefisien estimasi *cross section weight* (PCSE) yang bertujuan agar robust kebal terhadap pelanggaran asumsi. Berikut adalah hasil dari pengujian dengan rumus dan tabel model PCSE:

$$PE_w = -39.89792 - 0.060085KTIK + 0.187165UHH + 0.003593AKB$$

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan menggunakan metode PCSE pengujian yang dilakukan secara parsial (Uji t) menunjukkan variabel keterampilan teknologi informasi dan komputer ($p < 0.05$), dan angkatan kerja yang bekerja ($p < 0.05$), berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara umur harapan hidup ($p > 0.05$), berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Tabel Regresi Pengujian t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std.Error	-Statistic	Prob.	Keterangan
C	-39.89792	16.28468	-2.450027	0.0156	
KTIK	-0.060085	0.019532	-3.076280	0.0025	Berpengaruh signifikan secara parsial
UHH	0.187165	0.197099	0.949601	0.3440	Tidak berpengaruh signifikan secara parsial
AKB	0.003593	0.000882	4.073744	0.0001	Berpengaruh signifikan secara parsial

Sumber: Eviews 9, Data diolah

Berdasarkan tabel dibawah, uji simultan nilai F hitung atau F-statistik: 14.44058 dengan nilai probabilitas atau Prob(F-statistic): $0.000000 < 0,05$ maka terima H1 yang berarti secara simultan variabel keterampilan teknologi informasi dan komputer, umur harapan hidup, dan angkatan kerja yang bekerja berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : Pengujian F (Simultan) dan Koefisien Determinasi

Weight Statistic	Prob.
R-squared	0.257998
Adjusted R-squared	0.057156
S.E. of regression	4.003643
F-statistic	14.44058
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Eviews 9, Data diolah

Koefisien Determinasi: Nilai R Squared 0.257998, artinya persentase perubahan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor keterampilan teknologi informasi dan komputer, umur harapan hidup, angkatan kerja yang bekerja hanya dijelaskan sebesar 25.80%, sementara untuk 74.12% dari faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh keterampilan teknologi informasi dan komputer terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan data proporsi keterampilan teknologi informasi dan komputer Indonesia menurut provinsi di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. keterampilan teknologi informasi dan komputer memiliki pengaruh sebesar -0.060085 atau -6.0085% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan demikian semakin tinggi keterampilan teknologi informasi dan komputer maka akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi jika perkembangan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilatar belakangi oleh proses globalisasi yang terjadi dengan pesat namun hanya berkembang pada wilayah tertentu, artinya masih kurang pemerataan terhadap akses untuk memperoleh teknologi informasi dan komputer, sehingga hal ini mungkin menjadi penyebab keterampilan teknologi informasi dan komputer belum mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Putri,2020).

Kemajuan teknologi informasi belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, studi yang dilakukan SMERU menemukan bahwa literasi teknologi masyarakat Indonesia masih rendah, dilihat dari aspek kemampuan literasi data dan informasi ditunjukkan oleh buruknya nilai *Programme for International Student Assessment (PISA)*. PISA merupakan kajian yang mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja skolastik pelajar. Selain itu, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020, menunjukkan bahwa 60% responden menghadapi persoalan berfikir kritis dalam memilah dan mengolah informasi. Hal ini berimplikasi rentan terpapar hoaks, kejahatan internet, dan penggunaan internet yang tidak produktif. Selain itu, keterampilan digital tenaga kerja Indonesia juga tergolong rendah. Pada 2020, hampir separuh (atau 49%) pekerja Indonesia merupakan mereka yang berketerampilan rendah (*unskilled*). Mereka memiliki keterpaparan yang kecil terhadap teknologi digital sederhana. Kurang dari 1% pekerja memiliki keterampilan tingkat lanjut (*advanced*), yaitu tenaga kerja dengan keterampilan digital yang biasanya ditempatkan pada jabatan tingkat tinggi.

Keterampilan teknologi informasi dan komputer sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah karena keterbatasan akses dan fasilitas terhadap penggunaan teknologi yang biasa disebut Digital Poverty. Indonesia sendiri masuk termasuk dalam kategori *Digitaly Poor* dan *Extremley Digitaly*. Dari kategori tersebut dapat dikatakan teknologi informasi belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Kamilla,2021).

Pengaruh Umur Harapan Hidup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Umur harapan hidup berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro terkait modal manusia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, modal manusia meliputi pendidikan dan kesehatan, dan beberapa penelitian terkait tingkat kesehatan yang meliputi umur harapan hidup yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena umur harapan hidup yang lebih tinggi artinya populasi memiliki masa kerja yang lebih lama, dan artinya lebih banyak orang yang dapat berkontribusi secara ekonomi dalam jangka waktu yang lama, menghasilkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif. Tenaga kerja yang lebih besar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi dan konsumsi. (Akasumbawa,2021). Namun terdapat penelitian yang sejalan terkait umur harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup yang semakin banyak apabila tidak sesuai dengan tersedianya lapangan kerja maka akan meningkatkan angka ketergantungan terhadap penduduk usia produktif (Rasnino,2022). Selain itu umur harapan hidup yang tinggi jika tidak diimbangi oleh peningkatan keahlian akan meningkatkan beban dalam pembangunan daerah. (Nurwijayati, 2017). Jika usia

produktif lebih banyak daripada peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan perluasan keterampilan akan mengakibatkan pengangguran struktural, karena orang-orang yang berusia produktif mungkin akan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Pengaruh Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Angkatan kerja yang bekerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, angkatan kerja bekerja memiliki pengaruh sebesar 0.003569 untuk pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi jumlah angkatan kerja bekerja semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu terkait dengan angkatan kerja yang memiliki hubungan yang sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori solow-swan jika pertumbuhan ekonomi tergantung terhadap penyediaan faktor-faktor produksi yang meliputi penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. (Prasetyawan, 2017).

Penelitian berikutnya yang sejalan dengan penelitian ini juga sama menyatakan angkatan kerja yang bekerja berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena angkatan kerja merupakan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam menggerakkan perekonomian negara, karena manusia merupakan penggerak dengan menggunakan kemampuan dan keterampilannya dalam menghasilkan produksi yang memiliki kualitas yang baik. Sehingga semakin banyak angkatan kerja yang bekerja menghasilkan output barang dan jasa yang punya mutu maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik (Hellen, 2017). Penelitian ini juga sejalan dengan konsep ketenagakerjaan menurut Lewis (1959) terkait kontribusi angkatan kerja yang bekerja dalam menggerakkan perekonomian negara karena angkatan kerja yang bekerja merupakan bagian dari human resource atau sumber daya manusia yang berperan dalam peningkatan pertumbuhan serta pembangunan negara.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keterampilan teknologi informasi komputer, dan angkatan kerja yang bekerja berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ($p < 0.05$), sementara umur harapan hidup berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($p > 0.05$). karena umur hidup yang lebih tinggi apabila tidak sesuai dengan tersedianya lapangan kerja maka akan meningkatkan angka ketergantungan terhadap penduduk usia produktif. Selain itu umur harapan hidup yang tinggi jika tidak diimbangi oleh peningkatan keahlian akan meningkatkan beban dalam pembangunan daerah. Jika usia produktif lebih banyak daripada peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan perluasan keterampilan akan mengakibatkan pengangguran struktural, karena orang-orang yang berusia produktif mungkin akan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Secara simultan, Keterampilan teknologi informasi, umur harapan hidup dan Angkatan kerja yang bekerja berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ($p < 0,05$). besar perubahan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor keterampilan teknologi informasi dan komputer, umur harapan hidup, angkatan kerja yang bekerja hanya dijelaskan sebesar 25.80%.

Diharapkan pemerintah dapat terus melakukan peningkatan kualitas modal manusia dengan terus meningkatkan keterampilan teknologi yang merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas kesehatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat terus mengedepankan pendidikan dan peyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya hidup sehat, praktik kebersihan, pola makan yang seimbang, dan pencegahan penyakit. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bekerja agar terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akasumbawa, M. D. D., Adim, A., & Wibowo, M. G. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia (Studi pada Negara China, India, Indonesia, Pakistan dan Amerika Serikat). *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2611>
- Almizan. (2020). Pengaruh pembangunan teknologi informasi komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja sektor tik di indonesia. *Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 5.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Harga Konstan. Indonesia Tahun 2018-2022: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2010). Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2018-2022: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2022). Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2022. *Badan Pusat Statistik*, August 2022, iii–229. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>
- BPS. (2021). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2021. *Badan Pusat Statistik*, August 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355fee591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html>
- Bawono, S., & Widarni, E. L. (2021). The Role of Technology in Human Capital and Economic Growth in Indonesia. 6th ICGSS International Conference of Graduate School on Sustainability, 114–118.
- Boadi, A., Joseph, O., Yusheng, K., & Pierrette, T. (2022). Human capital , foreign direct investment , and economic growth : Evidence from ECOWAS in a decomposed income level panel. *Environmental Challenges*, 9(June), 10060. <https://doi.org/10.1016/j.envc.0.10060>
- Fatimah, N., Sulaiman, C., Jumadil, S., & Suriyani, M. (2021). Effects of Human Capital and Innovation on Economic Growth in Selected ASEAN Countries: Evidence from Panel Regression Approach*. *Journal of Asian Finance*, 8(7), 43–0054. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no7.0043>
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 8. <https://doi.org/10.964/jinv.v13i1.490>
- Kazmi, S. M., Ali, K., & Ali, G. (n.d.). Impact of Human capital on Economic Growth : Evidence from Pakistan.
- Nurwijayanti, N. (2017). Pengaruh Indikator Komposit Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2013. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 520–529.
- Putri, A.C.(2022). Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini. Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/00513143745-4-338853/jangan-kaget-begini-kondisi-ekonomi-indonesia-terkini>
- Rasnino, C. A., Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2022). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2014-2019. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 191–200. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.29>
- SMERU.or.id (2022, 21 Maret). Indonesia Terganjil Ketimpangan Keterampilan Digital, Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?. Diakses dari <https://smeru.or.id/id/article-id/riset-smeru-prospek-ekonomi-digital-indonesia-terganjal-ketimpangan-keterampilan-digital>
- Statistik, B. P. (2021). Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1509>
- Todaro, Michael, P. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII

PENYULUHAN DAN SOSIALISASI KEPADA UMKM DALAM MEMBUAT PRODUK PANGAN YANG MEMILIKI GIZI TINGGI DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

Atin Sumaryanti¹, Pratika Linanda², Hence Made Aryasa³, Giarti Astriana⁴, Delta Fenisa⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas OSO, Indonesia

ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in the food sector have a major contribution to the Indonesian economy. The MSMEs partners for this community service activity are MSMEs actors in Limbung Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan who are engaged in making food products. This activity aims to increase the knowledge and capabilities of partners in making MSMEs products that are more nutritious and varied and have high selling value. Activities were carried out at partner locations at the Limbung Village Office, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The activity consists of several stages as follows: 1) Socialization with lectures, 2) Viewing video tutorials, 3) Discussion. Based on the activities carried out, several benefits were obtained for partners, including increased knowledge of MSMEs actors in choosing food ingredients well and cleanly, increased knowledge about choosing food ingredients that are easy, cheap and nutritious and the variety of products produced provides greater opportunities for MSMEs actors to increase his income. With the implementation of this activity, most participants stated that this activity was useful and needed to be continued.

JEL: H51, H52, H53

Keywords: MSMEs, nutrition, food, selling, health, education

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan pangan yang banyak. Banyaknya pangan seharusnya dapat menjadikan masyarakat Indonesia hidup dengan nilai gizi yang cukup (Lestari, 2022), namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mementingkan akan nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya dalam memilih bahan pangan yang nantinya akan dijadikan produk pangan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki sumber pangan besar adalah di Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data Webgis “Kepong Bakol” geospasial, jumlah UMKM tersebar di 123 desa salah satunya yang berada di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayah sekitar 50.000 Ha yang sebagian besar lahannya digunakan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau, dari tanaman tersebut menghasilkan jenis produk pangan seperti keripik singkong, tepung mocca, keripik tempe, keripik pisang dan rengginang. (Profil Desa Limbung, 2014). Sebagian besar masyarakat di Desa Limbung terjun dalam bidang UMKM khususnya dalam membuat produk pangan yang bergerak di bidang makanan dan minuman karena memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang.

Peluang bisnis makanan dan minuman olahan yang sangat positif ini, mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha secara signifikan, terlebih dengan adanya sistem online yang membuat pelaku bisnis makanan dapat menjual produk secara bebas dan dengan mudah pula mendapatkan atensi pasar. (Pritanova et al, 2020 dalam Ayuningtyas 2022). Bisnis makanan dan minuman ini banyak diminati kaum muda dan dikreasikan dalam berbagai inovasi sehingga muncul banyak jenis makanan baru yang

sangat diminati. (Putra et all, 2020). Salah satu tantangan dalam bidang UMKM adalah tentang keamanan, kehalalan, dan kandungan gizi yang terdapat dalam hasil olahan pangan. Menurut penelitian Sari dan Rahmawati (2020), makanan olahan memiliki peran dalam pemenuhan zat gizi yang cukup besar yaitu 34,4% dari total asupan energi, 4,7% protein, 11,6% lemak, dan 18,6% karbohidrat. Minimnya pengetahuan dalam memilih bahan yang bersih, mudah didapat dan harganya murah membuat pelaku UMKM tidak memilih bahan yang memiliki kandungan gizi padahal sebagian besar hasil pangan di daerah tersebut mayoritas bergizi tinggi, selain itu juga rendahnya kesadaran pelaku UMKM tentang keamanan pada produk pangan yang akan dijual.

Dalam proses produksi makanan UMKM biasanya terdapat beberapa titik kritis misalnya penjamah makanan tidak menjaga kebersihan diri, menggaruk anggota tubuh, dan mengunyah makanan saat bekerja. (Manayang et all, 2018). Pentingnya keamanan pangan bagi UMKM yang memproduksi bahan olahan makanan dan minuman menjadi hal yang sangat penting / krusial untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan yang diakibatkan konsumsi makanan yang tidak aman. (Palupi et all, 2023). UMKM sebagai jembatan untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat harus terus dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat. UMKM yang peduli akan kesehatan menjadi agen perubahan untuk kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan produk yang berkualitas, nilai gizi yang tinggi serta mampu dijangkau oleh masyarakat, baik dari segi harga dan ketersediannya. UMKM pangan lokal dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan melihat dari sumber daya alam yang tersedia dan menjadi unggulan di daerah tersebut. (Lestari, 2022). Selain dari keamanan, kualitas dan gizi yang harus diperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, dimana berdasarkan ketentuan syariat bahwa setiap produk pangan harus memiliki sertifikat halal begitu juga dengan bahan campurannya. Proses ini memerlukan pemeriksaan oleh lembaga terpercaya yang disebut dengan sertifikat halal. (Akim et all, 2018).

Tujuan dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yaitu dengan memberikan edukasi serta menambah pengetahuan kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tentang pentingnya pengetahuan dalam memilih dan membuat produk pangan yang baik dan bersih, jenis produk pangan yang mudah didapat, murah dan memiliki kandungan gizi tinggi serta cara memvariasikan produk pangan menjadi lebih menarik agar memiliki nilai jual tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi maka masyarakat akan dengan mudahnya untuk memenuhi kebutuhan gizi, selain itu juga membahas tentang cara pemberian Penyuluhan dan Sosialisasi kepada UMKM dalam Membuat Produk Pangan yang Memiliki Gizi Tinggi di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya label kandungan gizi pada produk pangan yang akan di konsumsi oleh masyarakat. Dengan pemberian label kandungan gizi maka masyarakat merasa yakin bahwa makanan yang akan mereka konsumsi aman dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan serta bernilai jual tinggi.

2. KAJIAN LITERATUR

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi UMKM pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Simmons, Armstrong & Durkin, 2008). Menurut Bank Dunia, UMKM merupakan suatu bisnis yang memenuhi dua dari tiga kriteria yaitu kekuatan karyawan, ukuran aset atau penjualan tahunan (Das, 2017). UMKM dianggap sebagai bentuk

usaha yang cukup tanggung dan survive. Hal ini didasarkan pada realita yang menunjukkan bahwa meskipun memiliki skala usaha kecil namun saat terjadi krisis pada tahun 1998 sektor UMKM ternyata mampu menghadapinya. Kuncoro, 2008 menyebutkan beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan saat krisis. Salah satu alasannya adalah karena input yang digunakan adalah input lokal sehingga ketika krisis harga bahan baku tidak melonjak naik apalagi ketersediaannya pun melimpah (Utami, 2014).

Menjadi bagian industri pangan saat ini banyak menjadi pilihan masyarakat (Sumarto, 2022). Tingginya kebutuhan makanan menjadi perhatian penting pemerintah agar menjamin makanan tersebut aman dikonsumsi oleh seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dikeluarkannya surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). PIRT merupakan izin produksi bagi usaha skala industri rumah tangga. PIRT berbentuk sertifikat yang merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) BPOM RI Nomor 27 Tahun 2017. Pentingnya Keamanan Pangan bagi UMKM yang memproduksi bahan olahan makanan dan minuman menjadi hal yang sangat penting / krusial untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan yang diakibatkan konsumsi makanan yang tidak aman. UMKM seringkali berperan penting dalam pasokan makanan lokal dan pemahaman tentang praktik keamanan pangan yang benar menjadi kunci untuk mencegah insiden penyakit yang dapat merugikan masyarakat (Palupi et al 2023).

Timbulnya penyakit akibat pangan (foodborne diseases) yang termanifestasi dalam kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan juga merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dikhawatirkan konsumen. Untuk itu, pengolahan makanan yang sesuai dengan keamanan pangan dan terdapatnya label dalam kemasan merupakan hal yang dibutuhkan konsumen dan juga menjaga keberlangsungan pengrajin makanan khususnya pengrajin makanan skala rumah tangga dalam proses produksinya. Selain itu, mutu dan nilai gizi produk pangan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga jarang diperhatikan. BPOM RI dalam kegiatan surveilansnya juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM atau industri rumah tangga pangan sebesar 74 persen memiliki sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (BPOM RI Tahun 2020).

Sumber bahan pangan sangat beragam dari sumber pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Tingkat keragaman pangan di Indonesia sangat tinggi karena topografi Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, berkorelasi positif dengan hasilnya. Sebagai bahan pangan, ketersediaannya harus ada setiap saat, baik dari segi kualitas dan kuantitas, aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Rahayu et al, 2019). Produk pangan yang bergizi adalah produk makanan yang mengandung zat gizi beragam untuk memenuhi gizi seimbang. Pada satu kali sajian makan, sebaiknya berisi kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2014, gizi seimbang adalah: "Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka memperhatikan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi" (Widyaningrum et al, 2021).

3. METODA PENELITIAN

Kegiatan pelaksanaan PKM ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Limbung, yang beralamat di Jalan Merdeka II Nomor 51, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Desa ini terletak tidak jauh dari pusat kota. Sehingga memudahkan peserta untuk hadir tepat waktu. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan beberapa metode yaitu ceramah, melihat video tutorial dan diskusi. Melihat video tutorial: metode ini dilakukan dengan melihat video yang ditujukan kepada peserta jenis-jenis bahan pangan dan kandungan gizinya, olahannya, cara memvariasikan olahan pangan, memberi cara membaca label dalam kemasan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu ceramah, melihat video tutorial dan diskusi. Penjelasan secara lebih mendalam terkait sistematika metode kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dengan ceramah: metode ini dilakukan dengan presentasi atau seminar yang ditujukan kepada peserta untuk memberikan pemahaman mengenai pemilihan produk pangan yang baik dan bersih, memiliki kandungan gizi tinggi, mudah didapat.
- b. Melihat video tutorial: metode ini dilakukan dengan melihat video yang ditujukan kepada peserta jenis-jenis bahan pangan dan kandungan gizinya, olahannya, cara memvariasikan olahan pangan, memberi cara membaca label dalam kemasan.
- c. Diskusi: Metode ini merupakan metode tanya jawab terkait hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.

Adapun jumlah peserta kegiatan yang hadir yaitu 25 orang terdiri dari 11 pelaku UMKM yang ada di sekitar Desa Limbung, 2 Kader PKK, 2 Kader Posyandu Desa Limbung, 5 Mahasiswa Universitas OSO dan 5 Dosen Universitas OSO. Untuk mendukung pelaksanaan pada Penyuluhan dan Sosialisasi kepada UMKM dalam Membuat Produk Pangan yang Memiliki Gizi Tinggi di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, kami mendatangkan narasumber Ahli Gizi yang memiliki pengalaman praktik dan keahlian yang telah teruji dibidangnya, sehingga dapat menjadi pembelajaran dan juga memberikan pengetahuan terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi ini. Adapun narasumber yang dipilih adalah: Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S. Gz., RD., MPH. (Ahli Gizi sekaligus Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura), Atin Sumaryanti, S.E., M.M. (Dosen Prodi Manajemen FEB Universitas OSO selaku narasumber pada materi mengenai peningkatan nilai jual pada produk UMKM).

Pemilihan narasumber dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahan pangan yang mudan dan murah serta dapat dimanfaatkan dari hasil pertanian setempat yang memiliki banyak kandungan gizi, cara memvariasi bahan pangan serta memberikan pandangan lain mengenai peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam mengemas, memasarkan dan mendapatkan sertifikat halal untuk meyakinkan konsumen sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi.



Gambar 4.1
Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi



Gambar 4.2
Slide Presentasi Variasi Olahan Pangan dan Standar Gizi

5. SIMPULAN

Dengan terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat maka hasil yang di dapat dari kegiatan ini adalah timbulnya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta respon positif dan tanggapan yang sangat luar biasa dari kelompok UMKM di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peserta mendapatkan wawasan dan gambaran kedepannya dalam memilih produk pangan yang bergizi tinggi sebelum diolah menjadi produk yang akan mereka pasarkan, mengetahui cara memvariasikan produk pangan agar menjadi menarik, serta mengetahui cara mendapatkan label halal untuk meyakinkan konsumen

sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi, selain itu kegiatan ini dilakukan dalam upaya menangani masalah ekonomi dan kesehatan. Harapan dari kegiatan ini semoga bermanfaat, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat saling berkolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam pengelolaan pengembangan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Konety, N., Purnama, C., Adilla, M.H. 2018. *The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) in Jatiningor on the Obligation of Halal Certification on Food Products*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 1(1):31-49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- BPOM RI [Badan Pengawas Obat dan Makanan]. (2017), Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan [Internet]. Indonesia; 2017 p. 1-155. Available from: <http://eservice.insw.go.id/files/atr/55>. Peraturan BPOM 27 Tahun 2017.pdf.
- BPOM RI [Badan Pengawas Obat dan Makanan]. (2020), Laporan Tahunan 2020 Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang BPOM RI [Internet]. Jakarta. Available from: https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20220225/Laporan_Tahunan_2020_Direktora_t_Pengawasan_Pangan_Risiko_Rendah_dan_Sedang.pdf.
- Das, Parthajeet. (2017). Micro, small and medium enterprises (MSME) in India: Opportunities, issues & challenges. *Great Lakes Herald*, 11(1), 77-88.
- Lestari S, Anwar C, Husna A. (2022). Peningkatan UMKM Pangan Lokal sebagai Pencegahan Stunting di Desa Saree Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Pendidikan)* Vol. 4 No. 2 Oktober 2022. Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Manayang, Y., Joseph, W.B.S., Sumampouw, O.J. 2018. Higiene dan Sanitasi Industri Pangan Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Paniki Bawah. *Kesmas : Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*. 7(5):1-7.
- Palupi F, Noviyati T, Ribhi A, (2023), Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan pada UMKM, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* Volume 1, No 2 – April 2023 e-ISSN : 29863104.
- Peraturan Menteri Kesehatan. (2014), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Sekretariat JDH BPK, Jakarta.
- Pritanova, P.R., Muhandri, T., Nurjanah, S. 2020. Karakteristik dan Pemenuhan CPPOB Pelaku UMKM Online Produk Olahan Beku Daging Sapi dan Ayam di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*. 8(3):102-108. <https://doi.org/10.29244/jipthp.8.3.102-108>
- Profil Desa Limbung, 2014 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Kalimantan Barat.
- Putra, K.A.D., Hidayatullah, F., Farida, N. 2020. Mediatisasi Layanan Pesan Antar Makanan Di Indonesia Melalui Aplikasi Go-Food. *Islamic Communication Journal*. 5(1):114-124. <https://doi.org/10.21580/icj.2020.5.1.5416>
- Rahayu, Atikah., Yulidasari, Fahrini., Putri, Andini Octaviana. (2019). "Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi". Mine. Bantul.
- Sari, Y.D., Rachmawati, R. 2020. Kontribusi Zat Gizi Makanan Jajanan Terhadap Asupan Energi Sehari Di Indonesia (Analisis Data Survey Konsumsi Makanan Individu 2014) [*Food Away From Home (Fafh) Contribution of Nutrition To Daily Total Energy Intake in Indonesia*]. *Penelitian Gizi dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*. 43(1):29-40. <https://doi.org/10.22435/pgm.v43i1.2891>
- Prosiding TIN PERSAGI 2022:403-412. Tasikmalaya. Utami W, Anam C, Widiyanto (2014). Upaya Pengembangan UMKM Makanan Olahan di kabupaten Karanganyar. Vol. 2 No. 2 Mei 2014. Surakarta.
- Widyaningrum R, Suryani D, Eri A.C. (2021), Modul Edukasi Produk Pangan UMKM Bergizi, Aman dan Halal, K. Media, Yogyakarta.

DEMOCRACY AND POVERTY IN INDONESIA

Ebi Susanti¹, Nurul Bariyah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

This study aims to examine and analyze the effect of the Indonesian Democracy Index on poverty in 34 provinces in Indonesia from 2009 to 2019. In researching the Democracy Index, three aspects are used, namely: Civil Liberties; Political Rights and Democratic Institutions, and Poverty, which is measured by the percentage of the population living below the poverty line. The analytical method used is multiple linear regression, which uses panel data. The effect of the Democracy Index on poverty was analyzed using Eviews 10 with data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS). This study uses multiple linear regression with a fixed-effect model (FEM). Partially, the aspects of civil liberties have a positive and significant effect on poverty, while the aspects of political rights and democratic institutions have a negative and significant effect on poverty. Taken together, the three independent variables have a significant effect on poverty, with a coefficient of determination of 94.49%.

JEL classification: D72; F63; I3

Keywords: Democracy index, Poverty

1. INTRODUCTION

Poverty serves as a key indicator of a nation's prosperity, and addressing poverty remains a top priority for most governments. This is primarily because high poverty levels can impede the achievement of a country's Sustainable Development Goals (SDGs), with poverty alleviation being one of the primary objectives outlined and emphasized. According to Bappenas (2020), the lack of progress in Indonesia's democracy index is identified as a contributing factor to the increasing poverty rates. The existence of poverty can give rise to various societal issues encompassing social, economic, and political dimensions (Margareni et al., 2016). As per available data, out of the total population of 266.912 million people in Indonesia, 24.786 million individuals are classified as poor (BPS, 2019). Furthermore, poverty rate data indicates that rural areas experience higher poverty levels compared to urban areas (BPS, 2020).

Poverty refers to a state of severe deprivation in terms of resources, knowledge, skills, and opportunities, resulting in minimal productivity and limited prospects for a higher standard of living. To address this issue, it becomes imperative to employ a democratic system. Fahmi (2019) asserts that a democratic system can lead to a government administration that prioritizes social welfare and works towards reducing poverty levels. In various African countries, such as Ghana with a democracy score of 6.5, the proportion of people living below the poverty line has decreased to 23%. Similarly, Senegal with a democracy score of 5.6 has witnessed a reduction to 9.3% in the ratio of people below the poverty line. Additionally, Iceland, with a democracy score of 9.4, has experienced a decrease to 8.8% in the proportion of people living below the poverty line.

Obstacles to economic development resulting from poverty can be attributed to various factors, including inadequate law enforcement, poorly implemented policies, and political instability (Jhingan, 2014). Mongolia, classified as an imperfect democracy with a democracy index score of 6.5, faces a poverty level of 28%. An alarming 80% of survey respondents expressed their belief that government

policies are insufficient in addressing critical issues such as unemployment and poverty (Tuya, 2013). In the case of South Africa, with a democracy index score of 7.05, the country experiences a poverty rate of 55% and exhibits a Gini Score of 0.62, reflecting persistent issues of poverty and inequality (Seekings, 2013).. It is crucial to note that development policies implemented by a nation alone are insufficient to effectively tackle poverty; citizen participation is also essential in this endeavor (Roberto & Araujo, 2015).

Poverty-related issues in Indonesia persist at high levels, primarily stemming from structural problems. Further research indicates that economic disparities and ineffective enforcement of social order by the government contribute to the problem of poverty in the country (Suhardin, 2012). Consequently, it becomes crucial to focus on the government's policy implementation to ensure their effectiveness. Through sound democratic governance, desired changes and policies, including poverty reduction, can be successfully realized Fahmi (2019).

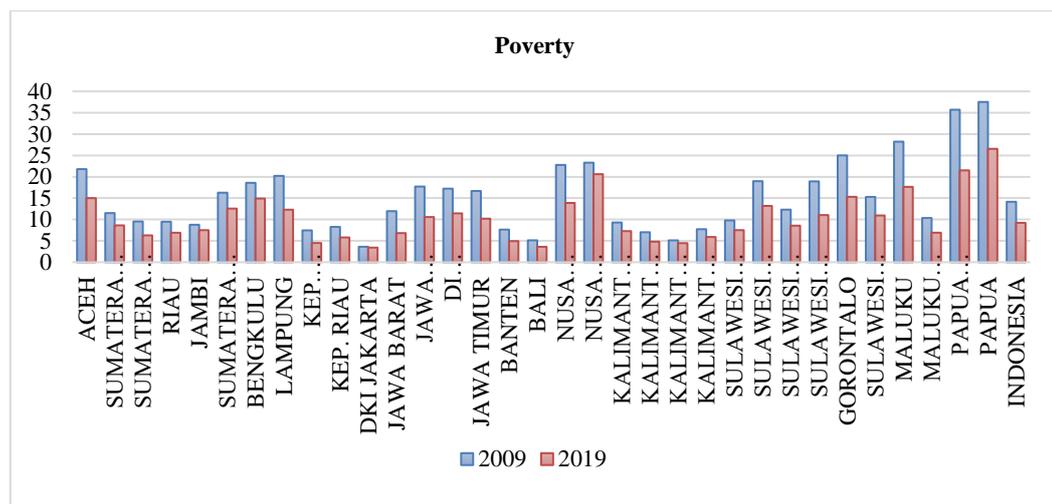


Figure 1. Percentage of the Population in Poverty by Province in Indonesia (2009-2019)

Source: Badan Pusat Statistik (BPS, 2009-2019)

Figure 1 illustrates the trend of poverty rate in Indonesia from 2009 to 2019. Overall, all regions experienced a relative decrease in poverty rate, although the decline was relatively modest. Nonetheless, the figure emphasizes the importance of ensuring the proper implementation and effectiveness of government policies. In 2009, the percentage of individuals living in poverty was 14.15%, equivalent to 32.529 million people. In 2019, the poverty rate decreased to 9.22%, or 24.786 million people. This represents an overall decrease in poverty rate by 4.93%, which is significant, although the progress was relatively slow over the span of a decade. The provinces with the highest poverty rates were Papua Province at 26.55%, followed by West Papua Province at 21.51%, and East Nusa Tenggara Province at 20.62%. Conversely, the provinces with the lowest poverty rates were DKI Jakarta Province at 3.42%, Bali Province at 3.61%, and South Kalimantan Province at 4.47%.

In 2019, Papua Province had the highest poverty rate at 26.55%. This high poverty level in Papua is primarily attributed to structural issues that hinder access to government facilities and service infrastructure. Concerns such as poor road quality, limited availability of clean water and electricity, inadequate presence of medical personnel, education gaps, and insufficient irrigation development significantly impede community activities in the region (Wahyuni & Damayanti, 2014).

On the other hand, DKI Jakarta Province had the lowest poverty rate at 3.42%. Jakarta is renowned for its vibrant community, serving as a center for government and financial administration with well-developed support facilities. Additionally, the region benefits from a substantial pool of

skilled and high-quality human resources. The government places greater attention on poverty reduction efforts in Jakarta, including successful initiatives in maintaining price stability. However, it is worth noting that despite its relatively low poverty rate, Jakarta faces challenges due to its growing population size compared to other provinces.

An increase in poverty can be attributed to insufficient attention from the government when formulating and implementing policies (Ma'Arif, 2012). Sunaryo (2017) defines democracy as a state characterized by openness, freedom of expression, and support for achieving prosperity, referred to as substantive democracy. However, according to the latest data from The Economist Intelligence Unit, Indonesia ranks 64th out of 167 countries in the 2019 democracy index. Based on this information, Indonesia cannot be considered a prime example of a democratic nation, as the implementation of the democratic system in various aspects has not yet had a significant impact on social development, including poverty alleviation. The quality of democracy also plays a role in determining the level of welfare, as low-quality democracy is often associated with inadequate leadership and weak integrity, leading to policies that do not benefit the people and increase the risk of corruption, ultimately exacerbating poverty levels.

Figure 2 illustrates the progression of the Democracy Index in Indonesia from 2009 to 2019. The data reveals several fluctuations during this period. Notably, there was a national increase in the Democracy Index score from 73.04 in 2014 to 74.92 in 2019. However, prior to that, from 2009 to 2013, there was a decline in the Democracy Index score, dropping from 67.3 to 63.72. When comparing the scores between 2009 and 2019, it is evident that Indonesia's Democracy Index has shown improvement over the years.

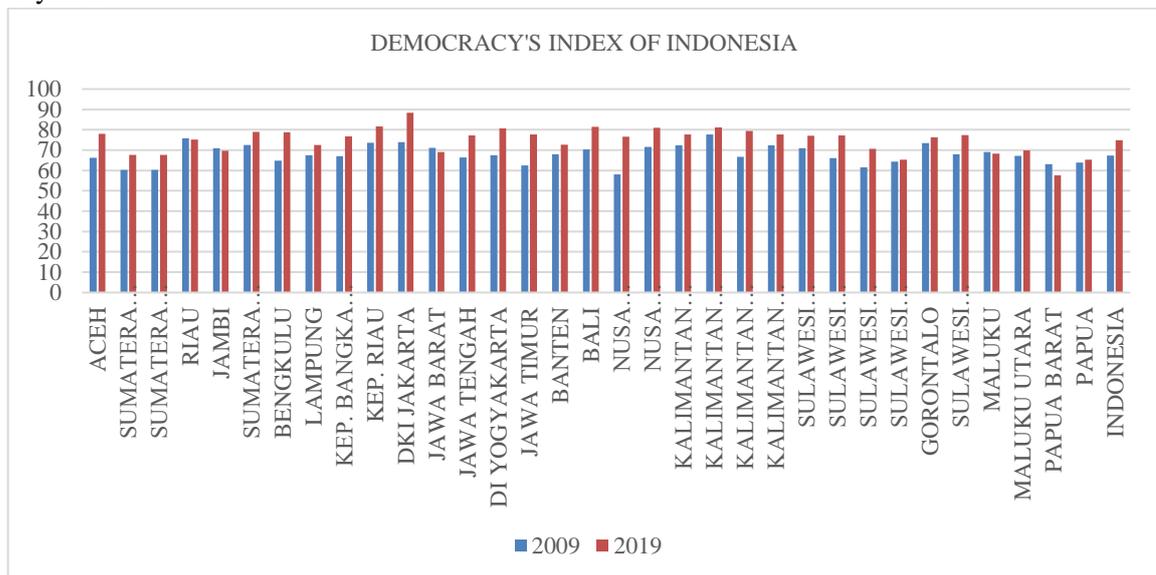


Figure 2. Democracy Index Score by Province in Indonesia (2009-2019)

Source: Badan Pusat Statistik (BPS, 2009-2019)

According to the data, the three provinces with the highest Democracy Index scores in 2019 are DKI Jakarta Province with a score of 88.29, North Kalimantan Province with a score of 88.29, and Riau Islands Province with a score of 81.64. These scores classify these provinces under the "Good" category in terms of democracy. Conversely, the three provinces with the lowest Democracy Index scores in 2019 are West Papua Province with a score of 57.62, Southeast Sulawesi with a score of 65.21, and Papua Province with a score of 65.25. These scores classify these provinces under the "Moderate" category in terms of democracy.

The low democracy index in West Papua Province can be attributed to the frequent occurrence of conflicts, which hinder the process of democratization. These conflicts create an environment where individuals are discouraged from expressing themselves due to threats of violence from influential figures or within the community. Consequently, unresolved issues persist for extended periods of time, undermining the democratic processes in the region.

On the other hand, the highest democracy index in DKI Jakarta Province can be attributed to the support and cooperation from various parties. As the capital city and the center of community and government activities, DKI Jakarta benefits from a more favorable environment for democratic practices. However, when comparing the democracy index scores between 2009 and 2019, although there has been an improvement, DKI Jakarta still falls within the moderate category. This is primarily due to relatively lower scores in the aspects of political rights, including political participation and the quality of elections, with a score of 70.71. The aspect of civil liberties, including freedom of expression, assembly, and freedom from discrimination, received a score of 77.20. The highest-scoring aspect is democratic institutions, including the roles and responsibilities of institutions, with a score of 78.73.

According to Sen, poverty is not solely caused by natural disasters but can also be attributed to political instability and the absence of a democratic system that allows people to voice their concerns and participate in policymaking processes (Indro, 2013). Therefore, ensuring freedom and opportunities for individuals to express their problems and contribute to policy formulation becomes crucial in addressing poverty. In the context of poverty alleviation, it is essential for the government to prioritize this issue and implement targeted measures to overcome it (Yacoub, 2012). Research conducted in Ghana and Senegal (Bojang, 2017) demonstrates that these countries were able to make progress in reducing poverty by adopting a democratic system. Similarly, Pakistan witnessed a 66% decrease in poverty between 2002 and 2016, attributed to the implementation of a democratic system that emphasized open access to services (Afzal et al., 2021). These examples highlight the potential benefits of a democratic system in poverty reduction efforts.

It is true that there are cases where countries have experienced economic prosperity despite having an authoritarian system, such as Argentina, and fast economic development unrelated to democratization, as seen in the case of South Korea (Nugroho, 2015). On the other hand, Indonesia has encountered challenges where a highly democratic system did not necessarily result in successful attainment of prosperity, primarily due to poor political stability (Tambunan & Sukambang, 2015).

In the Indonesian context, the level of poverty can be attributed to limitations in accessing development resources for disadvantaged individuals. These limitations prevent them from fully benefiting from available opportunities for economic growth and social advancement. This highlights the importance of not only having a democratic system but also ensuring equitable distribution of resources and opportunities to address poverty effectively.

The previous explanation highlights the fluctuating nature of both the poverty rate and the democracy index in Indonesia. While the poverty rate has been relatively decreasing, it still remains high, and the democracy index has shown fluctuations with a moderate categorization, indicating an imperfect democracy status. However, empirical studies have not provided a conclusive picture regarding the direct influence of the democracy index on poverty. In light of these observations, the analysis in this study focuses on investigating the influence of the democracy index on poverty levels in Indonesia. The research is structured around three main questions:

- 1) Does the aspect of Civil Liberties in the Democracy Index have an impact on poverty in Indonesia?
- 2) Does the aspect of Political Rights in the Democracy Index have an impact on poverty in Indonesia?
- 3) Does the aspect of Democratic Institutions in the Democracy Index have an impact on poverty in Indonesia?

These questions serve as the framework for examining the relationship between the democracy index and poverty levels in Indonesia. By exploring these aspects, the study aims to provide insights into the potential influence of democracy on poverty reduction in the country. The primary goal of this study is to investigate and analyze the impact of the Democracy Index on poverty in Indonesia over the period from 2009 to 2019. To achieve this objective, the research focuses on specific aims:

- 1) To examine and analyze the influence of the Civil Liberties Aspect of the Democracy Index on poverty in Indonesia from 2009 to 2019.
- 2) To test and analyze the impact of the Political Rights Aspect of the Democracy Index on poverty in Indonesia from 2009 to 2019.
- 3) To test and analyze the effect of the Democratic Institution Aspect of the Democracy Index on poverty in Indonesia from 2009 to 2019.

By addressing these objectives, the study aims to provide insights into the relationship between the Democracy Index and poverty levels in Indonesia, specifically examining the influence of civil liberties, political rights, and democratic institutions on poverty reduction during the specified timeframe.

2. LITERATURE REVIEW

Poverty

According to Kuncoro (2014), poverty can be described as a state in which individuals experience a low standard of living due to various factors such as insufficient income, inadequate housing, limited access to healthcare, and lack of education. Poverty is a complex issue that encompasses multiple dimensions, as it is influenced by various economic, socio-cultural, political, and participatory factors. From a political economy perspective, poverty is closely tied to the inability to access essential resources and opportunities, leading to socio-economic disparities and limited participation in decision-making processes (Arianto, 2017).

Measuring poverty is crucial for several reasons, as highlighted by the World Bank Institute (2020):

- 1) **Inclusion and Economic Planning:** Poverty measurement ensures that the needs of the poor are taken into account in the nation's economic plans. By identifying and understanding the extent of poverty, policymakers can develop targeted strategies and policies to address the specific needs of the poor population.
- 2) **Targeted Interventions:** Accurate poverty measurement allows for the proper identification of individuals or households living in poverty. This information is essential for designing and implementing effective poverty alleviation programs and interventions. By targeting resources towards those who need them the most, these programs can have a more significant impact on reducing poverty.
- 3) **Evaluating Policy Impact:** Measuring poverty helps in assessing the effectiveness of various economic policies in reducing poverty levels. By analyzing the relationship between policy interventions and changes in poverty rates, policymakers can gain insights into which strategies are successful and should be continued or expanded.
- 4) **Assessing Government Efficiency:** Poverty measurement also serves as a tool to evaluate the efficiency of government institutions in addressing poverty. By monitoring changes in poverty rates over time, policymakers can gauge the effectiveness of poverty alleviation efforts and make necessary adjustments to policies and programs.

Overall, measuring poverty provides essential information for policymaking, resource allocation, and evaluating the impact of poverty alleviation efforts, enabling governments to better address the needs of the poor and work towards reducing poverty effectively.

According to Fernandez in Arsyad (2015), poverty can be characterized by various aspects, including:

- 1) Political Aspect: This refers to the lack of means for people to express their problems and concerns to those in power who have the ability to improve their living conditions. Limited political participation and representation can contribute to the perpetuation of poverty.
- 2) Social Aspect: Poverty often leads to social exclusion and marginalization. The poor may not receive adequate care and support from the community, which further hinders their ability to improve their situation. Social stigma and discrimination can exacerbate the challenges faced by the poor.
- 3) Economic Aspect: Poverty is closely tied to economic factors. Low-quality human resources, inadequate access to healthcare, limited quality education, and lack of skills can contribute to low income and limited economic opportunities. These economic disadvantages can trap individuals and communities in a cycle of poverty.
- 4) Cultural Aspect: Cultural factors can influence poverty by shaping individuals' attitudes, values, and behaviors. Ingrained values that discourage persistence, critical thinking, and a strong work ethic can hinder individuals' ability to overcome poverty. Cultural norms and beliefs may also perpetuate inequality and restrict opportunities for upward social mobility.

By understanding these characteristics, policymakers and stakeholders can develop comprehensive strategies to address poverty by targeting not only the economic aspects but also the social, political, and cultural dimensions that contribute to its persistence.

According to Tambunan & Sukambang (2015), poverty is influenced by various factors, both at the individual and collective levels. They argue that poverty can be conceptualized based on four main factors:

- 1) Individual Factors: These factors pertain to the behavior, choices, and abilities of individuals in managing their lives. Pathological conditions, such as personal attitudes, skills, and decision-making processes, can contribute to poverty. Individual circumstances and capabilities play a role in shaping one's economic outcomes.
- 2) Social Factors: Social factors encompass discrimination based on gender, age, ethnicity, and other social dimensions. These factors create barriers and disadvantages that contribute to the impoverishment of certain individuals or groups. Discrimination and unequal social environments can trap individuals in poverty and limit their access to resources and opportunities.
- 3) Cultural Factors: Cultural conditions and qualities also influence poverty. Negative attitudes and beliefs, such as a sense of laziness, fatalism, lack of entrepreneurial spirit, and a disregard for work ethic, can contribute to poverty. Cultural factors can shape individuals' perceptions and behaviors regarding work, economic activities, and personal motivation.
- 4) Structural Factors: Structural factors refer to the systemic conditions that are characterized by unfairness, insensitivity, and limited accessibility to social service institutions. These structural deficiencies create barriers to economic opportunities and social mobility, leading to persistent poverty. Inadequate social service provision and an unjust system can contribute to the perpetuation of poverty.

By considering these factors, policymakers and stakeholders can develop targeted strategies to address poverty comprehensively. This may involve addressing individual capabilities and behavior, addressing social discrimination and inequalities, promoting positive cultural values and attitudes, and advocating for structural reforms that improve access to resources and opportunities for all individuals in society.

Democracy Index

The Democracy Index is indeed a tool developed by the Economist Intelligence Unit (EIU) to assess the state of democracy in different countries. It provides a comprehensive evaluation of democratic processes, political participation, and civil liberties within a country. Democracy, as a political system, is based on the principle of popular sovereignty, where power is vested in the people and their elected representatives (Syaukani et al., 2012).

Democracy serves as a mechanism to ensure that governments are accountable to the will of the people and that citizens have the opportunity to participate in decision-making processes. It creates a framework for open dialogue, political competition, and protection of individual rights and freedoms (Daven, 2016).

In Indonesia, the Indonesian Democracy Index (IDI) is used to measure the development of democracy in the country. The IDI assesses three main aspects: Civil Liberties, Political Rights, and Democratic Institutions (BPS, 2020). Civil Liberties focus on individual rights, freedom of expression, association, and assembly. Political Rights examine the electoral process, political participation, and the functioning of political parties. Democratic Institutions assess the effectiveness and transparency of governmental institutions, including the executive, legislative, and judiciary branches.

The use of the Analytical Hierarchy Process (AHP) in determining the weights for the Indonesian Democracy Index (IDI) is a common approach in decision-making processes that involve multiple criteria and expert judgment. AHP is a mathematical method that allows decision-makers to systematically compare and prioritize different criteria based on their relative importance.

In the context of the IDI, the AHP methodology is used to assign weights to the various aspects and sub-aspects of democracy, such as Civil Liberties, Political Rights, and Democratic Institutions. These weights reflect the perceived importance of each criterion in contributing to the overall measurement of democracy.

The process of determining the weights typically involves conducting interviews or distributing questionnaires to experts or stakeholders who have knowledge and expertise in the field of democracy. The respondents are asked to compare the importance of different criteria and provide pairwise comparisons. The collected data from the respondents' answers are then tabulated and analyzed.

The pairwise comparisons are used to construct a matrix that represents the relative importance of each criterion or alternative. The matrix is typically symmetric, with elements a_{ij} representing the preference or importance of criterion i over criterion j . According to Saaty's principle in Kuncoro (2014), the elements of the matrix follow the reciprocal relationship $a_{ij} = 1/a_{ji}$.

By applying mathematical calculations and algorithms, the AHP methodology allows for the determination of priority weights that reflect the relative importance of each criterion in the overall assessment of democracy. These weights are then used to aggregate the individual scores and calculate the final IDI.

The calculation of the Democracy Index in Indonesia (IDI) at the regional level follows a step-by-step process, as depicted in the provided picture. Before calculating the index, quantitative data for each indicator are obtained from newspaper reviews and document analysis. These indicators are then used to calculate the indicator index, which is subsequently aggregated to calculate the overall democracy index.

The Democracy Index is measured on a scale of 1 to 100, with a normative interpretation where a score of 1 represents the lowest performance and a score of 100 represents the highest performance. The scale is further divided into three categories: good (index score above 80), moderate (index score between 60 and 80), and poor (index score below 60), representing different levels of democratic performance.

The aspect of civil liberties, which contributes to the Democracy Index, is influenced by indicators such as freedom of opinion, belief, assembly, and freedom from discrimination. These indicators encompass individual and societal freedoms, including the protection and fulfillment of human rights (HAM).

The aspect of political rights, another component of the Democracy Index, is influenced by indicators such as the right to vote and be elected, as well as political participation in decision-making and oversight processes. These indicators reflect the level of participation and inclusivity in the democratic system.

The aspect of democratic institutions is influenced by indicators such as free and fair elections, the role of legislative bodies (DPRD), political parties, local government bureaucracy, and an independent judiciary. These indicators assess the functioning and effectiveness of democratic institutions and their ability to uphold democratic principles and governance.

It is important to note that while democracy is associated with freedom, it is not absolute freedom without limits. Democracy operates within the framework of the rule of law, which ensures that rights and freedoms are protected and regulated by legal principles (Kusmanto, 2014).

To sustain democracy effectively, several important elements are required. These include the establishment of a robust rule of law, the presence of a civilized society that respects democratic values and norms, and the formation of strategic alliances among various societal groups (Fahmi, 2019).

Impact of Democracy Index on Poverty

Amartya Sen, the Nobel laureate in economics in 1998, has argued that there is a relationship between democracy and poverty alleviation. According to Sen, using a freedom-based approach in development allows individuals to express their opinions, critique policies, and make choices to improve their lives. Democracy plays a crucial role in reducing poverty by influencing the policy-making process and addressing the conditions that contribute to poverty (Arifin, 2019; Sunaryo, 2017).

While democracy is not a perfect system, it provides an open space for civil rights, political freedom, and democratic institutions, which can lead to increased prosperity (Bariyah, 2022). Good governance and a high quality of democracy are important factors in addressing poverty. When the quality of democracy is good, it tends to produce effective and accountable leaders who prioritize the needs of the community, resulting in policies that address poverty and prevent corruption (Sutarto, 2020; Sunaryo, 2017).

To achieve poverty reduction, it is crucial to improve the democracy index by enhancing civil and political rights, particularly in the economic domain. The quality of democracy can serve as an indicator of the overall well-being and economic welfare of a country (Adnan & Amri, 2021); (Aditiyawarman, 2020). Paying attention to civil and political rights is essential for fostering positive changes in the democratic system, especially in developing countries, and ultimately achieving prosperity (Arianto, 2017).

However, challenges persist in poverty reduction efforts, such as political instability, lack of government intervention, inadequate policies, macroeconomic imbalances, and rampant corruption. Overcoming these challenges becomes crucial for effective government policies (Hussaini, 2014).

In summary, the views of Amartya Sen and other scholars highlight the significant relationship between democracy and poverty alleviation. Democracy, when accompanied by good governance and a high quality of democracy, can contribute to the reduction of poverty by ensuring inclusive policies, accountable leadership, and respect for civil and political rights. However, addressing challenges such as political instability and corruption is essential to achieve effective poverty reduction.

Previous Research

The studies mentioned provide valuable insights into the relationship between the democracy index and poverty. Abbas & Dompok's research (2020) concluded that democracy has a significant impact on achieving prosperity and welfare in Indonesia. However, they emphasized that a democratic system must be accompanied by strong political and other institutional systems to effectively improve people's welfare. (Arifin, 2019) found that democracy and social welfare have an explicit relationship in Indonesia. The democratic system, with its values of justice and freedom, can contribute to achieving social welfare. However, achieving prosperity requires attention to institutional strengthening, political rights, and values that promote freedom.

Assadzadeh & Pourqoly (2013) conducted research in MENA countries and found that foreign investment and institutional quality improvement have a significant effect on reducing poverty. Civil liberties and political stability also play a positive role in poverty reduction by attracting foreign investment and creating employment opportunities. Bariyah (2022) explored the relationship between the democracy index and income inequality. The study found that as the democracy index increases, income inequality also tends to increase. This suggests that democracy alone may not directly reduce income inequality and further measures are needed to address this issue.

Chujor (2017) focused on Nigeria's experience and highlighted the importance of democracy as an instrument in poverty alleviation. The study emphasized the involvement of communities, individuals, NGOs, and government organizations in addressing poverty through democratic processes.

The studies mentioned provide contrasting perspectives on the relationship between democracy and poverty in Indonesia. Martha et al. (2014) suggest that democracy has not led to a prosperous level in the country and has no direct effect on welfare. They argue that the measurement systems for welfare in Indonesia still fall short of the standards, indicating that there are other factors that need attention to achieve prosperity.

Research conducted by Nawawi (2015) highlights the lack of openness in the use of regional budget funds (APBD) for poverty alleviation policies in West Sulawesi Province. This suggests that the local government and DPRD (Regional People's Representative Council) may not prioritize poverty reduction effectively through budget allocation. Nihaya's research (2016) suggests that while democracy has a significant relationship to poverty in general, it may not be significant in the context of Indonesia. The author argues that democracy tends to benefit those with higher economic well-being, leading to the perception that it primarily serves the elite.

In contrast, Rasbin's research (2020) demonstrates the role of local government in reducing poverty and unemployment in Yogyakarta and Malang through various programs, including the family report card program, the Segoro Amarto Movement, KUBE (Micro Enterprise Development Program), CSR (Corporate Social Responsibility), and support from business actors and banking institutions.

Research conducted by Sujarwoto (2015) suggests that political stability can have an impact on poverty, indicating that an increase in political stability without a proper response to democracy and development may lead to policies that are not responsive to the needs of the community, potentially exacerbating poverty. The cases of corruption and the lack of attention from local governments to public opinion are cited as factors contributing to the difficulty in overcoming poverty.

Sutarto's research (2020) emphasizes the importance of implementing democratic values, particularly in the context of Pancasila, to create a clean and just government that can effectively reduce poverty. Widuri's research (2021) focuses on Europe and highlights the positive effect of democracy on people's welfare in Western Europe compared to Eastern Europe. The study also indicates that the representation of women in parliament has an impact on welfare. Yolanda's research (2019) examines the relationship between corruption perception, democracy, politics, economic growth, and poverty in ASEAN countries. The study suggests that corruption perception has a significant negative effect on

poverty, while democracy has an insignificant negative effect. It also highlights the significance of politics in reducing poverty, and the positive impact of economic growth.

Zaini's research (2019) highlights the influence of democratic politics on social welfare, indicating that democracy has an impact on the level of welfare. However, it also acknowledges that social welfare has not fully provided welfare for everyone as expected in a democratic system, emphasizing the need for further consideration and improvement in policy implementation. These studies collectively indicate that democracy can have a positive impact on poverty alleviation and social welfare. They highlight the complex dynamics and various factors that can influence poverty levels, emphasizing the importance of responsive governance, political stability, and the effective implementation of democratic values in achieving social welfare and reducing poverty. However, it is important to consider other factors such as institutional strength, political stability, economic policies, and the involvement of various stakeholders in achieving comprehensive and sustainable poverty reduction.

Conceptual Framework and Hypothesis

Based on the information provided, the influence of the variables AKS (X_1), AHP (X_2), and ALD (X_3) on the Democracy Index and Poverty Level can be summarized as follows:

- 1) AKS (X_1) - Aspect of Civil Liberties: The improvement of civil liberties, where individuals have freedom and opportunities to meet their needs without threats or obstacles, is expected to contribute to reducing poverty levels.
- 2) AHP (X_2) - Aspect of Political Rights: Enhancing democracy in the Aspect of Political Rights, particularly the right to participate in decision-making processes, can lead to policies that are more responsive to the needs of the community.
- 3) ALD (X_3) - Aspect of Democratic Institutions: Increasing the democracy index in the Aspect of Democratic Institutions entails ensuring that institutions or agencies responsible for governance prioritize the interests of the community rather than personal power or selfish motives.

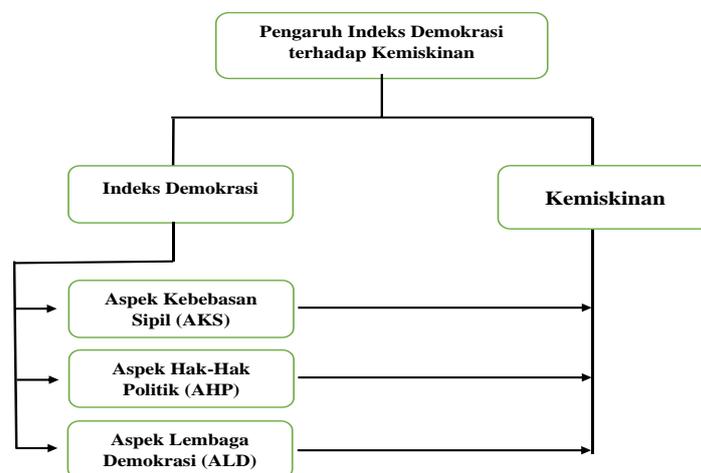


Figure 3. Research Conceptual Framework

- 1) Hypothesis 1: The level of Civil Liberties significantly influences the poverty level in Indonesia.
- 2) Hypothesis 2: The level of Political Rights significantly influences the poverty level in Indonesia.
- 3) Hypothesis 3: The level of Democratic Institutions significantly influences the poverty level in Indonesia.

3. RESEARCH METHOD

The research utilizes a descriptive research method with a quantitative approach. It aims to analyze data and provide an overview of the relationship between the dependent variable, which is Poverty, and the independent variables, namely Aspects of Civil Liberties (AKS), Aspects of Political Rights (AHP), and Aspects of Democratic Institutions (ALD).

The data used in the research consist of time series data from 2009 to 2019 and cross-sectional data from 34 provinces in Indonesia. This combination of time series and cross-sectional data is referred to as panel data (Gujarati, 2012). The data were obtained from annual reports published by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia (BPS RI) and other relevant agencies.

To analyze the data, the research employs multiple linear regression, which examines the effect of multiple independent variables on a single dependent variable. Eviews version 10, a statistical software, is used for data processing and analysis. The study uses a parametric statistical approach with a significance level (alpha) of 0.05, indicating a 5% error rate.

Overall, the research aims to determine the relationship between the aspects of democracy (Civil Liberties, Political Rights, and Democratic Institutions) and the poverty level in Indonesia using quantitative analysis and multiple linear regression.

It is important to note that the references mentioned Sugiyono, 2016; Quinlan & Zikmund, 2015; and Widarjono, 2018b) are likely sources that provide further insights into the methodology and concepts of descriptive research, quantitative analysis, and data presentation techniques.

Below is explained the operational definition and measurement of each variable.

Aspects of Civil Liberties

The Civil Liberties Aspect (AKS) in this research measures the level of freedom experienced by individuals, taking into account the limitations imposed by the rule of law. AKS is constructed using a 10-indicator approach with 4 variables. The aspect of civil liberties is developed through three stages, which involve the calculation of quantitative data for each indicator, consideration of qualitative data obtained from interviews, and the construction of indexes for each variable.

Quantitative data:

$$\text{Index (Xijk)} = \sum_{k=1}^n ((X_{ijk} - X_{\text{worst}}) / (X_{\text{ideal}} - X_{\text{worst}})) \quad (1)$$

Qualitative data:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Index (Xijk)}) \times 100\% \pm 10 \quad (2)$$

Variable index:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk}) \quad (3)$$

Aspect indeks:

$$(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij}) \quad (4)$$

Description :

$I(A_i)$: i-th index aspect

P_{ij} : The weighting value of AHP for the j-variable and i-aspect

$I(V_{ij})$: j-th variable index for i-th aspect

Aspects of Political Rights

The Aspect of Political Rights (AHP) in this research measures the level of participation and competition within the political system. AHP is constructed using a 7-indicator approach with 2 variables. The aspect of political rights is developed through three stages, which involve the calculation

of quantitative data for each indicator, consideration of qualitative data from interviews, and the construction of indexes for each variable.

Quantitative data:

$$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{\sum_{k=1}^n ((X_{ijk} - X_{\text{worst}})) / (X_{\text{ideal}} - X_{\text{worst}})}{n} \quad (5)$$

Qualitative data:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Index } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10 \quad (6)$$

Variable indeks:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk}) \right] \quad (7)$$

Aspect indeks:

$$(A_i) = \sum_{j=1}^n \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij}) \right] \quad (8)$$

Description :

$I(A_i)$: i-th index aspect

P_{ij} : The weighting value of AHP for the j-variable and i-aspect

$I(V_{ij})$: j-th variable index for i-th aspect

Aspects of Democratic Institutions

The Aspect of Democratic Institutions (ALD) in this research measures the performance and effectiveness of institutions in upholding democratic principles. ALD is constructed using an 11-indicator approach with 5 variables. The aspect of democratic institutions is developed through three stages, which involve the calculation of quantitative data for each indicator, consideration of qualitative data from interviews, and the construction of indexes for each variable.

Quantitative data:

$$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{\sum_{k=1}^n ((X_{ijk} - X_{\text{worst}})) / (X_{\text{ideal}} - X_{\text{worst}})}{n} \quad (9)$$

Qualitative data:

$$I(X_{ijk}) = (\text{Index } (X_{ijk})) \times 100\% \pm 10 \quad (10)$$

Variable indeks:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk}) \right] \quad (11)$$

Aspect indeks:

$$(A_i) = \sum_{j=1}^n \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij}) \right] \quad (12)$$

Description :

$I(A_i)$: i-th index aspect

P_{ij} : The weighting value of AHP for the j-variable and i-aspect

$I(V_{ij})$: j-th variable index for i-th aspect

Poverty Rate

The poverty rate is calculated as the percentage of the population living below the poverty line. The poverty line represents the income or expenditure level below which individuals or households are considered to be in poverty. The formula to calculate the poverty rate is as follows:

$$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{(z - y_i)}{z} \right] \alpha \quad (13)$$

Description :

- α : 0
- z : poverty line
- y_i : average per capita expenditure below the poverty line
- q : the number of people living below the poverty line
- n : total population.

As for the estimation model on the equation of the influence of civil liberties aspects, aspects of political rights, aspects of democratic institutions on poverty:

$$KN_{it} = \alpha + \beta_1 AKS_{it} + \beta_2 AHP_{it} + \beta_3 ALD_{it} + e_{it} \quad (14)$$

Where :

- KN : Poverty
- AKS : Civil Liberties Aspect
- AHP : Political Rights Aspect
- ALD : Democratic Institutions Aspect
- α : Shows intercept or constant.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Independent variable regression coefficient.
- i : Shows Indonesian Province cross section
- t : Shows time series data (2009-2019)
- e : Error or confusion component

In regression analysis, there are several classic assumptions that need to be satisfied in order to obtain reliable and valid results. These assumptions include multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. Before interpreting the data, it is important to conduct tests to assess whether these assumptions are met.

Multicollinearity Test: This test examines whether there is a high correlation among the independent variables in the regression model. High multicollinearity can lead to unstable and unreliable coefficient estimates. Various methods can be used to detect multicollinearity, such as calculating the correlation matrix or using variance inflation factors (VIF).

Heteroscedasticity Test: Heteroscedasticity refers to the unequal variance of the errors across different levels of the independent variables. It violates the assumption of constant variance of errors (homoscedasticity). Heteroscedasticity can affect the efficiency and reliability of the regression estimates. There are several tests available to detect heteroscedasticity, such as the Breusch-Pagan test or the White test.

Autocorrelation Test: Autocorrelation occurs when the errors or residuals in a regression model are correlated with each other. It violates the assumption of independence of errors. Autocorrelation can lead to inefficient and biased coefficient estimates. Tests for autocorrelation include the Durbin-Watson test, the Breusch-Godfrey test, or the Ljung-Box test.

Once the classic assumption tests have been conducted and any violations have been addressed, the panel data regression estimation method can be applied. There are three model approaches commonly used (Gujarati, 2015):

- 1) **Common Effect Model (CEM):** This model assumes that the parameters estimated by the Ordinary Least Squares (OLS) approach are the same across all individuals. It does not take into account individual-specific effects.
- 2) **Fixed Effect Model (FEM):** This model allows for differences in intercepts across individuals, but assumes that the regression coefficients are the same for all individuals. It captures individual-specific effects that are constant over time.

- 3) Random Effect Model (REM): This model considers both individual-specific effects and time-specific effects. It assumes that the errors are correlated across time and individuals, allowing for random variations in intercepts.

Model selection can be done using various tests (Widarjono, 2018), such as the Lagrange Multiplier test, the Chow test, and the Hausman test. These tests help determine the most appropriate model for the data based on the residual values and the suitability of the models.

In addition, statistical tests, such as t-tests and F-tests, can be conducted to assess the significance of individual variables or the overall model fit. The R² test, or the coefficient of determination, provides information about the proportion of variance in the dependent variable that is explained by the independent variables.

4. RESULTS AND DISCUSSION

RESULTS

Classic Assumption Test

Normality Test

The Jarque-Bera test is used to test the normality of the residuals in the regression analysis. It examines whether the distribution of the residuals follows a normal distribution or deviates from it. If the Jarque-Bera probability value (often referred to as p-value) is greater than 0.05, it suggests that there is no evidence to reject the null hypothesis of normality. In other words, if the p-value is larger than 0.05, it indicates that the residuals are normally distributed (Gujarati, 2012).

Table 1. Normality Test Results

<i>Indicator</i>	
<i>Jarque-Bera</i>	<i>15,91680</i>
<i>Probabilitas</i>	<i>0,000350</i>

Source: Results of data processing through EViews 10

The Jarque-Bera test suggests that the residuals in this case do not follow a normal distribution, as indicated by the p-value of 0.000350, which is less than the specified significance level of 0.05. This indicates evidence against the null hypothesis of normality, it can be concluded that the model used is not normally distributed. However, it's important to note that the assumption of normality is more critical for smaller sample sizes. As this study has more than 100 data points, the assumption of normality can be relaxed to some extent. With a larger sample size, the central limit theorem states that the distribution of sample means tends to be approximately normal, even if the underlying population is not normally distributed (Gujarati, 2012).

Multicollinearity Test

Multicollinearity refers to the presence of high correlation or intercorrelation between independent variables. If the correlation coefficient between independent variables is below 0.80, it indicates a lower level of intercorrelation or collinearity, suggesting that multicollinearity may not be a major concern in the regression equation (Ghozali, 2017).

Table 2. Multicollinearity Test Results

<i>Variable</i>	<i>KN</i>	<i>AKS</i>	<i>AHP</i>	<i>ALD</i>
KN	1	0,13044644	-0,3777449	-0,35120243
AKS	0,130446436	1	-0,11675583	-0,08122373
AHP	-0,37774499	-0,11675584	1	0,21897036
ALD	-0,35120243	-0,08122373	0,21897036	1

Source: Results of data processing through EViews 10

The results of the multicollinearity test show that the correlation coefficients between the independent variables in the regression equation are all below 0.80, it suggests that there is no significant multicollinearity issue. In other words, the variables are not highly correlated with each other, and there is no strong linear relationship between them.

Heteroscedasticity Test

Heteroscedasticity refers to a situation where the variability of the errors or residuals in a regression model is not constant across all levels of the independent variables. In other words, the spread of the residuals differs for different values of the predictors, indicating a violation of the assumption of homoscedasticity.

Table 3. Heteroscedasticity Test Results

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
F-statistic	0,954810	Prob. F(9,352)	0,4775
Obs*R-squared	8,626816	Prob. Chi-Square(9)	0,4724

Source: Results of data processing through EViews 10

In this case, since the obtained probability value (0.4724) is greater than the significance level of 0.05, it indicates that the regression equation does not exhibit significant heteroscedasticity. This is a positive finding, as it means that the assumption of homoscedasticity is likely satisfied, and the variability of the residuals is relatively constant across different levels of the independent variables.

Autocorrelation Test

The autocorrelation test, also known as the Durbin-Watson test, is conducted to detect the presence of autocorrelation, which refers to the correlation between the error terms in a regression model and the errors in previous periods (t-1).

The Durbin-Watson test statistic ranges from 0 to 4. A value of 2 indicates no autocorrelation, a value less than 2 suggests positive autocorrelation, and a value greater than 2 suggests negative autocorrelation.

Table 4. Autocorrelation Test Results

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2,456605	Prob. F(2,356)	0,0872
Obs*R-squared	4,928005	Prob. Chi-Square(2)	0,0851

Source: Results of data processing through EViews 10

Based on the results of the autocorrelation test, where the probability value (Obs*Square) is 0.0851 and greater than the specified significance level of 0.05, it can be concluded that the regression equation does not exhibit significant autocorrelation problems. This indicates that there is no substantial correlation between the error terms in the current period and the errors in the previous period (t-1) in the linear regression model.

Panel Data Estimation Model Selection

The test tools used to select a model are the Lagrange test, Chow test, and Hausman test, the results of which can be seen in Table 5.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow, dan Uji Hausman

Test	Comparison	Probability	Verdict
Lagrange Multiplier	Common Effect Model & Random Effect Model	0,0000	Random Effect Model
Chow	Common Effect Model & Random Effect Model	0,0000	Fixed Effect Model
Hausman	Common Effect Model & Random Effect Model	0,0127	Fixed Effect Model

Source: Results of data processing through EViews 10

Based on the results presented in Table 5, it appears that both the Lagrange test and the Chow test yield probability values that are smaller than the specified significance level of 0.05. This leads to the rejection of the null hypothesis (H_0) and the acceptance of the alternative hypothesis (H_1). Consequently, the selected model is the fixed effect model.

Furthermore, the results of the Hausman test also indicate that the Chi-square probability value is smaller than the specified significance level of 0.05, specifically $0.0127 < 0.05$. This leads to the rejection of H_0 and the acceptance of H_1 . Therefore, based on the Hausman test, the selected model is also the fixed effect model.

In conclusion, both the Chow test and the Hausman test suggest that the fixed effect model is the most appropriate model for the analysis.

Multiple Linear Regression Analysis

The following are the results of panel data regression using the Panel Least Squares method:

Table 6. Fixed Effect Regression Model Results

Variable	Coefficient	T-Statistic	Probability	Verdict
C	13,96898	9,423221	0,0000	Significant
AKS	0,066345	4,767552	0,0000	Significant
AHP	-0,063286	-7,541670	0,0000	Significant
ALD	-0,050385	-4,798814	0,0000	Significant

Source: Results of data processing through EViews 10

The regression equation for the research is as follows:

$$KN_{it} = 13,96898 + 0,066345 AKS_{it} - 0,063286 AHP_{it} - 0,050385 ALD_{it}$$

Below is a summary of the interpretations of the coefficients in the regression equation:

- 1) The constant term of 13.96898 represents the expected poverty level when all independent variables (AKS, AHP, and ALD) are held constant at zero. It indicates the baseline poverty level in the absence of any influence from the independent variables.
- 2) The coefficient for the Aspects of Civil Liberties (AKS) variable, which is 0.066345, suggests that for every 1% increase in the level of civil liberties, the poverty rate is expected to increase by 0.066345, all else being equal. This means that when individuals have more freedom, it may lead to increased poverty levels.
- 3) The coefficient for the Aspects of Political Rights (AHP) variable, which is -0.063286, indicates that for every 1% increase in the level of political rights (participation and competition), the poverty rate is expected to decrease by 0.063286, assuming other variables remain constant. This implies that greater political rights can potentially contribute to reducing poverty.
- 4) The coefficient for the Aspects of Democratic Institutions (ALD) variable, which is -0.050385, suggests that for every 1% increase in the role of democratic institutions, the poverty rate is

expected to decrease by 0.050385, holding other variables constant. This indicates that stronger democratic institutions may have a positive impact on reducing poverty.

Based on the estimation results of the fixed effect model, it appears that in the context of cross-section analysis, there are variations in the effect of each province on poverty. The positive values indicate a positive impact on poverty, while negative values suggest a negative impact on poverty.

Table 7. Province Coefficient Value with Fixed Effect Model

No	Province	Effect	No	Province	Effect
1	ACEH	0,551903	18	NTB	0,584947
2	SUMUT	-0,064753	19	NTT	0,690764
3	SUMBAR	-0,175696	20	KALBAR	-0,308958
4	RIAU	-0,239593	21	KALTENG	-0,578206
5	JAMBI	-0,261861	22	KALSEL	-0,581719
6	SUMSEL	0,266039	23	KALTIM	-0,524357
7	BNGKLU	0,459363	24	SULUT	-0,259059
8	LAMPUNG	0,369809	25	SULTENG	0,285039
9	KBB	-0,645837	26	SULSEL	-0,05862
10	KEP, RIAU	-0,477217	27	SULTENGG	0,153274
11	DKI JKT	-0,996985	28	GRNTLO	0,569372
12	JABAR	-0,114685	29	SULBAR	0,118906
13	JATENG	0,295116	30	MALUKU	0,648288
14	DIY	0,350335	31	MALTARA	-0,403159
15	JATIM	0,179913	32	Papua,B	0,782230
16	BNTN	-0,598359	33	PAPUA	0,895762
17	BALI	-0,911992			

Source: Results of data processing through EViews 10

There are 16 provinces have a positive effect on poverty, with the highest positive effect observed in Papua province with a score of 0.895762. This suggests that in these provinces, the factors represented by the independent variables (AKS, AHP, ALD) contribute to an increase in poverty levels.

On the other hand, 17 provinces have a negative effect on poverty, with the lowest negative effect observed in South Sulawesi province with a score of -0.058624. This implies that in these provinces, the factors represented by the independent variables contribute to a decrease in poverty levels.

The fixed effect model's estimation results reveal the influence of each province's cross-section on poverty. Out of the 16 provinces, Aceh, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, Maluku, West Papua, and Papua have positive and insignificant values. This suggests that an improvement or increase in civil liberties, political rights, and democratic institutions in these provinces would also lead to an increase in poverty.

Conversely, among the 17 provinces, North Sumatra, West Sumatra, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Riau Islands, DKI Jakarta, West Java, Banten, Bali, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, and North Maluku have negative values. However, these negative effects are not significant except for South Sulawesi. This indicates that if civil liberties, political rights, and democratic institutions improve or increase in these provinces, poverty is likely to decrease.

Statistic Test (Test of Goodness of Fit)

t-Statistic Test

The t-Statistics test is employed to assess the impact of each independent variable, whether significant or insignificant, on the dependent variable at a significance level of 5%. It helps determine the statistical significance of the relationship between the variables and provides insights into the magnitude and direction of the effects (Gujarati, 2012).

Table 8. t-Statistic Test Results

Variable	Coefficient	t-Statistic	Probability	Verdict
AKS	0,066345	4,767552	0,0000	Significant
AHP	-0,063286	-7,541670	0,0000	Significant
ALD	-0,050385	-4,798814	0,0000	Significant

Source: Results of data processing through EViews 10

Based on the obtained t-statistic test results, the following conclusions can be drawn:

- 1) The variable AKS (Aspects of Civil Liberties) has a t-statistic probability of 0.0000, which is less than the significance level of 0.05 ($\alpha = 5\%$). The positive coefficient (0.066345) indicates that AKS has a positive and significant impact on poverty in Indonesia. Therefore, an increase in civil liberties would lead to an increase in poverty, and a decrease in civil liberties would result in a decrease in poverty.
- 2) The variable AHP (Aspect of Political Rights) also has a t-statistic probability of 0.0000, which is less than the significance level of 0.05 ($\alpha = 5\%$). The negative coefficient (-0.063286) suggests that AHP has a negative and significant effect on poverty in Indonesia. Hence, an increase in political rights would lead to a decrease in poverty, while a decrease in political rights would result in an increase in poverty.
- 3) Similarly, the variable ALD (Aspect of Democratic Institutions) has a t-statistic probability of 0.0000, indicating statistical significance at the 5% level. The negative coefficient (-0.050385) implies that ALD has a negative and significant impact on poverty in Indonesia. Therefore, an increase in democratic institutions would lead to a decrease in poverty, while a decrease in democratic institutions would result in an increase in poverty.

In summary, the analysis suggests that civil liberties, political rights, and democratic institutions play crucial roles in shaping poverty levels in Indonesia. Enhancing these aspects can contribute to poverty reduction, while a decline in these aspects may lead to an increase in poverty.

F-Statistic Test

To assess the combined influence of the independent variables (aspects of civil liberties, aspects of political rights, and aspects of democratic institutions) on the dependent variable (poverty), an F-statistics test was conducted using Eviews version 10.

Table 9. F-Statistic Test Results

Indicator	
F-Statistic	159,0562
F-Statistic Probability	0,000000

Source: Results of data processing through EViews 10

Based on the obtained results of the F-Statistics test, an F-Statistics value of 159.0562 with a significant probability of 0.0000 (which is less than the significance level of 0.05, $\alpha=5\%$) was observed. This leads to the conclusion that the combined variables of Aspects of Civil Liberties (AKS), Aspects of Political Rights (AHP), and Aspects of Democratic Institutions (ALD) have a significant and

collective influence on the variable Poverty (KN) in Indonesia. Therefore, it can be interpreted that these three independent variables (AKS, AHP, and ALD) have an impact on poverty in Indonesia.

Coefficient of Determination (R²)

To determine the percentage of the total variation in the independent variables (aspects of civil liberties, aspects of political rights, and aspects of democratic institutions) that is explained by the dependent variable (poverty), the coefficient of determination (R²) test is conducted.

Table 10. Coefficient of Determination (R²) Results

Indicator	
R-Squared	0,944520
Adjusted R-Squared	0,938581

Source: Results of data processing through EViews 10

Based on the results of the coefficient of determination test, it is found that the R² value is 0.944953. This indicates that the variables representing aspects of civil liberties, aspects of political rights, and aspects of democratic institutions can collectively explain approximately 94.45% of the variation in the poverty variable. The remaining 5.55% of the variation is likely to be influenced by other variables that are not included in the model under study.

DISCUSSION

The Effect of the Democracy Index on Poverty.

The Influence of Civil Liberties Aspects on Poverty

Based on the conducted tests in this study, it was determined that the variable representing civil liberties has a positive and significant impact on poverty at a 5% significance level. This conclusion is supported by a t-statistic value of 4.767552, indicating a positive relationship between civil liberties and poverty. The probability value of 0.0000 is less than the significance level of 0.05, which leads to the rejection of the null hypothesis (H₀).

This interpretation suggests that changes in the civil liberties aspect will result in corresponding changes in the poverty variable. Specifically, an increase in civil liberties will lead to an increase in poverty, and this relationship is statistically significant. Conversely, a decrease in civil liberties will result in a decrease in poverty, and this relationship is also statistically significant.

The aspect of civil liberties generally refers to an individual's freedom to pursue their goals and meet their needs without hindrance, coercion, or threats. In an ideal setting, civil liberties provide space for the entire community to express their opinions and criticisms. It is believed that when civil liberties are present, it facilitates a conducive environment for the government and the community to collaborate in tackling poverty alleviation (Firmanzah, 2012).

However, the findings of this study contradict the expected outcome. It suggests that an increase in the aspect of civil liberties leads to an increase in poverty, while a decrease in civil liberties leads to a decrease in poverty. This condition implies that excessive freedom may create opportunities for individuals to engage in activities that are detrimental to society, such as committing crimes. Consequently, this hampers economic development and deviates from the intended outcomes.

Furthermore, the study indicates that the application of freedom in Indonesia has become a hindrance to economic progress due to ongoing demonstrations. These demonstrations often arise from the government's perceived failure to implement appropriate policies, which can have negative impacts on society. Demonstrations may escalate into acts of violence or anarchy, leading to disruptions in development projects, damage to public infrastructure, and hindrance to community activities, posing a threat to society as a whole.

Instances of threats to freedom of expression are observed during these demonstrations, as law enforcement officials have been reported to take repressive actions against community members, including human rights activists, journalists, students, and other individuals expressing their aspirations. Amnesty International Indonesia's monitoring in 2019 revealed numerous cases of violations of freedom of expression, including 78 reported incidents, 290 cases of violence against human rights defenders, and 108 victims.

The issue of freedom can indeed create opportunities for certain elite elements to exploit their own interests, leading to practices such as corruption, collusion, and nepotism. This problem is exacerbated by weak and unfair law enforcement. The Corruption Perceptions Index indicates that corruption levels in Indonesia have shown some improvement since 2009, but it remains high. In 2019, there were 271 reported corruption cases with 580 suspects, and the value of losses increased by IDR 8.41 trillion compared to the previous year, marking the highest losses in the past five years. As a result, Indonesia is ranked 85th out of 180 countries in terms of corruption perception.

These findings contradict the theory of freedom presented by Amartya Sen, which suggests that freedom provides opportunities for expressing opinions, criticism, and formulating policies to address poverty issues (Indro, 2013). Additionally, they are inconsistent with a study conducted in South Korea by (Kim et al., 2011), which found that openness and interaction between the government and the community could reduce poverty. Furthermore, the results do not align with the opinion of (Sunaryo, 2017), who states that a country can achieve prosperity through the government's provision of open spaces and freedom for public expression of opinions.

However, the findings of this study are in line with research conducted by Assadzadeh & Pourqoly (2013) in the MENA region, which demonstrated that civil liberties have a positive and significant effect on poverty reduction. This research emphasized that openness and freedom contribute to sustainable poverty alleviation.

The Effect of Aspects of Political Rights on Poverty

The variable of political rights exhibits a negative and significant impact on poverty with a significance level of 5%. This is evident from the t-statistic value of -7.541670, indicating a negative and significant relationship between political rights and poverty. The probability value of 0.0000 is smaller than the specified significance level of 0.05, leading to the acceptance of the H2 hypothesis. In other words, changes in the aspect of political rights can influence the level of poverty. When political rights, including community participation, improve or increase, poverty decreases significantly. Conversely, if political rights decline, poverty increases significantly.

The aspect of political rights serves as an indicator of political democracy, encompassing public participation in the political process and fair competition in general elections. Through community participation in policy monitoring and attention, a better direction can be established. When communities actively participate and supervise, it encourages politicians to prioritize and implement programs aimed at poverty alleviation. Political parties and parliamentary representation can also emphasize the government's responsibility in addressing the issues faced by society, thereby reducing poverty. To ensure effective poverty reduction, the participation and involvement of various stakeholders such as NGOs, family welfare development organizations, community empowerment institutions, farmer groups, social institutions, and the mass media are crucial. These entities pay close attention to program implementation and provide oversight to prevent the misuse of power by the government. Through community participation, access to socio-political and legal interests is achieved, as the community not only actively supervises but also takes part in village programs, contributing to the planning, implementation, and evaluation processes.

One approach taken by politicians and parliamentary representatives is to implement programs aimed at promoting national economic activities that can reduce poverty. These programs involve empowering the poor by providing access to public services such as free education and healthcare for underprivileged families, and enhancing the quality of human resources. Additionally, they may provide mentorship, skills development, entrepreneurship opportunities, business services, partnerships, access to capital, and social protection measures such as insurance-based social security or funding assistance to support the poor and enhance their capabilities.

The findings of this study align with the views expressed by (Sunaryo, 2017), who suggests that the existence of political rights in a country contributes to achieving prosperity, including poverty reduction. Similarly, Adnan & Amri (2021) argue that poverty reduction should be accompanied by an increase in the democracy index through the expansion of civil and political rights within the economic sphere. Arianto (2017) emphasizes the importance of civil and political rights in driving positive changes within the democratic system, leading to prosperity, particularly in developing countries. Roberto & Araujo, (2015) also stress the significance of community participation in poverty alleviation efforts.

However, this research contradicts the findings of Sujarwoto (2015), who discovered a positive relationship between political stability and poverty in Indonesia. According to their research, an increase in political stability leads to an increase in poverty due to misuse of power. Martha et al. (2014) also found no significant impact of democracy on welfare, highlighting the challenges faced in Indonesia's political system, which has not effectively improved welfare due to various underlying issues. These issues include a lack of public participation in responding to democratic processes and insufficient attention given to development initiatives. As a result, political stability can lead to policy-making without adequate community oversight, hindering poverty alleviation efforts. This is evident in the prevalence of corruption cases involving individuals with significant incomes and the failure of local governments to listen to public opinions.

One-way politicians or parliamentary representatives implement a program is by ensuring the continuity of national economic activities aimed at alleviating poverty and empowering the impoverished to reduce their own poverty levels. This involves granting the underprivileged access to essential public services, such as free education and healthcare for disadvantaged families, as well as enhancing the quality of human resources. Additionally, they may offer guidance, skill development, entrepreneurship support, business services, partnerships, access to capital, and establish social protection measures. These measures may include insurance-based social security or assistance programs that provide access to capital, funds, and knowledge enhancement.

The findings of this study align with Sunaryo's viewpoint (2017), who asserts that the presence of political rights within a country can contribute to achieving prosperity, including poverty reduction. Similarly, Adnan & Amri's opinion (2021) argue that reducing poverty must be accompanied by an increase in the democracy index, particularly by enhancing civil and political rights in the economic sphere. This sentiment is echoed by Arianto (2017), who emphasizes the significance of civil and political rights as vital elements for improving the democratic system and attaining prosperity, particularly in developing nations. Roberto & Araujo, (2015) also support this notion, highlighting the importance of community participation in overcoming poverty. Their research suggests that a democratic system, involving the active engagement of individuals, NGOs, grassroots organizations, and government entities, can effectively address the issue of poverty. This aligns with the findings of (Chujor & Dickson, 2017), who conducted a study on democracy as a tool for poverty alleviation in Africa. Chujor & Dickson's research, drawing on Nigeria's experience, demonstrates that poverty reduction can be achieved through a democratic framework that involves community participation, as

well as the collaboration of individuals, NGOs, and government agencies dedicated to promoting the common good.

However, this research contradicts the findings of Sujarwoto (2015), who discovered that political stability has a positive impact on poverty in Indonesia. According to Sujarwoto, an increase in political stability can lead to a rise in poverty levels due to abuses of power. Similarly, Martha et al. (2014) conducted research indicating that democracy does not have a significant effect on welfare in Indonesia. The political system in the country has failed to improve overall welfare due to numerous underlying problems. One contributing factor is the lack of public participation in democratic processes and insufficient attention given to development. Consequently, political stability can be utilized by those in power to make decisions without community oversight or control, hindering efforts to address poverty. This is exemplified by instances of corruption involving individuals with high incomes and the lack of responsiveness from local governments to public opinions and concerns.

The Effect of Aspects of Democratic Institutions on Poverty

The variable related to democratic institutions exhibits a significant and negative impact on poverty, with a significance level of 5%. This is evident from the t-statistic value of -4.798814, indicating a significant negative relationship between democratic institutions and poverty, with a probability value of 0.0000. The probability value being smaller than the chosen significance level of 0.05 ($0.0000 < 0.05$) confirms the acceptance of the H3 hypothesis. Consequently, it can be concluded that changes in the value of democratic institutions, including the roles and responsibilities of these institutions, have an effect on poverty. If institutions, such as the DPRD (Regional People's Representative Council), regional governments, political parties, and the independent judiciary, consistently improve their roles and responsibilities in implementing policies aimed at development and poverty alleviation, it is possible to reduce or overcome poverty.

The aspect of democratic institutions serves as an indicator of democracy, encompassing elements such as free and fair elections, the role of the DPRD (Regional People's Representative Council), the role of political parties, the role of local government bureaucracy, and the role of an independent judiciary. These institutions are responsible for implementing and facilitating programs that prioritize the welfare and interests of society. When democratic institutions are in place, political parties, the DPRD, regional governments, and the independent judiciary play an institutional role in enacting policies and providing public services that support poverty reduction initiatives.

Under ideal conditions, the presence of democratic institutions fosters sustainable and active community development in various social domains. It enables the provision of services, facilities, and budget allocations that are comprehensive, equitable, and fair in the implementation of policies. For instance, budget allocations can be allocated for infrastructure projects and public services, such as repairing roads in rural areas, ensuring access to quality education and healthcare, and assisting underprivileged communities. These initiatives contribute to poverty reduction efforts.

The poverty alleviation agency (LPK) is an essential institution for effectively implementing programs aimed at overcoming poverty and addressing related challenges. LPK plays a crucial role in minimizing issues that may arise during program implementation. The programs implemented by LPK primarily focus on productive activities, empowering individuals within the community by providing guidance and support to develop their skills and entrepreneurial abilities. This approach aims to enhance productivity and enable individuals to contribute to their own economic well-being.

Additionally, the government plays a role in providing social assistance programs that offer relief to the community, ensuring their basic needs are met. Examples of these programs include Staple Food Cards, Pre-Employment Cards, Non-Cash Food Assistance (BPNT), National Health Insurance (JKN-KIS), and the Family Hope Program (PKH). These initiatives aim to provide support and assistance to

vulnerable individuals and households, helping them meet their daily needs and improve their overall quality of life.

The findings of this study are consistent with the research conducted by (Assadzadeh & Pourqoly (2013), which indicates that an improvement in institutional quality can lead to a reduction in poverty. Similarly, Rasbin's research (2020) supports the notion that the role of local government can contribute to poverty reduction and unemployment alleviation in cities like Yogyakarta and Malang.

However, this research does not align with the findings of Nawawi (2015), who investigated the relationship between the DPRD (Regional People's Representative Council) and the Regional Government in formulating poverty-related policies in West Sulawesi Province. Nawawi's research suggests a lack of transparency in the utilization of APBD (Regional Budget) funds and a limited involvement of the community in poverty alleviation policies. Consequently, the study concludes that the DPRD and the local government demonstrate a lack of awareness and responsibility in addressing poverty, resulting in the APBD funds not being effectively utilized to benefit the poor. Nevertheless, it is important to note that the allocation of funds from the APBD is intended to be one of the government's policies for poverty reduction, indicating the significance of institutional roles in providing support to the community.

Furthermore, the findings of this study do not align with the research conducted by Tuya (2013) in Mongolia, which indicates that poverty levels have increased due to government policies that have not been implemented comprehensively. Tuya's research involved a survey in which 80% of the respondents reported that the government had been unable to effectively implement poverty-related policies.

These contrasting findings highlight the complex nature of poverty alleviation and the varied effectiveness of institutional roles and responsibilities across different contexts.

CONCLUSIONS

Based on the results that have been analyzed and discussed, conclusions can be drawn regarding the influence of the democratic index (aspects of civil liberties, aspects of political rights and aspects of democratic institutions) on poverty in Indonesia in 2009-2019.

The presence of civil liberties has a significant and positive influence on poverty in Indonesia. This is because an increase in civil liberties is accompanied by an increase in poverty, and vice versa. This phenomenon can be attributed to the frequent occurrence of demonstrations resulting from government policies that are deemed inappropriate and negatively affect society. These demonstrations can lead to damage to infrastructure, hinder economic development, and pose a threat to society due to anarchic actions. Moreover, the existence of civil liberties provides an opportunity for influential individuals to exploit their power for personal gains, including engaging in acts of corruption. Consequently, despite having civil liberties, poverty cannot be effectively addressed.

Political rights have a significant and negative impact on poverty in Indonesia. This implies that an increase in political rights leads to a decrease in poverty, and conversely, a decrease in political rights corresponds to an increase in poverty. This relationship can be attributed to the fact that political rights provide opportunities for public participation in political activities, enabling citizens to exercise control and supervision. This, in turn, encourages politicians to develop and implement community programs, including those aimed at poverty alleviation. Through parliamentary representation, the emphasis on addressing the concerns faced by the population can lead to a reduction in poverty and improved access to public services for the less fortunate.

Democratic institutions have a significant and negative impact on poverty in Indonesia. This indicates that an increase in the strength of democratic institutions leads to a decrease in poverty, while a decrease in their strength corresponds to an increase in poverty. This relationship can be attributed to

the effective performance of democratic institutions in providing support for poverty alleviation programs. The presence of well-functioning democratic institutions facilitates inter-institutional coordination in implementing poverty alleviation initiatives, resulting in the formulation and execution of effective policies to address poverty-related challenges.

This indicates that poverty reduction can be achieved by enhancing the democratic system through the promotion of political rights and the strengthening of democratic institutions. When the public actively participates in politics and supports democratic processes, the risk of power misuse for personal gain is mitigated. It also underscores the importance of institutions fulfilling their roles and responsibilities effectively to ensure well-designed and purposeful policies. However, it is important to note that addressing poverty in Indonesia cannot rely solely on civil liberties, as the misuse of freedom by elite elements can hinder poverty alleviation efforts.

Based on the conclusions presented, the following recommendations can be proposed for policies aimed at alleviating poverty through the democracy index, considering the aspects of Civil Liberties, Political Rights, and Democratic Institutions:

- 1) **Strengthen Political Rights:** Enhance the participation of the public in political activities by promoting inclusivity, transparency, and accountability. This can be achieved through measures such as promoting voter education, ensuring fair and free elections, and encouraging citizen engagement in decision-making processes.
- 2) **Enhance Democratic Institutions:** Focus on building and strengthening democratic institutions, including government agencies, legislative bodies, and judicial systems, to ensure their effective functioning. This involves ensuring independence, impartiality, and efficiency in their operations, as well as promoting inter-institutional coordination to facilitate poverty alleviation programs.
- 3) **Improve Governance and Accountability:** Foster good governance practices to prevent misuse of power and corruption. This includes promoting transparency, accountability, and anti-corruption measures within all levels of government. Implement mechanisms to hold public officials and institutions accountable for their actions and ensure that resources are allocated effectively towards poverty alleviation efforts.
- 4) **Targeted Poverty Alleviation Programs:** Develop and implement comprehensive poverty alleviation programs that address the specific needs of the population. These programs should focus on providing access to basic services, improving education and healthcare, promoting income-generating opportunities, and empowering marginalized communities. Ensure that these programs are inclusive and reach the most vulnerable populations.
- 5) **Continuous Monitoring and Evaluation:** Establish mechanisms for monitoring and evaluating the impact of poverty alleviation policies and programs. Regularly assess the effectiveness and efficiency of interventions and make necessary adjustments based on the feedback received. This will help ensure that resources are allocated optimally and that policies are responsive to the evolving needs of the population.
- 6) **Foster International Cooperation:** Engage in international collaborations and partnerships to leverage resources, knowledge, and best practices in poverty reduction efforts. Learn from successful experiences of other countries and engage in knowledge-sharing initiatives to enhance the effectiveness of poverty alleviation policies.

By implementing these recommendations, policymakers can foster an environment that supports poverty reduction through the democracy index, promoting inclusive growth, equitable opportunities, and improved well-being for all segments of society.

REFERENCES

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 5(1). <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v5i1.2417>
- Aditiyawardman. (2020). Pembangunan Politik dan Kualitas Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, 6(2).
- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Do Gender Empowerment and Democracy Reduce Poverty Rate? A Cross-Provinces Evidence from Western Indonesia. *Economics & Sociology*, 14(3). <https://doi.org/10.14254/2071-789x.2021/14-3/3>
- Afzal, A., Mirza, N., & Arshad, F. (2021). Pakistan's Poverty Puzzle: Role of foreign Aid, Democracy & Media. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 34(1). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1788964>
- Arianto, J. (2017). NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia. *Jurnal PPKn & Hukum*, 12(2).
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government, Volume 1 No.2*.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan Lanjutan. In *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (Vol. 05, Issue 01).
- Assadzadeh, A., & Pourqoly, J. (2013). The Relationship between Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Poverty: Case of MENA Countries. *Journal of Economics, Business and Management*, 1(2), 161–165. <https://doi.org/10.7763/joebm.2013.v1.35>
- Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>
- Bojang, M. B. S. (2017). Critical Issues Affecting Africa's Development: EGovernment, Democracy and Democratic Principles, And Governance as an Alternative for SocioEconomic Development in Africa. *International Journal of Youth Economy*, 1(1). <https://doi.org/10.18576/ijye/010104>
- Chujor, F. O. (2017). *Democracy as an Instrument of Poverty Reduction in Africa: An Appraisal of the Nigerian Experience*. 3(2), 33–40.
- Chujor, F. O., & Dickson, C. N. (2017). Democracy as an Instrument of Poverty Reduction in Africa: An Appraisal of the Nigerian Experience. *Journal of Political Science and Leadership Research*, 3(2).
- Daven, M. (2016). Korupsi dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1). <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.28.46-73>
- Fahmi, I. (2019). *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EViews 10*.
- Gujarati, D. N. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5. In *Jakarta: Salemba Empat* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Gujarati, D. N. (2015). Ekonometrika Dasar Edisi Kelima Buku 1. In *New York: The McGraw-Hill Companies, Inc*.
- Hussaini, M. (2014). Poverty Alleviation Programs in Nigeria: Issues and Challenges. *International Journal of Development Research*, 4(3).
- Indro, N. P. Y. (2013). Kemiskinan Global Sen Amartya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(13), 23–34.
- Jhingan, M. L. (2014). The Economics of Development and Planning. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Kim, T., Kwon, H.-J., Lee, J., & Yi, I. (2011). Poverty, Inequality, and Democracy: "Mixed Governance" and Welfare in South Korea. *Journal of Democracy Johns Hopkins University Press*, 2(3).
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta Erlangga* (4th ed.). Erlangga.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1).
- Ma'Arif, S. (2012). Problema Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung. *Jurnal Publica*, 2(1).
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. . M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 12(1), 101–110.
- Martha, J., Bainus, A., & Heryadi, D. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan : Teori Dan Realita (Studi Kasus : Indonesia)*.
- Nawawi, J. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Juanda Nawawi. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume*, 8(22), 27–42.
- Nihaya. (2016). Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(2).
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Quinlan, C., & Zikmund, W. (2015). *Business Research Methods*. In Thomson Learning.
- Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta Dan Malang. *Kajian*, 23(2).
- Roberto, P., & Araujo, G. De. (2015). *Working Paper The Impact of Democracy in Inequality , Poverty and Development*.
- Seekings, J. (2013). Poverty and Inclusive Growth in South Africa since 1994. In *Centre for Social Science Research Working Paper (Issue 321)*.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta, CV*.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>
- Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.1>
- Sunaryo. (2017). *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Intergasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, D. (2020). Implementasi Nilai Demokrasi Sebagai Solusi Bagi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *PETITA*, 2(2).
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2012). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Tambunan, T. T. H., & Sukambang, R. (2015). *Perekonomian Indonesia: Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tuya, N. (2013). Democracy and Poverty: A Lesson from Mongolia. *Mongolian Journal of International Affairs*, 18. <https://doi.org/10.5564/mjia.v0i18.66>
- Wahyuni, R. N. T., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.441>
- Widarjono, A. (2018a). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (Edisi ke 5). UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2018b). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Keempat. In *UPP STIM YKPN*.
- Widuri, D. R. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa : Analisis European. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(2).
- Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik Terhadap Kemiskinan di Delapan Negara Asean dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7711>
- Zaini, M. (2019). *Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial*. 25.

ANALISIS DAN PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN MELAWI

Eko Supriyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Pembangunan daerah merupakan motor penggerak untuk pembangunan nasional, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai perencana untuk melakukan berbagai macam transformasi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Untuk mewujudkan dan melaksanakan tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja perekonomian makro Kabupaten Melawi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Upaya dan kebijakan dalam rangka perbaikan tingkat kemakmuran masyarakat dan daerah Kabupaten Melawi dengan mewujudkan hubungan ekonomi dan distribusi kegiatan ekonomi sektor primer menjadi sektor sekunder dan tersier merupakan bagian dari tujuan pertumbuhan ekonomi. Indikator makro yang mengalami trend penurunan adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan yang mengalami trend peningkatan adalah indikator PDRB dan IPM. Jika PDRB meningkat namun pertumbuhan ekonomi menurun, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kenaikan output ekonomi dan laju pertumbuhan

JEL: F61, G21, F22

Kata Kunci : Ekonomi Makro, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian yang cenderung makin kompleks dan dinamis, baik pada tingkat global, nasional maupun daerah telah menyebabkan makin tingginya aspek ketidakpastian (uncertainty) terkait pergerakan dan hubungan antar variabel-variabel ekonomi. Hal ini menuntut para pembuat kebijakan, masyarakat maupun dunia usaha untuk selalu mengamati dan mensiasati setiap perkembangan, termasuk membuat perkiraan-perkiraan tentang gambaran perekonomian di masa mendatang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan serta keputusan-keputusan strategis ke depan. Gambaran ekonomi masa depan biasanya memuat proyeksi terukur mengenai besaran indikator-indikator ekonomi makro utama yang diasumsikan bisa dicapai sesuai dengan kapasitas ekonomi, potensi sumberdaya, serta tantangan dan peluang yang tercipta. (Pattilouw, 2018)

Pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari besarnya jumlah tingkat pertumbuhannya ekonominya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakatnya sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah. Pandemi covid 19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan cenderung menurun selama tahun 2020 – 2021 dan mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2022. Kondisi ini mendorong penetapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN 2023 sebesar 5.3% year on year berdasarkan pertimbangan dinamika

ekonomi di Indonesia. Penetapan target pertumbuhan nasional mendorong penetapan target pertumbuhan daerah sehingga diperlukan suatu kajian untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Melawi tahun 2020 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar masih tumbuh positif namun mengalami perlambatan di 2,63 persen dibanding dengan tahun sebelumnya di 4,25 persen. Sementara dua sektor dengan share terbesar berikutnya tumbuh negatif. Untuk lapangan usaha lainnya, jauh sangat turun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada di kirasan lima persen keatas. Hal ini dapat berupa dampak dari banyak pembangunan yang terpaksa harus berhenti akibat wabah covid19.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, proyeksi ekonomi makro berguna sebagai dasar untuk merencanakan produksi, konsumsi, dan distribusi sumberdaya ekonomi yang tersedia guna menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi di masa depan. Sedangkan bagi pemerintah, proyeksi ekonomi makro tersebut amat dibutuhkan sebagai acuan (benchmark) dalam membuat perencanaan pembangunan agar lebih kredibel, realistis, dan akomodatif terhadap situasi perekonomian kontemporer, dimana hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam rumusan arah dan kebijakan anggaran yang akan menentukan postur, alokasi, dan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (APBN/APBD). (Pattilouw, 2018)

Kendati telah menjadi sesuatu yang lumrah, namun fenomena bergesernya realisasi aktual dari yang ditargetkan tersebut harus menjadi perhatian penting, untuk kemudian diakomodasi dan dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian target-target selanjutnya. Sebab bagaimanapun pergeseran-pergeseran dalam pencapaian asumsi ekonomi jika tidak disiasati secara tepat melalui penyesuaian-penyusunan yang relevan, maka akan dapat mempengaruhi secara sistemik keseluruhan agenda dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ke depan.

2. KAJIAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan atau bisa dikenal dengan perkembangan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pengertian pertumbuhan ekonomi sudah banyak dirumuskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh para ekonom. Boediono (1999) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Widodo, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang telah dikembangkan oleh *United Nations for Development Program* (UNDP) sejak tahun 1990 merupakan indeks komposit yang merupakan gabungan dari tiga dimensi pokok kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk yang terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi kesehatan (Siregar, 2005 : 3).

Pengangguran

Pengangguran bisa disebut dengan angkatan kerja tidak ataupun belum juga mendapatkannya sebuah pekerjaan. Maksudnya, jika seseorang itu sesuatu digolongkan di angkatan kerja, secara itu aktif masih mencari suatu kerja pada suatu tingkatan upah. Namun tidak juga mendapatkan pekerjaan

tersebut, maka pengangguran bisa saja terjadi karena kurangnya permintaan oleh tenaga kerja pada suatu perekonomian bila itu dibandingkan melalui jumlah para pencari kerja tersebut. (Annisa dan Nasruddi, 2016)

Tingkat Kemiskinan

Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Ukuran yang digunakan para analis dalam menetapkan jumlah penduduk miskin adalah cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin apabila dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan asupan kalorinya minimal 2100 kkal/hari per kapita, atau pemenuhan kebutuhan pokok non makanan seperti yang dikemukakan diatas. (Wulandari, et al, 2022).

Kajian Empiris

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perekonomian Maluku dalam lima tahun ke depan diperkirakan mengalami sedikit peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen; 2) Sejalan dengan peningkatan inflasi kegiatan ekonomi juga diprediksi meningkat secara proporsional rata-rata sebesar 3,1 persen untuk Ambon inflasi, dan 3,9 persen untuk inflasi Tual; 3) Pengangguran diprediksi menurun dengan rata-rata penurunan 0,3 persen per tahun, sementara tingkat kemiskinan juga diprediksi menurun dengan rata-rata penurunan 0,6 persen per tahun. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ekspektasi optimis terhadap prospek ekonomi Maluku ke depan seharusnya mampu direspons melalui kebijakan APBD yang lebih progresif, efektif dan efisien, serta meningkatkan. Sinergi program berbasis data yang valid dan seragam, baik lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota. (Pattilouw, 2018).

Hasil dalam penelitian (Hendajany dan Wati, 2020) menunjukkan data inflasi dan nilai tukar (kurs) stasioner pada tingkat level sedangkan data suku bunga dan pertumbuhan ekonomi stasioner pada differencing pertama (lag 1). Hasil prediksi indikator ekonomi Indonesia lima tahun ke depan untuk nilai inflasi dan suku bunga cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu besar. Sedangkan nilai tukar mengalami kenaikan yang cukup besar dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023. Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi prediksi nilai pertumbuhan ekonomi yang hasil prediksi untuk tahun 2019-2023 cenderung konstan.

3. METODE PENELITIAN

Analisis Location Quotient (LQ)

LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor baru atau sedang tumbuh apalagi selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Metode yang lebih tepat adalah melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi daerah-daerah lainnya.

Analisis Shift Share (SS)

Analisis *shift share* atau disingkat dengan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian pada suatu daerah. Metode penelitian ini digunakan untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeseran dengan cara menekankan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih tinggi atau luas.

Analisis Tipologi Klassen

Menurut Klassen Alat analisis Tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Penentuan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, selanjutnya dapat digunakan mengklasifikasikan daerah empat kelompok,

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Metode ini mendasarkan analisis pada data masa lalu (*let the data speak for themselves*) dan tidak memperhatikan variable-variabel yang lain, sehingga disebut juga metode yang atheoric. Oleh karena itu tidaklah mudah untuk menentukan apakah suatu data time series mengikuti pola ARIMA atau tidak. Belum lagi berapa banyak komponen p (*autoregressive*), q (*moving average*), dan d (*diferen*) yang diperlukan agar data menjadi stasioner.

4. HASIL PENELITIAN

Analisis Lapangan Usaha Basis dan Non Basis Location Quotient (LQ) Kabupaten Melawi

Ukuran spesialisasi relatif dari suatu wilayah/daerah dalam industri-industri tertentu, mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi atau spesialisasi yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi dibandingkan dengan daerah yang tingkatannya lebih tinggi (provinsi Kalimantan Barat) atau sektor lain yang memiliki kategori sama. Hasil perhitungan LQ di Kabupaten Melawi selama 6 tahun terakhir ada 10 sektor lapangan usaha yang masuk dalam sektor basis dengan nilai LQ diatas 1 yaitu:

- 1) Pertambangan dan Penggalian
- 2) Konstruksi
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 5) Informasi dan Komunikasi
- 6) Real Estate
- 7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 8) Jasa Pendidikan
- 9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 10) Jasa lainnya

Nilai LQ tertinggi terleta pada sektor Real Estate dengan nilai 1.778, selanjutnya sektor jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1.712 dan sektor Informasi dan Komunikasi.

Analisis Shift Share

Ada 12 lapangan usaha/industri mengalami peningkatan pertumbuhan riil di Kabupaten Melawi hasil ini dilihat dari Dij diantaranya:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian/Industri Pengolahan
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 8) Informasi dan Komunikasi
- 9) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 10) Real Estate
- 11) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

12) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2021, nilai PDRB sektoral Kabupaten Melawi telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar Rp 125.66 (miliar rupiah). Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Melawi sebesar Rp 128,25 (miliar rupiah). Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Melawi masih sangat bergantung pada perekonomian Kalimantan Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Melawi, yaitu sebesar Rp 11.11 (miliar rupiah). Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Melawi mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh dengan baik, pengaruh efek bauran industri/sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi cukup baik dan tinggi.

Analisis Tipologi Klassen

Lapangan usaha perekonomian di Kabupaten Melawi selama periode pengamatan tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) lapangan usaha/industri yang masuk dalam klasifikasi lapangan usaha maju dan cepat tumbuh, yaitu: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan.

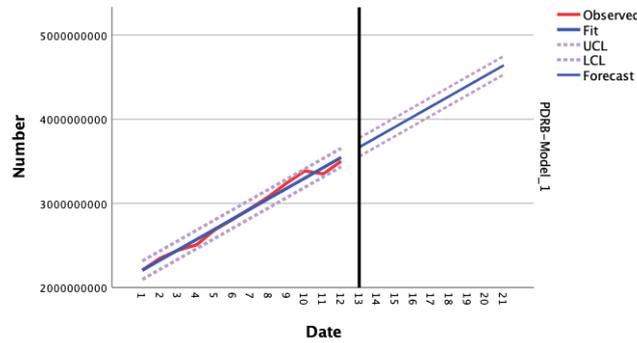


Gambar 4.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen

Upaya dan kebijakan dalam rangka perbaikan tingkat kemakmuran masyarakat dan daerah Kabupaten Melawi dengan mewujudkan hubungan ekonomi dan distribusi kegiatan ekonomi sektor primer menjadi sektor sekunder dan tersier merupakan bagian dari tujuan pertumbuhan ekonomi. Bentuk dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah akan terus dilaksanakan dengan melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor sehingga dapat memacu pertumbuhan yang tinggi

Hasil Proyeksi PDRB Kabupaten Melawi

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil peramalan memberikan tren positif sehingga nilai PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2030 terus akan mengalami kenaikan. Tabel 4.2 juga menunjukkan batas kepercayaan atas dan bawah dari hasil prediksi nilai PDRB di masa mendatang yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Pada tahun 2022 diperkirakan bahwa nilai PDRB adalah sebesar 3,666 Miliar. Pada tahun 2023 akan mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 3,788 Miliar dan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2030 diperkirakan nilai PDRB Kabupaten Melawi adalah sebesar 4,640 Miliar.

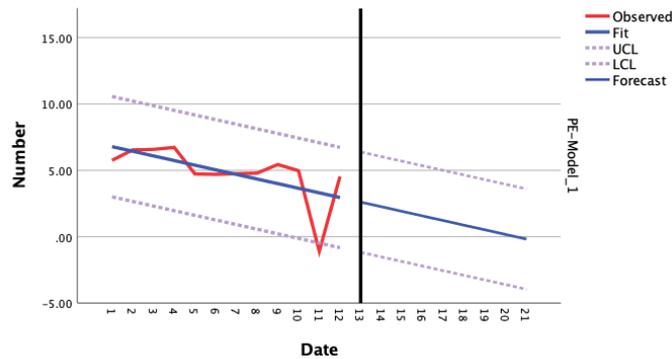


Gambar 4.2 Plot Nilai Observasi, Fitted Values dan Prediksi PDRB Rill

Hasil Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil peramalan pada gambar 4.3. menunjukkan bahwa pada periode selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2030 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi terkontraksi 0.18 persen. Sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam menanggulangi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus berkerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar trend kedepannya tumbuh positif. Pemetaan-pemetaan wilayah yang belum optimal fungsinya harus dimanfaatkan dengan potensi yang ada seperti :

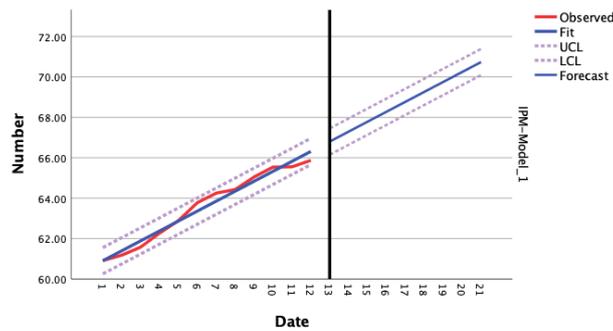
- 1) Optimalisasi asset daerah yang belum difungsikan secara maksimal
- 2) Potensi pengembangan pada sektor hasil pertanian
- 3) Menyusun kebijakan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat pada sektor pertanian agar berkesinambungan



Gambar 4.3 Plot Nilai Observasi, Fitted Values dan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Proyeksi IPM

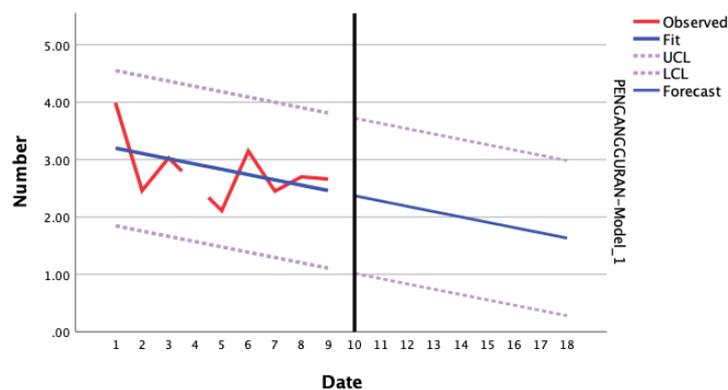
Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Melawi semakin meningkat pada tahun 2010-2021 dan di proyeksikan semakin membaik pada tahun-tahun berikutnya. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat, dimensi umur panjang dan hidup membaik, dimensi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk juga meningkat. Berikut ini hasil proyeksi IPM di Kabupaten Melawi:



Gambar 4.4 Plot Nilai Observasi, Fitted Values dan Prediksi IPM

Hasil Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Melawi mengalami trend penurunan setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah yang memiliki program membuka lapangan pekerjaan yang seluasnya akan berdampak terhadap kondisi perekonomian secara umum kepada masyarakat. Dengan begitu makan pendapatan akan meningkat, tingkat Pendidikan meningkat, tabungan meningkat dan kesejahteraan juga akan ikut meningkat. Berikut ini gambar tren penurunan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Melawi:

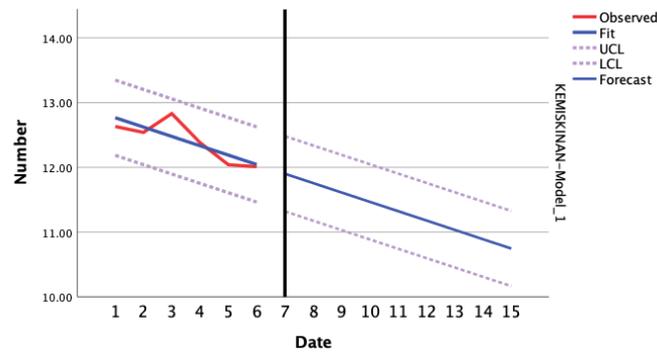


Gambar 4.5 Plot Nilai Observasi, Fitted Values dan Prediksi Pengangguran

Hasil Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Penting untuk dicatat bahwa tingkat kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti akses terhadap pendidikan, perumahan layak, pangan yang cukup, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi kemiskinan, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Data dan hasil peramalan tingkat kemiskinan di Kabupaten Melawi dapat dilihat pada gambar 4.6

Upaya penanggulangan tingkat kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Melawi juga dapat dikategorikan cukup baik. Nilai observasi data tingkat kemiskinan dan prediksi tingkat kemiskinan di Kabupaten Melawi dapat menurun. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tahun 2022 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hasil estimasi juga memprediksi bahwa tingkat kemiskinan akan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2030 tingkat kemiskinan akan mencapai 10,75 persen. Hasil estimasi peramalan ini diharapkan dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 4.6 Plot Nilai Observasi, Fitted Values dan Prediksi Kemiskinan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Kabupaten Melawi memiliki 10 sektor basis lapangan usaha: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Konstruksi (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5) Informasi dan Komunikasi (6) Real Estate (7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (8) Jasa Pendidikan (9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10) Jasa lainnya. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Sektor ini umumnya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap output ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Untuk mempertahankan sektor lapangan usaha, beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan kebijakan regulasi yang jelas, transparan, dan terprediksi dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini dapat mendorong investasi, pertumbuhan, dan inovasi di sektor lapangan usaha.
2. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung sektor lapangan usaha, seperti jaringan transportasi yang baik, energi yang andal, dan teknologi informasi yang canggih, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam rantai pasokan. Ini dapat membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor tersebut.
3. Memastikan akses yang memadai ke modal dan pembiayaan adalah kebijakan penting untuk mendukung sektor lapangan usaha. Pemerintah dapat memberikan insentif dan fasilitas pembiayaan, seperti kredit usaha, investasi modal, atau program subsidi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
4. Investasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sektor lapangan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan ini dapat mencakup program pelatihan, beasiswa, dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri.
5. Kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran produk dan jasa dari sektor lapangan usaha dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik pasar. Program promosi, partisipasi dalam pameran, dan dukungan pemasaran dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.
6. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta melalui kemitraan, kerja sama riset, dan dialog kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh sektor lapangan usaha. Hal ini dapat memperkuat sinergi dan memaksimalkan potensi pertumbuhan.

Indikator makro yang mengalami trend penurunan adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan yang mengalami trend peningkatan adalah indikator PDRB dan IPM. Jika PDRB meningkat namun pertumbuhan ekonomi menurun, hal ini menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara kenaikan output ekonomi dan laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan situasi ini adalah:

1. Faktor eksternal: Penurunan pertumbuhan ekonomi mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas internasional, atau ketidakstabilan geopolitik. Ini dapat mempengaruhi daya saing dan permintaan ekspor, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
2. Ketergantungan pada sektor tertentu: Jika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor tertentu yang mengalami perlambatan, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, jika sektor industri utama menghadapi masalah seperti penurunan permintaan atau penurunan produktivitas, ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
3. Ketimpangan distribusi pendapatan: Jika peningkatan PDRB tidak diikuti oleh peningkatan distribusi pendapatan yang merata, hal ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat permintaan domestik, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
4. Tantangan struktural: Tantangan struktural seperti kurangnya investasi dalam infrastruktur, rendahnya tingkat literasi dan keterampilan tenaga kerja, atau birokrasi yang kompleks dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada upaya untuk mengatasi tantangan struktural ini, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat meskipun PDRB meningkat.

5. SIMPULAN

Dari analisis forecasting dapat ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini. Yang harus dipahami sebagai sebuah keterbatasan adalah hasil proyeksi yang dilakukan dengan metode univariate forecasting yang mengasumsikan tidak ada intervensi/perubahan kondisi (*Ceteris Paribus*).

1. Trend dan proyeksi PDRB Kabupaten Melawi mengalami kenaikan.
2. Trend dan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Melawi mengalami penurunan.
3. Trend dan proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Melawi mengalami peningkatan.
4. Trend dan proyeksi Tingkat Pengangguran Kabupaten Melawi mengalami penurunan.
5. Trend dan proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Melawi mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten Melawi Dalam Angka. Kabupaten Melawi
- Clements, M. P., & Galvão, A. B. (2013). Forecasting with vector autoregressive models of data vintages: US output growth and inflation. *International Journal of Forecasting*, 29(4), 698–714. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.09.003>
- Enders, W. (2015). "Applied Econometric Time Series." Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc, Toronto
- Hendajany, Henny & Ramadhania Wati (2020). Prediksi indikator makro ekonomi Indonesia dengan model vector autoregressive periode 2019-2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 23 No. 2 Oktober 2020, 189-202
- Mankiw, N. G. (2009). "Macroeconomics." Seventh Edition. New York: Worth Publishers Inc
- Ni'mah, E. N., & Yulianto, S. (2017). Peramalan laju inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dengan menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). *The 6 Th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Pattilouw, Djufri Rays (2018). Analisis dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Cita Cita Ekonomika* Vol. XII No.2 2018. ISSN 1978-3612
- Wauran, Patrick CH (2018). Analisis Perekonomian Makro dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon. *Jurnal Bekala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No.06 2018

KONTRIBUSI STABILITAS POLITIK DAN INFLASI TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Faishol Luthfi³

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Wildana Latif M.²

Politeknik Negeri Semarang, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of political stability and inflation on the development of the Indonesian sharia capital market. This research uses a quantitative approach with a vector error correction model analysis method. The data used in this research includes data on the political stability index, inflation and capitalization of the Jakarta Islamic Index from 2000 to 2019 on a quarterly basis. The research results show that political stability has no contribution and only inflation contributes to the development of the Indonesian sharia capital market. The contributions obtained in the research illustrate a positive influence which indicates that the higher the inflation, the higher the development of the Indonesian sharia capital market, and vice versa.

JEL: E3, E44

Keywords: Indeks Stabilitas Politik, Inflasi, *Vector Error Correction Model*

1. PENDAHULUAN

Pasar modal berbasis syariah di negara Indonesia mengalami sebuah perkembangan yang pesat. Hal ini dapat terlihat dari beragamnya instrumen-instrumen investasi syariah yang diperdagangkan di dalam pasar modal seperti sukuk, saham, reksa dana dan lain sebagainya (Luthfi et al., 2022). Dari sekian banyak instrumen keuangan syariah, saham adalah salah satu instrumen yang memiliki peminat cukup besar di kalangan investor muslim karena prinsip-prinsipnya yang mengikuti kaidah Islam serta dianggap menghasilkan *return* yang besar, baik dari dividen yang diberikan maupun dari *capital gain*.

Salah satu indeks saham syariah pertama di Indonesia adalah Jakarta Islamic Index (JII). Menurut Fakriah, Abdullah, Hakim, & Safrianto (2020), indeks ini menghitung harga rata-rata saham yang memenuhi persyaratan syariah. Sebanyak 30 saham yang terdaftar di JII adalah saham syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang untuk memilih saham syariah untuk menjadi konstituen JII, yang dievaluasi pada bulan Mei dan November setiap tahunnya (Sania, 2021). Konstituen JII dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan pasar perdagangan selama dua belas bulan, dengan evaluasi periodik dilakukan setiap enam bulan (Dewi, Solihin, Hariyadi, Nurfitriyani, & Heriyanto, 2022).

Perkalian antara jumlah saham syariah yang beredar di JII dan harga saham syariah yang berlaku menghasilkan kapitalisasi pasar JII. Untuk membuat kebijakan stabilisasi dan strategi manajemen portofolio, investor dan pemerintah harus mengetahui nilai kapitalisasi pasar (Dufrénot, 2021). Banyak hal, baik lingkup ekonomi maupun non-ekonomi, dapat memengaruhi kapitalisasi pasar itu sendiri. Nilai kapitalisasi pasar JII juga akan dipengaruhi oleh perubahan harga saham (Ghassani &

³faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id

Sukmana, 2019). Tiga kategori saham yang diperdagangkan di pasar modal dikenal sebagai kapitalisasi pasar (Rusdiana et al., 2015):

- a. Kapital Besar (*Big-Cap*)
Saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar di atas 5 triliun. Umumnya disebut saham papan atas.
- b. Kapitalisasi Sedang (*Mid-Cap*)
Saham yang mempunyai kapitalisasi pasar antara 1 - 5 triliun rupiah. Umumnya disebut saham lapis kedua.
- c. Kapitalisasi Pasar kecil (*Small-Cap*)
Saham yang mempunyai kapitalisasi pasar kurang dari 1 triliun. Umumnya disebut saham lapis ketiga.

Analisa terkait pasar modal sangatlah penting mengingat pasar modal sangat reaktif terhadap informasi yang ada. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi pasar modal termasuk Kapitalisasi JII. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi misalnya yaitu inflasi, kurs, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor non ekonomi misalnya yaitu kondisi politik. Kondisi stabilitas politik juga memengaruhi kondisi pasar modal (Murtaza, Abrar Ul Haq, & Ali, 2015). Peristiwa-peristiwa politik menjadi bagian dari cakupan kondisi non ekonomi yang memiliki pengaruh pada kondisi pasar modal. Untuk itu, pada dasarnya situasi politik mempunyai korelasi erat dengan stabilitas perekonomian pada suatu negara (Basit & Haryono, 2021).

Menurut Aliminsyah dan Padji (2004), inflasi adalah ketika jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang/jasa yang beredar, yang mengakibatkan penurunan daya beli uang dan kemudian kenaikan harga yang signifikan. Inflasi didefinisikan sebagai ketika tingkat harga umum dalam suatu ekonomi meningkat, menyebabkan penurunan daya beli dan permintaan (Adler & Rizki, 2009). Tingkat inflasi dapat berdampak negatif atau positif tergantung pada besaran inflasi itu sendiri. Inflasi yang terlalu tinggi dapat melesukan perekonomian secara menyeluruh serta menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada menjadi bangkrut. Namun, inflasi yang sangat rendah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan harga saham (Samsul, 2006). Inflasi mampu menunjukkan bagaimana perekonomian sebuah negara, dan inflasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap indeks saham JII. Dengan harga kebutuhan pokok dan barang yang terus meningkat, ekonomi suatu negara akan menjadi lesu (Rahmawati & Warsitasari, 2022), mengakibatkan penurunan kuantitas produksi dan dampak pada nilai.

Saham sangat rentan terhadap perubahan ataupun peristiwa, baik dalam skala mikro seperti insiden internal perusahaan maupun skala makroekonomi. Jika terdapat informasi positif ataupun negatif di pasar, harga saham akan naik atau turun. Jika terdapat informasi negatif, harga saham akan turun. Beberapa informasi pada internal perusahaan yang memengaruhi pergerakan harga saham di antaranya termasuk pembagian dividen, merger akuisisi, dan lain-lain. Sebaliknya, informasi dalam skala makro di antaranya adalah stabilitas ekonomi, adanya krisis dan juga kondisi politik negara fiskal (Sukmaningrum, Madyan, & Hendratmi, 2019).

2. METODE PENELITIAN

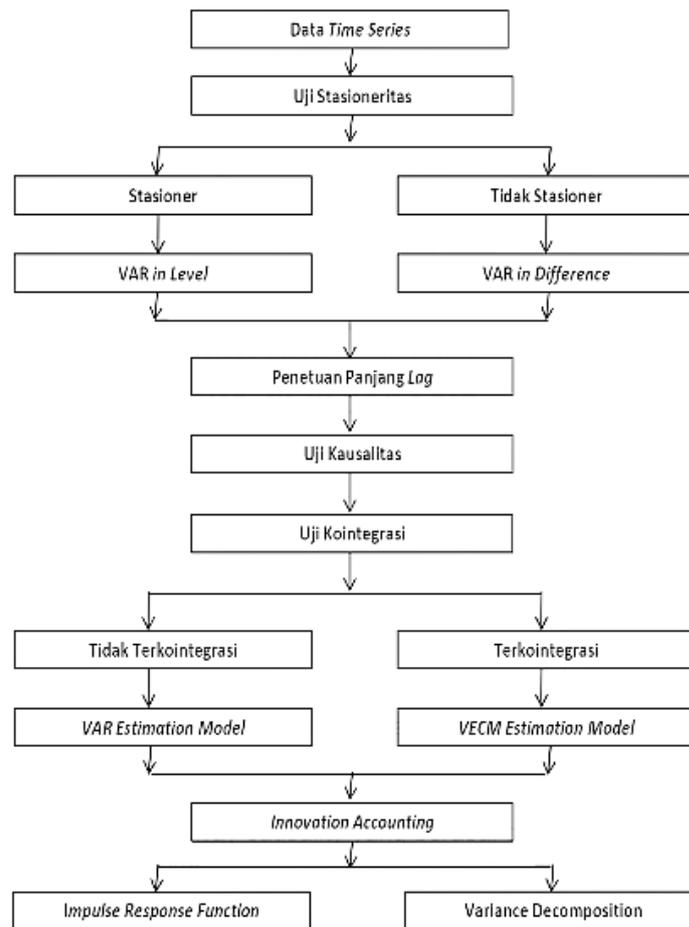
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kontribusi antar variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari stabilitas politik, inflasi dan perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Definisi operasional variabel dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Kode	Definisi	Sumber Data
Stabilitas Politik	ISP	<i>Political Stability and Absence of Violence/Terroris Index</i> merupakan proksi dari stabilitas politik. Indeks ini mengukur persepsi terhadap kemungkinan tidak stabilnya politik dan/atau kekerasan bermotif politik, termasuk juga terorisme (Özbozkurt & Satrovic, 2019).	Worldbank
Inflasi	INF	Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (Bank Indonesia)	Worldbank
Perkembangan pasar modal syariah Indonesia	JII	Kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index (JII) merupakan proksi dari perkembangan pasar modal syariah di Indonesia (Luthfi et al., 2022). Karena peningkatan nilai kapitalisasi saham mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif dari suatu pasar modal sehingga kapitalisasi saham dapat menggambarkan kondisi pasar. Pertumbuhan pasar modal yang positif akan meningkatkan sumber modal di dalam negeri. Dana yang berasal dari sumber modal ini dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi (Rosa & Idward, 2018).	Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data yaitu *time series* dan rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2019 secara *quarterly*.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Vector Error Correction Model (VECM). VECM merupakan pengembangan model VAR dengan menambahkan batasan kointegrasi karena model ini mencakup fluktuasi dinamis jangka pendek (Khurshid, 2023). Kelebihan model VAR adalah bahwa VAR tidak memerlukan banyak literasi mengenai variabel sebagai faktor dalam penelitian. Hanya variabel yang seharusnya berinteraksi satu sama lain secara intertemporal yang harus diketahui (Liu, Huang, & Li, 2022). VECM merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk membuat model proyeksi dan melihat hubungan kausalitas antara variabel (Abustan & Mahyuddin, 2009). Berikut adalah skema tahapan VECM:



Gambar 1. Tahapan VECM
 Sumber: Widarjono, (2007)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penyajian atau interpretasi hasil penelitian dan pembahasan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Stasioneritas (Augmented Dickey-Fuller Test)

Variabel	Level	1 st Difference
	(Prob)	(Prob)
LNISP	0.1563	0.0000
LNJII	0.2316	0.0081
LNINF	0.0510	0.0000

Sumber: Output, Diolah

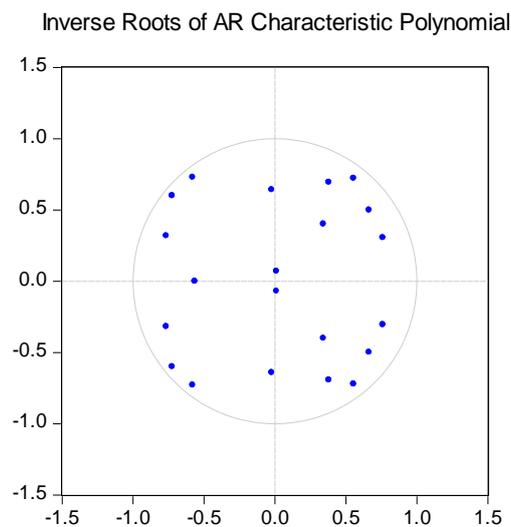
Tabel 2 menjelaskan tentang hasil uji stasioneritas. Hasil uji menunjukkan bahwa pada tingkat level, ketiga variabel belum stasioner sedangkan pada *first difference* semua variabel telah stasioner. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas semua variabel yang kurang dari alpha (0,05). Selain itu, semua variabel menunjukkan telah stasioner pada ordo yang sama (1st Difference) maka VECM dapat dilanjutkan.

Tabel 3. Pengujian Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	29.62483	NA	9.58e-05	-0.739579	-0.644717	-0.701814
1	54.68936	47.34412	6.13e-05	-1.185816	-0.806371*	-1.034758
2	56.47511	3.224276	7.51e-05	-0.985420	-0.321392	-0.721068
3	63.19695	11.57650	8.03e-05	-0.922138	0.026473	-0.544493
4	103.6714	66.33319	3.37e-05	-1.796429	-0.563235	-1.305491
5	121.0223	26.99027	2.70e-05*	-2.028398	-0.510621	-1.424166*
6	124.3306	4.870574	3.21e-05	-1.870296	-0.067935	-1.152771
7	140.0322	21.80775*	2.73e-05	-2.056451*	0.030493	-1.225632

Sumber: Output, Diolah

Tabel 3 menjelaskan tentang penentuan lag optimum. Hasil menunjukkan bahwa lag 7 merupakan lag optimum di mana nilai AIC merupakan angka paling rendah yaitu sebesar -2,056451. Untuk itu, lag optimum yang akan digunakan dalam analisis ini adalah lag 7.



Gambar 2. Pengujian Stability VAR
 Sumber: Output, Diolah

Berdasarkan Hasil Uji Stabilitas VAR pada Gambar 2, maka dapat dijelaskan bahwa semua poin/titik, sebarannya masih berada di dalam lingkaran sehingga dapat dikatakan model VAR sudah stabil

Tabel 4. Pengujian Granger Causality

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LNISP does not Granger Cause LNJII	73	0.63355	0.7262
LNJII does not Granger Cause LNISP		0.38306	0.9086
LNINF does not Granger Cause LNJII	73	0.96423	0.4658
LNJII does not Granger Cause LNINF		4.22885	0.0008
LNINF does not Granger Cause LNISP	73	0.97694	0.4568
LNISP does not Granger Cause LNINF		0.79253	0.5965

Sumber: Output, Diolah

Berdasarkan Tabel 4 Granger Causality dijelaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah (*one-way*) dari inflasi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 (alpha).

Tabel 5. Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.274989	45.11386	29.79707	0.0004
At most 1 *	0.154159	22.28253	15.49471	0.0041
At most 2 *	0.136201	10.39547	3.841466	0.0013

Sumber: Output, Diolah

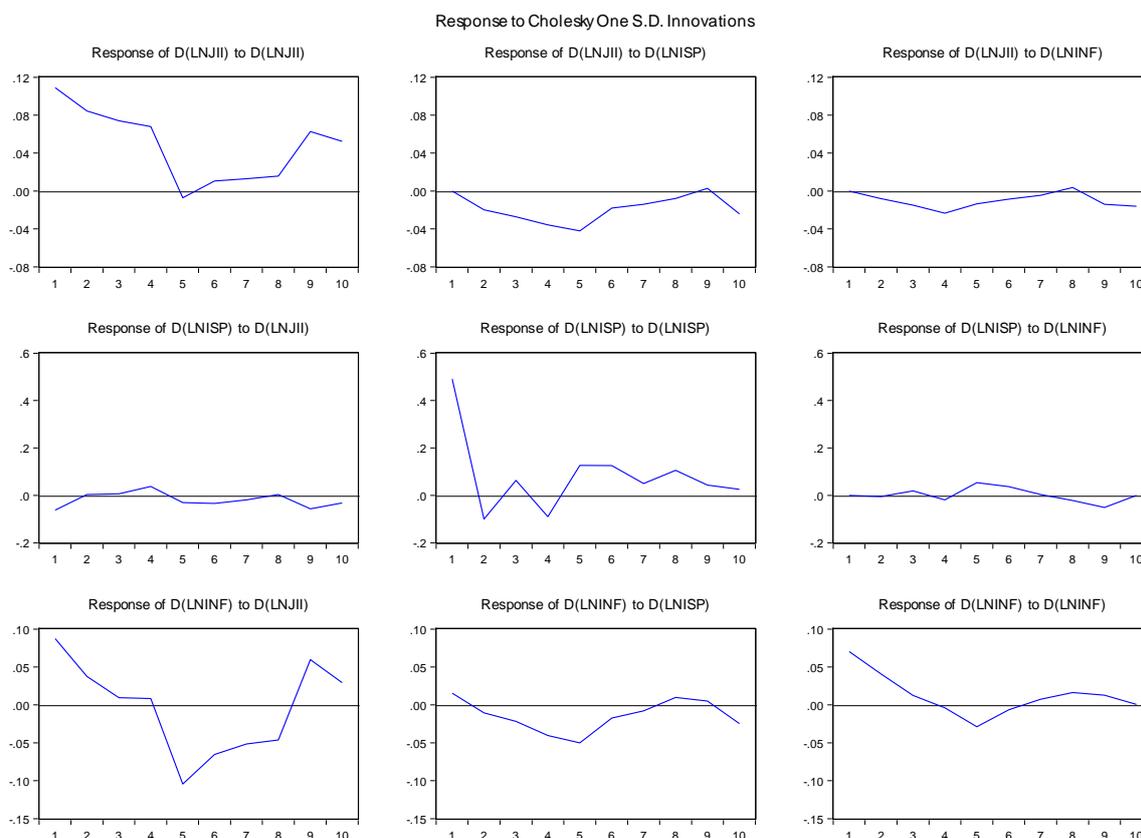
Berdasarkan Hasil Uji Kointegrasi dengan menggunakan Johansen Cointegration Test pada Tabel 5 maka diperoleh nilai trace statistic lebih besar dari nilai critical value. Selain itu, probabilitas yang dihasilkan kurang dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa ada indikasi hubungan jangka panjang antar variabel ISP, INF dan JII.

Tabel 6. Hasil Estimasi VECM

Jangka Panjang			
Variabel	Koefisien	T statistik	Keterangan
D(LNJII(-1))	1.000000		
D(LNISP(-1))	0.902094	[2.23201]	Sig
D(LNINF(-1))	2.129020	[3.83634]	Sig
C	-0.026037		
Jangka Pendek			
	-0.116822		
D(LNJII(-1),2)	-0.037875	[-0.06556]	No Sig
D(LNJII(-2),2)	0.054591	[-0.16153]	No Sig
D(LNJII(-3),2)	0.114575	[0.49081]	No Sig
D(LNJII(-4),2)	-0.689810	[-0.77556]	No Sig
D(LNJII(-5),2)	-0.072467	[-0.94090]	No Sig
D(LNJII(-6),2)	-0.109881	[-0.15386]	No Sig
D(LNJII(-7),2)	-0.149057	[0.51503]	No Sig
D(LNISP(-1),2)	0.068341	[0.69786]	No Sig
D(LNISP(-2),2)	0.038863	[0.39175]	No Sig
D(LNISP(-3),2)	0.011979	[0.12938]	No Sig
D(LNISP(-4),2)	-0.031889	[-0.38936]	Sig
D(LNISP(-5),2)	-0.032674	[-0.48213]	No Sig
D(LNISP(-6),2)	-0.031633	[-0.57811]	No Sig
D(LNISP(-7),2)	-0.034033	[-0.94947]	No Sig
D(LNINF(-1),2)	0.134938	[0.72868]	No Sig
D(LNINF(-2),2)	0.080575	[0.45375]	No Sig
D(LNINF(-3),2)	-0.003162	[-0.02030]	No Sig
D(LNINF(-4),2)	0.163604	[1.37754]	No Sig
D(LNINF(-5),2)	0.048272	[0.36925]	No Sig
D(LNINF(-6),2)	0.067854	[0.51738]	No Sig
D(LNINF(-7),2)	0.072516	[1.94416]	No Sig
c	0.001781	[0.13472]	

Sumber: Output, Diolah

Tabel 6 menjelaskan mengenai hasil analisis model VECM pada jangka panjang dan jangka pendek. Variabel stabilitas politik dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kapitalisasi JII pada jangka panjang. Hal ini terlihat dari hasil estimasi masing-masing variabel yaitu sebesar 2,23201 dan 3,83634 (t statistik $>$ t tabel). Penjelasan mengenai koefisien masing-masing variabel yaitu variabel stabilitas politik sebesar 0,902 artinya setiap kenaikan 1 satuan dari variabel stabilitas politik akan memengaruhi kenaikan kapitalisasi JII sebesar 0,902, begitu pula dengan variabel inflasi, di mana koefisien menunjukkan angka 2,129, artinya setiap kenaikan 1 satuan dari inflasi akan berpengaruh pada kenaikan kapitalisasi JII sebesar 2,129. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai pengaruh jangka pendek di mana secara statistik hanya variabel perkembangan pasar modal syariah Indonesia yang berpengaruh terhadap dirinya sendiri yaitu pada lag ke-4.



Gambar 3. Impulse Response Function (IRF)

Sumber: Output, Diolah

Analisis IRF dengan variabel perkembangan pasar modal syariah Indonesia sebagai respons dari adanya *shock* pada variabel stabilitas politik menunjukkan bahwa dari periode awal hingga akhir, secara umum berada pada level negatif. Hanya pada periode pertama dan kesembilan berada pada level positif. Hal ini menjadi indikasi bahwa perubahan pada kondisi stabilitas politik dapat menyebabkan respon yang bersifat positif (berdasarkan angka koefisien yang ada) pada kapitalisasi JII. Untuk hasil IRF variabel perkembangan pasar modal syariah Indonesia sebagai respons dari adanya *shock* pada variabel inflasi menunjukkan bahwa terjadi hal yang hampir sama. Secara umum, respon JII dengan adanya *shock* dari inflasi adalah negatif dari awal periode hingga akhir periode kecuali pada periode satu dan delapan yang menunjukkan angka positif.

Tabel 7. Variance Decomposition

Variance Decomposition of D(LNJII):				
Period	S.E.	D(LNJII)	D(LNISP)	D(LNINF)
1	0.108968	100.0000	0.000000	0.000000
2	0.139529	97.62335	2.047179	0.329466
3	0.161041	94.47357	4.405876	1.120555
4	0.179935	89.91086	7.478515	2.610627
5	0.185429	84.81575	12.20219	2.982060
6	0.186801	83.88932	12.96190	3.148784
7	0.187820	83.45436	13.37139	3.174244
8	0.188687	83.39153	13.42627	3.182198
9	0.199386	84.60512	12.04359	3.351293
10	0.208207	83.92983	12.39498	3.675185

Sumber: Output, Diolah

Variance Decomposition Kapitalisasi JII ditunjukkan oleh Tabel 7. Pada periode pertama, kapitalisasi JII dipengaruhi oleh *shock* kapitalisasi JII itu sendiri (100%). Lebih lanjut, pada periode tersebut *shock* belum terlihat berkontribusi terhadap stabilitas politik (0,00%) dan inflasi (0,00%). Untuk selanjutnya, mulai dari periode 2 hingga ke 10, proporsi *shock* kapitalisasi JII terhadap kapitalisasi JII itu sendiri telah berfluktuasi tetapi memiliki tren menurun hingga pada akhirnya *constant* di periode 10 dengan kontribusi sebesar 83,92%. Sebaliknya, dampak *shock* terhadap stabilitas politik dan inflasi terus meningkat mulai dari periode 2 hingga 10.

3.2 Analisis Ekonomi Mengenai Pengaruh Inflasi Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia

Inflasi seperti pisau bermata dua di mana mampu memberikan dampak positif dan negatif. Inflasi menjadi indikator dari pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang/jasa mengindikasikan bahwa permintaan barang/jasa tersebut tinggi dan ekonomi sedang bergerak. Dampak negatif terjadi ketika inflasi sudah terlalu tinggi karena akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini tentu menjadikan inflasi juga berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal di mana seiring inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga banyak investor masuk pada bursa pasar modal. Begitu pula sebaliknya, inflasi menyebabkan kenaikan harga barang faktor produksi (beban operasional meningkat) sehingga menurunkan profit perusahaan yang tentu akan berdampak pula pada menurunnya deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan (investor). Menurunnya deviden menyebabkan investor akan cenderung tidak tertarik dan memilih sektor lain untuk melakukan investasi. Selain itu, ketika terjadi inflasi, umumnya suku bunga perbankan akan meningkat (sebagai akibat dari kebijakan moneter) sehingga investor cenderung tertarik untuk berinvestasi pada deposito atau tabungan.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki kontribusi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Inflasi secara umum memiliki pengaruh positif di mana mengindikasikan bahwa semakin tinggi inflasi semakin tinggi perkembangan pasar modal syariah Indonesia, begitu pula sebaliknya. Menurunnya inflasi juga akan berdampak pada turunnya perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Pengaruh positif ini terjadi baik pada jangka panjang maupun jangka pendek. Hanya pada periode ketiga jangka pendek, pengaruh negatif terjadi. Kondisi ini menggambarkan bahwa inflasi di Indonesia berperan sebagai indikator pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi ini menyebabkan meningkatnya perkembangan pasar modal syariah Indonesia melalui banyaknya investor yang masuk (berinvestasi) pada pasar modal syariah Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak memiliki kontribusi dan hanya inflasi yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Selain itu, kontribusi inflasi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia menggambarkan pengaruh positif sehingga mengindikasikan bahwa semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi juga perkembangan pasar modal syariah Indonesia, begitu juga sebaliknya ketika inflasi menurun maka perkembangan pasar modal syariah juga akan menurun. Saran pada penelitian selanjutnya adalah perlunya eksplorasi terkait perkembangan pasar modal syariah terutama mengenai determinan variabel kapitalisasi pasar JII. Eksplorasi ini penting dilakukan mengingat potensi pasar modal syariah yang begitu besar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, & Mahyuddin. (2009). Analisis Vector Auto Regressive (Var) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 1–14.
- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Faktor Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220–237. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.96>
- Dewi, C. K., Solihin, D., Hariyadi, R. M., Nurfitriyani, & Heriyanto. (2022). *Jakarta Islamic Index Paska Pandemi*. 23(1), 41–50.
- Fakriah, Abdullah, A. F., Hakim, A., & Safrianto, A. (2020). Analisis Perbedaan Kinerja Saham Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan LQ45. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 4(1), 2598–3954.
- Khurshid, N. (2023). Does the causality between environmental sustainability, non-renewable energy consumption, geopolitical risks, and trade liberalization matter for Pakistan? Evidence from VECM analysis. *Heliyon*, 9(11), e21444. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21444>
- Liu, S., Huang, M., & Li, Y. (2022). Chinese Agricultural Insurance Development in a VAR Model. *Procedia Computer Science*, 202, 399–407. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.04.056>
- Luthfi, F., Sofia, A., Arminingsih, D., Mubaraq, A., Taufik, M. I., & Achmad. (2022). Analisis Prediksi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5, 6–14. Retrieved from <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/2.pdf>
- Murtaza, H., Abrar Ul Haq, M., & Ali, R. (2015). Impact of Major Political Events on Stock Market Returns of Pakistan. *Public Policy and Administration Research*, 5(4), 69–83.
- Özbozkurt, O. B., & Satrovic, E. (2019). MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS. *Sosyal Bilimler Dergisi /The Journal of Social Science*, 6(36), 182–191. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4950>
- Rahmawati, C., & Warsitasari, W. D. (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Index Harga Saham di Jakarta Islamic Index (JII). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 1992–2002. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2028>
- Rosa, Y. Del, & Edward. (2018). Pengaruh Kapitalisasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Menara Ekonomi*, IV(3), 110–120.
- Rusdiana, D., Azib, & Bayuni, E. M. (2015). Pengaruh Kapitalisasi Pasar terhadap Nilai Perusahaan dengan Menggunakan Metode Tobin's Q (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2012-2015) The Effect of Market Capitalization to The Value of The Co. *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA)*, 665, 522–528.
- Samsul, M. (2006). *PASAR MODAL DAN MANAJEMEN PORTOFOLIO*. Erlangga.
- Sania, M. (2021). Saham yang Konsisten Masuk JII dalam 10 Tahun Terakhir. Retrieved January 29, 2023, from <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/saham-yang->

konsisten-masuk-jii-dalam-10-tahun-terakhir/

Sukmaningrum, P. S., Madyan, M., & Hendratmi, A. (2019). Reaksi Pasar Saham Yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index (Jii) Terhadap Pengumuman Penetapan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10087>

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (2nd ed.). Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

**APAKAH UNEMPLOYMENT POSITIVE PRODUCTIVITY TRADE-OFF
HYPOTHESIS TERJADI DI INDONESIA ?**

Fariastuti Djafar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Tujuan makalah ini adalah menguji hubungan sebab akibat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dilanjutkan dengan menguji pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression (VAR). Hasil uji kausalitas menunjukkan adanya hubungan searah dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tidak ada hubungan dalam jangka pendek. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memberikan indikasi terjadinya *unemployment positive productivity trade-off hypothesis* antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang kurang produktif diganti oleh teknologi sehingga meningkatkan pengangguran namun membuat tingkat produktivitas orang yang masih bekerja semakin meningkat.

JEL: E24, J21, O53

Kata Kunci: Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, *trade-off*.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menjadi perhatian utama dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di banyak negara. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang selalu diharapkan, pengangguran dianggap sebagai masalah sosial yang serius. Banyak penelitian yang mengasumsikan adanya hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke pengangguran daripada dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi atau keduanya. Tujuan penelitian ini yaitu menguji hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dilanjutkan dengan menguji pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. KAJIAN LITERATUR

Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang jelas, apakah satu arah dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, dua arah atau hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan sama sekali. Sampai saat ini, hubungan empiris yang kuat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang belum dapat dibuktikan (Calmfors & Holmlund, 2000). Hal ini konsisten dengan model tradisional Solow yang mengasumsikan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan maupun produktivitas dalam jangka panjang (Pannenberg, 2002). Pada awalnya, model pertumbuhan Neoklasik maupun model ekonomi tenaga kerja cenderung mengabaikan pengangguran yang dianggap sebagai fenomena jangka pendek. Pada akhir 1980an, baik model pertumbuhan maupun ekonomi tenaga kerja telah mengubah perspektif mereka sehingga memungkinkan mereka untuk meneliti pengangguran dalam jangka panjang (Arico, 2003). Pengangguran yang tinggi di Eropa selama dua dekade terakhir menyiratkan bahwa pengangguran bukanlah fenomena siklus bisnis murni (Pannenberg, 2002).

Dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi diklasifikasikan menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, penurunan pengangguran akan meningkatkan output. Banyak penelitian menemukan dampak negatif pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang paling populer dilakukan oleh Okun di Amerika Serikat pada 1960an yang kemudian populer dengan sebutan hukum Okun. Okun menemukan bahwa pengurangan pengangguran sebesar satu persen akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 persen (Walterskirchen, 1999). Penelitian di berbagai negara membuktikan hukum Okun meskipun koefisien regresinya sangat bervariasi dari waktu ke waktu (Moosa, 2008). Misalnya, koefisien Okun adalah 1,75 di Malaysia (Noor et al., 2007), 0,07 di Korea (Cariani, 2006), 0,024 di Italia dan 0,007 di Yunani (Dritsaki & Dritsakis, 2009).

Dampak negatif pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tabungan dan kualitas sumber daya manusia. Bean dan Pissarides (1993) mengidentifikasi peran konsumsi sebagai mekanisme yang menghubungkan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran akan mengurangi tabungan yang dapat memperlambat pertumbuhan dalam lingkungan persaingan sempurna. Pannenberg (2002) telah memperluas model pertumbuhan tipe Solow dengan mengadopsi kualitas sumber daya manusia dalam modelnya. Dia menggunakan model tersebut untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan jangka panjang berdasarkan data panel dari 13 negara OECD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran akan mengurangi tingkat produktivitas dalam jangka panjang. Pannenberg (2002) menguraikan bahwa dampak pengangguran terhadap pertumbuhan produktivitas sangat tergantung pada pengaruh modal manusia dalam produksi. Modal manusia yang produktif akan menyebabkan pengangguran yang menurunkan produktivitas. Sebaliknya, modal manusia yang tidak produktif akan menyebabkan pengangguran yang tidak mempunyai dampak jangka panjang terhadap produktivitas.

Penjelasan dalam augmented Solow Model bertentangan dengan unempyoment positive productivity trade-off hypothesis yang diajukan oleh Gordon (1995) ketika membandingkan negara-negara Eropa yang memiliki produktivitas tinggi, pengangguran tinggi, dan ketimpangan pendapatan tinggi dibanding Amerika Serikat. Dalam jangka pendek, trade-off positif akan terjadi karena perubahan struktural, seperti upah yang disebabkan oleh posisi serikat pekerja yang semakin menguat. Trade-off akan menghilang dalam jangka panjang karena adanya penyesuaian dinamis yang melibatkan akumulasi atau deakumulasi modal. Upah yang tinggi menyebabkan perusahaan mengganti tenaga kerja dengan teknologi yang menyebabkan pengangguran dan peningkatan produktivitas mereka yang masih bekerja (Pannenberg, 2002). Pekerja dengan keterampilan tingkat menengah paling mudah digantikan oleh teknologi modern, seperti komputer (Autor et al., 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data pengangguran yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diterbitkan oleh International Monetary Funds (IMF) mulai 1996 hingga 2018. Data yang digunakan adalah data triwulanan dan ditransformasikan ke dalam bentuk log. Pengangguran diartikan sebagai penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB dengan harga pasar konstan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\log \left[\frac{PDB_t}{PDB_{t-1}} \right] = \alpha_0 + \alpha_1 \log \left(\frac{UN_t}{UN_{t-1}} \right) + \varepsilon_t \quad (\text{Eq.1})$$

PDB adalah nilai PDB dengan harga konstan; UN adalah jumlah pencari kerja atau pengangguran; ε adalah error; α_0 dan α_1 adalah koefisien yang diestimasi. Pendekatan Vector Autoregression (VAR) digunakan untuk menganalisis data. Sebelumnya, dilakukan uji kausalitas, uji

akar unit dan uji kointegrasi. Uji augmented Dickey Fuller (ADF) digunakan untuk uji akar unit (Said & Dickey, 1984). Hipotesis nol dari akar unit ditolak jika ADF hitung lebih besar daripada nilai kritis MacKinnon (1996) dengan kesimpulan bahwa rangkaian data adalah stasioner. Langkah selanjutnya, uji Johansen dan Juselius (1990) digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan jangka panjang (kointegrasi). Jika pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan jangka panjang, maka dilakukan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) untuk menguji kausalitas antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selain menunjukkan arah kausalitas antar variabel, pendekatan VECM juga mampu membedakan antara kausalitas jangka pendek dan jangka panjang (Engle & Granger, 1987).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji akar unit. Hasil uji ADF menunjukkan bahwa seluruh rangkaian data tidak stasioner pada *level* dan *first different*, namun stasioner pada *second different*. Hipotesis nol non-stasioner ditolak pada tingkat signifikansi 1, 5, dan 10 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller

Variabel	Level	Lag length	1 st difference	Lag length	2 st difference	Lag length
PDB	3.185860	9	- 2.028251	8	- 7.875278*	7
UN	- 1.504935	9	- 0.514103	8	- 4.702553*	7

Catatan : * menunjukkan signifikan pada 1%, 5% dan 10%.

Panjang lag optimum k ditentukan dengan Schwarz Information Criteria (SIC)

Karena rangkaian data telah stasioner pada level yang sama, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji Johansen dan Juselius menunjukkan H_0 ditolak yang berarti terjadi paling banyak satu hubungan jangka panjang antar variable dalam model (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Jumlah kointegrasi	Trace Statistic	5 Per cent Critical Value	Max-Eigen Statistic	5 Per cent Critical Value
Tidak ada *	18.87725	15.41	16.64163	14.07
Paling banyak 1	2.235624	3.76	2.235624	3.76

Catatan: * hipotesis ditolak pada tingkat 5%.

Uji Trace dan uji Max-Eigenvalue menunjukkan 1 persamaan kointegrasi pada tingkat 5%.

Setelah terdeteksi adanya kointegrasi, dilakukan uji kausalitas dengan menggunakan pendekatan VECM. Hasil uji menghasilkan satu Error Correction Term (ECT) yang signifikan yang menunjukkan bahwa persamaan pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya persamaan dalam sistem (Tabel 3). Persamaan tersebut menunjukkan adanya hubungan satu arah yang signifikan dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hasil uji juga menunjukkan bahwa pengangguran tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan nilai p yang tidak signifikan (Tabel 3).

Tabel 3. Uji Kausalitas berdasarkan VECM

Variabel terikat	χ^2 statistik (nilai p)		t statistik
	$\Delta \log GDP$	$\Delta \log UN$	ECT
$\Delta \log PDB$	-	3,164401 (0,2055)	-0,09706 (-4,03743*)
$\Delta \log UN$	0,078248 (0,9616)	-	0,104159 (1,44608)

Catatan: Δ adalah operator the first different * signifikan pada tingkat 5%.

Persamaan 2 menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanda koefisien α_1 yang positif artinya adalah peningkatan pengangguran diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nilai R^2 menunjukkan bahwa sekitar 54 persen variasi PDB ditentukan oleh variasi pengangguran.

$$\log PDB = 3.78 + 0.55 \log(UN) + \varepsilon \quad (\text{Eq. 1})$$

(6.93717)

Catatan: Nilai dalam kurung adalah t -hitung.

Kausalitas searah dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang didukung dengan pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan mendukung *augmented* Solow Model yang diusulkan oleh Pannenberg (2002). Sebaliknya, temuan ini tidak mendukung argumen Calmfors dan Holmlund (2000), Blanchard (1997) dan Model Solow tradisional yang menyatakan tidak ada hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Berbeda dengan temuan Pannenberg (2002), penelitian ini menemukan pengaruh pengangguran yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan terjadinya *unemployment positive productivity trade-off hypothesis* (Gordon, 1995) di Indonesia. Berbeda dengan hipotesis Gordon yang terjadi dalam jangka pendek, hipotesis tersebut terjadi dalam jangka panjang di Indonesia. Dampak positif pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peran teknologi padat modal dan polarisasi jenis pekerjaan yang semakin besar (Autor et al., 2008) dalam perekonomian Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menguji hubungan sebab akibat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil uji ekonometri menunjukkan terjadinya hubungan searah dari pengangguran ke pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tidak ada hubungan dalam jangka pendek. Hasil uji regresi menunjukkan pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. *Unemployment positive productivity trade-off hypothesis* terbukti telah terjadi dalam jangka panjang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk bagi Indonesia. Kabar baiknya adalah perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif, sedangkan kabar buruknya adalah pengangguran menjadi beban bagi perekonomian produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arico, F. 2003. Growth and Unemployment Towards a Theoretical Integration. *Journal of Economic Surveys*. 17 (3), 419-455.
- Autor, D.H., Katz. L.F., & and Kearney, M.S. 2008. "Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists." *Review of Economics and Statistics*. 90 (2), 300-323.
- Bean, C.R., & Pissarides, C. 1993. Unemployment Consumption and Growth. *European Economic Review*. 37, 837-859.
- Blanchard, O. 1997. The Medium Run. *Brooking Paper on Economic Activity*. 2, 89-158.
- Calmfors, L., & Holmlund, B. 2000. Unemployment and Economic Growth: a Partial Survey. *Swedish Economic Policy Review*. 7,107-153.
- Dritsaki, C., & Dritsakis, N. 2009. Okun's Coefficient for Four Mediterranean Member Countries of EU: An Empirical Study. *International Journal of Business and Management*. 4 (5), 18-26.

- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. 1987. Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. *Econometrica*. 55, 251-276.
- Gordon, R.J. 1995. *Is there a Tradeoff between Unemployment and Productivity Growth ?* Working Paper No. 5081. Massachusetts: National Bureau of Economic Research (NEBR).
- Johansen, S., & Juselius, K. 1990. Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the demand for Money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 32, 169-210.
- MacKinnon, J.G. 1996. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests. *Journal of Applied Econometrics*. 11 (6), 601-618
- Moosa, I.A. 2008. *Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun's Law Valid ?*. Paper presented at the International Conference of the Unemployment Crisis in the Arab Countries. Cairo: Arab Planning Institute.
- Noor, Z.M., Nor, N.M., & Ghani, J.A. 2007. The Relationship between Output and Unemployment in Malaysia: Does Okun's Law exist?. *International Journal of Economics and Management*. 1(3), 337 – 344.
- Pannenberg. 2002. Unemployment and Productivity Growth. *Economic Modelling*, 19, 105-120.
- Said, E.S., & Dickey D.A. 1984. Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order. *Biometrika*. 71, 599–607.
- Walterskirchen, E. 1999. *The Relationship between Growth, Employment and Unemployment in the EU*. Paper presented at the Workshop on European Economists for an alternative Economic Policy (TSER Network) in Barcelona. Vienna: Austrian Institute of Economic Research.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Fariastuti Djafar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu menguji hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tujuan kedua yaitu menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari International Labour Organization (ILO) dan International Monetary Fund (IMF). Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai hubungan jangka panjang. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran.

JEL: E24, O11, O47, J64

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran.

1. PENDAHULUAN

Salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak layak dan pertumbuhan ekonomi (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>). Tujuan ini memiliki target antara lain mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan. Pengangguran dapat menjadi indikator tidak langsung seberapa banyak jumlah kesempatan kerja yang telah diciptakan.

Pengangguran merupakan masalah krusial karena dapat menyebabkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak optimal yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Pengangguran juga merupakan masalah yang serius karena dapat berkontribusi pada peningkatan kegiatan kriminal (Sidhu 2005), rendahnya harga diri, martabat dan standar hidup (Toit et al., 2003). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran walau tidak selalu mampu menjamin tersedianya kesempatan kerja yang cukup bagi para pencari kerja. Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menguji hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sedangkan tujuan kedua adalah menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori konvensional yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi pengangguran dalam jangka panjang (Blanchard, 1997). Namun, Calmfors dan Holmlund (2000) berpendapat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sangatlah kompleks. Mereka berargumentasi bahwa dalam jangka panjang, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengurangi pengangguran, sementara kebijakan penurunan pengangguran juga tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui efek kapitalisasi positif dan hipotesis polarisasi jenis pekerjaan. Efek positif kapitalisasi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan keuntungan bagi perusahaan (Pissarides, 1990). Pengangguran juga dapat meningkat karena teknologi dan polarisasi jenis pekerjaan. Misalnya, pekerja dengan keterampilan tingkat menengah paling mudah digantikan oleh teknologi seperti komputer (Autor et al., 2008).

Analisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran seharusnya dipisahkan antara jangka pendek dan jangka panjang. Pissarides (1990) adalah peneliti pertama yang melakukan hal tersebut. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat positif atau negatif. Temuan Aghion dan Howitt (1994) secara konsisten menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki korelasi yang negatif dengan pengangguran sementara pertumbuhan ekonomi yang rendah berkorelasi positif dengan pengangguran. Cavelaars (2004) dalam penelitiannya di negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menemukan pertumbuhan produktivitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan lapangan kerja pada 1960an dan 1970an. Sementara itu, Rezai dan Semmler (2007) menemukan bahwa peningkatan output telah meningkatkan pengangguran dalam jangka pendek namun mengurangi pengangguran secara lebih efektif dalam jangka panjang. Di Indonesia, elastisitas permintaan kerja tertinggi ditemukan pada sektor jasa di perkotaan dan sektor pertanian di pedesaan (Suryadarma et al., 2007).

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh jenis pengangguran yang dominan, apakah pengangguran siklis, friksional, atau struktural. Pengangguran siklis merupakan masalah jangka pendek dan tergantung pada fluktuasi aktivitas ekonomi. Pengangguran friksional terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai yang tergantung pada keterampilan dan selera pencari kerja. Sementara itu, pengangguran struktural disebabkan oleh permintaan tenaga kerja yang berkurang karena upah yang berada di atas keseimbangan akibat dari undang-undang upah minimum, serikat pekerja dan upah efisiensi (Mankiw, 2008). Pengangguran struktural juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia (Moosa, 2008). Lebih lanjut Moosa (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu mengurangi pengangguran struktural dan pengangguran friksional.

Jenis pasar tenaga kerja juga dapat mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pasar tenaga kerja yang kaku menyebabkan hubungan yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di beberapa negara Arab (Moosa, 2008). Namun, pasar tenaga kerja yang fleksibel juga dapat menciptakan pengangguran. Gordon (2010) berpendapat bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas selama pemulihan ekonomi sekaligus memangkas biaya tenaga kerja secara terus menerus. Industri padat modal di negara-negara Arab tidak mengurangi pengangguran secara signifikan di negara-negara tersebut (Moosa, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data triwulanan pengangguran yang diterbitkan oleh ILO dan PDB yang diterbitkan oleh IMF selama 1996-2018. Data tersebut ditransformasikan dalam log. Pengangguran (UN) adalah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan pertumbuhan ekonomi (PDB) diukur dengan Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\log \{UN\} = \alpha_0 + \alpha_1 \log(PDB) + \varepsilon \quad (\text{persamaan 1})$$

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression (VAR). Sebelum uji kointegrasi, uji akar unit dilakukan untuk memverifikasi apakah rangkaian data dalam model memiliki tren stasioner. Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan uji augmented Dickey Fuller (ADF) (Said & Dickey, 1984). Nilai statistik ADF dibandingkan dengan nilai kritis MacKinnon (1996) untuk menentukan apakah hipotesis nol dari akar unit ditolak atau tidak ditolak. Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi (Johansen & Juselius, 1990). Jika terdeteksi kointegrasi, dilanjutkan dengan melakukan estimasi dengan persamaan normalitas untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan hasil uji akar unit ADF. Hasil uji menunjukkan semua rangkaian data tidak stasioner pada level dan first different namun stasioner atau tidak memiliki akar unit pada second difference. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Hasil uji Johansen dan Juselius menunjukkan bahwa hipotesis nol $r=0$ (tidak ada kointegrasi) ditolak yang berarti terdapat paling banyak satu kointegrasi. Ini berarti terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dan pengangguran (UN) (Tabel 2).

Tabel 1. Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller

Variabel	Level	Lag length	1 st difference	Lag length	2 st difference	Lag Length
PDB	3.185860	9	- 2.028251	8	- 7.875278*	7
UN	- 1.504935	9	- 0.514103	8	- 4.702553*	7

Catatan : * menunjukkan signifikan pada 1%, 5% dan 10%.

Panjang *lag optimum k* ditentukan dengan Schwarz Information Criteria (SIC)

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Jumlah kointegrasi	Trace Statistic	5 Per cent Critical Value	Max-Eigen Statistic	5 Per cent Critical Value
Tidak ada *	18.87725	15.41	16.64163	14.07
Paling banyak 1	2.235624	3.76	2.235624	3.76

Catatan: * hipotesis ditolak pada tingkat 5%.

Uji Trace dan uji Max-Eigenvalue menunjukkan 1 persamaan kointegrasi pada tingkat 5%.

Setelah terdeteksi adanya kointegrasi, persamaan 2 menunjukkan hasil uji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi pengangguran sekitar 1,65 persen.

$$\log UN_t = 12.53 - 1.65 \log PDB_t \quad (\text{persamaan 2})$$

(-1.11170)

Catatan: Nilai dalam kurung adalah *t*- hitung.

Pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran mirip dengan pernyataan Aghion dan Howitt (1994) dan Cavelaars (2004) walau dalam penelitian ini pengaruh tersebut tidak signifikan. Temuan dalam penelitian ini juga mendukung Blanchard (1997) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi pengangguran dalam jangka panjang namun berbeda dengan pendapat Rezai dan Semmler (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi pengangguran secara lebih efektif dalam jangka panjang. Efek positif kapitalisasi dari pertumbuhan

ekonomi (Pissarides, 1990) tidak signifikan untuk Indonesia yang diduga karena polarisasi jenis pekerjaan yang cukup dominan (Autor et al., 2008).

Hasil penelitian ini mirip dengan pernyataan Moosa (2008) tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu dapat mengurangi pengangguran terutama jika keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya pengangguran friksional di Indonesia. Suryadarma et al. (2007) menunjukkan bahwa mereka yang menganggur sebagian besar berpendidikan tinggi, berusia muda, belum berpengalaman dan masih tinggal bersama orang tuanya. Kebanyakan dari mereka berasal dari rumah tangga yang berada sehingga memungkinkan mereka untuk tetap menganggur sambil mencari pekerjaan formal dengan gaji yang lebih baik (Irawan et al., 2000). Kedua, pengangguran struktural juga dapat terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan antara pencari kerja dan persyaratan kerja, serta terbatasnya permintaan tenaga kerja karena penerapan undang-undang upah minimum, upah efisiensi, dan serikat pekerja.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menguji hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tujuan kedua adalah menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran dalam jangka panjang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan masalah pengangguran dengan menggunakan pendekatan holistik yang mencakup sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Autor, D.H., Katz, L.F., & Kearney, M.S. 2008. "Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists." *Review of Economics and Statistics*. 90 (2), 300-323.
- Blanchard, O. 1997. The Medium Run. *Brooking Paper on Economic Activity*. 2, 89-158.
- Calmfors, L., & Holmlund, B. 2000. Unemployment and Economic Growth: a Partial Survey. *Swedish Economic Policy Review*. 7, 107- 153.
- Cavelaars, P. 2004. *Has the Tradeoff Between Productivity Gains and Job Growth Disappeared?* Research Memorandum 0403. Rotterdam: De Nederlandsche Bank and Research Centre for Financial and Economic Policy (OCFEB), Erasmus University
- Gordon, R.J. 2010. Revisiting and Rethinking the Business Cycle Okun's Law, Productivity Innovations, and Conundrums in Business Cycle Dating. *American Economic Review: Papers & Proceedings*. 100 (2), 1-9
- Irawan, P.B., Ahmed, I., & Islam, I. 2000. *Labour Market Dynamics in Indonesia, Analysis of 18 Key Indicators of the Labour Market (KILM) 1986-1999*. Jakarta: International Labour Office.
- Johansen, S., & Juselius, K. 1990. Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the demand for Money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. 32, 169-210.
- MacKinnon, J.G. 1996. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests. *Journal of Applied Econometrics*. 11 (6), 601-618
- Mankiw, N.G. 2008. *Principles of Economics*. Singapore: Cengage Learning.
- Moosa, I.A. 2008. *Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun's Law Valid ?*. Paper presented at the International Conference of the Unemployment Crisis in the Arab Countries. Cairo: Arab Planning Institute.
- Pissarides, C. A. 1990. *Equilibrium Unemployment Theory*, London: Basil Blackwell.
- Rezai, A., & Semmler, W. 2007. *Productivity and Unemployment in the Short Run and Long Run*.

- SCEPA Working paper 2007-2008. New York: Schwartz Center for Economic Policy Analysis (SCEPA)
- Said, E.S., & Dickey D.A. 1984. Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order. *Biometrika*, 71, 599–607.
- Sidhu, A.S. 2005. The Rise of Crime in Malaysia. An academic and statistical analysis. *Journal of the Kuala Lumpur Royal Malaysia Police College*. 4,1-28.
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. 2007. *Reducing Unemployment in Indonesia: Results from a Growth-Employment Elasticity Model*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Toit, C.D., Schoeman, N.J., Steyn, F.G., & Van Heerden, J.H. 2003. *Unemployment, Economic Growth and Social Inequalities. How Government Could Make a Difference*. ABSA Working Paper No. 53. Pretoria: Department of Economics University of Pretoria, The Bureau for Economic Policy.
- UNDP. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>. SDGs Beraksi
- Walterskirchen, E. 1999. *The Relationship between Growth, Employment and Unemployment in the EU*. Paper presented at the Workshop on European Economists for an alternative Economic Policy (TSER Network) in Barcelona. Vienna: Austrian Institute of Economic Research.

PENGARUH *BRAND EXPERIENCE* TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PELANGGAN KFC DI KOTA PONTIANAK

Febrianawati¹, Irvan Wibowo W², Nur Hidayat³, Rianti Ardana Reswari⁴, Ery Niswan⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, Indonesia

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman yang diikuti gaya hidup masyarakat modern dimana menginginkan segala sesuatu yang mudah, cepat dan praktis dalam hal menyiapkan makanan menyebabkan semakin berkembangnya kebutuhan konsumen yang semakin variative dan kompleks, salah satunya adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji yang dijadikan penelitian kali ini adalah ayam goreng krispi milik *Kentucky Fried Chicken* alias KFC. *Brand experience* adalah sensasi perasaan tanggapan konsumen yang ditimbulkan oleh pengalamannya selama mencoba makanan cepat saji KFC. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu *Brand Experience* (X1), Kepuasan Pelanggan (Y1), Loyalitas Pelanggan (Y2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Brand Experience* terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan KFC dikota Pontianak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan KFC di kota Pontianak. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 130. Teknik pengukuran sampel menggunakan teori (Hair et al., 2021). Teknik Pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, kuesioner dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis SEM PLS dengan alat analisis WarpPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Brand Experience* berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan.

JEL: O12, O58

Kata kunci: *brand experience* , kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.

1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini ketersediaan makanan cepat saji semakin banyak diminati oleh Masyarakat baik kota maupun daerah. Kebutuhan konsumen yang variative dan kompleks yang menginginkan segala sesuatu mudah, cepat dan praktis dalam hal menyiapkan makanan membuat masyarakat memilih jenis makanan cepat saji. Peningkatan kualitas dari masyarakat terutama dikawasan perkotaan membuat semakin maraknya bisnis makanan cepat saji yang menyediakan menu utama untuk dijual berupa ayam goreng. Maraknya penjualan bisnis ayam goreng membuat persaingan juga semakin ketat karena para pelaku bisnis harus bisa mendapatkan pelanggan yang akan membuat bisnisnya sukses. *Kentucky Fried Chicken* alias KFC adalah salah satu makanan cepat saji yang menjual ayam goreng bentuk krispi yang paling terkenal di Indonesia. KFC telah memiliki banyak cabang salah satu cabangnya berada di Kota Pontianak. *Colonel Original Recipe dan Hot Crispy* merupakan produk ayam goreng yang paling disukai diantara semua merek restoran cepat saji diseluruh Indonesia. Cara pengolahan masakan yang khas dari KFC membuat banyak pelanggan selalu ingin mengulang untuk membeli. Hal tersebut terlihat pada hasil survei kurious dari *Katadata Insight Center* (KIC) bulan februari tahun 2023 tentang survei makanan cepat saji dimana KFC menduduki posisi tertinggi sebesar 56,7% dari suara responden. *Brand experience* merupakan perasaan, sensasi dan tanggapan yang

tercipta secara internal dan subjektif sebagai akibat interaksi secara langsung dan tidak langsung dari produk KFC. Kepuasan pelanggan KFC merupakan hal yang menggambarkan perasaan puas atau kecewa dari pembelian produk KFC yang diluar ekspektasi. Loyalitas pelanggan KFC didapatkan Ketika konsumen merasa puas dengan pembelian produk KFC sehingga menimbulkan minat untuk membeli kembali makanan di KFC.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian dari pelanggan cabang KFC di Kota Pontianak. Disaat semakin maraknya jenis persaingan bisnis makanan cepat saji yang berupa ayam goreng krispi muncul membuat Perusahaan KFC yang ada di Kota Pontianak harus bisa mengenal apa yang bisa menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan KFC saat ini maupun yang akan datang (Pradipta, 2012). Dengan adanya faktor yang menarik minat konsumen KFC membuat persaingan antar pelaku usaha sejenis dapat bersaing. Suasana ketika konsumen merasa senang dengan produk dari KFC akan memperkuat minat konsumen (Oktaviani, 2020). KFC sebagai restoran cepat saji di kota Pontianak sudah seharusnya penjualan produknya berorientasi pada pelanggan agar dapat memenangkan persaingan. Caranya adalah dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga tercipta *brand experience* pelanggan dan akhirnya bisa membuat hubungan baik antara pelanggan dan Perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan sukses apabila berhasil membuat konsumen merasa sangat puas dengan produk yang dihasilkan sehingga berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan, Perusahaan KFC di Kota Pontianak terus berusaha untuk bisa mempertahankan pelanggan yang lama dan mendapatkan pelanggan baru dengan cara menciptakan *brand experience* sehingga memberikan pengalaman-pengalaman positif kepada pelanggan untuk diceritakan kepada orang lain. Hal tersebut dilakukan Perusahaan dengan tujuan jangka panjang mencapai keuntungan maksimal sehingga loyalitas pelanggan merupakan cara untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada (Keni & Sandra, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *brand experience* terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan KFC di Kota Pontianak. Dari penelitian diharapkan agar dari terciptanya pengalaman yang positif membuat pelanggan merasa puas dan menjadi loyal terhadap produk KFC di Kota Pontianak.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Brand Experience

(Brakus et al., 2009) mendefinisikan “*brand experience is conceptualized as sensation, feelings, cognitions, and behavioral responses evoked by brandrelated stimuli that are part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and environments*”, artinya bahwa pengalaman merek diidentifikasi sebagai sensasi, perasaan, kognisi dan pandangan konsumen yang ditimbulkan oleh merek, terkait rangsangan yang ditimbulkan oleh design merek, identitas merek, komunikasi pemasaran, orang dan lingkungan merek tersebut dipasarkan.

Brand Experience bukan merupakan konsep hubungan emosional. Menurut (Sahin et al., 2011) *Brand experience* didapat dari desain sebuah merek sebagai hasil rangsangan dari pengalaman yang didapat dan penyampaian identitas (contohnya: nama, logo, *signage*), *packaging*, pemasaran (contohnya : iklan, brosur, situs website) dan melalui lingkungan Dimana suatu merek akan dipasarkan atau dijual.

Menciptakan *brand experience* diperlukan keikutsertaan dan dukungan dari pelanggan, caranya adalah dengan meningkatkan kadar keikutsertaan pelanggan dalam empat dimensi terpenting yang meliputi *Sensory Experience*, *Affective experience*, *Intellectual experience*, dan *Behavioral Experience* (Fatma, 2019).

2.2. Kepuasan Pelanggan

Menurut (Kotler & Keller, 2016) pelanggan akan merasa puas ketika harapan pelanggan terpenuhi dan merasa sangat gembira kalau harapan konsumen terlampaui. Konsumen yang puas cenderung loyal, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan menjadi rekan pemasaran yang baik (*positif word of mouth*). Menurut (Tjiptono & Diana, 2019) atribut yang membentuk kepuasan adalah minat berkunjung kembali, kesesuaian harapan, kesediaan merekomendasikan. Kepuasan pelanggan merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik (Tjiptono & Diana, 2019).

2.3. Loyalitas Pelanggan

Menurut (Kotler & Keller, 2012), loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Menurut (Hasan, 2013) pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang memiliki karakteristik runtutan pembelian dan proporsi pembelian, probabilitas pembelian, Tingkat atau ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah produk atau jasa, dan adanya penggunaan produk atau jasa yang sama secara teratur.

Menurut (Tjiptono, 2012) loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka Panjang. Indikator loyalitas pelanggan meliputi Kepuasan menggunakan produk, berkomitmen menggunakan produk, tidak membeli produk pesaing, merekomendasikan produk kepada orang lain, tidak mencoba produk lain, dan melakukan pembelian produk secara berulang berulang (Griffin, 2005). Pada dasarnya dengan adanya loyalitas pelanggan dapat mendongkrak atau meningkatkan penjualan produk perusahaan secara berkala (Ariffin et al., 2023).

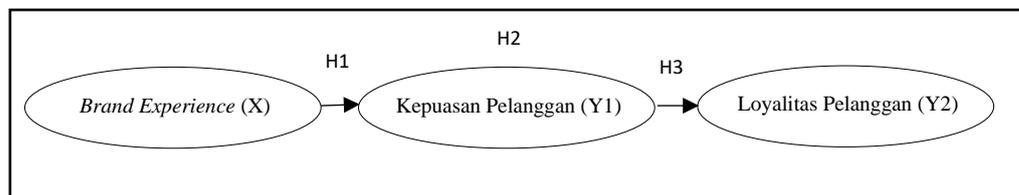
2.4. Pengaruh *Brand Experience* terhadap Loyalitas yang dimediasi oleh Kepuasan Pelanggan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *brand experience* dan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. *Brand experience* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

H₁: *Brand experience* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan KFC di kota Pontianak.

H₂: *Brand experience* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan KFC di kota pontianak.

H₃: Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan KFC di kota pontianak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel yang digunakan adalah pelanggan KFC di Kota Pontianak. Sampel pengujian diukur menggunakan (Hair et al., 2021). Hair digunakan karena ukuran populasi yang belum diketahui pasti dan menyarankan ukuran sampel minimum 5-10 dikali variable indicator. Sehingga jumlah indicator sebanyak 13 buah dikali 10 (13 x 10 = 130). Jadi jadi nperhitungan tersebut didapatlah jumlah sampel dari penelitian ini sebesar 130 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *nonprobability sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) berupa *Brand Experience*, variabel (Y1) sebagai variabel mediasi yaitu Kepuasan Pelanggan dan variabel terikat (Y2)

yaitu Loyalitas pelanggan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*, SEM) dengan alat analisis WarpPLS 6.0.

3.1. Analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modelling*)

Structural Equation Modeling (SEM) adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel indikatornya, hubungan variabel laten satunya dengan variabel laten lainnya, juga mengetahui besarnya kesalahan pengukuran. Salah satu strategi SEM yang berbasis varians atau komponen yaitu metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Hair, 2010). Alasan menggunakan SEM adalah:

1. SEM mempunyai kemampuan untuk mengintimasi hubungan antar variabel yang bersifat *multiple relationship*.
2. SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara laten dan variabel manifest atau indicator.

Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model penelitian pada pengukuran prediksi yang relevan. Tujuan PLS yang utama adalah untuk estimasi varian konstruk endogenous beserta variabel manifestnya, yang diistilahkan dengan indikator reflektif (reflective indikator) dengan kekhususan lainnya adalah indikator konstruk yang bisa dibuat dalam bentuk formatif, atau bisa dikenal dengan indikator formatif (*formative indicator*). Ukuran sampel PLS boleh kecil dengan dasar yang digunakan adalah *resampling* (Solimun et al., 2017).

3.2 Analisis WarpPLS

Langkah pengujian model empiris penelitian berbasis PLS adalah sebagai berikut:

- b. Model indikator reflektif dengan persamaan sebagai berikut:

$$x = \Lambda x \xi + \epsilon x \dots\dots\dots 1$$

$$y = \Lambda y \eta + \epsilon y \dots\dots\dots 2$$

dimana:

X & Y= indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (η)

Λx dan Λy = matrik loading koefesien regresi sederhana

ϵx dan ϵy = kesalahan pengakuan atau *noise*

- c. Model indikator formatif dengan persamaan sebagai berikut:

$$\xi = \Pi \xi x + \delta \dots\dots\dots 1$$

$$\pi = \Pi \pi y + \delta y \dots\dots\dots 2$$

dimana :

X & Y= indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (η)

Πx dan Πy = matrik loading koefesien regresi sederhana

δx dan δy = kesalahan pengakuan atau *noise*

Πx dan Πy = koefesien regresi berganda dari variabel laten terhadap laten indicator

δx dan δy = residual dari regresi

Adapun uji yang dilakukan pada outermodel yaitu:

- a. *Convergent Validity* yaitu nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indicator-indikatornya. *Loading factor* yaitu nilai yang menunjukkan korelasi antara indikator dengan konstruksinya.
- b. *Discriminant Validity* digunakan untuk mengetahui validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan nilai muatan factor dengan nilai *cross loading factor*. Jika nilai muatan factor lebih besar dari *cross loading factor* maka indikator memenuhi syarat validitas diskriminan. (Hair, 2010) memberikan patokan AVE lebih besar atau sama dengan 0,50 artinya mempunyai validitas diskriminan yang baik, tetapi bisa memakai AVE > 0,30 dengan syarat data penelitian lebih besar dari 200 dan memenuhi syarat validitas konvergen.
- c. *Reliability* merupakan ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana kuisioner yang tercermin dari data mampu mengukur dengan secara tetap atau konsisten. Pengujian reliabilitas yang paling sering digunakan adalah internal consistency reliability yang ditunjukkan dari besaran nilai koefisien Chonbach's Alpha dengan nilai kehandalan sebesar 0,70. Akan tetapi ini merupakan angka rule of thumb dan bukan standar mutlak.

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi model menggunakan uji model *Goodness of Fit Model* dan *Model Fit and Quality Indices*. Pengujian hipotesis pada analisis WarpPLS menggunakan uji-t, dengan keputusan pengujian yaitu $p\text{-value} \leq 0,10$ (alpha 10%) dikatakan *weakly significant*, $p\text{-value} \leq 0,05$ (alpha 5%) dikatakan *significant*, $p\text{-value} \leq 0,01$ (alpha 1%) dikatakan *high significant*. Pengujian Hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode resampling bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone.

Hipotesis statistik untuk outer model adalah:

$$H_0 : \lambda_i = 0$$

$$H_1 : \lambda_i \neq 0$$

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah:

$$H_0 : \gamma_i = 0$$

$$H_1 : \gamma_i \neq 0$$

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten endogen terhadap endogen adalah:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menghasilkan karakteristik demografi responden yang melakukan pembelian di KFC yang terdiri dari usia jenis kelamin, pendapatan, dan seberapa sering membeli KFC dalam 1 bulan. Pelanggan terbanyak berada pada rentang usia 20 – 25 tahun (86,2%). Jenis kelamin Wanita paling banyak menjadi pelanggan KFC di kota Pontianak sebanyak 91 orang (70%). Pelajar / mahasiswa adalah responden paling banyak yang membeli ayam KFC yaitu berjumlah 123 orang (94,6%). Dan rata-rata dalam 1 bulan yaitu 4-7 kali responden membeli produk KFC sebanyak 49 orang (37,7%).

4.1 Hasil Pengujian Validitas Konvergen

Matrix pengukuran korelasi antara skor item/indikator dengan skor konstruksinya (*loading factor*) dengan kriteria nilai dari setiap indikatornya $\geq 0,70$ maka memenuhi validitas konvergen (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji validitas reliabilitas dalam penelitian yang tertuang pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Reliabilitas

	BE(X1)	KP(Y1)	LP(Y2)	Kriteria	Keterangan
Composite reliab	0.917	0.949	0.939	> 0.70	Reliabel
Cronbach's alpha	0.878	0.938	0.920	> 0.70	Reliabel

Hasil dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai dari X1 (*Brand Experience*) composite reliability coefficients sebesar 0.917 dan *cronbach's alpha coefficients* sebesar 0.878 dengan demikian reliabilitas X1 dinyatakan reliabel. Variabel Y1 (Kepuasan Pelanggan) menunjukkan nilai *composite reliability coefficients* sebesar 0.949 dan *cronbach's alpha coefficients* sebesar 0.938 dengan demikian reliabilitas terpenuhi. Variabel Y2 (Loyalitas Konsumen) menunjukkan bahwa nilai *composite reliability coefficients* sebesar 0.939 dan *cronbach's alpha coefficients* sebesar 0.920 dengan demikian Y2 reliabilitas juga terpenuhi.

Menurut (Ghozali, 2013) evaluasi model structural bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten sehingga model seharusnya memiliki *Goodness of fit* yang baik pada analisis WarpPLS. Ukuran *Model of Fit and Quality Indeces* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Model Of Fit and Quality Indeces

No	Model Of Fit and Quality Indices	Hasil	Keterangan
1	<i>Average path coefficients (APC)</i>	0.262,P<0.001	Baik - Diterima
2	<i>Average R-squared (ARS)</i>	0.655,P<0.001	Baik - Diterima
3	<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	0.645,P<0.001	Baik - Diterima
4	<i>Average block VIF (AVIF)</i>	2.437	Baik - Ideal
5	<i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	2.731	Baik - Ideal
6	<i>Tenenhaus Gof (GoF)</i>	0.697	Baik - Large
7	<i>Simpson's paradox ratio (SPR)</i>	1.000	Baik - Diterima
8	<i>R-squared contribution ratio (RSCR)</i>	1.000	Baik - Diterima
9	<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	1.000	Baik - Diterima
10	<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)</i>	1.000	Baik – Diterima

Sumber : *Output WaspPLS 8.0, 2023*

Langkah akhir dari evaluasi model structural yang harus dilakukan adalah dengan melihat signifikan P-value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang dibangun melalui prosedur resampling seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. R-squared Contribution

	BE	KP
KP	0.326	
LP	0.250	0.372

Sumber: *Output WarpPLS 8.0, 2023*

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hypotheses	Path	Coefficients Path	P-value	Keterangan
H1	BE→KP	0.325	0.001	Diterima
H2	BE→LP	0.250	<0.001	Diterima
H3	KP→LP	0.372	<0.001	Diterima

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 1 diterima artinya *Brand experience* berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan KFC dengan hasil koefisien jalur sebesar 0.325 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001. Hal ini dibuktikan pada penelitian (Junaidi et al., 2021) pada KFC Kota Probolinggo dimana terdapat pengaruh signifikan variabel *brand trust* dan *brand equity* terhadap *brand loyalty*.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 2 diterima *Brand Experience* terhadap Kepuasan pelanggan menunjukkan hasil koefisien jalur sebesar 0.250 dengan tingkat signifikansi sebesar <0.001. Hal ini dibuktikan pada penelitian (Nurhayati, 2020) yang menyatakan *Brand Trust*, *Brand Experience* dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan.

Hasil pengujian menunjukkan Hipotesis 3 diterima artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hasil pengujian koefisien jalur kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0.372 dan p-value <0.001. Hal ini dibuktikan pada penelitian (Nurhayati, 2020) yang menyatakan *Brand Trust*, *Brand Experience* dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh melalui kuisioner Brand Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (0,325 dan *p-value* 0.001) dan Loyalitas pelanggan (0.250 dan *p-value* <0.001). Brand experience merupakan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan KFC di Kota Pontianak dari tahap pencarian informasi produk, pembelian, penerimaan pelayanan dan mengkonsumsi produk atau jasa dari KFC yang menimbulkan manfaat emosional kepada pelanggan. Kepuasan Pelanggan juga berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan hasil pengujian 0.372 dan p-value < 0.001. Pelanggan yang merasa puas akan menjadi loyal terhadap produk KFC sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwa pelanggan akan membeli kembali produk KFC jika pelanggan KFC di Kota Pontianak tersebut merasa puas dengan pengalamannya saat membeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., Andrey Indra Maulana, U., Pratiwi, W., & Aisyah. (2023). STRATEGY IN INCREASING CONSUMER LOYALTY. *Jurnal Ecoment Global*, 8(2), 11–17. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/view/2718>
- Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty? *Journal of Marketing*, 73(3), 52–68. <https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.52>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit UNDIP. https://www.researchgate.net/publication/289671928_Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_21_Update_PLS_Regresi#full-text
- Hair, J. F. (2010). *Multivariate Data Analysis* (Vol. 7). Prentice Hall. https://books.google.co.id/books?id=JIRaAAAAYAAJ&hl=id&source=gbs_book_other_versions

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hasan, M. A. (2013). *Marketing Marketing -- Management*. Buku Seru. URI: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20399878>
- Junaidi, J., Nafis, M. R. W., E, S. H., & Dewi, D. K. (2021). BRAND LOYALTY DI TINJAU DARI TRUST DAN BRAND EQUITY PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) KOTA PROBOLINGGO. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.53363/buss.v1i1.31>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. Prentice Hall.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed., Vol. 1). Pearson Education : Boston.
- Nurhayati, S. (2020). PENGARUH BRAND TRUST, BRAND EXPERIENCE DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi, Volume 7*(No 2). <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.54131/jbma.v7i2.100>.
- Sahin, A., Zehir, C., & Kitapçı, H. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty; An Empirical Research On Global Brands. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 24, 1288–1301. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.143>
- Solimun, Dr. I., Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, M. Sc. , M.Phil., P., & MS., N. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS* (2nd ed.). UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=GrRVDwAAQBAJ&pg=PR5&dq=Metode+Statistika&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjPyv2YmJPrAhXegUsFHbQtDHsQ6AEwA3oECAMQAg#v=onepage&q=Metode%20Statistika&f=false>
- Tjiptono, F. (2012). *Pemasaran Strategik - Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e-Marketing Edisi 2* (Edisi 2). C.V ANDI OFFSET
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=25703&pRegionCode=TELUNI&pClientId=116>
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2019). *Kepuasan Pelanggan : Konsep, Pengukuran, dan Strategi: Vol. i* (Cetakan: I, 1st). Andi Publisher.

KINERJA UMKM: PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN E-COMMERCE

Febriati¹, Ali Afif,² Aris Setiawan³, Wilda Sari⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, Indonesia

ABSTRACT

The performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) refers to the efforts made to achieve goals and provide the results expected by business owners. MSMEs have an important and crucial role for a country's economy. MSMEs are often a hotbed of innovation and creativity, they can more quickly adapt to market changes and create innovative solutions. The performance of MSMEs can be influenced by financial literacy knowledge and the use of e-commerce by business owners. However, we have limitations in looking at the interaction of these variables. Therefore, this study aims to investigate the effect of financial literacy and E-Commerce on the financial performance of MSMEs. The population and sample in this study are MSMEs located in Pontianak City. In this study, 150 MSMEs served as samples. With the aid of the SPSS software, multiple regression analysis is the analysis tool that is employed. The study's findings indicate that e-commerce and financial literacy have an impact on MSMEs' performance. This finding indicates that business owners' financial literacy levels can positively impact MSMEs' success. E-commerce usage aids MSMEs in increasing their market share.

JEL: G00, G10, G30

Keywords: financial literacy, e-commerce utilization, innovative, market share expansion

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk naik kelas agar mereka dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian. Sektor UMKM menyumbang 61% dari PDB, atau Rp9.580 triliun, dan 97% dari penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ada 65,5 juta UMKM di Indonesia, yang merupakan 99% dari semua unit usaha.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Skala Usaha Pelaku UMKM

No	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Sambas	14.278	3.880	158	18.316
2	Bengkayang	4.950	992	19	5.961
3	Landak	32.185	2.173	330	34.688
4	Mempawah	15.822	1.459	108	17.389
5	Sanggau	2.674	1.266	61	4.001
6	Ketapang	7.307	1.673	157	9.137
7	Sintang	14.888	2.121	106	17.115
8	Kapuas hulu	6.736	3.156	65	9.957
9	Sekadai	4.377	1.813	222	6.412
10	Melawi	3.662	747	39	4.448
11	Kayong Utara	7.062	671	-	7.733
12	Kubu Raya	7.792	2.340	18	10.150
13	Kota Pontianak	39.746	1.943	217	41.906
14	Kota Singkawang	7.523	2.094	205	9.822
	Jumlah	169.002	26.328	1.705	197.035

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, maret 2023.

Keberadaan UMKM saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, pembangunan di Indonesia saat ini secara mayoritas dipengaruhi oleh adanya UMKM (Hidayatulloh & Maulana, 2021). Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat periode 31 maret 2023. Semakin cepatnya pertumbuhan UMKM, maka semakin besar persaingan antar pelaku usaha. Maka setiap pelaku usaha harus dapat berpikir maju kedepan dalam menumbuh kembangkan usahanya. UMKM harus terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja UMKM adalah kemampuan UMKM untuk beroperasi secara efisien, memperoleh pendapatan yang memadai, bertahan hidup dan berkembang dengan memperhatikan peluang dan berbagai ancaman (Ross et al., 2013).

Kemampuan pemilik perusahaan dalam memilih dan mendapatkan akses ke lembaga keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan bisnisnya. (Maharani & Cipta, 2022). Literasi keuangan sangat penting bagi pemilik usaha karena memiliki dampak yang signifikan pada keseluruhan kesehatan keuangan bisnis. Literasi keuangan bermanfaat bagi pemilik bisnis dalam memahami laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat membuat keputusan bisnis yang lebih bijak dan strategis. Pemilik perusahaan yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik dapat membuat perencanaan keuangan yang efektif. Mereka dapat merencanakan anggaran, investasi, dan strategi finansial untuk mencapai tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perubahan yang terjadi saat ini pada era ekonomi digital menunjukkan bahwa perkembangan usaha mengarah pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) sehingga mendorong pelaku wirausaha dengan mudah untuk membuat usaha baru dan keuntungan – keuntungan yang didapatkan. Digitalisasi telah memunculkan pasar baru dan menciptakan kemungkinan bagi UMKM untuk melayani kebutuhan dengan cara baru, misalnya, dengan menggunakan saluran ekspor virtual atau perantara perantara elektronik (Cho & Tansuhaj, 2013). (Purbasari & Raharja, 2022) mendefinisikan digitalisasi sebagai proses transformasi dari bentuk cetak, audio, dan video ke bentuk digital, seperti *e-commerce*.

UMKM harus dapat memanfaatkan adanya *e-commerce* yang dapat memperluas pasar mereka agar masyarakat umum dapat mengetahui produk yang dibuat. Pemahaman pentingnya literasi keuangan dan Penggunaan *e-commerce* dapat meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah (UMKM). Kinerja UMKM yang semakin meningkat dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah khususnya di kota Pontianak. UMKM yang semakin berkembang akan membuka lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Resource-Based View (RBV)

Teori Resource-Based View (RBV) diawali pelopor oleh (Wernerfelt, 1982). Teori ini merupakan teori yang memandang sumber daya dan kapabilitas perusahaan sebagai dasar daya saing dan kinerjanya. Asumsi dari teori RBV adalah bagaimana bisnis dapat bersaing dengan bisnis lain dengan mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif (Wernerfelt, 1982). Perusahaan yang dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Dengan demikian, beberapa keuntungan yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan mereka. (Ali Syed et al., 2019)

Kinerja UMKM

Kinerja UMKM menurut (Marija et al., 2021) adalah Penghasilan Pengusaha kecil dan menengah (UMKM) memulai dari pendirian bisnis hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar mudah mengetahui kondisi UMKM secara akurat, parameter yang sederhana sering digunakan untuk menentukan tingkat kinerja UMKM. Untuk penelitian ini, parameter yang digunakan adalah pertumbuhan perusahaan, total penjualan perusahaan, total permintaan perusahaan, dan posisi keuangan perusahaan. (Aribawa, 2016).

Literasi Keuangan

Baik individu maupun organisasi dapat membutuhkan literasi keuangan. Memiliki pengetahuan keuangan membantu Anda menghindari masalah keuangan dengan membuat rencana keuangan yang baik. Orang-orang yang kurang pengetahuan keuangan harus diperbaiki untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan memaksimalkan pengelolaan keuangan mereka (Felicia Claresta Harli et al., 2015). Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan pengembangannya dalam bidang usaha untuk mencapai tujuan dan menghasilkan uang sehingga Anda dapat hidup dengan baik.

Electronic Commerce (E-commerce)

Dalam dunia bisnis, *e-commerce* adalah sistem yang mengubah perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik dengan bantuan teknologi ICT (*Information and Communication Technology*), atau dengan kata lain teknologi online. *Electronic commerce* (EC) adalah istilah baru yang dapat didefinisikan sebagai " proses membeli, menjual, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi" atau sebagai proses jual beli atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi. Semua transaksi yang dilakukan secara elektronik disebut "e-commerce", dan media yang digunakan untuk melakukannya adalah internet. Menurut (Karmawan, 2014) *e-commerce* adalah suatu bentuk operasi bisnis elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis individu yang memanfaatkan internet, yang merupakan teknologi berbasis jaringan digital. Teknologi ini memungkinkan pertukaran barang atau jasa antara bisnis dan konsumen langsung, melewati tantangan ruang dan waktu yang selama ini dominan.

Hipotesis Penelitian

2.1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Penelitian sebelumnya (Syuhada, 2022) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis pada penelitian ini ialah:

H₁: Literasi keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM

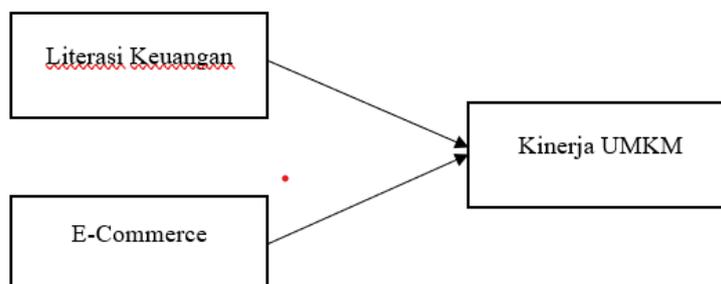
2.2. Pengaruh E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM

Penelitian sebelumnya (Haikhal, 2022) menemukan bahwa E-Commerce berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis pada penelitian ini ialah:

H₂: E-Commerce berpengaruh terhadap Kinerja UMKM

Model Penelitian

Adapun model penelitian yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Karena jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Ini karena metode survei yang digunakan adalah kuantitatif. Pemilihan metode survei dikarenakan metode ini tidak hanya terbatas pada data collection dan pengolahannya, akan tetapi sampai

pada penganalisisan dan interpretasi data (Imam Ghozali, 2016). Populasi penelitian ini adalah seluruh umkm yang terdapat di kota pontianak. Jumlah umkm di kota pontianak saat ini sebanyak 30.506. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling.

Dalam metode random sampling, setiap populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih (Imam Ghozali, 2016). Adapun Dalam penelitian ini, kuesioner, studi literatur, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, analisis regresi berganda digunakan melalui model struktur. Dalam penelitian ini, program analisis spss versi 25 digunakan. (ghozali, 2016). Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots$$

dimana :

- Y = Kinerja UMKM
- X1 = Literasi Keuangan
- X2 = E-Commerce
- B = parameter koefisien regresi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada objek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam wilayah Kota Pontianak. Objek penelitian ini adalah UMKM yang menjalankan usahanya di wilayah Kota Pontianak. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pemilik UMKM dan Mengirim link google form. Analisis data dilakukan terhadap 149 responden yang memenuhi kriteria pengolahan data, yang terdiri dari 160 kuesioner yang dibagikan kepada mereka. Hasil analisis data tersebut adalah rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel yaitu Literasi Keuangan (X1), E-Commerce (X2) dan Kinerja Keuangan (Y). Setelah Penyebaran kuesioner oleh penulis akan melakukan pemeriksaan validitas dan reliabilitas selanjutnya akan dilakukan uji regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen. Adapun ringkasan hasil uji regresi berganda ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t-hitung	Sig.
	B	Std. error	Beta		
(Constant)	9,073	2,750		3,299	0,001
Literasi Keuangan	0,351	0,076	0,357	4,622	0,000
E-Commerce	0,259	0,086	0,231	2,994	0,003
R Square	= 0,240				
Adjusted R Square	= 0,229				
F hitung	= 23,009				
Sign. F	= 0,00				
A	=0,05				

Sumber: data diolah, 2023

Persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,073 + 0,351X_1 + 0,259X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots$$

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan e-commerce terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square

sebesar 0,229, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan dan e-commerce dapat mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 22,9%, sedangkan bagian yang tersisa sebesar $100\% - 22,9\% = 77,1\%$ dapat diberikan oleh variabel lain yang terkait dengan keuangan.

Hasil Uji Anova (Uji F)

Uji Statistik F menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai atau sesuai dengan model. Nilai observasi dapat diprediksi dengan menggunakan model jika sesuai. Lihat hasil uji Anova di tabel 1, yang menunjukkan bahwa model yang dibuat layak untuk digunakan dalam penelitian ini, dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.

Hasil Uji Pengaruh Parsial (uji t)

Baik hipotesis divalidasi maupun pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent ditentukan dengan uji t. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dalam hasil uji t, yang disajikan dalam Tabel 1. Menurut tabel 1, variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05, yang berarti bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Variabel e-commerce juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 di bawah 0,05, yang berarti bahwa variabel e-commerce berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Kepemilikan rekening, pengetahuan tentang jumlah minimum setoran awal buka rekening, jumlah minimum saldo, pengetahuan tentang LPS, pengetahuan tentang bunga tabungan, pengetahuan tentang bunga mejamuk, dan pengetahuan tentang bunga kredit adalah indikator dari variabel laten literasi keuangan. Tabel 1 menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, untuk kinerja UMKM, indikatornya adalah peningkatan penjualan, rencana produksi, dan perkiraan permintaan. Ada korelasi positif antara literasi keuangan dan kinerja UMKM. Ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin baik kinerja UMKM mereka. Dengan kata lain, semakin banyak yang diketahui atau dipahami oleh pelaku UMKM tentang cara mengelola dana mereka, semakin baik kinerja UMKM mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan berdampak positif pada kinerja UMKM. Ini mengkonfirmasi penelitian para peneliti sebelumnya. Penelitian berjudul "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Usaha Umkm Di Kota Sukoharjo" (Syuhada, 2022) membuktikan hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara literasi keuangan dan kinerja dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah.

Analisis Pengaruh E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM

Dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, variabel e-commerce menunjukkan bahwa e-commerce mempengaruhi kinerja UMKM dan memberikan dampak positif pada kinerja mereka. Ini menunjukkan bahwa e-commerce adalah salah satu cara yang digunakan oleh UMKM di Kota Pontianak untuk meningkatkan laba dan pendapatan mereka. Menurut penelitian ini, pada era digital saat ini, para bisnis di Kota Pontianak harus belajar menggunakan E-Commerce untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khaira & Jalalluddin, 2021) berjudul Pengaruh Sistem Penjualan E-Commerce Bagi Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pendapatan meningkat setelah menggunakan sistem penjualan e-commerce daripada sebelumnya. Kinerja keuangan UMKM di Kota Banda Aceh dipengaruhi secara parsial oleh penggunaan sistem penjualan e-commerce.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa literasi keuangan (dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05) berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM dan e-commerce juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syed, T., Alzahrani, A., Jan, S., Siddiqui, M. S., Nadeem, A., & Alghamdi, T. (2019). A Comparative Analysis of Blockchain Architecture and its Applications: Problems and Recommendations. *IEEE Access*, 7, 176838–176869. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2957660>
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Cho, H., & Tansuhaj, P. (2013). Becoming a Global SME: Determinants of SMEs' Decision to Use E-Intermediaries in Export Marketing. *Thunderbird International Business*.
- Felicia Claresta Harli, Nanik Linawati, & Gesti Memarista. (2015). Pengaruh Penerapan Enterprise Risk Management dan Pengaruh Financial Literacy dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Konsumtif. *Finesta - Publication Petra*, 3(1).
- Haikhal, P. (2022). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi, Motivasi Kerja, Pengetahuan Akuntansi dan E-Commerce, terhadap kinerja UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Kecamatan Bangkinang Kota). *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.
- Hidayatulloh, A., & Maulana, R. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring (Training On The Making Of Financial Report And Tax On Micro, Small, And Medium Enterprises By Online). *Jurnal Berdaya Mandiri*, 3(1).
- Imam Ghozali. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Untuk Akuntansi, Bisnis, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama.
- Karmawan, I. G. M. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.Com. *Comtech*, 5(2), 748–762.
- Khaira, M., & Jalaluddin. (2021). Pengaruh Sistem Penjualan E-Commerce Bagi Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3(1).
- Maharani, S., & Cipta, W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(3), 306–315.
- Marija, Sihwahjoeni, & Gaguk Apriyanto. (2021). Pengaruh Financial Capital, dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 31–38. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Purbasari, R., & Raharja, S. J. (2022). Analisis Koperasi Modern Di Era Digital: From Values To Greatness. *AdBispreneur*, 6(3), 295. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.36272>
- Ross, D. M., Branford, S., Seymour, J. F., Schwarzer, A. P., Arthur, C., Yeung, D. T., Dang, P., Goynes, J. M., Slader, C., Filshie, R. J., Mills, A. K., Melo, J. V., White, D. L., Grigg, A. P., & Hughes, T. P. (2013). Safety and efficacy of imatinib cessation for CML patients with stable undetectable minimal residual disease: Results from the TWISTER study. *Blood*, 122(4), 515–522. <https://doi.org/10.1182/blood-2013-02-483750>
- Syuhada, A. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan Usaha UMKM di Kota Sukoharjo*.
- Wernerfelt, B. (1982). A Resource-Based View of The Firm. *Graduate School of Business Administration The University of Michigan*.

TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN KETIMPANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hendarmin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRAK

Fenomena transformasi struktural dan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami tren yang fluktuatif. Kondisi antar daerah Kabupaten/Kota menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti dengan gini rasio yang meningkat dan sebaliknya. Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami tingkat kesejahteraan yang relatif belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk cari bukti baru terhadap pola-pola pembangunan yang terjadi melalui proses transformasi struktural dan mengetahui keterkaitan antara transformasi struktural dengan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat. Menggunakan data sekunder dari tahun 2010-2022, metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan melihat grafik tren perkembangan sektor primer, sekunder, dan tersier lalu di analisis polanya berdasarkan data yang ada, dan melihat keterkaitan kedua variabel transformasi struktural dan gini rasio melalui nilai koefisien regresi dan korelasinya (R^2). Hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi pola transformasi struktural yang berbeda dengan pola normal seperti dalam teori Chenery dan Syrquin. Proporsi sektor pertanian dan jasa cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Barat, namun tidak di sektor industri.

JEL: O15, R11, R58, O18

Kata Kunci: Gini Rasio, Transformasi Struktural

1. PENDAHULUAN

Permasalahan ketimpangan baik di berbagai negara maupun antar daerah di Indonesia masih menjadi perhatian dikalangan ekonom dunia untuk dijadikan bahan diskusi yang cukup menarik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketimpangan ini sudah sangat krusial untuk diperbincangkan dan diperhatikan ? Dampak ketimpangan pendapatan yang tinggi dan semakin melebar akan menimbulkan biaya sosial yang besar. Hal ini berdampak pada melemahnya pilihan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Sehingga menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya muncul seperti korupsi, nepotisme, kriminalitas, dan lain-lain (Stiglitz, 2012).

Kajian masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia di fokuskan pada ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Menurut Badriah, Sambodo & Suryahan (2006), ketimpangan bisa terjadi dalam proses pembangunan daerah karena perbedaan potensi dan karakteristik sumberdaya alam, sumber daya manusia, arus modal, kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada wilayah tertentu, dengan adanya perencanaan daerah yang kurang tepat. Untuk mengukur kemajuan dalam ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu indikator yang digunakan adalah pendapan per kapita, yang secara agregat dapat menjelaskan tentang seberapa besar tingkat ekonomi yang dapat dicapai oleh masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan publikasi laporan BPS Kalimantan Barat secara umum menunjukkan bahwa daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat memberikan kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kalimantan Barat.

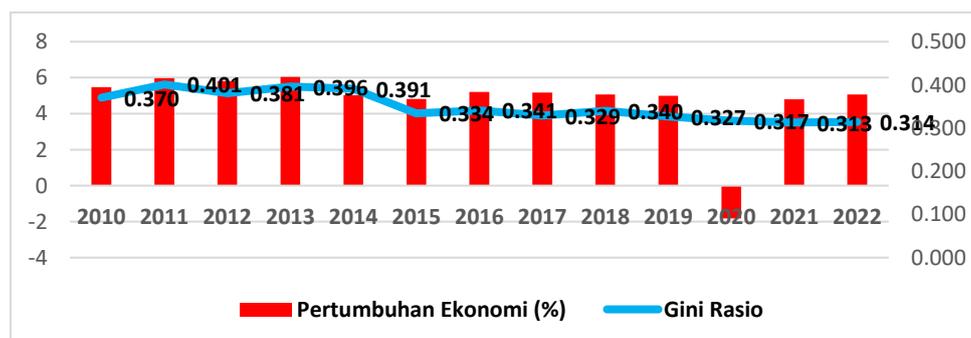
Tabel 1.1 Kontribusi PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Per Kapita (juta rupiah)
Kab. Sambas	9,54	4,64	37,68
Kab. Bengkayang	4,03	5,45	34,78
Kab. Landak	4,99	4,65	31,51
Kab. Mempawah	3,89	4,70	32,02
Kab. Sanggau	9,32	4,61	48,37
Kab. Ketapang	13,42	5,45	57,97
Kab. Sintang	6,77	4,96	40,64
Kab. Kapuas Hulu	4,76	4,51	47,79
Kab. Sekadau	3,08	5,10	36,76
Kab. Melawi	1,44	4,90	26,28
Kab. Kayong Utara	4,98	5,03	37,99
Kab. Kubu Raya	13,79	5,48	56,69
Kota Pontianak	17,34	4,98	66,17
Kota Singkawang	4,66	5,05	49,41

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Barat, 2022

di tahun 2022 (Tabel 1.1), Kota Pontianak memberikan kontribusi sebesar 17,34 persen terhadap total PDRB Kabupaten/Kota seKalimantan Barat. Dua Kabupaten lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar juga adalah Kabupaten Kubu Raya (13,79 persen) dan Kabupaten Ketapang (13,42 persen). Selain itu, ketimpangan terlihat jelas pada indikator PDRB per kapita. Dimana setiap penduduk di Kota Pontianak bisa menghasilkan 66,17 juta rupiah per tahun. Disusul oleh penduduk Kabupaten Ketapang yang mencapai 57,97 juta rupiah. Hal ini tidak sebanding dengan penduduk yang di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak dimana PDRB per kapitanya tidak sampai separuh dari PDRB Kota Pontianak, yaitu 26,28 juta rupiah per tahun dan 31,51 juta rupiah per tahun.

Permasalahan yang terkait ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap daerah dan menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi, sehingga menjadi isu yang sangat penting untuk diselesaikan jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah dihadapkan pada permasalahan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, hal ini dikarenakan tren ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi, khususnya di antar daerah sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Berbagai studi menggambarkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan yang mengindikasikan adanya hubungan yang negatif bahkan ada yang positif. Oleh karena itu kita dapat mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi selama tahun 2010-2022 di provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2022

Sumber: BPS, diolah

Nilai koefisien gini rasio Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan tren yang fluktuatif selama 13 tahun terakhir dari 2010 hingga 2022. Dari gambar di atas dapat kita lihat perkembangan gini rasio, dimana koefisien gini rasio mengindikasikan adanya perubahan-perubahan tingkat ketimpangan setiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2015 dimana gini rasio menunjukkan peningkatan secara berkala walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat selama 13 tahun terakhir hanya mengalami perubahan-perubahan ketimpangan yang relatif kecil. Jika dilihat penurunan gini rasio dari tahun 2010 hingga 2022 dari 0,370 menjadi turun sebesar 0,314 hanya turun sebesar 0,065 poin. Walaupun demikian, perubahan-perubahan yang terjadi dari angka gini ratio di Kalimantan Barat selama periode 2010-2022 tersebut masih tergolong pada tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif sedang.

Apabila dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 2010-2022, secara teoritis dalam kenyataannya bahwa negara-negara berkembang menghadapi sebuah trade off antara Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Di tahun 2010 terlihat sebuah fenomena dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2022 menjadi sebesar 5,07 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat juga diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang juga mengalami tren penurunan, dimana koefisien gini rasio tahun 2010 mencapai 0,370 turun menjadi 0,314 tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah provinsi Kalimantan Barat mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dikala pertumbuhan ekonomi melemah.

Penelitian ini mencoba mencari bukti baru dengan melihat keterkaitan antara transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga penelitian ini mencoba mengkaji (1) bagaimana pola transformasi struktural di Provinsi Kalimantan Barat menurut teori dari Chenery dan Syrquin, (2) bagaimana keterkaitan antara transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Provinsi Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Kuznets (1955) meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Ditemukan, ada suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hipotesis ini ketimpangan pendapatan dalam suatu negara akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, kemudian pada tahap menengah cenderung tidak berubah dan akhirnya menurun ketika negara tersebut sejahtera. Ketimpangan pendapatan yang besar pada fase awal pertumbuhan ekonomi ini disebabkan proses perubahan menjadi masyarakat industri.

Kuznets juga mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan yang besar terjadi pada negara-negara yang belum berkembang berkaitan dengan rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah. Kuznets mengasumsikan bahwa ketimpangan pendapatan ada bersama dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah, dan hipotesis Kuznets tentang penyebab perubahan jangka panjang dalam distribusi pendapatan apakah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan meningkat atau menurun dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara hanya dapat dijelaskan 5 persen informasi empiris dan 95 persen hanya spekulasi dan kemungkinan harapan.

Keterkaitan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Aglomerasi (pemusatan aktivitas) produksi digunakan oleh Bonet (2006) sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kesenjangan wilayah. Ia menyatakan bahwa aglomerasi produksi dapat

mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terdapat hambatan bagi mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terdapat surplus tenaga kerja dalam perekonomian.

Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2004), perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Namun kekayaan alam ini, tidak dimiliki oleh semua daerah di seluruh Indonesia secara merata. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan antar daerah.

Sedangkan Sjafrizal (2008) dalam Syamsir dan Rahman (2018), mengatakan bahwa terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar.

Transformasi Struktural: Konsep dan Karakteristik

Transformasi struktural merupakan proses peralihan atau transisi dalam dominasi sektor primer (tradisional) menuju ke peran aktif sektor modern (sekunder dan tersier) dalam kegiatan perekonomian yang lebih produktif (Naiya, 2013). Perubahan struktur ini memerlukan proses yang panjang dimana kegiatan ekonomi beralih dari sektor ekonomi tradisional (pertanian) yang cenderung menurun dan bergeser kepada sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor modern (industri dan jasa), terutama dalam output dan kesempatan kerja. Terdapat 2 (dua) persyaratan mendasar yang diperlukan dalam mencapai proses berlangsungnya transformasi struktural dalam mendorong pembangunan ekonomi (Ariyo & Olaniyan, 2014). *Pertama*, adanya modernisasi pertanian rakyat yang terintegrasi ke dalam rantai agribisnis yang berkembang pesat yang dapat menciptakan permintaan pangan di kota yang meningkat pesat. *Kedua*, ada upaya untuk memperbaiki performa industrialisasi untuk mendorong penciptaan dan pertumbuhan di sektor agribisnis dan manufaktur, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan tingkat produktivitas di luar sektor pertanian (WCAO, 2012).

Menurut Timmer, (2012) dan Naiya, (2013), secara umum, perekonomian yang mengalami transformasi struktural ditandai dengan beberapa karakteristik antara lain: (a) terjadi penurunan proporsi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja; (b) meningkatnya pangsa sektor modern yaitu industri dan jasa; (c) terjadinya proses urbanisasi yang cepat karena orang bermigrasi dari perdesaan (pekerja petani) ke daerah perkotaan (manufaktur dan ekspor); dan (d) terjadinya transisi demografi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke rendah kelahiran dan kematian. Badiane, (2012) mengatakan bahwa karakteristik tersebut biasanya akan mengarah pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi di seluruh perekonomian, dan secara progresif meningkatkan pendapatan di sektor pertanian perdesaan menuju tingkat pendapatan di sektor modern (industri dan jasa). Namun, bukti ini mengindikasikan bahwa transformasi dengan peningkatan produktivitas seperti itu mungkin tidak biasanya terjadi di negara-negara seperti Afrika dan Nigeria. Akan tetapi, sifat dan kualitas transformasi struktural di lingkungan negara-negara tersebut dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan (Herrendorf et.al, 2013).

Teori Patterns of Development Chenery-Syquin

Chenery dan Syrquin, dan Kuznets, melihat peningkatan transformasi struktural dalam hal pendapatan. Transformasi struktural merupakan proses yang terjadi pada masa peralihan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, peningkatan pendapatan dapat

meningkatkan akumulasi modal fisik dan kualitas sumber daya manusia, mengubah struktur permintaan, perdagangan, produksi dan lapangan kerja (Chenery dan Syrquin, 1975).

Chenery dan Syrquin (1975), berpendapat bahwa terkait dengan perubahan faktor-faktor produksi, terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Sehubungan dengan kondisi penawaran faktor-faktor produksi, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang seringkali disertai dengan akumulasi atau penggunaan sumber daya dan dana untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian suatu negara. Dalam model Chenery-Syrquin, sektor ekonomi dibagi menjadi empat sektor, yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor industri (manufaktur dan konstruksi), dan sektor jasa publik (listrik, gas, air minum, transportasi dan komunikasi) dan selebihnya adalah sektor jasa. Chenery dan Syrquin meneliti bagaimana perubahan struktur ekonomi terjadi di negara berkembang dan yang sedang berkembang. Secara keseluruhan, Chenery dan Syrquin menunjukkan sepuluh jenis perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama proses pembangunan negara berkembang. Perubahan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Proses Akumulasi, yaitu seperti pembentukan atau investasi, penerimaan pendapatan pemerintah dan kegiatan penyediaan Pendidikan kepada masyarakat.
- b. Proses Alokasi Sumber Daya, yaitu seperti struktur permintaan, struktur produksi dan struktur perdagangan.
- c. Proses Demografi dan Distribusi, yaitu seperti alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian serta distribusi pendapatan.

Model Pembangunan Fisher-Clark

Fisher (1939) mengemukakan teori tentang pola pergeseran struktur ekonomi yang berfokus pada perubahan produksi dan penggunaan faktor produksi dengan semakin berkembangnya suatu perekonomian. Hipotesis Fisher tersebut dikenal dengan "*Three Stages of Economic Development*" atau tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi dimana ketiga tahapan tersebut ialah pra-industri (pre-industrial), industri (industrial) dan pascaindustri (*post-industrial*) serta membagi ekonomi menjadi tiga sektor yakni sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam tahapan akhir perkembangan ekonomi, permintaan konsumen untuk jasa akan meningkat. Hasil penelitian Fisher tersebut didukung oleh kajian data statistik oleh Clark (1949). Dalam tulisannya "*The Conditions of Economic Progress*", Clark berargumentasi bahwa permintaan konsumen akan barang manufaktur akan mengalami stagnasi dan permintaan konsumen akan bergeser ke sektor jasa begitu pula dengan tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lain tersebut selain disebabkan karena menurunnya permintaan konsumen akan barang manufaktur, faktor lain yang tidak kalah penting ialah adanya perbedaan produktivitas masing-masing sektor. Penelitian keduanya sering dikenal dengan *Fisher-Clark Model of Development*.

Tinjauan Empiris

Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dilaksanakan di berbagai negara, adalah sebagai berikut :

Romli, Hutagaol, dan Priyarsono (2016), bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi struktural dan pengaruhnya terhadap disparitas pendapatan di Madura menggunakan model regresi data panel. Pangsa sektor pertanian berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi disparitas pendapatan sementara pangsa sektor industri dan jasa justru meningkatkan disparitas pendapatan. Nangarumba (2015), penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak PDB sektor Pertanian, PDB Sektor Industri, PDB Sektor Jasa, upah Provinsi Minimum, Pengeluaran Modal dan Kredit Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada 2005-2014, menggunakan regresi

data panel. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, salah satunya yaitu, ditemukan bahwa variabel independen secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan efek negatif, kecuali variabel PDB Sektor Industri. Sedangkan elastisitasnya, masing-masing variabel independen inelastis terhadap ketimpangan pendapatan. Dastidar (2012), penelitian ini membandingkan pengaruh struktur ekonomi pada ketimpangan pendapatan di Negara maju dan Negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Negara berkembang terjadi kondisi dimana sektor jasa dan industri lebih dominan dari pertanian. Kondisi ini ternyata meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Sedangkan di negara maju berkembangnya sektor jasa dan berkurangnya pangsa sektor industri dan pertanian, akan mengurangi dalam ketimpangan pendapatan. Yusica, Malik dan Arifin (2018), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah serta menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis PDRB perkapita tingkat ketimpangan wilayah di provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

3. METODE PENELITIAN

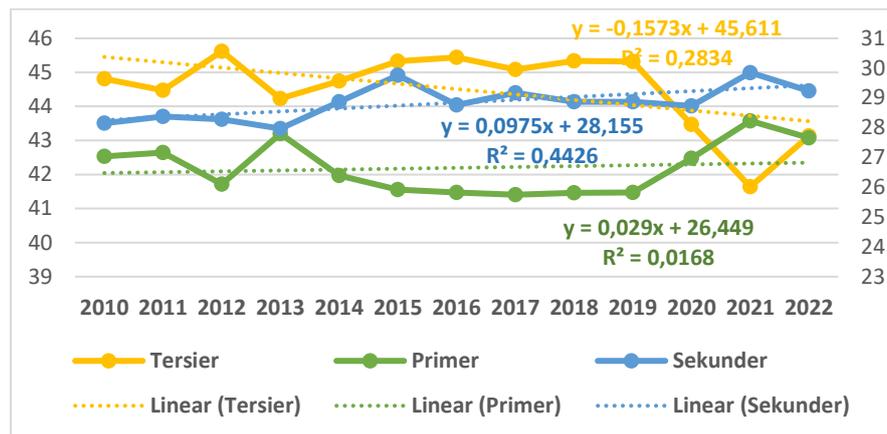
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pola transformasi struktural dalam Produk Domestik Regional Bruto, dan mengetahui keterkaitan antara transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Provinsi Kalimantan Barat. Data sekunder selama periode 2010-2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mengetahui dan menggambarkan pola transformasi struktural di Kalimantan Barat dengan melihat perbandingan pangsa relatif sektor-sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tersier) dan melihat polanya dengan grafik atau dengan melihat tren liniernya, serta mengetahui keterkaitan antara transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat dengan melihat besaran koefisien dan hubungan dalam persamaan regresi yang di tampilkan dalam bentuk kurva atau grafik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Transformasi Struktural di Kalimantan Barat

Perkembangan perekonomian nasional bisa diketahui secara langsung dari sisi produksi. Melalui penyelidikan sektor-sektor produksi dapat diketahui seberapa jauh proses transformasi ekonomi berlangsung.

Kecenderungan yang terjadi menurut pola normal sepertinya tidak sama kondisinya di Kalimantan Barat. Namun terjadi perbedaan dalam perubahan dibandingkan dengan pola normal yang terjadi di negara lain. Data yang ada menunjukkan secara absolut peran dari sektor primer terhadap PDB cenderung meningkat, akan tetapi terlihat bahwa secara relatif kontribusi sektor ini mengalami penurunan, namun di tahun 2019-2021 proporsi sektor pertanian mengalami tren yang meningkat. Sebaliknya, secara absolut maupun relatif, sektor sekunder semakin terdepan, kecuali sektor tersier selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun apabila dilihat dari laju pertumbuhan rata-ratanya ketiga sektor tersebut menunjukkan nilai yang fluktuatif, naik dan turunnya seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.



Gambar 1.2. Transformasi Struktural Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kontribusi Sektor Produksi, 2010-2022

Sumber : BPS, (diolah)

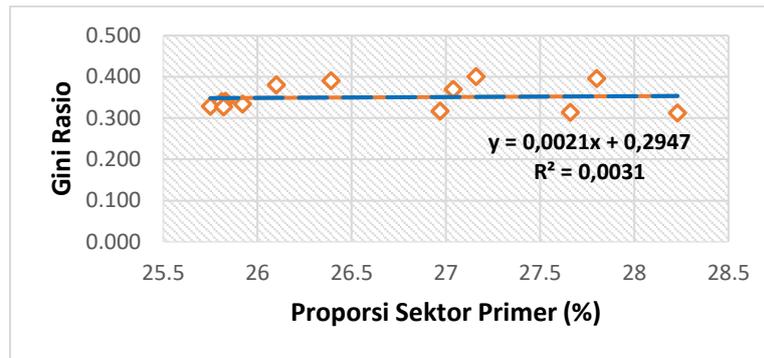
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sektor primer kontribusinya terhadap PDB mengalami tren yang fluktuatif, bahkan dari tahun 2013 sampai 2017 kontribusinya terus penurunan, dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sampai 2021. Hal ini dibuktikan dari besaran koefisien atau slop yang memiliki positif. Sedangkan sektor lainnya yaitu sektor sekunder kontribusinya mengalami peningkatan yang tercermin dari besaran slopanya bertanda positif. Namun berbeda untuk kontribusi pada sektor tersier dimana pada tahun 2013 sampai 2018 kontribusinya meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2019-2021, hal ini dapat diketahui dari besar nilai koefisien atau slop yang bertanda negatif.

Sektor yang memiliki tren menaik yaitu sektor sekunder terlihat paling besar peranannya terhadap struktur produksi nasional, dimana nilai koefisien regresinya mencapai 0,0975 dengan nilai korelasi atau R^2 sebesar 0,4426. Maksudnya adalah setiap peranan sektor sekunder dalam struktur produksi nasional selalu meningkat sebesar 0,0975 persen dalam PDRB Kalimantan Barat. Sementara itu tambahan kontribusi sektor tersier masih jauh di bawah sektor sekunder, maupun primer dimana nilainya korelasinya atau R^2 hanya sebesar 0,2834 (tersier) dan 0,0168 (primer).

Gambaran pola transformasi struktural yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat berbeda pada pola normal yang dinyatakan dalam teori Chenery dan Syrquin, dimana pola pembangunan yang terjadi menurut teori Chenery bahwa pola transformasi struktural terjadi terlihat dari peran kontribusi sektor pertanian yang cenderung mengalami tren yang menurun seiring dengan peningkatan pangsa sektor industri dan jasa dalam PDB. Sedangkan di Kalimantan Barat yang turun justru proporsi dari sektor jasa, sedangkan sektor pertanian dan industri meningkat. Hal ini sesuatu hal yang wajar dapat terjadi diberbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam pola-pola pembangunannya.

Keterkaitan Transformasi Struktural Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) di Kalimantan Barat

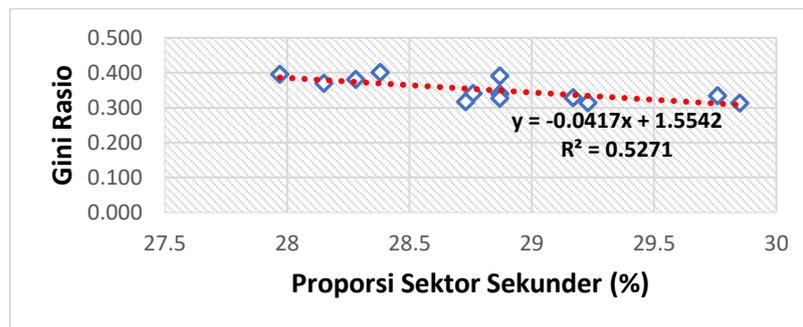
Selanjutnya kita dapat mengetahui keterkaitan atau hubungan antara transformasi struktural melalui proporsi masing-masing sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier terhadap ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1.3. Korelasi antara Proporsi Sektor Primer dan Gini Rasio

Sumber: BPS, Prov. Kalimantan Barat, 2010-2022 (data diolah)

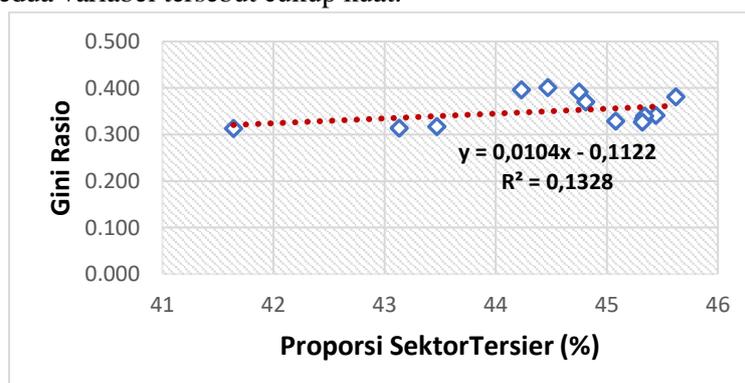
Terlihat dari gambar di atas, bahwa keterkaitan atau hubungan antara transformasi struktural yang diproksi dengan nilai proporsi sektor primer (pertanian) menunjukkan nilai koefisien yang positif (0,0021), artinya peningkatan pada kontribusi sektor primer terhadap PDRB akan berdampak kepada peningkatan gini rasio atau ketimpangan pendapatan yang terjadi Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai korelasi (R^2) antara proporsi sektor primer dan gini rasio sebesar 0,0031 yang bermakna memiliki hubungan yang lemah.



Gambar 1.4. Korelasi antara Proporsi Sektor Sekunder dan Gini Rasio

Sumber: BPS, Prov. Kalimantan Barat, 2010-2022 (data diolah)

Namun berbeda dengan gambar 1.4, hubungan atau keterkaitan antara transformasi sektor sekunder (industri) yang diproksi dengan proporsi sektor sekunder memperlihatkan nilai koefisien yang arah atau slopanya negatif (-0,0417), hal ini bermakna bahwa seiring dengan bertambahnya peran sektor sekunder (industri) terhadap PDRB akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan (gini rasio) yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai korelasi (R^2) sebesar 0,5271 yang artinya hubungan antara kedua variabel tersebut cukup kuat.



Gambar 1.5. Korelasi antara Proporsi Sektor Tersier dan Gini Rasio

Sumber: BPS, Prov. Kalimantan Barat, 2010-2022 (data diolah)

Sedangkan untuk gambar 1.5. persamaan regresi atau tren linier dari keterkaitan atau hubungan antara transformasi struktural sektor tersier yang diproksi dengan proporsi sektor tersier (jasa) memperlihatkan garis tren atau regresi yang meningkat dengan nilai slop atau koefisien bernilai positif (0,0104), yang berarti dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier (jasa) terhadap PDRB maka menyebabkan semakin meningkat pula gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai korelasi (R^2) sebesar 0,1328 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara proporsi sektor tersier dan ketimpangan pendapatan relatif lemah.

Temuan empiris tentang hubungan antara perkembangan sosial terhadap transformasi struktural menunjukkan bahwa hasil tergantung pada sifat transformasi. Misalnya, Dastidar (2012) menemukan bahwa ketika perubahan struktural ditandai dengan transisi dari pertanian ke industri, ketimpangan tidak meningkat di negara berkembang. Di sisi lain, ketimpangan ditemukan meningkat di negara berkembang yang mengalami transformasi jasa pertanian. Dalam kasus terakhir, peningkatan ketimpangan lebih terlihat ketika tingkat awal ketimpangan sudah lebih tinggi dari rata-rata. Sejalan dengan itu, baru-baru ini para ahli menyoroti misalokasi dan kurangnya pemanfaatan sumber daya sebagai akibat dari ketidaksetaraan yang selanjutnya menghambat pertumbuhan ekonomi (Restuccia & Rogerson, 2017).

Perubahan struktural dan hubungan ketimpangan telah dieksplorasi sebagai konsekuensi dari ketimpangan upah (Pi & Zhang, 2018), dan (Mihaylova & Bratoeva-Manoleva, 2018), dan, dalam kasus ekonomi Bulgaria, menunjukkan bahwa perubahan struktural mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Ketimpangan upah didorong oleh keterampilan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Sedangkan (Wang, 2019) dalam model keseimbangan dinamis, secara analitis membahas proses industrialisasi dari distribusi pendapatan pedesaan. Hubungan antara kedua konsep ini ditutup oleh efek pada permintaan yang disebabkan oleh pendapatan untuk menghasilkan barang-barang dengan produktivitas tinggi. Literatur empiris mengeksplorasi hubungan ketimpangan atas perubahan struktural. Di Cina, (Hao et.al., 2020) menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan telah memberikan migrasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor lain dan menghasilkan konvergensi antar daerah. Mekanismenya dalam hal ini karena adanya perubahan kebijakan migrasi yang dilakukan China pada tahun 2000-2015.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pola transformasi struktural yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat merupakan pola yang berbeda dengan pola normal yang cirikan dalam teori Chenery dan Syrquin. Namun pada dasarnya pola transformasi yang berbeda ini merupakan suatu pola pembangunan yang juga banyak terjadi diberbagai negara maju dan berkembang, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik disetiap negara maupun daerah termasuk di Kalimantan Barat. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki, peran pemerintah terhadap kebijakan pembangunan suatu daerah, struktur tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Keterkaitan atau hubungan antara transformasi struktural yang dilihat dari masing-masing peran sektor primer, sekunder, tersier dengan ketimpangan pendapatan (gini rasio) ternyata memberikan dampak yang berbeda. Dimana proporsi sektor primer dan tersier memberikan dampak positif terhadap gini rasio, hal ini memberikan makna bahwa peningkatan kontribusi sektor pertanian dan jasa terhadap PDRB akan menyebabkan semakin terjadi ketidakmerataan yang tinggi pada distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dengan sektor industri, dimana peran sektor sekunder yang semakin meningkat pada PDRB menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin menurun di Provinsi Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyo, Ademola, & Olaniyani, Olanrewaju. (2014). Structural Transformation and Inequality: Evidence from Nigeria. *Development*, 2014, 57(3-4), (531-539).
- Badriah, Lilis Siti, Herman Sambodo & Irma Suryahan. (2006). *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Purbalingga. EKO-REGIONAL, Vol 1, No.2, September 2006.*
- Bonet, Jaime. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From The Colombian Experience. *The Annals of Regional Science*, 2006, vol. 40, issue 3, 661-676.
- Chenery, H.B. dan Taylor. (1986). Development Pattern: Among Countries and Over Time. *Rev. of Econ. and Statistics* 50 : 391-416.
- Chenery, H & Syrquin, M.(1975). *Patterns of development 1950-1970. A World Bank research publication 11913. New York, NY : Oxford University Press.* [http://documents.worldbank.org/curated/en/482491468328816108/Patterns-of-development-1950-1970.](http://documents.worldbank.org/curated/en/482491468328816108/Patterns-of-development-1950-1970)
- Clark, C. (1949). Theory of Economic Growth. *Econometrica: Journal of The Econometric Society*, 112-116.
- Dastidar, Ananya G. (2012). Income Distribution and Structural Transformation: Empirical Evidence from Developed and Developing. *Seoul Journal of Economics* 2012, Vol. 25, No. 1.
- Hao, et.al. (2020). The effect of migration policy on growth, structural change, and regional inequality in China. *Journal of Monetary Economics*, 113(xxxx), 112-134. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.03.003>
- Herrendorf, Berthold, Richard Rogerson and Akos Valentinyi (2013) 'Growth and Structural Transformation', *NBER Working Paper No. 18996. Cambridge, MA: National Bureau Of Economic Research.*
- Fisher, Allan G. B. (1939). *Production, Primary, Secondary And Tertiary.* , 15(1), 24-38. Doi:10.1111/J.1475-4932.1939.Tb01015.X
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, Simon. (1955). Economic Growth and Inequality. *The American Economic Review*, Vol 63 (3), pp.247-258.
- Mihaylova, S., & Bratoeva-Manoleva, S. (2018). Structural changes and wage inequality in the Bulgarian economy. *Eastern Journal of European Studies*, 9(2), 205-227.
- Naiya, Ismaeel Ibrahim (2013) 'Structural Change, Economic Growth and Poverty in OIC Countries: The case of Indonesia, Malaysia, Nigeria and Turkey', *MPRA Paper No. 53954. Munich: Munich Personal RePEc Archive.*
- Nangarumba, Muara. (2012). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015ISSN 2086-1575.*
- Pi, J., & Zhang, P. (2018). Structural change and wage inequality. *International Review of Economics and Finance*, 58, 699-707. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.07.010>
- Restuccia, D., & Rogerson, R. (2017). The Causes and Costs of Misallocation. *Journal of Economic Perspectives*, 31(3), 151-174. <https://doi.org/10.1257/jep.31.3.151>
- Romli, Mohammad Saedy, Hutagaol, Manuntun Parulian, dan Priyarsono Dominicus Savio.(2016). Transformasi Struktural: Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 25-44. Vol 5 No 1. Edisi Juli 2016
- Samsir, Andi, & Rahman, Abdul.(2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ecces. Economics, Social, and Development Studies. Volume 5 Nomor1 Ed.Juni 2018 : page : 22- 42 . p-ISSN: 2407-6635 e-ISSN : 2580-5570.*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Baduose Media. Padang Sumatera Barat.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future.* New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Timmer, Peter. (2012) 'The Mathematics of Structural Transformation', in WCAO (ed.) *Patterns of Growth and Structural Transformation in Africa: Trends and lessons for future development strategies*. West and Central Africa Office Thematic Research Note 2 April.
- Wang, Y. (2019). A model of industrialization and rural income distribution. *China Agricultural*

Economic Review, 11(3), 507–535. <https://doi.org/10.1108/CAER-02-2019-0030>

West and Central Africa Office (WCAO) of International Food Research Policy Institute (IFPRI). (2012) *Patterns of Growth and Structural Transformation in Africa*. West and Central Africa Office (WCAO) of International Food Research Policy Institute (IFPRI). Dakar: International Food Research Policy Institute (IFPRI).

Yusica, Liling Vera, Nazaruddin Malik, dan Zaenal Arifin. (2108). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018 Hal. 230 – 240*.

ALOKASI WAKTU KERJA PEDAGANG SEKTOR INFORMAL WANITA DI KOTA PONTIANAK

Meiran Pangabean

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to find out the portrait of female workers, especially informal sector traders. The research method used is a quantitative descriptive method. The sampling technique used purposive sampling as many as 84 female traders at five traditional markets in Pontianak City. The research instruments used were interviews and questionnaires. The research results reveal that partially women's income, age, education level and number of dependents have a positive and significant effect on women's work time allocation, while husband's income has a negative and significant effect on women's work time allocation. The coefficient of determination test results show a value of 49.35% while the remaining 50.65% is influenced by other variables or factors outside the model.

JEL: J16, J22, O17

Keywords: Women's Working Time Allocation; Age; Women's Income; Husband's Income; Level of education; The number of dependents

1. PENDAHULUAN

Penting bagi suatu negara untuk mengakui bahwa kemajuan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu indikator kesuksesan bangsa untuk mencapai tujuan ini yaitu potensi sumber daya manusia, yang merujuk pada penduduknya. Di sini, peran wanita sebagai bagian dari penduduk menjadi sangat krusial dan memiliki kontribusi yang penting dalam mewujudkan cita-cita negara. Wanita memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian, dan oleh karena itu, mereka perlu didorong dan diberdayakan dengan baik. Namun, pada kenyataannya, partisipasi wanita di dunia kerja berada jauh di bawah laki-laki. Data publikasi BPS (2022) memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di Kota Pontianak selama periode 2017 hingga 2021 lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan, TPAK wanita mengalami penurunan pada tahun 2019 dan dalam dua tahun terakhir, belum mencapai angka 50%. Secara lebih detail, kemampuan perekonomian dalam membuat ataupun menyerap tenaga kerja diukur menggunakan nilai Employment to Population Ratio (EPR) dari BPS Kota Pontianak.

Pada tahun 2021, EPR laki-laki mencapai 66,06%, angka yang lebih tinggi daripada wanita yang hanya mencapai 42,80%. Artinya, penduduk laki-laki mempunyai peran yang lebih aktif dalam aktivitas perekonomian daripada dengan penduduk perempuan. Sebagai contoh, dari 100 orang penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas, 67 orang di antaranya bekerja, sedangkan pada penduduk perempuan hanya 43 orang. Walaupun secara keseluruhan partisipasi perempuan dalam perekonomian masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, ada fakta menarik yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor informal justru memiliki persentase yang lebih tinggi daripada laki-laki. Publikasi BPS (2022) memperlihatkan bahwa di Kota Pontianak selama periode tahun 2019 hingga 2021, sektor informal menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan. Hal tersebut terjadi karena penambahan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terutama di sektor formal, serta tingginya tingkat persaingan. Menurut Putra (2018), sektor

pekerjaan informal umumnya terdiri dari usaha mandiri dengan skala kecil, menggunakan teknologi sederhana, modal yang terbatas, dan cenderung tidak terorganisir.

Dampak dari situasi ini adalah sektor informal seringkali terkait dengan aktivitas ekonomi yang berskala kecil, memiliki produktivitas serta keuntungan yang rendah. Berdasarkan data yang disajikan oleh publikasi BPS Kota Pontianak untuk periode tahun 2019-2021, sektor perdagangan, jasa akomodasi, dan reparasi rumah makan, telah menjadi pilar utama dalam perekonomian Kota Pontianak. Sektor ini menunjukkan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi dibanding sektor lain. Sektor ini memiliki prioritas utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari perspektif jenis kelamin, sektor ini juga menunjukkan partisipasi perempuan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, sekitar 31,89% pekerja perempuan berkontribusi dalam sektor ini, namun pada tahun 2020, angka ini meningkat drastis sebesar 19,42% menjadi 51,31%. Tidak hanya itu, pada tahun 2021, persentase pekerja perempuan dalam sektor ini mencapai angka yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 77%.

Rata-rata jam kerja penduduk di Kalimantan Barat dalam sektor informal adalah 35-44 jam per minggu. Jika memperhatikan dari jenis kelamin, persentase pekerja laki-laki yang bekerja selama 35 hingga 44 jam per minggu lebih banyak dibanding wanita. Akan tetapi, perbedaan persentase tersebut tidak begitu signifikan. Dalam Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, diatur sistem jam kerja memiliki batasan 40 jam dalam satu minggu. Namun, data menunjukkan bahwa 22% perempuan bekerja lebih dari 44 jam per minggu, sementara laki-laki yang bekerja lebih dari 44 jam per minggu sekitar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan waktu kerja melebihi batas normal, yang biasanya dihitung sebagai waktu lembur. Meskipun waktu kerja normalnya adalah 40 jam per minggu, data menunjukkan adanya pekerja yang bekerja lebih dari jumlah tersebut.

Penelitian ini akan difokuskan pada wanita yang sudah menikah dan memiliki pekerjaan sebagai pedagang dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan memastikan bahwa responden memenuhi kriteria dari berbagai variabel yang menjadi fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti telah melakukan pra survei di pasar rakyat di Kota Pontianak. Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, Pasar Dahlia, Pasar Kemuning serta Pasar Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Pontianak dengan tingkat kunjungan konsumen yang sangat tinggi setiap harinya. Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan juga menunjukkan bahwa jumlah pedagang terdaftar serta aktif berjualan di pasar-pasar tersebut cukup banyak, lihat Tabel 1. Disamping itu, pasar-pasar ini menawarkan keberagaman ragam usaha serta tidak terbatas di satu jenis usaha. Hal ini akan menggambarkan jenis pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang dan perbedaan alokasi jam kerja yang dibutuhkan untuk menjual produk-produk mereka.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha di Pasar Tradisional Kota Pontianak

Pasar	Jumlah Pedagang
Pasar Flamboyan	135
Pasar Dahlia	127
Pasar Tengah	109
Pasar Teratai	73
Pasar Kemuning	67

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kota Pontianak, 202

Beberapa faktor mempengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia kerja, seperti yang disebutkan oleh Simanjuntak (2001), Faktor yang berpengaruh pada partisipasi wanita dalam dunia kerja meliputi berbagai aspek, seperti pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, usia, upah, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, pergeseran nilai budaya, lingkungan tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi. Selain itu, menurut penelitian oleh Hernawati dalam Sukarniati (2019), terdapat beberapa dorongan yang mendorong wanita untuk bergabung dalam dunia kerja. Dorongan-dorongan

tersebut meliputi keinginan dalam memperbaiki kualitas hidup, membayar hutang, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan suami serta memperbaiki status sosial. Simanjuntak (2001) juga menjelaskan bahwa curahan jam kerja seseorang bisa dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, umur, dan tanggungan keluarga, selain faktor upah. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa tidak semua penelitian empiris selaras dengan teori yang ada. Selain itu, penelitian tentang alokasi jam kerja wanita sebagai variabel dependen dalam sektor informal perdagangan, khususnya di Kota Pontianak, masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa analisis lebih lanjut mengenai hal ini perlu dilakukan.

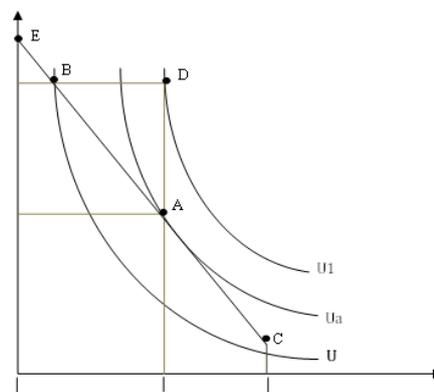
2. KAJIAN LITERATUR

Teori Penawaran Tenaga Kerja

Pada penawaran tenaga kerja, diasumsikan setiap individu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya atau utilitasnya. Mereka akan mencoba mengalokasikan waktu mereka antara bekerja dan beristirahat berdasarkan tingkat kepuasan yang dihasilkan dari masing-masing aktivitas tersebut (Todaro & Smith, 2003). Tradeoff antara bekerja dan waktu luang merupakan aspek krusial bagi individu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, maka semakin sedikit waktu luang yang mereka miliki (Mankiw, 2018). Kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan cara individu menggunakan waktunya antara bekerja dan beristirahat atau melakukan aktivitas konsumtif lainnya. Hubungan ini juga terkait dengan tingkat upah yang diterima oleh individu. Ketika pendapatan relatif seseorang tinggi, cenderung mereka akan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Hal ini mengakibatkan kurva penawaran berbelok ke kiri, yang sering disebut sebagai *Backward Bending Supply Curve*.

Teori Labor Leisure Choice

Teori laborileisure choice, atau disebut juga teori alokasi waktu pekerja merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan tentang cara mengalokasikan waktu mereka antara bekerja dan bersantai (tidak bekerja). Model ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seseorang akan bekerja serta berapa jam kerja yang akan dipilih (Borjas, 2016). Menurut Ehrenberg dan Smith (2009) menyatakan bahwa keputusan untuk bekerja adalah hasil akhir dari pertimbangan individu mengenai bagaimana mereka ingin menggunakan waktu mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang mereka harapkan, pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka, serta biaya kesempatan (opportunity cost). Kaufman dan Hotchkiss (2003) menekankan bahwa preferensi individu berperan penting dalam menentukan bagaimana mereka mengalokasikan waktu antara bekerja dan bersantai. Kurva indiferen digunakan untuk menggambarkan kombinasi berbagai pilihan bekerja pada tingkat pendapatan tertentu yang berhubungan dengan jumlah waktu luang yang dapat dinikmati oleh individu.



Gambar 2.1 Kurva Budget Line dan Alokasi waktu Konsumsi

Sumber : Borjas, 2016

Gambar 2.1 menjelaskan hubungan antara garis anggaran dan alokasi waktu. Titik D mewakili tingkat utilitas tertinggi. Titik A memperlihatkan tingkat utilitas optimal karena kurva indifferen U_a menyentuh garis anggaran, mencerminkan keseimbangan antara waktu luang serta waktu bekerja dengan tingkat kepuasan konsumsi yang diinginkan. Titik B memperlihatkan titik maksimal dalam bekerja, yang mengakibatkan individu hanya memiliki sedikit waktu luang dengan tingkat kepuasan konsumsi yang rendah. Dengan demikian, tingkat utilitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang mereka peroleh. Fungsi utilitas menggambarkan tingkat kepuasan yang diperoleh tenaga kerja berdasarkan konsumsi barang dan jasa, serta menikmati waktu luang mereka. Individu yang mempergunakan waktunya untuk waktu luang akan "mengonsumsi" waktu luang tersebut dan memperoleh kepuasan/utilitas dari aktivitas yang dilakukan selama waktu luang tersebut. Begitu pula dengan individu yang mengalokasikan sebagian waktu mereka untuk bekerja, mereka akan memperoleh kepuasan/utilitas dengan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan untuk mengonsumsi barang dan jasa.

Sektor Informal

BPS (Badan Pusat Statistik) mengkategorikan sektor informal menjadi lima status pekerjaan, yaitu: 1. Berusaha sendiri dengan bantuan karyawan tidak tetap; 2. Pekerja bebas di sektor non-pertanian.; 3. Pekerja keluarga yang tidak dibayar ; dan 4. Berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian. Dalam sektor informal, terdapat persentase pekerja informal perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fleksibilitas jam kerja yang dimiliki oleh sektor informal dan minimnya syarat formal untuk masuk ke dalam sektor ini (Anggreani, dkk, 2022).

Sektor informal memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kemandirian perekonomian. Pertumbuhan dalam sektor informal berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan kelompok ekonomi yang lebih lemah, sehingga kemajuan sektor ini bisa menambah pendapatan nasional serta distribusi pendapatan bisa diperbaiki secara keseluruhan. Permintaan yang kuat di pasar informal disebabkan oleh fakta bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ini adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat (Mulyadi, 2014).

Alokasi Waktu Kerja dan Faktor-faktor terkait

Pendapatan perempuan dapat dipengaruhi oleh jam kerja yang mereka lakukan dalam dunia kerja. Sugeng dalam Amnesi (2013) menyatakan bahwa jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan perempuan, semakin banyak jam kerja yang dilakukan oleh perempuan, maka pendapatan yang diterima juga akan semakin tinggi. Hal ini berdampak positif bagi keluarga, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian suatu keluarga (Widyawati & Pujiyono, 2013). Alokasi waktu atau jam kerja yang diberikan dalam usaha juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan perempuan. Husaini & Fadhlani (2017) menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk berdagang, maka peluang untuk mencapai omset yang lebih tinggi juga semakin besar. Hal ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan perempuan dan keluarga, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bagi pedagang keliling atau pedagang di sektor informal seperti pedagang kaki lima, jam kerja dihitung dari saat mereka memulai berangkat kerja atau membuka lapak/toko hingga kembali ke rumah atau menutup lapak/tokonya. Menurut Herlambang (2002), dalam usaha dagang, kecenderungan yang terjadi adalah pendapatan akan lebih tinggi jika pekerja bekerja lebih lama. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, maka pekerjaan tersebut cenderung akan menjadi lebih produktif.

Alokasi waktu kerja bagi tenaga kerja dalam kelompok usia produktif ini biasanya memerlukan biaya yang tinggi. Namun, pada kelompok usia yang lebih muda dan usia lanjut, alokasi waktu kerja cenderung lebih rendah karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang (Sukarniati, 2019). Menurut Sukarniati (2019), upah cenderung bertambah sejalan dengan bertambahnya usia tenaga kerja sehingga mencapai puncaknya pada umur sekitar 50 tahun. Setelah mencapai titik tertinggi, upah tidak mengalami peningkatan lagi, malah mengalami penurunan. Sementara itu, jam kerja cenderung bertambah sejalan dengan peningkatan usia hingga mencapai umur maksimal. Setelah mencapai usia maksimal, jam kerja cenderung mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Kusnedi (2003) juga menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pola yang menurun pada kelompok usia muda (10-24 tahun), meningkat pada kelompok usia produktif (25- 60 tahun), dan kemudian kembali menurun pada kelompok usia tua. Pada umumnya, tenaga kerja dengan usia produktif akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja dibandingkan dengan kelompok usia yang sudah tidak produktif.

Ketika upah suami meningkat (*ceteris paribus*), pendapatan keluarga juga akan bertambah. Kenaikan pendapatan keluarga ini berdampak pada peningkatan jumlah barang atau komoditi yang bisa dibeli oleh keluarga tersebut. Jika pendapatan suami rendah, maka kebutuhan rumah tangga akan sulit terpenuhi, dan situasi ini mungkin mendorong istri yang sudah menikah untuk ikut bekerja di pasar tenaga kerja. Namun, jika pendapatan suami meningkat, peran istri dalam pasar tenaga kerja dapat berkurang (Sukarniati, 2019). Dalam situasi di mana pendapatan suami rendah dan kebutuhan rumah tangga tinggi, diharapkan istri dapat membantu dengan berkontribusi dalam perekonomian keluarga melalui pekerjaan di luar rumah.

Berdasarkan penelitian Purwanti dan Kusumastuti (2013), terlihat pendapatan suami memiliki pengaruh terhadap alokasi jam kerja pedagang wanita. Jika pendapatan suami rendah, menyebabkan wanita atau istri akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja. Namun, jika pendapatan suami tinggi, alokasi jam kerja wanita cenderung rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori *backward bending supply curve*, dengan adanya pendapatan suami yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerja istri cenderung menurun. Teori ini juga menjelaskan bahwa kebebasan perempuan dari pasar kerja dianggap sebagai barang normal. Artinya, jika suami memiliki pendapatan tinggi, ia mampu membayar "harga" bagi istri untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar (Jalilvand, 2000).

Perempuan dengan tingkat pendidikan rendah yang tinggal di daerah perkotaan seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan formal dengan status dan penghasilan tinggi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Sebagai hasil dari situasi ini, banyak wanita memilih untuk bekerja dalam bidang pekerjaan yang memiliki penghasilan atau produktivitas rendah (Todaro & Smith, 2003). Dalam konteks penawaran tenaga kerja, pendidikan memainkan peran penting untuk mempengaruhi keputusan seseorang untuk keikutsertaan dalam pasar tenaga kerja (Verick, 2014). Tingkat pendidikan individu akan mempengaruhi pilihan mereka dalam mencapai nilai pendapatan yang maksimum. Pekerja yang mempunyai pendidikan tinggi umumnya akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada pekerja berpendidikan rendah. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah, perempuan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu bekerja dengan produktivitas yang rendah. Sebagai konsekuensinya, meskipun mereka mengalokasikan banyak waktu untuk bekerja, pendapatan yang dihasilkan tidak selalu sebanding dengan waktu yang dihabiskan (Borjas, 2016).

Seseorang yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan tingkat yang memadai untuk masuk ke pasar tenaga kerja di sektor modern mempunyai kesempatan cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi di kota dibandingkan dengan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan (Todaro & Smith, 2003). Pandangan ini juga sama dengan pendapat Hosney (2016), yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak positif pada partisipasi tenaga kerja wanita, karena individu yang berpendidikan serta ahli mempunyai peluang penghasilan yang lebih tinggi. Pendidikan

memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Teori human capital yang dijelaskan oleh Becker dalam Anggreni (2022) juga mendukung pandangan ini. Menurut teori ini, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi karena pendidikan memberikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Akibatnya, mereka bisa bekerja dengan lebih efektif serta efisien, sehingga jam kerja yang dibutuhkan cenderung lebih rendah.

Tingginya beban ketergantungan, seperti jumlah adik, anak, keponakan, dan faktor lainnya, mendorong banyak wanita untuk terlibat dalam kegiatan kerja. Banyak di antara mereka memilih untuk mendirikan unit usaha mikro yang memerlukan modal yang minim atau bahkan tanpa modal uang sama sekali. Meskipun unit usaha mikro ini memiliki modal yang kecil, namun tingkat keuntungannya bisa sangat tinggi. Namun, untuk mencapai keuntungan tersebut, tenaga dan waktu yang harus mereka curahkan sangat besar. Contohnya, mereka harus menjual dagangan sepanjang hari hanya agar memperoleh sejumlah uang yang cukup untuk membeli makanan keluarga selama satu ataupun dua hari sajai. Akibatnya, apabila dihitung berdasarkan rasio modal tenaga kerja, maka tingkat produktivitas dari usaha mikro yang mereka jalani cenderung sangat rendah (Todaro & Smith, 2003).

Dewi & Yuliarmi (2020) menyatakan bahwa perempuan seringkali terlibat dalam kegiatan perekonomian keluarga karena adanya beban tanggungan keluarga yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Banyaknya anggota keluarga yang tidak produktif menjadi beban berat bagi keluarga, yang membuat ibu rumah tangga agar mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Total keluarga yang ditanggung berkaitan dengan pengeluaran keluarga. Semakin besar jumlah tanggungan, maka cenderung semakin besar pula pengeluaran keluarga. Akibatnya, keluarga memerlukan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Todaro & Smith, 2003). Apabila penghasilan suami sebagai kepala keluarga tidak mencukupi, maka tekanan ekonomi ini akan mendorong istri untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan terjadi pengalokasian waktu perempuan di dunia kerja, dimana mereka akan menyisihkan waktu dari tugas rumah tangga untuk bekerja dan mencari penghasilan tambahan untuk keluarga.

Kajian Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti dan Novita (2022) terhadap buruh pengasin ikan di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, ditemukan bahwa alokasi waktu kerja istri mencapai 7.09 jam (29,05%), yang ternyata lebih tinggi daripada waktu kerja suami sebesar 6,71 jam (28%). Selain itu, ditemukan pula bahwa variabel jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi wanita dalam bekerja serta rata-rata jumlah tanggungan keluarga mencapai 4 orang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Yuliarmi (2020) terhadap curahan jam kerja pedagang perempuan di pasar seni Sukawati, Bali, digunakan analisis regresi linier berganda dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada curahan jam kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak signifikan berpengaruh terhadap curahan jam kerja. Namun, ditemukan bahwa variabel umur serta pendapatan suami memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan curahan jam kerja. Sebaliknya, jumlah tanggungan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggreni et al (2021) terhadap pedagang perempuan di Denpasar, digunakan analisis data moderated regression analysis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara bersama-sama, variabel umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan (sektor formal), pendapatan suami, dan jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja. Selain itu, ketika menganalisis secara terpisah, semua variabel dalam penelitian ini menjelaskan hubungan yang positif serta signifikan dengan curahan jam kerja. Artinya, ketika variabel independen meningkat maka akan meningkatkan variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penelitian Kurniawati dan Salsabila (2021) mengenai motivasi kerja wanita madura di

sektor informal di Pontianak Barat, menggunakan analisis deskriptif, ditemukan bahwa faktor yang dominan mendorong wanita madura untuk bekerja adalah kondisi ekonomi keluarga. Meskipun demikian, tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi wanita madura dalam bekerja. Selain itu, jumlah tanggungan dan usia juga tidak menjadi faktor penentu dalam kemauan mereka untuk bekerja. Hal ini disebabkan karena wanita etnis madura telah terbiasa bekerja sejak usia muda, sehingga tinggi rendahnya curahan jam kerja bagi mereka tidak menjadi masalah.

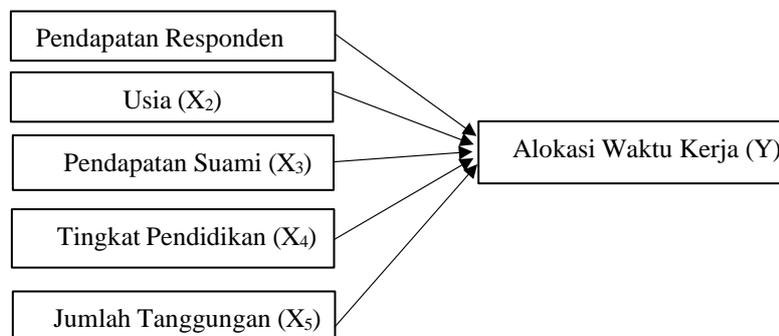
Berdasarkan penelitian Rahayu dan Darsana (2019) terhadap pedagang perempuan di Lot Tabanan, ditemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap curahan jam kerja. Namun, kegiatan adat dan agama, serta pendapatan suami, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap curahan jam kerja. Meskipun begitu, penelitian juga memperlihatkan bahwa total tanggungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap curahan jam kerja wanita pedagang cenderamata di Lot Tabanan. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel dengan pengaruh dominan yang lebih besar dalam mempengaruhi curahan jam kerja perempuan pedagang cenderamata di Lot Tabanan yakni kegiatan adat dan agama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatikasari (2016) terhadap pedagang wanita di kawasan wisata Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, menggunakan analisis regresi linier berganda, ditemukan bahwa usia dan jumlah tanggungan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi jam kerja. Sementara itu, pendapatan suami dan jarak rumah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi jam kerja perempuan pedagang tersebut. Namun, tingkat pendidikan menunjukkan hubungan positif dengan alokasi jam kerja, meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Sasana dan Riana(2013) terhadap curahan kerja pedagang wanita di pasar Johar, Semarang, digunakan analisis regresi linier berganda, ditemukan beberapa temuan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan wanita, umur, dan jumlah tanggungan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap curahan jam kerja pedagang wanita. Di sisi lain, tingkat pendidikan dan pendapatan suami memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap curahan jam kerja pedagang wanita.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Widayawati & Pujiyono (2013) terhadap wanita di sektor pertanian di desa Tajuk, Kabupaten Semarang, menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa variabel umur, jumlah tanggungan, luas lahan, jarak tempat tinggal serta keuntungan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap curahan jam kerja wanita dalam sektor pertanian tersebut. Namun, tingkat pendidikan berhubungan negatif dengan curahan jam kerja serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan

berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai

H1 : Pendapatan responden berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja pedagang

wanita di pasar tradisional Kota Pontianak

- H2 : Usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja pada pedagang wanita di pasar tradisional Kota Pontianak
- H3 : Pendapatan suami berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja pada pedagang wanita di pasar tradisional Kota Pontianak
- H4 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja pada pedagang wanita di pasar tradisional Kota Pontianak
- H5 : Jumlah tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja pada pedagang wanita di pasar tradisional Kota Pontianak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan data yang konkret dan berlandaskan pada pandangan positivistik, yang kemudian dianalisis menggunakan statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian dilaksanakan pada lima pasar tradisional di Kota Pontianak, yaitu Pasar Flamboyan, Teratai, Dahlia, Kemuning serta Pasar Tengah.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari pedagang wanita di pasar tradisional sebagai responden. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terbuka yang sudah disesuaikan berdasarkan variabel yang dibutuhkan. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pedagang wanita pada lima pasar yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang responden. Menggunakan rumus slovin dalam teknik penarikan sampel, yang kemudian diaplikasikan dengan teknik proporsional sampling dan purposive sampling (Gujarati : 2021)

$$Y = \beta_0 + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \beta_4(X_4) + \beta_5(X_5) + e$$

Keterangan :

Y = Alokasi Jam Kerja	β_0 = Konstanta
X ₁ = Pendapatan Responden	β_1 = Koefisien Regresi Pendapatan Responden
X ₂ = Usia Responden	β_2 = Koefisien Regresi Usia Responden
X ₃ = Pendapatan Suami	β_3 = Koefisien Regresi Pendapatan Suami
X ₄ = Tingkat Pendidikan	β_4 = Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan
X ₅ = Jumlah Tanggungan	β_5 = Koefisien Regresi Jumlah Tanggungan
e = eror/residual	

Adapun tahapan selanjutnya melakukan pengujian statistik meliputi Uji t (Uji Parsial) ; Uji F (Uji Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Sebelum data diinterpretasikan maka dilakukan uji asumsi klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji deskriptif dapat diungkapkan bahwa jam kerja rata-rata responden sebesar 50,27 jam dengan standar deviasi sebesar 18,968. Jam kerja terendah yang diamati yakni 16 jam per minggu, sementara jam kerja tertinggi mencapai 105 jam per minggu. Pendapatan rata-rata responden sebesar Rp. 889.449,4 dengan standar deviasi sebesar Rp. 383.094,2. Pendapatan terendah yang diamati oleh responden adalah Rp. 281.250 per minggu, sementara pendapatan tertinggi mencapai Rp. 1.950.000 per minggu. Usia responden sekitar 43 hingga 44 tahun dengan standar deviasi adalah 8,742. Usia termuda yang diamati pada responden pada penelitian ini yakni 27 tahun, sementara usia tertua ditemukan adalah 61 tahun. Pendapatan suami rata-rata sebesar Rp. 889.107,1 per minggu dengan standar deviasi

Rp.326.535,9. Pendapatan suami terendah Rp. 250.000 per minggu, dan tertinggi Rp. 1.750.000 per minggu.

Tingkat pendidikan rata-rata atau lama sekolah yang dijalani oleh responden sekitar 10 tahun, setara pendidikan tingkat SMP atau SMA. Tingkat pendidikan terendah yang menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi yang dapat diselesaikan oleh responden adalah 16 tahun, setara dengan pendidikan tingkat perguruan tinggi atau universitas. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga berada dalam kisaran antara 3 hingga 4 orang. Jumlah tanggungan keluarga terbanyak 6 orang dan terendah adalah 1 orang.

Hasil Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data dari regresi berganda dengan menerapkan metode *Ordinary Least Square* (OLS) diperoleh hasil seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variabel : Alokasi Waktu Kerja					
Method : Least Squares					
Sample : 84					
Included observations : 84					
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil Uji t
C	3.732586	0.246216	1.598044	0.0000	-
Pendapatan (X ₁)	1.454980	1.281107	2.477316	0.0008	Signifikan
Usia (X ₂)	0.166654	0.004507	1.905731	0.0014	Signifikan
Pendapatan Suami (X ₃)	-0.399239	1.393107	-2.581357	0.0362	Signifikan
Pendidikan (X ₄)	0.202266	0.011449	1.996813	0.5183	Tidak Signifikan
Jumlah Tanggungan(X ₅)	0.035281	0.039508	2.893013	0.0274	Signifikan
R-squared	0.493588	Mean dependent var	3.867892		
Adjusted R- Squared	0.476443	S.D. dependent var	0.382288		
S.E. of regression	0.349447	Akaike info criterion	0.803822		
Log likelihood	9.524856	Schwarz criterion	0.977452		
Sum squared resid	-27.76053	Hannan-Quinn criter	0.873620		
F-statistic	4.266737	Durbin-Watson stat	2.215576		
Prob(F-statistic)	0.001756				

Sumber : Hasil olah data melalui Eviews 12

Dari hasil olahan pada tabel 2 didapatkan persamaan umum regresi berganda berikut:

$$Y = 3,733 + 1,455X_1 + 0,167X_2 - 0,399X_3 + 0,202X_4 + 0,035X_5$$

Penjelasan persamaan regresi ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 3,732 menunjukkan besarnya alokasi waktu kerja pada saat pendapatan responden, usia, pendapatan suami, tingkat pendidikan serta jumlah tanggungan tetap.
2. Koefisien pendapatan responden (X₁) memiliki nilai sebesar 1,455. Artinya, setiap kenaikan pendapatan responden sebesar 1 rupiah, mengakibatkan peningkatan alokasi waktu kerja responden sebesar 1,455 jam.
3. Koefisien usia responden (X₂) memiliki nilai sebesar 0,167 Ini berarti bahwa setiap peningkatan usia responden sebesar 1 tahun akan mengakibatkan kenaikan alokasi waktu kerja responden sebesar 0,167 jam.
4. Koefisien pendapatan suami (X₃) memiliki nilai -0,399. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan suami sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan penurunan alokasi waktu kerja

responden sebesar 0,399 jam.

5. Koefisien tingkat pendidikan (X_4) memiliki nilai sebesar 0,202. Ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun akan mengakibatkan kenaikan alokasi waktu kerja responden sebesar 0,202 jam.
6. Koefisien jumlah tanggungan (X_5) memiliki nilai sebesar 0,035. Dengan demikian, setiap penambahan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang akan menyebabkan peningkatan alokasi waktu kerja responden sebesar 0,035 jam.

Uji t (Uji Parsial)

1. Pendapatan Responden (X_1)

Berdasarkan hasil uji-t, variabel pendapatan responden memperlihatkan t-statistik sebesar 2,477316 serta nilai probabilitas sebesar 0,0008, lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pendapatan responden mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja.

2. Usia (X_2)

Hasil uji-t memperlihatkan bahwa variabel usia responden memiliki t-statistik sebesar 1,905731 serta nilai probabilitas sebesar 0,0014, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa usia responden memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja.

3. Pendapatan Suami (X_3)

Berdasarkan hasil uji-t, variabel pendapatan suami menunjukkan t-statistik sebesar -2,581357 serta nilai probabilitas sebesar 0,0362, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa variabel pendapatan suami mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja.

4. Tingkat Pendidikan (X_4)

Berdasarkan hasil uji-t, variabel tingkat pendidikan menunjukkan t-statistik sebesar 1,996813 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5183, yang lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap alokasi waktu kerja, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

5. Jumlah Tanggungan (X_5)

Hasil uji-t memperlihatkan bahwa variabel jumlah tanggungan mempunyai t-statistik sebesar 2,893013 serta nilai probabilitas sebesar 0,0274, yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jumlah tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja.

Uji F (Uji Simultan)

Hasil uji signifikansi F memperlihatkan bahwa nilai probabilitasnya yakni 0,001756, yang lebih kecil dari nilai taraf signifikan 0,05. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa secara bersama-sama, pendapatan responden, usia responden, pendapatan suami, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi waktu kerja.

Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,493588. Hal tersebut menjelaskan variabel pendapatan responden, usia responden, pendapatan suami, tingkat pendidikan responden serta jumlah tanggungan dapat menjelaskan 49,35% variasi dalam variabel alokasi waktu kerja. Selebihnya sebesar 50,65% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Hasil Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Responden Terhadap Alokasi Waktu Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa pendapatan responden berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi waktu kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar 2,477316

serta nilai probabilitas yakni 0,0008, kecil dari taraf signifikan 0,05. Oleh sebab itu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Implikasinya apabila pendapatan responden bertambah maka waktu yang dialokasikan dalam bekerja juga akan bertambah. Hasil penelitian ini sama dengan temuan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ade Riana & Hadi Sasana (2013) terhadap pedagang wanita di Kota Semarang yang memperlihatkan bahwa pendapatan responden mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah jam kerja.

Hasil uji statistik deskriptif memperlihatkan bahwa rata-rata jam kerja responden dalam seminggu adalah 50,27 jam. Angka ini menandakan bahwa jam kerja pedagang wanita di sektor informal melebihi rata-rata jam kerja normal yang biasanya 40 jam per minggu sesuai Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004. Penelitian ini kebanyakan responden yaitu 30,2%, termasuk dalam golongan berpendapatan tertinggi dengan kisaran pendapatan Rp. 901.000 hingga Rp. 1.950.000. Pendapatan golongan ini sejalan akan alokasi waktu kerja mereka mencapai ≥ 50 jam per minggu. Di sisi lain, responden berpendapatan rendah Rp. 281.000 hingga Rp. 500.000 hanya terdiri dari 2,3% dan mayoritas dari mereka, sebanyak 12%, bekerja kurang dari 50 jam dalam seminggu. Dari keseluruhan responden, sebanyak 50,4% mengalokasikan waktu kerjanya kurang dari 50 jam per minggu, sementara 49,6% bekerja ≥ 50 jam per minggu. Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan pendapatan dengan alokasi waktu kerja, dan juga mendukung hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan.

Tabel 3. Hubungan Pendapatan Responden dengan Alokasi Waktu Kerja

Pendapatan Responden (Rp/Minggu)	Alokasi Waktu Kerja Responden (Jam/Minggu)	
	< 50 Jam	≥ 50 Jam
281.000 – 500.000	12%	2,3%
501.000 – 700.000	16%	8%
701.000 – 900.000	12,4%	9,1%
901.000 – 1.950.000	10%	30,2%
Total	50,4%	49,6%

Sumber : Data primer diolah 2023

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang wanita yang memiliki jam kerja tinggi memiliki pekerjaan sampingan. Mereka aktif berdagang pada 2 lokasi pasar yang beraktivitas pada pagi dan sore hari. Praktik ini dilaksanakan dengan tujuan dalam memaksimalkan pendapatan yang dapat mereka peroleh untuk satu hari. Herlambang (2002) menyatakan bahwa usaha dagang cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih banyak apabila pekerjaannya bekerja dalam waktu yang lebih lama. Di samping kondisi ekonomi, terdapat juga faktor lain yang membuat pedagang wanita untuk bekerja dengan giat. Beberapa di antaranya termasuk mengisi waktu luang dengan produktif, serta keinginan untuk mempunyai pendapatan sendiri sehingga tidak tergantung sepenuhnya dengan pendapatan suami. Hasil penelitian juga sejalan dengan teori *labor leisure choice* yang dapat dijelaskan dalam bentuk kurva budget line dan alokasi waktu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan mengurangi waktu luang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dengan mengorbankan waktu luang, seseorang tersebut akan mengalokasikan lebih banyak waktu bekerja. Pendekatan ini juga sejalan dengan pernyataan Sugeng dalam Amnesi (2013) pendapatan mempunyai pengaruh terhadap jam kerja perempuan pada konteks perekonomian rumah tangga. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, mereka cenderung untuk bekerja lebih lama dalam rangka mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa rata-rata pendapatan 84 responden dalam seminggu adalah sebesar Rp. 889.446,4. Rata-rata pendapatan itu dapat dianggap cukup besar apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan pada perkotaan Indonesia, yakni Rp. 2.324.274 per rumah

tangga miskin per bulan September 2022 berdasarkan berita resmi statistik pada Januari 2023. Walaupun pendapatan rata-rata responden tergolong tinggi, mereka masih menghadapi tekanan ekonomi karena tingginya biaya hidup di perkotaan. Sebagian besar dari mereka juga harus menanggung biaya sekolah anak yang tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa responden dalam penelitian ini hidup di bawah tekanan ekonomi meskipun memiliki pendapatan yang relatif tinggi.

Faktor-faktor ekonomi dan sosial telah mendorong banyak wanita untuk bekerja, dan sektor informal, terutama usaha dagang, menjadi pilihan mereka. Usaha dagang di sektor informal menarik karena tidak memiliki peraturan khusus yang mengikat, sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan. Pasar tradisional, terutama yang berfokus pada penjualan hasil pangan, telah menjadi tujuan utama bagi banyak pedagang wanita. Konsumsi masyarakat kota tinggi pada produk pangan memberikan keuntungan untuk pedagang pada pasar tradisional. Produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi andalan banyak responden dalam memilih usaha dagang.

Pengaruh Usia Terhadap Alokasi Waktu Kerja Responden

Berdasarkan analisis data, dijelaskan bahwa usia responden mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja. Hal tersebut pada nilai t-statistik sebesar 1,905731 serta probabilitas yakni 0,0014, yang kecil daripada taraf signifikan 0,05. Dimana hal ini H2 yang menyatakan bahwa usia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja dapat diterima. Jika hasil ini diimplementasikan, artinya ketika responden mengalami pertambahan usia, produktivitas kerja mereka juga meningkat, dan ini mendorong mereka untuk menambah jumlah jam kerja mereka. Sehingga, usia adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan alokasi waktu kerja dan produktivitas pekerjaan responden.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan analisis statistik deskriptif, dimana rata-rata usia responden pada penelitian ini adalah 44 tahun. Data yang diolah memperlihatkan bahwa mayoritas pedagang wanita bekerja ada pada rentang usia 35 sampai 44 tahun dan 45 sampai 54 tahun, tergolong pada usia produktif. Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Fatikasari (2016) terhadap pedagang wanita di Yogyakarta dan Anggraeni (2021) terhadap pedagang wanita di Kota Denpasar, yang juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara usia dengan alokasi waktu kerja.

Tabel 4. Hubungan Usia Responden dengan Alokasi Waktu kerja

Usia Responden (Tahun)	Alokasi Waktu Kerja Responden (Jam/Minggu)	
	< 50 Jam	≥ 50 Jam
27 – 34	6,3%	7,14%
35 – 44	19%	24%
45 – 54	15,4%	14,3%
55 – 61	11%	3%
Total	51,5%	48,4%

Sumber : Data primer diolah 2023

Pada Tabel 4, terlihat bahwa jam kerja responden cenderung bertambah sejalan dengan kenaikan usia, namun berkurang jika mencapai usia di atas 54 tahun. Hal tersebut bisa diperhatikan dari fakta bahwa pada golongan usia 55 hingga 61 tahun, persentase responden yang bekerja kurang dari 50 jam per minggu mencapai 11%, yang lebih besar dibandingkan dengan persentase responden yang bekerja ≥ 50 jam per minggu, yang hanya sebesar 3%. Pada kelompok usia 35-44 tahun, terdapat persentase tertinggi yakni 24%, dari responden yang mengalokasikan jam kerjanya setidaknya 50 jam per minggu. Secara keseluruhan, sebanyak 51,5% responden mengalokasikan waktu kerjanya kurang dari 50 jam per minggu, sedangkan selebihnya yakni 48,4%, bekerja setidaknya 50 jam per minggu.

Penelitian ini berhasil membuktikan teori Sukarniati (2019) yang menyatakan bahwa terdapat

kaitan antara usia dengan alokasi waktu kerja. Temuan menunjukkan bahwa jam kerja cenderung bertambah sejalan dengan penambahan usia sampai mencapai usia maksimal, namun jika usia melebihi titik maksimal tersebut maka terjadi penurunan jam kerja. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kaitan antara usia dengan alokasi waktu kerja bisa memperlihatkan hubungan 2 arah yakni negatif serta positif. Akan tetapi, pada penelitian ini ditemukan bahwa usia memiliki pengaruh positif terhadap alokasi waktu kerja. Hal tersebut disebabkan dominan responden pada penelitian ini adalah wanita dengan usia produktif, yaitu berada pada kisaran usia 35-54 tahun. Para responden yang berusia di atas 55 tahun menyadari akan kondisi fisik mereka yang mungkin tidak lagi seoptimal ketika lebih muda, serta adanya kompetisi dengan pedagang lain yang lebih muda dan memiliki keahlian yang lebih baik. Meskipun demikian, kondisi ekonomi mendorong mereka agar tetap berusaha dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Pengaruh Pendapatan Suami Terhadap Alokasi Waktu Kerja Responden

Berdasarkan analisis data memperlihatkan bahwa pendapatan suami berdampak negative dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja responden. Hal tersebut terlihat dari nilai t-statistik yakni sebesar -2,581357 serta probabilitas yakni 0,0362, yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Artinya hipotesis H₃ yang menyatakan pendapatan suami berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja dapat diterima. Jika hasil ini diimplementasikan, jika suami mempunyai pendapatan yang tinggi, maka responden akan cenderung mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Sebaliknya, ketika suami memiliki pendapatan yang rendah, responden akan cenderung meningkatkan alokasi waktu kerja mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasana & Riana (2013) terhadap pedagang wanita di Kota Semarang menghasilkan temuan yang sejalan dengan hasil analisis data yakni bahwa pendapatan suami berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja responden. Berdasarkan analisis statistic deskriptif, rata-rata pendapatan suami dalam seminggu tercatat sebesar Rp. 889.107,1, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penghasilan responden dalam seminggu sebesar Rp. 889.446,4. Meskipun perbedaan tersebut signifikan, namun tidak terlalu jauh.

Tabel 5. Hubungan Pendapatan Suami dengan Alokasi Waktu Kerja

Pendapatan Suami (Rp/Minggu)	Alokasi Waktu Kerja Responden (Jam/Minggu)	
	< 50 Jam/minggu	≥ 50 Jam/minggu
250.000 – 750.000	17%	29%
751.000 – 950.000	13%	21%
951.000 – 1.750.000	9%	11%
Total	39%	61%

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa pada kelompok pendapatan suami Rp. 250.000 hingga Rp. 750.000, sebanyak 29% responden pedagang wanita mengalokasikan waktunya dalam bekerja setidaknya 50 jam per minggu. Namun, pada kelompok pendapatan suami Rp. 951.000 hingga Rp. 1.750.000, persentase ini menurun menjadi 9%, yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase responden yang bekerja kurang dari 50 jam per minggu, yaitu sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan suami meningkat, responden cenderung mengurangi waktu kerjanya. Secara keseluruhan, 39% responden mengalokasikan waktu kerjanya kurang dari 50 jam per minggu, sementara sisanya, yaitu 61%, bekerja setidaknya 50 jam per minggu.

Ditemukan bahwa sebagian besar suami dari responden pada penelitian ini termasuk dalam kelompok pendapatan rendah, mencapai 46,42%. Hal tersebut disebabkan oleh jenis pekerjaan suami

dengan memberikan penghasilan yang tidak besar, misalnya menjadi petani, buruh, tukang ojek, bengkel serta supir, yang mempunyai waktu kerja kurang menentu. Situasi ini mendorong wanita untuk berpartisipasi dalam bekerja untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Temuan ini mendukung penelitian Kusumastuti dan Purwanti (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan suami berpengaruh terhadap alokasi jam kerja wanita. Apabila pendapatan suami rendah, wanita atau istri cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja. Namun, apabila pendapatan suami tinggi, alokasi jam kerja wanita cenderung lebih rendah Berdasarkan teori Reynolds (dalam Damayanti, 2013), ada 2 penyebab yang mendasari partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Pertama, faktor ekonomi rumah tangga rendah, di mana pendapatan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong wanita untuk bekerja sebagai tambahan sumber penghasilan untuk mendukung keluarga. Kedua, ada juga motivasi tertentu yang mendorong wanita untuk bekerja, meskipun pendapatan suami sudah mencukupi. Beberapa alasan di antaranya adalah untuk mengisi waktu luang, mempunyai pendapatan sendiri, ataupun mencari kesenangan pribadi melalui pekerjaan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Alokasi Waktu Kerja

Berdasarkan analisis data, bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan responden mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap alokasi waktu kerja responden. Hal tersebut bisa diperhatikan dari nilai t-statistik sebesar 1,998613 serta probabilitasnya yakni 0,5183 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Fatikasari (2016) menyatakan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi waktu kerja terkhususnya karena kebanyakan responden berada pada sektor informal. Di sisi lain, penelitian lain seperti Anggreni et al. (2021) dan Rahayu & Darsana (2019) yang dilakukan pada pedagang wanita di Bali memperlihatkan hasil yang berbeda, dimana hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap alokasi waktu kerja responden.

Tabel 6. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Alokasi Waktu Kerja

Tingkat Pendidikan (Tahun)	Alokasi Waktu Kerja Responden (Jam/Minggu)	
	< 50 Jam ^(*)	≥ 50 Jam ^(**)
SD	8%	12%
SMP	10%	13%
SMA	20%	24%
Universitas	6%	7%
Total	44%	56%

Sumber : Data primer diolah 2023

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak pedagang wanita yang berusaha di sektor informal, terutama di pasar tradisional, memiliki tingkat pendidikan 9 hingga 12 tahun ataupun setara dengan tingkat SMP & SMA. Hal ini memperlihatkan bahwa dominan responden telah menyelesaikan pendidikan dasar minimal di Indonesia yakni wajib belajar selama 9 tahun. Disamping itu, terlihat juga bahwa beberapa responden yang memiliki pendidikan tinggi, seperti Diploma dan Universitas, ternyata bekerja pada sektor informal yang masuk dalam kategori pekerjaan rendah dalam penelitian ini. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya *mismatch* dalam pasar tenaga kerja, di mana terjadi ketidaksesuaian latar belakang pendidikan responden dan jenis pekerjaan yang mereka geluti

Pada Tabel 6, terlihat bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dimiliki oleh responden, maka persentase responden yang mengalokasikan waktunya untuk bekerja juga semakin meningkat ≥50 jam per minggu. Begitu juga sebaliknya, di mana semakin rendah tingkat pendidikan, semakin banyak responden yang bekerja dalam rentang waktu kerja tertentu. Namun, dalam penelitian ini, perbedaan tersebut hanya terlihat pada tingkat pendidikan dari SD hingga SMA. Hal ini disebabkan

oleh fakta bahwa responden dengan tingkat pendidikan lulusan universitas memiliki jumlah yang paling sedikit. Dari keseluruhan data disimpulkan bahwa sebanyak 56% responden mengalokasikan waktu kerja mereka ≥ 50 jam per minggu, sementara sisanya sebesar 44% bekerja < 50 jam per minggu.

Pada sektor informal, terkhususnya dalam pekerjaan seperti pedagang kaki lima, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan Todaro & Smith (2003), dimana sektor informal cenderung tidak membutuhkan keahlian khusus yang mengharuskan pekerja dalam memiliki pendidikan tinggi. Pekerja di sektor informal, termasuk pedagang wanita, dapat memiliki fleksibilitas dalam menentukan jam kerja mereka, dan biasanya tidak ada banyak syarat formal untuk memasuki sektor ini Anggreani (2022). Menurut Borjas (2016) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, wanita mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja, namun produktivitas kerja yang rendah dapat mengakibatkan pendapatan yang terbatas. Dalam sektor informal, kemampuan dan fleksibilitas kerja lebih berpengaruh daripada tingkat pendidikan formal, dan wanita dapat menentukan jam kerja mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Becker dalam Anggreni (2022), menyatakan bahwa dalam teori *human capital*, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini sebab pendidikan memberikan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik, pekerja bisa bekerja lebih efisien serta efektif.

Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Alokasi Waktu Kerja

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa jumlah tanggungan responden mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja. Faktanya, terbukti dari nilai t-statistik sebesar 2,893013 serta probabilitas yakni 0,0274 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Oleh sebab itu, hipotesis H₅ menyatakan bahwa jumlah tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja responden dapat diterima. Pada praktiknya, apabila anggota keluarga yang menjadi tanggungan semakin bertambah maka alokasi waktu bekerja akan bertambah juga. Hasil tersebut sama dengan penelitian sebelumnya, yakni yang dilakukan oleh Dewi & Yuliarini (2020) serta Widayawati & Pujiyono (2013), yang juga menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan berpengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi waktu kerja responden.

Tabel 7. Hubungan Jumlah Tanggungan dengan Alokasi Waktu Kerja

Jumlah Tanggungan	Alokasi Waktu Kerja Responden (Jam/Minggu)	
	< 50 Jam	≥ 50 Jam
1 – 2	8%	7%
3 – 4	29%	36%
5 – 6	6%	14%
Total	43%	57%

Sumber : Data primer diolah 2023

Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki jumlah tanggungan sebanyak 3 hingga 4 orang. Hasil pada Tabel 7 memperlihatkan bahwa responden yang memiliki jumlah tanggungan ≥ 3 orang cenderung lebih banyak mengalokasikan waktu untuk bekerja. Penting untuk dicatat bahwa jumlah tanggungan responden tidak hanya terbatas pada jumlah anak, namun juga meliputi tanggungan orang tua dan saudara. Hasil analisis menyimpulkan bahwa responden bekerja ≥ 50 jam per minggu mempunyai persentase yang lebih besar yakni 57%, berbeda dengan responden yang bekerja < 50 jam per minggu hanya sebesar 43%.

Menurut Todaro & Smith (2003), terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga dengan total pengeluaran keluarga. Apabila jumlah tanggungan yang diakomodasi bertambah maka secara proporsional total pengeluaran keluarga akan bertambah juga. Dalam penelitian

ini, pengeluaran rumah tangga responden dipengaruhi secara signifikan dari beban biaya sekolah anak-anak dalam keluarga. Faktor pendapatan suami juga yang tidak cukup dalam mencukupi seluruh keperluan keluarga juga menjadi faktor yang berpengaruh. Kondisi ini menuntut wanita untuk berperan aktif dalam memenuhi tanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, wanita memilih untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan studi lapangan, diketahui bahwa semakin banyak anak dalam keluarga, maka biaya hidup seperti sandang, pangan serta papan dan biaya pendidikan akan meningkat pula. Kondisi ini menjadi tantangan karena lapangan pekerjaan yang terbatas dan persaingan di dunia kerja yang tinggi, sehingga keluarga harus berupaya menyekolahkan anak-anaknya di tingkat pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kecukupan gizi keluarga juga menjadi hal penting, terutama dengan tingginya angka stunting di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu dari delapan provinsi dengan angka tertinggi di Indonesia sebesar 27,8% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022. Kesejahteraan keluarga sangat terkait dengan tingkat penghasilan yang diperoleh, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas hidup keluarga tersebut.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pekerja wanita terhadap alokasi waktu kerja di sektor informal perdagangan di Kota Pontianak, berikut adalah kesimpulannya:

1. Pendapatan responden memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi waktu kerja. Artinya, jika pendapatan responden meningkat, maka mereka akan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja.
2. Usia responden mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi waktu kerja. Ini berarti bahwa semakin bertambah usia responden, mereka akan cenderung meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan oleh karena itu akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja.
3. Pendapatan suami memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap alokasi waktu kerja. Artinya, jika pendapatan suami meningkat, waktu yang di alokasikan oleh responden dalam bekerja akan berkurang, dan sebaliknya, jika pendapatan suami menurun, responden akan cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja.
4. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi waktu kerja. Artinya, apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan, responden cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja. Namun, dalam sektor informal perdagangan, seperti pedagang kaki lima, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi jam kerja. Hal ini karena sektor informal umumnya tidak memerlukan keahlian khusus yang mengharuskan pekerja untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Jumlah tanggungan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi waktu kerja. Ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, wanita akan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Perlu adanya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan sosial pekerja wanita terkhususnya pada sektor informal salah satunya seperti membatasi jam kerja yang berlebihan, perempuan dalam penelitian ini bekerja diatas rata-rata jam kerja normal. Perhatian khusus

pemerintah dapat berupa memberikan layanan kesehatan gratis yang dapat dengan mudah diakses oleh pekerja wanita yang kurang mampu, serta perlu adanya jaminan perlindungan keamanan di lokasi pasar tempat wanita bekerja. Selain itu pemerintah perlu secepatnya melakukan pengesahan terhadap undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam melindungi hak pekerja wanita terkhususnya pada sektor informal.

2. Pemerintah perlu membuka program pelatihan perempuan untuk mengelola usaha yang dimiliki agar berjalan dengan produktif serta menghasilkan pendapatan yang setara dengan usaha yang dijalankan. Seperti pelatihan kewirausahaan, literasi pemasaran digital, pengelolaan keuangan usaha serta pemanfaatan maksimal kemampuan perempuan dengan mempelajari keahlian yang dapat menciptakan jenis usaha baru. Selain itu perlu adanya kemudahan dalam akses pendidikan terutama untuk keluarga yang tidak mampu. Salah satunya dengan memberikan banyak program beasiswa dengan jumlah kuota yang besar.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terkhususnya pada pasar tradisional di Kota Pontianak. Seperti perbaikan akses jalan di pasar, adanya toliet umum, serta petugas kebersihan untuk memastikan lingkungan pasar terjaga kebersihannya. Dengan membangun fasilitas yang memadai serta biaya sewa lapak yang terjangkau diharapkan dapat meringankan beban penjual.
4. Memaksimalkan program keluarga berencana untuk menurunkan rendahnya tanggungan keluarga terkhususnya bagi keluarga golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini bertujuan untuk menekan jumlah anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang gizinya tidak terpenuhi karena terkendala biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). Metodologi penelitian suatu pendekatan proposal. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Aprliyanti, Selvia. (2017). Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (studi kasus : PT. Oasis water Internasional cabang Palembang). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, 1(2), 68-72. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JSMI/article/download/413/pdf/>
- Anggreni, N. P., Purwanti, P. A., & Wenagama, I, W. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi curahan jam kerja perempuan di kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(1), 45-58. <https://doi.org/10.24843/FEB.2022v11.i01.p05>
- Amnesi, Dance. (2013). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan perempuan pada keluarga miskin di kelurahan kapal kecamatan mengwi kabupaten badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(1), 23-42. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/4401>
- Boserup, Ester. (1984). Peranan wanita dalam perkembangan ekonomi. Gadjamada University Press : Yogyakarta.
- Borjas, G.J. (2016). Labor economics. McGraw-Hill Education : New York.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Sistem Informasi Rujukan Statistik Metadata Variabel. Dikases melalui <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/34>
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2019). Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2019.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2020). Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2021). Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2019). Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kota Pontianak 2019
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2020). Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kota Pontianak 2020

- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2021). Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kota Pontianak 2021
Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. TPAK menurut kab/kota dan jenis kelamin (persen) 2019-2021, agustus 2021, [diakses pada 2 oktober 2022].
<https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/172/1/tpak-menurut-kab-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Berliana, S Maniar & Purbasari, L, Ana. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja tenaga kerja wanita berstatus kawin dalam seminggu di indonesia (analisis data sakernas 2014). *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(4). 234-242.
- Budiantari, N.N.S., & Rustariyuni, S.D. (2013). Pengaruh faktor sosial demografi terhadap curahan jam kerja pekerja perempuan pada keluarga miskin di desa pemecutan kaja kecamatan denpasar utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(11) : 539-546. .
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kota Pontianak. (2022). Rekapitulasi data pedagang di pasar tradisional kota pontianak.
- Dewi, A.A.I.R., & Yuliarmi, Ni Nyoman. (2020). Analisis curahan jam kerja pedagang perempuan di pasar seni sukawati. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(7) : 2779- 2806.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/Index>.
- Ehrenberg, R.G. & Smith, R.S. (2009). *Modern labor economics*, 11th Edition. Scott, Foresman and Company.
- Fatikasari, Kanthi. (2016). Alokasi waktu kerja ibu rumah tangga sebagai pedagang pada kawasan wisata makam bung karno. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 10(2), 248-254. <https://jimfeb.ub.ac.id>
- Gujarati, D,N. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika*. Edisi Kelima. Salemba Empat : Jakarta.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlambang. (2002). *Ekonomi mikro: sebuah kajian komprehensif*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Hosney, S.H. (2016). *Factors influencing female labor force participation in egypt and germany : a comparative study*. German Socio Economic Panel : Berlin.
- Husaini, H & Fadhlani, A. (2017). Pengaruh modal kerja, lama usaha, jam kerja dan lokasi usaha terhadap pendapatan monza di pasar simalingkar Medan. *Jurnal Visioner & Strategis*, 6(2), 111-126.
- Idris, Amiruddin. (2016). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. CV Budi Utama Deepublish: Yogyakarta.
- Jalilvand, M. (2000). *Married women, work, and calues*. Alfabeta : Bandung.
- Kusnedi. (2003). *Ekonomi sumber daya manusia dan alam*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.: Jakarta.
- Kaufman, E Bruce & Hotchkiss, Julie L. (2003). *The economics of labor markets* 6th Edition. South Western : Canada.
- Kusumastuti, N, Ayu & Purwanti, E, Yulis. (2012). Pengaruh faktor pendapatan, umur, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan suami dan jarak tempuh ke tempat kerja terhadap curahan jam kerja pedagang sayur wanita (studi kasus di pasar umum purwodadi). *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 229-241.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/404>
- Kurniawati, Sri & Salsabila. (2021). Faktor pendorong motivasi kerja wanita madura pada sektor informal di pontianak barat. *E-Jurnal Universitas Tanjungpura Prosiding Seminar Nasional STIESP2021*, 8-16. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/PROSIDING-SATIESP-2021-REV.pdf>
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Raja Grafindo Persada : Depok.

- Mankiw, N Gregory. (2018). Principles of economics pengantar ekonomi mikro edisi ke-7. Salemba Empat : Jakarta.
- Noor, M.M., Normelani, E., & Hastuti, K.P. (2016). Faktor penyebab partisipasi kerja wanita pada sektor industri kayu lapis (studi kasus PT. SSTC) kecamatan banjarmasin barat kota banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(6), 36-46.
- Oktavianti, Dian & Novita. (2022). Pengaruh alokasi waktu kerja suami dan istri terhadap pendapatan rumah tangga buruh pengasin ikan di pulau pasaran kecamatan teluk betung timur. *Journal Open Science and Technology*, 2(1), 74-85.
- Putra, Windhu. (2018). Perekonomian indonesia penerapan beberapa teori ekonomi pembangunan di indonesia. Rajawali Pers : Jakarta.

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Muz'an Sulaiman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan atau desentralisasi ekonomi kepada Pemerintah Daerah. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi kuantitatif. Analisis regresi kuantitatif ini merupakan analisis keterangan menggunakan data berupa angka mengenai permasalahan yang terdapat pada kasus yang sedang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel (pooled data), yaitu kombinasi antara data time series selama 5 tahun dan data cross section 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Diuji secara simultan uji F Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial uji t Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum (1.289751) lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah (0.337599) yang semakin menguatkan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016- 2020, karena respon belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih besar bersumber dari transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah sendiri.

JEL: F61, G21

Kata Kunci: PAD, DAU, *Flypaper Paper*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan atau desentralisasi ekonomi kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini merupakan wujud dari desentralisasi. Dalam prakteknya, pemerintah pusat tidak lepas tangan secara keseluruhan dan tetap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Otonomi Daerah, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan desentralisasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al., 2002).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan seperti dana perimbangan tersebut,

pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Dalam hal pengelolaan pada pembangunan dan keuangan, daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bidang keuangan dan pengelolaan anggaran di bagian penerimaan dan pengeluaran. Pada setiap daerah diwajibkan dalam membuat suatu rancangan keuangan daerah yang biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ialah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Pembangunan daerah merupakan bagian daripada pembangunan nasional yang didasari oleh otonomi daerah. Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemandirian pada daerah, dan memberikan daerah hak untuk memerintah sendiri dirinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dalam membiayai operasi utamanya sehari-hari bergantung pada dana transfer pemerintah, yang dapat menimbulkan fenomena FlypaperEffect.

Perkembangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rata-rata PAD paling tinggi yaitu berada pada Kabupaten Ketapang dengan rata-rata 2.059.551.816 (Rupiah). Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang menjadi nilai rata-rata PAD yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, kabupaten Ketapang juga mengalami peningkatan nilai PAD dan cukup konsisten disetiap tahunnya. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata PAD paling rendah yaitu berada pada kabupaten Kayong Utara dengan rata-rata PAD sebesar 732.910.974 (Rupiah). Meskipun kabupaten Kayong Utara memiliki nilai rata-rata PAD yang paling rendah setiap tahunnya, namun mengalami peningkatan PAD yang cukup konsisten.

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Dapat dilihat pada kabupaten Ketapang yang memiliki nilai transfer dana dari pusat yang paling tinggi pada setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 dengan nilai transfer dana yang dimiliki sebesar 1.165.047.376 (Rupiah), pada tahun 2019 kabupaten Ketapang juga memiliki nilai DAU sebesar 1.148.116.453 (Rupiah) dimana angka tersebut melewati kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi yang mendapatkan transfer dana sebesar 726.769.846 (Rupiah) pada tahun 2019.

Tidak hanya itu, permasalahan yang ada pada belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari beberapa faktor seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi pada setiap tahunnya, maka hal tersebut akan meningkatkan belanja daerah. Terlebih jika pada setiap tahunnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan alokasi dana atau anggaran kepada masing-masing daerah yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Dengan alokasi yang cukup di setiap tahun maka hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah yang ada di Kabupaten/Kota untuk lebih banyak menggunakan dana tersebut untuk digunakan pada belanja daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat adanya kecenderungan yang cukup konsumtif bagi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Situasi yang ada pada pernyataan tersebut juga akan menimbulkan fenomena flypaper effect, yaitu suatu kondisi dimana respon Dana Alokasi Umum lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan respon Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yaitu angka menunjukkan 4.320.618.793 (Rupiah) menjadi 5.259.793.611 (Rupiah). Belanja Daerah tidak hanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur tertentu saja, tetapi untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik.

2. KAJIAN LITERATUR

Otonomi Daerah

Di Indonesia, penerapan otonomi daerah menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang–Undang No.32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang–Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30).

Transfer Pemerintah

Rosen (2014), membagi jenis transfer menjadi dua macam yaitu unconditional grant dan conditional grant. Unconditional grant merupakan transfer tak bersyarat yaitu transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah tanpa syarat tertentu, dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk investasi pada badan usaha. Sedangkan conditional grant adalah transfer bersyarat/khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan khusus, misalnya untuk biaya operasional sekolah.

Pendapatan Asli Daerah

Henri Edison (2009) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama satu tahun anggaran dan tidak perlu lagi dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam Pemandagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang–undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah Yuwonnodkk, (2005:108). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang–undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Saputri, 2014).

Flypaper Effect

Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich dan Rubinfield (1979) untuk mengartikulasi pemikiran Artur Okun (1930) yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada pernyataan “*Flypaper Effect*” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. *Flypaper effect* merupakan hal yang utama dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu mendefinisikan *flypaper effect* adalah suatu kondisi dimana pada saat pemerintah daerah merespon atau belanja lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau dana perimbangan dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri (Maimunah 2006 dan Ida Mentayani 2012).

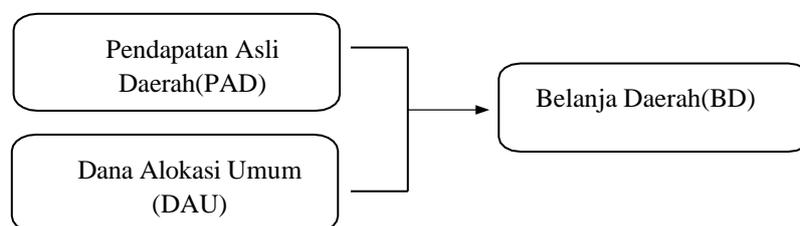
Kajian Empiris

Ekawarna (2017) melakukan penelitian di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan regresi data panel menggunakan metode PLS, FEM, REM, untuk pengujian hipotesis digunakan 2 pengujian yaitu uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga tidak terjadi *flypaper effect* pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi.

Subadriyah (2018) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwasemakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah akan semakin meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang di peroleh maka Belanja Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Maka dari itu telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020. GambarBerikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Apabila DAU lebih berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan PAD maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper Effect*.

3. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi kuantitatif. Dimana analisis regresi kuantitatif ini merupakan analisis keterangan menggunakan data berupa angka mengenai permasalahan yang

terdapat pada kasus yang sedang diteliti dan kemudian membuktikan adanya pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel (pooled data), yaitu kombinasi antara data time series selama 5 tahun dan data cross section 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dan Website resmi Kemenkeu RI.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda yang menggunakan program E-VIEWS 10. Adapun bentuk persamaan model regresi berganda sebagaiberikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Dimana :

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Alokasi Umum
- i = Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat
- t = Menunjukkan periode waktu ke-t
- e = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya nilai konstanta persamaan regresi linier berganda dengan model fixed effect weight adalah sebesar -57426067, kemudian nilai koefisien pendapatan asli daerah 0,337599, dan dana alokasi umum sebesar 1,28975.

Tabel 1. Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57426067	2.78E+08	-0.206266	0.8374
PAD?	0.337599	0.050448	6.691969	0.0000
DAU?	1.289751	0.388386	3.320799	0.0016

Sumber : Hasil Olahan E-Views 10

Selain itu dilihat dari intercept pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan nilai positif dan negatif pada setiap kabupaten/kotanya, yang mana nilai intercept tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai *Intercept* Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Nilai Intercept
Sambas	49007951
Bengkayang	-22762046
Landak	85401014
Mempawah	-27544326
Sanggau	24668138
Ketapang	2650535
Sintang	1.4600008
Kapuas Hulu	-70556761
Sekadau	-24463824
Melawi	-54831626
Kayong Utara	-2.3800008
Kubu Raya	4695671
Pontianak	1.66000008
Singkawang	-40324790

Sumber : Hasil Olahan E-Views 10

Nilai intercept ini memiliki arti yaitu apabila di kabupaten/kota tersebut tidak terdapat variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka belanja daerah akan tetap ada dan akan meningkat sebesar nilai intercept-nya. Sedangkan pada 7 kabupaten/kota yang memiliki nilai intercept negatif artinya apabila kabupaten/kota tersebut tidak terdapat variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan mengalami penurunan sebesar nilai intercept-nya. Terdapat hasil analisis regresi linier berganda, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

$$BD_{it} = -57426067 + 0,3375 PAD_{it} + 1,2897 DAU_{it} + e_{it}$$

Dari rumus analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa :

a. Konstanta (β_0)

Berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar -57426067. Nilai tersebut memiliki arti apabila Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) tidak mengalami perubahan maka Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebesar -57426067 Rupiah.

b. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.337599 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah naik 1 Rupiah, maka Belanja Daerah akan bertambah/naik sebesar 0,3375 Rupiah dengan asumsi Dana Alokasi Umum (X2) konstan.

c. Dana Alokasi Umum (X2)

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 1,2897 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum naik 1 Rupiah, Maka Belanja Daerah akan bertambah/naik sebesar 1,2897 Rupiah dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X1) konstan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini signifikan atau tidaknya. Dalam pengujian ini terdapat tiga uji yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu Koefisien Determinasi (R²), Uji F, dan Uji T. Pada pemilihan model yang telah dilakukan, maka model *Fixed Effect Model* yang terpilih menjadi model terbaik.

Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Koefisien Determinansi (R^2) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen.

Table 3. Hasil Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Indikator	Nilai Koefisien
R-squared	0.991288

Sumber : Hasil Olahan E-Views 10

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai koefisien determinansi (R^2) sebesar 0.991288 hal ini menunjukkan bahwa persentase perubahan belanja daerah mampu dijelaskan oleh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebesar 99,12% sedangkan sisanya 0,8 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Silmultan (Uji F-Statistik)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji F

Indikator	Nilai Koefisien
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Olahan E-Views 10

Pada tabel 4 dimana nilai probabilitas yaitu 0,000000 kurang dari 0,05 artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Uji Signifikan Parsial (Uji t-Statistik)

Dalam uji t statistic uji ini digunakan untuk menguji dan mengetahui hasil dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara mandiri (parsial), dengan taraf signifikan 0,05. Dibawah ini ditampilkan hasil uji t statistic dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Barat:

Tabel 5. Hasil Uji t Statistic

Variabel	t-Statistic	Prob.	Taraf Signifikan	Keterangan	Arah Hubungan
PAD	6.691969	0.0000	0,05	Signifikan	Positif (+)
DAU	3.320799	0.0016	0,05	Signifikan	Positif (+)

Sumber : Hasil Olahan E-Views 10

Berdasarkan hasil estimasi diatas maka didapat dan dijabarkan hasilnya sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan 0,05. Artinya variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan variabel dana alokasi umum memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0016 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Artinya variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi suatu daerah seperti, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang mempunyai tujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dalam perwujudan dari desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menghasilkan pendapatannya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Pengeluaran daerah harus seimbang dengan pengeluaran daerah. Sumber dalam pengeluaran daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah menentukan jumlah dana yang tersedia bagi pemerintah daerah. Jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar juga anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja daerah. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membiayai programkegiatan pembangunan yang diperlukan.

Dari pembahasan diatas semakin menguatkan dugaan bahwa ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum tidak terlalu besar karena dibandingkan dengan variabel lain yang mempengaruhi belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maimunnah (2006), Ida,dkk (2012), Nabila,dkk(2010), Rusmita (2016), Ekawarna (2017), Subdriyah (2018), dan Ardanaswari,dkk (2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Apabila PAD semakin besar, maka pemerintah daerah bisa memperoleh banyak dana untuk memenuhi pengeluaran daerah tanpa mengandalkan pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai tujuan untuk pemerataan ekonomi dengan cara memperhatikan potensi daerah, jumlah penduduk, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan. Dana Alokasi Umum memberikan sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah. Dana ini berasal dari pendapatan nasional yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan kemudian dialokasikan kembali kepada daerah-daerah. Dengan Dana Alokasi Umum ini, pemerintah daerah memiliki tambahan anggaran yang dapat digunakan untuk belanja daerah, termasuk untuk membiayai program-program pembangunan yang dianggap penting.

Dana Alokasi Umum disetiap daerah ditentukan dengan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan suatu selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi fiskal (*fiscal capacity*), jika daerah mempunyai potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil, namun jika daerah mempunyai potensi fiskalnya besar, dan kebutuhan fiskalnya juga besar maka akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai t-statistik Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh sebesar 3.320799 dan menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini karena nilai

probabilitas uji t-statistik yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu $0,0016 < 0,05$ dengan demikian hipotesis yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dapat diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran Dana Alokasi Umum yang diterima tidak banyak dari sisi penerimaan, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pembahasan sebelumnya jauh lebih tinggi dari pada Dana Alokasi Umum. Berdasarkan pada nilai t-statistik yang bernilai positif artinya dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum akan meningkatkan belanja daerah. Hal ini berarti membuktikan bahwa semakin besar dana alokasi maka belanja daerah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat semakin tinggi. Akan tetapi, pada penelitian ini Dana Alokasi Umum tidak signifikan artinya dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum tidak menjadi faktor yang dominan dalam penggunaan anggaran belanja daerah guna membiayai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan oleh nilai t-statistik Dana Alokasi Umum lebih kecil dibandingkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah yang mana dapat disimpulkan dalam situasi ini tiap daerah dikatakan telah mampu membiayai kebutuhan belanjanya tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maimunnah (2006), Mentayani (2012), Rusmita (2016), Ekawarna (2017), dan Subdaryah (2018), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila et al., (2016) yang menyatakan bahwa hasil Dana Alokasi Umum secara parsial tidak ada berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah daerah di Pulau Jawa dari tahun 2013-2017. Apabila daerah tersebut mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi, maka akan menyebabkan peningkatan Dana Alokasi Umum. Sehingga bisa mengurangi pengeluaran daerah.

***Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat**

Asumsi terjadinya *Flypaper Effect* adalah (1) apabila nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada koefisien PAD terhadap belanja daerah dan keduanya signifikan, atau (2) PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper Effect* (Wulansari, 2015).

Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan PAD dan DAU bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien PAD (0,337599) lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien DAU (1,289751). Hasil ini menunjukkan bahwa fenomena *Flypaper Effect* terjadi pada belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, karena koefisien dari PAD lebih kecil dari DAU dan keduanya signifikan. Jika terjadi fenomena *Flypaper Effect* di dalam keuangan daerah maka membuktikan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Barat masih kurang memiliki hasrat untuk membiayai belanja daerahnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat sangat tinggi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Dana Alokasi Umum masih menjadi sumber terbesar untuk membiayai sebagian besar belanja daerah, dikarenakan dapat dilihat dari jumlah DAU yang masih jauh lebih besar daripada PAD.

Berdasarkan istilah dari *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfield (1979) dalam Hines & Thaler (1995) untuk mengartikan pemikiran “*money sticks where it hits*”. *Flypaper Effect* sebagai fenomena utama dalam penelitian ini merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer (*Unconditional grants*) yang disebut dengan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan kemampuan sendiri yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena *Flypaper*

Effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Pemerintah daerah harusnya bisa melakukan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sedangkan ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dilakukan agar terjadi peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah tidak terus menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum agar terciptanya kemandirian dari daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kriteria dari Wulansari (2015) yang menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016-2020 terjadi fenomena *Flypaper Effect* di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maimunnah (2016) dan Subadriyah (2018) yang dimana terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Pulau Sumatradan di Provinsi Jawa Tengah lebih mengandalkan Dana Alokasi Umum dalam hal Belanja Daerah. Hasil koefisien Dana Alokasi Umum juga lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Pulau Sumatra dan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini tidak sejalan dengan Mentayani (2012) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah tetapi tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Secara silmultan uji f Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Secara parsial uji t Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum (1.289751) lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah (0.337599) yang semakin menguatkan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016- 2020, karena respon belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih besar bersumber dari transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebaiknya merencanakan anggaran belanja daerahnya pada periode yang akan datang untuk lebih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dan semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun Pendapatan Asli Daerah harus dapat digunakan dengan tepat sasaran untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus mengali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah naik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik

Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.

3. Mendukung semua program pemerintah daerah mengenai otonomi guna mengubah perilaku pemerintah daerah agar bersifat lebih profesional dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansori, W., & Muthmainah, M. (2018). *Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 151-163.
- Azwardi. (2007). *The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance In Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Volume XXI, hal. 23-54.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2020*. Kalimantan Barat. Diakses 03 November 2022.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2020*. Kalimantan Barat. Diakses 03 November 2022.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Publik*. Jakarta.
- Courant, P., Gramlich, E., & Rubinfeld, D. (1979). *The Stimulative Effects of Intergovernmental Grant or Why Money Sticker Where Its Hits*.
- Edison, Henri. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*, Medan.
- Ekawarna, Shinta Unjaswati. (2017). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167-184.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Ponorogo.
- Khoiri, Hasan Al (2015). *Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat (2008-2012)*.
- Kuncoro, H. (2004). *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.9.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, Padang.
- Melo, L. (2002). *The Flypaper Effect Under Different Institutional Context : The Columbian Case*, Publics Choice.
- Mentayani, Ida. Dkk. (2012). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Dan Kabupaten di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta. Halaman 30.
- Rahmawati, L, A., & Suryono, B. (2015). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(2), 1-20.
- Rosen, H. S. (2014). *Public Finance, Tenth Edition, Global Edition*. The McGraw-Hill Series in Economics
- Rusmita, S. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(3), 237-257.
- Sabadriyah, S, H. (2018). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*.

- Salawati, dkk (2016). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah. Volume 18 Nomor 2. Halaman 20-37.
- Saputri, M. A., & Muid D. (2014). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012*. Diponegoro Jurnal Of Accounting, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-11, IISN (online) : 2337-3806.
- Sidik et al. (2002). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Subadriyah, Sholikul Hidayat. (2018). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal EkonomiPembangunan, 135 – 235.
- Undang–Undang Republik Indonesia. (2004). *Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 , *tentang Perimbangan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, *tentang Klasifikasi Belanja Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prakorsa, K. B. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Daerah JawaTengah dan DIY*. JAA1 VOL.8.
- Wahyuni, S. E., & Suphenj, L. (2017) *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016*. Akuntansi Dewantara, 1(2), 188-200.
- Yani, Ahmad (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yuwono, Sony, Dkk (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya : Bayu mediaPublising.

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KAWASAN PESISIR
DENGAN PEMANFAATAN TANAMAN CAMPUR PADI – KELAPA (PALAPA)**

Pramushinta Arum Pynanjung¹, Dwi Septiyarini²

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

ABSTRACT

The productivity and income of rice farmers in tidal areas generally tends to be low. One way to increase farmers' income is the use of mixed rice-coconut crops (Palapa). The aim of this research is to analyze the income level of a farmer who applies the rice and coconut integration (palapa) pattern in order to improve the welfare of rice farmers. The location of this research is Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The data used in this research is primary data with in-depth interview data collection techniques. The analysis method uses simple qualitative and quantitative descriptive analysis. The research results show that the income of rice farmers if calculated without mixed crops is IDR. 1,680,067,- / month. Meanwhile, farmers' income when using mixed rice-coconut crops (Palapa) is IDR. 2,700,900,- / month. This shows that there is an increase in farmer income when utilizing rice-coconut (Palapa) plants.

JEL: J28, O18

Keywords: Mixed Crops, Rice-Coconut, Palapa, Farmer income

1. PENDAHULUAN

Pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan yang terjadi karena proses alami dan perubahan karena campur tangan manusia. Kegiatan-kegiatan di kawasan pesisir seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya (tambak), pelabuhan, pariwisata, permukiman dan suaka alam dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan geomorfologi kawasan pesisir. Konversi lahan dan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir menjadi salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan pada kawasan pesisir yang mempengaruhi penyimpangan tata guna lahan di kawasan tersebut (Apena et al., 2021).

Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi dengan luas 147.307 km², yang terdiri dari 14 kabupaten/kota. Adapun beberapa daerah yang tergolong ke dalam daerah pesisir di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan hasil penelitian Modes & Hidayah (2021) bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Barat sebesar 23,15%. Hal ini tidak dipungkiri membuat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor unggulan Kalimantan Barat. Jika kita melihat potensi yang lebih dalam, setiap kabupaten yang berada di daerah pesisir tentu memiliki potensi yang berbeda. Seperti halnya Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Kalimantan Barat untuk daerah pesisir dengan masing-masing jumlah produktivitas sebesar 117.921 ton dan 53.946,93 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2022). Namun jika kita melihat dari segi akses lokasi produsen ke lokasi pemasaran maka Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten yang berpotensi dalam hal pemasaran hasil pertaniannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya, 2016 menyatakan bahwa Kecamatan Sungai Kakap merupakan salah satu kawasan pesisir yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan (LP2B) meliputi kawasan *food estate*. Peraturan ini tentunya juga memperhatikan potensi-potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sehingga sebagian besar penduduk yang berdomisili pada area Kecamatan Sungai Kakap memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk membuka lahan pertanian. Hal ini juga terlihat dari hasil produksi tanaman pangan Kecamatan Sungai Kakap dimana padi sawah paling mendominasi dengan jumlah produksi sebesar 70.490 ton dan luas panen sebesar 16.846 Ha (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021).

Namun sayangnya, menurut Puspitasari (2022), rata-rata pendapatan petani padi sawah sekitar \pm Rp. 7.696.442,- / MT/ Ha. Artinya seorang petani padi mampu meraup keuntungan sebesar Rp. 1.282.740,- / bulan / Ha. Jika nominal keuntungan ini dibandingkan dengan UMP Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar Rp. 2.608.601,- tentulah tidak sebanding. Wajar saja jika anak-anak muda zaman sekarang kurang tertarik untuk menggeluti dunia pertanian khususnya petani padi. Padahal, beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dimana permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian padi, diperlukan sistem usaha tani yang berkelanjutan. Salah satunya dengan mengintegrasikan tanaman padi dengan tanaman lain seperti kelapa agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan seorang petani yang menerapkan pola integrasi padi dan kelapa (palapa) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani padi.

2. KAJIAN LITERATUR

Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pertanian bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi para petani, namun juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian tidak membutuhkan pendidikan secara khusus seperti halnya pada sektor-sektor yang lain seperti sektor industri. Sektor pertanian biasanya dipengaruhi oleh kondisi alam, seperti musim, curah hujan, hama / penyakit dan lain sebagainya yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah produktivitas. Sehingga sistem pertanian di Indonesia masih memerlukan upaya perbaikan dan revitalisasi agar terjadi percepatan atau akselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha pertanian (Damanik, 2014).

Pada mulanya, sistem pertanian yang dianut menggunakan input luar yang tinggi, dan dikenal dengan istilah *High External Input Agriculture* (HEIA). Sistem yang dianut pada HEIA mampu memberikan keuntungan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang sistem ini dapat mempengaruhi produktivitas lahan menjadi stagnan bahkan merusak lingkungan. Sistem tani HEIA ini kemudian digantikan dengan sistem pertanian *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA) dimana mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan mengombinasikan berbagai macam komponen usaha tani. Tujuan LEISA untuk mencapai tingkat produksi yang stabil dalam jangka panjang dengan menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan input dari dalam (Mahatmayana, 2021). Sistem LEISA ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan agro-industri. Sistem LEISA sendiri diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan petani. Selain sistem pertanian HEIA dan LEISA ada sistem pertanian tumpang sari. Sistem tumpang sari ini berusaha untuk memanfaatkan lahan yang ada sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Gonggo et al. (2003) bahwa sistem tumpangsari dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan, memperkecil risiko kegagalan hasil dan dapat menambah pendapatan petani. Seperti halnya Warsono et al. (2002) juga menyatakan bahwa tumpangsari merupakan salah satu bentuk program intensifikasi pertanian alternatif yang tepat untuk melipat gandakan hasil pertanian pada

daerah-daerah yang kurang produktif. Namun pola tumpang sari ini merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatu sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman (Setiawan, 2009). Berbeda halnya dengan dua atau lebih jenis tanaman yang ditanam tanpa pengaturan serempak, dengan jarak tanam dan barisan yang teratur, lebih sering disebut dengan tanam campur.

Pendapatan

Menurut Sukirno (1994) pendapatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi adalah pendapatan perusahaan perorangan, pendapatan netto, pendapatan dari sewa, gaji dan upah para pekerja serta deviden. Pendapatan ini juga meliputi pembayaran pindahan kecuali subsidi kepada perusahaan dan para petani.

2. *Disposable Income*

Berbeda dari pendapatan pribadi, *disposable income* adalah pendapatan pribadi yang dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan. Dengan kata lain pendapatan ini merupakan pendapatan yang boleh digunakan oleh para penerima untuk membeli barang dan jasa yang mereka inginkan.

Sedangkan menurut Boediono (2000) pendapatan merupakan penerimaan dari hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan hasil penjualan faktor produksi yang dimiliki perusahaan.

Tenaga Kerja

Penduduk yang telah berada di usia kerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja ialah semua orang yang bersedia untuk bekerja. Tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tenaga kerja merupakan penggerak serta faktor input yang lain, tanpa adanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Oleh karena itu dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja maka dapat mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan juga akan meningkat (Sumarsono, 2013).

Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Menurut Hidayat & Halim (2013) biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan fungsi atau kegiatan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang kemudian mempunyai nilai jual. Secara umum, biaya produksi memiliki elemen-elemen seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Meningkatnya biaya produksi berarti bertambahnya jumlah barang/jasa yang diproduksi sehingga meningkatkan pendapatan secara langsung, akan tetapi peningkatan biaya produksi tanpa disertai peningkatan permintaan akan barang/jasa yang diproduksi dan tanpa disesuaikan dengan permintaan maka akan mempengaruhi modal.

Laba

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan melalui transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba merupakan kenaikan modal atau secara umum merupakan selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya produksi dalam jangka waktu tertentu. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003).

Penelitian Terdahulu

Bakari (2019) melalui penelitiannya memperlihatkan bahwa dengan luas lahan 0,64 Ha maka pendapatan rata-rata petani padi sawah yang dapat dihasilkan sebesar ± Rp. 3.936.641,- di Kecamatan Tilongkabila. Sedangkan Ma'ruf et al. (2019) juga melakukan penelitian terkait usaha tani padi sawah dimana di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, setiap petani memiliki pendapatan sebesar ± Rp. 13.624.627/ musim tanam/ Ha. Selanjutnya Listiani et al. (2019) juga melakukan analisis pendapatan dari usaha tani padi sawah di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dimana rata-rata pendapatan per bulan petani sebesar Rp. 1.487.404 /0,5 Ha.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian terkait dengan analisis pendapatan kelapa hibrida, dimana luas lahan, jumlah tanaman, pupuk dan tenaga kerja sangat berpengaruh dalam usaha tani kelapa hibrida (Safitri, 2020). Penelitian Att (2022) juga memperlihatkan usaha tani kelapa hibrida mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.478.876 / tahun / Ha. Sedangkan hasil penelitian Maheda (2015) menunjukkan bahwa pola tanam tumopangsari antara kelapa dan padi mampu meningkatkan pendapatan petani paling besar jika dibandingkan dengan pola tumpang sari kelapa – jagung, kelapa-pisang serta kelapa saja.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan tanaman campur padi – kelapa untuk meningkatkan kesejahteraan petani Kawasan pesisir. Adapun lokasi penelitian berada di daerah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Adapun metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Perhitungan pendapatan sederhana dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$TC = TFC + TVC \dots\dots\dots(1)$$

$$TR = P \times Q \dots\dots\dots(2)$$

$$\Pi = TR - TC \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

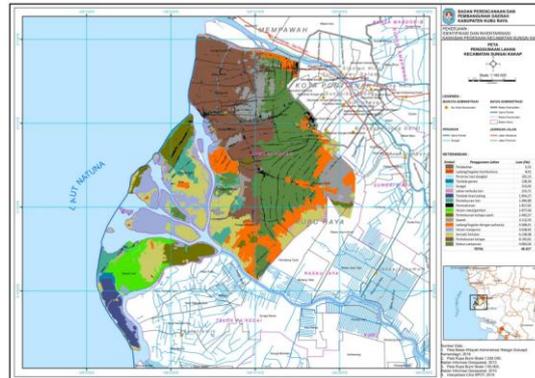
- TC : Biaya Total
- TFC : Biaya tetap total
- TVC : Total Biaya Variabel
- TR : Total Revenue
- P : Harga output per unit
- Q : Jumlah Output

Responden sampel ditentukan dengan cara purposive sampling dimana sampel yang ditentukan dengan tujuan tertentu. Penarikan responden dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Responden merupakan salah satu petani yang menerapkan pemanfaatan tanaman campur padi – kelapa lebih dari ± 15 tahun. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi upah minimum, lama bekerja, luas lahan dan biaya usaha tani. Setelah data-data terkumpul selanjutnya kemudian dianalisis berdasarkan perhitungan sederhana untuk melihat kemampuan usaha tani padi-kelapa.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daerah Kecamatan Sungai Kakap sendiri merupakan daerah pesisir dengan potensi budidaya tanaman kelapa yang cukup besar. Sehingga tidak heran jika sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Sungai Kakap diselingi tanaman kelapa yang cukup banyak. Hal ini juga terlihat dari hasil identifikasi dan inventarisasi Kawasan Pedesaan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Kubu Raya (2021), Kecamatan Sungai Kakap memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan tahunan rata-rata 3.196 mm dan merata hampir di seluruh wilayah. Data menunjukkan bahwa di Kecamatan Sungai Kakap mampu memproduksi tanaman pangan seperti beras mencapai ± 70.490 ton. Sedangkan untuk subsektor perkebunan, terdapat 5 komoditi dengan jumlah produksi yang besar seperti kelapa dalam, kelapa hybrida, pinang, kopi dan kakao. Analisis Bappeda Kabupaten Kubu Raya (2021) juga menunjukkan bahwa 20% ($\pm 11.672,82$ Ha) luas lahan di Kecamatan Sungai Kakap merupakan kebun campuran. Area yang merupakan kebun campuran dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Sungai Kakap
 Sumber : Bappeda , 2021

Area dengan warna Hijau tua merupakan area yang ditanami kebun campuran di Kecamatan Sungai Kakap. Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada salah satu petani yang telah melakukan pemanfaatan lahan dengan pola kebun campuran dan telah melakukan pola tersebut ± 15 tahun. Adapun responden merupakan ketua dari Kelompok Tani Cahaya Rezeki yang berlokasi di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun hasil wawancara kemudian dilakukan analisis usaha tani untuk melihat tingkat pendapatan dari usaha taninya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Biaya Pengeluaran Variabel Usaha Tani Padi-Kelapa (Palapa)

NO.	URAIAN	Qty	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp / Tahun)
1	Pengolahan Lahan	1	Ha	1.200.000	1.200.000
2	Bibit Padi	60	kg	8.000	480.000
3	Upah Tanam	2	OK	1.200.000	2.400.000
4	Pupuk Ponska	12	Karung	130.000	1.560.000
5	Pestisida	2	dirigen	2.000.000	4.000.000
6	Upah Penyiangan	2	OK	600.000	1.200.000
7	Upah Pemanenan	2	OK	3.600.000	7.200.000
8	Upah Perontokan	2	OK	900.000	1.800.000
9	Biaya Lain-Lain	2		1.000.000	2.000.000
Jumlah Biaya Variabel					21.840.000

Sumber : Olahan Data, 2023

Biaya variabel ini merupakan biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun berjalan dengan luas area pertanian yang dikelola ± 1 Ha dan responden melakukan 2 kali musim tanam. Lahan yang digunakan untuk pertanian ini merupakan lahan pasang surut dengan jenis varietass padi Inpari 32. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis didapat jumlah pengeluaran variabel untuk usaha tani palapa mencapai Rp. 21.840.000,-. Biaya variabel yang dikeluarkan tergolong sangat besar, hal ini dikarenakan dalam

perhitungan pada penelitian ini juga mempertimbangkan tenaga upah dalam setiap proses usaha tani padi sawah, walaupun pada realitanya hampir sebagian besar petani di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya melakukan sendiri setiap tahapnya untuk mengurangi biaya upah tersebut. Sedangkan untuk biaya tetap dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Biaya Tetap Usaha Tani Padi-Kelapa (Palapa)

NO.	URAIAN	Qty	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp / Tahun)
1	Bibit Kelapa Hibrida	100	Bibit	25.000	2.500.000
2	Sewa Lahan	1	Ha	3.000.000	3.000.000
Jumlah Biaya Tetap					5.500.000

Sumber : Olahan Data, 2023

Biaya tetap pada penelitian ini merupakan biaya yang jarang berubah dan tetap digunakan pada usaha tani palapa. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha tani palapa sebesar ± Rp. 5.500.000,- . Sehingga dengan menggunakan persamaan (1) didapat biaya total dalam usaha tani palapa sebesar ± Rp. 27.340.000,-. Sedangkan penerimaan dalam usaha tani Palapa dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penerimaan Usaha Tani Padi- Kelapa (Palapa)

NO.	URAIAN	Qty	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp / Tahun)
1	Hasil Panen Padi	7.526	kg	4.300	31.200.800
2	Hasil Panen Kelapa Muda	4.500	Buah	2.000	9.000.000
3	Hasil Panen Kelapa Tua (Kopra)	1.500	Buah	2.500	3.750.000
Jumlah Biaya Tetap					43.950.800

Sumber : Olahan Data, 2023

Jika kita menghitung usaha tani padi saja tanpa kelapa hybrida dan tidak memerlukan tenaga upah, maka rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh petani yaitu sebesar ± Rp. 1.680.067,- / bulan. Pendapatan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Ekawati et al. (2023) dimana rata-rata pendapatan petani di Kecamatan Sungai Kakap ± Rp. 1.412 058,- sampai dengan ± Rp. 1.930.444,-. Penerimaan usaha tani palapa pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil kedua usaha tani baik sub sektor pertanian (padi sawah) dan sub sektor perkebunan (kelapa hybrida). Masing-masing penerimaan sub sektor dihitung menggunakan persamaan (2), kemudian masing-masing sub sektor dijumlahkan dan didapat total penerimaan sebesar ± Rp. 43.950.800,- . Sedangkan tingkat pendapatan bersih atau laba petani dihitung melalui persamaan (3) dimana total laba yang didapat dari usaha tani palapa sebesar ± 16.610.800,-. Sehingga petani mampu mendapatkan ± 1.384.233 / bulan. Namun jika petani melakukan pekerjaan upah sendiri maka total laba yang dihasilkan usaha tani palapa sebesar ± Rp. 32. 410.800,- . Artinya Petani mampu mendapatkan pendapatan sebesar ± Rp. 2.700.900 / bulan. Jika kita sandingkan kembali dengan UMP Provinsi Kalimantan Barat, maka upah yang didapat oleh petani palapa ini sudah menyesuaikan standar UMP Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Maheda (2015) dimana dengan usaha tani sistem tumpang sari dapat meningkatkan pendapatan petani dari Rp. 1.680.067,- menjadi Rp. 2.700.800,- .

Hal lain yang perlu dicermati bahwa lokasi yang dijadikan area pertanian ini merupakan lahan pasang surut, dimana lahan pasang surut memerlukan beberapa kendala jika ingin dijadikan lahan budidaya produktif. Lahan pasang surut memiliki sifat keasaman tanah yang tinggi (pH rendah) sehingga butuh upaya yang lebih ekstra dalam menetralsisir kemasaman tanah. Selain itu lahan pasang

surut seringkali mengalami genangan air yang sulit diprediksi sehingga dapat menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen. Kemudian seringkali lahan juga terpengaruh air laut, dan lapisan parit sedikit dangkal sehingga dapat meracuni sistem perakaran tanaman. Kondisi lahan yang miskin unsur hara juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian pupuk, karena diperlukan pupuk yang lebih banyak untuk memperkaya unsur hara pada lahan pasang surut.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan dengan melakukan usaha tani sistem tanam campur antara padi dan kelapa hibrida, seorang petani mampu meningkatkan tingkat pendapatan mereka dari Rp. 1.680.067 / bulan menjadi Rp. 2.700.900 / bulan. Hal ini membuktikan bahwa usaha tani dengan sistem tanam campur mampu meningkatkan kesejahteraan petani padi dengan lahan terbatas. Adapun saran yang dapat diberikan bahwa selain dengan menggunakan tanam campur dalam pengelolaan lahan terbatas dibutuhkan penanganan ekstra dalam pengelolaan lahan pasang surut seperti pemberian pupuk dalam jumlah yang besar untuk memperkaya unsur hara tanah. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan bantuan dari pihak pemerintah maupun swasta dalam hal pembiayaannya. Salah satunya dengan pendanaan CSR dari pihak swasta dan pemberian pupuk bersubsidi dari OPD terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Apena, O., Rondonuwu, D. M., & Poluan, R. J. (2021). Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Di Kecamatan Mandolang. *Spasial*, 8(1), 117–125. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/33553>
- Att, M. (2022). *Analisis Usaha Tani dan Pemasaran Kelapa Hibrida (Cocos Nucifera L.) di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/18705/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. (2021). *Identifikasi Dan Inventarisasi Kawasan Pedesaan Kecamatan Sungai Kakap*. [https://litbangbappeda.kuburayakab.go.id/hasil/91Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Pedesaan Kecamatan Sungai Kakap.pdf](https://litbangbappeda.kuburayakab.go.id/hasil/91Identifikasi%20dan%20Inventarisasi%20Kawasan%20Pedesaan%20Kecamatan%20Sungai%20Kakap.pdf)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022*.
- Bakari, Y. (2019). Analisis Karakteristik Biaya Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 265. <https://doi.org/10.20956/jsep.v15i3.7288>
- Boediono. (2000). *Ekonomi Internasional*. BFFE.
- Damanik, J. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 212–224.
- Ekawati, Darmawan, R., Rizieq, R., & Sugiarti, S. (2023). Komparasi Pendapatan Usahatani Padi Berdasarkan Penggunaan Benih di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1), 153–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.148>
- Gonggo, B. M., Turmudi, E., & Brata, W. (2003). Respon Pertumbuhan dan Hasil Ubi Jalar pada Sistem Tumpangsari Ubi Jalar-Jagung Manis di Lahan Bekas Alang-Alang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 5(1), 34–39.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Keuangan Menengah*. BPFE.
- Hidayat, L., & Halim, S. (2013). Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(2), 159–168.

<https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i2.263>

- Listiani, R., Setiadi, A., & Santoso, S. I. (2019). Analisis Pendapatan Usahatani Pada Petani Padi Di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i1.4018>
- Ma'ruf, M. I., Kamaruddin, C. A., & Muharief, A. (2019). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Padi Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(3), 193. <https://doi.org/10.20956/jsep.v15i3.7021>
- Mahatmayana, I. K. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Usahatani Terintegrasi di Provinsi Bali. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v2i1.5581>
- Maheda, D. (2015). Pemanfaatan Lahan di Bawah Pohon Kelapa Dengan Pola Tanam Tumpangsari di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang. *Skripsi*.
- Modes, J. T., & Hidayah, R. N. (2021). Analisis Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.10>
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya, (2016).
- Puspitasari, M. (2022). Pendapatan Dan Risiko Usahatani Padi Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Rice Business Income and Risk in Sambas District West Kalimantan. *Jurnal Pertanian Agros*, 24(2), 819–826.
- Safitri, E. (2020). *Analisis komparatif usaha tani kelapa hibrida dan kelapa dalam di kecamatan pelangiran kabupaten indragiri hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiawan, E. (2009). Kearifan Lokal Pola Tanam Tumpangsari di Jawa Timur. *Agrovigor*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/agrovigor.v2i2.246>
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2013). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Warsono, U., Gusti, A. K. S., Luluk, P. E., Sri, W., Hesti, E. O., Endang, H., Rudi, Desyanti, Elis, N. H., & Suwena. (2002). *Pertanian Terpadu Suatu Strategi Untuk Mewujudkan Pertanian Kelanjutan*. Institut Pertanian Bogor.

**PERGERAKAN BILATERAL TRADE, TENAGA KERJA DAN NILAI TUKAR
INDONESIA – ARAB SAUDI**

Hasanah¹

Institut Bisnis dan Ekonomi, Indonesia,

Arina Azwani²

Bisnis dan Humaniora, Universitas Satu, Indonesia

ABSTRACT

Based on the reason a country conducts international trade with other countries is the same, namely to benefit from the exchange of goods and services resulting from specialization in fields that have a comparative advantages in each country. The moratorium factor is also the cause of the decline in the number of migrant workers in Saudi Arabia every year with the highest number in 2018 with 5 thousand workers so that the decrease in the number of migrant workers can result in a decrease in the country's foreign exchange and depreciation of the rupiah. This research aims to analyze the influence of bilateral trade (export - import) and Indonesian workers on the stability of the rupiah exchange rate against the riyal, research observations in two Islamic countries in the world, namely Indonesia and Saudi Arabia which are members of the OIC (Organization of Islamic Cooperation) with an observation period of 30 years, from 1990 - 2022 using multiple linear regression analysis methods. Based on partial test results, exports to Saudi Arabia have an insignificant negative influence on the rupiah exchange rate, while imports from Saudi Arabia have a significant positive influence on the rupiah exchange rate and TKI have an insignificant positive influence on the rupiah exchange rate against the riyal. The results of this research are intended to further encourage the Indonesian government to support exports and establish good relations with the Saudi Arabian government so that Indonesia's trade balance continues to improve and the rupiah exchange rate remains stable.

JEL: F1,F3

Keywords: *Bilateral, Labor, Exchange Rate, Regresi Panel.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya adalah sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran barang dan jasa yang dihasilkan dari spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing negara tersebut. (Salvatore, 2004) Adapun aktivitas dari suatu perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Selain itu kualitas tenaga kerja luar negeri juga dapat berperan dan mempengaruhi pendapatan negara dalam bentuk devisa sehingga penguatan nilai tukar juga dapat terjadi dan tentunya dapat menjaga perkembangan perekonomian dan stabilitas nilai tukar suatu negara.

Secara teori perdagangan internasional pada umumnya sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Perbedaan harga inilah yang menjadi pangsak timbulnya perdagangan antar negara (Nopirin, 2010). Sedangkan menurut Sobri (2001) perdagangan internasional merupakan

¹gadhihasanah18@gmail.com

suatu transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara lain baik mengenai barang ataupun jasa. Ball dan McCulloch (2000) menyatakan bahwa perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan harga relative antar negara. Dari paparan teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain yang muncul karena adanya perbedaan harga relatif mengenai harga barang ataupun jasa-jasa.

Kurs atau nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara, yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs tersebut akan memainkan peranan yang sangat penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan untuk digunakan dalam mengartikan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama (Krugman dan Obstfeld, 2004). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ika dan Yani (2005) tentang dampak volatilitas nilai tukar terhadap arah hubungan Indonesia dengan menggunakan metode ARDL – ECM mendapatkan hasil penelitian yaitu dalam jangka pendek eksportir cenderung menghindari resiko akibat nilai tukar. Sejalan dengan penelitian Aliman dan Purnomo (2001) tentang Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan metode Uji kausalitas model koreksi kesalahan baku dan FPE, mendapatkan hasil penelitian Adanya pola hubungan kausalitas timbal balik antara ekspor dan pendapatan riil.

Pardade (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Kurs Dollar Amerika Tahun 2006 – 2017 menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi, menemukan secara simultan remitansi TKI, cadangan devisa dan PDB berpengaruh signifikan terhadap kurs Dollar Amerika. Remitansi TKI secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs Dollar Amerika. Faktor moratorium menjadi penyebab turunnya jumlah TKI di Arab Saudi setiap tahun dengan angka tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 5 ribu tenaga kerja sehingga penurunan jumlah TKI tersebut dapat mengakibatkan menurunnya devisa negara dan depreksiasi rupiah, namun pada hubungan perdagangan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi mengalami pergerakan fluktuatif dengan angka tertinggi terletak pada ekspor migas pada tahun 2014 dengan jumlah 20 miliar Saudi dan impor tertinggi pada tahun 2015 dengan jumlah 9 miliar Saudi sehingga dengan tinginya angka ekspor dibandingkan impor Arab Saudi dapat mengakibatkan stabilitas rupiah menjadi terganggu dan hal tersebut juga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan hubungan kerjasama antar kedua negara yaitu Indonesia dan Arab Saudi.

2. KAJIAN LITERATUR

Dalam konteks perdagangan internasional, kestabilan nilai tukar merupakan keadaan yang lebih diinginkan oleh pelaku pasar. Hal ini didasarkan pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan melalui biaya dan harga yang akhirnya menghasilkan perubahan harga relatif dalam perdagangan (Carbaugh, 2005) dan volatilitas nilai tukar itu sendiri akan menimbulkan resiko dalam transaksi karena perbedaan nilai spot transaksi dengan nilai spot pembayaran. Walaupun resiko tersebut dapat ditutup dengan melakukan pemagaran nilai tukar yakni dengan melakukan transaksi di pasar forward, besarnya premi yang ditanggung importir tetap akan membebani transaksi (Krugman dan Obsfeld, 2003).

Resiko nilai tukar terjadi setiap kali seorang investor, perusahaan atau bank menghadapi kewajiban pembayaran di masa mendatang dalam valuta asing. Kondisi tersebut berarti pelaku pembayaran itu mengalami resiko nilai tukar (*foreign exchange risk*) atau apa yang disebut sebagai “posisi terbuka” (Salvatore, 1997). Terkait adanya resiko tersebut, maka pelaku transaksi dapat melakukan upaya dalam menghindari resiko nilai tukar tersebut dengan melakukan pemagaran nilai tukar atau hedging yang dapat dilakukan di pasar forward. Namun, pemagaran resiko nilai tukar ini juga menimbulkan biaya jika terjadi premi terhadap transaksinya. Timbulnya biaya yang harus dipikul dalam

rangka melakukan pemagaran resiko nilai tukar tersebut akan menimbulkan biaya perdagangan internasional yang selanjutnya berkecenderungan mengurangi volume perdagangan. Hal tersebut juga didukung oleh Suardhini dan Goeltom (1997) yang menyatakan bahwa resiko fluktuasi keuntungan perdagangan dalam jangka pendek bisa dikurangi dengan melakukan transaksi di pasar forward. Tetapi, sebagai akibatnya akan menimbulkan biaya perdagangan internasional akan meningkat yang akhirnya menimbulkan anti-trade bias.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirimkan ke luar negeri dapat disebut juga sebagai remitansi yaitu adalah transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal (Nizar, 2014). Menurut World Bank dalam Sihombing dan Safaruddin (2007), yaitu pembayaran antar negara dari orang ke orang dengan besaran nilai yang secara relatif kecil, yang dalam prakteknya, transfer uang kiriman tersebut dilakukan oleh para pekerja asing secara berulang kali kepada keluarganya di daerah asal. Remitansi dianggap sebagai aliran devisa yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Perubahan devisa dari aliran masuk remitansi terhadap nilai tukar mata uang biasanya juga dilihat melalui pengaruhnya terhadap ketersediaan devisa atau valuta asing (*foreign reserves*) dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, apabila terdapat transfer devisa remitansi ke suatu negara, akan menyebabkan menambah ketersediaan (penawaran) valuta asing di negara itu. Sebaliknya, apabila terjadi transfer devisa remitansi dari suatu negara akan meningkatkan permintaan valuta asing Negara tersebut. Apabila penawaran valuta asing lebih besar dari permintaannya (*excess supply*), kemudian harga valuta asing (nilai tukar) tersebut akan turun dan sebaliknya apabila terjadi permintaan valuta asing lebih besar (*excess demand*), maka harga valuta asing akan naik (Krugman and Melitz dalam Nizar, 2014).

Transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal atau sering disebut remitansi juga menjadi sumber penerimaan devisa (*foreign exchange earnings*) yang penting bagi banyak negara, sehingga turut mempengaruhi posisi neraca pembayaran (*balance of payments*) negara penerimanya (Barajas, 2010). Dalam konteks peranan terhadap neraca pembayaran inilah pengaruh aliran masuk remitansi terhadap nilai tukar mata uang negara penerima biasanya dilihat. Sebagai salah satu negara yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri, Indonesia juga menikmati aliran masuk remitansi. Aliran masuk remitansi ini, sebagaimana tercatat dalam neraca transaksi berjalan (*current accounts*) neraca pembayaran Indonesia, pada gilirannya akan menambah cadangan devisa. Dengan bertambahnya cadangan devisa, berarti pasokan terhadap valuta asing (*foreign exchange*) juga bertambah dan pada gilirannya akan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, termasuk terhadap US dolar. Oleh karena itu, setiap perubahan aliran masuk devisa yang bersumber dari remitansi akan mempengaruhi posisi neraca transaksi berjalan. Sementara itu, posisi (surplus/defisit) neraca transaksi berjalan yang sama.

Demi mendukung landasan teoritis dan keabsahan penelitian yang akan dilakukan, penulis melihat bahwa selayaknya masing – masing variabel yang akan diteliti dilengkapi dengan bukti penelitian terdahulu. Pardede (2018), melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh remitansi tenaga kerja Indonesia terhadap kurs Dollar Amerika tahun 2006 – 2017 menggunakan metode statistika, dengan variabel dependen kurs Indoensia dan variabel independen tenaga kerja Indonesia, cadangan devisa dan PDB, mendapatkan hasil penelitian yang menegaskan bahwa secara simultan remitansi TKI, cadangan devisa dan PDB berpengaruh signifikan terhadap kurs Dollar Amerika dan secara parsial remitansi TKI berpengaruh positif terhadap kurs Dollar Amerika.

Aliman dan Purnomo (2001), dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji hubungan timbal balik antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode uji kausalitas model, koreksi kesalahan buku dan FPE. Adapun variabelnya adalah ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti mengatakan bahwa terdapatnya pola hubungan kausalitas timbal balik antara ekspor dan

pendapatan riil. Sedangkan Didi dan Jamzani (2005) dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi regional menggunakan metode pendekatan kointegrasi dan EG-ECM mengungkapkan bahwa hubungan antara ekspor dan variabel – variabel yang mempengaruhinya yakni rasio harga, pendapatan luar negeri, nilai tukar riil dan volatilitas nilai tukar memiliki hubungan dalam jangka panjang atau kointegrasi.

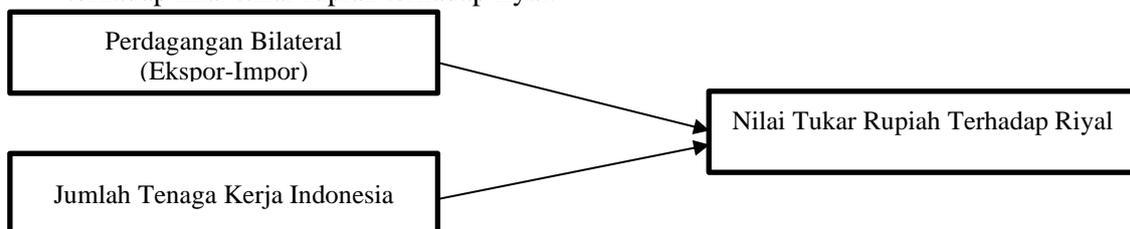
Ika dan Yani (2005) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan internasional, dengan menggunakan metode ARDL – ECM. Nilai tukar terhadap variabel dependen dan perdagangan internasional sebagai variabel dependen, yang mendapatkan hasil penelitian bahwa dalam jangka pendek eksportir cenderung menghindari resiko akibat nilai tukar. Maulana, dkk(2015) melakukan penelitian berujuan untuk menganalisis perkebangan perdagangan internasional dan membandingkan perdagangan anatara kedua negara yaitu Inonesia dan Malaysia pada tahun 2003 – 2017, menggunakan metode analisis efek nilai tukar perdagangan atau term of trade (TOT). Variabel dependennya yaitu ekspor dan impor, sedangkan variabel independennya yaitu tingkat harga GDP. Perhitungan indeks harga ekspor (Px) dan indeks harga impor (Pm). Mereka menegaskan bahwa dalam model Ekspor: Real effective exchange rate (REER) tidak berdampak signifikan dan Volatilitas nilai tukar berdampak secara signifikan mengurangi ekspor. sedangkan Model Impor: REER berdampak positif secara signifikan, berhubungan positif terhadap impor. Dan volatilitas nilai tukar tidak berdampak signifikan, namun akan signifikan jika diberlakukan segregasi.

Bourdet & Falck (2003) untuk kasus negara Cape Verde. Dengan menggunakan data periode 1980– 2000 mereka menguji efek remitansi terhadap keseimbangan nilai tukar riil. Hasil yang diperoleh sejalan dengan pandangan konvensional bahwa peningkatan penerimaan remitansi menyebabkan apresiasi nilai tukar riil di Cape Verde. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam studi yang dilakukan oleh SaadiSedik & Petri (2006) untuk kasus Yordania selama periode 1964– 2005. Studi lain dengan menggunakan data beberapa negara (panel) juga pernah dilakukan, misalnya oleh Amuedo-Dorantes & Pozo (2004). Dengan menggunakan data 13 negara Amerika Latin dan Karibia dalam periode 1978 – 1998, studi ini juga mengkonfirmasi pandangan konvensional bahwa peningkatan remitansi menyebabkan apresiasi nilai tukar riil.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Mongardini & Rayner (2009) untuk 29 negara Sub Sahara Afrika menunjukkan hasil yang agak berbeda. Remitansi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar riil dalam jangka panjang. Berbeda dengan pengaruh bantuan (aid) yang menyebabkan depresiasi nilai tukar riil dalam jangka panjang.

H1 : Perdagangan Bilateral dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki hubungan signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap riyal.

H2 : Perdagangan Bilateral dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki hubungan signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap riyal.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Metode penelitian adalah bentuk atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006). Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang

merupakan bentuk penelitian yang lebih didasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh (Umar, 2008).

Penelitian menggunakan data sekunder runtun waktu (time series). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dari sumber yang telah ada. Sumber data diantaranya yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi lembaga pemerintahan, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lain-lain (Sekaran, 2011). Data diambil dari beberapa situs, diantaranya adalah sesric.org dan BPS (badan Pusat Statistik). Penelitian dilakukan anatar dua negara Islam yaitu selama 2002-2017. Observasi dilakukan antara 2 negara Islam yang tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC) selama 30 tahun periode 1988 – 2018, antara Indonesia dan Arab Saudi.

3.1. Model Regresi

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/ predictor (X1, X2,...Xn). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/ response (Y) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/ predictor (X1, X2,..., Xn) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel - variabel bebasnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat di tuliskan sebagai berikut:

$$R_{Pt} = \beta_0 + \beta_1 PB_t + \beta_2 TKI_t + e_t$$

Keterangan :

[[PB]]_t = Perdagangan bilateral net ekspor (ekspor-impor) periode t

[[TKI]]_t = Jumlah tenaga kerja Indonesia periode t

R_{pt} = Nilai tukar rupiah terhadap riyal periode t

β₀ = Intersep

β₁ = Koefesien

e_t = Error tren

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Output Statistik

Dependent Variable: Nilai Tukar				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2069.498	107.2479	19.29640	0.0000
Ekspor	-0.020287	0.017321	-1.171232	0.2517
Impor	0.158975	0.052431	3.032102	0.0053
TKI	0.611903	0.494885	1.236456	0.2269

Sumber : hasil olah data eviews (2020)

Hasil regresi pada tabel 6 dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

a. Ekspor : -0.020287

Ketika ekspor mengalami peningkatan 1%, dan variabel yang lain tidak mengalami perubahan maka nilai tukar mengalami penurunan sebesar 0.02 miliar dollar

b. Impor : 0.158975

Ketika impor mengalami peningkatan 1%, dan variabel yang lain tidak mengalami perubahan maka nilai tukar mengalami peningkatan sebesar 0.15 miliar dollar

c. Tenaga Kerja Indoneisa : 0.611903

Ketika TKI mengalami peningkatan 1%, dan variabel yang lain tidak mengalami perubahan maka nilai tukar mengalami peningkatan sebesar 0.61 ribu orang.

4.1 Pengaruh Perdagangan Bilateral (Ekspor) Terhadap Stabilitas Nilai Tukar Terhadap Riyal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.2517, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probability lebih besar dari level of significance ($\alpha = 0,05$) dengan nilai t statistik menunjukkan angka -1.171232. Maka dikatakan bahwa ekspor ke Arab Saudi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap riyal. Berdasarkan data dari Sesric.org pergerakan ekspor dari Indonesia ke Arab Saudi selama tiga tahun terakhir menunjukkan pergerakan menurun yaitu dari tahun 2014 sebesar 20,949.00 miliar dollar turun menjadi 9,879.00 miliar dollar pada tahun 2015, pergerakan tersebut terus menurun hingga tahun 2018. Hal tersebut nyatanya tidak dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar, dimana nilai tukar rupiah terhadap riyal terus mengalami depresiasi dari tahun 1988 bernilai Rp. 1.660,00 per riyal hingga 2018 bernilai Rp. 3.570,00 per riyal.

Ekspor berpengaruh terhadap nilai tukar, hal tersebut sesuai dengan teori balance of payment, ekspor sering menjadi faktor yang dapat mendorong naik dan turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus neraca perdagangan memungkinkan terjadinya depresiasi suatu mata uang. Sebaliknya penurunan nilai ekspor neto atau defisit neraca perdagangan menyebabkan terapresiasi mata uang suatu negara. Nilai koefisien ekspor sebesar -1.171232 berarti kenaikan perubahan ekspor mengakibatkan nilai kurs rupiah terapresiasi terhadap Saudi Arab riyal. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa ekspor neto berpengaruh negatif terhadap nilai tukar rupiah.

Teori purchasing power parity atau paritas daya beli dikemukakan oleh Gustav Basel yang menyatakan bahwa perbandingan nilai suatu mata uang lain ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut di masing-masing negara. (Nopirin, 2013). Dasar teorinya bahwa, perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut (terhadap barang dan jasa) di masing-masing negara. Perubahan kurs di dalam pasar bebas tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap valas dan penawaran terhadap valas. Permintaan dan penawaran terhadap suatu valas asing inilah yang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang asing negara tersebut (Wulandari, 2014). Ribka, dkk (2017) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama yaitu ekspor dan impor (net ekspor) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel nilai tukar rupiah atas Dolar Amerika Serikat.

Terdapat dua preposisi terhadap dampak pergerakan nilai tukar rupiah. Pertama, depresiasi nilai tukar rupiah mempunyai dampak positif terhadap permintaan ekspor sehingga neraca perdagangan meningkat. Secara komparatif, produk Indonesia akan lebih murah dibandingkan negara pesaing. Leigh, etc (2016) mengestimasi dampak depresiasi nilai tukar sebesar 10%, akan menyebabkan kenaikan neraca perdagangan secara rata-rata sebesar 1,5%. Kedua, nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi akan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan. Ini disebabkan oleh tingginya kandungan impor pada industri yang berorientasi ekspor, sehingga depresiasi nilai tukar rupiah menurunkan kemampuan produksi dan ekspor produk ke pasar global.

4.2 Pengaruh Perdagangan Bilateral (Impor) Terhadap Stabilitas Nilai Tukar Terhadap Riyal

Pada hasil perhitungan impor terhadap stabilitas nilai tukar diperoleh hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.0053, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probability lebih kecil dari level of significance ($\alpha = 0,05$) dengan nilai t statistik menunjukkan angka 3.032102. Maka dikatakan bahwa Impor dari Arab Saudi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai tukar rupiah terhadap riyal. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor yang besar akan menyebabkan permintaan akan mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang domestik melemah. Impor yang tinggi juga akan menurunkan

produksi didalam negeri akibatnya pengangguran meningkat dan pendapatan menurun sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun.

Berdasarkan data dari BPS dan sesric pada pergerakan nilai tukar dan impor memiliki pergerakan yang sama memiliki kenaikan, seperti pada tahun 2015 nilai impor dari Arab Saudi tertinggi mencapai 9,559.24 miliar dollar dan nilai tukar rupiah terhadap riyal mengalami depresiasi dengan nilai Rp. 3,255.50 per riyal, dimana sebelumnya pada tahun 2014 rupiah bernilai Rp. 2,586.00 per riyal. Hal tersebut membuktikan bahwa pergerakan impor terhadap rupiah memiliki korelasi yang positif sesuai dengan hasil penelitian ini. Semakin banyak Indonesia mengimpor dari Arab Saudi maka akan semakin menekan rupiah terhadap riyal. Total impor dari Arab Saudi ke Indonesia pada Januari 2017 mencapai US\$ 219 juta atau mengalami peningkatan dari sebelumnya US\$ 196,15 juta per periode Januari 2016. Sedangkan di Januari – Desember 2016, tercatat nilai impornya US\$ 2,73 miliar. Rinciannya Indonesia mengimpor komoditas atau produk minyak dan gas (migas) dari Arab Saudi sebesar US\$ 153,37 juta di Januari 2017 atau naik tipis dibanding realisasi US\$ 150,24 juta di periode Januari tahun lalu. Sementara di 2016, nilai impor migas Indonesia dari Arab mencapai US\$ 2,02 miliar (liputan6.com, 2017), hal tersebut yang membuat nilai tukar terus tertekan sehingga mengalami depresiasi rupiah terhadap riyal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin (2009) terdapat pengaruh yang positif signifikan impor terhadap kurs, yang artinya shock yang terjadi pada impor akan direspon positif oleh kurs. Semakin banyak barang dan jasa yang diimpor ke Amerika Serikat, maka akan semakin banyak permintaan valuta asing sehingga kurs akan cenderung meningkat atau melemah. Dalam penelitian Nurdiansyah (2014) mengatakan baik dalam jangka panjang dan jangka pendek impor mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kurs. Fluktuasi ekspor dan impor suatu negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang negara tersebut terhadap valuta asing. Peningkatan jumlah impor menyebabkan meningkatnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap valuta asing yang akhirnya menyebabkan depresiasi mata uang tersebut Hal ini disebabkan oleh rendahnya permintaan terhadap mata uang negara lain semakin tinggi.

Berbeda dengan ekspor yang akan menyumbangkan pendapatan bagi Negara, impor merupakan bocoran dan akan menjadi pengeluaran Negara. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri (Murni, 2009). Suatu Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu dengan cara memproduksi barang dan jasa itu sendiri karena berbagai faktor, maka dari itu suatu Negara melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kecenderungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah Negara Karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Impor barang-barang jadi juga akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, maka dari itu kegiatan impor dan ekspor harus berjalan dengan seimbang. Pengembangan industri substitusi impor dalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor (Arsyad, 2005).

5. SIMPULAN

Pengaruh perdagangan bilateral yang terdiri dari ekspor dan impor antara Indonesia dan Arab Saudi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap riyal memiliki korelasi dan pengaruh yang berbeda. Ekspor memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan impor memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Fluktuasi ekspor dan impor suatu negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang negara tersebut terhadap valuta asing. Peningkatan jumlah impor dan menurunnya kegiatan ekspor menyebabkan meningkatnya nilai tukar

mata uang suatu negara terhadap valuta asing yang akhirnya menyebabkan depresiasi mata uang tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya permintaan terhadap mata uang negara lain semakin tinggi.

Pengaruh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Arab Saudi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan. Pengaruh positif tersebut memberikan indikasi bahwa peningkatan jumlah aliran remitansi yang masuk ke Indonesia akan menyebabkan nilai tukar riil Rupiah terhadap riyal mengalami penguatan (apresiasi). Stabilitas nilai tukar rupiah dapat dilihat dari sektor ekonomi maupun non ekonomi salah satunya adalah jumlah TKI yang berada diluar negeri karena semakin meningkatnya jumlah TKI diluar negeri tentu akan meningkatkan jumlah permintaan uang transfer ke pemerintah Indonesia dan tentu pula akan menguatkan mata uang rupiah begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan untuk ekonomi Islam dan pemerintah adalah sebagai Neraca perdagangan dan nilai tukar berjalan beriringan dimana perubahan pada nilai tukar akan menyebabkan perubahan pada neraca perdagangan, begitu pula sebaliknya perubahan pada neraca perdagangan akan mengakibatkan naik atau turunnya nilai tukar suatu negara sehingga dalam hal ini pemerintah perlu untuk menjaga kestabilan nilai tukar dengan lebih memperhatikan jumlah ekspor dan impor agar tetap seimbang.

Bagi pemerintah perlu untuk menambah kuota TKI diluar negeri serta mengintegrasikan kebijakan remitansi dan devisa nasional, sehingga dengan semakin banyaknya jumlah TKI maka akan meningkatkan devisa negara, serta dengan keefektifan kebijakana yang dilakukan pemerintah maka tidak hanya devisa negara yang akan bertambah , nilai tukar rupiah juga akan tetap kompetitif. Bagian ini khusus menyimpulkan hasil riset yang diikuti dengan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai dalam riset. Pada bagian akhir, penulis dapat menyampaikan berbagai keterbatasan dalam riset tersebut, yang diikuti dengan arahan untuk penyempurnaan riset ke depan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

2004, U. N. (t.thn.).

Agustin, G. (2009). Analisis Paritas Daya Beli Pada Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Periode Semtember 1997 – Desember 2007 Dengan Menggunakan Metode Error Correction Model. *JESP*.

Aliman, & Purnomo, B. (2001). Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Economy and Business*.

Amuedo, D. C., & Pozo, S. (2004). Workers' Remittances and the Real Exchange Rate: A Paradox of Gifts. *World Development*, Vol. 32 (8).

Arifin, Z. (2003). *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah cetakan II*. Jakarta: Alvabeth.

Arifin, Z. (2003). *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah Cetakan ke II*. Jakarta: Alvabet.

Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ariyanti, F. (2017, 05 Maret). Intip Data Perdagangan antara RI dan Arab Saudi.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2876137/intip-data-perdagangan-antara-ri-dan-arab-saudi>.

Arsyad, L. (2005). *Pengantar Perencanaan Ekonomi Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

- Barajas, A., Chami, R., Hakura, D., & Montiel, P. (2010). Workers' Remittances and the Equilibrium Real Exchange Rate: Theory and Evidence. *IMF Working Paper, Washington : International Monetary Fund. , WP.10/287.*
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analisis dengan SPSS*. Salatiga: Slatiga Press.
- Boediono. (2005). *Ekonomi Makro Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Bourdet, Y., & Falck, H. (2003). Emigrant's Remittances and Dutch Disease in Cape Verde. Sweden : Kristianstad University Collage. *Working Paper Series 11.*
- Carbough, R. J. (2005). *International Economics, 10th Edition*. South-Western: Mason, OH: Thomson.
- Chapra, M. U. (2010). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ekananda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Goeltom, M., & Suardani, M. (1997). Analisa Dampak Intervensi Bank Sentral Dalam Penerapan Ekspor - Impor di Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume XIV No.1.*
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Hamidi. (Sistem Moneter yang Stabil dan Berkeadilan). 2007. Jakarta: Senayan Abadi.
- Hamidi, M. L. (2007). *Gold Dinar; Sistem Moneter yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Senayan Abadi .
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Izquierdo, A., & Montiel, P. (2006). Remittances and Equilibrium Real Exchange Rates in Six Central American Countries. *Williams College, mimeo.*
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional dan Kebijakan, Harper Collins. Ahli Bahasa Faisal Bashri*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Krugman, P. R. (2004). *Ekonomi Internasional dan Kebijakan Harper Collins Publisher Ahli Bahasa Faisal H. Basri*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2012). *International Economic : Theory and Polici. Ninth Edition*. Boston: Pearson Edocation.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (1994). *Ekonomi Internasional : Teori Ekonomi dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2011). *Economic International Ed. II*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kusumosuwidho, S. (1981). *Angkata Kerja dalam Dasar - Dasar Demografi*. Jakarta: Lemabaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lidya, K. (2011). *Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita* . Makassar.

- Mahendra, A. (2014). Analisis Pengaruh Ekspor, Utang Luar Negeri dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Maksiro Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Manurung, R. P. (2002). *Pengantar Ekonomi, Buku Seri Ekonomi*. Jakarta: FEUI.
- Maulana, I., Putro, T. S., & Darmayuda. (2015). Analisis Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Malaysia tahun 2003 - 2012. *Jom Fekon*.
- Mc.Culloch, D. A. (2000). *International Business, terjemah oleh Syahrizal Noor*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miskhin, F. S. (2001). *Financial Markets and Instutions. Wasley Champany Publishing*.
- Miskhin, F. S. (2009). *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mongardini, J., & Rayner, B. (2009). Grants, Remittances, and the Equilibrium Real Exchange Rate in Sub-Saharan African Countries. *IMF Working Paper, WP 09/75*.
- Murni, A. (2009). *Ekonomi Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nisfiannoor, M. (2009). *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Nizar, M. (2014). Pengaruh Aliran Masuk Devisa Tenaga Kerja (Worker's Remittances) Terhadap Nilai Tukar Rupiah. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Internasional Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nopirin. (2013). *Ekonomi Moneter. Buku II Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE .
- Nurdiansyah, Y. (2014). Keseimbangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. *Trikonomika*, 13–20.
- Pardade, V. N. (2018). Pengaruh Remitansi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Kurs Dollar Amerika Serikat tahun 2006 - 2017. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Qs. Al A'raf ayat 85. (t.thn.).
- Qs. Al Balad ayat 4. (t.thn.).
- Qs. Al Baqarah ayat 275. (t.thn.).
- Qs. Al Fushilat ayat 10. (t.thn.).
- Qs. Al Jumuah ayat 10. (t.thn.).
- Qs. Al Mulk ayat 15. (t.thn.).
- Qs. An Nahl ayat 97. (t.thn.).

Qs. An Nisa ayat 29. (t.thn.).

Rohmana, Y. (2010). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPEB UPI.

Saadi-Sedik, T., & Petri, M. (2006). To Smooth or Not to Smooth - The Impact of Grants and Remittances on the Equilibrium Real Exchange Rate in Jordan. *IMF Working Paper. Washington : International Monetary Fund.*, WP 06/257.

Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Intenasional*. Jakarta: Erlangga.

Salvatore, D. (1997). *Managerial Economic in A Global Economic*. New York: Mc-Graw-Hill.

Salvatore, D. (2004). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.

Sekaran, U. (2011). *research Methods for Business Edision 1 & 2* . Jakarta: Salemba Empat.

Sholeh, M. (2007). Permintaan serta Penawaran Tenaga Kerja . *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.

Silitonga, R. B., Ishak, Z., & Mukhlis. (2017). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* . , Vol. 15(1): 53-59.

Simanjuntak, P. (1998). *Teori Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.

Sobri. (2001). *Ekonomi Internasional Teori, Masalah dan kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFE UII.

Sodik, J., & Nuryadi, D. (2005). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Economic Journal of Emerging Markets*.

Suharyadi, & Purwanto. (2003). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno, S. (2011). *Pengantar Makroekonomi, Edisi Tiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umar, H. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UUD No. 39 tahun 2004. (t.thn.).

Winarno, W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* . Yogyakarta: LPP STIM YKPN.

Wulandari, E. (2014). Analisis Makro Ekonomi Indonesia Periode 1980 - 2012 . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1-9.

**PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, HARGA MINYAK MENTAH, DAN HARGA EMAS
TERHADAP PERKEMBANGAN CADANGAN EMAS DI LIMA NEGARA ISLAM
(KUWAIT, ARAB SAUDI, QATAR, MALAYSIA, DAN INDONESIA)**

Marhamah

UNU KALBAR, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to talk about the effect of inflation, exchange rates, crude oil prices, and gold prices on the development of gold reserves in Islamic countries, observing five Islamic countries, namely Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Malaysia, and Indonesia which are members of the OIC (Organization of Islamic Cooperation) with an observation period of 19 years, from 2000-2019 using the panel data regression method. Based on the results of the partial test, inflation has a significant negative effect on the development of gold reserves, the exchange rate has a negative and significant effect on the development of gold reserves, oil prices have a negative and significant effect on the development of gold reserves, while the price of gold has a positive and significant effect on the development of reserves in five selected Islamic countries. The results of this study want to further encourage the governments of Islamic countries to maintain the movement of inflation, maintain the stability of the country's currency, maintain crude oil stocks in each country, and maintain and protect gold stocks and stabilize gold prices.

Kata kunci: The Influence Of Inflation, Exchange Rates, Crude Oil Prices, Gold Prices, On The Development Of Gold Reserves

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Cadangan emas adalah faktor penting dalam melindungi stabilitas mata uang suatu negara, karena setiap pergerakan nilai emas di suatu negara dapat memengaruhi nilai tukar. Saat ini Emas sedang diagendakan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah dari sistem keuangan dan moneter yang rentan terjadi ketidakstabilan. Apabila seluruh negara Islam siap menerbitkan emas menjadi nilai mata uang, maka permasalahan sistem keuangan moneter inflasi dapat terkontrol dengan baik. (Meera, 2009). Negara-negara Islam antusias menggerakkan penyatuan mata uang sejak 1945, tetapi hal tersebut terpecah menjadi dua kubu Pada tahun 2010 belum berhasil namun tidak sampai disini saja hal tersebut terus dilanjutkan perencanaan ulang, (Bacha, 2000). Pergerakan untuk menggunakan Dinar emas sebagai mata uang paralel terus muncul di kalangan masyarakat akar rumput di beberapa bagian Indonesia, Malaysia, dan Afrika. (Yacob, 2012). Hal ini menjadi sebuah Motivasi bagi negara islam dalam bentuk keantusiasaan untuk menggunakan uang berstandar emas, maka dapat dilihat dari keberadaan cadangan emas yang dimiliki oleh setiap negara islam hingga saat ini.

Menurut Martin (2014) Emas mampu memperlancar portofolio dalam periode yang fluktuatif standar current. Apabila nilai tukar mengalami apresiasi maka akan terjadi penurunan harga emas sebaliknya apabila nilai tukar mengalami depresiasi maka akan terjadi kenaikan harga emas hal tersebut terjadi karena investasi nilai tukar pada saat nilai mata uang negara sedang menguat. Sehingga emas akan mengalami peningkatan. Pada akhir zaman, manusia di masa itu semestinya memiliki dirham-

dirham dan dinar-dinar untuk menegakkan urusan agamanya dan dunianya” (AL-Tabrani). Allah Swt menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta di dunia sehingga bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim juga berpendapat, dinar, dirham adalah nilai harga barang komoditas. Emas resmi menjadi mata uang mulai sejak Rasulullah Saw pada masa Khulafaurrasidin. diisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Hasan, 2017).

2. KAJIAN LITERATUR

Cadangan devisa (*International Reserve*) adalah aset berharga yang dimiliki suatu negara bersifat likuid sehingga dapat diterima oleh masyarakat internasional sebagai alat transaksi pembayaran internasional emas (Mishkin, 2001) simpanan cadangan devisa juga berupa mata uang (*Reserve Currency*) digunakan untuk menjamin (kewajibannya) yaitu mata uang lokal yang disimpan oleh pemerintah (bank) sentral sebagai cadangan. Menurut teori (Salvatore, 1996).

Peranan Cadangan devisa dapat dianalogikan dengan motif berjaga-jaga (Roger, 1993). Salah satu komponen cadangan devisa adalah emas moneter, yaitu persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter berupa emas batangan dengan prasyarat internasional tertentu, emas murni, dan mata uang emas yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Emas memiliki keunggulan, lebih tahan lama dibandingkan komoditas lain termasuk dengan jenis logam sendiri, emas tidak dapat beroksidasi sehingga anti karat dan tetap stabil (Karim, 2002). Emas adalah komoditas bernilai tinggi meski dalam bentuk ukuran kecil (Grenspan, 1996). Cadangan Devisa Dalam Pandangan Islam Salah satu yang termasuk dalam komponen cadangan devisa adalah emas, dimana emas yang memiliki nilai fisik dan intrinsiknya sama, karena berstandar emas. Emas juga memiliki power penggunaannya lebih stabil, serta tahan inflasi, dan fluktuasi lebih rendah dibanding dengan uang fiat tercantum (Q.S. Ali Imran: 75)

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum sehingga terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Inflasi terjadi karena daya permintaan produk melebihi kapasitas penawaran nya sehingga harga mengalami kenaikan. Menurut Karim, A (2011), (Tadelilin, 2010) dan Manurung (2008) kemudian beberapa anggapan bahwa telah terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, terus menerus dan bersifat umum. Inflasi terjadi akibat jumlah uang yang beredar lebih banyak dari pada jumlah barang yang ditawarkan, sehingga harga barang cenderung naik (Manurung, 2008). Beberapa ahli ekonomi modern mendefinisikan bahwa inflasi disebabkan oleh kenaikan suatu jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang atau komoditas dan jasa disebut sebagai deflasi

Inflasi Dalam Pandangan dikenal dengan tidak ada inflasi (*Zero Inflation* Islam memiliki mata uang yang stabil yaitu dinar dirham. Namun inflasi pernah terjadi pertama kali pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yaitu kekeringan atau peperangan. Pengaruh inflasi terhadap perkembangan cadangan emas, inflasi secara tidak langsung mempengaruhi cadangan emas karena pada saat terjadi inflasi cadangan emas tetap meningkat hal ini dapat memperbaiki sistem nilai tukar yang sedang lemah. Peristiwa kenaikan harga barang pada sektor jasa akan cenderung mengalami kenaikan inflasi, hal ini menyebabkan ketidak lancaran perekonomian di suatu negara. Sehingga negara membutuhkan lebih banyak devisa untuk dapat bertransaksi di luar negara. Pada saat inflasi cadangan emas akan juga memback up serta membantu perbaiki system nilai tukar yang melemah. Pengaruh inflasi terhadap perkembangan cadangan emas negara yaitu inflasi artinya, apabila suatu negara terjadi inflasi maka harga barang dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikan. Akibatnya akan berdampak pada perubahan nilai mata uang, yang berujung pada simpanan giro bank umum.

Blanchard (2006) mendefinisikan Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) sebagai harga mata uang asing dilihat (diukur) dari mata uang domestik. Kurs yaitu sebuah harga nilai mata uang antar

negara, dinyatakan dalam mata uang lainnya. Artinya siklus memiliki peran dalam mengambil keputusan pembelanjaan negara dalam Bahasa yang sama. (Krugman & Maurice, 2004) Dan (Miskhin, 2009) juga menyebutkan kurs yaitu nilai suatu mata uang antar negara. Nilai Tukar Dalam Pandangan Islam adalah Uang yang diterima serta di akui oleh masyarakat luas untuk tukar menukar dalam perdagangan. Uang adalah apa yang digunakan untuk standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Dalam kegiatan ekonomi islam memperbolehkan tukar menukar uang yang disebut *sharf*, seperti mata uang asing dengan mata uang asing lain, (Arifin, 2003).

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Perkembangan Cadangan Emas Pada saat posisi nilai tukar menguat maka saat stabilnya ekonomi cadangan devisa juga akan stabil, karena nilai tukar termasuk indikator ekonomi makro yang mana apabila nilai tukar menurun maka harus melakukan salah satu devisa negara yang dikorbankan. Ini artinya cadangan emas sebagai back up nilai tukar suatu negara dan juga dengan adanya investor semakin terdorong untuk melakukan investasi di negara yang cadangan devisanya mengalami peningkatan. Dalam bukunya (Salvator, 1997) mengatakan bahwa harga ditentukan oleh bertemunya dua kekuatan atau pengaruh yaitu permintaan dan penawaran. Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (2003) mengatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh penjual. Dikutip dalam bukunya (Rosyidi, 2017) maka dengan hal ini harga sangatlah penting dalam sebuah perdagangan internasional untuk mendapatkan *income* bagi negara dalam keberlangsungan sebuah negara.

Harga Dalam Pandangan Islam yaitu ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Teori harga Ibnu Taimiyyah (1263-1328) kekuatan permintaan dan penawaran secara analisis mikro disebut *staman mitsli* (Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , 2016) Harga yang setara ketika harga standar dan berlaku di masyarakat menjual barang-barangnya dan diterima secara umum sebagai harga yang setara dan sesuai dengan barang, tempat dan waktu yang khusus. Pengaruh Harga Minyak Terhadap Perkembangan Cadangan Emas dapat di ketahui dari Permintaan dan penawaran minyak mentah terjadi kenaikan karena adanya kekuatan komoditas minyak dunia. Apabila harga minyak dunia naik seharusnya memiliki dampak positif terhadap mata uang negara dimana mata uang tersebut terapresiasi bagi negara yang pengekspor minyak, sedangkan bagi negara pengekspor minyak berdampak negatif sehingga mata negara terdepresiasi akibat naiknya harga minyak dunia. (Salvatore, 1997), menyatakan kegiatan ekspor suatu negara merupakan selisih antara produksi atau penawaran domestik dikurangi dengan konsumsi atau permintaan domestik negara yang bersangkutan ditambah dengan stok tahun sebelumnya.

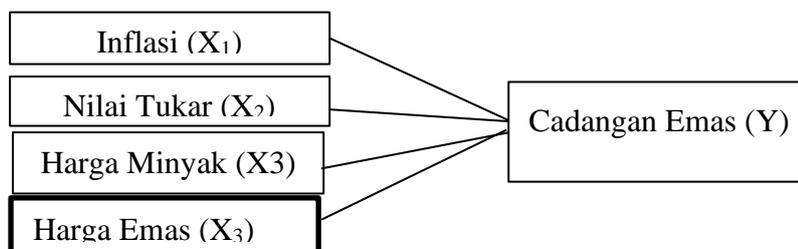
Hubungan antara harga terhadap cadangan emas adalah semakin tinggi suatu harga komoditas maka permintaan tersebut semakin berkurang, *ceteris paribus* (Lipse, 1995) semakin tinggi cadangan emas maka harga semakin stabil karena dapat di back up oleh pendapatan harga minyak suatu negara. Emas merupakan investasi sebagai jaga-jaga ketika kondisi ekonomi memburuk, namun dengan seiringnya waktu emas menjadi salah satu investasi utama untuk mendukung portopolio sebuah investasi. (Handiani, 2014). Meera (2009) menyatakan bahwa komoditas emas merupakan komoditas paling stabil dibandingkan dengan mata uang kertas sehingga emas memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai tukar. Menurut Triono (2012) emas atau logam mulia adalah logam yang tahan korosi dan oksidasi serta langka sehingga diburu oleh manusia.

Menurut Oei (2009) Emas adalah sejenis logam mulia terpercaya yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima di semua negara di dunia. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan jika dilihat berdasarkan nilai moneter absolut, emas itu sendiri digunakan di berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dollar Amerika. Teori Emas Dalam Islam Dalam Islam emas

disebut dengan dinar, dinar emas Islam adalah koin bundar dengan berat 4,25 gram dan 24 karat 917 emas. Jenis dan berat emas sesuai dengan pengukuran standar syar'i yang disepakati oleh para ahli hukum Islam saat itu. Karena itu, dinar emas dikaitkan sebagai mata uang yang terkait dengan Muslim dan disebut sebagai mata uang syar'i atau mata uang Islam hingga saat ini. Penggunaan emas dinar berakhir pada tahun 1924 setelah jatuhnya Kekaisaran Turki Ottoman (Yaacob, 2009).

Pengaruh Harga Emas Terhadap Perkembangan Cadangan Emas adalah Apabila harga emas meningkat maka permintaan terhadap emas menurun sehingga cadangan emas banyak. Sebaliknya jika harga emas menurun maka permintaan emas meningkat, sehingga cadangan emas menurun. Menurut Sunariyah (2006) salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas resiko adalah emas. Bagi investor ketika melakukan investasi, mereka lebih memilih investasi dengan tingkat imbal hasil tinggi dengan risiko pada tingkat tertentu atau tingkat imbal hasil tertentu dengan risiko yang rendah. Sementara permintaan emas ada dua macam yang pertama permintaan pengguna, yang digunakan dalam proses produksi perhiasan, medali, koin, dan lain-lain. yang kedua permintaan asset dimana emas digunakan oleh pemerintah, fund manager dan sebagai investasi individu.

Variabel dalam penelitian ini yaitu inflasi, nilai tukar, harga minyak mentah, dan harga emas di lima negara islam (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, Dan Indonesia) sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak dapat ditemukan langsung terkecuali di dapat dari beberapa alamat website lainnya (Martono, 2011). dengan menggunakan data panel dalam kurun waktu 19 tahun (2000-2019) dengan skala pertahun Adapun tahapan pengujian modelnya sebagai berikut: *Uji Asumsi Klasik*

3.1 Uji Heteroskedastisitas

(Kuncoro, 2011) Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji nilai apakah ada data ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada regresi linear.

3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang mengalami masalah multikolinieritas tidak dapat memprediksi nilai variabel dependen dengan baik atau tidak dapat menghasilkan parameter yang BLUE (*best linear unbiased estimator*).

3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapatnya autokorelasi.

3.4 Metode Analisis

$$GR_{it} = \alpha + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 ER_{it} + \beta_3 PO_{it} + \beta_4 PG_{it} + E_{it}$$

Keterangan:

- Y = Cadangan Emas/ Gold Reserver
- X₁ = Inflasi/ inflation
- X₂ = Nilai Tukar/Exchange Rate
- X₃ = Harga Minyak Mentah/Crude Oil Prices/Price Oil
- X₄ = Harga Emas/Gold Price
- t = Periode/Time
- i = Tempat/Place
- α = Konstanta/constant
- e = Variabel diluar model/error

3.5 Uji Chow

Chow pengujian untuk menentukan model *fixed -effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

3.6 Uji Determinasi (R²)

Menurut Bowono (2016) menjelaskan bahwa jika nilai R² semakin besar (mendekati 1), maka semakin baik hasil regresi tersebut dan semakin besar mendekati 0, maka semakin tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan Koefisien determinasi (R²) secara umum adalah mengetahui kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Heterokedastisitas

Tabel 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.521390	Prob. F(14,84)	0.1212
Obs*R-squared	20.02524	Prob. Chi-Square(14)	0.1293
Scaled explained SS	18.56278	Prob. Chi-Square(14)	0.1823

Berdasarkan uji heterokedastisitas pada tabel 4.1 dengan metode White diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 20.02524 dan nilai Prob.Chi-Square nya sebesar 0.1823 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak bersifat heterokedastisitas

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Inflasi	Infasi	Nilai Tukar	Harga Minyak	Harga Emas
Inflasi	1.000000	0.145943872984728	0.08112894299199	0.02034424840682395
Nilai Tukar	0.145943872984728	1.000000	0.23704709012549	0.3509506257033155
Harga Minyak	0.0811289429919915	0.2370470901254978	1.000000	0.1851505979697587
Harga Emas	0.02034424840682395	0.3509506257033155	0.1851505979697587	1.000000

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.682475	Prob. F(2,90)	0.5080
Obs*R-squared	0.682475	Prob. Chi-Square(2)	0.4845

Berdasarkan pada uji Breusch-Godfrey yang ditampilkan pada table 4.3, menunjukkan bahwa nilai Obs*r-squared sebesar 0.682475 dan nilai Prob. Chi - Square sebesar 0.4845 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan Ho diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Negara			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.809526	(4,91)	0.0000

Hasil uji chow pada tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas cross section F = 0,0000 < 0,05. Nilai F-statistik 54.809526 > f_{tabel} 2,740058 sehingga H₀ ditolak, artinya model yang digunakan adalah *fixed effect* yang tepat digunakan daripada *common effect*

Uji Hausman

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Negara			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	219.238105	4	0.0000

Hasil uji hausman pada tabel 4.5 menunjukkan nilai P Value 0,000 kurang dari 0,05 maka terima H₁ yang berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effect* daripada *random effect*

Tabel 6. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.138550	0.806284	0.171837	0.8639
Inflasi	-0.186476	0.075833	-2.459034	0.0158
Nilai tukar	-0.344728	0.235114	-1.466216	0.1460
Harga minyak mentah	0.039983	0.163894	0.243957	0.8078
Harga emas	0.297101	0.110895	2.679126	0.0088
Fixed effects (cross)				
Kuwait—c	1.209413			
Arabsaudi—c	0.285554			
Qatar—c	-0.840169			
Malaysia—c	-0.961665			
Indonesia—c	0.306867			

Ket *: Signifikansi pada taraf 0,05 %

Table 7. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.720103
Adjusted R-squared	0.695496

Berdasarkan nilai R^2 menerangkan tingkat hubungan antar variabel - variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0.720103 atau 72%.

Pengaruh Inflasi Terhadap Perkembangan Cadangan Emas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.0158, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probability lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap perkembangan cadangan emas.

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap perkembangan Cadangan Emas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.1460 nilai ini menunjukkan bahwa nilai probability lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan nilai tukar memiliki pengaruh yang negative tidak signifikan terhadap perkembangan cadangan emas.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan penelitian Eka Yuliana Rahmawati (2020) dengan hasil nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Kamnar (2016) mengatakan bahwa jika nilai tukar naik satu persen (*ceteris paribus*) maka cadangan devisa akan turun sebesar (9,22%). Itu berarti bahwa kurs berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap cadangan devisa, artinya Jika terjadi penguatan nilai tukar maka cadangan devisa juga akan meningkat begitupun sebaliknya. Hal ini akan mendorong minat investor yang tertarik untuk melakukan investasi di pasar keuangan domestik yang akan mengakibatkan surplus pada neraca transaksi berjalan sehingga cadangan devisa juga akan meningkat.

Pengaruh Harga Minyak Mentah Terhadap perkembangan Cadangan Emas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.8078 nilai menunjukkan bahwa nilai probability lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa harga minyak mentah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap perkembangan cadangan emas. Artinya ketika harga minyak mentah meningkat ataupun menurun di negara Kuwait di tahun 2014-2015 sebesar 27,33 dan 15,26 dalam satuan KWD per bael terhadap USD, sementara posisi cadangan emas tetap stabil di angka 8,6%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Istamar, dkk (2019) Sudati Nur Sarfiah, 3) Rusmijati disimpulkan bahwa harga minyak dunia tersebut menjelaskan bahwa variabel harga minyak dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia tahun 1998, dan penelitian ini tidak sejalan dengan (Bondan Noviantoro dkk 2017) Berdasarkan uji parsial (uji t) terlihat bahwa harga minyak mentah dunia dan harga karet dunia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap defisit neraca transaksi berjalan Indonesia.

Pengaruh Harga Emas Terhadap Perkembangan Cadangan Emas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.0088, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probability

setara dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa harga emas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perkembangan cadangan emas. Berarti ketika harga emas meningkat cadangan emas juga menurun, karena perkembangan cadangan emas dan harga emas satu komponen sangat erat saling berhubungan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Elani Umiyatul Halim, Lilis Yuliati, Siswoyo Hari Santosa (2015) Pengaruh harga emas terhadap inflasi di Indonesia memiliki hasil yang tidak signifikan dan memiliki arah koefisien negatif.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis sejauh mana pengaruh setiap variable terhadap perkembangan cadangan emas di lima negara islam, maka ditarik kesimpulan mengenai perkembangan cadangan emas di lima negara islam (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Indonesia) sebagai berikut:

1. Pengaruh Inflasi terhadap perkembangan cadangan emas menunjukkan pengaruh negatif signifikan, hal tersebut dikarenakan emas tahan inflasi, serta memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah perekonomian. (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Indonesia) sehingga memiliki dampak secara signifikan, serta memiliki pengaruh yang negatif terhadap perkembangan cadangan emas namun nilai yang ditunjukkan kecil 0.0158 dan perkembangan cadangan emas dapat di pengaruhi oleh factor lain.
2. Pengaruh nilai tukar terhadap perkembangan cadangan emas mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan peneraan rezim sitem nilai tukar yang berbeda-beda, dalam mata uang lainnya di lima negara islam, (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Indonesia) memiliki dampak secara negatif tidak signifikan, perkembangan cadangan emas nilai yang ditunjukkan kecil 0.1460 dan perkembangan cadangan emas dapat di pengaruhi oleh factor lain..
3. Pengaruh harga minyak mentah terhadap perkembangan cadangan emas mempunyai pengaruh positif tidak signifikan, dikarenakan harga minyak mentah dunia dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti permintaan dan penawaran, sehingga apabila harga minyak naik maka posisi cadangan tetap stabil begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya harga minyak mentah di lima Negara Islam (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, Dan Indonesia) tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan cadangan emas, namun memiliki hubungan yang positif, nilai yang ditunjukkan sebesar 0.8078 dan perkembangan cadangan emas dapat di pengaruhi oleh factor lain.
4. Pengaruh harga emas terhadap perkembangan cadangan emas mempunyai pengaruh positif signifikan, di lima negara islam (Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, Indonesia) karena harga emas dan cadangan emas adalah satu kesatuan dalam komponin yang terikat apabila naik turunnya harga emas di tentukan oleh posisi naik turunnya cadangan emas pula. Nilai yang di tunjukkan sebesar 0.0088 dan perkembangan cadangan emas dapat di pengaruhi oleh harga emas.

DAFTAR PUSTAKA

(t.thn.).

(t.thn.).

(t.thn.).

(HR.Ahmad:16569 dari miqdam bin madikarib RA). (t.thn.).

Agustiar, M., Djafar, F., & Afrizal. (2017). *Counstruction of on Optimum Currency Area Index Anchored to the Gpld Dinar: The Case of Selected Islamic Countries.*

- Agustiar, M., Djafar, F., & Afrizal. (2017). *Construction of on Optimum Currency Area Index Anchored to the Gold Dinar: The Case of Selected Islamic*.
- Agustina, R. (2014). PENGARUH EKSPOR, IMPOR, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP CADANGAN DEvisa INDONESIA. *JURNAL WIRA EKONOMI MIKROSKIL*, 69.
- Al-qur'an. (t.thn.). Al-kahfi . ayat 19.
- AL-Tabrani, H. (t.thn.).
- Anderson, R. H. (1994). *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. (Y. Miarso, & dkk, Penerj.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Bacha, I. (2000). Asia's Currency Crisis: Between Forex Market Inadequacies and Currency Vulnerability. *The Economic and Financial Imperatives of Globalisation: A Islamic Respon*, 41-88.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis Dengan SPSS*. Salatiga: Salatiga Press.
- Boediono. (1998). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Bondan Noviantoro, E. Y. (2017). PENGARUH HARGA CPO,HARGA MINYAK MENTAH DUNIA, HARGA KARET DUNIA DAN KURS TERHADAP DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA. *JURNAL PARADIGMA EKONOMI*.
- Bordo, Dittmar, & Gavin. (2000). *Gold, Fiat Money and Price Stability*. Salatiga: Salatiga Press.
- Chapra, U. (2000). *Sistem Ekonomi Moneter*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- CNN INDONESIA .com. (t.thn.).
- Dauda. (2011). Effect of Public Educational Spending and Macroeconomic. *University of Lagos*. (2008). *dikutip dari www.hariancompas.com*.
- Dwiati, A. R. (2016). PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN INDONESIA DENGAN NILAI KURS SEBAGAI VARIABLE MODERATING. *NATIONAL CONFERENCE DAN CALL*.
- Elani Umiyatul Halim, L. Y. (2015). PENGARUH HARGA MINYAK, MENTAH DUNIA,HARGA EMAS,JUB, DAN KURS TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2001-2013. *ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA*.
- Fawziah. (2021). Unit Root Test. *M jurnsl*.

- Filus Raraga, M.Chabachib, Harjum Muharam. (2012). Analisis Pengaruh Harga minyak Dan Harga Emas Terhadap Hubungan Timbal - Balik Kurs Dan Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia . *Jurnal Bisnis Strategi* .
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gold Price.org. (t.thn.).
- (t.thn.). *GoldPrice.org*.
- Gujarati, D. N. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadist Al-tabrani Tentang Dinar Dirham*. (t.thn.).
- Handiani, S. (2014). Pengaruh Harga Emas, Harga Minyak Dunia Dan Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *E-Journal Graduate Unpar*.
- Hasan, A. (2017). Dilema Penerapan Emas (Dinar) sebagai Mata Uang Internasional: Studi Atas Politik Moneter Dunia. *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 51.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Grup.
- Index mundi.org. (t.thn.).
- Indrajaya, I. B. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa.
- InvestmentsIndonesia.com. (t.thn.).
- Kitab Majmu Tentang Fatwa Jual Beli Emas*. (t.thn.).
- Kompas.com. (t.thn.).
- Krugman, P. R., & Maurice, O. (2004). *Ekonomi Internasional dan Kebijakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Kuswantoro, M. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, 146-168.
- Langi, T. M., Masinambow, V., & Siwu, H. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Ekonomi*.
- Lipsey, R. G. (1995). *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- M.Kuswantoro. (2017). ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS, HUTANG LUAR NEGERI, DAN EKSPOR TERHADAP CADANGAN DEvisa INDONESIA. *JURNAL TIRTAYASA EKONOMI*.
- (t.thn.). *MACROTREND.Org*.
- Manurung, R. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Martin, E. T. (2014). Changes in Cesarean Delivery Rates by Gestational Age United States, 1996-2011. *Natinal Center for Health Statistics*.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzo, M., & Zagaglia, P. (2010). Gold and The US Dollar:Tales From The Turmoil. *Tales from the Turmoil*.
- Mishkin, F. S. (2001). *Financial Marklets And Institutions*. Wesley Champany.
- Miskhin, F. S. (2009). *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanang, M. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nisfiannoor, M. (2000). *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Noviantoro, & et.all. (2017). Pengaruh harga CPO, Harga Minyak Mentah Dunia, Harga Karet Dunia dan Kurs Terhadap Defisit Neraca Transaksi Berjalan Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomi Vol.12.No.1, Januari-Juni ISSN:2085-1960*.
- Obadi, S. K. (2017). The Impact of Low OilPrice On the Trade Balance of Balkan Countries and Their Energy Security. *Jurnal Energi Ekonomi Letters ISSN, 12*.
- Oei, I. (2009). *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ohin, Y. (2014, Februari Sabtu). Nilai Tukar. *Diakses dari gyu2 WordPress Web Site: <https://gyu2.wordpress.com>*.
- P3EI. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Pinem, J. R. (2009). Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Nilai Tukar Rupiah Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *The University Insitutional Repository*.
- Pundy, S., & Tan , S. (2017). Analisis Cadanga Devisa Indonesia Dan Faktor -Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Paradigma Ekonomika, 12*.
- Q.S.Ali Imron. (t.thn.).
- Roger, S. (1993). *Management of Foreign Exchange Raserves* . Basle: BIS.
- Rohmana, Y. (2013). Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews. *Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Setyowati, 89-102*.
- Rosyidi, S. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* . Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* . Jakarta: Rajawali Pers .

- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi Ed.1- Cet.3*. Jakarta : Rajawali Pers 2016.
- Saidi, Z. (2016, Februari Sabtu). Perlindungan Hukum atas penggunaan Dinar Dirham,. <https://zaimsaidi.co/perlindungan-hukum-atas-penggunaan-dinar-dirham>.
- Salvator, D. (1997). *Teori Ekspor*.
- Saqib, N., Masnoon, M., & Rafique, N. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth Pakistan. *Advances in Management & Applied Economics*, 35-45.
- Sayoga, P., & Syamsurijal, T. (2017). Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 25-30.
- (2017). *SESRIC*.
- Setiawan Deny, Isbah , U., & Ilyas, E. (2010). Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi*, 18.
- Shodiq, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Equilibrium*.
- Silviana, H. (2016). *Analisis Pengaruh Kurs Dan Inflasi Terhadap Neraca Perdagangan Di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) .*
- Suharyadi, & Purwanto. (2013). *Statistika untuk ekonomi dan Keuangan Modern*. Yogyakarta: BPFE.
- Surahman. (2016). Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Uang Anti Krisis. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1-2.
- Syakir, A. (2016, Juli). Inflasi Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Kajian Keislaman*, 87-96.
- Sylvia, H. (2014). Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *E-journal Graduate Unpar Part A-Econmics*, 90.
- Tadelilin, E. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Triyono. (2008). Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika. *Ekonomi Pembangunan*, 156-167.
- Vadillo, U. I. (1998). *Kembalikan Kegemilangan Mata Uang Islam*. Julai: Majalah Al Islam.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM UKPN.
- (2018). *Word,C.G*.
- Yaacob, S. E. (2012). The Reality of Gold Dinar Application In Malaysia. *Advances In Natural and Applied Sciences*, 341-347.

**DETERMINAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN BARAT**

*Determinants Of Environmental Quality In Sustainable Economic Development In West
Kalimantan*

Firman

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the determinants (relationship) between economic growth and poverty on the Environmental Quality Index (IKLH) in West Kalimantan, using data sourced from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia from 2007 - 2021. The analytical method used in this research is Pearson Product Moment analysis (r test), using times series data. The results of this research found that poverty and the West Kalimantan Environmental Quality Index (KLH) have a strong relationship, because they have a coefficient value of 0.688 or between 0.60 - 0.799 with the category of sustainable economic development, as well as the relationship between poverty and the Quality Index. Environment (IKLH) also has a relationship, although the relationship is very low, because it has a coefficient value of 0.195 or between 0.00 - 0.199, at the same time development in West Kalimantan is in the category of sustainable economic development.

JEL: Q01, P36, F44

Keywords: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

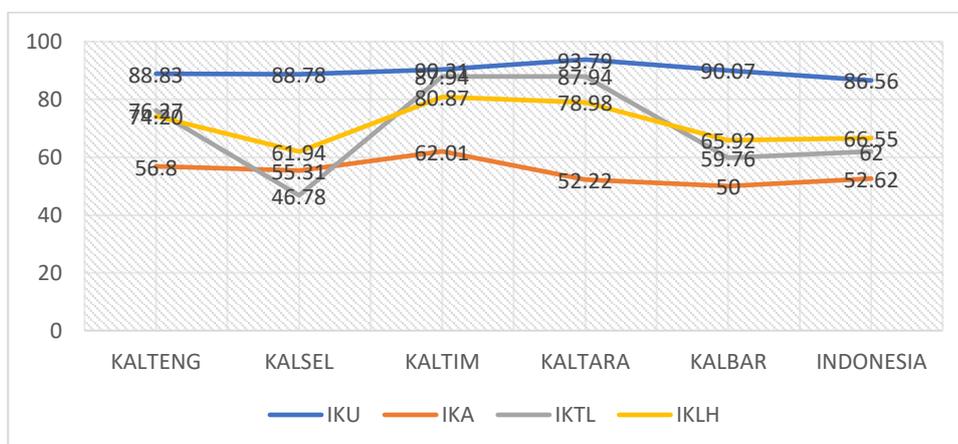
Persoalan lingkungan menjadi perhatian penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia global, karena kualitas lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam keberlangsungan hidup generasi dimasa mendatang dan bagi suatu wilayah, sehingga kualitas lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari pembangunan suatu negara, karena pengelolaan perekonomian suatu wilayah membutuhkan sumber daya alam yang berkualitas (Finanda & Gunarto, 2021). Jika suatu pembangunan tidak memperhatikan keberlangsung lingkungan hidup atau tidak berbasis terhadap sumberdaya pada akhirnya pembangunan tersebut akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri (Burhanuddin, 2016). Pentingnya persoalan kemiskinan dan perubahan lingkungan baik di negara maju maupun pada negara berkembang membuat program bersama yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Ridena, 2021).

17 (tujuh belas) tujuan dari permbangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Gols* (SDGs) pada perserikan bangsa-bangsa dengan perpaduan 3 indikator atau aspek, yakni aspek ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan (Cahyani, 2020). Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan aktivitas ekonomi yang menuntut penggunaan lahan yang menyebabkan alih fungsi lahan untuk difungsikan sebagai lahan pertanian,

serta pengalihan lingkungan menjadi lahan pemukiman (KLHK, 2020). Pemanfaatan sumberdaya alam (lingkungan) pada akhirnya akan menyebabkan eksternalitas (dampak) negatif dan positif, terutama eksternalitas negatif yakni menurunnya tingkat produktivitas lingkungan atau sumberdaya alam, kerusakan ekosistem, banjir, longsor dan kualitas lingkungan hidup yang terus mengalami penurunan. Tetapi dari sisi eksternalitas positifnya adalah dengan pemanfaatan lingkungan (sumber daya alam) maka masyarakat akan mendapatkan kebutuhan pangannya, menambah pendapatan masyarakat atau negara. Dengan peningkatan atau pengelolaan lingkungan yang baik akan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi.

Suatu pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan akan berdampak negatif terhadap negara dan generasi masa mendatang. Indonesia dengan sumberdaya alam yang melimpah negara dengan sumber kekayaan yang luar biasa, tidak hanya di darat, tetapi kekayaan juga terletak di laut, dan udara (Finanda & Gunarto, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan dimasa depan, pada jangka pendek akan berdampak besar terhadap pembangunan suatu wilayah, tetapi pada sisi lain pada jangka panjang pembangunan tersebut tidak akan berarti apa-apa dengan eksploitasi lingkungan karena pada masanya kerugian yang begitu besar tidak hanya pada soal lingkungan tetapi juga kerugian finansial, begitu juga persoalan kemiskinan yang membuat semua orang mengeksploitasi lingkungan demi dasar kebutuhan hidup dan keuntungan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan aktifitas kehidupan manusia yang melebihi kapasitas konsumsinya, salah satunya adalah didaerah perkambungan sebagian besar masyarakat masih menggunakan kayu untuk pembuatan rumah dan untuk kehidupan sehari-hari memasak masih menggunakan kayu bakar.

Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah sumberdaya alam yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2022 laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, lingkungan hidup di Kalimantan Barat terus mengalami tekanan sehingga Kalimantan Barat perlu mengedepankan pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan meminimalisir eksploitasi sumberdaya alam. Jika dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Pulau Kalimantan pada tahun 2019, Kalimantan Barat (65,92) merupakan daerah dengan tingkat kualitas hidup Nomor 4 paling rendah dan hanya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebesar 61,94 dan dibawah Indonesia (66,55).



Gambar 1. Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) Tahun 2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indeks Kualitas Udara (IKU) yang terdiri dari 2 parameter yakni SO₂ dan NO₂, Indeks Kualitas Air (IKA) yang terdiri dari 7 parameter yakni TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang terdiri dari Luas Tutupan Hutan. Dimana pada tahun 2019, IKU di Kalimantan Barat tertinggi No 3 (Pulau Kalimantan) yakni sebesar 90.07 di bawah Kalimantan Utara (90.79), dan Kalimantan Timur, sedangkan untuk indikator IKA, Kalimantan Barat berada pada posisi terendah yakni sebesar 50.00 dan untuk indikator IKTL berada pada posisi terendah Nomor 4 dibandingkan dengan provinsi di Pulau Kalimantan lainnya, yakni sebesar 59.76 hanya berada di atas Kalimantan Selatan (46.78), tetapi jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2015-2018 IKLH Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan tingkat kontribusi terbesar terhadap Indeks Lingkungan Hidup terbesar nomor 5 se Indonesia dibawah, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oleh sebab latarbelakang di atas peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat

Kemiskinan dengan kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan yang kuat, karena dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mengakibatkan tingkat lingkungan semakin rusak (Finanda & Gunarto, 2021), dimana penduduk miskin jika ingin bertahan hidup dengan keterbatasan akses dalam mencari kerja dan tidak memiliki alternatif lain dengan cara pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan (*carrying capacity*) dari sumber daya alam yang ada (Suryani, 2018). Kemiskinan dan Kualitas lingkungan saling mempengaruhi jika tidak dipergunakan dengan baik, dimana kemiskinan muncul sebab dari rusaknya lingkungan atau juga sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan yang semakin meningkat dan mengakibatkan bias berkepanjangan yang tidak berujung (Reswita et al., 2021).

Hasil penelitiannya (Setyadharma et al., 2020), yang menyatakan bahwa kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan dengan kemiskinan, dimana kerusakan lingkungan dengan kemiskinan dan cara penanggulannya. Selain itu juga proyek-proyek yang pro kaum miskin harus terus ditingkatkan agar pemanfaatan lingkungan juga memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan, seperti pasokan air, sanitasi dasar, perlindungan bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan terutama pencegahan terhadap penyakit yang mudah tertular (Bucknall et al., 2010). Ada perbedaan yang mendasar antara kemiskinan dipertanian dan di perdesaan dimana, sebagian besar masyarakat yang hidup di perdesaan memiliki ketergantungan langsung terhadap kondisi alam dan sumber daya alam dari pada didaerah perkotaan, tetapi juga ada juga masyarakat miskin memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam melindungi posisi lingkungan, karena berfikir demi keberlangsungan matapencarian sedangkan kaum miskin kota hanya bergantung pada kesehatan saja (Rai, 2019). Sehingga peningkatan lingkungan juga dapat menjadi jalan yang efektif dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin (Annex, 2010). Dalam penelitiannya (Ridena, 2021) mengemukakan bahwa kemiskinan di daerah perkotaan memiliki perbedaan dengan kemiskinan di perdesaan terhadap kualitas lingkungan, dimana penduduk miskin didaerah perkotaan lebih cenderung dan berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup dibandingkan dengan penduduk miskin yang hidup didaerah perdesaan.

H₁ = Kemiskinan memiliki hubungan yang kuat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat

Apalagi ketergantungan penurunan lingkungan hidup di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh penurunan kualitas lingkungan hidup yang mana diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia (Ridena, 2021). Sumber daya alam memiliki peranan yang penting pada suatu daerah dimana lingkungan tersebut dapat menjaga kelestarian pendapatan dan sumberdaya alam, tetapi pertumbuhan yang mengarah pada eksploitasi terhadap pada jangka pendek akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi pada jangka panjang akan merusak lingkungan dan mengikis sumberdaya alam. Tetapi jika perekonomian suatu daerah yang memiliki perhatian terhadap kualitas lingkungan terutama efisien terhadap penggunaan sumberdaya alam akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang (Hardini, 2011). Pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan tidak menjadi keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup rusak, pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan, artinya pembangunan ekonomi harus melihat dapat terhadap kerusakan alam agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri (Burhanuddin, 2016).

H₂ = Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Hubungan yang kuat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan data *Cross Section* (Runtun Waktu) pada Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat, dimana variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Kemiskinan Kalimantan Barat (persentase penduduk miskin dalam persen) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, peneliti menggunakan analisis Korelasi *Pearson Product Moment* (r). Untuk mendapatkan hasil dan penjelasan tentang kuat atau tidaknya hubungan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan alat bantu statistik program E-Views 10, dan digunakan interpretasi Koefisien Korelasi (r) sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Cukup Kuat
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sugiyono dalam Firman, 2023

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kemiskinan (%) dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2007-2021, selanjutnya oleh peneliti dioleh dengan menggunakan menggunakan analisis deskripti, yakni untuk menggambarkan keadaan dari data yang diteliti, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

	IKLH	KEMISKINAN	PE
Mean	73.28600	8.594667	4.858667
Median	72.59000	8.170000	5.170000
Maximum	87.24000	12.91000	6.050000
Minimum	65.92000	7.150000	-1.820000
Std. Dev.	5.198750	1.533115	1.900691
Skewness	1.175147	1.782726	-3.142737
Kurtosis	4.585068	5.479437	11.70482
Jarque-Bera	5.022703	11.78753	72.05072
Probability	0.081158	0.002757	0.000000
Sum	1099.290	128.9200	72.88000
Sum Sq. Dev.	378.3780	32.90617	50.57677
Observations	15	15	15

Sumber: *Output Eviews* (data diolah), 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada setiap variabel yang diteliti yang terdiri dari 15 data atau tahun yakni pada tahun 2007-2021, dengan penjelasan per variabel sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat pada tahun tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya adalah sebesar 65.92000, dan nilai maksimumnya adalah sebesar 87.24000, dengan standar deviasi sebesar 5.198750, sedangkan untuk nilai meannya atau rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat sebesar 73.28600.
2. Kemiskinan Kalimantan Barat pada tahun tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya adalah sebesar 7.150000, dan nilai maksimumnya adalah sebesar 12.91000, dengan standar deviasi sebesar 1.533115, sedangkan untuk nilai meannya atau rata-rata persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 8.594667.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya adalah sebesar -1.820000, dan nilai maksimumnya adalah sebesar 6.050000, dengan standar deviasi sebesar 1.900691, sedangkan untuk nilai meannya atau rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 4.858667.

Koefisien korelasi merupakan gambaran hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, hubungan tersebut dilihat dari nilai koefisien korelasi yang dihasilkan dalam pengujian koefisien korelasi, hasilnya tersebut dapat menjelaskan apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat atau sangat rendah. Berikut adalah hasil dari uji korelasi *Pearson Product Moment*.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

	IKLH	KEMISKINAN	PE
IKLH	1.000000	0.688730	0.195959
KEMISKINAN	0.688730	1.000000	0.354819
PE	0.195959	0.354819	1.000000

Sumber: *Output Eviews* (data diolah), 2023

Dari hasil pengujian Korelasi Pearson Product Moment di atas diperoleh nilai koefisien korelasi variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan kemiskinan sebesar 0.688730, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.60 – 0.799 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Kuat. Sedangkan untuk hasil koefisien korelasi variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 0.195959, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.00 – 0.199 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Sangat Rendah.

Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat

Pada hasil uji korelasi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi variabel Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 0.688730, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.60 – 0.799 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Kuat. Kemiskinan dengan kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan yang kuat, karena dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mengakibatkan tingkat lingkungan yang semakin rusak (Finanda & Gunarto, 2021), dimana penduduk miskin jika ingin bertahan hidup karena keterbatasan akses dalam mencari kerja dan tidak memiliki alternatif lain yang dengan cara pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan (*carrying capacity*) dari sumber daya alam yang ada (Suryani, 2018). Kemiskinan dan Kualitas lingkungan saling mempengaruhi jika tidak dipergunakan dengan baik, dimana kemiskinan muncul sebab dari rusaknya lingkungan atau juga sebaliknya lingkungan rusak karena kemiskinan yang semakin meningkat dan mengakibatkan bias berkepanjangan yang tidak berujung (Reswita et al., 2021).

Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitiannya (Setyadharna et al., 2020), yang menyatakan bahwa kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan dengan kemiskinan, dimana kerusakan lingkungan dengan kemiskinan dan cara penanggulannya. Selain itu juga proyek-proyek yang pro kaum miskin harus terus ditingkatkan agar pemanfaatan lingkungan juga memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan, seperti pasokan air, sanitasi dasar, perlindungan bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan terutama pencegahan terhadap penyakit yang mudah tertular (Bucknall et al., 2010). Ada perbedaan yang mendasar antara kemiskinan dipertkotaan dan di perdesaan dimana, sebagian besar masyarakat yang hidup di perdesaan memiliki ketergantungan langsung terhadap kondisi alam dan sumber daya alam dari pada didaerah perkotaan, tetapi juga ada juga masyarakat miskin memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam melindungi posisi lingkungan, karena berfikir demi keberlangsungan mata pencaharian sedangkan kaum miskin kota hanya bergantung pada kesehatan saja (Rai, 2019). Sehingga peningkatan lingkungan juga dapat menjadi jalan yang efektif dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin (Annex, 2010). Dalam penelitiannya (Ridena, 2021) mengemukakan bahwa kemiskinan di daerah perkotaan memiliki perbedaan dengan kemiskinan di perdesaan terhadap kualitas lingkungan, dimana penduduk miskin didaerah perkotaan lebih cenderung dan berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup dibandingkan dengan penduduk miskin yang hidup didaerah perdesaan.



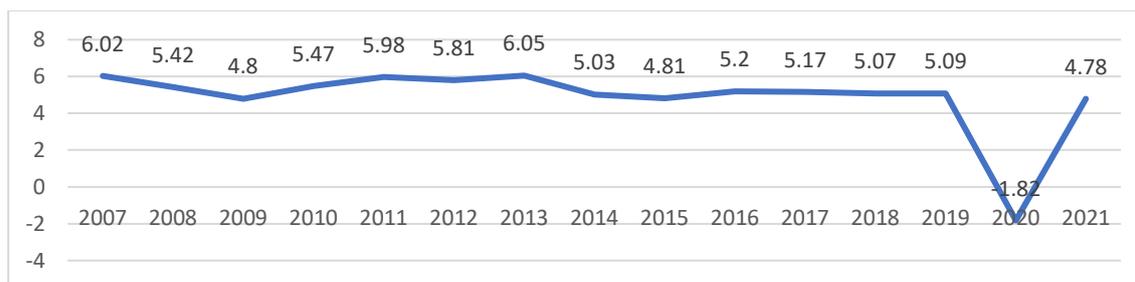
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin (%) Kalimantan Barat Tahun 2007-2021

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik, 2023

Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga harus dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin, baik dari program peningkatan lingkungan ataupun kebijakan. Karena peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan jumlah penduduk miskin merupakan agenda besar yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Sustainable Development Goals* merupakan capaian sebuah pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk setempat dalam secara keberlanjutan, artinya pembangunan yang menjaga kesimbangan pendapatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup merupakan contoh dari SDGs (Muhammad, 2021). Jika melihat perbandingan antara peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan kontribusi ke 5 terbesar terhadap IKLH Indonesia, serta diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan 2021. Artinya bahwa peningkatan IKLH dan penurunan jumlah penduduk miskin bukti bahwa pembangunan di Kalimantan Barat adalah pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat

Koefisien korelasi variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 0.195959, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.00 – 0.199 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Sangat Rendah. Artinya walaupun sangat rendah hubungannya antara ekonomi dengan lingkungan hidup tetap keduanya sangat penting untuk sama-sama ditingkatkan. Struktur ekonomi yang mengalami perubahan dari sektor primer menjadi sektor industri dapat mempengaruhi kestabilan lingkungan dalam rangka mengurangi penurunan lingkungan yang semakin memburuk (Muhammad, 2021). Apalagi ketergantungan penurunan lingkungan hidup di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh penurunan kualitas lingkungan hidup yang mana diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia (Ridena, 2021). Sumber daya alam memiliki peranan yang penting pada suatu daerah dimana lingkungan tersebut dapat menjaga kelestarian pendapatan dan sumberdaya alam, tetapi pertumbuhan yang mengarah pada eksploitasi terhadap pada jangka pendek akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi pada jangka panjang akan merusak lingkungan dan mengikis sumberdaya alam. Tetapi jika perekonomian suatu daerah yang memiliki perhatian terhadap kualitas lingkungan terutama efisien terhadap penggunaan sumberdaya alam akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang (Hardini, 2011). Pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan tidak menjadi keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup rusak, pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan, artinya pembangunan ekonomi harus melihat dapat terhadap kerusakan alam agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri (Burhanuddin, 2016).



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2007-2021

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik, 2023

Sektor perekonomian Kalimantan Barat lebih banyak didominasi atau kontribusi terbesar terhadap perekonomiannya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pada tahun 2021 sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 23,94% atau sebesar 34,54 triliun rupiah terhadap PDRB Kalimantan Barat. Walaupun sumber terbesar pendapatan Kalimantan Barat dari sektor pertanian tetapi Kalimantan Barat mampu menjaga keberlangsungan ekosistem terbukti Kalimantan Barat masih memberikan kontribusi nomor 5 (lima) terbesar terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia, artinya pertumbuhan ekonomi yang yang tinggi yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat, sehingga terjadi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

5. SIMPULAN

Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki nilai koefisien sebesar 0.688730, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.60 – 0.799 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Kuat. Penurunan kemiskinan di Kalimantan Barat pada tahun 2007 – 2021 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dibarengi dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan kontribusi ke 5 terbesar terhadap IKLH Indonesia. Artinya bahwa peningkatan IKLH dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat bukti bahwa pembangunan di Kalimantan Barat adalah pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki nilai koefisien yakni sebesar 0.195959, yang terletak pada interval koefisien diantara 0.00 – 0.199 yang memiliki arti bahwa hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat adalah Sangat Rendah.

Walaupun sektor perekonomian Kalimantan Barat sebagian besar atau kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sebesar 23,94%, tetapi Kalimantan Barat mampu menjaga keberlangsungan ekosistem terbukti Kalimantan Barat masih memberikan kontribusi nomor 5 (lima) terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia, artinya pertumbuhan ekonomi yang yang tinggi yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat, sehingga terjadi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annex. (2010). Poverty and Environment. *Making Sustainable Commitments — An Environment Strategy for the World Bank*, 213–226. <https://doi.org/10.4324/9781849772693>
- Bucknall, J., Kraus, C., & Pillai, P. (2010). Poverty and Environment: Background Paper for the World Bank Environment Strategy. *The ACP-EU Courier*, 2000(189), 28–56. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,shib&db=awn&AN=NIZA-200005375&site=ehost-live>
- Burhanuddin. (2016). Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal EduTech*, 11(2), 50–57.
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Indonesian State Law Review*, 2(2), 168–179. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38472>
- Finanda, N., & Gunarto, T. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Serta Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosial Sains*, 2(1), 193–202. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i1.324>
- Hardini, D. A. (2011). Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Di Kota Semarang Tahun 2001-2008. In *Universitas Negeri Semarang*.
- KLHK. (2020). Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 14–50.
- Muhammad, F. (2021). Analisis Keterkaitan Koservasi Lingkungan Dengan Pembangunan Ekonomi. *Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya Malang*.
- Rai, J. (2019). Understanding Poverty-Environment Relationship from Sustainable Development Perspectives. *Journal of Geography, Environment and Earth Science International*, February, 1–19. <https://doi.org/10.9734/jgeesi/2019/v19i130077>
- Reswita, Mulyasari, G., & Reflis. (2021). Hubungan Degradasi Lingkungan Dengan Kemiskinan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1579–1584. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjTif2qlOf5AhWOALcAHbEFDPQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fstp-mataram.e-journal.id%2FJIP%2Farticle%2Fdownload%2F936%2F735%2F&usg=AOvVaw1EMStNEVwpmKkkmapLJPw>
- Ridena, S. (2021). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- Setyadharma, A., Oktavilia, S., Nihayah, D. M., Bowo, P. A., & Wahyuningrum, I. F. S. (2020). The trade-off between Poverty and Environmental Degradation: Evidence from Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 448(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012065>
- Suryani, A. S. (2018). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 35–63. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.991>

KAJIAN AKUNTANSI EMISI KARBON DAN GAS RUMAH KACA DI INDONESIA

Eliza Noviriani¹

Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia

Sri Mulyati²

Prodi Agrobisnis, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia

ABSTRACT

The development of industry in various lines cannot be separated from the breakthrough of the industrial revolution which refers to the maximization of changes in industry, especially the production of goods and services. This industrial change is intended towards digitalization, automation and faster connectivity so that productivity becomes more effective and efficient. Behind these astonishing transformations, it can be said that the ongoing progress of civilization is like a double-edged sword. On the one hand, human life is made easier by rapid development in all aspects. However, on the other hand there are impacts resulting from this sustainable industrialization. As a form of accountability for the environmental impacts caused, companies are required to report sustainability reports. Sustainability reports are a means for companies to reveal environmental and social responsibility practices that have been carried out to "atone for the sins" of their business activities towards all stakeholders. The existence of this obligation further emphasizes the position of the company and related parties to always pay attention to environmental waste. This research aims to conduct an accounting study of carbon and greenhouse gas emissions. This is because the study of accounting for carbon and greenhouse gas emissions related to the calculation, determination and accurate disclosure of carbon and greenhouse gas emissions will be useful as a basis for decision making and direction of company action regarding social and environmental responsibility.

JEL: *Corporate Governance, Economic Development, Environment*

Keywords: *Carbon & Greenhouse Gas Emissions, Globalization, Industrialization, Sustainability Reports.*

1. PENDAHULUAN

Tren perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan perubahan secara universal hampir di seluruh aspek kehidupan sehingga manusia dituntut untuk responsif dan adaptif terhadap dampak dari kemajuan tersebut. Selain teknologi yang demikian canggih, perkembangan industri modern juga merupakan salah satu aspek yang tidak luput mengalami perubahan masif. Perkembangan industri di berbagai lini tidak terlepas dari gebrakan revolusi industri yang merujuk pada maksimalisasi perubahan dalam industri khususnya produksi barang maupun jasa. Secara lebih rinci, perubahan industri ini dimaksudkan menuju arah digitalisasi, otomasi dan konektivitas yang lebih cepat sehingga produktivitas menjadi semakin efektif dan efisien.

Di balik berbagai transformasi yang mencengangkan tersebut, dapat dikatakan kemajuan peradaban yang sedang terjadi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kehidupan manusia dimudahkan dengan pesatnya pembangunan di seluruh aspek. Namun, di sisi lain terdapat dampak

yang ditimbulkan dari industrialisasi berkelanjutan ini. Pesatnya perkembangan industri modern menyebabkan peningkatan aktivitas produksi dan akibatnya secara bersamaan konsumsi sumber daya turut mengalami peningkatan sehingga menghasilkan sejumlah besar limbah dalam bentuk padat, cair dan gas. Dampak negatif industrialisasi makin diperparah dengan tingginya permintaan manusia akibat pertumbuhan penduduk dan gaya hidup konsumtif. Bagi lingkungan yang tak berujung, kondisi ini mendorong sektor industri untuk “menggenjot” produksi massal dan menciptakan lebih banyak limbah bagi lingkungan salah satunya emisi karbon dan gas rumah kaca.

Pada dasarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengungkapkan praktek tanggung jawab lingkungan dan sosial yang telah dilakukan untuk “menebus dosa” dari aktivitas bisnisnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Adanya kewajiban ini semakin mempertegas posisi perusahaan serta pihak-pihak terkait untuk senantiasa menaruh perhatian pada limbah lingkungan. Oleh sebab itu, kajian akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca dalam hal ini terkait perhitungan, penetapan hingga pengungkapan atas emisi karbon dan gas rumah kaca yang akurat akan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan arah tindakan perusahaan terkait tanggung jawab sosial serta lingkungan.

2. KAJIAN LITERATUR

Emisi karbon merupakan gas yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran senyawa karbon seperti CO₂, solar dan bahan bakar lainnya yang turut menjadi penyumbang perubahan iklim bumi sehingga menjadi cenderung sulit diprediksi (Bawa et al., 2023; Kiswanto et al., 2023; Ratnatunga & Balachandran, 2009). Salah satu efek yang ditimbulkan dari emisi karbon adalah pemanasan global atau dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Dalam hal ini, emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas*) yang berlebihan akan terperangkap di bumi sehingga suhu bumi menjadi meningkat (Hazaea et al., 2023a; Miller et al., 2022).

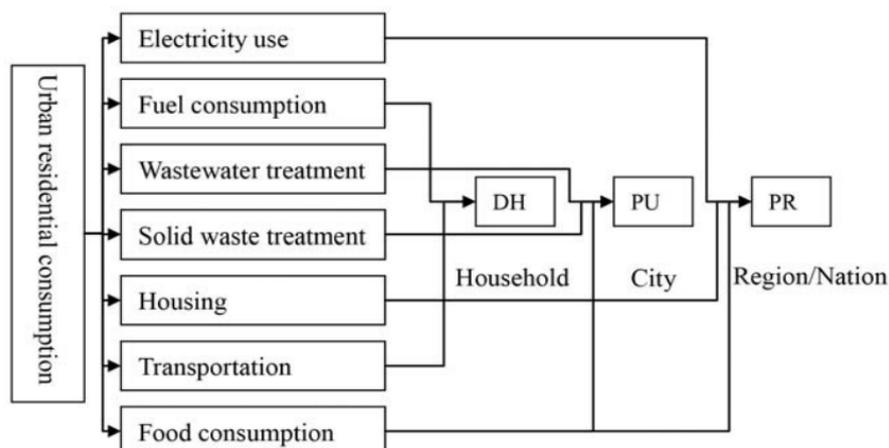
Gas rumah kaca berasal dari aktivitas manusia seperti konsumsi bahan bakar, penguraian bahan organik, kegiatan industri dan penggunaan pupuk (Ratmono et al., 2022). Peningkatan efek yang ditimbulkan oleh gas rumah kaca semakin buruk sejak revolusi industri (He et al., 2022). Artinya, tidak dapat dipungkiri sektor industri khususnya manufaktur merupakan salah satu penyumbang emisi gas di atmosfer. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa menurut Ratmono et al., (2022) dan Suryani & Wijayati (2019), jenis korporasi yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yakni industri manufaktur, sektor pertanian, kehutanan, pertambangan serta energi (transportasi).

Sektor pertanian nyata-nyata turut menyumbang peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Flysjo (2012) bahwa emisi gas rumah kaca yang memiliki keterkaitan dengan produk-produk pertanian khususnya produk hewani berbeda dengan produk sektor-sektor lain:

“...For most sectors fossil carbon dioxide (CO₂) dominates GHG emissions, while in agriculture methane (CH₄) and nitrous oxide (N₂O) are the most important contributors. In addition, biogenic CO₂ from land use change (LUC) contributes significantly in agriculture.”

Sementara itu, selain sektor-sektor dominan skala besar sebut saja industri manufaktur, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya, aktivitas primer manusia yang rutin dilaksanakan sehari-hari turut menghasilkan gas emisi. Sebut saja emisi yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan bermotor (Kissinger et al., 2013). Tidak hanya itu, aktivitas manusia yang tanpa disadari dapat menyumbang gas emisi bagi atmosfer diantaranya penggunaan perangkat elektronik, konsumsi

bahan bakar hingga konsumsi makanan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1 berikut (Lin et al., 2013):



Gambar 1. Aktivitas Rumah Tangga Penyumbang Gas Emisi

Semakin sering intensitas serta frekuensi aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung maka akan semakin besar dampaknya bagi lingkungan. Bayangkan saja bila pertumbuhan penduduk terus meroket yang menandakan kebutuhan terhadap barang maupun jasa turut meningkat, sektor industri dapat dipastikan akan semakin menggenjot aktivitas produksinya. Luar biasa tidak terbayangkan akan menjadi seperti apa bumi beberapa masa ke depan. Oleh sebab itu, mengingat dampak serius tersebut diperlukan penanganan yang komprehensif tidak hanya dari entitas melainkan tentunya kerjasama berbagai pihak.

Bentuk penanganan terhadap dampak emisi karbon dan gas rumah kaca diantaranya melalui pembentukan memorandum atau kesepakatan internasional yaitu Protokol Kyoto mengenai kewajiban untuk mengurangi limbah emisi karbon. Pada awalnya, Protokol Kyoto hanya diikuti oleh 39 negara maju yang tergabung dalam kelompok negara Annex 1, namun setelah beberapa waktu semakin banyak negara yang bergabung (Irwhantoko & Basuki, 2016). Selain Protokol Kyoto, negara-negara di dunia juga menandatangani Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Suryani & Wijayati, 2019). Di sisi entitas, berbagai negara telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan serangkaian prosedur pengungkapan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya dalam sebuah laporan berkelanjutan (*sustainability report*). Tujuannya agar komitmen yang telah disepakati dapat berjalan dengan sinergitas berbagai pihak.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam ranah kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan konteks penelitian. Proses analisis merujuk pada sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel bentuk publikasi lain sejenis. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Noviriani et al., (2023) bahwa penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan sumber perpustakaan atau referensi-referensi.

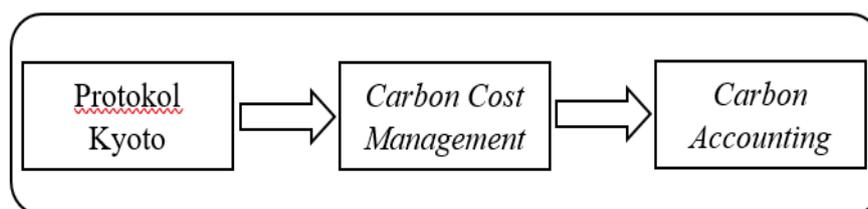
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemunculan akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca berawal dari diadakannya sebuah konvensi internasional di Kyoto Jepang pada tahun 1997 yang menghasilkan kesepakatan bersama atau dikenal dengan istilah Protokol Kyoto (Irwhantoko & Basuki, 2016; Dwijayanti, 2011). Implikasi dari Protokol Kyoto mencetuskan isu akuntansi karbon (*carbon accounting*) yaitu ketentuan bagi entitas untuk melakukan serangkaian proses akuntansi yang meliputi aktivitas mengidentifikasi, mengukur, menilai, menyajikan hingga mengungkapkan emisi karbon dan gas rumah kaca dalam laporan perusahaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kiswanto et al., (2023) bahwa akuntansi karbon merupakan bidang ekonomi bisnis yang sedang berkembang dan mencakup berbagai kegiatan termasuk pengukuran, perhitungan, pemantauan, pelaporan serta audit emisi karbon dan gas rumah kaca di sebuah organisasi pada tingkat proses, produk atau rantai pasokan.

Artinya, dalam kaitannya dengan isu lingkungan khususnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, akuntansi karbon memuat kajian lingkungan yang dimanifestasikan dalam sebuah aktivitas bernilai ekonomi untuk selanjutnya diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut mengingatkan aktivitas bisnis menghasilkan dampak lingkungan yang selayaknya diidentifikasi, diukur, dinilai, disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan dalam bentuk satuan yang dapat diukur (bernilai ekonomi) sebagaimana prinsip pengukuran. Hal ini senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh He et al., (2022) yakni akuntansi karbon membahas integrasi aspek mitigasi perubahan iklim dalam akuntansi dan seringkali disebut sebagai penghitungan karbon.

Dalam lingkup akuntansi, kajian mengenai emisi karbon dan gas rumah kaca pada dasarnya terbagi menjadi dua pembahasan utama, yakni penghitungan biaya karbon (*carbon cost management*) dan pengungkapan biaya tersebut dalam laporan perusahaan. Pengungkapan biaya karbon meliputi suatu tahapan pengukuran, perhitungan, pemantauan serta pelaporan. Artinya, penghitungan biaya karbon termasuk dalam bagian siklus akuntansi karbon. Hal ini dipertegas oleh pendapat Kiswanto et al., (2023) bahwa penghitungan karbon adalah bagian dari akuntansi begitu pula dengan akuntansi lingkungan hidup yang timbul dari perhitungan biaya lingkungan hidup tersebut.

Manajemen biaya karbon merupakan implikasi dari ketentuan dalam Protokol Kyoto yang mengharuskan perusahaan mengatur ambang batas emisi gas CO₂ yang dihasilkan dari aktivitas produksinya untuk selanjutnya diperluas menjadi serangkaian tahapan pada akuntansi karbon (*carbon accounting*) sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2 (Dwijayanti, 2011). Penerapan akuntansi karbon bertujuan untuk menekan emisi karbon dan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sesuai dengan standar yang telah disepakati guna wujud tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam hal ini, jika emisi karbon yang dihasilkan berada di atas ketentuan maka perusahaan diharuskan mengurangi limbah gas tersebut. Entitas juga diwajibkan untuk mengungkapkan akuntansi karbon terhadap para pihak yang berkepentingan.



Gambar 2. Alur Latar Belakang Akuntansi Karbon

Perhitungan biaya karbon terdiri atas beberapa komponen biaya diantaranya biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal (Dwijayanti, 2011); biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya modal, biaya energi serta biaya lingkungan

(Kissinger et al., 2013; Zhao-hui et al., 2020). Klasifikasi biaya-biaya ini membentuk keseluruhan biaya yang dibutuhkan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan atas emisi karbon yang dihasilkan.

Perusahaan melakukan pengungkapan terkait emisi karbon dan gas rumah kaca melalui berbagai cara diantaranya pengungkapan kepada lembaga pemerintah berdasarkan peraturan tertentu, pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan atau secara terpisah dalam laporan keberlanjutan yang dikenal sebagai laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) maupun secara sukarela melalui CDP (Hazaea et al., 2023b; He et al., 2022; Marlowe & Clarke, 2022; Ratnatunga & Balachandran, 2009). Berbagai bentuk pengungkapan tersebut tergantung situasi dan kondisi entitas. Bagi entitas dalam lingkup negara yang mengharuskan adanya pengungkapan gas karbon maka entitas diwajibkan mengikuti ketentuan kenegaraan tersebut. Sementara itu, pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan sementara ini masih merupakan hal yang sukarela (*voluntary*) bagi perusahaan khususnya di Indonesia.

Hingga saat ini, riset akuntansi mengenai emisi karbon dan gas rumah kaca dilakukan di berbagai tempat serta waktu dengan jenis metode dan temuan yang variatif. Kissinger et al., (2013) menawarkan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung emisi gas rumah kaca di wilayah perkotaan yaitu dengan mengidentifikasi produk-produk yang sering dikonsumsi di kota lalu menentukan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari setiap produk tersebut. Hal ini mengingat selama ini emisi gas rumah kaca hanya difokuskan pada sektor industri tanpa merujuk ke produk-produk yang mayoritas digunakan khususnya wilayah perkotaan. Padahal, identifikasi tersebut pada akhirnya akan menghasilkan temuan industri sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca ditinjau dari banyaknya produk yang dihasilkan. Sementara itu, Miller et al., (2022) melakukan studi guna menghitung emisi karbon dan gas rumah kaca yang dihasilkan dari pemakaian listrik ribuan perumahan, komersial, industri dan fasilitas pertanian di seluruh Amerika untuk kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan penghitungan emisi per jam.

Beberapa peneliti menggunakan metode statistik (*statistical method*) dalam eksplorasi akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca untuk menguji keterkaitan berbagai variabel. Irwhantoko & Basuki (2016) menguji keterkaitan pengungkapan emisi karbon pada ukuran perusahaan, profitabilitas, kompetisi, pertumbuhan, rasio utang terhadap ekuitas dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 19 perusahaan manufaktur. Di sisi lain, Suryani & Wijayati (2019) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan pada pengungkapan emisi gas rumah kaca. Menggunakan metode yang sama, Krisnawanto & Solikhah (2019) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan serta paparan media terhadap pengungkapan emisi karbon dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan populasi 43 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia. Hubungan antara akuntansi emisi karbon dengan struktur tata kelola perusahaan pada 69 perusahaan dieksplorasi oleh Ratmono et al., (2022) menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Berbeda dengan beberapa riset diatas, Lin et al., (2013) dalam penelitiannya menyajikan penghitungan emisi gas rumah kaca yang berasal dari konsumsi perumahan di Kota Xiamen dengan metode survei.

Di samping riset dengan metode lapangan (*field method*), riset mengenai akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca banyak dilakukan melalui kajian literatur (lihat Hazaea et al., 2023a; He et al., 2022; Kiswanto et al., 2023; Marlowe & Clarke, 2022; Ratnatunga & Balachandran, 2009). Para peneliti melakukan pemetaan (*mapping*) berbagai literatur yang membahas akuntansi emisi

karbon dan gas rumah kaca. Hasilnya, mayoritas pembahasan pada pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca sebagai tindak lanjut kesepakatan Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

Di masa mendatang, riset mengenai akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca dapat mengeksplorasi ranah perilaku sebagaimana diungkapkan oleh Cornforth (2009) bahwa kajian lingkungan hidup selayaknya didasarkan pada konsepsi yang koheren tentang sifat manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran manusia sebagai pengguna lingkungan sehingga perilaku manusia akan berdampak pada lingkungan. Dalam hal ini, kajian mengenai cara seseorang menerima informasi baru atau motivasi manusia untuk menjalankan akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca dapat menjadi pertimbangan selanjutnya.

5. SIMPULAN

Isu terkait akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca semakin menjadi perhatian serius saat ini khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya entitas, organisasi, pemerintah, peneliti hingga masyarakat. Namun secara empiris, perhitungan hingga pengungkapan emisi karbon dapat dikatakan cenderung terbatas. Akuntansi karbon (*carbon accounting*) masih berupa pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) bagi perusahaan. Padahal jika merunut pada Protokol Kyoto maupun Perjanjian Paris, telah banyak negara yang berkomitmen dan meratifikasi kesepakatan terkait ketentuan emisi karbon. Akuntansi karbon bagi suatu entitas berperan penting untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, pengurangan emisi karbon sejatinya akan berkontribusi masif dan signifikan terhadap kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, dengan penerapan akurasi akuntansi emisi karbon dan gas rumah kaca, tidak hanya bagi entitas, para *stakeholder* lain juga turut andil menyumbangkan lingkungan yang layak huni di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alana Cornforth. (2009). Behaviour Change: Insights for Environmental Policy Making from Social Psychology and Behavioural Economics. *Policy Quarterly*, 5(4), 21–29.
- Anna Flysjo. (2012). *Greenhouse gas emissions in milk and dairy product chains improving the carbon footprint of dairy products* (1st ed., Vol. 1). Aarhus University.
- Bawa, D., Ahmed, A., Darden, D., Kabra, R., Garg, J., Bansal, S., Olsen, E., Atkins, D., Rahim, A., Pham, N., Gopinathannair, R., Pothineni, N. V. K., Park, P., Tummala, R., Koerber, S., Natale, A., & Lakkireddy, D. (2023). Impact of Remote Cardiac Monitoring on Greenhouse Gas Emissions. *JACC: Advances*, 2(3), 100286. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2023.100286>
- Hazaea, S. A., Al-Matari, E. M., Alosaimi, M. H., Farhan, N. H. S., Abubakar, A., & Zhu, J. (2023a). Past, present, and future of carbon accounting: Insights from scholarly research. *Frontiers in Energy Research*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.958362>
- Hazaea, S. A., Al-Matari, E. M., Alosaimi, M. H., Farhan, N. H. S., Abubakar, A., & Zhu, J. (2023b). Past, present, and future of carbon accounting: Insights from scholarly research. *Frontiers in Energy Research*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.958362>
- He, R., Luo, L., Shamsuddin, A., & Tang, Q. (2022). Corporate carbon accounting: a literature review of carbon accounting research from the Kyoto Protocol to the Paris Agreement. *Accounting & Finance*, 62(1), 261–298. <https://doi.org/10.1111/acfi.12789>
- Irwhantoko, I., & Basuki, B. (2016). Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2). <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.92-104>
- Kissinger, M., Sussmann, C., Moore, J., & Rees, W. E. (2013). Accounting for Greenhouse Gas Emissions of Materials at the Urban Scale-Relating Existing Process Life Cycle Assessment

- Studies to Urban Material and Waste Composition. *Low Carbon Economy*, 04(01), 36–44. <https://doi.org/10.4236/lce.2013.41004>
- Kiswanto, K., Hajawiyah, A., Harjanto, A. P., & Setyarini, E. T. (2023). Twelve Years Research Journey of Carbon Accounting. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 246–254. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14288>
- Kurniawan Krisnawanto, & Badingatus Solikhah. (2019). The Determinants of Carbon Emission Disclosure Moderated by Institutional Ownership. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 135–142.
- Marlowe, J., & Clarke, A. (2022). Carbon Accounting: A Systematic Literature Review and Directions for Future Research. *Green Finance*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.3934/GF.2022004>
- Miller, G. J., Novan, K., & Jenn, A. (2022). Hourly accounting of carbon emissions from electricity consumption. *Environmental Research Letters*, 17(4), 044073. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6147>
- Noviriani, E., Mukaromah, L., Zurmansyah, E., & Munandar. (2023). Studi Literatur Industrialisasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.587>
- Patricia Febrina Dwijayanti. (2011). Manfaat Penerapan Carbon Accounting di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 3(1), 79–92.
- Ratmono, D., Darsono, D., Cahyonowati, N., & Chaerun Niza, T. (2022). Greenhouse Gas Emission Accounting Disclosure, Corporate Characteristics and Governance: An Empirical Investigation on Indonesian Firms. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(6), 86–95. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13487>
- Ratnatunga, J. T. D., & Balachandran, K. R. (2009). Carbon Business Accounting: The Impact of Global Warming on the Cost and Management Accounting Profession. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 24(2), 333–355. <https://doi.org/10.1177/0148558X0902400208>
- Rohmah Suryani, & Fitri Laela Wijayati. (2019). Large Determinant of Greenhouse Gas Emissions Disclosure in Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 102–117.
- Tao Lin, Yunjun Yu, Xuemei Bai, Ling Feng, & Jin Wang. (2013). Greenhouse Gas Emissions Accounting of Urban Residential Consumption: A Household Survey Based Approach. *PLoS ONE*, 8(2), 1–12.
- Zhao-hui, L., Wei-min, Z., Zhong-yue, X., Jia-bin, S., & Dongdong, L. (2020). Research on Extended Carbon Emissions Accounting Method and Its Application in Sustainable Manufacturing. *Procedia Manufacturing*, 43, 175–182. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.132>

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA
PARTISIPASI SEKOLAH (SD, SMP, SMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ninuk Dwiastuti Ruwandari¹, Helly Suharlina²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

Belanja pemerintah dibidang pendidikan secara langsung merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga peran serta pemerintah dan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah SD, SMP, SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama lima tahun dengan metode analisis, menggunakan regresi linier berganda dengan data panel, serta uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah SD, SMP, SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Belanja Pemerintah, Bidang Pendidikan, dan Angka Partisipasi Sekolah

1. PENDAHULUAN

Belanja pemerintah sangat penting guna meningkatkan sumber daya manusia terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga belanja pemerintah menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja/Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan secara langsung merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlakuan yang sama terhadap masyarakat bagi pelayanan pendidikan sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga peran serta pemerintah dan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan.

Untuk meningkatkan pembangunan maka perlu meningkatkan pendidikan, oleh karena itu melalui pendidikan maka dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengaplikasikan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan dalam belajar maka salah satu peran pemerintah dalam hal ini pemerataan kesempatan belajar dengan melalui alokasi belanja pendidikan di setiap Kabupaten/Kota. Dengan adanya alokasi belanja pendidikan maka dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah yang berdasarkan pada suatu jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi dengan pemerataan serta kesempatan belajar melalui angka partisipasi sekolah sehingga alokasi bidang pendidikan perlu ditingkatkan serta dialokasikan sesuai dengan sasaran pemerintah serta dialokasikan secara efisien dan efektif. Dengan adanya alokasi dana di bidang pendidikan maka

diharapkan akan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di suatu daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Dengan adanya alokasi pendidikan maka dapat mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya dibidang pendidikan sehingga akan berdampak pada angka partisipasi sekolah. Adapun tujuan dari pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan tabel berikut ini data tentang belanja pemerintah bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021.

Tabel 1
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	586.256.924.824	567.078.341.585	589.015.065.051	573.394.958.807	592.345.141.690
Bengkayang	228.243.293.454	281.348.817.344	304.465.261.622	287.856.549.813	442.246.666.361
Landak	369.835.096.708	373.420.560.532	395.091.726.061	397.244.634.978	370.533.768.696
Mempawah	281.483.055.475	286.154.245.992	305.259.804.042	279.589.065.103	284.012.070.655
Sanggau	456.686.398.457	463.893.868.724	482.851.801.500	439.461.394.589	451.029.851.164
Ketapang	454.584.971.412	502.564.382.547	619.132.123.775	576.125.543.891	631.868.675.025
Sintang	450.726.916.271	477.936.927.923	500.456.107.400	520.420.041.515	516.200.149.381
Kapuas Hulu	398.342.635.201	399.787.624.392	449.880.972.977	378.414.662.129	399.899.294.626
Sekadau	206.720.289.599	224.869.828.578	231.294.260.582	226.230.094.076	262.850.371.095
Melawi	222.545.394.609	275.527.489.098	292.408.237.432	286.967.812.376	258.124.334.714
Kayong Utara	106.839.659.409	184.948.327.296	188.682.115.748	187.296.692.737	209.192.490.569
Kubu Raya	462.418.285.239	457.488.164.560	514.544.385.317	484.018.650.321	490.559.043.067
Pontianak	489.891.711.626	451.930.354.529	477.405.237.630	422.963.962.736	427.864.249.159
Singkawang	243.727.285.735	249.362.173.836	233.325.576.582	207.728.491.993	255.355.325.751

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan Kabupaten//Kota dari tahun 2017 – 2021 berfluktuatif, hanya pada Kabupaten Ketapang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Adapun belanja/pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2021 yang terbesar di Kabupaten Ketapang dan belanja/pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang terendah adalah di Kabupaten Kayong Utara. Alokasi dana tersebut sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan langsung yang berupa bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dapat berlangsung terus agar sumber daya manusia terwujud. Dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) diharapkan akan dapat menjadi sistim pendidikan Nasional sehingga merata bagi masyarakat.

Besar kecilnya alokasi anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan tergantung dari pendapatan asli daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alokasi belanja/pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga akan dapat memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dengan melihat keberhasilan belanja//pengeluaran pemerintah bidang pendidikan melalui dengan melihat angka partisipasi sekolah dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Pemerataan bidang pendidikan dapat dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, kelas, bangku dan tenaga pendidik. Kadang – kadang terjadi ketimpangan antara rasio guru dan murid, sehingga semua itu harus bisa diatasi secara cepat, demi kelangsungan pendidikan.

Data ini menunjukkan data tentang angka partisipasi sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut.

Tabel 2
Angka Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	97,59	98,75	98,75	98,25	98,68
Bengkayang	98,34	97,70	97,79	98,63	98,36
Landak	98,60	97,69	98,65	99,06	98,79
Mempawah	98,44	99,63	99,45	97,33	99,22
Sanggau	96,85	97,59	97,59	98,60	97,67
Ketapang	97,99	97,65	97,67	98,42	98,53
Sintang	100,00	98,89	97,67	98,42	98,53
Kapuas Hulu	99,26	100,00	99,51	98,89	99,44
Sekadau	97,26	98,46	98,80	96,98	98,76
Melawi	98,10	96,43	96,61	98,15	96,72
Kayong Utara	99,73	98,78	98,21	99,30	97,81
Kubu Raya	99,02	99,05	99,34	98,77	99,15
Pontianak	98,72	98,45	98,86	98,69	99,21
Singkawang	98,41	98,82	98,71	98,58	98,70
Kalimantan Barat	97,99	98,43	98,51	98,80	98,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 2 angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan SD di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 sebesar 97,99 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah tujuh tahun sampai duabelas tahun yang bersekolah pada tingkat pendidikan SD sebesar 97,99 %. Dilihat dari angka partisipasi sekolah bidang pendidikan pada tingkat pendidikan SD tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan hanya pada tahun 2021 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan sebesar 98,64 %. Kalau dilihat dari kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat cenderung berfluktuatif disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 persentase jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD yang tertinggi pada Kabupaten Kapuas Hulu 99,44 %, sedangkan jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD yang terendah adalah Kabupaten Melawi sebesar 96,72 %. Data dibawah ini menunjukkan data tentang angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP tahun 2017 – 2021 sebagai berikut.

Tabel 3
Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	90,47	94,97	95,22	91,52	95,35
Bengkayang	92,75	90,60	91,37	93,17	94,63
Landak	91,18	93,20	92,82	91,76	93,20
Mempawah	89,83	91,69	91,07	90,66	91,98
Sanggau	93,12	90,46	90,83	94,29	90,25
Ketapang	89,92	93,36	93,57	89,23	93,87
Sintang	87,93	89,86	89,84	87,31	89,62
Kapuas Hulu	89,92	87,34	86,80	90,02	87,54
Sekadau	86,73	90,06	89,88	86,64	89,99
Melawi	94,23	86,81	86,16	93,72	87,05
Kayong Utara	95,68	94,12	93,42	97,08	93,82
Kubu Raya	96,40	97,01	96,77	96,57	97,35
Pontianak	93,45	96,34	96,45	93,21	96,30
Singkawang	92,51	92,37	93,50	92,90	93,23
Kalimantan Barat	95,25	92,84	92,85	94,90	93,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Provinsi Kalimantan Barat cenderung berfluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95,25 %, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak usia 13 tahun sampai 15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 95,25 %, sedangkan pada tahun 2021 angka partisipasi sekolah sebesar 93,14 % dimana terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 94,90 %. Kemudian pada tahun 2021 dilihat angka partisipasi sekolah yang tertinggi adalah Kabupaten Kubu Raya sebesar 97,35 %, sedangkan yang terendah angka partisipasi sekolah adalah Kabupaten Melawi sebesar 87,05 %. Data dibawah ini menunjukkan data tentang angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut.

Tabel 4
Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Sambas	67,13	68,46	68,18	73,34	69,01
Bengkayang	71,00	74,30	73,01	72,02	74,29
Landak	64,16	73,81	74,11	74,01	74,43
Mempawah	59,46	73,05	72,53	56,19	73,65
Sanggau	63,85	56,31	55,80	64,53	56,20
Ketapang	53,67	64,26	63,85	58,34	64,61
Sintang	64,15	59,19	56,57	71,89	60,55
Kapuas Hulu	70,00	71,98	69,78	67,59	71,53
Sekadau	58,49	68,46	68,09	57,45	68,77
Melawi	71,00	57,32	55,41	72,63	57,99
Kayong Utara	69,55	72,49	72,40	68,74	72,81
Kubu Raya	80,44	67,59	68,98	78,36	71,05
Pontianak	68,16	79,07	79,49	72,43	79,43
Singkawang	67,53	70,58	70,57	68,37	75,88
Kalimantan Barat	70,22	68,35	67,73	68,73	69,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA di Provinsi Kalimantan Barat cenderung berfluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,53 %, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak usia 16 tahun sampai 18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 67,53 %, sedangkan pada tahun 2021 angka partisipasi sekolah sebesar 75,88 % dimana terjadi kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 68,37 %. Kemudian pada tahun 2021 dilihat angka partisipasi sekolah yang tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 79,43 %, sedangkan yang terendah angka partisipasi sekolah adalah Kabupaten Sintang sebesar 60,55 %.

Angka partisipasi sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan setiap tahun berfluktuatif dan tidak menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 – 2021. Dilihat dari angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 98,70 %, jenjang pendidikan SMP sebesar 93,23 % sedangkan jenjang pendidikan SMA sebesar 75,88 %.

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SD dan SMP paling tinggi angka partisipasi sekolah, banyaknya penduduk usia sekolah yang mengenyam tingkat pendidikan SD dan SMP. Sedangkan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA masih sangat rendah, hal ini menggambarkan masih banyak penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang tidak mengenyam jenjang pendidikan SMA.

Peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat guna meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan meningkatkan fasilitas penunjang seperti jumlah sekolah harus mampu menampung jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu.

Dengan adanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan angka partisipasi sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota maka dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya dana alokasi dibidang pendidikan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap angka partisipasi sekolah SD, SMP, SMA.

2.KAJIAN LITERATUR

2.1. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan barang - barang publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah dalam mengatur sumber – sumber pendapatan negara guna membelanjakan program – program dan untuk kegiatan pemerintahan pada setiap tahun. Menurut Sukirno Pengeluaran pemerintah memiliki kegunaan sebagai anggaran yang harus dialokasikan pemerintah untuk menjalankan program yang di rencanakan oleh pemerintah yang mencakup sekumpulan dana administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintah, hal ini mencakup membiayai gaji pegawai pemerintah, sistem pendidikan, kesehatan, pembelanjaan berbagai jenis infrastruktur pembangunan untuk menunjang kegiatan pembangunan maupun pembelanjaan – pembelanjaan yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.

Menurut Halim pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran pemerintah kas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Pada masa sebelumnya, struktur atau klasifikasi yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah (pemerintah pusat maupun daerah), dibedakan dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan atau belanja pembangunan. Pengeluaran rutin atau belanja rutin adalah pengeluaran atau belanja rutin untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari seperti belanja pegawai (gaji dan upah) dan belanja barang. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah belanja untuk pembangunan baik fisik (jalan, gedung, dan pembelian kendaraan) maupun non fisik (penataan, training dan lain-lain). Menurut Hasanah dan Sunyoto menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kompoen dalam dalam struktur Produk Nasional Bruto (PNB). Dalam sebuah pemerintahan, pemerintah akan akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar oprasional dan roda perekonomian tetap berjalan. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalanya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Belanja pemerintah adalah sebagai kebijakan pemerintah serta untuk membiayai kegiatan pemerintah demi untuk kemajuan daerah maupun negara. Menurut Sukirno pengeluaran pemerintah dijelaskan sebagai anggaran yang harus dialokasikan pemerintah untuk menjalankan program yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut Adolf Wagner (Dalam Pangestuty dan Prasetya) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah terjadi peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Kegiatan ini dengan hukum meningkatnya peranan pemerintah.

Meningkatnya kegiatan pemerintah di dalam kegiatan ekonomi negara tidak terlepas dari peran dari keseluruhan masyarakat.

2.2. Belanja Pendidikan

Belanja/Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang dapat mencerminkan dari total anggaran dan belanja untuk pembangunan yang dialokasikan untuk tingkat pendidikan dengan alokasi untuk fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib belajar 12 tahun dan lainnya. Menurut Ghozali menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah. Biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan.

Menurut Suparto menyatakan bahwa mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik terjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut tampak masih relatif tingginya alokasi anggaran belanja rutin dibanding anggaran belanja pembangunan, baik dalam skala Nasional maupun regional. Khusus mengenai alokasi pengeluaran pendidikan rencana alokasi 20 % untuk anggaran pendidikan masih jauh dari realita. Pendidikan merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga masyarakat dapat merasakan sejahtera dan makmur.

Menurut Delavallade menyatakan bahwa Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang instruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita. Belanja/pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan besarnya belanja/pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang mencerminkan pengeluaran dari total anggaran dan belanja untuk pembangunan yang dialokasikan untuk pendidikan, seperti sarana dan prasarana untuk pendidikan. Peranan pemerintah sangat penting agar masyarakat sejahtera dan makmur, maka sangat dibutuhkan fasilitas serta akses pendidikan yang lebih merata.

2.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara banyaknya murid sekolah usia tertentu dengan banyaknya penduduk usia tertentu dinyatakan dalam persen. Dengan angka partisipasi sekolah merupakan jumlah presentase anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk jenjang pendidikan SD dihitung berdasarkan jumlah anak yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun, untuk jenjang pendidikan SMP dihitung berdasarkan jumlah anak yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun sedangkan jenjang pendidikan SMA dihitung berdasarkan jumlah anak usia 16 tahun sampai 18 tahun.

Menurut Todaro menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor – faktor yang bersifat non pasar (non ekonomis), secara umum dapat dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaa dan penawaran , sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Dari sisi permintaa ada dua hal yang berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan yakni :

- a. Harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor moderen di masa yang akan datang bagi siswa dan atau keluarganya.
- b. Biaya – Biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya.

Pada sisi penawaran, jumlah sekolah ditingkat sekolah dasar, menengah dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik yang sering tidak ada kaitannya dengan kreteria ekonomi. Karena semakin besar dan kuatnya tekanan – tekanan politik yang diletakan kepundak pemeritahan negara – negara dunia ketiga untuk menyediakan tempat sekolah yang semakin banyak, maka kita dapat mengasumsikan dengan aman bahwa tingkat penawaran atau penyediaan tempat – tempat sekolah ini (oleh negara) dibatasi oleh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan . Pada gilirannya, hal tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat dari masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Roza menyatakan bahwa tujuan program pendidikan yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Ada enam indikator utama sebagai pengukurannya yakni :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM)
- b. Angka Partisipasi Murni di SD
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP
- d. Proporsi murid yang berhasil menamatkan SD
- e. Proporsi murid kelas 1 yang menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar
- f. Angka melek huruf usia 15 tahun sampai 24 tahun

Pendidikan merupakan salah satu unsur sebagai modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang umumnya didapat dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan melalui pendidikan maka seseorang akan memiliki kemampuan guna meningkatkan kualitas diri demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik kualitas seseorang hal ini karena mereka dapat menyerap informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Desmaniar menyatakan bahwa banyaknya penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan memberikan dampak yang baik terhadap indeks pembangunan manusia. Pemerintah menyadari pentingnya modal sumber daya manusia yang berkualitas sebagai dasar bagi pembangunan.

Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara misalnya melalui kebijakan dengan harapan pembangunan pendidikan yang dicapai dapat mempengaruhi arahnya pembanguan ekonomi dimasa depan. Program wajib belajar merupakan program pemerintah yang paling dikenal dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Dimana keberhasilan pendidikan pada program ini dinilai dengan menggunakan indikator angka partisipasi sekolah di tiap daerah. Jadi angka partisipasi sekolah merupakan alat ukur utama yang dapat melihat akses untuk pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. Dengan semakin besarnya angka partisipasi sekolah maka akan semakin tinggi penduduk untuk mendapatkan pendidikan. Meningkatnya angka kemiskinan maka diikuti dengan menurunnya angka partisipasi sekolah dan sebaliknya.

Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah maka manfaatnya sebagai perluasan pendidikan dasar dan dalam hubungan keatas serta menyiapkan untuk ikut dalam pendidikan tinggi atau dalam menyiapkan untuk memasuki lapangan kerja. Menurut Suprianto menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai fungsi sebagai penggerak sekaligus pemicu terhadap potensi

kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan prestasi kerjanya yang dapat yang dapat di pupuk melalui program pendidikan, perkembangan dan pelatihan pendidikan merupakan peran utama dalam pembentukan masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Selain peran pemerintah, peran orang tua juga dibutuhkan untuk memberikan peluang bagi anak – anak pada usia sekolah guna mendapatkan pendidikan. Kesadaran orangtua sangat penting terhadap pendidikan anak – anaknya, sehingga dengan pendidikan akan menjadi bekal mereka untuk mendapatkan hidup yang layak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2009 : 21). Hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menekankan analisisnya pada data – data numerik sehingga dapat diketahui hubungan yang signifikan pada variabel tersebut. Dengan menggunakan data panel data diolah dengan program E-views.

3.2. Regresi Linier / Regresi Sederhana

$$Y_{it} = a + bx_{it}$$

Dimana :

Y_1 = Angka Partisipasi sekolah SD

Y_2 = Angka Partisipasi Sekolah SMP

Y_3 = Angka Partisipasi Sekolah SMA

a = Konstanta / intercep

b = Koefisien Regresi

X = Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

3.3. Uji Statistika

a. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat kepercayaan/Keyakinan 95 %.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel bebas (independen) terhadap naik turunnya variabel terikat (dependen). Gunanya koefisien determinasi (R^2) adalah untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen) dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 maka kemampuan variabel bebas (independen) dalam memberikan informasi atau pengaruh akan semakin baik dan jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) amat terbatas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Belanja Pemerintah bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD

a. Regresi linier/Sederhana

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Linier

Variabel	Coefficient	Prob.
C	98,7441	0,0000
Belanja Pemerintah (X)	0,198660	0,0381

Sumber: Data Olahan E-Views

Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 98,7441 + 0,198660 X$$

Hasil regresi Linier/Sederhana yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Konstanta (C)

Nilai konstanta (C) sebesar 98,7441 artinya jika Belanja Pemerintah tidak mengalami perubahan, maka Angka Partisipasi Sekolah SD sebesar 98,7441 persen.

- Belanja pemerintah Bidang Pendidikan

Nilai koefisien Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 0,198660, artinya jika Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mengalami kenaikan satu persen, maka Angka Partisipasi Sekolah SD akan mengalami kenaikan sebesar 0,198660 persen.

b. Uji t

Tabel 2. Uji T

Variabel	t-statistic	Prob.	Keputusan
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X)	5,166835	0,0381	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views

Pada Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Pemerintah bidang pendidikan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,696500 artinya sebesar 69,6500 % Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mampu menjelaskan pengaruh Angka Partisipasi Sekolah SD, sedangkan sisanya sebesar 30,3500 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.

4.1.2. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP

a. Regresi linier/Sederhana

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linier

Variabel	Coefficient	Prob.
C	85,33382	0,0345
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X)	0,579898	0,0455

Sumber : Data Olahan E-Views

Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 85,3382 + 0,579898 X$$

Hasil regresi Linier/Sederhana yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta (C)

Nilai konstanta (C) sebesar 85,33382 artinya jika Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan tidak mengalami perubahan, maka Angka Partisipasi Sekolah SMP sebesar 85,33382 persen.

- Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Nilai koefisien Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 0,579898, artinya jika Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mengalami kenaikan satu persen, maka Angka Partisipasi Sekolah SMP mengalami kenaikan sebesar 0,579898 persen.

b. Uji t

Tabel 4. Uji T

Variabel	t-statistic	Prob.	Keputusan
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X)	4,170183	0,0435	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views

Pada Tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

- Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,895207 artinya sebesar 89,5207 % Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mampu menjelaskan pengaruh Angka Partisipasi Sekolah SMP, sedangkan sisanya sebesar 10,4793 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.

4.1.3. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA

a. Regresi linier/Sederhana

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Linier

Variabel	Coefficient	Prob.
C	53,71460	0,2542
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X)	0,53721	0,0116

Sumber : Data Olahan E-Views

Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 53,71460 + 0,53721 X$$

Hasil regresi Linier/Sederhana yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Konstanta (C)

Nilai konstanta (C) sebesar 53,71460 artinya jika Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan tidak mengalami perubahan, maka Angka Partisipasi Sekolah SMA sebesar 53,71460 persen.

- Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Nilai koefisien Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 0,53721, artinya jika Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mengalami kenaikan satu persen, maka Angka Partisipasi Sekolah SMA mengalami kenaikan sebesar 0,53721 persen.

b. Uji t

Tabel 6. Uji T

Variabel	t-statistic	Prob.	Keputusan
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X)	4,611036	0,0116	Signifikan

Sumber : Data Olahan E-Views

Pada Tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,594702 artinya sebesar 59,4702 % Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan mampu menjelaskan pengaruh Angka Partisipasi Sekolah SMA, sedangkan sisanya sebesar 40,5298 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan semakin besar belanja/pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka akan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah SD pada daerah tersebut. Belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting terutama untuk melaksanakan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan di dalam APBN dan APBD yang dirasakan sangat cukup dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah SD.

Pemerintah telah menetapkan program wajib belajar duabelas tahun, untuk dapat meringankan masyarakat dalam hal biaya pendidikan. Pemerintah telah menetapkan program wajib belajar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, tentunya dalam hal penyelenggaraan pendidikan perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah menyediakan sarana pendidikan antara lain menyediakan jumlah sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Setelah selesai mengenyam pendidikan mereka berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat penghasilan yang memadai atau mendapat penghasilan yang lebih baik.

Selain itu biaya pendidikan dapat terjangkau oleh masyarakat, pentingnya pendidikan sekolah dasar Tujuh sampai duabelas tahun, hal ini dapat memberikan kesadaran bagi orangtua betapa pentingnya pendidikan sekolah dasar untuk anak mereka agar bisa membaca dan menulis. Dengan alokasi anggaran bidang pendidikan yang dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah akan tetapi anggaran bidang pendidikan bukan satu – satunya indikator yang dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD. Selain itu belanja pendidikan juga akan digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan antara lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pemerintah juga membuat program beasiswa. Belanja pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah SD hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya diukur dari belanja pendidikan saja tetapi kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan SD bagi anaknya, yang dapat berperan penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah SD. Berikut ini data tentang Rata-Rata Angka

Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut.

Tabel 7
Rata – Rata Angka Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Sambas	97,59	98,75	98,75	98,25	98,68	98,40
Bengkayang	98,34	97,70	97,79	98,63	98,36	98,16
Landak	98,60	97,69	98,65	99,06	98,79	98,56
Mempawah	98,44	99,63	99,45	97,33	99,22	98,81
Sanggau	96,85	97,59	97,59	98,60	97,67	97,66
Ketapang	97,99	97,65	97,67	98,42	98,53	98,05
Sintang	100,00	98,89	97,67	98,42	98,53	98,70
Kapuas Hulu	99,26	100,00	99,51	98,89	99,44	99,42
Sekadau	97,26	98,46	98,80	96,98	98,76	98,05
Melawi	98,10	96,43	96,61	98,15	96,72	97,20
Kayong Utara	99,73	98,78	98,21	99,30	97,81	98,77
Kubu Raya	99,02	99,05	99,34	98,77	99,15	99,07
Pontianak	98,72	98,45	98,86	98,69	99,21	98,79
Singkawang	98,41	98,82	98,71	98,58	98,70	98,64
Kalimantan Barat	97,99	98,43	98,51	98,80	98,64	98,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 7 angka partisipasi sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berfluktuatif. Sedangkan rata – rata angka partisipasi sekolah SD yang tertinggi angka partisipasi sekolah SD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 99,42 % dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 99,07 % serta yang terendah Kabupaten Melawi sebesar 97,20 % dan Kabupaten Sanggau sebesar 97,66 %. Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SD ada Kabupaten/Kota yang lebih tinggi angka partisipasi sekolah SD dibanding dengan rata – rata angka partisipasi sekolah SD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 98,41 % yaitu Kabupaten Landak sebesar 98,56 %, Kabupaten Mempawah sebesar 98,81 %, Kabupaten Sintang sebesar 98,70 %, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 99,42 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 98,77 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 99,07 %, Kota Pontianak sebesar 98,79 % dan Kota Singkawang sebesar 98,64 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dimana masyarakatnya sudah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SD terus meningkat. Berdasarkan perkembangan angka partisipasi sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 97 % sampai 98 persen saja, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja jumlah anak usia tujuh tahun sampai duabelas tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan SD atau mungkin mereka mengalami putus sekolah SD. Jadi masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka ingin anak – anaknya bisa membaca dan menulis. Program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang dapat meringankan biaya pendidikan pada masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya pada jenjang pendidikan sekolah dasar karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Berikut ini data tentang Rata – Rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 8
Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 – 2021 (Tahun)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Sambas	6,67	6,68	6,70	6,71	6,72	6,70
Bengkayang	6,09	6,27	6,53	6,76	6,80	6,49
Landak	7,08	7,09	7,10	7,11	7,12	7,1
Mempawah	6,47	6,63	6,82	7,03	7,04	6,80
Sanggau	6,93	6,94	6,95	7,15	7,39	7,07
Ketapang	7,03	7,04	7,26	7,31	7,46	7,22
Sintang	6,72	6,73	6,89	7,07	7,08	6,90
Kapuas Hulu	7,02	7,25	7,47	7,52	7,53	7,36
Sekadau	6,70	6,58	6,60	6,83	6,85	6,71
Melawi	6,53	6,66	6,76	6,76	6,91	6,69
Kayong Utara	5,85	5,86	6,00	6,01	6,02	5,95
Kubu Raya	6,58	6,81	6,82	6,83	7,00	6,81
Pontianak	9,79	9,90	10,14	10,17	10,43	10,09
Singkawang	7,30	7,57	7,72	7,89	7,90	7,68
Kalimantan Barat	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45	7,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk pada usia limabelas tahun keatas diseluruh tingkat pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 – 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata – Rata lama sekolah yang tertinggi adalah Kota Pontianak, dengan rata – rata lama sekolah sekitar 10 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kayong Utara 6 tahun, hal ini menggambarkan persentase penduduk usia limabelas tahun keatas dengan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar pada kelas enam SD. Sedangkan rata – rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar tujuh tahun. Kabupaten yang lebih tinggi dari rata – rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7 tahun adalah Kota Pontianak sebesar 10,09 tahun, Kota Singkawang sebesar 7,68 tahun, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,36 tahun, sedangkan yang terendah rata – rata lama sekolah adalah kabupaten Kayong Utara sebesar 5,95 tahun.

Secara keseluruhan rata – rata lama sekolah pada penduduk usia limabelas tahun keatas hanya dapat mengenyam pendidikan selama enam tahun. Dalam hal ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah karena rata – rata penduduk usia limabelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SD saja dan ada juga yang putus sekolah pada kelas lima SD saja. Berikut ini data tentang Rata – Rata lama sekolah dan rata – rata angka partisipasi sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 9
Rata-Rata Lama Sekolah Dan Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah SD
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (%)
Sambas	6,70	98,40
Bengkayang	6,49	98,16
Landak	7,1	98,56
Mempawah	6,80	98,41
Sanggau	7,07	97,66
Ketapang	7,22	98,05
Sintang	6,90	98,70
Kapuas Hulu	7,36	99,42
Sekadau	6,71	98,05
Melawi	6,69	97,20
Kayong Utara	5,95	98,77
Kubu Raya	6,81	99,07
Pontianak	10,09	98,79
Singkawang	7,68	98,64
Kalimantan Barat	7,26	98,41

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 9 rata-rata lama sekolah yang berada pada posisi enam tahun yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu raya. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten – Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk 15 Tahun keatas yang hanya mengenyam pendidikan yang berada pada kelas enam SD atau hanya tamatan SD Saja, bahkan ada yang putus sekolah hanya duduk dikelas lima SD saja. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara Rata-Rata lama sekolah berada pada posisi lima tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kayong Utara rata-rata lama sekolah penduduk usia limabelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan kelas lima SD mereka putus sekolah, sehingga program pemerintah wajib belajar sembillan tahun belum memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan di Provinsi kalimantan Barat.

Dengan rendahnya rata-rata lama sekolah maka dapat dikatakan bahwa rendahnya pendidikan di suatu daerah, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang rendah maka akan mengakibatkan rendahnya pembangunan suatu daerah yang akan berjalan dengan lambat. Kemudian rata-rata lama sekolah yang berda pada posisi tujuh tahun yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dab Kota Singkawang. Hal ini dapat dikatakan bahwa kabupaten-Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SD dan putus sekolah pada jenjang pendidikan kelas satu SMP saja. Hanya pada kota Pontianak saja rata-rata lama sekolah penduduk usia limabelas tahun keatas yang mengenyam pendidikan selama 10 tahun, hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kota Pontianak rata-rata penduduk usia limabelas tahun keatas hanya tamat SMP saja dan putus sekolah pada kelas satu SMA. Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SD yang paling tinggi berada Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 99,42 % dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 99,07 %. Sedangkan rata-rata angka partisipasi sekolah yang terendah berada pada kabupaten Melawi sebesar 97,20 %. Untuk Provinsi Kalimantan Barat angka partisipasi sekolah SD sebesar 98,41 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat dimana masyarakatnya sadar akan pentingnya tingkat pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SD mengalami peningkatan. Program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

4.1.2 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat menggambarkan bahwa belanja/pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah SMP. Dengan alokasi anggaran 20 persen dari pemerintah dibidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dapat memberikan dampak terhadap angka partisipasi sekolah SMP. Hal ini dikarenakan masih adanya penduduk berusia 13 – 15 tahun yang tidak mengenyam pada pendidikan berjenjang SMP. Dengan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga ada program bantuan operasional sekolah (BOS) yang mampu untuk memberikan dampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah SMP.

Tabel 10
Rata – Rata Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Sambas	90,47	94,97	95,22	91,52	95,35	93,51
Bengkayang	92,75	90,60	91,37	93,17	94,63	92,50
Landak	91,18	93,20	92,82	91,76	93,20	92,43
Mempawah	89,83	91,69	91,07	90,66	91,98	91,05
Sanggau	93,12	90,46	90,83	94,29	90,25	91,79
Ketapang	89,92	93,36	93,57	89,23	93,87	91,99
Sintang	87,93	89,86	89,84	87,31	89,62	88,91
Kapuas Hulu	89,92	87,34	86,80	90,02	87,54	88,32
Sekadau	86,73	90,06	89,88	86,64	89,99	88,66
Melawi	94,23	86,81	86,16	93,72	87,05	89,59
Kayong Utara	95,68	94,12	93,42	97,08	93,82	94,82
Kubu Raya	96,40	97,01	96,77	96,57	97,35	96,82
Pontianak	93,45	96,34	96,45	93,21	96,30	95,15
Singkawang	92,51	92,37	93,50	92,90	93,23	92,90
Kalimantan Barat	95,25	92,84	92,85	94,90	93,14	93,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 10 angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berfluktuatif. Sedangkan rata – rata angka partisipasi sekolah SMP yang tertinggi yaitu angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten Kubu Raya sebesar 96,82 % dan Kota Pontianak sebesar 95,15 % serta angka partisipasi sekolah SMP yang terendah yaitu Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 88,32 % dan Kabupaten Sekadau sebesar 88,66 %. Kalau dilihat dari rata-rata

angka partisipasi sekolah SMP ada Kabupaten/Kota yang lebih tinggi angka partisipasi sekolah SMP dibanding dengan rata – rata angka partisipasi sekolah SMP Provinsi Kalimantan Barat sebesar 93,80 % yaitu Kabupaten Kabupaten Kayong Utara sebesar 94,82 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 96,82 % dan Kota Pontianak sebesar 95,15 % .

Hal ini menunjukkan bahwa dimana masyarakat sudah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SMP terus meningkat. Berdasarkan perkembangan angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 88 % sampai 96 persen saja, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja jumlah anak usia Tigabelas tahun sampai limabelas tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan SMP atau mungkin mereka mengalami putus sekolah SMP. Jadi masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka ingin anak – anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi sampai ke perguruan tinggi. Program pemerintah dibidang pendidikan sangat membantu masyarakat terutama dalam hal biaya pendidikan yang dapat meringankan masyarakat karena biaya pendidikan setiap tahun selalu meningkat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program pemerintah bidang pendidikan, sehingga mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya pada jenjang pendidikan sekolah menengah karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Berikut ini data tentang Rata – Rata lama sekolah Dan Rata – Rata Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 11
Rata-Rata Lama Sekolah Dan Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah SMP
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (%)
Sambas	6,70	93,51
Bengkayang	6,49	92,50
Landak	7,1	92,43
Mempawah	6,80	91,05
Sanggau	7,07	91,79
Ketapang	7,22	91,99
Sintang	6,90	88,91
Kapuas Hulu	7,36	88,32
Sekadau	6,71	88,60
Melawi	6,69	89,50
Kayong Utara	5,95	94,82
Kubu Raya	6,81	96,82
Pontianak	10,09	95,15
Singkawang	7,68	92,90
Kalimantan Barat	7,26	93,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk pada usia limabelas tahun keatas diseluruh tingkat pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 – 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata – Rata lama sekolah yang tertinggi adalah Kota Pontianak, dengan rata – rata lama sekolah sekitar 10 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kayong Utara 6 tahun, hal ini menggambarkan persentase penduduk usia limabelas tahun keatas dengan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar pada kelas enam SD.

Sedangkan rata – rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar tujuh tahun. Kabupaten yang lebih tinggi dari rata – rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7 tahun adalah Kota Pontianak sebesar 10,09 tahun, Kota Singkawang sebesar 7,68 tahun, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,36 tahun, sedangkan yang terendah rata – rata lama sekolah adalah kabupaten Kayong Utara sebesar 5,95 tahun. Secara keseluruhan rata – rata lama sekolah pada penduduk usia limabelas tahun keatas hanya dapat mengenyam pendidikan selama enam tahun. Dalam hal ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah karena rata – rata penduduk usia limabelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SMP saja dan ada juga yang putus sekolah pada kelas satu SMP saja.

Rata - Rata lama sekolah yang berada pada posisi enam tahun yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu raya. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten – Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk 15 Tahun keatas yang hanya mengenyam pendidikan yang hanya tamatan SD Saja, bahkan ada yang putus sekolah hanya duduk dikelas satu SMP saja. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara Rata-Rata lama sekolah berada pada posisi lima tahun. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara rata-rata lama sekolah penduduk usia limabelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan kelas lima SD mereka putus sekolah. Program pemerintah dibidang pendidikan belum memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan rendahnya rata-rata lama sekolah maka dapat dikatakan bahwa rendahnya pendidikan di suatu daerah, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia rendah maka akan mengakibatkan rendahnya pembangunan suatu daerah yang akan berjalan dengan lambat. Rata - Rata lama sekolah yang berada pada posisi tujuh tahun yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Hal ini dapat dikatakan bahwa kabupaten-Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SD dan putus sekolah pada jenjang pendidikan kelas satu SMP saja. Hanya pada kota Pontianak saja rata-rata lama sekolah penduduk usia limabelas tahun keatas yang mengenyam pendidikan selama 10 tahun, hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kota Pontianak rata-rata penduduk usia limabelas tahun keatas hanya tamat SMP saja dan putus sekolah pada kelas satu SMA. Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMP yang paling tinggi berada Kabupaten Kubu Raya sebesar 96,82 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 94,82 % dan Kota Pontianak sebesar 95,15 %, Sedangkan rata-rata angka partisipasi sekolah yang terendah berada pada kabupaten Kapuas Hulu sebesar dan Kabupaten Sekadau sebesar 88,66 %.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat rata – rata angka partisipasi sekolah SMP sebesar 93,80 %. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat dimana masyarakatnya sadar betapa pentingnya tingkat pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga rata – rata angka partisipasi sekolah SMP mengalami peningkatan. Program pemerintah di bidang pendidikan sangat membantu masyarakat dimana biaya pendidikan sangat mahal sehingga dengan adanya bantuan pemerintah dibidang pendidikan maka mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Rata – rata angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berfluktuatif. Sedangkan rata – rata angka partisipasi sekolah SMP yang tertinggi Kabupaten Kabupaten Kubu Raya sebesar 96,82 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 94,82 % dan Kota Pontianak sebesar 95,15 % serta yang terendah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 88,32 % dan Kabupaten Sekadau sebesar 88,66 %. Dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMP maka dapat dilihat, ada

Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dibanding dengan rata – rata angka partisipasi sekolah SMP Provinsi Kalimantan Barat sebesar 93,80 % yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 94,82 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 96,82 % dan Kota Pontianak sebesar 95,15 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dimana masyarakatnya sudah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SMP terus meningkat. Berdasarkan perkembangan rata – rata angka partisipasi sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 88 % sampai 96 persen saja, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja jumlah anak usia tigabelas tahun sampai limabelas tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan SMP atau mungkin mereka mengalami putus sekolah SMP. Jadi masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka ingin anak – anak mereka berpendidikan tinggi. Program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang dapat meringankan biaya pendidikan pada masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan demi masa depan anak-anak mereka.

4.2.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat menggambarkan bahwa belanja/pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah SMA. Dikarenakan masih adanya penduduk berusia 16 – 18 tahun yang tidak mengenyam pada pendidikan berjenjang SMA. Dengan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan dan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang mampu untuk memberikan dampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah SMA.

Tabel 12

Rata – Rata Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Sambas	67,13	68,46	68,18	73,34	69,01	69,22
Bengkayang	71,00	74,30	73,01	72,02	74,29	72,92
Landak	64,16	73,81	74,11	74,01	74,43	72,10
Mempawah	59,46	73,05	72,53	56,19	73,65	66,98
Sanggau	63,85	56,31	55,80	64,53	56,20	59,34
Ketapang	53,67	64,26	63,85	58,34	64,61	60,95
Sintang	64,15	59,19	56,57	71,89	60,55	62,47
Kapuas Hulu	70,00	71,98	69,78	67,59	71,53	70,18
Sekadau	58,49	68,46	68,09	57,45	68,77	64,25
Melawi	71,00	57,32	55,41	72,63	57,99	62,87
Kayong Utara	69,55	72,49	72,40	68,74	72,81	71,20
Kubu Raya	80,44	67,59	68,98	78,36	71,05	73,28
Pontianak	68,16	79,07	79,49	72,43	79,43	75,72
Singkawang	67,53	70,58	70,57	68,37	75,88	70,59
Kalimantan Barat	70,22	68,35	67,73	68,73	69,38	68,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 12 angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berfluktuatif. Sedangkan rata – rata angka partisipasi sekolah SMA yang tertinggi yaitu rata-rata angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten Kubu Raya sebesar 73,28 %

dan Kota Pontianak sebesar 75,72 % serta rata-rata angka partisipasi sekolah SMA yang terendah yaitu Kabupaten Ketapang sebesar 60,95 % dan Kabupaten Sanggau sebesar 59,34 %. Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMA ada Kabupaten/Kota yang lebih tinggi rata-rata angka partisipasi sekolah SMA dibanding dengan rata – rata angka partisipasi sekolah SMA Provinsi Kalimantan Barat sebesar 68,88 % yaitu Kabupaten Kabupaten Sambas sebesar 69,22 %, Kabupaten Bengkayang sebesar 72,92 %, Kabupaten Landak sebesar 72,10 %, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 70,18 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 71,20 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 73,28 %, Kota Singkawang sebesar 70,59 % dan Kota Pontianak sebesar 75,72 % .

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SMA terus meningkat. Semakin tinggi tingkat pendidikan di Kalimantan Barat maka angka partisipasi sekolah semakin meningkat juga. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka dibutuhkan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta untuk meningkatkan pembangunan masing – masing daerah. Dengan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA serta biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat, masih menjadi masalah dalam pengelolaan pendidikan.

Oleh karena jumlah sekolah SMA terbatas sehingga tidak dapat menampung jumlah lulusan SMP, terutama pada daerah pedalaman dan pedesaan yang pada umumnya hanya tersedia sekolah SD dan SMP, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA umumnya berada di Kecamatan serta di Kota sehingga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA mereka harus bersekolah di Kecamatan atau di Kota yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka sehingga memerlukan biaya yang besar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA.

Berdasarkan perkembangan angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 59 % sampai 75 % saja, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja jumlah anak usia Enambelas tahun sampai Delapanbelas tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan SMA atau mungkin mereka mengalami putus sekolah kelas satu SMA. Jadi masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka ingin anak – anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi sampai ke perguruan tinggi. Program pemerintah dibidang pendidikan sangat membantu masyarakat terutama dalam hal biaya pendidikan yang dapat meringankan masyarakat karena biaya pendidikan setiap tahun selalu meningkat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program pemerintah bidang pendidikan, sehingga mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya pada jenjang pendidikan sekolah menengah karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Berikut ini data tentang Rata – Rata lama sekolah Dan Rata – Rata Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 13
Rata-Rata Lama Sekolah Dan Rata- Rata Angka Partisipasi Sekolah SMA
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 - 2021

Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (%)
Sambas	6,70	69,22
Bengkayang	6,49	72,92
Landak	7,1	72,10
Mempawah	6,80	66,98
Sanggau	7,07	59,34
Ketapang	7,22	60,95
Sintang	6,90	62,47
Kapuas Hulu	7,36	70,18
Sekadau	6,71	64,25
Melawi	6,69	62,87
Kayong Utara	5,95	71,20
Kubu Raya	6,81	73,28
Pontianak	10,09	75,72
Singkawang	7,68	70,59
Kalimantan Barat	7,26	68,88

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah).

Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk pada usia Enambelas tahun keatas diseluruh tingkat pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani Kabupaten/Kota di Provinsi kalimantan Barat dari tahun 2017 – 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata – Rata lama sekolah yang tertinggi adalah Kota pontianak, dengan rata – rata lama sekolah sekitar 10 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kayong Utara 6 tahun, hal ini menggambarkan persentase penduduk usia Enambelas tahun keatas dengan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar pada kelas enam SD. Sedangkan rata – rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat sebesar tujuh tahun. Kabupaten yang lebih tinggi dari rata – rata lama sekolah di Provinsi kalimantan Barat sebesar 7 tahun adalah Kota Pontianak sebesar 10,09 tahun, Kota Singkawang sebesar 7,68 tahun, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,36 tahun, sedangkan yang terendah rata – rata lama sekolah adalah kabupaten Kayong Utara sebesar 5,95 tahun.

Secara keseluruhan rata – rata lama sekolah pada penduduk usia Enambelas tahun keatas hanya dapat mengenyam pendidikan selama enam tahun. Dalam hal ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan di Provinsi kalimantan Barat masih sangat rendah karena rata – rata penduduk usia Enambelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SMP saja dan ada juga yang putus sekolah pada kelas satu SMA saja.

Adapun rata-rata lama sekolah yang berada pada posisi enam tahun yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu raya. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten – Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk 16 Tahun keatas yang hanya mengenyam pendidikan hanya tamatan SD Saja, bahkan ada yang putus sekolah hanya duduk dikelas satu SMP saja. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara Rata-Rata lama sekolah berada pada posisi lima tahun. Kabupaten Kayong Utara rata-rata lama sekolah penduduk usia limabelas tahun keatas hanya mengenyam pendidikan kelas lima SD mereka putus sekolah. Program pemerintah dibidang pendidikan belum memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan di Provinsi kalimantan Barat.

Dengan rendahnya rata-rata lama sekolah maka dapat dikatakan bahwa rendahnya pendidikan di suatu daerah, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia rendah maka akan mengakibatkan rendahnya pembangunan suatu daerah yang akan berjalan dengan lambat. Rata - Rata lama sekolah yang berada pada posisi tujuh tahun yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Hal ini dapat dikatakan bahwa kabupaten-Kabupaten tersebut rata-rata lama sekolah penduduk usia 16 tahun keatas hanya mengenyam pendidikan tamat SMP dan putus sekolah pada jenjang pendidikan kelas satu SMA saja. Hanya pada kota Pontianak saja rata-rata lama sekolah penduduk usia Enambelas tahun keatas yang mengenyam pendidikan selama 10 tahun, hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kota Pontianak rata-rata penduduk usia Enambelas tahun keatas hanya tamat SMP saja dan putus sekolah pada kelas satu SMA.

Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMA yang paling tinggi berada Kabupaten Kubu Raya sebesar 73,28 % dan Kota Pontianak sebesar 75,72 %, Sedangkan rata-rata angka partisipasi sekolah yang terendah berada pada Kabupaten Sanggau 59,34 % dan Kabupaten Ketapang sebesar 60,95 %. Untuk Provinsi Kalimantan Barat rata – rata angka partisipasi sekolah SMA sebesar 68,88 %. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat dimana masyarakatnya sadar betapa pentingnya tingkat pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga rata – rata angka partisipasi sekolah SMA mengalami peningkatan. Program pemerintah di bidang pendidikan sangat membantu masyarakat dimana biaya pendidikan sangat mahal sehingga dengan adanya bantuan pemerintah dibidang pendidikan maka mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya karena masyarakat menganggap betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Rata – Rata angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berfluktuatif.

Sedangkan rata – rata angka partisipasi sekolah SMA yang tertinggi yaitu Kabupaten Kubu Raya sebesar 73,28 % dan Kota Pontianak sebesar 75,72 % dan yang terendah rata-rata angka partisipasi sekolah yaitu Kabupaten Sanggau sebesar 59,34 % dan Kabupaten Ketapang sebesar 60,95 %. Dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMA maka dapat dilihat, ada Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dibanding dengan rata – rata angka partisipasi sekolah SMA Provinsi Kalimantan Barat sebesar 68,88 % yaitu Kabupaten Sambas sebesar 69,22 %, Kabupaten Bengkayang sebesar 72,92 %, Kabupaten Landak sebesar 72,10 %, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 70,18 %, Kabupaten Kayong Utara sebesar 71,20 %, Kabupaten Kubu Raya sebesar 73,28 %, Kota Pontianak sebesar 75,72 % dan Kota Singkawang sebesar 70,59 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dimana masyarakatnya sudah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga angka partisipasi sekolah SMA terus meningkat. Berdasarkan perkembangan rata – rata angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata berkisar antara 59 % sampai 75 % saja, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja jumlah anak usia Enambelas tahun sampai Delapanbelas tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan SMA atau mungkin mereka mengalami putus sekolah pada kelas satu SMA. Jadi masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka ingin anak – anak mereka berpendidikan tinggi.

Perkembangan angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota berfluktuatif dari Tahun 2017 – 2021. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak mengenyam jenjang pendidikan SMA terdapat pada Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Dengan rendahnya angka partisipasi sekolah SMA maka berdampak pada rendahnya pembangunan di bidang pendidikan dan selain itu tingkat kemiskinan yang membuat masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan hidup dari pada untuk biaya pendidikan SMA.

Rendahnya rata-rata angka partisipasi sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 68,88 % saja, hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah belum mampu untuk memberikan kesejahteraan yang optimal pada masyarakat. Kalau dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah SMA yang tertinggi pada Kota Pontianak sebesar 75,72 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat Kota Pontianak lebih baik sehingga masyarakat mampu untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMA, bahkan dapat menyekolahkan anak mereka kejenjang yang lebih tinggi lagi ke jenjang perguruan tinggi, karena dianggap sangat penting untuk menjadi bekal serta mendapatkan kehidupan yang layak.

Partisipasi penduduk usia 16 – 18 tahun pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam menempuh jenjang pendidikan SMA masih dibawah 70 %. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya yang menjadi kendala yang masih menjadi penghambat untuk mereka bersekolah. Oleh karena itu banyak diantara penduduk usia sekolah yang bekerja, padahal seharusnya mereka masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA. Pendidikan memang sangat penting akan tetapi disisi lain mereka juga harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Dengan kondisi seperti masyarakat menengah kebawah kesadaran akan pentingnya tingkat pendidikan yang masih rendah maka akan menjadi masalah rendahnya partisipasi penduduk usia 16 – 18 tahun dalam mengenyam jenjang pendidikan SMA. Program pemerintah saat ini sudah sampai ke jenjang SMA dengan biaya gratis bahkan sekarang pemerintah memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu ekonomi keluarganya tetapi anak tersebut menunjukkan prestasi yang baik untuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi sekarang ini pemerintah membuat program bidang pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi pemerintah memberikan salah satunya seperti program beasiswa bidikmisi dan lain-lain. Beasiswa diperuntukan bagi anak yang orang tuanya kurang mampu, beasiswa bidikmisi ini sampai selesai kuliah atau sampai sarjana, jadi mereka merasa terbantu untuk biaya kuliah anak mereka.

Belanja/pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada dasarnya meningkat setiap tahun, tapi tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Rata-Rata lama sekolah yang masih menunjukkan angka dibawah 9 tahun yang menjadi alasan rendahnya angka partisipasi sekolah SMA di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sangat rendahnya pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat akan berdampak pada indeks pembangunan manusia, hal ini menjadi perhatian yang besar bagi pemerintah terhadap peningkatan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.

Pemerintah perlu membuat program penyuluhan untuk masyarakat betapa pentingnya pentingnya pendidikan bagi anak – anak mereka terutama di kabupaten – Kabupaten yang angka partisipasi sekolah rendah. Khususnya di pedesaan karena anak – anak mereka usia sekolah pada umumnya mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kebanyakan mereka putus sekolah dikarenakan mereka bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga mereka tidak lagi memikirkan tentang pendidikan mereka.

5. SIMPULAN

1. Belanja Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan masyarakat sadar akan pentingnya tingkat pendidikan bagi anak – anak mereka, apalagi pemerintah telah menetapkan program wajib belajar 12 Tahun sehingga dapat meringankan masyarakat dalam hal biaya pendidikan.

2. Belanja Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan program pemerintah di bidang pendidikan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu terutama dalam hal biaya pendidikan yang sangat mahal, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak – anak mereka.
3. Belanja Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan dengan program pemerintah di bidang pendidikan maka masyarakat yang kurang mampu dapat menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang pendidikan SMA dan bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi. Pemerintah memberikan program beasiswa sampai ke perguruan tinggi/Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Ubbiyati (2001), Ilmu Pendidikan, Rineka Gipta, Jakarta.
- Boediono, (1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik 2022. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Badan Pusat Statistik.
- Dumairy, MA.1996. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Erlin, Sri Mulyani,2007, Metodologi Penelitian Bisnis,Cetakan Pertama USU Press, Medan.
- Gujarati, D.N, (2013), Dasar-Dasar Ekonometrika (Terjehan), Salemba Empat.
- (2002). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Hayat B (2010), Mutu Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasbullah (2001), Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhinghan, ML (2010) *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- , (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Kurnia, Ahmad Syakir (2006) Model Pengukuran Kinerja Dan efisiensi Sektor Publik Metode FDH, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No.2, Agustus 2006, Hal. 1-20.
- Mangkoesebroto, Guritno,2000, *Ekonomi Publik*,Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi (2006) *Ekonomi Sumber Daya Manusia : Dalam Prespektif Pembangunan*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada.
- Melita. Cut, (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 7(1), 19-22.
- Misdawita, Arini (2013) analisis Dampak pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan. Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 147-161.
- Nanga, Muana (2001), *Makro ekonomi Teori Pengantar*,Penerbit raja grafindo Persada,Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*.Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000.
- Sugiyono, 2006, Metodologi Penelitian Bisnis, Alfabeta, bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan.(2002). *Pengantar Ekonometrika*. BPFE- UGM. Yogyakarta
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (2001) . *Ilmu Makro ekonomi*. Edisi Ketujuhbelas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi
- Sasana, Hadi(2009), Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi KabupatenKota Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10. No 1, Juni 2009, 103-124.
- Permana Dan Arianti (2012) Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2004-2009.

- Todaro , Michael. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004
- (1995). *Ekonomi untuk Negara Berkembang*. Jakarta : Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga

**ANALISIS PRODUKSI BERAS UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT**

Akhmad Yani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

Banyak factor yang berpengaruh tercukupinya ketersediaan beras di Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Melawi, mulai dari factor alam, factor teknis, penduduk, factor social dan ekonomi dan juga berkaitan dengan kebijakan. Memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan beras di Kabupaten Melawi, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menemukan dan menganalisis dengan menggunakan permodelan system dinamik kondisi ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi, (2) mengidentifikasi dan menganalisis dengan menggunakan permodelan system dinamik variable-variabel yang sangat sensitive memberikan pengaruh terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi, (3) menganalisis dengan menggunakan permodelan system dinamik melalui simulasi scenario dampak perubahan secara simultan nilai konstanta variable-variabel terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi. Penelitian ini telah mendapatkan bahwa (1) hasil simulasi tanpa scenario mendapatkan pada saat sekarang ini ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi mengalami surplus selama periode waktu analisis bahkan untuk beberapa dekade ke depan. (2) variable tingkat laju pertumbuhan penduduk merupakan variable yang paling sensitive dibandingkan dengan 3 variabel lainnya tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan. Namun jika seluruh ke empat variable tingkat konstanta masing-masing naik sebesar 1 persen, maka menyebabkan deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi sudah terjadi sejak tahun 2009 dan terus berlangsung selama beberapa decade ke depan.

JEL: Q180

Kata Kunci : Permodelan Sistem Dinamik, Ketersediaan Beras

1. PENDAHULUAN

Kenaikan dalam jumlah penduduk penduduk Kabupaten Melawi dalam 10 tahun terakhir mengisyaratkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap kebutuhan beras penduduk di Kabupaten Melawi. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan beras dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi beras pada lahan-lahan sawah yang ada di Kabupaten Melawi. Data luas tanam dan panen dari tahun 2014-2020 memperlihatkan terjadi penurunan rata-rata pertahun luas lahan padi sawah yang ditanam di Kabupaten Melawi sebesar -0.12 persen. Rata-rata luas lahan padi sawah yang ditanam siap untuk dipanen di Kabupaten Melawi hanya mencapai 65 persen. Selain itu, luas lahan sawah yang dipanen juga cenderung mengalami penurunan selama periode waktu tahun 2014-2020 yang mencapai penurunan rata-rata pertahun sebesar -2.97 persen (Dinas Pertanian Kab. Melawi, 2021, data diolah).

Hambatan lain menyangkut upaya meningkatkan produksi beras, adalah semakin sempitnya luas lahan pertanian yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Melawi. Di Kabupaten Melawi alih fungsi lahan untuk dijadikan sebagai lahan non pertanian relatif tinggi. Terjadinya alih fungsi lahan, dikhawatirkan akan memberikan dampak pada turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan di Kabupaten Melawi termasuk di Kabupaten Melawi Berdasarkan data yang ada, luas sawah di Kabupaten Melawi pada 2012 adalah 305.000 hektar, namun pada 2018 berkurang sebesar 66.000 hektar, sehingga luasan lahan sawah turun menjadi menjadi 239.000 hektar (Kabupaten Melawi dalam Angka, 2020). Jika mengacu data alih fungsi lahan pada tingkat Kabupaten Melawi, maka dapat diduga kuat alih fungsi lahan pertanian pun terjadi di Kabupaten Melawi. Tambahan pula kendala lain adalah sebagian besar lahan yang ada relatif kurang sesuai untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang beririgasi teknis.

Aspek lain bencana banjir yang dalam beberapa tahun belakangan ini sering melanda Kabupaten Melawi, maka dapat menyebabkan kemampuan produksi lahan sawah menjadi turun. Selain bencana banjir, bencana kekeringan dan kebakaran hutan dapat menimbulkan penurunan pada produksi padi, dan bencana ini juga terjadi di Kabupaten Melawi. Kegagalan dalam menjamin ketersediaan beras akan memberikan implikasi pada aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk Kabupaten Melawi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Melawi harus mampu meminimalisir berbagai kendala tersebut terutama dari aspek teknis dan kebijakan secara local terkait dengan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Melawi. Mendasari permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi variable-variabel signifikan serta memberikan pengaruh secara simultan terhadap ketersediaan beras melalui simulasi Business As Usual di Kabupaten Melawi dengan pendekatan model system dinamik dan (2) Menganalisis permasalahan persediaan beras dengan melakukan simulasi kondisi 30 tahun ke depan melalui simulasi scenario pesimis, moderat dan optimis dengan pendekatan model system dinamik.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori permintaan menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam hukum permintaan dikatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut dan sebaliknya apabila semakin tinggiharga suatu barang tersebut maka semakin sedikit permintaan terhadap barang itu. (Mankiw, 2007). Selanjutnya Mankiw (2007) mengemukakan bahwa Faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi permintaan suatu barang, antara lain adalah : a) Harga. Permintaan konsumen dapat dipengaruhi oleh harga, harga barang yang akan dibeli, harga barang pengganti (price of substitution product) maupun harga barang pelengkap (price of complementary product). b)

Pendapatan Konsumen. Konsumen tidak akan dapat melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan, jika pendapatan tidak dimiliki atau tidak mencukupi untuk membeli barang tersebut. Perubahan permintaan atas barang yang disebabkan oleh perubahan pendapatan, menjadikan sifat dari barang tersebut dibedakan atas beberapa golongan antara lain : 1) Barang Esensial (*essential goods*) adalah barang yang sangat penting dan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebutuhan atau permintaan akan barang ini tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan pendapatan. 2) Barang Normal (*normal goods*) adalah barang yang permintaannya berhubungan secara linier dengan pendapatan konsumen. 3) Barang Inferior (*inferior goods*) adalah barang yang permintaannya berhubungan terbalik dengan pendapatan konsumen. Bila pendapatan konsumen menurun maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat dan sebaliknya. c) Jumlah Konsumen. Jika pertambahan penduduk diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan hal ini juga akan menambah daya beli masyarakat. d) Selera Konsumen. Perubahan selera tercermin dalam perilaku pasar. Sekalipun tanpa ada perubahan harga barang maupun pendapatan, permintaan akan suatu barang akan suatu barang dapat berubah karena perubahan selera. e) Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Perubahan – perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan.

Dari Aspek penawaran. menurut Mankiw (2007) jumlah penawaran (*quantity supplied*) dari suatu barang adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dijual oleh penjual. Banyak factor yang menentukan jumlah penawaran barang, namun diantara berbagai factor yang paling dominan adalah harga barang itu. Apabila jumlah konsumen bertambah maka biasanya akan semakin banyak penawaran yang akan dilakukan produsen. Dalam hal tertentu untuk komoditas makana pokok seperti beras, pemerintah terkadang menetapkan suatu harga minimum bagi barang dan jasa tertentu yang disebut harga dasar (*price floor*) (Lipsey (1996). Pembentukan harga yang minimum terjadi pada tingkat harga pedagang besar karena hanya pada tingkat ini terdapat persaingan yang agak sempurna dan pada umumnya penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang baik tentang situasi pasar pada suatu waktu tertentu.

Sementara itu Machmud (2005) 2005 (dalam Purba, 2019) menjelaskan bahwa harga beras memiliki keunikan dalam proses penentuannya sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan harganya. Keunikan tersebut antara lain beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani perlu adanya kenaikan harga beras yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani. Namun jika harga beras tinggi penduduk miskin akan meningkat. Keunikan yang lain meskipun pemerintah telah menaikkan harga dasar penjualan padi tetap saja petani akan miskin. Kajian lain yang dilakukan Bank Dunia (2004) (dalam Sanny, L. 2010) menyimpulkan bahwa kenaikan harga beras hingga 33% telah menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 3,1 juta orang. Kesimpulan ini berarti setiap kali ada kenaikan harga beras akan terjadi pertambahan penduduk miskin. Sebaliknya, penurunan harga beras akan menurunkan angka kemiskinan, tetapi akan meningkatkan kemiskinan pada kelompok pertanian.

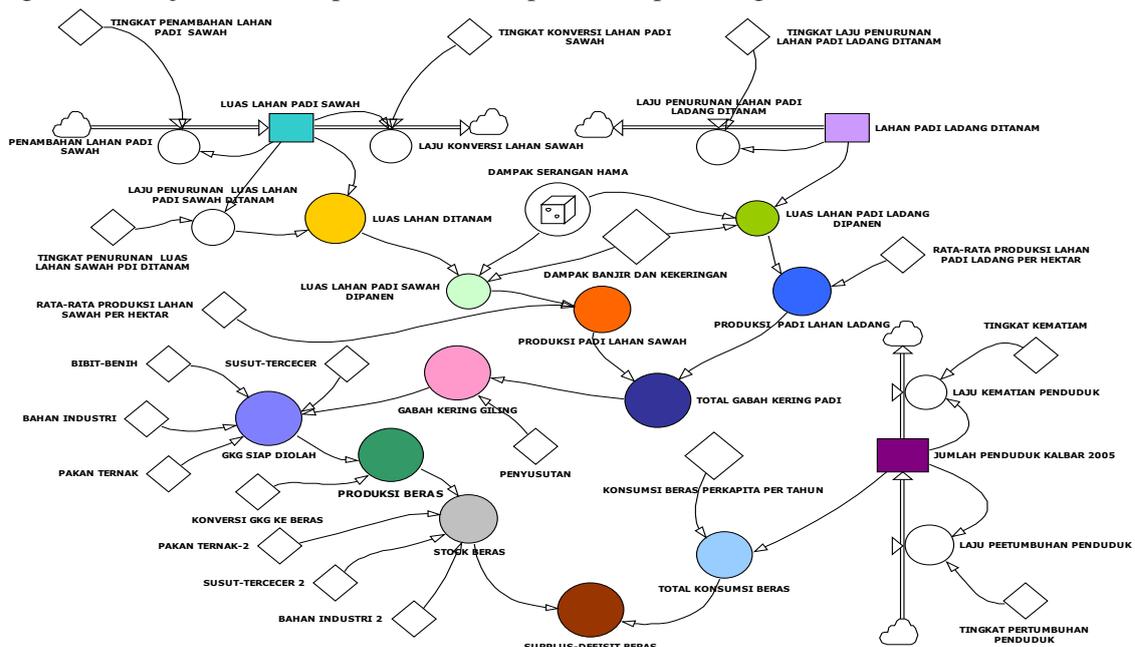
Dalam kaitannya dengan ketersediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat terdapat 2 (aspek) yang harus terpenuhi yaitu tersedianya dan tercukupinya jumlah serta harga beras yang terjangkau untuk dapat dibeli masyarakat terutama masyarakat miskin. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian. Semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut (Rahim dan Dwi Hastuti, 2008). Luas lahan sangat mempengaruhi produksi, karena apabila luas lahan semakin luas maka penawaran beras akan semakin besar, sebaliknya apabila luas lahan semakin sempit maka produksi padi akan semakin sedikit. Jadi hubungan luas lahan dengan produksi padi adalah positif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dilingkup wilayah Kabupaten Melawi, dengan periode waktu data yang dianalisis adalah tahun 2018 hingga tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data variabel penelitian dalam system dynamics yaitu data populasi penduduk serta data-data dari variable-variabel yang mempengaruhinya, data produksi beras dan produksi padi serta data-data dari variable-variabel yang mempengaruhinya, data luas lahan sawah serta data-data dari variable-variabel yang mempengaruhinya, dan data-data variable-variabel lain yang saling pengaruh mempengaruhi dari ketersediaan beras di Kabupaten Melawi. Pengolahan Data Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data dengan menggunakan model system dynamics, dimana analisis ini dilakukan dengan beberapa proses yaitu: 1) Konseptualisasi Causal Loop Diagram (*From Story To Structure*) 2) Penyusunan *Stock Flow Diagram (From Structure To Behavior)* 3) Verifikasi dan Validasi Model dengan menggunakan rumus MAPE.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perilaku model system dinamik untuk ketersediaan beras dalam mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Kabupaten Melawi dilakukan dengan membuat simulasi atas data-data yang tersedia selama periode waktu analisis yaitu dari tahun 2005 hingga 2050. Selain itu, simulasi dilakukan dengan membuat beberapa scenario untuk menganalisis pengaruh perubahan satu atau beberapa variable yang dimasukkan dalam model system dinamik ini terhadap ketersediaan beras untuk kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Melawi. Analisis perilaku ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu analisis tanpa scenario atau dikenal dengan analisis *business as usual* (BAU) dan analisis dilakukan dengan scenario. Analisis dengan scenario dibagi ke dalam ekstim, moderat dan lebi moderat. Variable-variabel yang digunakan dalam analisis scenario ini adalah variable tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat laju konversi lahan tanaman padi sawah, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan. Model system dinamik untuk ketersediaan beras dalam mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Kabupaten Melawi dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1. Model Stock Flow Diagram Ketersediaan Beras Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Melawi

1. Analisis Prilaku Model Tanpa Skenario

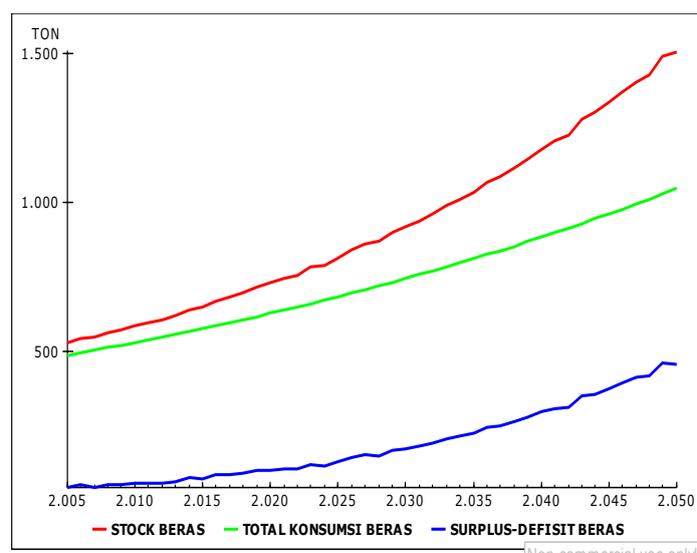
Analisis perilaku model tanpa scenario adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan data awal yang ada. Data-data yang digunakan dalam simulasi tanpa scenario ini adalah:

- Data penduduk tahun 2005 = 4.052.345 jiwa.
- Angka tingkat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk = 2,04 persen per tahun.
- Angka tingkat rata-rata kematian kasar = 0,32 persen per tahun.
- Angka rata-rata konsumsi beras per kapita penduduk Kalbar = 120 kg atau p,120 ton per tahun.
- Luas lahan tanaman padi sawah tahun 2005 = 292,220 hektar.
- Tingkat rata-rata laju pencetakan sawah baru lahan padi sawah = 6,4 persen per tahun.
- Tingkat rata-rata laju konversi lahan padi sawah = 3,63 persen per tahun.
- Tingkat rata-rata laju perubahan luas lahan padi sawah yang ditanam = 2,34 persen per tahun.
- Tingkat rata-rata produksi lahan tanaman padi sawah = 3,327 ton per hektar.
- Luas lahan tanaman padi ladang yang ditanam tahun 2005 = 118,102 hektar.
- Tingkat rata-rata laju penurunan lahan tanaman padi ladang yang ditanam = 1,4 persen per tahun.
- Tingkat rata-rata produksi lahan tanaman padi ladang = 1,905 ton per hektar.
- Tingkat rata-rata dampak serangan hama dan penyakit terhadap luas lahan tanaman padi yang ditanam (lahan tanaman padi sawah dan ladang) = 2,3-4,3 persen per tahun.
- Tingkat rata-rata dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap luas lahan tanaman padi yang ditanam (lahan tanaman padi sawah dan ladang) = 2,5 persen per tahun.

Berdasarkan data yang tersedia, maka simulasi tanpa scenario terhadap model system dinamik ketersediaan beras guna mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Kabupaten Melawi menghasilkan bahwa jumlah stock beras relative masih melebihi dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras untuk penduduk Kabupaten Melawi. Bahkan berdasarkan analisis simulasi data sejak tahun 2005 hingga tahun 2050, stock beras di Kabupaten Melawi hasil produksi lahan pertanian tanaman padi selalu surplus.

Tabel 1
Analisis Perilaku Model
Business As Usual

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	TOTAL KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	544,234	494,645	49,589
2.008	562,077	511,808	50,269
2.010	588,080	529,565	58,514
2.012	605,848	547,939	57,909
2.014	641,382	566,950	74,432
2.016	670,105	586,621	83,485
2.018	695,491	606,974	88,517
2.020	728,843	628,034	100,809
2.022	753,540	649,824	103,717
2.024	788,953	672,370	116,583
2.026	840,665	695,698	144,967
2.028	868,378	719,836	148,542
2.030	917,557	744,812	172,745
2.032	960,424	770,653	189,770
2.034	1.010,591	797,392	213,199
2.036	1.069,209	825,058	244,151
2.038	1.115,147	853,684	261,463
2.040	1.181,064	883,304	297,761
2.042	1.226,887	913,950	312,937
2.044	1.302,269	945,661	356,608
2.046	1.371,450	978,471	392,979
2.048	1.428,979	1.012,420	416,559
2.050	1.504,574	1.047,547	457,028



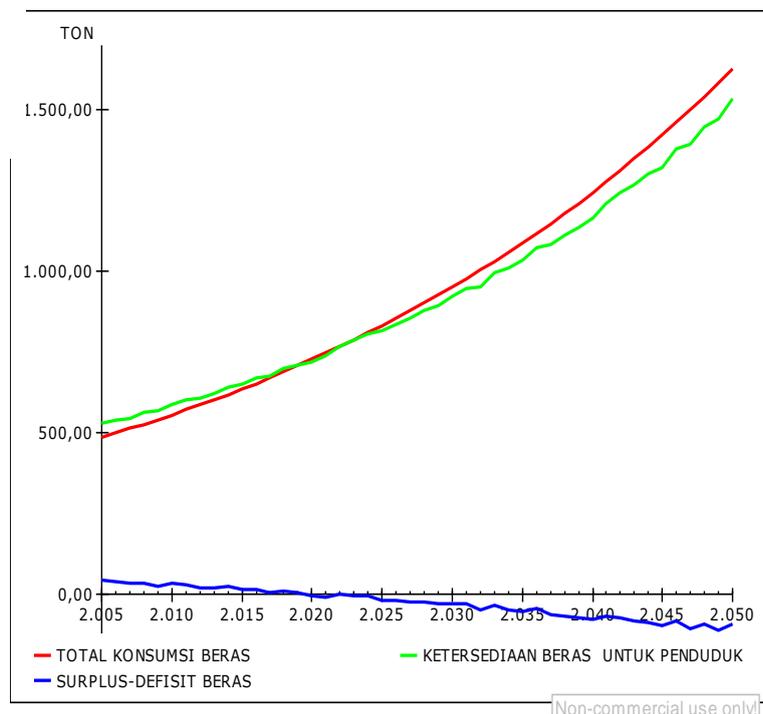
Grafik. 1
Analisis Perilaku Model Business As Usual

2. Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Simulasi scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk dalam model system dinamik bertujuan untuk menganalisis dari aspek jumlah dan dimensi waktu kemampuan Kabupaten Melawi mempertahankan kemandirian ketersediaan stock beras dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk jika terjadi perubahan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam scenario ini tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk yang semula sebesar 2,04 persen per tahun dinaikan 1 persen, sehingga tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk menjadi 3,04 persen per tahun dengan asumsi nilai variable-variabel lain dianggap tidak mengalami perubahan. Berikut ini hasil simulasi scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk yang memberikan dampak terhadap stock beras Kabupaten Melawi dari aspek jumlah dan dimensi waktu.

Tabel 2
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	537,696	499,508	38,187
2.008	561,283	527,051	34,231
2.010	590,239	556,113	34,127
2.012	607,859	586,777	21,082
2.014	641,260	619,131	22,129
2.016	668,213	653,270	14,943
2.018	699,852	689,291	10,561
2.020	720,603	727,299	-6,696
2.022	767,272	767,402	-0,129
2.024	804,666	809,716	-5,050
2.026	834,110	854,364	-20,254
2.028	878,165	901,473	-23,309
2.030	922,032	951,180	-29,149
2.032	953,997	1.003,628	-49,631
2.034	1.008,702	1.058,968	-50,266
2.036	1.073,507	1.117,360	-43,853
2.038	1.111,669	1.178,971	-67,302
2.040	1.167,883	1.243,979	-76,096
2.042	1.241,905	1.312,572	-70,667
2.044	1.299,843	1.384,947	-85,104
2.046	1.380,219	1.461,312	-81,094
2.048	1.448,977	1.541,889	-92,912
2.050	1.532,885	1.626,909	-94,024



Grafik 2
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan

Hasil simulasi berdasarkan scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1 persen telah menyebabkan ketersediaan stock beras Kabupaten Melawi yang semula selalu surplus selama periode waktu analisis, mengalami deficit mulai tahun 2020 dan terus mengalami deficit hingga sampai berakhirnya periode waktu analisis yaitu tahun 2050. Bahkan kondisi deficit akan terus berlangsung dalam periode waktu yang cukup lama, apabila tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap variable-variabel dalam model system dinamik ini yang mempengaruhi ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi.

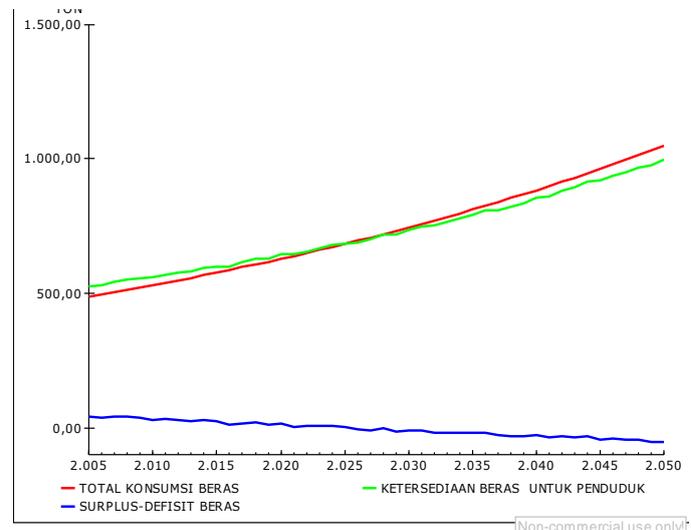
3. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah.

Untuk menganalisis dampak kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah terhadap stock beras di Kabupaten Melawi dalam model system dinamik ini, dilakukan simulasi scenario dengan menaikkan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah sebesar 1 persen, sehingga yang semula sebesar 3,63 persen menjadi 4,63 persen per tahun. Berikut ini hasil simulasi

scenario kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan padi sawah terhadap stock beras di Kabupaten Melawi.

Tabel 3
Skenario Kenaikan Tingkat Laju
Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi
Sawah

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	530,024	494,645	35,379
2.008	551,425	511,808	39,617
2.010	559,025	529,565	29,46
2.012	575,761	547,939	27,822
2.014	595,82	566,95	28,87
2.016	600,202	586,621	13,581
2.018	626,76	606,974	19,786
2.020	644,985	628,034	16,952
2.022	656,472	649,824	6,648
2.024	677,95	672,37	5,58
2.026	688,332	695,698	-7,366
2.028	717,165	719,836	-2,672
2.030	736,772	744,812	-8,04
2.032	752,673	770,653	-17,98
2.034	777,182	797,392	-20,21
2.036	806,616	825,058	-18,443
2.038	821,458	853,684	-32,226
2.040	855,328	883,304	-27,975
2.042	883,068	913,95	-30,882
2.044	915,792	945,661	-29,869
2.046	939,226	978,471	-39,245
2.048	966,303	1.012,42	-46,117
2.050	995,529	1.047,547	-52,018



Grafik 3
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi
Lahan Tanaman Padi Sawah

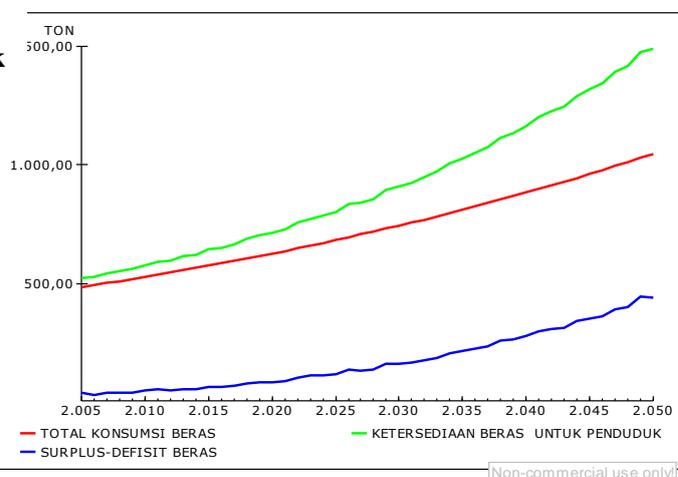
Hasil simulasi atas scenario meningkatnya tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah terhadap ketersediaan stock beras mendapatkan bahwa dengan meningkatnya tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sebesar 1 persen menyebabkan surplus stock beras hanya bisa tercapai pada tahu 2026. Mulai tahun 2027 hingga tahun 2050 Kabupaten Melawi akan mengalami deficit stock beras.

4. Skenario Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama Dan Penyakit

Untuk menganalisis kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit terhadap stock beras, maka tingkat dampak serangan hama dan penyakit dinaikkan sebesar 1 persen. Berikut ini hasil simulasi scenario kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit terhadap ketersediaan stock beras untuk kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Melawi.

Tabel 4
Skenario Kenaikan Tingkat Dampak
Serangan Hama dan Penyakit

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	529,972	494,645	35,327
2.008	554,853	511,808	43,045
2.010	580,496	529,565	50,931
2.012	599,197	547,939	51,258
2.014	624,280	566,950	57,330
2.016	653,556	586,621	66,935
2.018	688,368	606,974	81,394
2.020	713,184	628,034	85,151
2.022	758,593	649,824	108,770
2.024	788,510	672,370	116,140
2.026	834,544	695,698	138,846
2.028	858,126	719,836	138,290
2.030	910,114	744,812	165,302
2.032	950,443	770,653	179,790
2.034	1.006,097	797,392	208,705
2.036	1.051,837	825,058	226,779
2.038	1.114,183	853,684	260,499
2.040	1.165,010	883,304	281,706
2.042	1.225,607	913,950	311,657
2.044	1.289,770	945,661	344,109
2.046	1.343,992	978,471	365,521
2.048	1.413,783	1.012,420	401,363
2.050	1.489,695	1.047,547	442,148



Grafik 4
Skenario Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama
dan Penyakit

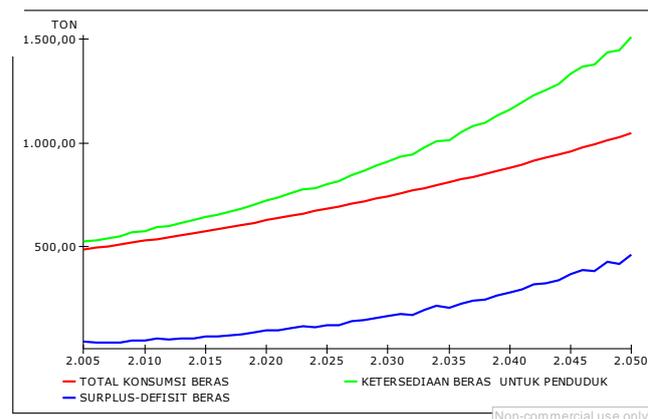
Simulasi scenario yang dilakukan dengan menaikkan tingkat dampak serangan hama dan penyakit sebesar 1 persen terhadap stock beras, menghasilkan ketersediaan stock beras tetap surplus selama periode waktu analisis. Dapat dikatakan bahwa dampak serangan hama dan penyakit pada lahan tanaman padi yang ditanam tidak menimbulkan deficit terhadap stock beras di Kabupaten Melawi selama dampak serangan hama dan penyakit dapat dikendalikan dengan obat-obatan seperti pestisida dan insektisida.

5. Scenario Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan.

Dalam simulasi permodelan system dinamik untuk ketersediaan beras dalam mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Melawi, discernariokan terjadi kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap berkurangnya luas tanaman padk yang dipanen sebesar 1 persen, sehingga tingkat dampak banjir dan kekeringan yang scenariokan dalam model ini menjadi 3,5 persen per tahun. Berikut ini hasil simulasi scenario dampak dari kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis.

Tabel 5
Skenario Kenaikan Tingkat Dampak
Bencana Banjir dan Kekeringan

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	533,012	494,645	38,366
2.008	549,859	511,808	38,051
2.010	576,460	529,565	46,895
2.012	602,679	547,939	54,741
2.014	627,657	566,950	60,707
2.016	656,953	586,621	70,332
2.018	685,183	606,974	78,209
2.020	725,019	628,034	96,985
2.022	759,356	649,824	109,532
2.024	783,263	672,370	110,893
2.026	819,646	695,698	123,948
2.028	865,246	719,836	145,410
2.030	913,275	744,812	168,463
2.032	943,564	770,653	172,910
2.034	1.011,854	797,392	214,462
2.036	1.052,714	825,058	227,656
2.038	1.098,433	853,684	244,749
2.040	1.164,355	883,304	281,052
2.042	1.232,797	913,950	318,847
2.044	1.286,777	945,661	341,116
2.046	1.366,797	978,471	388,325
2.048	1.439,673	1.012,420	427,253
2.050	1.510,775	1.047,547	463,228



Grafik 5
Skenario Kenaikan Tingkat Dampak
Bencana Banjir dan Kekeringan

Hasil simulasi scenario dengan menaikkan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan sebesar 1 persen menunjukkan stock beras untuk memenuhi kebutuhsn konsumsi penduduk masih tetap surplus selama periode analisi. Dengan kata lain bahwa dampak bencana banjir dan kekeringan pada lahan tanaman padi sawah yang ditanam tidak memberikan pengaruh yang menimbulkan deficit terhadap stock beras di Kabupaten Melawi sepanjang dampak tersebut dapat dimitigasi.

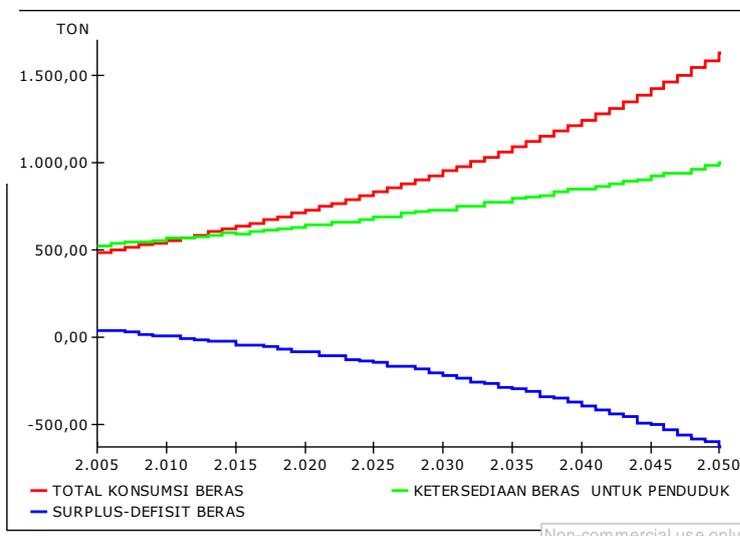
6. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Laju Kenaikan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah

Simulasi terhadap scenario ini dilakukan dengan menaikkan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah masing-masing sebesar 1 persen. Scenario kenaikan 1 persen ini telah menjadikan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang semula sebesar 2,04 persen menjadi 3,04 persen per tahun. Begitu juga dengan tingkat laju pertumbuhan alih fungsi lahan tanaman padi sawah yang semula sebesar 3,63 persen menjadi sebesar 4,63 persen per tahun. Berikut ini hasil simulasi scenario kenaikan tingkat laju

pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode analisis.

Tabel 6
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Laju Kenaikan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	538,485	499,508	38,977
2.008	543,346	527,051	16,294
2.010	566,470	556,113	10,357
2.012	572,296	586,777	-14,480
2.014	595,328	619,131	-23,804
2.016	608,642	653,270	-44,628
2.018	620,065	689,291	-69,226
2.020	644,374	727,299	-82,925
2.022	658,464	767,402	-108,938
2.024	670,952	809,716	-138,764
2.026	689,060	854,364	-165,304
2.028	718,248	901,473	-183,225
2.030	728,922	951,180	-222,258
2.032	748,466	1.003,628	-255,162
2.034	772,582	1.058,968	-286,387
2.036	805,712	1.117,360	-311,648
2.038	834,225	1.178,971	-344,746
2.040	849,038	1.243,979	-394,941
2.042	877,952	1.312,572	-434,620
2.044	897,848	1.384,947	-487,099
2.046	936,112	1.461,312	-525,200
2.048	962,227	1.541,889	-579,662
2.050	1.000,225	1.626,909	-626,683



Grafik 6
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Laju Kenaikan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah

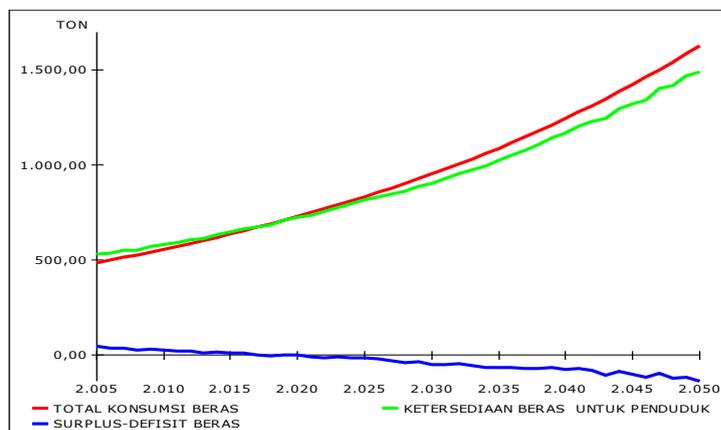
Simulasi scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah sebesar 1 persen terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, telah menyebabkan deficit stock beras di Kabupaten Melawi dimulai sejak tahun 2011. Jika scenario ini secara empiris telah terjadi sejak tahun awal periode analisis yaitu tahun 2005, maka sejak mulai tahun 2011, Kabupaten Melawi harus mengimpor atau mendatangkan beras dari daerah lain untuk menutupi deficit ketersediaan stock beras.

7. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit

Simulasi terhadap scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit masing-masing dinaikkan sebesar 1 persen, sehingga kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk menjadi 3,04 persen per tahun dan kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit menjadi sebesar 3,89 persen. Berikut ini hasil simulasi scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis.

Tabel 7
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Laju Dampak Serangan Hama dan Penyakit

(TON)			
TAHUN	STOCKBERAS (RIBUAN)	KONSUMSI BERAS (RIBUAN)	S/D BERAS (RIBUAN)
2.004			
2.006	532,70 TON	499,51 TON	33,19 TON
2.008	551,04 TON	527,05 TON	23,99 TON
2.010	580,27 TON	556,11 TON	24,16 TON
2.012	607,88 TON	586,78 TON	21,10 TON
2.014	631,32 TON	619,13 TON	12,19 TON
2.016	661,85 TON	653,27 TON	8,58 TON
2.018	681,42 TON	689,29 TON	-7,87 TON
2.020	725,01 TON	727,30 TON	-2,29 TON
2.022	753,21 TON	767,40 TON	-14,19 TON
2.024	794,91 TON	809,72 TON	-14,81 TON
2.026	833,48 TON	854,36 TON	-20,88 TON
2.028	860,08 TON	901,47 TON	-41,39 TON
2.030	901,92 TON	951,18 TON	-49,26 TON
2.032	954,61 TON	1.003,63 TON	-49,02 TON
2.034	992,37 TON	1.058,97 TON	-66,60 TON
2.036	1.049,57 TON	1.117,36 TON	-67,79 TON
2.038	1.105,51 TON	1.178,97 TON	-73,46 TON
2.040	1.167,64 TON	1.243,98 TON	-76,34 TON
2.042	1.229,61 TON	1.312,57 TON	-82,96 TON
2.044	1.296,28 TON	1.384,95 TON	-88,66 TON
2.046	1.343,24 TON	1.461,31 TON	-118,07 TON
2.048	1.419,24 TON	1.541,89 TON	-122,65 TON
2.050	1.487,82 TON	1.626,91 TON	-139,09 TON



Grafik 7
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit

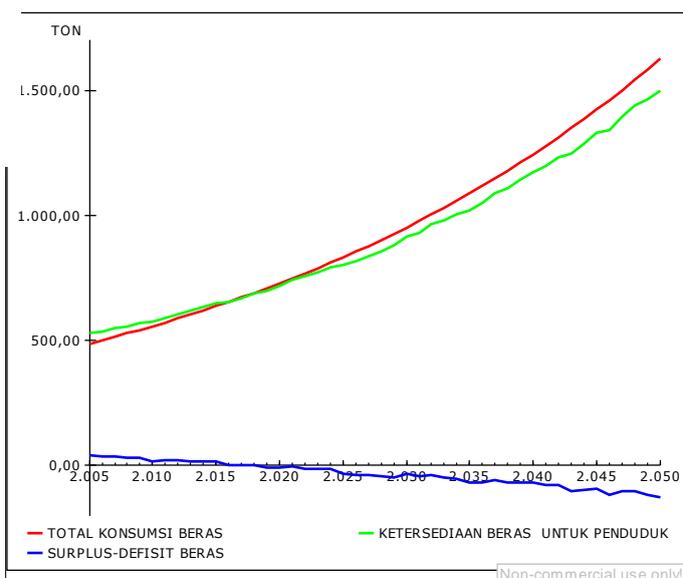
Mendasari pada hasil simulasi scenario ini kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit masing-masing sebesar 1 persen, memmmberikan dampak telah terjadi ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi dimulai sejak tahun 2018. Deficit ketersediaan stock beras akan terus terjadi hingga akhir periode waktu analisis yaitu tahun 2050. Bahkan apabila scenario dalam simulasi ini dilakukan hingga tahun 2100, deficit ketersediaan stock beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Melawi tetap terjadi.

8. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

Untuk melihat dampak dari kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, maka dilakukan simulasi scenario menaikkan angka tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 1 persen. Kenaikan ini menambah angka tingkat laju pertumbuhan penduduk menjadi sebesar 3,04 persen dan angka tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan meenjadi sebesar 3,5 persen. Berikut ini hasil simulasi scenario dampak kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaam stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis.

Tabel 8
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Laju Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan (TON)

TAHUN	STOC KBERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	532,922	499,508	33,414
2.008	554,873	527,051	27,822
2.010	572,860	556,113	16,747
2.012	605,820	586,777	19,043
2.014	634,261	619,131	15,129
2.016	655,444	653,270	2,174
2.018	687,567	689,291	-1,724
2.020	717,696	727,299	-9,602
2.022	754,677	767,402	-12,725
2.024	792,717	809,716	-16,999
2.026	817,544	854,364	-36,820
2.028	857,287	901,473	-44,186
2.030	914,886	951,180	-36,294
2.032	963,867	1.003,628	-39,761
2.034	1.003,894	1.058,968	-55,074
2.036	1.048,603	1.117,360	-68,756
2.038	1.109,874	1.178,971	-69,097
2.040	1.173,835	1.243,979	-70,144
2.042	1.233,187	1.312,572	-79,385
2.044	1.288,233	1.384,947	-96,714
2.046	1.341,369	1.461,312	-119,943
2.048	1.440,084	1.541,889	-101,805
2.050	1.496,426	1.626,909	-130,482



Grafik 8
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

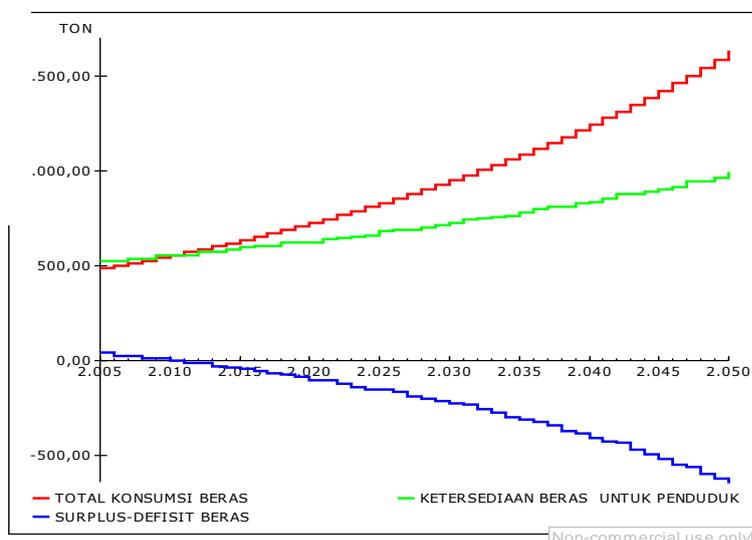
Jika memperhatikan hasil simulasi scenario secara simultan kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan yang masing-masing meningkat sebesar 1 persen sebelumnya, maka sejak tahun 2017 hingga tahun 2050 telah terjadi deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, jika scenario ini telah terjadi sejak tahun 2005, maka sejak tahun 2017, Kabupaten Melawi harus sudah mengimpor atau mendatangkan beras dari daerah lain untuk menutupi kekurangan ketersediaan stock beras guna mencukupi kebutuhan konsumsi beras penduduk.

9. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah Dan Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama Dan Penyakit.

Scenario berikut ini dilakukan dengan memasukkan 3 (tiga) variable yang secara simultan mempengaruhi ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis. Dalam scenario ini variable yang secara simultan mempengaruhi ketersediaan beras adalah kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk, kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah dan kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit. Dalam scenario ini tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman pangan dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dinaikkan sebesar 1 persen dari angka sebelumnya. Hasil simulasi scenario kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman pangan dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis dapat dilihat pada table dan grafik berikut ini.

Tabel 9
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah Dan Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama Dan Penyakit.

2.006	524,171	499,508	24,663
2.008	539,370	527,051	12,319
2.010	555,730	556,113	-0,382
2.012	574,697	586,777	-12,079
2.014	584,775	619,131	-34,356
2.016	602,770	653,270	-50,500
2.018	619,585	689,291	-69,707
2.020	625,300	727,299	-101,999
2.022	646,861	767,402	-120,541
2.024	660,512	809,716	-149,204
2.026	690,681	854,364	-163,683
2.028	698,832	901,473	-202,641
2.030	724,970	951,180	-226,210
2.032	751,088	1.003,628	-252,540
2.034	763,370	1.058,968	-295,598
2.036	797,024	1.117,360	-320,335
2.038	810,335	1.178,971	-368,636
2.040	836,452	1.243,979	-407,527
2.042	878,819	1.312,572	-433,753
2.044	890,934	1.384,947	-494,013
2.046	917,098	1.461,312	-544,215
2.048	946,607	1.541,889	-595,282
2.050	990,025	1.626,909	-636,884



Grafik 9
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah Dan

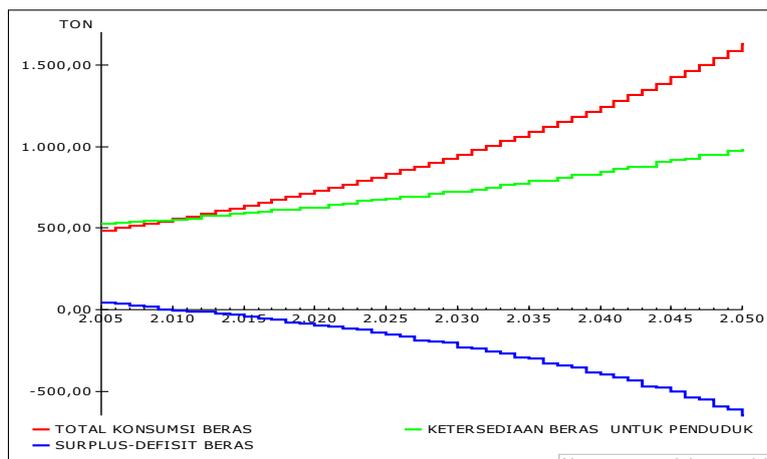
Hasil simulasi scenario mendapatkan bahwa dengan meningkatnya tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi serta tingkat dampak serangan hama dan penyakit sebesar 1 persen telah menyebabkan terjadinya deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi sejak tahun 2010 dan seterusnya mengalami deficit hingga tahun 2050.

10. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan.

Scenario 3 (tiga) variable yang secara simultan berpengaruh terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, juga dilakukan pada variable tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk, kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan dengan menaikkan tingkat angka konstanta ketiga variable tersebut masing-masing sebesar 1 persen. Hasil simulasinya dapat dilihat pada table dan grafik berikut ini.

Tabel 10
Skenario Kenaikan Tingkat Laju
Pertumbuhan Jumlah Penduduk,
Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi
Lahan Tanaman Padi Sawah Dan
Kenaikan Tingkat Dampak
Bencana Banjir dan Kekeringan

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	534,591	499,508	35,083
2.008	547,566	527,051	20,515
2.010	550,901	556,113	-5,212
2.012	574,910	586,777	-11,867
2.014	588,435	619,131	-30,697
2.016	600,455	653,270	-52,815
2.018	609,707	689,291	-79,585
2.020	626,660	727,299	-100,639
2.022	648,728	767,402	-118,674
2.024	672,127	809,716	-137,589
2.026	688,373	854,364	-165,991
2.028	708,914	901,473	-192,560
2.030	719,555	951,180	-231,625
2.032	749,358	1.003,628	-254,271
2.034	768,236	1.058,968	-290,733
2.036	786,662	1.117,360	-330,698
2.038	824,764	1.178,971	-354,206
2.040	847,202	1.243,979	-396,777
2.042	876,857	1.312,572	-435,715
2.044	905,728	1.384,947	-479,219
2.046	921,283	1.461,312	-540,029
2.048	946,555	1.541,889	-595,334
2.050	978,403	1.626,909	-648,506



Grafik 10
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah
Penduduk, Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan
Tanaman Padi Sawah Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana
Banjir dan Kekeringan

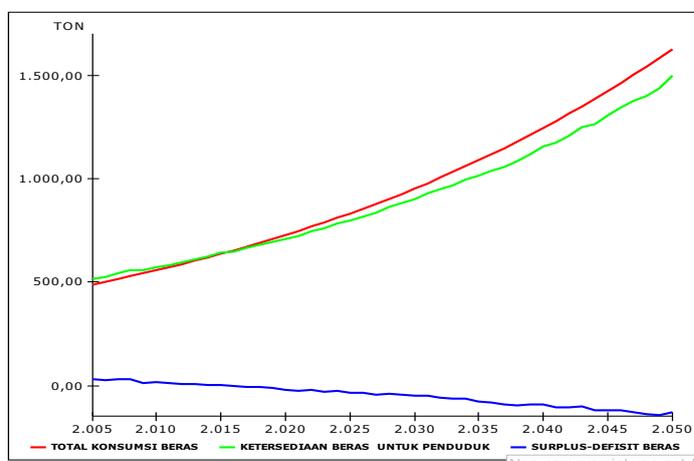
Hasil simulasi scenario dampak kenaikan 1 persen tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan telah menyebabkan terjadinya deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi dimulai sejak tahun 2010 dan seterusnya berlangsung sampai akhir periode waktu analisis.

11. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan.

Sama seperti scenario sebelumnya, untuk menganalisis dampak simultan kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, dilakukan simulasi atas scenario dengan menaikkan angka konstanta masing-masing variable tersebut sebesar 1 persen. Hasil simulasi scenario ketiga variable tersebut dapat dilihat pada table dan grafik berikut ini.

Tabel 11
Skenario Kenaikan Tingkat Laju
Pertumbuhan Jumlah Penduduk,
Kenaikan Tingkat Dampak
Serangan Hama dan Penyakit Dan
Kenaikan Tingkat Dampak
Bencana Banjir dan Kekeringan

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	524,877	499,508	25,369
2.008	555,554	527,051	28,503
2.010	573,078	556,113	16,965
2.012	593,696	586,777	6,919
2.014	622,208	619,131	3,076
2.016	648,948	653,270	-4,322
2.018	681,365	689,291	-7,927
2.020	707,453	727,299	-19,846
2.022	746,634	767,402	-20,767
2.024	782,794	809,716	-26,922
2.026	816,976	854,364	-37,387
2.028	862,484	901,473	-38,990
2.030	900,078	951,180	-51,103
2.032	945,714	1.003,628	-57,914
2.034	996,479	1.058,968	-62,489
2.036	1.036,258	1.117,360	-81,101
2.038	1.082,723	1.178,971	-96,248
2.040	1.153,156	1.243,979	-90,823
2.042	1.204,542	1.312,572	-108,030
2.044	1.262,816	1.384,947	-122,130
2.046	1.343,419	1.461,312	-117,893
2.048	1.401,273	1.541,889	-140,616
2.050	1.498,803	1.626,909	-128,106



Grafik 11
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan
Jumlah Penduduk, Kenaikan Tingkat Dampak
Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan
Tingkat Dampak Bencana Banjir dan
Kekeringan

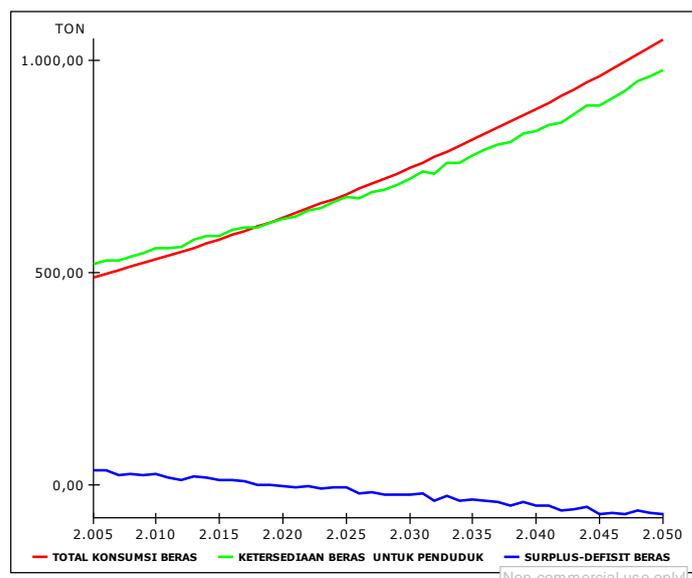
Berdasarkan simulasi terhadap scenario yang dilakukan telah menghasilkan bahwa secara simultan dampak kenaikan tingkat laju jumlah pertumbuhan penduduk, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis menyebabkan terjadinya defisit ketersediaan beras sejak tahun 2016 hingga tahun berakhirnya periode waktu analisis, yaitu tahun 2050.

12. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan.

Simulasi dampak kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, dilakukan dengan scenario menaikkan angka konstanta dari ketiga variable tersebut sebesar 1 persen. Berikut ini hasil simulasi scenario dari kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras dapat dilihat pada table dan grafik berikut ini.

Tabel 12
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

(TON)			
TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	527,267	494,645	32,622
2.008	536,679	511,808	24,872
2.010	555,166	529,565	25,601
2.012	557,863	547,939	9,924
2.014	583,410	566,950	16,460
2.016	597,806	586,621	11,185
2.018	605,241	606,974	-1,733
2.020	625,144	628,034	-2,889
2.022	644,398	649,824	-5,426
2.024	666,446	672,370	-5,924
2.026	673,047	695,698	-22,651
2.028	695,256	719,836	-24,580
2.030	719,230	744,812	-25,581
2.032	732,333	770,653	-38,320
2.034	757,818	797,392	-39,574
2.036	787,538	825,058	-37,520
2.038	804,918	853,684	-48,766
2.040	833,096	883,304	-50,207
2.042	853,280	913,950	-60,670
2.044	891,903	945,661	-53,758
2.046	910,734	978,471	-67,737
2.048	950,183	1.012,420	-62,237
2.050	975,992	1.047,547	-71,555



Grafik 12
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

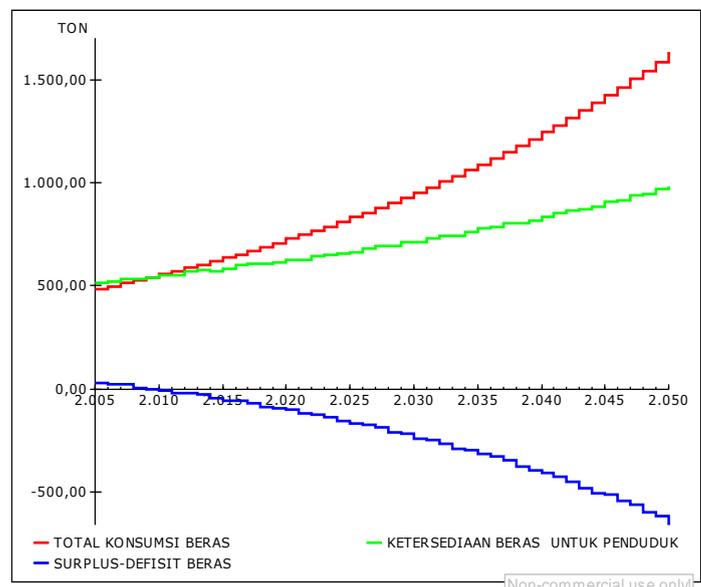
Hasil simulasi terhadap scenario yang dilakukan telah mendapatkan bahwa secara simultan dampak kenaikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis menyebabkan defisit ketersediaan stock beras terjadi dimulai sejak tahun 2018 dan selanjutnya defisit ini terus berlangsung berakhirnya periode waktu analisis yaitu tahun 2050 yang cenderung mengalami peningkatan.

13. Scenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan.

Sebagaimana diketahui dalam permodelan system dinamik untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras di Kabupaten Melawi, ada 4 (empat) variable yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat simulasi scenario yaitu tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk, alih fungsi lahan tanaman padi sawah, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan. Keempat variable ini secara simultan dapat memberikan pengaruh pada ketersediaan stock beras. Oleh karena itu, simulasi kali ini untuk menganalisis dampak simultan dari keempat variable tersebut terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis, dilakukan scenario dengan menaikkan angka konstanta keempat variable tersebut sebesar 1 persen. Berikut ini hasil simulasi scenario dampak keempat variable tersebut terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi.

Tabel 13
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

TAHUN	STOCK BERAS	KONSUMSI BERAS	SURPLUS-DEFISIT BERAS
2.004			
2.006	521,147	499,508	21,639
2.008	533,499	527,051	6,448
2.010	551,468	556,113	-4,644
2.012	567,510	586,777	-19,267
2.014	572,420	619,131	-46,711
2.016	598,310	653,270	-54,960
2.018	604,701	689,291	-84,590
2.020	627,612	727,299	-99,687
2.022	641,080	767,402	-126,322
2.024	655,763	809,716	-153,953
2.026	681,806	854,364	-172,558
2.028	692,458	901,473	-209,016
2.030	711,311	951,180	-239,869
2.032	740,386	1.003,628	-263,243
2.034	763,246	1.058,968	-295,722
2.036	788,362	1.117,360	-328,997
2.038	803,629	1.178,971	-375,341
2.040	836,550	1.243,979	-407,429
2.042	865,863	1.312,572	-446,708
2.044	882,837	1.384,947	-502,110
2.046	916,973	1.461,312	-544,339
2.048	947,125	1.541,889	-594,764
2.050	974,879	1.626,909	-652,030



Grafik 13
Skenario Kenaikan Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Laju Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi Sawah, Kenaikan Tingkat Dampak Serangan Hama dan Penyakit Dan Kenaikan Tingkat Dampak Bencana Banjir dan Kekeringan

Simulasi terhadap scenario yang dilakukan telah menghasilkan bahwa secara simultan dampak kenaikan tingkat laju pertumbuhan jumlah penduduk, alih fungsi lahan tanaman padi sawah, kenaikan tingkat dampak serangan hama dan penyakit dan kenaikan tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi menyebabkan deficit stock beras yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dan terus mengalami deficit hingga akhir periode waktu analisis yaitu tahun 2050.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas bertujuan untuk menganalisis tingkat sensitivitas variable-variabel dalam permodelan system dinamik ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi. Analisis sensitivitas ini dilakukan dengan membandingkan tingkat sensitivitas dari hasil simulasi beberapa

scenario atas variable-variabel yang memberikan dampak pada ketersediaan stock beras di Kalimantan Barat selama periode waktu analisis. Rangkuman hasil simulasi atas beberapa scenario baik scenario dengan variable tunggal dan multi variable yang memberikan dampak terhadap ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis terdapat pada table berikut ini.

Tabel 14
Hasil Simulasi Senario dan Analisis Sensitivitas Variabel Yang Mempengaruhi Ketersediaan Stock Beras di Kabupaten Melawi dalam Permodelan Sistem Dinamik

No	Bentuk Skenario	Surplus Beras	Deficit Beras	Tingkatan Perbandingan Sensitivitas
A	Variable tunggal			
1	Penduduk		Sejak Tahun 2020	Tinggi
2	Alih fungsi lahan		Sejak Tahun 2026	Sedang
3	Serangan hama	Surplus		Tidak Sensitive
4	Bencana	Surplus		Tidak Sensitive
B	Variabel Ganda 2 Variabel			
1	Penduduk + Konversi		Sejak Tahun 2011	Tinggi
2	Penduduk + Hama		Sejak Tahun 2018	Rendah
3	Penduduk + Bencana		Sejak Tahun 2017	Sedang
C	Variabel Ganda 3 Variabel			
1	Penduduk+ Konversi+ Hama		Sejak Tahun 2010	Tinggi
2	Penduduk + Konversi + Bencana		Sejak Tahun 2010	Tinggi
3	Penduduk + Hama+Bencana		Sejak Tahun 2016	Sedang
4	Konversi+ Hama+ Bencana		Sejak Tahun 2018	Rendah
D	Variabel Ganda dengan 4 Variabel			
1	Penduduk+Konversi+Hama+Bencana		Sejak Tahun 2009	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil olahan data, 2023

Pada dasarnya keempat variable yang digunakan dalam membuat permodelan system dinamik ini secara simultan dapat memberikan pengaruh pada ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi dan hal ini secara empiris bisa saja terjadi. Oleh karena itu simulasi scenario kombinasi keempat variable ini dilakukan serta menghasilkan bahwa jika secara simultan angka konstanta keempat variable tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan dan tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan dinaikkan masing-masing sebesar 1 persen, maka deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi sudah mulai terjadi pada tahun 2009 dan akan terus berlangsung sampai akhir tahun periode waktu analisis yaitu tahun 2050. Bahkan jika jangka waktu simulasi skenarionya diperpanjang hingga tahun 2080, deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi tetap terus terjadi.

Arah Fomulasi Kebijakan

Simulasi permodelan system dinamik ketersediaan beras untuk mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Kabupaten Melawi yang dilakukan tanpa adanya scenario atau tanpa merubah angka-angka pada variable dalam permodelan ini telah menghasil bahwa ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode analisis terus mengalami surplus. Hal ini berarti dengan kondisi yang sekarang, Kabupaten Melawi mampu mencapai surplus beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk dalam jangka panjang. Produksi beras yang berasal dari lahan pertanian tanaman padi di Kabupaten Melawi dapat menjamin tercapainya swa sembeda beras dalam mewujudkan kemandirian pangan khususnya beras secara berkelanjutan. Kondisi ini terus tetap dapat dipertahankan, selama angka-angka pada variable-variabel yang membentuk permodelan system dinamik ketersediaan beras di Kabupaten Melawi tidak berubah dan meningkat. Namun simulasi tanpa scenario (simulasi berdasarkan business as usual) tidak bisa

mengidentifikasi variable-variabel yang sensitif memberikan pengaruh signifikan pada perubahan ketersediaan stock beras, jika angka-angka variable dalam pembentukan permodelan system ini meningkat. Terkait hal ini, telah dilakukan simulasi scenario dengan menaikkan angka-angka konstanta pada beberapa variable untuk mengidentifikasi sensitivitas variable yang menyebabkan perubahan ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi selama periode waktu analisis.

Berdasarkan pada analisis sensitivitas, maka arah formulasi kebijakan dalam mempertahankan surplus dan kemandirian beras berkelanjutan di Kabupaten Melawi, maka pemerintah Kabupaten Melawi perlu melakukan langkah-langkah pengendalian tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi, tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan serta tingkat dampak serangan hama dan penyakit paling tidak untuk tetap terkendali seperti angka yang terjadi sekarang ini. Karena dengan tingkat angka yang terjadi sekarang ini, simulasi yang telah dilakukan menghasilkan Kabupaten Melawi dapat mempertahankan surplus beras sekaligus mencapai kemandirian pangan dalam 5 dekade ke depan.

Secara spesifik, arah formulasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang sekarang ini pada angka 2,04 persen pertahun untuk mengurangi pada tingkat yang lebih rendah lagi. Pengendalian tingkat laju pertumbuhan penduduk ini harus menjadi kebijakan yang sangat prioritas dalam mempertahankan surplus dan kemandirian beras, karena kenaikan tingkat laju pertumbuhan penduduk ini sebesar 1 persen, telah mengakibatkan deficit stock beras di Kabupaten Melawi terjadi pada tahun 2020. Untuk itu beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah:
 - Terus melanjutkan program keluarga berencana sebagaimana yang sudah berjalan sekarang ini yang dipadukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin.
 - Terus mengembangkan dan menambah program kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang disertai dengan peningkatan edukasi kelompok untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta ikatan solidaritas social yang tinggi.
2. Mengendalikan tingkat laju alih fungsi lahan tanaman padi sawah paling tidak untuk tetap pada angka 3,63 persen pertahun seperti sekarang ini. Hal ini sangat penting dilakukan, karena hasil simulasi dengan scenario menaikkan tingkat laju alih fungsi lahan ini sebesar 1 persen, telah menyebabkan deficit stock beras di Kabupaten Melawi terjadi mulai pada tahun 2027. Oleh karena itu beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam pengendalian dan penurunan tingkat laju alih fungsi lahan adalah:
 - Membuat aturan yang ketat dan sanksi yang tegas baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati terhadap upaya-upaya kegiatan untuk melakukan alih fungsi lahan tanaman padi sawah menjadi kegiatan non tanaman pangan.
 - Melakukan program sertifikasi lahan tanaman padi sawah untuk menjamin legalitas kepastian kepemilikan bagi petani dan sekaligus menjadi sumber data akurat bagi pemerintah atas ketersediaan lahan tanaman padi sawah. Hal ini juga mempermudah dalam membuat perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya tanaman padi.
3. Scenario dengan menaikkan angka konstanta masing-masing sebesar 1 persen untuk dampak serangan hama dan penyakit serta bencana banjir dan kekeringan, tidak mempengaruhi ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi, stock beras tetap surplus selama periode waktu analisis bahkan untuk beberapa decade ke depan. Sekalipun demikian kedua variable ini perlu untuk dikendalikan dampaknya terhadap ketersediaan stock beras pada tingkat yang paling tidak tetap berada pada angka yang terjadi seperti sekarang ini. Beberapa arah kebijakan yang

dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian dampak serangan hama dan penyakit serta dampak bencana banjir dan kekeringan adalah sebagai berikut:

- Untuk dampak serangan hama dan penyakit:
 - a) Pada saat ini sebelum ada alternative teknologi ramah lingkungan, perlu mengintensifkan kegiatan penyemprotan tanaman padi dengan obat-obat pemberantasan hama dan penyakit pestisida dan insektisida. Namun mengingat tidak semua petani mampu membeli obat-obatan ini, diperlukan langkah untuk memberikan subsidi untuk obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit ini agar harganya bisa dijangkau oleh petani.
 - b) Mendorong petani menggunakan cara penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu dalam bentuk program pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dengan didampingi para penyuluh pertanian lapangan (PPL).
 - Untuk dampak bencana banjir dan kekeringan:
 - a) Untuk pengendalian banjir pada lahan-lahan tanaman padi, pemerintah harus membangun tanggul-tanggul penahan air dan pembuatan saluran untuk pembuangan air sekaligus bisa berfungsi sebagai saluran irigasi.
 - b) Untuk pengendalian kekeringan pada lahan tanaman padi, pemerintah perlu untuk terus melanjutkan program pompanisasi, yaitu program bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan dalam bentuk natura (mesin pompa) untuk mengatasi kekurangan pasokan air pada tanaman padi.
 - c) Selanjutnya pengendalian kekeringan pada lahan tanaman padi, pemerintah untuk terus melanjutkan program pembangun embung yang berfungsi sebagai penampung air untuk dijadikan sebagai cadangan air dalam mensupply air bagi tanaman padi jika terjadi kekeringan.
4. Scenario naiknya angka konstanta semua variable secara simultan naik sebesar 1 persen, memberi dampak yang massive pada ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi, sehingga deficit ketersediaan stock beras terjadi mulai sejak tahun 2009 dan deficit ini terus terjadi hingga akhir tahun periode analisis bahkan berlangsung terus dalam beberapa decade ke depan. Tentu hal ini perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi kenaikan dampak tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman sawah, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan secara simultan. Dalam konteks ini, perlu perencanaan dan kebijakan yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi diantara berbagai pihak yang terkait dan lintas sektoral, dalam pengendalian tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan tanaman sawah, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan ini.

5. SIMPULAN

Hasil simulasi tanpa scenario mendapatkan pada saat sekarang ini ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi mengalami surplus selama periode waktu analisis bahkan untuk beberapa dekade ke depan. Selanjutnya Sensitivitas yang paling ekstir pada permodelan system dinamik untuk ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi yaitu terjadinya kenaikan angka konstanta keempat variable dalam analisis ini. Apabila tingkat laju pertumbuhan penduduk, tingkat laju alih fungsi lahan, tingkat dampak serangan hama dan penyakit serta tingkat dampak bencana banjir dan kekeringan secara simultan naik sebesar 1 persen, maka hal ini menyebabkan deficit ketersediaan stock beras di Kabupaten Melawi lebih cepat terjadinya yaitu mulai tahun 2009 dan terus berlangsung hingga beberapa decade ke depan.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang disampaikan pada penelitian ini pada dasarnya untuk memperkuat dan melengkapi arah formulasi kebijakan yang sebelumnya sudah dikemukakan dan bersifat umum. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dalam mempertahankan surplus beras yang sudah dicapai sekarang ini adalah:

1. Melakukan Penyusunan Masterplan daya dukung lahan tanaman padi sawah menjadi suatu langkah strategis. Hal ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan lahan tanaman padi sawah dalam rangka untuk mempertahankan surplus ketersediaan stock beras yang sudah tercapai serta menuju tercapainya kemandirian pangan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
2. Perlu penyusunan perencanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan gambaran tentang kependudukan Kabupaten Melawi masa kini dan 30 tahun ke depan. Hal ini diperlukan sebagai dasar membuat perencanaan pembangunan secara komprehensif maupun perencanaan sektoral termasuk perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan tanaman padi.
3. Menyusun Masterplan pengelolaan kawasan hutan untuk menentukan daya dukung luas kawasan hutan minimal yang harus dipertahankan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sekaligus untuk menghindari terjadinya alih fungsi kawasan hutan menjadi kegiatan kegiatan non pertanian dan non kehutanan. Penyusunan Masterplan pengelolaan kawasan hutan diperlukan dalam rangka pengendalian terhadap banjir dan kekeringan termasuk memperluas catchment arean (kawasan tangkapan hujan).
4. Dukungan pendanaan yang memadai dan proporsional melalui alokasi anggaran sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur pada pertanian tanaman padi seperti diantaranya pembuatan tanggul pengendali banjir, pembangunan irigasi serta pembuatan embung sebagai cadangan persediaan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang (a), B. 1993. *Ekonomi Perberasan, Jagung, dan Minyak Sawit di Kalimantan Barat*. PT. Dharma Karsa Utama. Jakarta
- Amang, B. 1995. *Kebijakan Pangan Nasional*. PT. Dharma Karsa Utama. Jakarta
- Amirullah. 2005. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agung, G.D., 2020. *Pemodelan Sistem Dinamis Produksi Tempe “Sumber Mas” Di Kabupaten Jember*. Skripsi. Program Studi Manajemen Agroindustri Jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember 2020
- Bantuan, I.F., 2010. *Simulasi Model Dinamik Pada Sistem Deteksi Dini Untuk Manajemen Krisis Pangan*. Skripsi. Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Daniel, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Farida, dkk. 2010. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Febriaty, H. 2016. *Analisis Perkembangan Impor Beras Di Kalimantan Barat*. EKONOMIKAWAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2016. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sunatera Utara*.
- Forrester, J.W. (1994), *System dynamics, systems thinking, and soft OR*. *Syst. Dyn. Rev.*, 10: 245-256. <https://doi.org/10.1002/sdr.4260100211>
- Godam, 2007. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi / Pengeluaran Rumah Tangga – Pendidikan Ekonomi Dasar*, <http://organisasi.org/faktor> yang mempengaruhi-tingkat-konsumsi-pengeluaran-rumah-tangga-pendidikan-ekonomi-dasar.
- Hartisari. 2007. *Sistem Dinamik : Konsep dan Pemodelan untuk Industri dan Lingkungan*. SEAMEO BIOTROP. Bogor: Kalimantan Barat.
- <https://www.KalimantanBarat-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/>. Di akses 16 Mei 2020.
- <https://kalbar.antaraneews.com/berita/302229/konsumsi-beras-penduduk-kalbar>. Di Akses 16 Mei 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/16380551/> di akses 16 Mei 2020.

- Irawan, B. (2003). Konversi lahan sawah di Jawa dan dampaknya terhadap produksi padi (Land conversion in Java and its impact on rice production). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, R.I., Bogor
- Kotler, Philip. (2001). Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol. Jakarta : PT. Prehallindo
- Lispey, R.G., dan P. N. Courant. 1996. Microeconomics. Eleventh Edition. Harper Collins College Publisher. New York.
- Mankiw, N. G. 2007. Makroekonomi. Terjemahan. Erlangga. Jakarta.
- Marimin. 2005. Teknik dan Aplikasi : Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. PT. Grasindo, Jakarta.
- Muhammadi, Amminullah, E., & Soesilo, B. (2001). Analisis sistem dinamis: lingkungan hidup, sosial, ekonomi, manajemen. Jakarta: UMJ
- Pranolo, Tito, 2000, "Peran Bulog Sebagai Lembaga Distribusi Cadangan Pangan Nasional", Round Table, Harga Gabah, Deptan, Jakarta.
- Purba, Kristina, M.P. 2019. Analisis Permintaan Dan Penawaran Beras Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.
- Rahim, A., dan Dwi Hastuti, D. R., 2008. Pengantar, Teori dan Kasus Ekonomika Pertanian. Penebar Swadaya, Jakarta
- Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika, B. Sayaka, and S. Bahri. 2006. Financial and economic profitability of rice farming across production environments in Kalimantan Barat. Proceeding of International Rice Congress on Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity, at National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, India, October 2006. International Rice Research Institute, Los Banos, the Philippine
- Sany Lim., 2010. Analisis Produksi Beras Kalimantan Barat. [Journal.binus.ac.id/index.php/article](http://journal.binus.ac.id/index.php/article).
- Soekartawi, 1995 .Pembangunan Pertanian. Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, B (2019). Kuliah Umum Systems Thinking dan System Dynamics. Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Kalimantan Barat
- Sudarsono. 1990. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. LP3ES. Jakarta.
- Suhardjo, dkk. 1986. Pangan Gizi dan Pertanian. Universitas Kalimantan Baratn (UI – Press). Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2005. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2010. Teori Pengantar Mikro Ekonomi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sumodiningrat G. 2001. Menuju Swasembada Pangan Revolusi Hijau. Jakarta: RBI.
- Suwarto.2007.Pengaruh kelembagaan lahan dan tenaga kerja pada usahatani terhadap konsumsi pangan dan non-pangan petani dikabupaten gunung
Dikutip:http://agriculture.upnyk.ac.id/index.php?option=com_content&vw=article&id=106:
- Sterman, John D. 2000. Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World. New York: Irwin McGraw-Hill.: 1-14

**PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL TANJUNGPURA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH)**

Ragil Fatin Cempaka¹, Erni Panca Kurniasih²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang sangat penting bagi suatu negara. Keberadaan pelabuhan apalagi pelabuhan bertaraf internasional pasti akan memberikan dampak ke masyarakat mulai dari saat pembangunan hingga selesai pembangunan pelabuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pembangunan pelabuhan internasional Tanjungpura terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat di dua desa yaitu Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Kunyit Laut yang merupakan area yang dibebaskan untuk pembangunan pelabuhan internasional tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa pembangunan pelabuhan Tanjungpura memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Kunyit Laut. Pemilik tanah mendapat ganti untung pembebasan lahan dengan harga yang sangat berpatutan. Selain tanah, tanaman yang tumbuh di atas lahan yang dibebaskan serta bangunan juga dinilai dan diberikan ganti untung yang sesuai. Pemilik togog dan kelong juga mendapat ganti untung sesuai luasnya, sementara pekerja togog dan kelong serta nelayan yang terdampak dipekerjakan di pelabuhan dengan gaji yang sesuai.

Kata kunci : dampak pembangunan pelabuhan, keadaan sosial ekonomi, lingkungan hidup

1. PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya bagi negara-negara maritim seperti Indonesia, karena pelabuhan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan keberadaan pelabuhan, aktivitas ekonomi suatu negara dapat berjalan lebih lancar, mengingat mayoritas barang ekspor dan impor di banyak negara dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal, yang memerlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki beberapa fungsi yang berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Pelabuhan menjadi titik penting dalam menghubungkan antar pulau maupun dengan dunia internasional. Sebagai titik pertemuan antara transportasi darat dan laut, pelabuhan memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah hinterlandnya yang menjadi pusat kegiatan distribusi barang dan mobilitas manusia yang signifikan. Sebagai bagian integral dari sistem transportasi, pelabuhan memiliki dampak yang besar dalam dinamika perekonomian suatu negara.

Pembangunan pelabuhan internasional di Kijing adalah salah satu lokasi alternatif pembangunan pelabuhan internasional yang dianggap paling cocok, dengan mempertimbangkan 10 aspek penilaian kondisi tempat yang akan dibangun, termasuk kedalaman pantai, arus laut, pasang surut, gelombang, sedimentasi, aksesibilitas, ketersediaan lahan, fasilitas pendukung, dan kondisi lahan (Wahono, 2015). Pelabuhan memiliki peran vital dalam perkembangan industri,

perdagangan, dan jasa, terutama di negara maritim seperti Indonesia. Pelabuhan memungkinkan kelancaran kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Barang-barang ekspor dan impor kebanyakan dikirim melalui jalur laut, membutuhkan pelabuhan sebagai tempat berlabuh, meskipun rute perjalanan bisa melalui alat transportasi lain (Febria, 2017).

Pelabuhan Internasional Tanjungpura, yang dulunya dikenal sebagai Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan konektivitas, infrastruktur kemaritiman, dan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat. Sebagai salah satu dari tujuh terminal penghubung nasional, pelabuhan ini akan menjadi yang terbesar di Kalimantan, mendukung rute pelayaran antar negara dan antar daerah, serta terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan pelabuhan internasional di Tanjungpura, Kalimantan Barat, memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk berkembang sebagai daerah industri. Munculnya perusahaan seperti PT. ANTAM Tbk, PT. Wilmar, dan perusahaan konstruksi penyimpanan alat berat di sekitar pelabuhan menunjukkan potensi pertumbuhan industri di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan ini akan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Selama ini, sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit hanya diekspor melalui provinsi lain karena Kalimantan Barat belum memiliki pelabuhan besar yang mampu melayani kapal besar. Dengan beroperasinya pelabuhan internasional Tanjungpura, ekspor minyak kelapa sawit dari Kalimantan Barat dapat langsung diekspor, memberikan dampak ekonomi berupa penerimaan pajak ekspor. Kecamatan Sungai Kunyit terdiri dari 12 desa, termasuk Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut, yang langsung terdampak oleh pembangunan pelabuhan internasional. Oleh karena itu, kedua desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengevaluasi dampak pembangunan pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Tanjungpura merupakan program nasional yang mendesak untuk dilaksanakan. Ditinjau dari sudut kepentingan maka Pelabuhan Tanjungpura ini mempunyai kemanfaatan yang sangat besar bagi perekonomian nasional umumnya, terutama perekonomian Kalimantan Barat. Di sisi lain, pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Tanjungpura tersebut pastinya akan membawa dampak bagi penduduk sekitar pelabuhan yang tinggal di Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut serta Kabupaten Mempawah secara umum baik dampak positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Pelabuhan Tanjungpura terhadap kondisi sosial ekonomi dan kondisi lingkungan hidup di Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut

2. KAJIAN EMPIRIS

Peran pelabuhan terhadap pembangunan ekonomi semakin besar seiring dengan semakin penting-nya pelabuhan dalam aktivitas logistik, khususnya transportasi intermoda atau multimoda (Mandasari dkk, 2017). Selain itu, pelabuhan biasanya juga menjadi tempat bermulanya suatu kota atau peradaban dan tidak sedikit terdapat bangunan cagar budaya dan bangunan colonial pada wilayah perkotaan (Nurhijrah & Fisu, 2019), khususnya kota pelabuhan. Salah satu Peran penting dan strategis suatu pelabuhan dalam aktivitasnya sangat besar disumbangkan bagi pertumbuhan industri, ekonomi dan perdagangan serta merupakan bidang usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional (Elfrida, 2017)

Pelabuhan merupakan bandar yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan aktifitas bongkar muat barang dan naik-turun penumpang seperti dermaga, tambatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya (Fisu, 2016). Pengembangan pelabuhan berbasis logistik dilakukan karena paradigma strategi pengembangan pelabuhan saat ini tidak lagi hanya

pada aspek teknis, seperti penambahan fasilitas pelabuhan baru atau memperluas area pelabuhan, namun sudah bergeser pada perspektif ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan lebih ditekankan pada aspek logistic Pelabuhan merupakan inti dalam model rantai logistic pelabuhan yang mengintegrasikan berbagai pelaku jasa logistik (termasuk penanganan, pengolahan, transportasi, pergudangan, bea cukai, distribusi, atau bahkan keuangan, perusahaan layanan bisnis, dan lain-lain) dan pelanggan (termasuk pengirim dan pengiriman perusahaan, dan lain-lain) (Fisu, Didiharyono & Bakhtiar, 2020).

Pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama arus barang, baik ekspor maupun impor, dan pemindah muatan antar moda transportasi. Adanya pelabuhan sebagai infrastruktur ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, pelabuhan merangsang aktivitas ekonomi yang lebih besar, misalnya tumbuhnya perusahaan dan pabrik di sekitar pelabuhan. Aktivitas ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal didekatnya, sehingga akan membentuk daerah baru. Menurut Mukherjee (2001), India memiliki armada pelayaran dagang terbesar di antara negara-negara berkembang. Diperkirakan bahwa sekitar 90 persen dari perdagangan barang dagangan dan komoditas dunia diangkut oleh kapal. Persentase ini tetap cukup konstan selama satu abad terakhir, namun volumenya meningkat luar biasa dalam dua dekade terakhir.

Sesuai Berköz, (1999), pelabuhan memiliki 2 manfaat utama. Pertama-tama, pelabuhan berperan sebagai penghubung penting dari pedalaman ke titik-titik di luar negeri. Di sisi lain, negara juga membutuhkan hubungan internal, seperti hubungan ke pelabuhan lain, koneksi bandara dan kereta api jika diperlukan menjalankan peran mereka secara efisien. Kedua, angkutan laut adalah cara transportasi termurah jika dipertimbangkan hal konsumsi bahan bakar dan investasi. Jika dibandingkan dengan sistem transportasi lainnya, transportasi kereta api membutuhkan konsumsi energi dua kali lipat, sedangkan transportasi jalan raya membutuhkan sepuluh kali lipat dari laut kendaraan. Selama beberapa dekade terakhir dunia telah menjadi semakin sadar lingkungan dan, bersama konsumsi energinya lebih rendah, transportasi laut jelas lebih ramah lingkungan dibandingkan sarana lain.

Biaya transportasi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat investasi asing yang lebih rendah, rasio tabungan yang lebih rendah, ekspor yang berkurang layanan, berkurangnya akses ke teknologi dan pengetahuan, dan penurunan lapangan kerja. Diperkirakan menjadi dua kali lipat biaya transportasi menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih dari setengah poin persentase. Dampak ini mungkin tampak rendah, tetapi perlu dicatat bahwa pertumbuhan yang lebih rendah dalam jangka panjang menghasilkan variasi yang cukup besar dalam per pendapatan kapita. Dari studi yang dilakukan oleh Sánchez et al. (2002), ditemukan bahwa pelabuhan laut lebih efisien jelas terkait dengan biaya pengiriman yang lebih rendah setelah mengontrol jarak, jenis produk, ketersediaan layanan kapal, dan biaya asuransi, antara lain. Faktor efisiensi pelabuhan, sebagai variabel penjelas, mencerminkan sekumpulan komponen dengan mudah dapat diamati di terminal pelabuhan mana pun. Variabel yang dipertimbangkan termasuk tingkat pemuatan kontainer per jam, rata-rata tahunan kontainer yang dimuat per kapal, waktu tunggu, dan beberapa lainnya. Menurut Sánchez et al. (2002), 25% peningkatan satu faktor efisiensi berarti pengurangan sekitar 2% dari total biaya transportasi laut.

Menurut Ferrari (2011), terdapat pengaruh positif pelabuhan terhadap pembangunan lokal. Pengaruhnya lemah (elastisitas kurang dari 0,05) dan lebih lemah dari infrastruktur transportasi lainnya (yaitu bandara). Studi yang dilakukan oleh Kowalczyk (2012) setuju bahwa kecenderungan dunia baru-baru ini dalam transportasi kargo sedang berkembang pesat. Total biaya penanganan kargo di pelabuhan laut dapat dikurangi secara substansial dan total waktu yang dibutuhkan untuk operasi pelabuhan dapat dikurangi dipersingkat.

Oliveira (2008) mengemukakan bahwa pemerintah terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengurangi efek berbahaya yang disebabkan oleh spesies asing dibawa ke lingkungan laut. Memanfaatkan analisis regresi, Berköz (1999) menemukan peran pelabuhan dalam pembangunan suatu bangsa sebagai bagian dari pelayanan transportasi. Pendapatan Nasional Bruto diambil sebagai variabel dependen dan panjang pelabuhan, angka lalu lintas total, impor dan ekspor, kunjungan kapal, jumlah pekerja dan penyimpanan / pergudangan dianggap sebagai variabel independen. Perdagangan dilakukan di pelabuhan dan melalui jalur laut transportasi merupakan salah satu elemen fundamental yang memiliki pengaruh langsung terhadap ekonomi makro suatu negara. Dalam analisis regresi, ditentukan bahwa total beban ekspor dan impor dan kunjungan kapal sangat berkorelasi dengan pendapatan nasional bruto kota. Di sisi lain, asumsi bahwa ukuran pelabuhan, jumlah pekerja dan kapasitas stok berhubungan dengan pendapatan nasional bruto terbukti gagal.

Hasil penelitian Wang (1998) di wilayah Pearl River Delta (PRD) di Provinsi Guangdong di Cina, sistem pelabuhan sangat padat diintensifkan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem logistik kontainer di daerah-daerah ini telah berubah secara luar biasa dekade terakhir. Di sisi lain, temuan Guoqiang et al. (2005), PDB provinsi Guangdong meningkat dari 573,4 miliar Yuan pada awal tahun reformasi 1979 menjadi 1362,6 miliar Yuan pada tahun 2003; dan dalam periode yang sama pertumbuhan tahunan tingkat PDB per kapita mencapai 11,4%.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang dampak pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak terhadap penduduk di Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diikuti dengan interpretasi secara rasional berbagai temuan dilapangan sekaligus menganalisis semua keadaan masyarakat dilokasi penelitian.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sekitar pelabuhan, yaitu dengan cara wawancara langsung yang dibantu oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden kunci yang terdiri dari ketua RT, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pemilik Usaha, pemilik togog, dan nelayan terdampak yang berasal dari Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut. Menurut Sugiyono (2008), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut Sugiyono mengungkapkan bahwa bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi dan gabungan ketiganya/ triangulasi.

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian dilakukan di Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, yang merupakan lokasi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

Variabel yang akan diteliti meliputi:

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Indicator yang digunakan meliputi :

- Perubahan Mata Pencaharian
- Perubahan kesempatan kerja dan berusaha
- Perubahan Tingkat Pendapatan
- Perubahan Persepsi Masyarakat

2. Kondisi Lingkungan Hidup

Indikator yang digunakan meliputi :

- Gangguan Lalu Lintas Darat
- Peningkatan Kebisingan
- Gangguan Kesehatan Masyarakat
- Penurunan Kualitas Udara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut

Area yang direncanakan untuk proyek Pelabuhan meliputi dua desa, yakni Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut. Jumlah bangunan yang akan dipindahkan lebih banyak di Desa Sungai Bundung Laut. Di antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo, terdapat banyak Togog (perangkap udang) dan bagan/kelong (alat tangkap ikan teri). Mayoritas pemilik Togog dan kelong berasal dari Desa Sungai Limau dan Desa Sungai Kunyit Laut, dengan sebagian kecil dari desa lain. Togog-togog ini sudah ada sejak lama dan sering diperjualbelikan bersama lokasinya. Togog dan kelong menggunakan Pulau Temajo sebagai pembatas gelombang. Namun, saat terjadi badai dengan arus kencang, Togog dan kelong tersebut kadang-kadang rusak atau terkena arus.

Di sekitar Pantai Kijing, tidak ada perahu nelayan yang menggunakan jaring. Hanya beberapa nelayan pesisir yang menggunakan pukot rentang untuk menangkap ikan dan udang kecil. Di Pulau Temajo, terdapat bangunan bekas vila atau penginapan yang sekarang sudah terbengkalai dan rusak, namun masih dijaga oleh petugas. Di Pulau Temajo, juga terdapat beberapa pondok nelayan yang digunakan sebagai tempat beristirahat. Di Desa Sungai Kunyit Laut, ada kelompok yang mengolah hasil laut menjadi ikan asin. Meskipun kelompok ini tidak berada di dalam area proyek, mereka akan terdampak oleh proyek karena kehilangan sumber bahan baku (jika Togog, kelong, dan perahu nelayan tidak dapat beroperasi lagi di wilayah Pantai Kijing dan Pulau Temajo). Di Desa Sungai Kunyit Laut, tidak ada sawah dengan irigasi teknis, tetapi ada sawah tadah hujan yang akan terpengaruh karena berada di dalam area proyek pelabuhan. Sawah ini terletak di RT 5 dan RT 10, dan sebagian pemiliknya adalah warga Desa Sungai Kunyit Laut.

Di wilayah Desa Sungai Bundung Laut terdapat banyak sawah dan kebun yang akan terkena dampak karena berada di dalam area proyek yang direncanakan, terutama di sebelah utara Jalan Pantai Kijing 2. Dua dusun yang terkena dampak langsung adalah Dusun Mayasari (RT 4) dan Dusun Sukatani (RT 5 hingga RT 8). Mayoritas penduduk Desa Sungai Bundung Laut telah

mengetahui adanya rencana pembangunan pelabuhan di Pantai Kijing, tetapi mereka belum mengetahui wilayah mana saja yang akan terkena dampak proyek tersebut. Pedagang tanaman hias di RT 7 juga akan terkena dampak, dan mereka adalah pedagang perorangan tanpa afiliasi kelompok tertentu.

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Bundung Laut adalah petani, sementara sisanya terdiri dari nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil (PNS). Diperkirakan ada 361 objek, baik bangunan maupun tanah, yang perlu dibebaskan jika proyek pelabuhan berjalan. Di antara objek tersebut, terdapat 52 hektar sawah padi, sebagian dimiliki oleh penduduk Desa Sungai Bundung Laut dan sebagian lagi oleh penduduk luar desa. Sawah-sawah ini tidak memiliki irigasi teknis dan dipanen dua kali setahun, menghasilkan lebih dari 208 ton padi per tahun.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan lapangan kerja dapat menyebabkan penurunan kesempatan kerja. Namun, jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu mencerminkan kesempatan kerja yang sebenarnya karena sering terjadi ketidakcocokan keterampilan di pasar kerja. Tenaga kerja adalah kunci pembangunan, dan komposisi serta jumlahnya akan berubah seiring dengan perubahan demografi. Pada tahun 2019, Kecamatan Sungai Kuyit memiliki 17.721 penduduk usia kerja, atau sekitar 71,15% dari total penduduk.

Infrastruktur ekonomi di desa cukup bervariasi, termasuk toko, pasar permanen dan non-permanen, minimarket, warung kelontong, restoran, hotel, dan losmen. Desa Sungai Kuyit Laut dan Sungai Bundung Laut memiliki jumlah warung makan terbanyak karena kedua desa tersebut dekat dengan pembangunan pelabuhan dan tempat wisata pantai.

Aktivitas perkebunan ada di sekitar lokasi rencana pembangunan pelabuhan, termasuk tanaman kelapa dalam, kelapa hibrida, cengkeh, dan kakao. Cengkeh adalah tanaman utama di Desa Sungai Kuyit Laut, sementara kakao dominan di Desa Bundung Laut. Pembangunan pelabuhan akan memberikan dua opsi bagi penduduk petani: beralih mata pencaharian atau mendapatkan lokasi perkebunan baru yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama industri, produksi perkebunan perlu ditingkatkan melalui peremajaan, diversifikasi komoditas, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan di Kecamatan Sungai Kuyit mengalami penurunan, tetapi produksi masih cukup stabil. Sektor perikanan juga berperan penting dalam menyediakan protein hewani, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong perekonomian. Di Kecamatan Sungai Kuyit, produksi perikanan laut mendominasi, dengan kegiatan tangkap di luar wilayah rencana pelabuhan. Nelayan akan diberikan dua opsi yang sama dengan para petani.

Dampak Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Sungai Kuyit Laut Dan Desa Sungai Bundung Laut

Sejak awal masyarakat memang sudah disosialisasikan tentang rencana pembangunan pelabuhan internasional Kijing, baik secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi sering dilakukan, baik tentang kompensasi yang akan mereka terima apabila terjadi pembebasan lahan serta kemanfaatan pelabuhan itu sendiri. Sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat dan unsur pimpinan desa. Awalnya masyarakat ragu bahwa pembangunan itu akan terlaksana, namun mereka pada dasarnya setuju, terutama terkait kompensasi yang mereka terima. Sasaran sosialisasi terutama adalah masyarakat terdampak, yaitu masyarakat yang memiliki lahan, bangunan atau usaha di lokasi pembangunan pelabuhan. Pendataan tentang masyarakat terdampak sudah dilakukan sebelumnya oleh tim appraisal dari pusat bekerjasama dengan RT dan tokoh masyarakat serta masyarakat terdampak.

Berdasarkan keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari narasumber, pada mulanya informasi mengenai wacana pembangunan pelabuhan TanjungKijing ini sudah sempat terdengar

dari lama sekitar awal tahun 2017. Informasi ini sebagian besar diperoleh dari orang ke orang, namun menurut salah satu narasumber mengungkapkan bahwa sempat ada sosialisasi dari pihak PT Pelindo II mengenai akan diadakannya pembangunan pelabuhan dan kerjasama dengan kepala desa setempat untuk melakukan pembebasan lahan dan penilaiannya. Dengan adanya wacana pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini dan telah beredarnya informasi mengenai pembebasan lahan, masyarakat menanggapi dengan pro dan kontra. Sebagian besar dari mereka yang pro bersedia membebaskan lahannya dikarenakan adanya kompensasi berupa ganti untung terhadap tempat tinggal (tanah), tempat usaha, maupun seluruh aset bernilai yang mereka miliki sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang kontra belum dapat menerima pembebasan lahan mereka dikarenakan nilai kompensasi yang mereka terima belum sesuai dengan harapan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu baik masyarakat yang pro maupun kontra ini sudah dapat diatasi dan dengan berlangsungnya pembangunan pelabuhan sampai saat ini semua masyarakat pada akhirnya menyetujui pembangunan tersebut.

Adanya pembangunan pelabuhan ini juga sangat menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Jumlah toko dan tempat usaha menjadi semakin banyak dan bervariasi yang menandakan bahwa pembangunan pelabuhan Tanjungpura memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat dan hal ini menjadi indikator masyarakat semakin sejahtera dan ekonominya meningkat, segala jenis usaha menjadi lebih lengkap dari sebelumnya. Aktifitas ekonomi juga semakin aktif dari yang sebelumnya jam 7 malam sudah sepi sekarang menjadi semakin ramai. Salah satunya adalah tempat usaha yang menjadi tempat wawancara ini, sebelumnya berada tepat disebelah jalan yang termasuk wilayah pembangunan proyek namun seiring sudah memperoleh kompensasi sehingga tempat usaha yang lama dirobohkan dan kemudian dialokasikan untuk mendirikan warung yang baru dengan lebih baik dari sebelumnya.

Menurut pendapat narasumber, dari seluruh jenis usaha, tempat tinggal, dan aset yang terdampak baik yang di darat maupun di laut mereka berpendapat bahwa yang paling terdampak besar dari adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini adalah para pekerja dan pengolah hasil tangkapan togog dan kelong. Hal ini dikarenakan hilangnya mata pencaharian yang mereka miliki, nilai kompensasi yang mereka peroleh sangatlah kecil, dan belum adanya kepastian masa depan terkait pekerjaan yang akan mereka peroleh apabila proyek ini sudah selesai. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya para pemilik dan pekerja togog dan kelong ini sempat berorasi di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan telah bertemu langsung dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Melalui pertemuan tersebut, dijanjikan bagi masyarakat desa terdampak ini dapat dipekerjakan di PT Pelindo II sebagai satpam, buruh lepas, buruh bongkar muat dan diberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Melalui orasi tersebut, terbentuklah koperasi tenaga kerja bongkar muat. Namun usulan tersebut sampai saat ini masih belum diketahui apakah akan diterima atau tidak oleh PT Pelindo II dan harapannya agar perkembangan kedepannya mengarah ke hal ini.

Untuk sementara waktu ini, PT Wika sebagai perusahaan pemborong (pelaksana pembangunan) telah mempekerjakan masyarakat di desa terdampak sebagai tenaga kerja disana dan juga para nelayan togog dan kelong masih diizinkan untuk melaut sampai pada waktu pelabuhan akan siap disahkan dan di operasionalkan. Hal ini sangat membantu terutama bagi pekerja dan pemilah hasil tangkapan togog dan kelong yang masih dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk sementara waktu. Namun masyarakat masih belum mengetahui secara persis bagaimana dampak nantinya jika operasional pelabuhan Tanjungpura ini sudah dijalankan. Narasumber juga mengatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan dan sangat mendukung sekali pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini dikarenakan proyek ini juga termasuk ke dalam program pemerintah sehingga sebagai masyarakat juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan

tersebut, hanya saja masyarakat menginginkan adanya ganti untung dan berharap agar dipekerjakan pada PT Pelindo II setelah kehilangan mata pencaharian yang mereka miliki.

Sampai dengan saat ini, proses pembangunan pelabuhan Tanjungpura sudah memasuki tahapan finishing yang menurut narasumber sudah dimulai sejak awal tahun 2018. Sebagian besar pengerjaan sudah hampir selesai dan sudah mulai banyak terjadi pengurangan karyawan. Mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di PT Wika saat ini tidaklah diketahui secara pasti namun dari sekitar 2000 lebih orang yang bekerja di perusahaan tersebut (termasuk yang bekerja di darat dan laut, dari luar Kalimantan dan lokal Kalimantan), sekarang hanya tinggal 700 lebih orang yang masih bekerja dikarenakan pengerjaan proyek sudah hampir selesai. Dikatakan oleh narasumber juga bahwa kegiatan operasional pelabuhan Tanjungpura ini masih hanya sekedar bongkar muat material yang diperlukan untuk proses pembangunan pelabuhan Tanjungpura, hal ini juga sebagai imbas dari kejadian robohnya jembatan dermaga pelabuhan Tanjungpura yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi sebelumnya sehingga mengharuskan adanya perbaikan lagi dan pengunduran pengesahan kegiatan operasional yang seharusnya menurut narasumber sudah dapat berjalan pada bulan November ini.

Lokasi eksisting pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan lokasi rekreasi pantai kijing, dimana lokasi tersebut dimiliki dan dikelola oleh perorangan. Dengan adanya kegiatan pembangunan pelabuhan ini maka pekerja di lokasi wisata akan diberikan opsi untuk berganti mata pencaharian dan untuk objek wisata akan dicarikan lokasi baru yang akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber, terdapat juga informasi unik yang diperoleh yaitu dengan adanya pembangunan pelabuhan ini mereka berpendapat bahwa ternyata ikan-ikan yang ada dilaut tersebut malah justru semakin mendekat kearah pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini, hasil-hasil tangkapan nelayan ikan dilaut dari pukut dan juga para pemancing pun malah justru semakin banyak dari semenjak adanya pembangunan pelabuhan ini, hasil tangkapan yang jarang ditemui seperti udang kara juga semakin mudah untuk ditemui semenjak adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini.

Bentuk Kompensasi Bagi Pemilik Tanah dan Bangunan

Berdasarkan keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari narasumber, nilai kompensasi yang diperoleh masyarakat terdampak pembangunan pelabuhan Tanjungpura pada tanah dan bangunan yang mereka miliki ini berbeda-beda tergantung dari apa-apa saja yang terdampak dari masyarakat tersebut. Kompensasi yang diperoleh ini telah ditetapkan oleh tim appraisal (tim penilai) yang berkoordinasi dengan PT Pelindo II dan Desa terdampak untuk meninjau langsung serta menetapkan nilai kompensasi yang akan diperoleh setiap masyarakat yang terdampak. Nilai kompensasi yang diperoleh didasarkan pada rumahnya, berapa luas tanah yang dimiliki, jarak jauh dan dekatnya dari pelabuhan, serta nilai ekonomis yang ada di tanah tersebut seperti tempat usaha dan aset yang mereka miliki seperti sawah, kebun, tanaman, dll yang juga dinilai dari berapa besar produksinya, berapa penghasilan yang diperoleh dalam sebulan/setahun, kemudian dinilai lagi luas tanahnya, baru akhirnya nilai-nilai keseluruhan tersebut diakumulasikan dan diperoleh nilai kompensasi yang ditetapkan tim appraisal (tim penilai) kepada setiap masyarakat terdampak sehingga hal ini sangatlah menguntungkan bagi masyarakat.

Selain itu, adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini juga berdampak pada perkembangan harga tanah. Harga tanah yang berada didekat lokasi pelabuhan dan jalan raya nasional menjadi semakin meningkat. Menurut sepengetahuan narasumber, dari awal pengembangan pelabuhan ini harga tanah ditaksir senilai 300 ribu – 400 ribu/m² oleh tim penilai PT Pelindo II. Lalu, setelah adanya pembangunan pelabuhan masyarakat setempat tentunya mulai

menyesuaikan dan meningkatkan harga tanah yang mereka miliki menjadi senilai 500 ribu – 600 ribu/m² bahkan ada yang menetapkan sampai 1 juta/m² terutama masyarakat yang memiliki tanah yang berada 3-5 km dari pelabuhan Tanjungpura tersebut apabila terdapat orang yang ingin membeli tanah mereka. Sebagian besar masyarakat merasa sangat diuntungkan. Dengan nilai kompensasi yang menguntungkan ini (ganti untung), mereka tidak merasakan seperti kehilangan pekerjaan bahkan mereka berterimakasih karena lahan mereka telah dibebaskan sehingga mereka sangat terbantu dengan adanya tambahan modal yang mereka terima untuk semakin mengembangkan usaha mereka yang sudah ada sebelumnya ditempat lain. Rata-rata masyarakat yang terkena pembebasan lahan ini juga telah memiliki perkebunan yang luas diluar tempat tinggal mereka saat ini, selain itu mereka juga biasanya menggunakannya untuk memperoleh tanah ditempat lain yang harganya lebih murah ataupun membangun rumah yang baru dengan lebih layak huni.

Dalam hal penilaian kompensasi yang ditetapkan kepada masyarakat, pihak PT Pelindo II sudah mendatangkan tim appraisal (tim penilai) sehingga seluruh nilai kompensasi sudah disurvei, dihitung, dan ditetapkan oleh tim. Tinggal masyarakatnya setuju atau tidak setuju dengan nilai yang diberikan oleh tim penilai. Untuk mengenai masalah sesuai atau tidaknya nilai kompensasi yang diterima oleh masyarakat, menurut masyarakat sendiri pastinya mereka beranggapan bahwa nilai yang telah diberikan kepada masyarakat tentunya masih kurang dan pastinya masih menginginkan lebih. Namun setelah melalui adanya komunikasi, mediasi, dan kesepakatan bersama sampailah masyarakat akhirnya menyetujui nilai kompensasi yang telah ditetapkan tersebut. Jumlah tanah yang sudah dibebaskan adalah sekitar 200 ha dan sebesar 17 ha yang sudah digunakan. Bentuk kompensasi yang diperoleh masyarakat terdampak seluruhnya berbentuk uang tunai, selain itu bentuk kompensasi yang juga diperoleh adalah pembangunan tempat ibadah Masjid dan Kantor Desa Bundung Laut yang pembangunannya 100% dibiayai oleh PT.Pelindo II. Narasumber juga mengatakan bahwa ada satu sekolah yang termasuk wilayah pembangunan, namun sampai saat ini belum dilakukan tindakan terhadap sekolah tersebut dan kegiatan belajar mengajar masih beroperasi.

Tim appraisal menentukan nilai beli tanah, bangunan serta tanaman yang memiliki nilai jual dan berada di atas lahan misalnya pohon kelapa, buah buahan dan semua jenis tanaman yang bisa dipanen dan dijual. Pada hari yang ditentukan, masyarakat diberi amplop yang isinya mengabarkan tentang nilai beli tanah, bangunan dan tanaman tumbuh tersebut. Pada dasarnya mayoritas masyarakat terdampak sudah setuju dengan nilai ganti untung tersebut, walaupun ada penolakan tidak lebih dari 10% masyarakat. Alasan penolakan adalah ketidak sesuaian harga yang mereka harapkan, karena mereka membandingkan dengan kasus pembebasan lahan di daerah lain di Indonesia nilainya jauh lebih tinggi, padahal penetapan harga tanah memang tidak bisa dibandingkan antar daerah karena kekhasan masing-masing daerah. Alasan lainnya adalah letak posisi lahan di belakang dan tepi jalan seharusnya ditetapkan dengan harga berbeda, harga tanah di tepi jalan harusnya lebih tinggi dari harga tanah di belakang. Pada akhirnya kelompok ini setuju dengan penetapan harga yang ditentukan, sebab negara juga tetap akan mengeksekusi lahan merka demi kepentingan umum. Proses pencairan pun terhitung cepat, diawali dengan sosialisasi yang massif, sebulan kemudian tim penilai dari pusat turun lapangan, sebulan kemudian proses pencairan dilakukan. Masyarakat sangat gembira karena pembebasan lahan kali ini harganya sangat memuaskan dan mereka tidak di beri harapan palsu.

Tawaran pembebasan lahan bukan hal yang pertama bagi masyarakat dua desa ini, sebelumnya PT Wilmar, sebuah perusahaan nasional pernah menawarkan pembebasan lahan bagi masyarakat desan, dengan harga yang sangat murah yaitu Rp 12.000,00 per meter persegi. Pada saat itu tidak ada warga yang setuju, barulah pada tahun 2017 Pelindo memberikan tawaran pembebasan

lahan untuk pembangunan pelabuhan, dengan harga Rp 300.000,00 per meter. Jika di atas lahan ada bangunan, tanaman atau pohon, maka perhitungan menjadi berbeda untuk setiap komponen.

Selain harga tanah, maka pohon yang tumbuh di atas tanah itupun diberikan harga tersendiri seperti pohon kelapa, jambu, pisang dan lain-lain (istilahnya tanam tumbuh). Ganti yang mereka dapatkan dari tanam tumbuh jauh lebih besar dari harga tanah itu sendiri. Bangunan dihitung berdasarkan luasnya, bukan bahan material pembuatnya. Untuk pohon seperti pohon kelapa harganya Rp 1.000.000, per pohon, pohon jabon Rp 600.000,00 dan pohon lainnya juga dihargai.

Jenis tanaman lainnya yang memberikan hasil jika dijual juga diberikan tariff perhitungan tersendiri. Intinya pemerintah tidak ingin konsep pembebasan ini disebut ganti rugi, melainkan ganti untung. Seharusnya, setelah dibeli, maka seluruh asset tersebut menjadi milik pemerintah, namun faktanya, setelah pohon atau bangunan dibeli, si pemilik boleh mengambil kembali bahan material rumah jika masih bisa diselamatkan, dan memindahkan pohon/tanaman jika bisa dipindahkan. Salah satu pemilik kebun bunga merasa beruntung, karena selain ganti untung lahan, dan bangunan sederhana miliknya diperhitungkan, serta seluruh tanaman bunganya dibebaskan juga, namun tanaman tersebut diambil kembali oleh pemiliknya dan dibawa ke tempat yang baru.

Bentuk Kompensasi Kepada Pemilik Togog Dan Kelong

Togog adalah alat tangkap udang yang memiliki panjang 5 meter yang terdiri dari 1 buah jaring dan 1 laboh togog yang diletakkan didasar laut sedangkan kelong adalah alat penangkap ikan teri dan sotong yang terdiri dari dua jenis yaitu kelong tancap dan kelong apung. Jaring, struktur bagan, serta pemasangan togog ini juga berbeda dengan kelong. Untuk togog penangkapan dilakukan ketika arus air laut kuat (aek nyorong) dan untuk kelong dilakukan ketika arus air laut tenang (aek kondak). Kelong kerjanya dilakukan dimalam hari sedangkan togog kerjanya mengikuti musim (barat, timur, selatan) dan dapat dilakukan pada pagi, siang, sore, subuh menyesuaikan dengan kondisi musim tadi serta dengan peralatan yang berbeda.

Togog dan kelong sudah ada di kawasan Pantai Kijing dan Pulau Temajo ketika Pantai Kijing masih dipenuhi semak belukar dan belum dibangun menjadi tempat wisata. Dalam 1 tahun kalender, biasanya Togog akan vakum pada bulan Maret sampai bulan Mei karena arah arus laut yang tidak mendukung. Pada masa-masa itu pekerja/pengelola Togog biasanya menganggur atau menjadi pekerja serabutan di bidang-bidang lain. Di areal antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo terdapat banyak Togog (alat penangkap udang) dan bagan/kelong (alat penangkap ikan teri). Mayoritas pemilik Togog dan kelong itu adalah warga Desa Sungai Limau dan warga Desa Sungai Kunyit Laut. Ada pula sebagian kecil pemilik yang berasal dari desa lain. Togog-Togog tersebut sudah lama terpasang dan sering pula diperjualbelikan (alat berikut lokasinya).

Data pemilik Togog sangat dinamis (selalu berubah). Baik pihak Dinas, Pemerintah Kecamatan, maupun Pemerintah Desa selalu kesulitan untuk melakukan pendataan. Kepemilikan Togog beserta lokasinya biasanya bersifat turun temurun, namun banyak pula yang telah diperjualbelikan. Proses jual beli/pindah tangan ini tidak pernah dilaporkan secara resmi sehingga Pemerintah sulit untuk melakukan pemantauan. Di lapangan juga sering kali ada perbedaan antara nama pemilik dan nama pengelola Togog. Jika pihak pencatat tidak mencermati hal itu, maka bisa terjadi pencatatan ganda atas Togog yang sama (*double account*).

Di wilayah perairan antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo, terdapat 4 baris Togog, yaitu:

- Baris Kijing, yang lokasinya nyaris sejajar dengan dermaga di Pantai Kijing
- Baris Balkon, yang lokasinya berada di sebelah selatan Baris Kijing
- Baris Sungai, yang lokasinya berada di sebelah selatan Baris Balkon dan sejajar dengan Desa Sungai Limau

- Baris Dua, yang lokasinya berada di sebelah selatan Baris Sungai

Di sekitar Pulau Temajo dulunya banyak karang, tetapi sekarang tinggal sekitar 20% karena sering dibom oleh nelayan. Di sekitar Kecamatan Sungai Kunyit ada pula kapal trol yang beroperasi, tetapi mereka tidak boleh beroperasi ke wilayah Togog. Penduduk Desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut banyak yang memiliki togog (bagan ikan) yang lokasinya berada di laut dan termasuk wilayah pelabuhan. Otomatis dengan dibangunnya pelabuhan, maka togog juga termasuk sector terdampak. Pemilik togog mendapat kompensasi ganti untung sesuai luas togog yang dimiliki. Kompensasi togog antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta yang didapat oleh tauke pemilik togog. Sementara pekerja togog (nelayan) mendapat kompensasi berupa penggantian pendapatannya selama masa pembangunan pelabuhan, dan mereka juga diperkerjakan dalam pembangunan pelabuhan oleh PT Wika sebagai kontraktor pembangunan pelabuhan tersebut

Salah satu narasumber yang merupakan pemilik togog ini sudah memiliki togog dari sekitar tahun 2006 hingga saat ini (\pm 15 tahun) dan sifat kepemilikan togog ini adalah turun temurun dan dimiliki sendiri. Dalam hal kepemilikan togog, masing-masing orang memiliki wilayah togog nya masing-masing berdasarkan turun temurun dan sudah saling mengenal daerah nya masing-masing dan siapa-siapa saja orang yang menjadi batasan dari togog yang mereka miliki (dilakukan berdasarkan batas timur kepemilikan dan batas barat kepemilikan, togog disusun secara memanjang).

Dalam 1 togog tersebut, 1 buah jaring terdiri dari mata togog, jaring 1 in, dan jaring 1 in 25 (lawi) yang kemudian dibentuk dan membutuhkan biaya sebesar 3 jutaan sedangkan untuk 1 laboh terdiri dari batang pinang, galang, buloh, tangga, keleker, penekan, dan tali di totalkan sebesar 1 jutaan, sehingga 1 togog (jaring+laboh) memakan biaya sekitar 4 jutaan kemudian ditambah dengan alat-alat untuk melaut seperti motor air, bensin, dll sehingga ditotalkan seluruhnya membutuhkan biaya sebesar 6 jutaan. Sedangkan mengenai kelong sendiri, narasumber kurang mengetahui secara pasti mengenai biaya yang dibutuhkan, namun dari keterangan yang diperoleh harga kelong tancap lebih mahal daripada kelong apung namun dengan biaya pembuatan yang kurang lebih sama yaitu sekitar 16 jutaan dengan total seluruh alat yang diperlukan dan bahkan bisa mencapai 20 jutaan apabila menggunakan jasa pemasangan orang lain.

Untuk sistem kerja togog ini, sebelum togog siap untuk digunakan bahan-bahan pembuatan togog tersebut haruslah dibentuk dan dipancang terlebih dahulu, dimana seorang tauke (pemilik) akan mempekerjakan sebuah tim yang terdiri dari 5-7 orang sebagai pekerja dibagian pemancangan togog. Upah yang mereka peroleh tergantung dari kedalaman laut tempat pemancangan togog itu dilakukan. Semakin dalam dasar laut tempat pemancangan togog tersebut berada, maka akan lebih tinggi upah yang mereka peroleh. Upah yang mereka peroleh dalam satu kelompok yang terdiri dari 5-7 orang tersebut sekitar 1,4 juta yang kemudian dibagi sama rata per orang (200 ribu – 300 ribu/orang), namun pemancangan ini juga dapat dilakukan sendiri oleh pemilik togognya secara langsung sehingga tidak memakan biaya untuk mempekerjakan para pekerja pemancang (tergantung dari masing-masing pemilik togog nya).

Setelah jaring sudah siap dan proses pemancangan selesai, maka togog sudah siap digunakan sebagai alat tangkap udang dan ikan kecil. Kemudian, dalam proses penangkapan udang dan ikan ini, pemilik togog juga dapat secara langsung turun tangan untuk bekerja dan mengelola penangkapannya sendiri namun ada juga pemilik (tauke) yang memiliki anak buahnya untuk mengelola togog milik nya (hal ini biasanya dilakukan tauke yang memiliki togog dalam jumlah yang banyak seperti 35 buah togog). Dalam hal pemilik togog yang memiliki anak buah, penangkapan dilakukan dengan menggunakan jaring togog yang dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari 4-6 orang dengan menggunakan motor air. Dalam proses penangkapan dan memanen hasil tangkapan togog ini dilakukan minimal setiap 6 jam sekali dalam 1 hari dan bergantung pada

kondisi arus air laut yang kuat (musim) untuk memperoleh tangkapannya. Setelah jaring terpasang dan kemudian ditinggalkan dalam beberapa jam (± 6 jam), jaring tersebut kemudian ditarik, kemudian dimasukkan ke kapal motor dan dipilah hasilnya di darat.

Hasil yang diperoleh dalam satu kali penangkapan togog ini terdiri dari limbah anak ikan, udang, ikan-ikan kecil, bahkan sampai dengan hasil tangkapan yang berbahaya seperti ular, ikan berbahaya, dll menjadi satu. Hasil-hasil tersebut kemudian dipilah, dimana hasil tangkapan berupa udang diberikan kepada pemilik togog (tauke) sedangkan ikan-ikan kecil dan limbah anak ikan diberikan kepada para pemilah tersebut. Dalam 1 kali penangkapan togog, hasil tangkapan yang diperoleh sangatlah tidak menentu yang mana bisa saja dalam 1 hari bisa memperoleh 100 kg udang, namun besoknya hanya mendapat 10 kg udang, dan bahkan pernah juga melaut tanpa memperoleh apapun sama sekali dalam 1 hari, "tergantung rezeki karena ini barang gaib berada didalam air, kata pak herman (pemilik togog). Dalam pembagian hasil antara pemilik (tauke) togog dan para pekerja togog ini (anak buah), mereka menetapkan sistem bagi hasil dimana misalnya ketika hasil panen udang yang diperoleh sebesar 50 kg, maka pemilik (tauke) akan memperoleh 25 kg dan pekerja juga memperoleh 25 kg udang. Kemudian hasil yang diperoleh pekerja itu dinilai oleh pemilik (tauke) ini misalnya 1 kg udang seharga 20.000, maka hasil yang diperoleh pekerja adalah 20.000×25 kg sesuai dengan harga dan jumlah yang mereka peroleh tadi sedangkan apabila pemilik togog bekerja sendiri maka hasil yang mereka peroleh akan diperoleh dan diusahakan mereka sendiri. Kemudian untuk para pemilah, proses pemilahan ini dilakukan ketika berada di darat. Dari limbah anak ikan dan ikan kecil tersebut semuanya dapat difungsikan dengan baik yaitu untuk direbus kembali (makan), ada yang menampung, direbus, dan dijemur menjadi olahan ikan asin, dan ada juga yang menggunakannya untuk pengolahan pakan ikan.

Selain itu juga jika ada rezeki lebih maka para pemilik togog juga memberikan udang yang mereka peroleh kepada para pemilah tersebut. Para pemilik togog merasa terbantu dengan adanya para pemilah tersebut yang membantu memilahkan hasil tangkapan yang mereka peroleh. Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan togog ini, terdapat beberapa pihak yang berperan yaitu tauke sebagai pemilik togog dan pengumpul udang (pemilik togog dalam skala besar sekaligus tempat penjual udangnya), pemilik togog skala kecil (6-10 togog), para pekerja yang mengelola togog, dan para pemilah yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela ikut membantu memilah hasil tangkapan togog. Kemudian, untuk sistem kerja kelong tancap adalah dengan ditancap di pulau dan tinggal menunggu saja hasil tangkapannya dan sampai kelong nya mengalami kerusakan (kurang lebih sama seperti togog) dan untuk kelong apung akan dibiarkan mengapung dan kemudian diseret pakai motor air sehingga bisa berpindah-pindah. Penangkapan kelong ini dilakukan tergantung dari masyarakatnya sendiri dan bisa dilakukan setiap hari setiap 1,5 jam sekali dan dalam arus laut yang tenang.

Untuk saat ini, jumlah togog yang berada di sungai kunyit sudah mencapai total 1000 lebih laboh togog yang berada dalam 4 baris yaitu baris Kijing (baris 4), baris sungai (baris 3), baris dua (baris 2), dan baris balkon (baris 1). Untuk saat ini, dari 4 baris yang ada tersebut, hanya tersisa 2 baris saja yang masih aktif dan diizinkan untuk melaut yaitu baris baris sungai (baris 3) dan baris dua (baris 2) hal ini dikarenakan baris-baris tersebut tidak dekat dan langsung mengenai jalan lintas dermaga dan tempat pembangunan pelabuhan Tanjungpura tersebut. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini, akhirnya seluruh pihak yang berperan dalam togog ini merasakan dampaknya mulai dari pemilik (tauke), pemilik togog skala kecil, para pekerja, dan pemilah dikarenakan dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini membuat mereka tidak dapat mengoperasional togog dan kelong serta mereka kehilangan mata pencaharian dan manfaat yang mereka peroleh dari togog dan kelong tersebut. Dengan adanya dampak tersebut, maka mereka

memperoleh kompensasi dengan nilai yang berbeda-beda dan hanya diperoleh untuk para pemilik dan pekerja dari togog dan kelong yang terdampak.

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari narasumber, untuk kompensasi yang diperoleh pemilik togog ini telah ditentukan oleh tim penilai (tim appraisal) dari PT Pelindo II yang langsung turun ke lapangan meninjau lokasi 4 baris togog yang ada. Nilai kompensasi yang diperoleh masing-masing pemilik togog ini ditentukan berdasarkan nilai fisik (jaring+1 laboh togog) dan non fisik (lokasi togog berada). Dalam hal penilaian secara fisik maka akan dinilai dari biaya pembuatannya (jaring+1 laboh togog) sedangkan dalam hal penilaian secara non fisik semakin dekat lokasi togog dengan jalan lintas dermaga pelabuhan Tanjungpuranya, maka akan semakin tinggi nilai yang diperoleh. Dari 4 baris togog tersebut, baris Kijing (baris 4) merupakan baris yang berada pas di jalan lintas dermaga pelabuhan Tanjungpura tersebut.

Salah satu narasumber yang merupakan pemilik togog skala kecil ini memiliki togog sebanyak 11 laboh togog dimana 5 laboh terletak di baris Kijing (baris 4) dan 6 laboh terletak di baris dua (baris 2). Pada baris Kijing, kompensasi yang diperoleh adalah sebesar 35 juta/laboh togog (fisik dan non fisik) sehingga dari baris Kijing ini, seorang narasumber tersebut memperoleh kompensasi sebesar 175 juta sedangkan untuk di baris dua dan di baris-baris yang lain (baris sungai, baris dua, dan baris balkon), kompensasi yang diperoleh adalah sebesar 22 juta/laboh togog (fisik dan non fisik) sehingga seorang narasumber ini memperoleh kompensasi sebesar 132 juta dengan total kompensasi sebesar 307 juta, namun berdasarkan keterangan dari narasumber karena ada beberapa pemilik togog yang pada waktu itu masih belum dapat menerima besaran kompensasi yang diperoleh dilakukan lah sedikit negosiasi dan kompromi yang dilakukan dengan PT Pelindo II maka nilai kompensasi yang mereka peroleh ditingkatkan 4 juta/laboh menjadi 26 juta/laboh togog. Mengenai besaran kompensasi yang telah diperoleh dari salah satu narasumber ini, ia juga mengungkapkan bahwa hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai untung namun tidak juga dikatakan sebagai rugi, “standar-standar saja”, kata pak herman selaku pemilik togog. Mengenai besaran kompensasi yang telah diperoleh juga, narasumber mengatakan bahwa sebagai orang awam pastinya masih ingin nilai yang lebih, namun karena nilai tersebut sudah ditetapkan oleh tim penilai dan pemerintah sehingga narasumber menerimanya dan hal ini juga sudah disetujui oleh semua pemilik togog yang terdampak. Kemudian, untuk nilai kompensasi yang diperoleh pemilik kelong tancap, sepengetahuan narasumber pemilik kelong apung memperoleh kompensasi sebesar 80 jutaan/kelong apung sedangkan untuk kelong tancap narasumber kurang mengetahuinya dan untuk dasar penilaiannya sama juga berdasarkan nilai fisik dan non fisik.

Selain terhadap pemilik togog dan kelong, dampak pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini juga dirasakan oleh para pekerja (anak buah) dan pemilah yang akhirnya kehilangan mata pencaharian mereka. Mengenai hal tersebut, para pekerja telah memperoleh kompensasi sebesar 6 juta untuk setiap pekerja togog dan kelong yang terdampak dengan pendataan melalui KTP dari masing-masing pekerja togog. Selain itu untuk sementara waktu, PT Wika sebagai perusahaan pemborong (pelaksana pembangunan) juga telah memprioritaskan untuk mempekerjakan masyarakat-masyarakat di 5 desa terdampak (desa sungai limau, desa sungai kunyit laut, desa bundung laut, dan desa sungai duri 1&2) sebagai buruh harian disana dengan penghasilan sebesar 100.000/hari. Hal ini sangat membantu terutama bagi pekerja dan pemilah hasil tangkapan togog dan kelong yang masih dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk sementara waktu, para pekerja juga menganggap bahwa penghasilan yang mereka peroleh sebagai buruh harian di PT Wika ini lebih pasti karena diupah per hari dibandingkan pada saat menjadi pekerja togog dengan penghasilan yang tidak pasti (walaupun bekerja dilaut sewaktu-waktu bisa memperoleh upah yang lebih besar namun ada juga waktu dimana tidak memperoleh hasil dan upah sama sekali).

Seluruh pekerja togog dan kelong ini sudah tidak mempermasalahkan lagi adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini akan tetapi masyarakat masih belum mengetahui secara persis bagaimana efek kedepannya jika operasional pelabuhan Tanjungpura ini sudah dijalankan. Mereka juga masih belum mengetahui apakah masih dapat melaut atau tidak dan apakah akan dipekerjakan kembali di PT Pelindo II atau tidak sebagai buruh harian lepas maupun buruh pelabuhan di PT Pelindo II. Oleh karena hal ini belum dapat dipastikan sehingga bisa saja para pekerja memperoleh kerugian kedepannya namun bisa juga tidak apabila permohonan mereka ditanggapi dengan baik oleh PT Pelindo II. Oleh karena itu, para pekerja terdampak hanya berharap agar setelah proyek pembangunan pelabuhan Tanjungpura yang dikerjakan oleh PT Wika ini selesai, mereka dapat dipekerjakan lagi di PT Pelindo II sebagai buruh harian lepas maupun buruh yang ada di pelabuhan PT Pelindo II tersebut.

Khusus untuk para pemilah, menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber walaupun togog dan kelong di daerah pelabuhan Tanjungpura ini tidak beroperasi lagi, para pemilah tidak akan kehilangan pekerjaan mereka (tidak menganggur) dikarenakan masih terdapat togog dan kelong di wilayah lainnya dan pemilah memiliki kemungkinan untuk tidak hanya memperoleh manfaat dari satu pemilik togog dan kelong saja tetapi dapat diperoleh dari pemilik togog dan kelong yang berlokasi di tempat lain yang tidak terdampak pembangunan pelabuhan Tanjungpura seperti di lokasi Kuala Mempawah. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini banyak dari para pemilah kemudian menyesuaikan diri dengan beralih profesi dengan adanya proyek pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini seperti menjadi buruh harian lepas di PT Wijaya Karya (Wika). Adapun PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai pemilik juga telah melakukan perekrutan tenaga kerja tahap pertama namun dengan batas umur ≤ 26 tahun, sehingga kebermanfaatannya hanya dirasakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut dan dari keterangan narasumber hanya 50 orang yang akhirnya diperkerjakan disana dari 5 desa yang terdampak.

Dalam kepengurusan Surat Izin Usaha (SIU) togog ini, seorang narasumber sudah mengurus dan memiliki Surat Izin Usaha (SIU) togog ini sejak tahun 2006 dan tidak ada kendala dalam mengurusnya. Untuk perkembangan Surat Izin Usaha (SIU) para pemilik togog ini, yang memiliki izin adalah yang sudah mengurusnya sejak lama namun untuk sampai sekarang surat kepemilikan tersebut sudah tidak diterbitkan lagi. Kepengurusan surat izin togog ini diurus di Dinas Perikanan Mempawah namun tidak semua pemilik togog memiliki SIU dan sekarang sudah menjadi hak milik PT Pelindo II semua sehingga SIU tersebut sudah tidak diterbitkan lagi. Togog ini sifatnya tidak bisa sembarangan asal bangun karena masing-masing orang sudah memiliki wilayah pasang togog mereka masing-masing dari sejak turun temurun, togog yang dibangun tersebut mengikuti wilayah mereka masing-masing. Dikarenakan dasar penilaian kompensasi togog ini berdasarkan nilai fisik dan non fisiknya, sehingga kepemilikan SIU tidak menjadi dasar dalam pemberian kompensasi tersebut, sehingga baik pemilik togog yang memiliki SIU maupun yang tidak memiliki SIU tetap memperoleh kompensasi. Oleh karena SIU tidak menjadi dasar dalam penilaian kompensasi yang diperoleh maka dalam hal pendataan pemilik togog yang terdampak, PT Pelindo II melakukan pendataan berdasarkan nama pemilik dari togognya, berapa jumlah laboh yang dimiliki, dan dari batas-batas mereka masing-masing (siapa pemiliknya, berapa laboh yang ada di sebelah batas mereka masing-masing, dan berapa jumlah laboh yang berada di sebelah batas mereka masing-masing baik timur dan baratnya) sehingga tidak ada tumpang tindih karena masing-masing dari mereka pemilik togog sudah saling mengetahui satu sama lain batasan-batasan mereka sendiri dan perkembangan kepemilikan dari masing-masing togog yang dimiliki. Pendataan juga dibantu oleh masing-masing koordinator perwakilan dari setiap baris yang ada.

Dalam hal pemberian kompensasi, menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber pemberian kompensasi dilakukan di Mempawah dengan memperoleh sebuah slip kompensasi dengan nilai nominal kompensasi yang sudah tertera didalam slip tersebut, kemudian penerima kompensasi tersebut hanya tinggal setuju atau tidak setuju dengan nilai nominal kompensasi yang telah tertera dalam slip tersebut, setelah menyetujui nilai nominal kompensasi tersebut, maka slip tersebut dikembalikan lagi. Kemudian, masing-masing penerima kompensasi ini akan dipanggil kembali untuk diberikan buku tabungan dan nomor rekening dari Bank Kalbar dan tidak berupa uang tunai secara langsung. Setelah uang tersebut sudah masuk kedalam rekening tersebut sesuai dengan nilai nominal kompensasi yang diperoleh, maka kompensasi sudah bisa diambil dan dipergunakan. Dari kompensasi yang telah diperoleh ini, narasumber telah mempergunakannya untuk membeli tanah, membangun rumah layak huni, dan untuk keperluan rumah dan anak-anak. Dari pengeluaran-pengeluaran yang ada ini, berdasarkan keterangan narasumber, sumber pemasukan yang mereka peroleh hanya berasal dari melaut karena masih diizinkan untuk sementara waktu ini dan juga para pemilik togog ini sempat bekerja sebagai buruh lepas di PT WIKA namun tidak dalam waktu yang lama dan sekarang sudah tidak bekerja di PT Wika lagi, dan berdasarkan keterangan yang telah diperoleh, mereka baru hanya memiliki rencana untuk memulai usaha baru ataupun untuk beralih profesi sebagian besar kompensasi masih dipergunakan untuk membeli tanah, membangun rumah yang layak huni, dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bentuk Kompensasi Kepada Pemilik Warung

Di Pantai Kijing terdapat 15 warung: 10 di antaranya berfungsi sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal; 5 lainnya hanya berfungsi sebagai warung dan hanya buka di hari-hari libur. Pemilik 5 warung tersebut ada yang tinggal di Desa Sungai Kunyit Laut, namun ada juga yang tinggal di desa sekitarnya. Seluruh bangunan warung di Pantai Kijing dibangun sendiri oleh pemiliknya, tetapi tanah tempat pendirian bangunan adalah milik mertua Bupati Mempawah. Setiap tahun pemilik warung membayar biaya sewa kepada pemilik tanah. Bagi pemilik usaha seperti warung atau usaha lainnya yang berada di wilayah pembebasan, bentuk kompensasinya berdasarkan penggantian senilai omzet usaha per bulan dikali selama masa pembangunan pelabuhan serta nilai bangunan. Warung-warung tersebut ada yang dibangun di atas tanah milik sendiri, ada juga yang status lahan sewa (milik Bupati Mempawah).

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber, sedikit dari mereka yang mengetahui secara detail mengenai nilai dan bentuk kompensasi yang diperoleh oleh tempat usaha yang terdampak pembangunan pelabuhan Tanjungpura. Namun, mereka mengatakan bahwa semua masyarakat yang terdampak pembebasan lahan ini baik dari tempat usaha, pemilik tanaman hias, togog, kelong, dll semuanya memperoleh kompensasi dalam bentuk uang. Secara khusus, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber, nilai kompensasi yang ditetapkan terhadap setiap tempat usaha didasarkan pada jenis usahanya (permanen atau tidak), luas lahannya dan letak dari usaha tersebut (jauh dekatnya dari pelabuhan). Berdasarkan lokasinya, kompensasi tempat usaha yang berada lebih dekat dengan pelabuhan memperoleh nilai kompensasi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Begitu juga dengan tempat usaha yang sifatnya permanen memiliki nilai kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat usaha yang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi.

Alih Profesi Masyarakat Terdampak

Bagi penduduk yang tidak memiliki lahan atau tempat usaha di wilayah pelabuhan, namun bekerja di tempat usaha terdampak, maka mereka akan dipekerjakan di pelabuhan selama pembangunan berlangsung sesuai dengan keahlian yang diperlukan (kebanyakan pekerja kasar).

Gaji yang mereka terima juga memuaskan apalagi jika ditambah dengan uang lembur. Namun belakangan, setelah pembangunan ini hamper selesai, maka kontrak mereka juga akan berakhir. Para pekerja tersebut ada yang memang sudah selesai kontraknya, ada juga yang mengundurkan diri sebelum kontrak mereka berakhir.

Sebagian dari mereka berharap diangkat sebagai karyawan Pelindo, namun tentu saja hal tersebut sangat tidak memungkinkan, mengingat kebutuhan tenaga kerja Pelindo tentu tidak sebanyak mereka yang menawarkan diri. Pekerja local ini merupakan pekerja yang direkrut oleh perusahaan sub kontraktor dari PT Wika sebagai pelaksana pembangunan pelabuhan yang ditunjuk oleh Pelindo (Pemerintah). Oleh karena itu, posisi pekerjaan ini bersifat tidak permanen. Mereka yang keluar dari pekerjaan padahal tidak dipecah, beralasan karena kerja di pelabuhan menurut mereka sangat berat serta harus disiplin waktu. Akhirnya mereka memilih berhenti, dan bekerja di tempat lain. Sebagian dari pekerja ini juga merupakan penerima hasil pembebasan lahan, sehingga dengan ganti untung yang didapat, mereka bisa membuat usaha sendiri dan tidak tergantung pekerjaan dipelabuhan yang mengikat.

Perubahan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak

Tidak ada yang rugi dalam pembebasan lahan ini, masyarakat dua desa ini mendadak menjadi Orang Kaya Baru (OKB), paling sedikit mereka mengantongi Rp 600 juta , sedangkan paling tinggi ada masyarakat yang mengantongi Rp 6 milyar. Masyarakat berbondong bondong mendaftar paket Umroh dan mendaftar haji serta membeli mobil untuk kendaraan keluarga. Faktanya mereka sangat puas akan ganti untung tersebut, mereka membeli tanah dan membuat rumah yang baru di lokasi yang masih berdekatan dengan lokasi pelabuhan. Seiring dengan pembangunan pelabuhan, harga tanah sekitar pelabuhan juga naik, mengikuti harga pembebasan lahan. Namun karena lahan yang dibebaskan cukup luas misalnya satu hektar, mereka masih mendapat untung jika hanya mengambil 1 unit kapling rumah dekat pelabuhan. Mereka berpikiran bahwa keberadaan pelabuhan ke depannya akan menimbulkan peluang bisnis yang baru. Dan memang, sebelum resmi pelabuhan beroperasi, beberapa usaha baru bermunculan seperti bisnis jasa laundry pakaian, rumah kos, bisnis katering, warung makanan, dan persewaan parkir mobil container. Bisnis tersebut muncul disebabkan banyaknya pekerja pembangunan pelabuhan yang berasal dari luar daerah Mempawah (70% berasal dari Jawa) khususnya pekerja berkeahlian khusus.

Masyarakat local tidak semuanya bekerja dipelabuhan, ada yang bekerja di perusahaan tambang PT ANTAM yang lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi pelabuhan. Masyarakat setempat tidak mempermasalahkan kehadiran pekerja dari luar ini dan mereka bisa berbaur dengan pekerja local. Awalnya PT Antam menawarkan ganti rugi pembebasan lahan dengan harga yang sangat murah (Rp 12.000) sebelum Pelindo masuk. Beberapa masyarakat bersedia dengan ganti rugi tersebut. Kemudian setelah Pelindo masuk dan menawarkan tarif pembebasan yang harganya jauh lebih tinggi, maka harga tanah di sekitar PT Antam juga meningkat sama dengan harga yang ditawarkan Pelindo. Masyarakat yang sudah menerima pembayarang dari PT ANTAM dengan harga lama cukup kecewa, namun mereka pun tidak bisa menolak sebab jika mereka tidak bersedia, tanah pun tetap akan dieksekusi mengingat PT Antam adalah BUMN. Setelah Pelindo masuk, maka masyarakat bersedia dengan senang hati membebaskan lahan untuk PT Antam dengan harga sesuai yang diberikan oleh PT Pelindo.

Nantinya jika pelabuhan resmi beroperasi, maka akan sangat banyak container yang harus bermalam disekitar pelabuhan dan akan menimbulkan bisnis jasa sewa lahan parkir container menginap yang nilainya juga sangat menguntungkan. Oleh karenanya, uang ganti untung mereka belikan tanah lagi di luar pelabuhan. Ada juga yang membeli tanah di luar Mempawah dengan

harga yang sangat murah, tujuannya hanya untuk investasi. Rata-rata masyarakat juga memiliki dump truck setidaknya satu orang memiliki satu. Dump truck ini berfungsi untuk membawa material bangunan seperti batu, tanah, pasir dan lain-lain baik untuk keperluan pelabuhan maupun keperluan lainnya. Hal ini tentu saja menambah pendapatan bagi warga. Mereka menyewakan dump trucknya hingga ke luar daerah. Jika mereka mempunyai anak maka usaha ini diserahkan ke anaknya. Ini juga yang menyebabkan si anak yang tadinya bekerja di pelabuhan memilih keluar dan bekerja dengan usaha sendiri. Selain itu mereka juga membuat rumah permanen yang sangat bagus dan kendaraan untuk keluarga.

Tidak hanya bagi warga, pemerintah daerah juga merasakan manfaat dari pembebasan lahan ini karena adanya peningkatan pembayaran pajak (PBB). Tentunya setelah pelabuhan internasional Kijing ini resmi beroperasi akan sangat banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat meningkat dengan pesat setelah adanya pembebasan lahan ini. Dampak negative dari pembangunan pelabuhan ini belum begitu terlihat karena aktivitas pelabuhan belum berjalan.

Dampak Pembangunan Pelabuhan Tanjungpura Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Masyarakat

Dampak Terhadap Kondisi Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber mengenai dampak terhadap lalu lintas jalan, mereka merasakan adanya perubahan kondisi lalu lintas jalan pada saat sebelum dan sesudah adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura. Mereka menceritakan bahwa sebelum adanya pembangunan pelabuhan, kondisi lalu lintas jalan tidak terlalu ramai kemudian dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini mereka merasakan kondisi lalu lintas yang menjadi lebih ramai dari sebelumnya.

Dampak perubahan kondisi lalu lintas yang dirasakan oleh masyarakat yaitu semakin banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang melintas oleh keluar masuknya kendaraan proyek yang mengangkut bahan baku material yang akhirnya menimbulkan kemacetan namun hal ini tidak mengganggu dan tidak berlangsung lama, selain itu dampak yang dirasakan juga adalah jalanan menjadi bergelombang yang diakibatkan oleh beban muatan kendaraan-kendaraan besar yang melintas.

Dalam menanggapi hal ini, narasumber mengatakan bahwa pihak perusahaan telah mempersiapkan petugas pengamanan jalan sehingga kondisi lalu lintas jalan disekitar pelabuhan dapat berjalan dengan tertib. Dikatakan juga bahwa kondisi jalan yang ada tidaklah mengalami kerusakan yang begitu parah dan masih bagus, mereka juga berpendapat bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan jalan. Namun, salah satu narasumber menyatakan bahwa sempat terjadi kecelakaan tepat di depan jalan perusahaan dimana kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa. Hal ini dikatakan oleh narasumber diakibatkan oleh adanya air yang berada di jalan setelah terjadinya hujan sehingga mengakibatkan korban ingin melewati air tersebut namun disaat yang bersamaan terdapat kendaraan lain dari arah berlawanan melintas dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nantinya juga akan dibangun jalan alternative jalan provinsi melalui rute belakang, sedangkan jalan negara yang akan digunakan untuk aktivitas pelabuhan menggunakan container. Jika sudah ada dua jenis jalan ini maka aktivitas pelabuhan tidak akan mengganggu lalulintas umum.

Untuk rencana pembangunan jalan provinsi, pembebasan lahan juga sudah dilakukan dengan harga yang sesuai dengan harga penwaran PT Pelindo. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan ini memberikan keuntungan lagi bagi sekelompok masyarakat terutama masyarakat yang sudah mendapat ganti untung pembebasan lahan pelabuhan dengan nominal yang

sangat besar dan mereka menginvestasikan kembali untuk membeli tanah. Mereka membeli tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan provinsi dengan harga yang tidak begitu tinggi, kemudian setelah selesai akan ada pembangunan jalan maka mereka mendapat ganti untung dengan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp 500.000,- per meter.

Dampak Terhadap Kualitas Udara

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber mengenai permasalahan polusi udara, narasumber mengatakan bahwa dari semua dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini, dampak terhadap polusi udara yang paling dirasakan oleh masyarakat. Adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini sedikit mengganggu pernapasan masyarakat sekitar. Adapun dampak yang sering ditimbulkan seperti batuk ringan dan gangguan pernapasan lainnya yang diakibatkan oleh polusi udara yang berasal dari asap kendaraan dan debu material yang jatuh ke tanah oleh kendaraan-kendaraan proyek.

Selain itu, dikarenakan kondisi jalan yang masih berupa tanah merah mengakibatkan banyaknya debu di jalanan terutama pada saat kondisi jalan kering. Namun demikian masyarakat tampaknya sudah terbiasa akan hal tersebut walaupun terdapat beberapa keluhan-keluhan kecil namun hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat juga sudah terbiasa menghadapinya dengan memiliki kebiasaan untuk menggunakan masker saat berkendara (selain karena COVID-19), selain itu pihak perusahaan juga telah bertanggungjawab dengan menyiram jalan agar tidak banyak debu terutama pada saat kondisi jalan kering. Perlu untuk diketahui juga bahwa semua keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat itu hanya diatasi secara pribadi dari masyarakat itu sendiri dan belum ada gerakan dari perusahaan untuk memberikan bantuan seperti penyediaan tempat berobat ataupun penyediaan masker gratis sampai saat ini.

Dampak Terhadap Kebersihan Lingkungan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber mengenai kebersihan lingkungan, dikatakan bahwa dikarenakan pelabuhan Tanjungpura ini masih belum beroperasi dan belum adanya pembangunan pabrik disana, dampak terhadap kebersihan lingkungan pun belum terlalu dirasakan dan belum bisa dikaji dampaknya terhadap kebersihan lingkungan masyarakat. Mereka masih perlu untuk melihat bagaimana dampak kedepannya terlebih dahulu, namun untuk saat ini masih belum didapati dampak terhadap kebersihan lingkungan yang berarti. Mereka membandingkan hal ini seperti kondisi yang terjadi pada PT. Wilmar dimana setelah perusahaan tersebut membangun pabrik, barulah dampak negatif yang begitu besar dirasakan terhadap kondisi kebersihan di lingkungan masyarakat.

Dampak Terhadap Kualitas Air Sumur Dan Kondisi Kekeringan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari narasumber mengenai dampak terhadap kualitas sumber air dan kondisi kekeringan di masyarakat, narasumber menyebutkan bahwa masih belum terdapat permasalahan terhadap sumber air dan kondisi kekeringan yang terjadi di masyarakat, karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya proyek pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini masih belum menimbulkan limbah yang membahayakan dan belum didirikan pabrik juga disekitar area pelabuhan sehingga belum ada limbah yang mencemari sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat (masih bersih).

Dikarenakan hampir semua sumber mata air berasal dari dalam tanah seperti gorong-gorong (sumur bor), sumur tanah, kolam (perigi), dan air hujan sehingga masyarakat sangat mengandalkan sumber air yang ada di dalam tanah, apabila tidak terdapat sumber air didalam tanah maka akan terjadi kekeringan namun apabila terdapat sumber air didalam tanah maka tidak terjadi

kekeringan, jikalau sampai terjadi kekeringan maka masyarakat dapat membeli air dari penyuplai air bersih dan ada juga yang memperolehnya dari sungai.

Dampak Terhadap Kondisi Keamanan Masyarakat

Berdasarkan keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari narasumber mengenai dampak terhadap keamanan, dikatakan bahwa tidak terjadi permasalahan keamanan yang disebabkan oleh arus masuknya penduduk baru yang datang ke wilayah pelabuhan dan permukiman masyarakat sekitar, justru dengan adanya pembangunan pelabuhan ini adanya pendatang baru memberikan dampak yang begitu besar terutama bagi perekonomian masyarakat secara khusus dan mempawah secara umumnya, dimana adanya pendatang baru ini semakin memajukan usaha-usaha masyarakat sekitar dan memberikan peluang usaha baru seperti penyediaan penginapan, kos, kontrakan, dll yang akhirnya memberikan pemasukan bagi masyarakat dari pendatang baru tersebut.

5. SIMPULAN

Pembangunan pelabuhan Tanjungpura memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Kunyit Laut. Pemilik tanah mendapat ganti untung pembebasan lahan dengan harga yang sangat berpatutan. Selain tanah, tanaman yang tumbuh di atas lahan yang dibebaskan serta bangunan juga dinilai dan diberikan ganti untung yang sesuai. Selain ganti untung, barang-barang yang sudah dinilai dan dibeli dapat diambil kembali oleh pemiliknya sehingga pemilik mendapat keuntungan berlipat. Pemilik usaha/warung juga mendapatkan kompensasi berupa penggantian pendapatan usaha selama pembangunan berlangsung, walaupun status tanah mereka sewa. Pemilik togog dan kelong juga mendapat ganti untung sesuai luasnya, sementara pekerja togog dan kelong serta nelayan yang terdampak dipekerjakan di pelabuhan dengan gaji yang sesuai.

Pendapatan yang diperoleh masyarakat terdampak sangat tinggi terutama bagi pemilik lahan serta tanam tumbuh. Masyarakat kedua desa tersebut dapat memiliki rumah baru yang sangat bagus, membeli kendaraan roda empat pribadi, dumptruck, umroh, mendaftar Haji, membeli tanah di luar daerah dengan ukuran yang luas, tabungan yang memadai serta memiliki usaha yang baru. Masyarakat mendapat keuntungan yang besar dari pembebasan lahan tersebut. Terjadi alih profesi masyarakat terdampak. Nelayan terdampak sekarang bekerja di pelabuhan dan beberapa memilih membuat usaha sendiri dengan hasil kompensasi yang diterima. Banyak usaha baru bermunculan seperti laundry, penyewaan dumtruck dan warung/rumah makan baru.

Dampak pembangunan pelabuhan Tanjungpura terhadap kondisi lingkungan diantaranya terlihat dari lalu lintas jalan menjadi lebih ramai dari sebelumnya karena semakin banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut bahan baku material yang akhirnya menimbulkan kemacetan namun hal ini tidak mengganggu dan tidak berlangsung lama, selain itu dampak yang dirasakan juga adalah jalanan menjadi bergelombang. Nantinya juga akan dibangun jalan alternative jalan provinsi melalui rute belakang, sedangkan jalan negara yang akan digunakan untuk aktivitas pelabuhan menggunakan container. Jika sudah ada dua jenis jalan ini maka aktivitas pelabuhan tidak akan mengganggu lalulintas umum. Dari semua dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini, dampak terhadap polusi udaralah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Adanya pembangunan pelabuhan Tanjungpura ini sedikit mengganggu pernapasan masyarakat sekitar. Adapun dampak yang sering ditimbulkan seperti batuk ringan dan gangguan pernapasan lainnya yang diakibatkan oleh polusi udara yang berasal dari asap kendaraan dan debu material yang jatuh ke tanah oleh kendaraan-kendaraan proyek.

Setelah pembangunan pelabuhan Tanjungpura selesai dan akan beroperasi, maka perlu diwaspadai dampak sosial karena dengan adanya pelabuhan akan menjadikan kedua desa semakin ramai dengan pendatang sehingga selain dampak positif, juga harus diwaspadai dampak negative. Rekomendasi diberikan dalam hal pengendalian dan pengawasan dampak negative tersebut oleh pemerintah serta aparatur desa dan jajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berköz, Lale. (1999). The role of ports in the economic development of Turkey, 39th European Congress of the Regional Science Association, August 23-27, Dublin, Ireland.
- Febria, A. (2017). Dampak Pembangunan Pelabuhan Pada Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Kendal Kabupaten Kendal. *Jurnal Departemen Pembangunan Wilayah Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 1-14
- Ferrari, Claudio. (2011). Ports and regional economic development: Global Ports and Urban Development: Challenges and Opportunities, OECD, Paris.
- Fisu, A. A, Didiaryono & Bakhtiar (2020). Economic & Financial Analysis of Tarakan Fishery Industrial Estate Masterplan. International Conference on Environment and Technology. IOP Conference Series Vol 469
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136 [8].
- Gultom, Elfrida, (2017) Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.10, No.03, hal 419-444
- Guoqiang, Zhang, Ning, Zhang, Qingyun, Wang, (2005). Container ports Development and regional economic growth: an empirical research on the pearl river delta region of china, *Proceedings of the Eastern Asia Society for ransportation Studies*, Vol. 5, pp. 2136 – 2150.
- Kowalczyk, Ursula. (2012). Case Study on Hub-And-Hinterland Development In The Baltic Sea Region, Maritime Institute in Gdansk, TransBaltic Project, Gdansk, Poland
- Mandasari, Tridoyo Kusumastanto, Heti Mulyati. (2017). Analisis Kebijakan Ekonomi Pengembangan pelabuhan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.18, No.01.hal 92-108
- Mukherjee, Arpita (2001). India's trade in maritime transport services under the gats framework, working paper no. 76, Indian council for research on international economic relations
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2020). Place Memory Masyarakat pada Bangunan Cagar Budaya di Kota Palopo. *RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies)*, 17(2), 63-70
- Oliveira, Uirá Cavalcante., (2008). The Role of the Brazilian Ports in the Improvement of the National Ballast Water Management Program According the Provisions of the International Ballast Water Convention, The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme 2007 – 2008
- Rijkure, Astrida . Inga Sare.,(2013). The Role Of Latvian Ports Within Baltic Sea Region, *ISSN 1822–8402 European Integration Studies* 2013. No. 7.
- Sanchez, Ricardo J. , Alejandro Miccó, Jan Hoffmann, Georgina V. Pizzolitto Martín Sgut (2002). Port efficiency and international trade: Port efficiency as a determinant of the maritime transport cost. *IAME Panama* .
- Wahono, D. (2015). Terminal Petikemas pada Pelabuhan Internasional Pantai Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak. *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur*, 3(1).
- Wang, J. J. (1998). A container load center with a developing hinterland: A case study of Hong Kong, *Journal of Transport Geography*. Vol.6,vNo.3 187-201.

**DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP MASYARAKAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT**

Jumhur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

Community perception of oil palm plantations in Bengkayang Regency is a cognitive process experienced by every person (community) in understanding information about their environment related to the impact of the establishment of oil palm plantations. The surrounding community, especially the village community, is the access road to the company. The distance between the company and the village settlements will have an impact that will be felt by the village community, this impact will be from an economic and social perspective, both positive and negative. This research aims to find out how the community perceives the impact of the establishment of oil palm plantations in Bengkayang Regency, especially from economic aspects. This research method uses qualitative descriptive data analysis. The sample was determined using the proportional cluster method, that is, 10% of each population was taken to be used as a sample. Based on the results of research that has been carried out, it was found that the economic impact of the existence of an oil palm plantation company in Bengkayang Regency is able to have a positive influence on the community's economy, this is reflected in the increase in community income, increased employment opportunities and increased community consumption after the operation of an oil palm company in the Regency. Stuffed.

JEL: B22, E22

Key words: economic, environmental and social impacts; oil palm plantation

ABSTRAK

Persepsi masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupataen Bengkayang merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang (masyarakat) di dalam memahami informasi tentang lingkungannya terkait dampak berdirinya perkebunan kelapa sawit. Masyarakat sekitar terkhusus masyarakat Desa yang menjadi akses jalan menuju perusahaan, jarak lokasi yang tidak terlalu jauh antara perusahaan dan pemukiman penduduk desa akan memberikan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat desa, dampak tersebut dari segi ekonomi dan sosial yang bersifat positif maupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak berdirinya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang terutama dari aspek ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode proporsional *cluster*, yakni dari setiap populasi diambil 10 % untuk dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dampak ekonomi dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang mampu memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, hal ini tercermin dari semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat setelah peroperasinya perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang.

Kata kunci: *dampak ekonomi, lingkungan dan sosial; perkebunan kelapa sawit*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di sektor pertanian bertumpu di atas landasan keunggulan komparatif dalam memproduksi berbagai bahan baku mentah, salah satunya yaitu dari komoditas perkebunan, yang dapat membuat peluang pengembangan agribisnis yang cukup besar. Peluang pengembangan agribisnis ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Berdirinya perusahaan perkebunan tentu akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar perkebunan (Rusmawardi, 2007). Dampak yang terjadi akibat atau pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan perkebunan, akan menimbulkan persepsi masyarakat akan kelangsungan hidup mereka. Baik itu yang mengarah pada keresahan atau keluhan masyarakat ataupun terhadap perbaikan keberadaan lingkungan hidup mereka (Hikmal Said, Lukman Yunus, 2018)

Persepsi merupakan tanggapan langsung seseorang atas sesuatu (Media, 2010). Persepsi setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang seseorang. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikir bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya atau ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi sekitarnya (Nugroho, 2018).

Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat di sekitarnya, baik positif maupun negatif. Begitupun sebaliknya, pandangan atau tindakan masyarakat sekitar perusahaan dapat mempengaruhi keberlanjutan keberadaan sebuah perusahaan di wilayah tertentu. Persepsi masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan sektor perkebunan kelapa sawit merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang (masyarakat) di dalam memahami informasi tentang lingkungannya terkait dampak berdirinya perkebunan kelapa sawit, baik lewat penglihatan, pandangan, penghayatan, perasaan maupun penciuman.

Salah satu contoh dampak yang terjadi akibat adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. secara sosial dan ekonomi membawa banyak pengaruh positif. Adapun pengaruh positif terhadap kondisi sosial terlihat pada pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan terhadap pranata sosial lembaga-lembaga masyarakat. pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi terlihat pada Kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka dengan adanya perkebunan sawit sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran (Apriyanti & Munthaha, 2017).

Tabel 1. Luas Tanaman Perkebunan Rakyat 2015-2021 di Kabupaten Bengkayang (Ha)

Perkebunan	2015	2016	2017	2018	2019	2021
Karet	52.420	52.477	55.083	53.063	53.063	53.122
Kelapa Sawit	13.835	15.245	15.258	98.417	98.417	99.433
Kelapa Hibrida	104	104	104	104	104	100
Kelapa Dalam	4.270	4.277	4.277	4.277	4.277	4.271
Lada	2.826	2.899	3.071	3.071	3.071	3.067
Kopi	412	386	386	386	396	396
Kakao	2.050	2.020	2.041	2.041	2.041	1.694
Aneka Tanaman	2.220	2.189	82.289	2.036	2.036	1.976

Sumber. *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2022*

Perkembangan luas Tanaman perkebunan rakyat tahun 2015-2021 di Kabupaten Bengkayang seperti terlihat pada table 1 terlihat luas areal perkebunan karet relative tetap selaman kurun waktu 2015-2021, sementara untuk perkebuna kelapa sawit pada rentang waktu yang sama terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal menjadi lebih baik, angka putus sekolah berkurang dan asupan gizi bagi anak-anak dapat dipenuhi. Namun, selain sisi positif bagi sosial ekonomi masyarakat, pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pertanian juga memiliki dampak negatif. Perubahan itu tampak pada mulai hilangnya marwah institusi lokal (lembaga adat) masyarakat lokal. Masyarakat lebih berpikir pragmatis dan hedonis, tata cara hidup tidak lagi merujuk pada tata aturan adat budaya setempat.

Perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi hingga ke institusi keluarga, komunikasi orang tua dan anak sudah mulai berkurang. Pendidikan di keluarga lebih didominasi oleh teknologi dan media (media masa maupun media sosial) dari pada orang tuanya sendiri. Kekerabatan masyarakat adat mulai longgar. Ritual adat sebagai media religius dan sosial berubah menjadi lebih pada serimonial dan lebih kental aspek pariwisata. Masyarakat lokal kehilangan identitas dan jati diri, segala yang terkait dengan warisan sudah kehilangan maknanya.

Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit akan menciptakan suatu alternatif tambahan untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan tambahan bagi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit yang pada akhirnya terakumulasi menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kajian aspek ekonomi dalam penelitian ini akan difokus pada beberapa aspek yaitu, kondisi perekonomian masyarakat, pendapatan yang diterima, lapangan kerja, tingkat konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk kebutuhan pangan, pengeluaran untuk kebutuhan sandang, dan pengeluaran untuk kebutuhan papan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak perkebunan kelapa sawit terhadap sosial ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Merekomendasikan hasil penelitian ini pada pengambil kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak positif maupun negative perkebunan sawit terhadap masyarakat Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Memberikan kontribusi pada penelitian yang ada dan memberikan wawasan tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap social ekonomi masyarakat masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Ronald Coase menjelaskan bahwa jalan keluar penyelesaian konflik berkenaan dengan eksternalitas negatif dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangannya. Jika syarat itu terpenuhi maka pihak swasta mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Walaupun secara teoritis Teorema Coase dianggap baik sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sulit untuk dilakukan, namun kadangkala masih diperlukan tawar-menawar dengan biaya yang tinggi. Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang memengaruhi kesejahteraan orang lain tetapi tidak membayar dan menerima kompensasi atas dampak tersebut. Jika dampak karena aktivitasnya buruk, maka disebut eksternalitas negatif. Jika dampak dari kegiatan tersebut baik, maka disebut eksternalitas positif (Ronald, 1960).

Dampak eksternalitas sosial ekonomi terhadap kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat ditentukan oleh macam-macam aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah tinggal, dan jabatan dalam suatu organisasi. Karakteristik sosial tersebut dapat meliputi status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter ekonomi meliputi antara lain aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, status pekerjaan, lapangan

pekerjaan, dan juga pendapatan. Setelah berdirinya perusahaan tentunya dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Contoh yang dapat diambil ialah masyarakat yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani kini beralih profesi sebagai karyawan swasta atau wiraswasta. Dengan melakukan alih profesi tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan sekarang. Norma-norma yang ada dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Keinginan terhadap sesuatu yang baru mendorong munculnya perubahan sosial (Faritz, 2017).

Kegiatan produksi pada perusahaan industri kelapa sawit dapat berdampak pada lingkungan sekitar tempat tinggal penduduk. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dari Mei 2019 hingga Juli 2019, menemukan bahwa industri kelapa sawit memiliki dampak positif pada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Pendirian perusahaan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang bisnis. Industri ini menawarkan banyak manfaat bagi orang-orang yang tinggal di dekat perusahaan, termasuk dukungan keuangan untuk anak yatim, dukungan untuk pemeliharaansekolah, dan dukungan untuk perbaikan jalan (Hidayah et al., 2020)

Penelitian tentang eksternalitas perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memberikan dampak negatif yang sangat fatal terhadap sosial dan lingkungan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan pertambangan (Suciadi, 2021). Namun penelitian pada kegiatan pembangunan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge justru menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini tampak dari hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara peran masyarakat sebagai pekerja, petani dan pengusaha (Suciadi et al., 2020)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok tani swadaya di sektor perkebunan. Kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat pedesaan di Kabupaten Mamuju hal ini cukup beralasan karena memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan perekonomian industri selain dari minyak dan gas bumi yang selama ini merupakan komoditi andalan Indonesia. Produk kelapa sawit berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan industri bahan makanan maupun bahan nonpangan keperluan industri (Awaru et al., 2023)

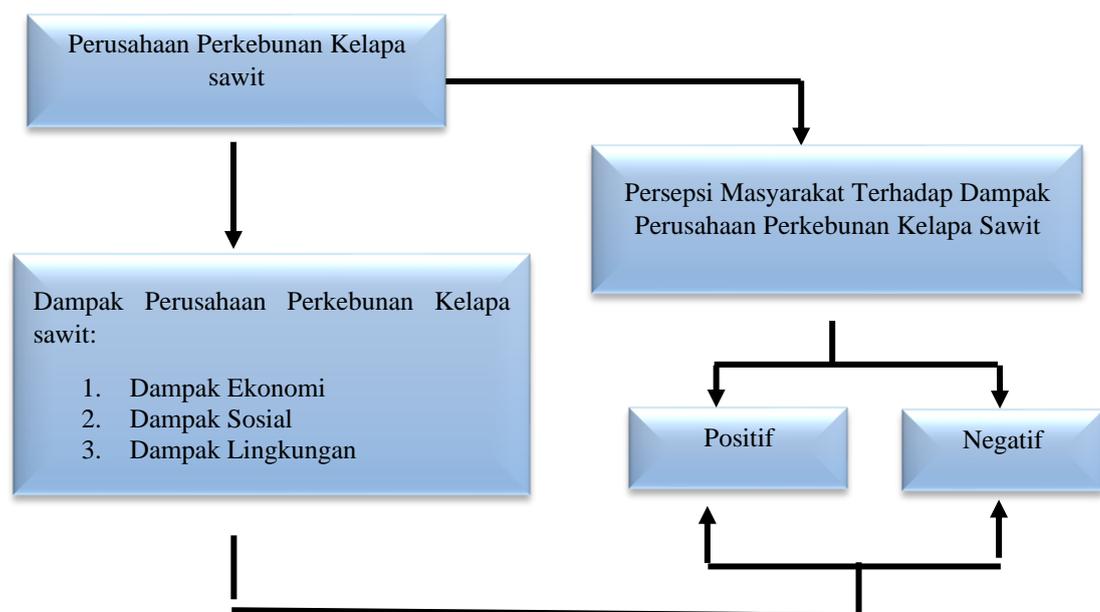
Aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya mampu memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian, karena kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani jika dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Tanaman kelapa sawit juga merupakan tanaman yang cukup tangguh, karena tidak memerlukan perawatan yang intensif dan tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu permintaan dari tahun ke tahun untuk produk kelapa sawit terus mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri tetapi juga luar negeri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, studi kepustakaan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan

data dilakukan dengan beberapa cara berikut: (1) Melalui wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dengan panduan atau daftar pertanyaan ataupun diluar daftar pertanyaan, (2) Melalui observasi (*observation*), yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bekerja di Kabupaten Sanggau yang terdekat dengan sektor perkebunan kelapa sawit. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode proporsional *cluster*, yakni dari setiap populasi diambil 10 % untuk dijadikan sampel, sehingga sampel pada penelitian ini sebanyak 252 jiwa

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dengan menggunakan prosedur penerapan alat ukur skala Likert. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dijabarkan menjadi item-item spesifik yang telah disusun dalam kuesioner penelitian. Setiap pertanyaan diberikan skor. Skor untuk masing-masing responden yang diperoleh dari kuesioner kemudian dijumlahkan untuk mengetahui persepsi dari responden tersebut. Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner inilah yang kemudian digunakan untuk melihat persepsi masyarakat di sekitar perkebunan. Secara ringkas alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian Masyarakat

Usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat merupakan kegiatan agribisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Perkebunan kelapa sawit rakyat di Kalimantan Barat berkembang hampir diseluruh kabupaten di Kalimantan Barat kecuali Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit yang terdapat di Kalimantan Barat ialah Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang memiliki luasan perkebunan kelapa sawit sebesar 13.835 hektar pada tahun 2015 dan berkembang menjadi 49.433 hektar pada tahun 2021, hal ini mengukuhkan Kabupaten bengkayang sebagai daerah yang memiliki luasan kebun kelapa sawit cukup besar di Kalimantan Barat (BPS Kalimantan Barat 2022).

Luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat akan terus meningkat yang disebabkan oleh hasrat keinginan masyarakat yang cukup besar terhadap perkebunan kelapa sawit yang tersebar di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Perkebunan kelapa sawit merupakan alternatif bagi masyarakat dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan dasar kemampuan masyarakat.

Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit akan berpengaruh dengan terbukanya peluang usaha. Walaupun jenis usaha yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat masih tergolong dalam intensitas dan skala kecil, namun memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat sekitar proyek perusahaan kelapa sawit tersebut. Semakin kompleksnya kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut akan membuka peluang kerja secara langsung bagi masyarakat sekitar perusahaan menjadi karyawan dalam perusahaan tersebut. Pengadaan kerja pada proyek-proyek untuk kegiatan perkebunan akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat sekitar perusahaan perkebunan tersebut.

Tabel 2.
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dampak Ekonomi Perusahaan Perkebunan Sawit Di Kabupaten Bengkayang

No	PARAMETER	Prekwensi/Prosentase					Jumlah Responden
		Sangat Baik	Baik	Netral	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	Kondisi Perekonomian Masyarakat						
	Sebelum	3 (1,19)	79 (31,35)	88 (34,92)	76 (30,16)	6 (2,38)	252 (100,00)
	Sesudah	33 (13,10)	164 (65,08)	21 (8,33)	30 (11,90)	4 (1,59)	252 (100,00)
2	Pendapatan Yang diterima						
	Sebelum	3 (1,19)	75 (29,76)	92 (36,51)	76 (30,16)	6 (2,38)	252 (100,00)
	Sesudah	37 (14,68)	146 (57,94)	40 (15,87)	27 (10,71)	2 (0,79)	252 (100,00)
3	Lapangan Kerja Baru						
	Sebelum	7 (2,78)	51 (20,24)	94 (37,30)	82 (32,54)	18 (7,14)	252 (100,00)
	Sesudah	34 (13,49)	162 (64,29)	33 (13,10)	23 (9,13)	0 (0,00)	252 (100,00)
4	Tingkat Konsumsi Masyarakat						
	Sebelum	7 (2,78)	76 (30,16)	104 (41,27)	59 (23,41)	6 (2,38)	252 (100,00)
	Sesudah	28 (11,11)	170 (67,46)	34 (13,49)	14 (5,56)	6 (2,38)	252 (100,00)
5	Pengeluaran untuk kebutuhan Pangan						
	Sebelum	2 (0,79)	72 (28,57)	118 (46,83)	54 (21,43)	6 (2,38)	252 (100,00)
	Sesudah	33 (13,10)	155 (61,51)	42 (16,67)	18 (7,14)	4 (1,59)	252 (100,00)
6	Pengeluaran untuk kebutuhan Sandang						
	Sebelum	2 (0,79)	74 (29,37)	110 (43,65)	58 (23,02)	8 (3,17)	252 (100,00)
	Sesudah	24 (9,52)	173 (68,65)	30 (11,90)	23 (9,13)	2 (0,79)	252 (100,00)
7	Pengeluaran untuk kebutuhan Papan						
	Sebelum	9 (3,57)	69 (27,38)	91 (36,11)	77 (30,56)	6 (2,38)	252 (100,00)
	Sesudah	30 (11,90)	149 (59,13)	49 (19,44)	17 (6,75)	7 (2,78)	252 (100,00)
Jumlah/Persentase							
	Sebelum	33 (1,87)	496 (28,12)	697 (39,51)	482 (27,32)	56 (3,17)	1.764 (100,00)
	Sesudah	219 (12,41)	1.119 (63,44)	249 (14,12)	152 (8,62)	25 (1,42)	1.764 (100,00)

Sumber: *Data Primer Diolah, 2022*

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkayang Kondisi perekonomian masyarakat secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit ekonomi masyarakat yang kondisi ekonominya baik hanya 31,35% kemudian setelah adanya perusahaan sawit masyarakat yang memiliki ekonomi kategori baik meningkat menjadi 65,08%. Dampak ekonomi yang terjadi termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang bersifat positif.

1. Pendapatan Yang diterima

Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Berdasarkan Tabel 2 kondisi pendapatan yang diterima masyarakat secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit pendapatan yang diterima masyarakat yang kondisi baik hanya 29,76% kemudian setelah adanya perusahaan sawit masyarakat yang memiliki pendapatan kategori baik meningkat menjadi 57,94%. Dampak peningkatan pendapatan masyarakat yang terjadi termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh responden, bahwa setelah adanya perkebunan kelapa sawit, pendapatan masyarakat meningkat karena terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yakni menjadi karyawan di perkebunan tersebut. Sementara yang kondisi ekonominya tidak baik sebelum adanya perusahaan sawit masih termasuk besar yaitu 30,16% dan setelah adanya perusahaan turun menjadi 10,71%.

2. Lapangan Kerja

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di pedesaan membuka peluang kerja bagi masyarakat pedesaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Peningkatan peran masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, diharapkan dapat mengatasi masalah keterlibatan masyarakat lokal dalam industri kelapa sawit yang dapat memicu kecemburuan sosial. Berdasarkan Tabel 2, kondisi kesempatan kerja atau lapangan kerja yang diterima masyarakat secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit kesempatan kerja yang ada yang kondisi baik hanya 20,24% kemudian setelah adanya perusahaan sawit lapangan kerja meningkat menjadi 64,29%. Dampak peningkatan lapangan kerja yang ada di masyarakat yang terjadi yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu membuka lapangan kerja yang bersifat positif. Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat menjadi karyawan di perkebunan tersebut. Sementara yang kondisi ekonominya tidak baik sebelum adanya perusahaan sawit masih termasuk besar yaitu 32,54% dan setelah adanya perusahaan turun menjadi 9,13%). Pekerjaan dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit cukup banyak memerlukan tenaga. Selain itu kegiatan perkebunan kelapa sawit berfluktuasi sepanjang tahun karena adanya pekerjaan yang berkaitan dengan musim, lahan, curah hujan, dan bulan panen puncak dan panen rendah (Lubis, 1992). Hal tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan tenaga kerja yang cermat, efektif dan efisien.

3. Tingkat Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makro ekonomi. Konsep konsumsi merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan

jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau juga pendapatan yang dibelanjakan. Menurut Keynes pada Mankiw (2006), tingkat konsumsi individu secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Maka bila terjadi peningkatan pada pendapatan individu kemungkinan besar tingkat konsumsi akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan Tabel 2, Tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit tingkat konsumsi masyarakat yang ada yang kondisi baik hanya 30,16% kemudian setelah adanya perusahaan sawit Tingkat konsumsi masyarakat meningkat menjadi 67,46%. Demikian pula Tingkat konsumsi masyarakat yang pada kategori netral sebelum adanya perkebunan sawit cukup yingg yang mencapai 41,27%. setelah adanya perusahaan sawit turun eraktis menjadi hanya 13,49%. Dampak peningkatan Tingkat konsumsi yang ada di masyarakat yang terjadi yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu membuka lapangan kerja yang bersifat positif. Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi mereka. Sementara yang kondisi tingkat konsumsi masyarakat tidak baik sebelum adanya perusahaan sawit masih termasuk besar yaitu 23,41% dan setelah adanya perusahaan turun menjadi 5,56%.

4. Pengeluaran Untuk Kebutuhan Pangan

Secara garis besar, kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Dengan demikian, pada tingkat pendapatan tertentu rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara alamiah, kebutuhan pangan akan mencapai titik jenuh pada tingkat pendapatan tertentu, sementara kebutuhan nonpangan termasuk kualitas pangan dapat dikatakan tidak memiliki titik jenuh. Hukum Working menyatakan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bermacam jenis pengeluaran bervariasi sesuai dengan tingkat pendapatan, ukuran keluarga dan tabungan. Selanjutnya, dikatakan oleh Pakpahan (2012) bahwa proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk pangan cenderung menurun secara aritmetik sejalan dengan peningkatan pendapatan yang bergerak secara geometrik. Artinya, semakin kaya suatu rumah tangga makin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan.

Berdasarkan Tabel 2, pengeluaran untuk kebutuhan Pangan secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit Pengeluaran untuk kebutuhan Pangan masyarakat yang ada yang kondisi baik hanya 28,57% kemudian setelah adanya perusahaan sawit Tingkat konsumsi masyarakat meningkat menjadi 61,51%. Demikian pula Pengeluaran untuk kebutuhan Pangan masyarakat yang pada kategori netral sebelum adanya perkebunan sawit cukup yingg yang mencapai 46,83%, setelah adanya perusahaan sawit turun eraktis menjadi hanya 16,67,49% saja. Dampak peningkatan Tingkat konsumsi yang ada di masyarakat yang terjadi yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu membuka lapangan kerja yang bersifat positif. Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat memberikan kesempatan ang lebih besar bagi masyarakat menjadi karyawan di perkebunan tersebut. Sementara yang kondisi Pengeluaran untuk kebutuhan Pangan sebelum adanya perusahaan sawit masih termasuk besar yaitu 21,43% dan setelah adanya perusahaan turun menjadi 7,14%.

5. Pengeluaran Untuk Kebutuhan Sandang

Sandang merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pakaian, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan makanan dan minuman, dan papan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal. Berdasarkan Tabel 2, pengeluaran untuk kebutuhan Sandang secara umum setelah adanya perusahaan sawit terjadi peningkatan, misalnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit Pengeluaran untuk kebutuhan Sandang masyarakat yang ada yang kondisi baik hanya 29,27% kemudian setelah adanya perusahaan sawit Tingkat konsumsi masyarakat meningkat menjadi 68,65%. Demikian pula Pengeluaran untuk kebutuhan sandang masyarakat yang pada kategori netral sebelum adanya perkebunan sawit cukup yingg yang mencapai 43,65%, setelah adanya perusahaan sawit turun eraktis menjadi hanya 11,90 saja. Dampak peningkatan Pengeluaran untuk kebutuhan Sandang yang ada di masyarakat yang terjadi yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya adanya atau berdirinya perusahaan Sawit tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari adanya peningkatan Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan Sandang Sementara yang kondisi Pengeluaran untuk kebutuhan Pangan sebelum adanya perusahaan sawit masih termasuk besar yaitu 23,02% dan setelah adanya perusahaan turun menjadi 9,13%.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang dampak ekonomi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit, dapat diambil kesimpulan bahwa, dampak ekonomi dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang mampu memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, hal ini tercermin dari semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat setelah peroperasinya perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu agar aspek ekonomi menyanarkan terue meningkat, maka pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit sebaiknya harus menciptakan komunikasi dan hubungan sosial yang baik kepada masyarakat sekitar perusahaan, perusahaan harus lebih memberikan perhatian khusus pada daerah sekitar terkait dampak Ekonomi yang akan terjadi akibat adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dari sisi pengambil kebijakan ada dua hal yang penting yang bisa dilakukan yaitu (a) Untuk investor, untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis sawit di Kabupaten Bengkayang, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah maupun pusat terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain bisa dilakukan dengan cara memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan, sehingga biaya produksi dapat ditekan, (b) Dari sisi masyarakat, guna meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan sawit, bisa dilakukan dengan; (1) lebih banyak melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja di perusahaan sawit yang bisa dilakan dengan mengharuskan perusahaan sawit untuk menyerap sekian persen dari pekerja lokal. (b) ikut berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan/keterampilan tenaga kerja lokal dengan cara membuka lembaga-lembaga pendidikan/pelatihan yang dipersiapkan untuk mendidik para pakerja lokal. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pekerja lokal untuk melakukan pemagangan diperusahaan sawit. Hal ini perlu dilakukan agar peluang kerja yang memerlukan tingkat keterampilan tertentu diperusahaan sawit secara bertahap bisa diisi oleh pekerja lokal agar keberadaan perusahaan sawit secara riil mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, I., & Munthaha, M. A. (2017). Social Economic Conditions Around the Palm Oil Plant Company in Regency. *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 20(3), 239–245. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fagrium.v20i3.1054>
- Awaru, A. O. T., Nurulmiati, Talia, N., Mustika, Sofiana, M. D., & Yulianti. (2023). *Dampak Sosial Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani*. 1(3).
- Faritz, M. (2017). Pengaruh keberadaan Perusahaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun. *Pengaruh Keberadaan Perusahaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun*, 9(2), 9.
- Hidayah, U. N., Widuri, N., & Maryam, S. (2020). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 3(2), 63.
- Hikmal Said, Lukman Yunus, W. O. Y. (2018). *Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit (Pt.Tani Prima Makmur) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Karyawan Di Desa Mendikon Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe*. 91–100.
- Nugroho, A. E. ;Rakhmadhani N. (2018). Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Pembangunan Di Hulu Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. *Magrobis Journal*, Volume 8 (2), 1–10.
- Ronald, C. . (1960). Coase.Pdf. In *Law and Economics: Vol. III* (Issue The problem of social cost, p. 44). <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf>
- Suciadi, M., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2458>

EKSTERNALITAS PERUSAHAAN PENGOLAHAN HASIL TAMBANG TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KETAPANG

Sri Kurniawati¹, Anggi Franata²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perubahan kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap masyarakat di Kabupaten Ketapang. Perubahan yang terjadi yang disebabkan adanya kegiatan pengolahan hasil tambang akan berdampak positif atau sebaliknya akan menimbulkan hal negatif yang justru merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini berbentuk deskriptif dan kualitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.543 kepala keluarga dengan sampel sebanyak 100 kepala keluarga. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sesudah adanya kegiatan pengolahan hasil tambang. Sebaliknya, terdapat perubahan negatif pada kondisi lingkungan sesudah adanya kegiatan pengolahan hasil tambang. Pada kondisi sosial sesudah adanya kegiatan pengolahan hasil tambang berdampak positif pada struktur sosial, kondisi pendidikan, dan infrastruktur namun berdampak negatif pada kondisi kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Industri pengolahan; dampak sosial; dampak ekonomi

1. PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi perbedaan antar daerah, dan struktur ekonomi yang seimbang. Di Amerika Serikat, sektor industri merupakan mesin penggerak terhadap pembangunan ekonomi (Kialashaki & Reisel, 2014).

Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang seiring berjalannya waktu ditandai oleh perubahan struktural. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional, bahkan sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar dalam tenaga kerja. Pembangunan itu sangat identik dengan pertumbuhan pendapatan perkapita nasional, kemudian pendapatan penduduk yang diikuti dengan industrialisasi, perkembangan teknologi di sebuah negara dan terakhir modernisasi masyarakat (Indarti, 2017).

Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sektor industri pengolahan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana sektor industri pengolahan lebih besar dari pada sektor lainnya. Kontribusi terbesar pada tahun 2022 dalam pembentukan PDB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yaitu sektor industri pengolahan sebesar Rp.877,8 triliun atau 17,84 persen dari total PDB Nasional senilai Rp.4.919,9 triliun pada kuartal II-2022, dengan mempekerjakan sekitar 18,7 juta tenaga kerja Indonesia. Rata-rata kontribusi terbesar sektor

¹sri.kurniawati@ekonomi.untan.ac.id

industri pengolahan dalam pembentukan PDRB provinsi periode 2017-2021 ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Papua Barat. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif stabil dengan jumlah 18,5 juta jiwa pada 2017 dan 18,6 juta jiwa pada 2021 (BPS, 2022).

Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang didukung oleh sektor industri pengolahan terbesar kedua setelah pertanian dengan kontribusi PDRB sebesar Rp.10,3 miliar atau 16,30 persen dari total PDRB Kalimantan Barat senilai Rp.63 miliar pada kuartal II-2022 dengan mempekerjakan sekitar 166 ribu tenaga kerja. Jumlah perusahaan industri pengolahan di Kalimantan Barat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 196 perusahaan dengan nilai produksi mencapai Rp.80,84 miliar (BPS Kalimantan Barat, 2022). Tabel 1.1 menjelaskan kontribusi setiap sektor untuk PDRB Kabupaten Ketapang. Tahun 2017-2021 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan. Tiga peran utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 dihasilkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,74 persen, disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,33 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 13,43 persen.

Kontribusi sektor Industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar ketiga untuk perekonomian Kabupaten Ketapang setelah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ketapang relatif stabil selama lima tahun terakhir. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ketapang 2017-2021, kontribusi sektor industri pengolahan sebesar Rp.3,17 triliun pada tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp.4,15 triliun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa hasil industri pengolahan Kabupaten Ketapang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian dan menjadi potensi investasi bagi daerah. Sehingga, pembangunan suatu industri pengolahan tentu tidak luput dari potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah seperti halnya di Kecamatan Kendawangan. PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok.

Tabel 1. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ketapang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021

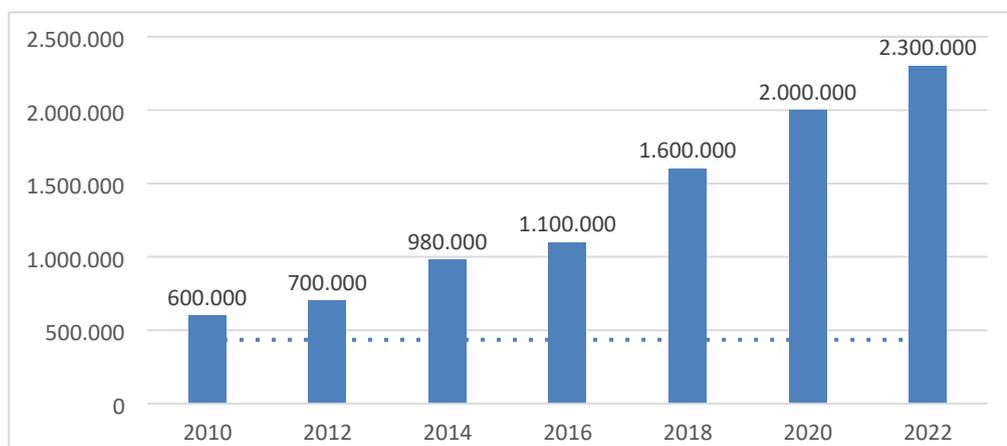
No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,23	24,28	23,29	23,48	23,33
2	Pertambangan dan Penggalian	18,34	19,03	20,11	22,88	24,74
3	Industri Pengolahan	14,09	14,51	14,62	13,31	13,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	10,20	9,66	9,79	9,63	9,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,95	10,60	10,71	10,25	9,55
8	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,15	2,05	1,68	1,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,00	1,96	1,96	1,43	1,42
10	Informasi dan Komunikasi	2,87	2,90	2,91	3,05	2,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41	3,45	3,12	3,07	2,96
12	Real Estate	2,61	2,54	2,50	2,48	2,24
13	Jasa Perusahaan	0,37	0,35	0,35	0,32	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	4,69	4,67	4,77	4,44
15	Jasa Pendidikan	2,26	2,13	2,12	1,86	1,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,01	1,03	1,19	1,47
17	Jasa lainnya	0,66	0,63	0,64	0,46	0,41
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik regional Bruto Kabupaten Ketapang 2017-2021

Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Ketapang dimiliki oleh perusahaan asing dari China yang terletak di Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan nama PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR) yang mengolah bauksit menjadi alumina merupakan perusahaan pengolahan tambang bauksit satu-satunya di Kabupaten Ketapang, didirikan pada tahun 2012 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. Pada tahun 2021, perusahaan ini telah memberdayakan tenaga kerja lebih dari 3.050 orang, sekitar 80% dari total karyawan yang merupakan penduduk asli Kalimantan Barat dan sekitar 70% karyawan merupakan masyarakat Kabupaten Ketapang. (<https://www.whwalumina.com>, 2021).

Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi Smelter Grade Alumina (SGA) dengan kapasitas 1 juta ton per tahun, dengan luas area lebih dari 1.000 hektar. Perusahaan memiliki sejumlah fasilitas penunjang pabrik berupa pembangkit listrik tenaga uap, terminal khusus kegiatan bongkar muat berstandar Internasional dan kompleks hunian karyawan berkapasitas ribuan orang. Seperti yang dijelaskan W. Arthur Lewis (Todaro, 2000) bahwa negara berkembang memfokuskan proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Keberadaan perusahaan, selain berkontribusi positif pada sektor ekonomi negara juga pada pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Barat dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentunya diharapkan dapat memberi dampak maupun sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil wawancara awal, responden mengungkapkan beberapa fakta dibidang sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah adanya kegiatan industri pengolahan hasil tambang di Desa Mekar Utama. Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang masyarakat bekerja sebagai Petani, Nelayan, Wiraswasta, Pedagang dan bahkan masih ada sebagian yang menganggur. Rata-rata pendapatan masyarakat hanya berkisar Rp.600.000 – Rp.900.000 per bulan. Pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan dikarenakan daerah Desa Mekar Utama berada diantara daratan dan pesisir pantai. Sebagian masyarakat membuka usaha kecil-kecilan dan bergantung pada hasil alam baik darat maupun laut sehingga tidak memprioritaskan pendidikan karena pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi.



Gambar 1 Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Desa Mekar Utama 2010-2022

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Rendahnya tingkat pendapatan membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, barang-barang elektronik, kendaraan dan sebagainya. Kondisi kesehatan masyarakat baik dan jarang terkena penyakit sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang, ketika terkena penyakit pun masyarakat lebih memilih pengobatan alternatif karena biaya yang terjangkau. Selain itu sarana dan prasarana yang tersedia seperti kesehatan dan perbelanjaan masih belum lengkap, transportasi yang sulit diakses karena kondisi jalan tergolong rendah dengan kondisi jalan rusak dan berlubang. Namun masyarakat mudah untuk mendapatkan air sungai yang bersih, hasil laut yang berkondisi, serta udara yang bersih karena lingkungan yang masih belum tercemar oleh kegiatan industri pengolahan hasil tambang.

Setelah adanya industri pengolahan hasil tambang pendapatan rata-rata masyarakat meningkat secara signifikan mulai dari Rp.1.000.000 – Rp.2.300.000 per bulan (Gambar 1). Hal itu dikarenakan adanya masyarakat yang mulai bekerja di industri pengolahan hasil tambang dan membuka usaha di sekitar perusahaan seperti rumah makan, warung sembako, kios bensin, depot air galon, laundry, bengkel dan sebagainya. Kesempatan kerja terbuka dengan lebar dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat yang bekerja di industri pengolahan hasil tambang sebagai operator, bagian pergudangan, satpam, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan sebagainya dengan alasan ingin mendapatkan penghasilan tetap sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Adanya kesempatan kerja dan penghasilan tetap membuat masyarakat mulai memprioritaskan pendidikan. Hal ini karena keinginan menjadi karyawan di industri pengolahan hasil tambang yang mempunyai syarat wajib yaitu berpendidikan minimal SMA.

Tidak semua masyarakat bisa bekerja di perusahaan tersebut dikarenakan tingkat pendidikan dan umur. Sebagian masyarakat tidak mau bekerja di perusahaan dengan alasan tidak mau terikat dan tetap pada pekerjaan sebelumnya. Selain itu setelah adanya industri pengolahan hasil tambang struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan dimana banyaknya masyarakat yang sudah mampu untuk membeli kendaraan pribadi, menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, merenovasi rumah, membeli peralatan elektronik dan sebagainya. Hal itu dikarenakan masyarakat sekitar industri pengolahan hasil tambang termotivasi untuk mampu menyesuaikan perubahan struktur sosial yang disebabkan banyaknya masyarakat pendatang yang menjadi karyawan di industri pengolahan hasil tambang maupun masyarakat pendatang yang membuka usaha di sekitar industri pengolahan hasil tambang. Adanya bantuan dari perusahaan untuk membantumasyarakat sekitar seperti sumbangan untuk pembuatan TPA dan masjid, banyaknya sarana perbelanjaan yang di bangun, seperti alfamart, minimarket, ruko-ruko dan ATM, pariwisata pantai yang di kelola dengan baik, serta kondisi jalan cukup meningkat meskipun masih terdapat jalan yang rusak.

Namun, setelah adanya industri pengolahan hasil tambang beberapa aliran sungai semakin keruh akibat limbah industri pengolahan hasil tambang serta rusaknya biota laut dikarenakan adanya terminal khusus kegiatan bongkar muat, kegiatan tersebut juga mempercepat terjadinya abrasi pantai. Pencemaran udara secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat yaitu asap dari cerobong industri pengolahan hasil tambang yang menyebabkan polusi udara dan debu jalan akibat kendaraan pengangkut bauksit sehingga menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat mulai menurun yang menyebabkan masyarakat mengalami infeksi saluran pernafasan akut dan influenza karena udara sudah tidak sehat. Tercemarnya air sungai dan laut mengakibatkan masyarakat mengalami diare dan gatal-gatal serta tidak sehatnya hasil tangkapan laut yang dikonsumsi serta tangkapan laut menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi.

Kehadiran industri pengolahan hasil tambang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang disebabkan terbukanya

lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat lokal, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan dan kondisi hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat dampak positif dan negatif pada perubahan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagai dampak dari industri pengolahan hasil tambang. Keberadaan industri pengolahan hasil tambang tentu akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada sosial ekonomi masyarakat. Namun, walaupun demikian keberadaan industri pengolahan hasil tambang juga memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema dampak industri pengolahan hasil tambang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Ketapang. Studi kasus yaitu masyarakat Desa Mekar Utama di sekitar wilayah industri pengolahan hasil tambang.

2. KAJIAN LITERATUR

Todaro dan Smith (2000) menyatakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial secara material, duniawi dan spiritual ada tiga hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tingkat kebutuhan dasar. Pengembangan kesanggupan dan pemerataan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.
2. Tingkat kehidupan. Meningkatkan standar hidup, penghasilan, pendidikan yang bermutu, dan sarana prasarana pendidikan.
3. Memperluas skala perekonomian pada skala individu dan nasional. Ada pilihan untuk bekerja di masyarakat yang lebih baik agar meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari penjelasan tiga hal mendasar di atas, berdasarkan poin ketiga diharapkan keberadaan industri pengolahan hasil tambang dapat memperluas skala ekonomi baik masyarakat sekitar wilayah industri pengolahan hasil tambang maupun negara, dengan begitu tingkat kesejahteraan masyarakat juga membaik. Kesejahteraan sosial merupakan suatu proses tindakan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjadikan kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Jika usahanya membaik, maka keadaan ekonomi mereka akan membaik dan dapat dipastikan akan terjadi meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Faturochman, 2012). Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik menyatakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menjelaskan kesejahteraan yaitu pendapatan, perumahan dan pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Ronald Coase dalam Prasetya (2012) mengungkapkan bahwa pemberian hak milik yang tepat terhadap suatu barang, walaupun tetap akan ada eksternalitas tetapi bisa menimbulkan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terkait sehingga pihak-pihak yang terkait bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik ini dikenal dengan teorema Coase. Teorema Coase adalah suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Teorema Coase yang menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitas sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah. Artinya jika pihak-pihak yang terkait dalam melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendiri.

Hasil penelitian oleh Adawiyah (2019) di Kabupaten Lombok Timur dan Aningsih (2021) di Kabupaten Bojonegoro, mengatakan bahwa industri pengolahan, sawit dan pertambangan yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar mengakibatkan masyarakat memiliki peluang untuk bekerja di industri tersebut. Terbukanya lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat setempat

dengan tersedianya berbagai bentuk pekerjaan baik yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung sehingga mampu menyerap pengangguran (Farlan dkk, 2016).

Umumnya penduduk desa dulunya bekerja sebagai petani dan nelayan namun setelah adanya industri mereka mulai bekerja di industri tersebut dikarenakan hasil dari perkebunan dan laut yang tidak menentu dan membutuhkan waktu lama untuk mendapat hasilnya (Ekhrad, 2018). Pendapatan masyarakat juga meningkat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu membiayai pendidikan anak mereka untuk menempuh pendidikan (Suciadi, dkk., 2018).

Dampak positif lainnya juga terdapat pada pendidikan, struktur sosial dan infrastruktur. Pendidikan (sarana pendidikan) yang meningkat sangat berdampak terhadap kondisi berfikir, sikap dan bertingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari agar semakin berkembang (Mukarramah, 2017). Penelitian Qolbina (2017) di Kabupaten Kampar dan Listyani (2018) di Kabupaten Tuban mengungkapkan bahwa pendidikan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki tingkat pendidikan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin terbuka luas lapangan pekerjaan serta alternatif pekerjaan semakin banyak (Sulistiyana, 2020).

Penelitian Fitriyanti (2016) mengatakan bahwa struktur sosial di masyarakat juga mengalami perubahan karena masyarakat sekitar pertambangan termotivasi untuk mampu menyesuaikan perubahan struktur sosial karena banyaknya masyarakat pendatang. Alat modern telah menjamur dan menjadi kebutuhan yang penting bagi penunjang kehidupan masyarakat seperti transportasi dan penggunaan perabotan elektronik. Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di perkebunan terbantu dengan tersedianya fasilitas tempat tinggal yang disediakan (Laing, 2016). Selain itu, adanya bantuan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari oleh perusahaan (Hidayah dkk, 2020). Penelitian Hendriono (2016) menyatakan bahwa perusahaan juga memberikan pelayanan kesehatan gratis yang ditujukan kepada karyawan yang sakit akibat industri pengolahan hasil tambang.

Namun, adanya sebuah industri tentunya memiliki dampak negatif terutama pada kesehatan dan lingkungan. Penelitian oleh Juniah dkk (2013) dan penelitian Jimmy & Merang (2020) mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan yaitu polusi udara, dimana debu yang ditimbulkan merupakan hasil dari industri pengolahan hasil tambang sehingga udara menjadi kotor dan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Pencemaran air yang diakibatkan dari limbah pencucian batubara dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara (Albertus dan Zalukhu, 2019). Aktivitas industri juga menimbulkan polusi suara sehingga membuat kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar (Alwi, 2017). Oleh karena itu, Penelitian Nugraha, dkk (2018) mengungkapkan bahwa adanya dampak negatif lingkungan dari industri bagi masyarakat di sekitar dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitar industri pengolahan hasil tambang sehingga dapat menimbulkan biaya kesehatan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak industri pengolahan hasil tambang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Ketapang. Objek penelitian pada penelitian ini masyarakat di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Waktu

penelitian ini dilakukan bulan juli 2022.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan kuesioner kepada tenaga kerja dan masyarakat di sekitar industri pengolahan hasil tambang. Data sekunder yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Ketapang 2017-2021, 10 macam penyakit terbesar Puskesmas Desa Mekar Utama tahun 2022 dan rata-rata pendapatan masyarakat Desa Mekar Utama tahun 2008-2020. Sedangkan, sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, dan Kantor Desa Mekar Utama. Metode pengumpulan data menggunakan:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang digunakan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara secara mendalam

Metode wawancara secara mendalam merupakan proses tanya jawab dari pihak peneliti kepada masyarakat di Desa Mekar Utama. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Proses tanya jawab ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai dampak industri pengolahan hasil tambang di Desa Mekar Utama.

3. Wawancara dengan kuesioner

Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan tentang variabel yang diukur, disusun dan dikemas dengan perencanaan yang matang sehingga jawaban dari semua pertanyaan tersebut dapat benar-benar menjelaskan keadaan variabel yang sebenarnya (Mustafa, 2013). Pada penelitian ini kuesioner diberikan kepada masyarakat di Desa Mekar Utama guna memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Populasi dalam penelitian ini adalah 2.543 kepala keluarga di Desa Mekar Utama. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Peneliti bermaksud untuk menentukan responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Mekar Utama yang berada di dekat perusahaan industri pengolahan hasil tambang dengan jarak 5-10 km
2. Masyarakat Desa Mekar Utama yang berusia ≥ 25 tahun.
3. Masyarakat Desa Mekar Utama yang sudah tinggal selama 10 tahun. Untuk mengetahui hasil sampel menggunakan rumus Slovin, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Standard Error (kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi, 10%)

Dengan rumus diatas diperoleh perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 kepala keluarga.

Variabel penelitian dan definisi operasional yang dipaparkan dalam penelitian ini digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana variabel itu terbentuk. Variabel dalam penelitian ini yaitu status sosial, kondisi kesehatan, kesempatan kerja dan pendapatan. Definisi dari variabel penelitian ini bersumber akan dijelaskan pada sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan perubahan persepsi masyarakat terhadap pendidikan, kemampuan untuk menyekolahkan anak dan fasilitas pendidikan. Kondisi pendidikan dikategorikan baik apabila sarana dan prasarana memadai seperti gedung sekolah, kursi, meja, papan tulis serta tenaga pengajar dan dikategorikan buruk apabila sarana dan prasarana tidak memadai seperti tidak adanya penambahan gedung sekolah, meja, kursi, papan tulis dan tenaga pengajar.

2. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan perubahan persepsi masyarakat terhadap kesehatan, kerentanan masyarakat terhadap penyakit dan sarana prasarana kesehatan seperti klinik, apotek, dan tenaga kesehatan. Kondisi kesehatan dikategorikan baik apabila masyarakat jarang terkena sakit dan lengkapnya sarana prasarana kesehatan seperti klinik, apotek serta tenaga kesehatan dan dikatakan buruk apabila masyarakat rentan terhadap penyakit serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik, apotek serta tenaga kesehatan.

3. Struktur sosial

Struktur sosial merupakan perubahan tingkat sosial pada masyarakat ketika mampu memenuhi kebutuhan sekunder seperti membangun rumah, membeli peralatan rumah tangga dan memiliki kendaraan.

4. Kondisi Kesehatan

Lingkungan merupakan perubahan terhadap lingkungan air, tanah, udara dan suara. Kondisi lingkungan dikategorikan baik apabila lingkungan bersih dan tenang serta dikategorikan buruk apabila lingkungan kotor dan mengganggu aktifitas masyarakat.

5. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan perubahan peluang kerja masyarakat yang ditunjukkan pada terjadinya perubahan mata pencaharian.

6. Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan dan Pengeluaran Pendapatan dan pengeluaran merupakan perubahan pendapatan dan pengeluaran masyarakat per bulan.

7. Peluang Usaha

Peluang usaha merupakan perubahan peluang usaha di masyarakat yang ditunjukkan dengan keberagaman jenis usaha yang dibuka oleh masyarakat.

8. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan perubahan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Desa Mekar Utama. Infrastruktur dikategorikan baik apabila adanya pembangunan dan perbaikan terhadap infrastruktur dan dikategorikan buruk apabila tidak adanya pembangunan dan perbaikan terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bendungan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengambil data mentah yang dihasilkan dari wawancara, kuesioner maupun observasi lapangan di Desa Mekar Utama. Kemudian mengetik ulang data lapangan, memilah dan menyusun data tersebut untuk dianalisis
2. Data yang telah diketik ulang, diolah dan dihitung persentasenya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel
3. Mendeskripsikan makna secara keseluruhan dari data observasi lapangan yang telah diolah sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Industri Pengolahan Hasil Tambang Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Keberadaan industri pengolahan hasil tambang di sekitar wilayah masyarakat tentunya memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya baik dampak positif maupun negatif. Seperti adanya dampak dalam bidang sosial dan ekonomi, dimana sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan pasti terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keberadaan industri pengolahan hasil tambang dan kondisi sosial ekonomi dianalisis dengan mendeskripsikan persentase terhadap hasil penelitian tanggapan responden. Variabel yang termasuk dalam bidang sosial, yaitu pendidikan, kesehatan, struktur sosial dan lingkungan. Variabel yang termasuk dalam bidang ekonomi, yaitu pendapatan, kesempatan kerja, peluang usaha dan infrastruktur.

a. Pendidikan

Pendidikan cukup baik setelah adanya industri pengolahan hasil tambang karena pendapatan masyarakat yang mulai meningkat. Orang tua semakin berpikir tentang pentingnya pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi, bahkan banyak yang melanjutkan sekolah di luar daerah. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Mekar Utama. Pendidikan memungkinkan masyarakat Desa Mekar Utama dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukarramah (2017); Adawiyah (2019); Sulistyaningrum (2020); Qolbina (2017); dan Listyani (2018).

b. Kesehatan

Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang, kondisi kesehatan masyarakat cukup baik. Penyakit yang diderita hanya demam, sakit kepala dan sakit perut. Sedangkan sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang, Masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat udara yang tercemar seperti: alergi, diare, influenza, demam, sakit kepala, dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh debu batu bara dari industri pengolahan hasil tambang yang menyebar ke tempat tinggal masyarakat.

Sarana dan prasarana kesehatan sebelum dan sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang mengalami perubahan. Sebelum adanya perusahaan, sarana dan prasarana Kesehatan hanya sedikit dan berada jauh dari pemukiman masyarakat. Sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang, mulai tersedia pengobatan moderen seperti klinik, bidan, puskesmas dan apotek. Bertambahnya klinik baru menyebabkan terjadinya perubahan pola masyarakat pada kebiasaan berobat, sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang masyarakat yang awalnya berobat hanya menggunakan pengobatan alternatif kini sudah berobat ke klinik dan puskesmas. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugraha, dkk (2018); (Mukaramah,2017); Juniah dkk (2013); dan Hendriono (2016).

c. Struktur Sosial

Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang, mayoritas status kepemilikan rumah adalah milik pribadi (63%) dengan kondisi bangunan semi permanen. Mayoritas rumah pribadi karena masyarakat merupakan masyarakat asli desa tersebut dan beberapa masyarakat memiliki rumah dari warisan orang tua dengan status kepemilikan pribadi. Sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang menunjukkan peningkatan status kepemilikan rumah secara pribadi (84%) dengan kondisi bangunan. Semakin meningkatnya status kepemilikan rumah sebagai rumah pribadi karena semakin banyaknya masyarakat yang sudah berpenghasilan tetap dan mampu untuk membangun maupun merenovasi rumah sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Laing (2016); dan (Fitriyanti, 2016).

d. Lingkungan

Setelah adanya industri pengolahan hasil tambang membuat kondisi lingkungan masyarakat Desa Mekar Utama menjadi terganggu dengan terjadinya pencemaran udara, pencemaran air, abrasi pantai dan kebisingan suara mesin produksi perusahaan industri pengolahan hasil tambang. Berbagai pencemaran yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang bauksit seperti pencemaran udara merupakan dampak negatif suatu industri pengolahan hasil tambang. Udara yang tercemar menyebabkan udara menjadi kotor atau tidak bersih, udara yang kotor ini dapat menimbulkan dampak yaitu adanya gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat yaitu debu karena pembakaran batubara industri pengolahan hasil tambang yang sampai ke tempat tinggal masyarakat. Pencemaran udara tentu berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat dalam kesehatan ataupun ekonomi. Selain itu debu-debu hasil pembakaran batubara dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan. Dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker dan kemungkinan bayi lahir cacat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Juniah dkk (2013); Jimmy dan Mereng (2020); Albertus dan Zalukhu (2019); dan Alwi (2017).

e. Pendapatan dan pengeluaran

Industri pengolahan hasil tambang berdampak terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat Desa Mekar Utama. Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang, mayoritas masyarakat di Desa Mekar Utama memiliki pendapatan sebesar 2 juta hingga 2,9 juta rupiah per bulan (50%) dan tidak ada masyarakat yang memiliki pendapatan sebesar 4 juta hingga 4,9 juta rupiah per bulan. Sedangkan sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Mekar Utama memiliki pendapatan sebesar 3 juta hingga 3,9 juta rupiah per bulan (56%) dan tidak ada lagi masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta rupiah per bulan.

Hal ini terjadi karena sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang, masyarakat yang awalnya bekerja sebagai nelayan, petani dan bahkan tidak bekerja mulai bekerja di perusahaan dengan pendapatan yang tetap, ada juga yang membuka usaha di sekitar wilayah perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempekerjakan penduduk sekitar dan penduduk dari luar desa, sehingga wilayah perusahaan menjadi ramai. Hal ini memberikan peluang usaha bagi penduduk setempat untuk membuka usaha, seperti warung sembako, warung makan, bengkel, konter, kafe, kost dan kontrakan.

Pendapatan yang besar akan meningkatkan konsumsi masyarakat untuk alat-alat modern maupun jasa-jasa pendukung kegiatan sehari-hari. Mayoritas pengeluaran masyarakat sebesar 2 juta hingga 2,9 juta rupiah (48%) dan pengeluaran paling tinggi adalah 3 juta hingga 4 juta rupiah (16%). Masyarakat menjadi lebih konsumtif yang ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder seperti TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, sound sistem, *hand phone*, motor dan mobil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari, dkk (2014); Jimmy dan Mereng (2020); dan Adawiyah (2019).

f. Kesempatan Kerja

Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang mayoritas responden (kepala keluarga) di desa mekar utama bekerja sebagai petani (30%) dan nelayan (35%) karena daerah Desa Mekar Utama berada di antara daratan dan pesisir pantai. Namun setelah ada industri pengolahan hasil tambang mata pencaharian masyarakat tidak lagi sebatas pada sektor utama yaitu nelayan

dan petani, tetapi menjadi lebih luas lagi mulai dari menjadi karyawan perusahaan dan membuka usaha. Kesempatan kerja terbuka dengan lebar dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan perusahaan pertambangan (54%) dengan alasan ingin mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran (0%).

Masyarakat yang bekerja di perusahaan dapat bekerja sebagai operator, bagian Pergudangan, Satpam dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Didukung oleh penelitian Aningsih (2021) terhadap penambangan pasir di Desa Sumberarum dan penelitian Farlan dkk (2016) terhadap penambangan emas di Aceh Selatan yang mengungkapkan bahwa dampak positif yang dirasakan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat setempat dengan tersedianya berbagai bentuk pekerjaan baik yang terlibat langsung di kegiatan penambangan maupun secara tidak langsung sehingga mampu menyerap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aningsih (2021); Farlan dkk (2016); dan Ekhrad (2018).

g. Peluang Usaha

Sebelum adanya industri pengolahan hasil tambang di Desa Mekar Utama hanya sedikit masyarakat yang membuka usaha karena sepinya wilayah desa tersebut hanya ada beberapa usaha yang ada seperti warung sembako dan bengkel. Sedangkan sesudah adanya industri pengolahan hasil tambang desa mekar utama menjadi ramai yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang mulai membuka usaha. Usaha yang meningkat yaitu usaha rumah makan, laundry, catering, toko sembako, toko pakaian, toko bangunan, kafe, agen gas, usaha air galon, dan usaha catering. Usaha air galon dan catering merupakan kerjasama masyarakat dan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suciadi (2020).

H. Infrastruktur

Perusahaan pengolahan hasil tambang ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya jika ada jalan yang rusak maka perusahaan membantu perbaikan jalan seperti menimbun jalan rusak dengan tanah merah. Perusahaan pengolahan hasil tambang belum sepenuhnya melakukan pembangunan infrastruktur untuk Desa Mekar Utama. Jika terdapat kerusakan ataupun perlu adanya pembangunan fasilitas lainnya maka aparat desa meminta bantuan kepada perusahaan melalui prosedur tertentu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayah dkk, 2020.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 kepala keluarga di Desa Mekar Utama mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 35 – 44 tahun yang berasal dari Kabupaten Ketapang. Pendidikan tertinggi masyarakat di Desa Mekar Utama adalah SMA/SMK. Kepala Keluarga di Desa Mekar Utama bermata pencaharian sebagai Karyawan Perusahaan dan rata-rata memiliki tanggungan sebanyak lebih dari 3 orang.

Kegiatan pengolahan hasil tambang berdampak positif terhadap sosial masyarakat Desa Mekar Utama yaitu pada pendidikan dan struktur sosial seperti adanya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, bertambahnya sarana penunjang pendidikan seperti kursi, meja dan papan tulis sertamampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekunder. Namun adanya kegiatan pengolahan hasil tambang juga memberikan dampak negatif terhadap sosial masyarakat Desa Mekar Utama yaitu pada lingkungan dan kesehatan seperti adanya pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya penurunan kesehatan pada masyarakat, seperti pencemaran udara yang mengakibatkan masyarakat sakit pada pernapasan.

Selain itu, kegiatan pengolahan hasil tambang juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat Desa Mekar Utama yaitu pada pendapatan, kesempatan kerja, peluang usaha dan infrastruktur seperti adanya peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di perusahaan maupun yang tidak bekerja di perusahaan, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bertambahnya sarana prasarana perbelanjaan dan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2019). Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2019: studi di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. *Doctoral dissertation*. UIN Mataram.
- Albertus, F., & Zalukhu, Y. (2019). Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1), 42-56.
- Aningsih, S. (2021). Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat dari Penambangan Pasir dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Doctoral dissertation*. IAIN Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ketapang Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022*.
- Ekrad. (2018). Dampak Pertambangan Emas Tradisional terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal).
- Farlan, E., Indra, I., & Hamid, A. H. (2016). Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 1(1), 329-336.
- Faturocman. (2012). *Kesejahteraan Masyarakat* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fitriyanti, R. (2018). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).
- Hendriyono, W. (2016). Studi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. *Kendari: Universitas Halu Oleo*.
- Hidayah, U. N., Widuri, N., & Maryam, S. (2020). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian*, 3(2), 63-70.
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal Of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 35-50.
- Jimmy, N., & Merang, K. R. I. (2020). Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 111-121.
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2012). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 12(1), 252-258.
- Kantor Desa Mekar Utama. (2022). *Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Desa Mekar Utama, 2010-2022*.
- Kialashaki, A., & Reisel, J. R. (2014). Development and validation of artificial neural network models of the energy demand in the industrial sector of the United States. *Energy*, 76, 749-760.
- Laing. (2016). Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai

- Kartanegara.
- Mukarammah. (2017). Dampak Industri Pt. Semen Tonasa Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik*. Jakarta: Permata Puri Media. 179- 180
- Nugraha, G. I. K. (2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Antam, Tbk.(Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). *Vocatio*, 2(1).
- Prasetya, Ferry. (2012). *Teori Eksternalitas*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya.
- PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery. (2021). Diakses Dari <https://www.whwalumina.com/profilperusahaan.php> Pada 10 November 2022.
- Puskesmas Kecamatan Kendawangan. (2022). *Penyakit Teratas UPTD Puskesmas Kecamatan Kendawangan Bulan Januari-Juli 2022*.
- Qolbina, F., Ekwarso, H., & Isbah, U. (2017). Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Didesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Doctoral dissertation*. Riau University.
- Sofiana, Y. (2014). Pengaruh Revolusi Industri terhadap perkembangan desain modern. *Humaniora*, 5(2), 833-841.
- Suciadi, M., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267- 285.
- Sulistiya, N. (2020). Analisis Dampak Pertambangan Batu Gunung terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. *Doctoral dissertation*. IAIN PURWOKERTO.
- Suma, L., & Hariyanto, B. (2018). Dampak Industri Pertambangan Minyak Bumi Terhadap Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Swara Bhumi*, 5(5), 78-84.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P. M., and S. C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Jakarta: Erlangga.

**KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL ASING
MENJELASKAN KEMISKINAN DENGAN INTERVENSI PENGANGGURAN SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI DI INDONESIA**

Jumhur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRACT

Poverty is one of the factors that threatens the economic growth and development of a country. This research aims to test and analyze the influence of economic growth, foreign investment and unemployment on poverty and test the ability of the unemployment variable to mediate the indirect influence of economic growth and foreign investment on poverty in Indonesia. Using a regression approach to analyze panel data consisting of time series data for 2018-2022 with cross section data from as many as 34 provinces in Indonesia. From the research results, it was found that economic growth had a significant effect on reducing unemployment, foreign investment had an insignificant effect on unemployment, foreign investment had an insignificant effect on reducing poverty, economic growth had a significant effect on reducing poverty, and unemployment had a significant effect on reducing poverty in Indonesia. The unemployment variable is unable to mediate the indirect effect of investment and economic growth on poverty in Indonesia.

JEL: B22, E22

Key words: *poverty, unemployment, investment, economic growth*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mengancam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, dan pengangguran terhadap kemiskinan serta menguji kemampuan variabel pengangguran memediasi pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia. Menggunakan pendekatan regresi untuk menganalisis data panel yang terdiri dari data *time series* tahun 2018-2022 dengan data *cross section* sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan pengangguran, penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Variabel pengangguran tidak mampu memediasi pengaruh tidak langsung investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: *kemisikinan, pengangguran, investasi, pertumbuhan ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang bisa mengancam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dan (Fuente, 2016). Sehingga sampai saat ini kemiskinan masih tetap menjadi tantangan dan penghalang terbesar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terutama di negara-negara sedang berkembang (World Bank, 2020). Oleh karena itu dari fakta yang ada, PBB telah mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Begitu pentingnya masalah pengangguran ini, maka mendefinisikan dan mengukur kemiskinan merupakan langkah awal dalam merancang program, strategi, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (M. Khan et al., 2020).

Tidak banyak kesepakatan antara peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan tentang makna, dan pengukuran kemiskinan (Gweshengwe & Hassan, 2020). Sampai saat ini, kemiskinan didefinisikan dan diukur dengan satu indikator seperti pendapatan atau konsumsi rumah tangga dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Menurut pendekatan kesejahteraan, kemiskinan adalah defisit relatif barang dan jasa karena kendala pendapatan yang ekstrim, atau kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dianggap wajar oleh standar masyarakat (Wang et al., 2021). Namun karena kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu dimensi saja tetapi dimensi lain seperti pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup juga sama pentingnya. Oleh karena itu, analisis kemiskinan harus mencakup dimensi kesejahteraan lainnya (Abeje et al., 2020).

Banyak faktor yang dianggap bisa mempengaruhi kemiskinan seperti pengangguran. Di Indonesia, istilah pengangguran yang lazim digunakan dalam perekonomian adalah pengangguran terbuka. Pada dasarnya, seorang angkatan kerja dikategorikan sebagai pengangguran terbuka jika merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, masih mencari pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja, dan tengah menyiapkan suatu usaha (BPS Indonesia, 2020). Parameter yang sering dipakai dalam menjelaskan adanya peningkatan lapangan kerja pada tingkat wilayah adalah PDRB. Menurut (Oktaviana & Amalia, 2018), PDRB merupakan indikator yang penting dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah, terutama saat menganalisis permintaan tenaga kerja di tingkat regional. PDRB juga dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian daerah jika dilihat secara sektoral. Jika dalam suatu perekonomian nilai kontribusi suatu sektor tertentu ke dalam PDRB di daerah tersebut semakin besar, maka sektor tersebut akan tumbuh dan berperan dalam menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya PDRB dapat berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja serta dapat menyerap tenaga kerja di daerah.

Selanjutnya besarnya nilai output yang ditunjukkan oleh nilai PDRB merupakan parameter yang dapat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan besarnya PDRB akan berbanding lurus dengan produktivitas suatu daerah. Ketika terjadi peningkatan output, maka diharapkan penggunaan tenaga kerja sebagai input dalam produksi juga dapat meningkat. Peningkatan dalam permintaan tenaga kerja tersebut yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menurunkan angka pengangguran.

Globalisasi dan liberalisasi telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Meningkatnya keterbukaan ekonomi berarti bahwa ekonomi terlibat dalam lebih banyak transaksi perdagangan dan pasar modal. Dengan demikian, variabel seperti investasi asing langsung (investasi) memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan pengangguran.

Berdasarkan penjelasan dan data data diatas dimana perkembangan kemiskinan, pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing di masing-masing provinsi cukup bervariasi. Oleh Karena itu, penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana pengaruh

langsung maupun tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan dengan intervensi tingkat pengangguran sebagai variabel antara di Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Teoretis

Mengenai pengukuran kemiskinan, ada dua pandangan dalam literatur yaitu: pandangan moneter dan pandangan non-moneter (Ruggeri Laderchi et al., 2003). Pendekatan moneter atau kesejahteraan mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan salah satu indikator seperti pendapatan atau konsumsi. Menurut pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mendapatkan tingkat pendapatan atau sumber daya minimum untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar hidup (Ruggeri Laderchi et al., 2003). Di sisi lain, pendekatan non-kesejahteraan mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan berbagai dimensi dan indikator. Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai kegagalan seseorang untuk mencapai kemampuan dasar untuk memenuhi fungsi penting tertentu secara memadai pada tingkat minimal (Sen, 2000).

2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pada tahun 1962, Arthur Okun mengajukan Hukum Okun. Ini menyatakan bahwa pengangguran siklis dan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) memiliki hubungan terbalik. Untuk membuktikan hal tersebut penelitian terus dilakukan seperti penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan menemukan koefisien Okun menjadi 3 persen (Mehra, 2018). Ketika diuji secara empiris, Hukum Okun menunjukkan hasil yang beragam. Studi yang dilakukan di Nigeria selama periode 1981 hingga 2016 menggunakan uji kausalitas VAR. Tes menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen (Kenny, 2019). Korelasi yang kuat ditemukan antara PDB dan pengangguran di India, di mana sekitar 48% dari perubahan pengangguran disebabkan oleh PDB. Penelitian ini sejalan dengan hukum Okun (Chand et al., 2018). Studi lebih lanjut yang dilakukan di India dengan menggunakan uji kausalitas Granger untuk periode 1991 hingga 2017 mengungkapkan terjadi aliran searah dari PDB riil ke pengangguran (Sahoo, 2019). Di Bahrain ditemukan hubungan negatif yang tidak signifikan antar variabel (Alrayes & Abu Wadi, 2018). Dengan menganalisis data triwulanan Rumania dari tahun 2000 hingga 2018 menegaskan adanya hubungan terbalik antara pertumbuhan PDB dan pengangguran dengan koefisien $-0,217$ dan kuadrat R rendah dari 0.03 (Slusariuc, 2018) Semua uraian di atas menunjukkan bahwa kesesuaian hukum Okun di berbagai negeri belum ada kesimpulan yang sama, sehingga masih terbuka peluang untuk meneliti hal tersebut.

2.3. Investasi dan Pengangguran

Johnny (2018), mempelajari dampak Investasi terhadap tingkat pengangguran di Nigeria dari tahun 1980 hingga 2015. Studi tersebut mengungkapkan bahwa: Ada hubungan negatif dan signifikan antara Investasi dan tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil studi tersebut merekomendasikan agar pemerintah menerapkan kebijakan yang memperbaiki iklim investasi di Nigeria dan juga memastikan bahwa semua sumber daya untuk kegiatan produktif digunakan sepenuhnya sebelum masuk ke dalam bentuk tabungan apapun. Muhd Irpan et al., (2016) dampak Investasi terhadap tingkat lapangan kerja di Malaysia, menemukan bahwa Investasi secara signifikan mempengaruhi dan mengurangi tingkat pengangguran di Malaysia. Namun, ekonom lain memiliki pandangan pasif tentang efek investasi tingkat pengangguran dalam hal kurangnya efek nyata pada pengangguran atau menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, seperti (Grahovac & Softić, 2017) tingkat pengangguran global di negara-negara Balkan Barat dan menyajikan analisis komparatif dengan negara-negara terpilih selama periode 2000 hingga 2014. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sejak 2009, terjadi penurunan investasi bersih yang signifikan, yang lebih jelas dalam kasus Investasi karena permintaan domestik dan eksternal yang

lebih rendah sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran. Hasil juga menunjukkan tidak adanya dampak positif investasi terhadap lapangan kerja, yang hadir di sebagian besar negara CEE selama masa transisi, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai studi empiris. Kausalitas dua arah diamati antara Investasi dan pengangguran dalam analisis yang dilakukan pada data triwulanan dari Federasi Rusia selama periode 1992 hingga 2015 (Alrayes & Abu Wadi, 2018) Oleh karena itu, di negara berkembang, model masuk Investasi harus menciptakan pekerjaan padat karya (Meldebra Hilom-Polinon & Hakim, 2019)

2.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

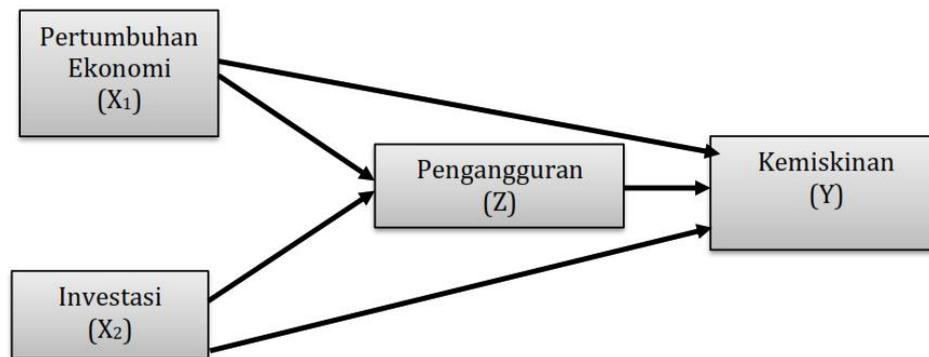
Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan (Balasubramanian et al., 2023). (Seth & Alkire, 2021) ketika mempelajari negara bagian India, menemukan korelasi negatif yang lemah antara perubahan absolut PDB dan kemiskinan global. Berfokus pada studi lintas negara, (Seth & Alkire, 2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan kemiskinan di 27 negara Afrika Sub-Sahara, sedangkan (Balasubramanian et al., 2023) menemukan korelasi negatif yang lemah pada sampel 51 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan, tetapi dengan elastisitas yang jauh lebih rendah dari 1 dan bahkan lebih rendah daripada yang terdeteksi dalam satu-satunya studi yang sebanding (Santos et al., 2016).

2.5. Investasi dan Kemiskinan

Investasi berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Joshua et al., 2021). Dengan menggunakan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), temuan empiris studi menunjukkan bahwa Investasi sangat penting dalam mencapai ekspansi ekonomi di Kawasan Afrika. Namun, selain studi yang mendukung hipotesis Investasi pengurangan kemiskinan, beberapa studi telah menemukan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Diawali dengan penelitian (Suzanna-Zora Rye, 2016) yang meneliti pengaruh investasi asing langsung terhadap kemiskinan dengan menggunakan sampel 134 negara di dunia. Studi ini mengeksplorasi regresi instrumental, dan ditemukan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Demikian pula, (Yaser, 2017) meneliti dampak Investasi terhadap pengurangan kemiskinan di negara berkembang dengan menggunakan model koreksi kesalahan panel menyimpulkan Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya (Quiñonez et al., 2018) meneliti dampak Investasi terhadap insiden kemiskinan di Amerika Latin untuk panel 13 negara menemukan bahwa Investasi tidak secara signifikan mengurangi kemiskinan di Amerika Latin. Bertikutnya (Anetor et al., 2020) menggunakan teknik *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) untuk mengkaji dampak Investasi asing terhadap kemiskinan di SSA menemukan Investasi dan bantuan luar negeri meningkatkan kemiskinan dan bahwa tingkat Investasi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan belum tercapai.

2.6. Pengangguran dan Kemiskinan

Kemiskinan erat kaitannya dengan kekurangan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan rasa aman yang akan menentukan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. (Ravallion, 2020) mengatakan bahwa kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi minimum yang dianggap wajar dalam skala absolut dan dalam persepsi masyarakat tertentu. Selanjutnya (Abdurachman et al., 2021) menyatakan bahwa pengangguran merupakan indikator kemajuan suatu negara; semakin rendah tingkat pengangguran, pemerintah dianggap berhasil mengatur kehidupan rakyatnya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual penelitian

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan gambar tersebut di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.
- H2 : Penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.
- H3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- H4 : Penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- H5 : Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia
- H6 : Pengangguran mampu memediasi pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia.

3. METODA PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yang merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri data *time series* tahun 2018-2022 dan data *crosssection* sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Semua data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari terbitan selama beberapa tahun sesuai keperluan data penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Statistik Indonesia (*Statistical Yearbook of Indonesia*) Tahun 2018-2023. Definisi Variabel Dan Pengukuran Data (1) Pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya disingkat (PE) adalah Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai output bruto yang dihasilkan setiap provinsi di Indonesia pertahun berdasarkan harga konstan di provinsi yang bersangkutan. Satuan dari variabel (X_1) ini adalah rupiah, (2) Investasi yang selanjutnya disingkat (Inves) adalah investasi penanaman modal asing dan investasi penanaman modal dalam negeri yang dilakukan disetiap provinsi di seluruh wilayah republik Indonesia. Satuan dari variabel terikat (X_2) ini adalah rupiah, (3) Tingkat Pengangguran terbuka yang selanjutnya disingkat (TPT) adalah jumlah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Satuan dari variabel terikat (Z) ini adalah jiwa, (4) Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang ada disetiap provinsi. Satuan dari variabel terikat (Y_2) ini adalah jiwa.

Metode analisis regresi data dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel-variabel bebas (*independen*) yang digunakan dalam meneliti terhadap variabel terikat (*dependen*). Data panel (*pooled data*) diperoleh dengan cara menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Analisis regresi dengan data panel (*pooled data*) memungkinkan peneliti mengetahui karakteristik antar waktu dan antar individu dalam variabel yang bisa saja berbeda-beda. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis. Adapun kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel adalah sebagai berikut (Gujarati, 2007): Data panel mampu menyediakan lebih banyak data, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga diperoleh *degree of freedom* (df) yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan lebih baik; Data panel mampu mengurangi *kolineritas* variabel; Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks; Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul karena adanya masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*); Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni maupun *cross section* murni; Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Teknis analisis data dalam penelitian ini diawali dengan merancang suatu model matematis yang menggambarkan hubungan antar satu variabel atau lebih. Model matematis yang dirancang ini harus mampu mempresentasikan hubungan kausal antara variabel yang dimunculkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian dilapangan adalah teknik kuantitatif. Untuk membuktikan Hipotesisi 1 sampai 5 digunakan analisis jalur (*Part Analysis*).

Analisis jalur (*path analysis*) untuk pengujian mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jika X signifikan terhadap Y_1 dan hipotesis diterima, dan Y_1 signifikan terhadap Y_2 dan hipotesis diterima, serta X signifikan terhadap Y_2 dan hipotesis diterima, maka variabel Y_1 merupakan variabel setengah mediasi, (2) Jika X signifikan terhadap Y_1 dan hipotesis diterima, dan Y_1 signifikan terhadap Y_2 dan hipotesis diterima, sedangkan X tidak signifikan terhadap Y_2 , maka Y_1 merupakan variabel mediasi penuh, (3) Jika X tidak signifikan terhadap Y_1 , dan Y_1 signifikan terhadap Y_2 dan hipotesis diterima, maka variabel Y_1 bukan variabel mediasi.

Setelah model teoritis yang dikembangkan dan manefestasikan dalam sebuah diagram jalur selanjutnya dilakukan konversi dalam bentuk persamaan-persamaan matematis, sehingga terbentuk satu sistem persamaan simultan atau sering disebut model struktural, yaitu :

$Y_1 = f(X_1, X_2,)$ maka persamaan strukturalnya

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots \text{(persamaan 3.1)}$$

$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1)$, maka persamaan strukturalnya :

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots \text{(persamaan 3.2)}$$

Di mana X_1 adalah Pertumbuhan ekonomi, X_2 adalah Investasi, Y_1 adalah Tingkat Pengangguran, Y_2 adalah Tingkat Kemiskinan dan α, β adalah koefisien jalur

Uji Asumsi Klasik yang digunakan (1) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah data terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Karena data panel memiliki ciri-ciri yang lebih dekat ke data cross section dari pada data time series, maka Uji Heteroskedastisitas Wajib dilakukan, (2) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi antara variabel bebas. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari 1 variabel bebas, maka model apapun yang terpilih (FEM / CEM / REM) wajib dilakukan uji Multikolinearitas. Uji F dilakukan untuk menguji koefisien regresi apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan Uji t dilakukan

untuk pengujian signifikansi koefisien regresi secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap peubah lain bersifat konstan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Penelitian

Analisis jalur atau *path analysis* merupakan analisis lanjutan dan pengembangan dari analisis regresi. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (*kontribusi*) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel Investasi (X_1) dan Pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap Pengangguran (Z) serta dampaknya terhadap Kemiskinan (Y). Pengaruh investasi (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap pengangguran (Z) serta dampaknya terhadap kemiskinan (Y).

4.1. Model Persamaan Struktural I

4.1.1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas (multiko). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai *Collinearity Tolerance* kedua variabel lebih dari 0,10 dan nilai *Statistics VIF* kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model struktural 1 yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independent*

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output pengolahan data dapat dilihat bahwa variabel investasi dan FE mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.2. Koefisien Jalur Model I

Berdasarkan hasil output regresi model I, pada table coefficient dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penanaman modal asing (X_1) = 0.923 ini berarti lebih besar dari 0,05 sehingga variabel penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi (X_2) = 0.000 hasil ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Z). Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada Regresi Model 1, variabel penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Selanjutnya nilai *R Square* yang didapat pada table Model Summary adalah sebesar 0.455^a. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah sebesar 45,50% sisanya sebesar 54,50 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Tabel 1. Nilai Koefisien Regresi Persamaan Struktural 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.370	1.451		-2.322	0.021
	Penanaman Modal Asing	-0.010	0.104	-0.009	0.097	0.923
	Pertumbuhan Ekonomi	-0.710	0.149	-0.449	4.757	0.000

a. Dependent Variable: Pengangguran

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Program IBM SPSS Statistic 26

4.2. Model Persamaan Struktural I

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independent*. Cara mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance dan Inflation factor* (VIF) dan *tolerance* dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa nilai *Collinearity Tolerance* ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai Statistics VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independent*.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejter bahwa nilai sig semua variable lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.2.2. Koefisien Jalur Model II

Pengaruh penanaman modal asing terhadap kemiskinan: dari hasil analisis diperoleh nilai penanaman modal asing sebesar $0.117 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan variabel penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan: dari hasil analisis diperoleh nilai sig pertumbuhan ekonomi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan: dari hasil analisis diperoleh nilai sig sebesar $0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.

Koefisien Determinasi (R^2). Hasil output R-squared memiliki besaran nilai 0,511 yang berarti variasi tiga variabel independen yaitu penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menjelaskan 51,10% variasi variabel kemiskinan. Sisanya 48,50% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan dari Koefisien Determinasi (R^2) adalah model regresi baik. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Hasil output menunjukkan nilai F statistik 61,312 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan ketiga variabel yaitu Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Nilai Koefisien Regresi Persamaan Struktural 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2.649	0.694		-3.815	0.000	
	Penanaman Modal Asing	-0.077	0.049		-0.117	-1.574	0.117
	Pertumbuhan Ekonomi	-0.807	0.075		-0.853	10.774	0.000
	Pengangguran	0.107	0.036		0.179	-2.941	0.004

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Program IBM SPSS Statistic 26

4.3. Analisis Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh penanaman modal asing melalui pengangguran terhadap kemiskinan: diketahui pengaruh langsung yang diberikan penanaman modal asing terhadap pengangguran sebesar 0,009. Sedangkan pengaruh tidak langsung penanaman modal asing melalui pengangguran terhadap kemiskinan adalah perkalian antara nilai beta penanaman modal asing terhadap pengangguran dengan nilai beta pengangguran terhadap kemiskinan yaitu: $0,009 \times -0,179 = -0,001611$. Maka pengaruh total yang diberikan penanaman modal asing terhadap kemiskinan adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung $0,009 + -0,001611 = 0,007389$. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,009 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,007389. Pengaruh tidak langsung < nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung penanaman modal asing melalui pengangguran mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengangguran terhadap kemiskinan: diketahui pengaruh langsung yang diberikan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,449. Sedangkan pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi melalui pengangguran terhadap kemiskinan adalah perkalian antara nilai beta pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan nilai beta pengangguran terhadap Kemiskinan yaitu: $0,449 \times -0,179 = -0,080571$. Maka pengaruh total yang diberikan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung $0,449 - 0,080571 = 0,368429$. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,449 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,368429. Pengaruh tidak langsung < nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi melalui pengangguran mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskina di Indonesia.

4.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Bila dibandingkan denan hukum Okun maka temuan penelitian ini menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap penganggran di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hukum okum sejalan dengan hukum. Dimana menurut Hukum Okun bahwa pengangguran dan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) memiliki hubungan terbalik,

seperti yang ditemukan di Negara India India, diman sekitar 48% dari perubahan pengangguran disebabkan oleh PDB. (Chand et al., 2018), (Sahoo, 2019). Selanjutnya Di Bahrain ditemukan hubungan negatif yang tidak signifikan antar variable (Alrayes & Abu Wadi, 2018). Di Rumania dari tahun 2000 hingga 2018 menegaskan adanya hubungan terbalik antara pertumbuhan PDB dan pengangguran dengan koefisien -0,217 dan kuadrat R rendah dari 0.03 (Slusariuc, 2018)

Penanaman modal asing merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Investasi baik lokal maupun asing memiliki *multiplier effect* yang sangat besar terutama bagi terserapnya tenaga kerja Indonesia. Tingkat investasi yang tinggi akan menyebabkan perputaran yang cepat pada perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah output karena adanya investasi baik investasi untuk meningkatkan produktivitas atau investasi dalam mengekspansi usaha maupun investasi untuk membuka usaha atau pabrik baru. Investasi dalam mengekspansi usaha dilakukan suatu perusahaan karena jumlah permintaan yang tinggi. Untuk mengejar keuntungan lebih maka perusahaan memutuskan untuk memperluas usahanya melalui peningkatan produktivitas. Produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui penambahan kapasitas produksi dan pasti akan membutuhkan input produksi yang lebih terutama kebutuhan akan input sumber daya manusia.

4.5. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pengangguran

Hasil Penelitian ini menemukan penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini berarti semakin tinggi penanaman modal asing di Indonesia maka pengangguran akan semakin tinggi. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Johnny et al., (2018) di Nigeria dari tahun 1980 hingga 2015 yang menemukan ada hubungan negatif dan signifikan antara Investasi dan tingkat pengangguran dan penelitian Muhd Irpan et al., (2016) di Malaysia yang menemukan Investasi secara signifikan mempengaruhi dan mengurangi tingkat pengangguran di Malaysia.

Namun temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Grahovac & Softić, 2017) yang menemukan tidak adanya dampak positif penanaman modal asing terhadap lapangan kerja, yang hadir di sebagian besar negara CEE selama masa transisi, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai studi empiris. Oleh karena itu, di negara berkembang, model masuk penanaman modal asing seharusnya menciptakan pekerjaan padat karya (Meldebra Hilom-Polinon & Hakim, 2019)

Walaupun penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, namun pemerintah harus mengundang perusahaan maupun pemilik modal untuk ambil bagian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang memadai diantaranya berupa regulasi dan birokrasi serta membangun infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga menstimulus masuknya modal asing melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini sangat dibutuhkan para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri yang sangat membutuhkan modal mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian usahanya bersifat padat karya.

4.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seth & Alkire, 2021), ketika mempelajari negara bagian India, menemukan korelasi negatif antara perubahan absolut dalam PDB dan indeks kemiskinan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Seth & Alkire, 2021) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan kemiskinan di 27 negara Afrika Sub-Sahara.

4.7. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menemukan penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yaser, 2017) yang menemukan bahwa Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Demikian pula, (Quiñonez et al., 2018) meneliti dampak Investasi terhadap insiden kemiskinan di Amerika Latin untuk panel 13 negara yang menyimpulkan bahwa Investasi tidak secara signifikan mengurangi kemiskinan di Amerika Latin, selanjutnya (Anetor et al., 2020) juga menemukan bahwa Investasi dan bantuan luar negeri meningkatkan kemiskinan dan bahwa tingkat Investasi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan belum tercapai. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzel et al. (2015) menyelidiki dampak arus masuk investasi asing langsung terhadap pengentasan kemiskinan di negara-negara Sub-Sahara dari tahun 1990 hingga 2010 yang menemukan penanaman modal asing penyebab pengurangan kemiskinan, (M. B. Khan et al., 2019) menemukan hubungan antara Investasi dan kemiskinan di Pakistan menunjukkan bahwa penanaman modal asing berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

4.8. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menemukan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pengangguran maka pendapatan Masyarakat akan semakin rendah, hal ini akan menyebabkan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Kemiskinan erat kaitannya dan melekat pada kondisi deprivasi, baik itu kekurangan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan rasa aman yang akan menentukan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. (Ravallion, 2020) mengatakan bahwa kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi minimum yang dianggap wajar dalam skala absolut dan dalam persepsi masyarakat tertentu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ristika et al., 2021) yang menemukan tingkat pengangguran terbuka memiliki arah hubungan positif dengan kemiskinan. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengangguran maka kemiskinan juga akan ikut meningkat, begitupula sebaliknya. Namun hasil penelitian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan karena penduduk yang menganggur belum tentu penduduk dengan pendapatan yang rendah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nabibah & Hanifa, 2022), dimana pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Mengurangi tingkat pengangguran telah digembar-gemborkan baik secara nasional maupun internasional sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. Terlepas dari kemampuannya, peran tenaga kerja berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung (Callander et al., 2011). (Ravallion, 2020)(Ravallion, 2020) (Abdurachman et al., 2021) menyatakan bahwa pengangguran merupakan indikator kemajuan suatu negara; semakin rendah tingkat pengangguran, pemerintah dianggap berhasil mengatur kehidupan rakyatnya; sebaliknya, semakin tinggi tingkat pengangguran, pemerintah dianggap memiliki.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia, penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan

kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Variabel pengangguran tidak mampu memediasi pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah dalam menurunkan kemiskinan dapat menggunakan strategi peningkatan pengeluaran pemerintah terutama yang pengeluarannya yang berpihak kepada kaum miskin. Pemerintah perlu terus melakukan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena terbukti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Kemudian selanjutnya hendaknya pemerintah terus berupaya mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan karena secara akumulasi akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Bagi pemerintah daerah hendaknya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, T. Z., Syahnur, S., & Syathi, P. B. (2021). Determinants of Unemployment in the Large and Medium Industrial Sector in Indonesia. *International Journal of Global Operations Research*, 2(3), 110–117. <https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i3.113>
- Abeje, M. T., Tsunekawa, A., Haregeweyn, N., Ayalew, Z., Nigussie, Z., Berihun, D., Adgo, E., & Elias, A. (2020). Multidimensional Poverty and Inequality: Insights from the Upper Blue Nile Basin, Ethiopia. *Social Indicators Research*, 149(2), 585–611. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02257-y>
- Alrayes, S. E., & Abu Wadi, R. M. (2018). Determinants of Unemployment in Bahrain. *International Journal of Business and Social Science*, 9(12), 64–74. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n12p8>
- Anetor, F. O., Esho, E., & Verhoef, G. (2020). The impact of foreign direct investment, foreign aid and trade on poverty reduction: Evidence from Sub-Saharan African countries. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1737347>
- Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, 161, 106119. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106119>
- Chand, K., Tiwari, R., & Phuyal, M. (2018). Economic Growth and Unemployment Rate: An Empirical Study of Indian Economy. *PRAGATI: Journal of Indian Economy*, 4(02). <https://doi.org/10.17492/pragati.v4i02.11468>
- Fauzel, S., Seetanah, B., & Sannasse, R. (2015). Foreign direct investment and welfare nexus in sub Saharan Africa. *The Journal of Developing Areas*, 49(4), 271–283. <https://doi.org/10.1353/jda.2015.0133>
- Fuente, B. P. de la. (2016). Economic Growth and Poverty Reduction in a Rapidly Changing World. *European Economy. Economic Brief*, 19(October), 2–17. <https://doi.org/10.2765/730208>
- Grahovac, D., & Softić, S. (2017). Impact Of The FDI On Unemployment Rate In Countries Of West Balkan. *Review Of Innovation And Competitiveness*, 3(2), 65–82.
- Gweshengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the characteristics of poverty and their implications

- for poverty analysis. *Cogent Social Sciences*, 6(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>
- Johnny, N., Timipere, E. T., & Krokeme, O. (2018). Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment rate in Nigeria (1980-2015). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i3/3905>
- Joshua, U., Babatunde, D., & Sarkodie, S. A. (2021). Sustaining Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Do FDI Inflows and External Debt Count? *Journal of Risk and Financial Management*, 14(4), 146. <https://doi.org/10.3390/jrfm14040146>
- Kenny, V. (2019). A causal relationship between unemployment and economic growth A causal relationship between unemployment and economic growth. *Munich Personal RePEc Archive*, 93133, 1–11.
- Khan, M. B., Huobao, X., & Saleem, H. (2019). Direct impact of inflow of foreign direct investment on poverty reduction in Pakistan: a bonds testing approach. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), 3647–3666. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1670088>
- Khan, M., Saboor, A., Rizwan, M., & Ahmad, T. (2020). An empirical analysis of monetary and multidimensional poverty: evidence from a household survey in Pakistan. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 30(2), 106–121. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1712663>
- Mehra, G. (2018). Unemployment: Stumbling Block to Economic Growth. *SSRN Electronic Journal*, 6(1), 71–78. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3115958>
- Meldebra Hilom-Polinon, & Hakim, T. A. (2019). The impact of entry modes of Foreign Direct Investment towards unemployment: Evidence from Asian countries. *International Journal of Business & Economic Development*, 07(02), 1–9. <https://doi.org/10.24052/ijbed/v07n02/art-01>
- Muhd Irgan, H., Mat Saad, R., Shaari Md Nor, A. H., Md Noor, A. H., & Ibrahim, N. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on the Unemployment Rate in Malaysia. *Journal of Physics: Conference Series*, 710(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/710/1/012028>
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p1-13>
- Oktaviana, N., & Amalia, N. (2018). Gross Regional Domestic Product Forecasts Using Trend Analysis: Case Study of Bangka Belitung Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.2.5005>
- Quiñonez, P., Sáenz, J., & Solórzano, J. (2018). Does foreign direct investment reduce poverty? The case of Latin America in the twenty-first century. *Business and Economic Horizons*, 14(3), 488–500. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.35>
- Ravallion, M. (2020). Ravallion-2020贫困终结的理论起源NBER. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Ruggeri Laderchi, C., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches. In *Oxford Development Studies* (Vol. 31, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>
- Sahoo, M. (2019). The relationship between unemployment and some macroeconomic variables: Empirical evidence from India. *Theoretical and Applied Economics*, XXVI(1), 115–128.
- Santos, M. E., Dabus, C., & Delbianco, F. (2016). *OPHI WORKING PAPER NO. 105 Growth and Poverty Revisited from a Multidimensional Perspective*. 1–12.
- Sen, A. (2000). Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny. In *Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank, Social Development Papers* (Vol. 1, Issue June). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.1010&rep=rep1&type=pdf>
- Seth, S., & Alkire, S. (2021). Multidimensional poverty and inclusive growth in india: An analysis using

- growth elasticities and semi-elasticities. *Research on Economic Inequality*, 29(November 2020), 105–137. <https://doi.org/10.1108/S1049-258520210000029007>
- Slusariuc, G. C. (2018). *Corruption and Transparency in Public Administration*. 18(2), 185–192.
- Suzanna-Zora Rye. (2016). *Foreign Direct Investment and its Effect on Income Inequality*. November, 1–60.
- Wang, C., Zeng, B., Luo, D., Wang, Y., Tian, Y., Chen, S., & He, X. (2021). Measurements and Determinants of Multidimensional Poverty: Evidence from Mountainous Areas of Southeast China. *Journal of Social Service Research*, 47(5), 743–761. <https://doi.org/10.1080/01488376.2021.1914283>
- World Bank. (2020). *Annual Report 2020 Poverty Estimates and Income by Region*. 3–5.
- Yaser, A. (2017). The Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in the Developing Countries. *International Finance & Banking*, 4(2), 92–111.

PENGARUH LUAS LAHAN DAN HARGA JUAL PADI TERHADAP TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA

Fara Dina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

The research aims to look at the agricultural sector. The research method in this research is quantitative. The type of data used is secondary data and processing is carried out using panel data regression equipment. It is hoped that this research can provide input for research and be useful for students who will conduct research.

Keywords: Land Area, Rice Selling Price.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dikarenakan sektor pertanian merupakan sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Selain hal itu, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor pertanian adalah bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial yang dapat dijadikan sebagai sektor strategis perencanaan pembangunan saat ini dan masa yang akan datang.

Selain meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sektor pertanian juga menjadi salah satu penyediaan pangan pokok masyarakat. Oleh karena itu, peran sektor pertanian dalam penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau untuk masyarakat dalam percepatan pembangunan sangat penting. Walaupun dalam beberapa tahun pendapatan pada sektor pertanian mengalami penurunan hal ini juga berdampak karena adanya pandemi *COVID-19* sehingga dalam PDB juga mengalami penurunan. Namun sektor pertanian tetap memegang peran yang besar dalam perekonomian secara menyeluruh, karena memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi dan seektor-sektor lainnya.

Salah satu sektor pertanian yang paling unggul di Indonesia adalah hasil pertanian padi, Padi merupakan komoditi penting dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Maka dari itu sebagaian besar di setiap daerah di Indonesia masyarakatnya bekerja sebagai petani. Padi merupakan salah satu komoditi pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Permintaan padi semakin meningkat dengan semakin tumbuhnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan padi. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap sektor pertanian agar produksi padi yang ada di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana luas lahan dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia
 2. Bagaimana harga jual padi dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia
- Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk :
1. Menganalisis luas lahan dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia
 2. Menganalisis harga jual padi dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia

2. KAJIAN LITERATUR

2.1.1 Teori Produksi

Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output ataupun nilai pada suatu barang atau jasa (Maharani Lutfiah Damayanti,2020:1-15). Dalam proses produksi terdapat beberapa faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan segala sesuatu yang menentukan berjalannya produksi dalam menghasilkan output yang telah direncanakan membutuhkan pengeluaran biaya dalam pemenuhan faktor-faktor produksi dan proses produksinya. Adapun faktor produksi yaitu, sumber daya manusia atau tenaga kerja (L), teknologi (T), modal (C) dan tanah (N) (Anshar,2017).

2.1.2 Teori Konsumsi

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan secara langsung (Sri Kartini,2019). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menyatakan bahwa konsumsi pangan merupakan jumlah pangan, secara tunggal atau beragam, yang dikonsumsi seseorang dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologisnya. Selain itu tujuan seseorang untuk mengonsumsi diantaranya yaitu, memberikan kesenangan dan kepuasan, mengukur tingkat status sosial konsumen, meningkatkan gengsi konsumen, dan mendorong terciptanya produk baru (Sri Kartini,2019).

2.1.3 Teori Harga

Harga adalah suatu nilai barang yang dinyatakan dengan satuan uang dengan jumlah tertentu. Semakin rendah harga suatu barang atau jasa maka semakin tinggi permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dan sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang atau jasa maka semakin rendah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Hal tersebut terjadi karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang (Suhardi,2016).

2.1.4 Luas Lahan

Luas lahan adalah besarnya lahan yang dikelola dalam berusaha tani untuk menghasilkan produksi. Semakin luas lahan yang dipakai tentunya akan mendapatkan hasil yang semakin meningkat. Usaha tani di ukuran kecil tidak mendapatkan untung untuk mencukupi kebutuhan petani dan keluarganya. Sebaliknya jika ukuran suatu lahan meningkat, maka kecenderungan dapat memperoleh hasil yang semakin tinggi (Usman dan Juliani,2018).

2.1 Kajian Empiris

1. Hasil penelitian yang membahas tentang hubungan antara luas lahan dan produksi adalah penelitian yang dilakukan oleh Rika Harini dkk berjudul Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Di Kalimantan Utara. Hasil perhitungan analisis regresi luas lahan pertanian dan produksi pertanian menunjukkan bahwa dua kabupaten (Malinau dan Nunukan) tidak ada pengaruh secara signifikansi (lebih dari 0,05) sedangkan untuk tiga kabupaten (Bulungan, Tana, Tidung, dan Tarakan) terdapat pengaruh secara signifikan (dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05) penurunan jumlah luas lahan.
2. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kenaikan harga berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Osi Hayuni Putri dkk dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Produksi Dan Harga Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Kerinci". Serta penelitian yang dilakukan oleh Mayang Narang Ali dan Ambya berjudul "Pengaruh Perubahan Harga Beras terhadap Pola Konsumsi Pangan Pada Rumah Tangga Dalam Jangka Pendek".

3. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kenaikan harga tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh A. Husni Malian dkk dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan”. Serta Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zaryl Gapari berjudul “Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Sukaraja”.

3. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu analisis ilmiah secara terstruktur, terorganisasi, dan tersusun terhadap sisi, fenomena dan hubungan dari awal hingga akhir penelitian dengan berdasarkan data informasi yang dikumpulkan (Hermawan, 2019). Tempat penelitian dilakukan di Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi. Sumber data berasal dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Waktu penelitian dilakukan selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang ditemukan dari metode membaca, mendalami, dan menekuni dari sarana lain dengan bersumber dari literatur, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Data panel merupakan gabungan antara gabungan data *time series* dan data *cross section* (Widarjono, 2013). Penelitian ini memakai data panel dengan gabungan *time series* selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2021 dan *data cross section* yang terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia. terdiri dari data rata-rata Produksi padi, Luas Lahan, Harga jual dan tingkat konsumsi masyarakat di provinsi Indonesia. Dengan menggunakan metode kuantitatif bisa melakukan pengujian hipotesis pada suatu data untuk memperoleh kebenaran sehingga bisa disimpulkan.

3.2 Analisis Data

Penelitian tersebut dilakukan dengan memakai metode regresi linear berganda dengan pengolahan data memakai program Eviews Versi 10 melalui tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Dengan model estimasi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Konsumsi Masyarakat

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Luas Lahan

X_2 = Harga Jual

i = Provinsi Indonesia

t = Menunjukkan periode waktu ke-t

e = error

Tahapan – tahapan dalam analisis sebagai berikut:

1. Model Regresi Data Panel

Metode estimasi dengan menggunakan model regresi data panel terbagi menjadi tiga pendekatan (Basuki & Yuliandi, 2015) yakni:

1. Model Common Effect

Model ini merupakan pendekatan gabungan data deret waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) secara paling sederhana. Model Common Effect menerapkan pendekatan Ordinary Least

Square (OLS) kepada dugaan parameternya, dan tidak memandang dimensi masa atau individu, kemudian diasumsikan sama dalam berbagai periode waktu (Greene, 2000).

2. Model Fixed Effect

Model ini mengasumsikan variasi antar individu bisa diakomodasi dari perbedaan intersepnya. *Model Fixed Effect* menduga data panel dengan penambahan berupa variabel dummy agar menangkap variasi intersep antar data *cross section* dengan *slope*-nya tetap sama. Model *Fixed Effect* nama lainnya adalah *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. Model Random Effect

Model ini mengasumsikan error saling berhubungan antara waktu dan individu. Terdapat variasi intersep diakomodasi sama error terms tiap – tiap data *cross section*. Model *Random Effect* bisa menghapus keberadaan heteroskedastisitas. Dalam model tersebut menerapkan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS).

3.2.2 Uji Spesifikasi Model

1. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini dilakukan untuk memilih model terbaik antara model *random effect* dan model *common effect* berdasarkan nilai *residual model common effect* (Greene, 2003). Hipotesis *Uji Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Common Effect*

2. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih model *common effect* dan model *fixed effect* (Greene, 2008). Hipotesis Uji Chow sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

3. Uji Hausman

Uji ini dilakukan ketika hasil uji Chow model yang sesuai adalah model *fixed effect*. Pengujian ini dilakukan untuk memilih model estimasi terbaik antara model *fixed effect* atau model *random effect* (Greene, 2008). Hipotesis Uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Pada metode OLS terdapat sebagian asumsi klasik yang perlu terwujud yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam regresi data panel mempunyai bagian kelebihan sehingga pada penelitian ini tidak dilakukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2012).

3.2.3 Uji Statistik (*Test of Goodness of Fit*)

Evaluasi model estimasi menurut kriteria statistik terdapat beberapa pengujian yaitu:

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) untuk memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel independen (Y) yang dijelaskan oleh variabel dependen (X) (Gujarati, 2003).

2. Uji F-Statistik

Pengujian F-statistik untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama – sama terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003). Kriteria pengujian keputusan:

- a. Jika Probability $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
 - b. Jika Probability $\leq 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
3. Uji t-Statistik

Pengujian t-statistik untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% (Gujarati, 2003). Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika Probability $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak
- b. Jika Probability $\leq 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka hasil yang diperoleh pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
C	73563.36	85956.40	0.855822	0.3954
Luas Lahan	0.016079	0.084775	0.189672	0.8502
Harga Jual	-0.234227	0.421037	-0.556310	0.5800

Sumber. Data diolah dengan Eview 10

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.1 dihasilkan koefisien dari variable Luas Lahan sebesar 0.016079, Harga Jual sebesar -0.234227, dan konstanta sebesar 73563.36. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 23563.36 + 0,016079X_{1it} - 0,234227 X_{2it} + e_{it}$$

Dari persamaan diatas maka dijelaskan sebagai berikut.

Adapun nilai konstanta pada persamaan diatas sebesar 23563.36 mengindikasikan bahwa Luas lahan dan Harga Jual Padi tetap maka konsumsi padi akan bertambah sebanyak 23563.36%. Nilai Koefisien luas lahan sebesar 0.016079 , artinya jika luas lahan naik sebesar 1% maka Konsumsi padi naik sebesar 0.016079% dengan asumsi harga harga jual tetap. Dan nilai koefisien harga jual sebesar -0.234227 artinya jika harga jual naik sebesar 1%, maka konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan sebesar 0,234227%.

4.1.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji t-statistik

Uji statistik t adalah digunakan dalam penelitian ini untuk melihat seberapa jauh variabel bebas secara individu dalam menjelaskan secara detail variabel terikat.

Tabel 4.2 Hasil Uji t-statistik

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob	Kesimpulan
Luas Lahan	0.016079	0.189672	0.8502	Tidak signifikan
Harga Jual	-0.234227	-0.556310	0.5800	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah dengan Eview 10

- a. Variable Luas Lahan menunjukk t-statistic sebesar 0.189672 dengan nilai probablilitas sebesar 0.8502 angka tersebut ≥ 0.05 yang memiliki arti tidak berpengaruh. Berdasarkan tabel 4.2 dapat

diketahui bahwa variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi padi di Indonesia.

- b. Variable Harga jual menunjukkan t-statistic sebesar -0.556310 dengan nilai probabilitas sebesar $0.5800 \geq 0.05$ artinya tidak berpengaruh. Dapat disimpulkan bahwa Variabel harga jual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi padi di Indonesia.

2. Uji F-statistik

Uji F statistik merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Tabel 4.3 berikut ini menampilkan hasil uji F statistik.

Tabel 4.3 Hasil Uji F Statistik

Indikator	
F _{statistik}	1.477824
Probabilitas F _{statistik}	0,089840

Sumber: Data diolah dengan Eview 10

Tabel 4.3 diatas diperoleh nilai F_{statistik} yaitu 1.477824 dengan nilai probabilitas sebesar 0,089840 yang menunjukkan lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya variable luas lahan tidak signifikan terhadap konsumsi padi pada masyarakat di Indonesia. begitu juga dengan variable harga jual juga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap konsumsi padi masyarakat Indonesia.

3. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) model pengujian untuk memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel independen (Y) yang dijelaskan oleh variabel dependen (X).

Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Indikator	
R-squared	0,458855
Adjusted R-squared	0,148361

Sumber: Data diolah dengan Eview 10

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R_2 sebesar 0,458855 artinya variable luas lahan dan harga jual dapat menjelaskan konsumsi padi masyarakat sebesar 45% sedangkan 65% lainnya mampu dijelaskan oleh variable lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pedesaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan bahwa variable luas lahan dan haarga jual tidak mempengaruhi terhadap tingkat konsumsi padi pada masyarakat Indonesia. hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik pada tabel 4.2 nilai t-statistik dari luas lahan sebesar 0.189672 yang berarti hubungan antara luas lahan dan tingkat konsumsi padi masyarakat Indonesia adalah positif. Nilai probabilitasnya sebesar 0.089840 yang menunjukkan hubungan tidak signifikan antara luas lahan dan tingkat konsumsi padi masyarakat Indonesia. Hal ini karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, artinya perubahan nilai luas lahan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi padi masyarakat Indonesia. karena mayoritas petani di Indonesia adalah berprofesi sebagai petani padi dan padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga kecil kemungkinan masyarakat Indonesia akan mengurangi permintaan akan padi, Jadi petani padi akan tetap memproduksi padi.

4.2.2 Pengaruh Harga Jual Terhadap Tingkat Konsumsi padi

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa variable Harga jual negative dan tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi padi masyarakat di Indonesia. hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2 bahwa nilai t-statistik dari variable harga jual adalah sebesar -0.855822 yang berarti hubungan antara harga jual dan tingkat konsumsi padi masyarakat di Indonesia berpengaruh secara negative. Nilai probabilitasnya sebesar 0.089840 menunjukkan lebih besar dari 0.05. artinya perubahan nilai variable harga jual tidak memiliki pengaruh terhadap nilai konsumsi padi masyarakat di Indonesia. hal ini dikarenakan padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia, kecil kemungkinan untuk masyarakat beralih ke makanan pokok lainnya dalam waktu yang singkat apalagi tidak terjadi kelangkaan padi. masyarakat pasti akan tetap membeli padi untuk alasan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mengkonsumsi makanan. Berapapun harga yang di pasarkan untuk 1 kilogram padi, tentu masyarakat Indonesia akan tetap membeli dan mengkonsumsi padi sehingga kecil kemungkinan harga jual untuk mempengaruhi tingkat konsumsi padi.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah dianalisis mengenai pengaruh variabel Luas lahan dan harga jual terhadap tingkat konsumsi padi masyarakat di Indonesia, maka dijelaskan sebagai berikut,

- 1) Luas lahan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi padi masyarakat di Indonesia. hal ini dikarenakan indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar dan padi merupakan makanan pokok masyarakat di Indonesia, sehingga permintaan akan padi akan tetap konsisten di Indonesia.
- 2) Harga jual memiliki hubungan negative dan tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi padi masyarakat di Indonesia. hal ini karena masyarakat Indonesia dalam kesehariannya mengkonsumsi nasi yang berasal dari padi sehingga masyarakat akan tetap membeli dan mengkonsumsi padi meskipun harga jual padi berfluktuatif sehingga permintaan akan padi tetap akan mengalami konsistensi.

5.2 Rekomendasi

berdasarkan simpulan diatas, Adapun rekomendasi atau saran yang bisa disampaikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan petani mampu mempertimbangkan untuk beralih fungsi lahan padinya, dikarenakan kondisi luas lahan yang semakin sempit seiring berjalannya waktu dan akan mempengaruhi produktivitas padi.
2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan para petani padi, memberikan solusi kepada petani padi, mengadakan subsidi untuk pestisida dan peralatan pertanian lainnya serta membantu para petani dalam mendistribusikan hasil padinya ke seluruh Indonesia agar dapat mengurangi Import beras dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Durma, R. I (2018). Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produksi Padi dan Kesejahteraan Petani studi di Kelurahan gunung sekar kecamatan sampan kabupaten sampan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis 5th Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Greene, W. H. (2008). *Econometric Analysis Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

- Harini, R., Ariani, R. D., Supriyati, S., & Satriagasa, M. C. (2019). Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Di Kalimantan Utara. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 15-27.
- Iqbal, M. (2014). Peran kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali (Disertasi Doktor Universitas Tadulako). Kesejahteraan Petani Studi di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampan.
- Malian, A. H., Mardianto, S., & Ariani, M. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 22(2), 119-146.
- Matanari, S., & Emalisa, D. (2015). Peranan Kelompok Tani terhadap Peningkatan Produksi Padi Sawah (Oriza Sativa) di Desa Hutagugung Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 4(7), 94048.
- Mawarni, E., Baruwadi, M., & Bempah, I. (2017). Peran kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani padi sawah di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis* 2 (1), 65-73.
- Pramono, LG, & Yuliawati, YY (2020). Peran Kelompok Petani Terhadap Pendapatan Petani Beras Lapur Di Desa Suku Selatan Kabupaten Sidorejo Kota Salatiga. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto* , 21 (2), 129-139.
- Putri, O. H., & Gunawan, S. I. (2018). Pengaruh produksi dan harga terhadap konsumsi beras di kabupaten kerinci. *Jurnal Akrab Juara*, 3(1), 59-69

STRATEGI INOVATIF PDAM: MENGUATKAN KINERJA KEUANGAN MELALUI INTEGRASI SDM DAN ASPEK OPERASIONAL DI WILAYAH III

Windhu Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the internal dynamics of Regional Water Supply Companies (PDAMs) to identify factors that affect service quality and financial performance. With the main objective to explore the effect of operational efficiency and investment in human resource (HR) development on improving services and financial results, this study uses the regression analysis method to analyze PDAM operational data. Results from Model 1 show that there is a significant relationship between operational efficiency, measured through Operating Water Loss Rate, and service quality, which is consistent with findings in the literature linking optimal operational processes with higher customer satisfaction. Furthermore, investment in human resources, represented by the Employee Training Ratio/Competency Improvement, also contributes significantly to service quality, supporting theories that emphasize the importance of skill development and employee motivation.

In Model 2, the relationship between operational efficiency and HR management and financial performance shows no statistical significance, indicating that there may be other variables or long-term factors at play. However, service quality is emerging as a key factor in improving financial performance, underscoring its role as a determinant of customer satisfaction and loyalty that ultimately affects profitability.

This study contributes to the literature by highlighting the importance of operational efficiency and HR management in improving service quality, as well as the role of service quality as a mediation between PDAMs' internal factors and their financial performance. These findings have valuable implications for policymakers and practitioners in the clean water sector, offering recommendations to improve PDAMs' operations, customer satisfaction, and financial health.

JEL: G300

Kata Kunci: *Efisiensi Operasional, Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan, Kinerja Keuangan,*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia layanan air bersih memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih yang layak dan berkelanjutan. Di tengah peningkatan kebutuhan akan air bersih dan tantangan dalam mengelola sumber daya yang terbatas, PDAM menghadapi tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Isu efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sering muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kualitas pelayanan yang tinggi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara positif.

Beberapa PDAM di Indonesia mengalami kehilangan air yang signifikan dan tingkat kepuasan pelanggan yang rendah, yang mencerminkan adanya masalah dalam efisiensi operasional dan

pengelolaan SDM. Keadaan ini mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana PDAM dapat mengoptimalkan operasional dan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja keuangan.

Dalam konteks Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang berperan penting dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat, muncul beberapa pertanyaan penting yang mendasari penelitian ini. Pertama, riset ini bertujuan untuk memahami hubungan antara efisiensi operasional dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh PDAM. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengelolaan sumber daya dan proses operasional yang efisien dapat mempengaruhi standar layanan yang diterima oleh pelanggan. Kedua, penelitian ini menginvestigasi dampak investasi dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas layanan, dengan pertimbangan bahwa SDM yang terlatih dan kompeten dapat menyampaikan layanan yang lebih baik dan lebih efektif. Ketiga, diinginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana efisiensi operasional dan pengelolaan SDM secara kolektif mempengaruhi kinerja keuangan PDAM, sebuah area yang menarik bagi pemangku kepentingan untuk menilai kesehatan finansial dan keberlanjutan layanan. Terakhir, penelitian ini berupaya menentukan apakah peningkatan dalam kualitas pelayanan dapat berfungsi sebagai mediasi antara efisiensi operasional serta pengelolaan SDM dengan kinerja keuangan, sehingga menawarkan wawasan strategis untuk pengambilan keputusan di PDAM. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbing investigasi riset untuk menghasilkan temuan yang dapat menerangi area-area kritis dalam pengelolaan PDAM dan memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk praktek manajerial yang lebih baik.

Tujuan utama dari riset ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terhadap dinamika internal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mempengaruhi penyediaan layanan dan hasil keuangan. Secara spesifik, riset ini bertujuan untuk mengungkap seberapa signifikan pengaruh efisiensi operasional dalam peningkatan kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh PDAM. Selanjutnya, riset ini akan mengkaji dampak investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas layanan yang disediakan, berangkat dari premis bahwa SDM yang berkualitas merupakan kunci untuk penyampaian layanan yang prima. Selain itu, penelitian ini akan menilai sejauh mana efisiensi operasional dan pengelolaan SDM mempengaruhi kinerja keuangan PDAM, dengan tujuan untuk memahami implikasi finansial dari praktik operasional dan manajerial yang efektif. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah kualitas pelayanan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara efisiensi operasional dan pengelolaan SDM dengan kinerja keuangan, sehingga memberikan wawasan baru terhadap strategi peningkatan kinerja PDAM. Dengan demikian, tujuan-tujuan ini akan membantu dalam memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasional, kepuasan pelanggan, dan kesehatan finansial PDAM.

Riset ini mengusulkan pendekatan integratif yang mengkombinasikan efisiensi operasional dan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis simultan dari dua variabel independen—efisiensi operasional dan pengelolaan SDM—terhadap dua variabel dependen—kualitas layanan dan kinerja keuangan—yang belum banyak dijelajahi dalam konteks PDAM Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan bukti empiris mengenai bagaimana efisiensi dan SDM secara bersamaan mempengaruhi kinerja di sektor layanan publik.

Berdasarkan teori efisiensi operasional, peningkatan dalam pengelolaan aset dan proses dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas (Rodríguez y Silva & González-Cabán, 2016). Dalam konteks PDAM, efisiensi operasional dapat diukur melalui pengurangan tingkat kehilangan air, yang merupakan indikator penting dalam manajemen air bersih. Di sisi lain, teori kapital manusia menekankan pentingnya investasi dalam SDM untuk meningkatkan kinerja (Dutta et al., 2024).

Dalam konteks PDAM, ini berarti peningkatan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan motivasi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan kinerja keuangan.

Penelitian ini menarik karena menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan manajemen operasional dan SDM (Kaushal et al., 2023), PDAM tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga kinerja keuangannya, yang sejalan dengan penelitian oleh (Kaushal et al., 2023; Petrovska et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam sektor layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan melalui pengelolaan operasional dan SDM yang lebih baik.

2. KAJIAN LITERATUR

Aspek Operasional dan Kualitas Pelayanan (H1);

Aspek operasional (X_1) dalam literatur sering dikaitkan dengan proses dan efisiensi internal organisasi. Penelitian oleh (Bakar et al., 2022; Ben Ammar et al., 2022) menegaskan bahwa optimasi proses operasional dapat menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, yang diukur melalui kepuasan pelanggan dan pengurangan keluhan. Dalam konteks ini, inovasi operasional, seperti penerapan teknologi baru atau metode lean management, telah dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan.

Sumber Daya Manusia dan Kualitas Pelayanan (H2);

Sumber daya manusia (X_2) memegang peranan krusial dalam menyampaikan pelayanan berkualitas. Penelitian oleh (Vafae-Najar et al., 2023) menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat memperkuat keterampilan dan motivasi, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan. Studi oleh (Cardoso et al., 2023) juga menemukan hubungan positif antara kepuasan kerja karyawan dengan kepuasan pelanggan.

Aspek Operasional dan Kinerja Keuangan (H3);

Aspek operasional yang efisien (X_1) telah dikaitkan dengan kinerja keuangan (Y_2) yang lebih baik dalam literatur. Penelitian oleh (Shi & Mena, 2023) dengan model Balanced Scorecard-nya menunjukkan bahwa efisiensi operasional dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Ini didukung oleh studi (Wardhani & Supratiwi, 2023), yang menemukan bahwa perusahaan dengan operasi yang dioptimalkan cenderung memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi.

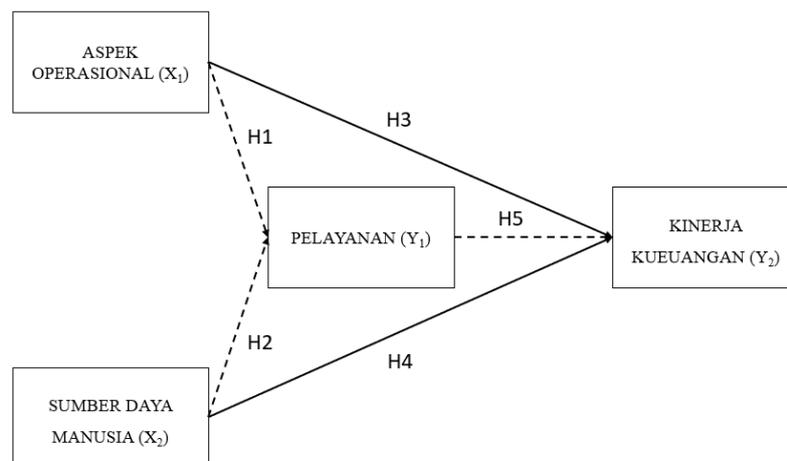
Sumber Daya Manusia dan Kinerja Keuangan (H4)

Investasi dalam sumber daya manusia (X_2) tidak hanya meningkatkan kinerja operasional tetapi juga memiliki efek positif pada kinerja keuangan. (Jo et al., 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan dengan praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif cenderung menunjukkan hasil keuangan yang lebih baik karena peningkatan produktivitas dan inovasi dari karyawan.

Kualitas Pelayanan dan Kinerja Keuangan (H5)

Kualitas pelayanan (Y_1) diakui sebagai penggerak kinerja keuangan (Y_2) dalam banyak penelitian. (Rajani et al., 2023) menunjukkan bahwa peningkatan dalam kualitas layanan dapat menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berdampak pada loyalitas pelanggan dan profitabilitas yang lebih tinggi. (Le et al., 2022) menegaskan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi berhubungan dengan kinerja keuangan melalui retensi pelanggan yang lebih baik.

Berdasarkan diagram yang disajikan, dapat dirumuskan hipotesis dalam bentuk paragraf sebagai berikut: Penelitian ini mengusulkan bahwa aspek operasional (X_1) berpotensi memiliki dampak positif signifikan terhadap kualitas pelayanan (Y_1), dengan asumsi bahwa perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas operasional akan memfasilitasi penyampaian layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, dihipotesiskan bahwa sumber daya manusia (X_2), yang mencakup kemampuan dan kompetensi karyawan, diharapkan berkontribusi positif terhadap kualitas pelayanan (Y_1), menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang lebih terampil dapat meningkatkan standar layanan yang disediakan. Hipotesis selanjutnya menduga bahwa aspek operasional (X_1) dapat mempengaruhi kinerja keuangan (Y_2) secara langsung, menyarankan bahwa operasi yang lebih baik dapat mempercepat aliran kas dan meningkatkan rentabilitas. Sumber daya manusia (X_2) juga diduga memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan (Y_2), yang mengimplikasikan bahwa investasi dalam pengembangan karyawan dapat memberikan manfaat ekonomi. Akhirnya, dihipotesiskan bahwa kualitas pelayanan (Y_1) memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan (Y_2), yang menandakan bahwa peningkatan dalam layanan dapat menarik dan mempertahankan pelanggan, berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis-hipotesis ini mencerminkan pemahaman bahwa interaksi antara aspek operasional, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, dan kinerja keuangan adalah dinamis dan saling terkait dalam menentukan kesuksesan organisasi.



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

3. METODA PENELITIAN

Dalam upaya untuk mengevaluasi strategi inovatif yang diimplementasikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penelitian ini akan menggunakan teknik cluster sampling. Pendekatan ini terpilih karena keefektifannya dalam menangani populasi besar yang tersegmentasi ke dalam berbagai unit. Sampel yang akan diambil khususnya dari PDAM di Wilayah III, yang dianggap representatif terhadap berbagai kategori wilayah PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia. Penentuan sampel ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang berlaku secara umum dan dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi industri PDAM secara keseluruhan.

Teknik pengumpulan data yang dipilih untuk penelitian ini adalah dokumentasi atau arsip. Metode ini melibatkan pengambilan data yang relevan dari berbagai dokumen resmi, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan catatan operasional PDAM di Wilayah III yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan informasi historis dan kontemporer yang akurat, yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Data panel, yang juga dikenal sebagai data lintas waktu atau longitudinal, akan menjadi jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data panel khas karena memiliki dua dimensi penting: lintas bagian dan waktu (Vomberg & Wies, 2022). Contohnya, data panel dapat mengobservasi pendapatan dari berbagai PDAM selama periode tertentu, memberikan 100 lintas bagian (PDAM) dan 5 titik waktu (tahun). Keunikan ini memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya memahami perbedaan antara PDAM tetapi juga untuk melacak perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Data panel memungkinkan analisis dinamika yang lebih mendalam, seperti fluktuasi kinerja finansial PDAM dari tahun ke tahun, dengan mempertimbangkan efek tetap yang inheren dalam masing-masing PDAM dan efek acak yang mungkin muncul dari waktu ke waktu. Untuk menganalisis data panel, beberapa uji statistik akan diterapkan, termasuk uji Chow untuk menentukan pendekatan analisis yang paling tepat dan uji Hausman untuk memilih antara model efek tetap atau efek acak. Pendekatan model Fixed Effect akan digunakan bila diperlukan, dengan uji F yang akan mengevaluasi keberadaan efek tetap yang signifikan, dan uji Hausman akan menginformasikan pemilihan antara model Fixed dan Random Effect.

Selanjutnya, penelitian ini akan melaksanakan serangkaian diagnosa terhadap asumsi model, termasuk autokorelasi dengan uji Wooldridge, heteroskedastisitas dengan uji Breusch-Pagan, dan multikolinearitas untuk memastikan bahwa model yang digunakan dapat memberikan estimasi yang akurat dan valid dari fenomena yang sedang diteliti.

Dalam studi ini, Path Analysis diidentifikasi sebagai metode utama untuk analisis data. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji hubungan kausal antara berbagai variabel yang dihipotesiskan. Dengan menggunakan Path Analysis, dapat dieksplorasi apakah model teoretis yang diusulkan cocok dengan data empiris yang dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, variabel dibagi menjadi dua kategori: eksogen (independen) dan endogen (dependen). Variabel eksogen dalam konteks studi ini adalah Aspek Operasional (X1) dan Sumber Daya Manusia (X2), sedangkan Kinerja Keuangan (Y2) dan Kualitas Pelayanan (Y1) dianggap sebagai variabel endogen. Persamaan yang diusulkan, $Y2 = f(X1, X2, Y1)$, mengusulkan bahwa Kinerja Keuangan (Y2) diharapkan dipengaruhi oleh Aspek Operasional (X1), Sumber Daya Manusia (X2), serta secara langsung oleh Kualitas Pelayanan (Y1). Begitu juga, Kualitas Pelayanan (Y1) dianalisis sebagai fungsi dari Aspek Operasional (X1) dan Sumber Daya Manusia (X2). Penggunaan diagram jalur akan membantu dalam visualisasi dan pemahaman tentang arah dan kekuatan hubungan kausal antar variabel ini.

Selanjutnya, Uji Sobel akan diterapkan untuk menguji kekuatan dan signifikansi efek mediasi dalam model. Dalam analisis mediasi, fokusnya adalah untuk menentukan apakah variabel mediasi (dalam hal ini, Kualitas Pelayanan (Y1)) menjelaskan hubungan antara variabel independen (Aspek Operasional (X1) dan Sumber Daya Manusia (X2)) dengan variabel dependen (Kinerja Keuangan (Y2)). Uji Sobel dilakukan melalui beberapa langkah, yang dimulai dengan estimasi hubungan antara variabel independen dan variabel mediasi untuk memperoleh koefisien regresi. Kemudian, hubungan antara variabel mediasi dan variabel dependen diestimasi, dengan mengontrol variabel independen, untuk mendapatkan koefisien kedua. Statistik Sobel dihitung menggunakan standar kesalahan dari kedua koefisien tersebut. Jika hasil statistik Sobel cukup besar, ini menunjukkan signifikansi efek mediasi. Akan tetapi, penting untuk mengakui keterbatasan uji Sobel, terutama dalam sampel yang kecil, di mana metode bootstrap mungkin lebih disukai untuk keandalan yang lebih tinggi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Analisis Regresi Pengaruh Efisiensi Operasional dan Pengembangan SDM terhadap Kualitas Pelayanan PDAM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-39994,44	6474,377	-6,177342	0,0000
X1 (Operasi Tingkat Kehilangan Air)	1034,992	175,7126	5,890257	0,0000
X2 (Ratio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi)	727,9420	291,2366	2,499487	0,0131

Sumber: Data diolah

Studi empiris yang dirujuk (Bakar et al., 2022; Ben Ammar et al., 2022) menyatakan bahwa optimasi dalam aspek operasional dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil regresi menunjukkan koefisien positif yang signifikan untuk X1 (Operasi Tingkat Kehilangan Air) sejalan dengan penelitian ini, yang menegaskan pentingnya efisiensi operasional dalam menunjang kualitas layanan. Ini didukung oleh koefisien 1034,992 dan t-statistik yang tinggi (5,890257) dengan probabilitas nol, menandakan hubungan yang kuat dan signifikan.

Sementara itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM (X2) yang diwakili oleh koefisien 727,9420 dan t-statistik 2,499487 juga menunjukkan signifikansi pada level 5%. Hal ini konsisten dengan temuan Vafae-Najar et al. (2023) dan Cardoso et al. (2023) yang mengidentifikasi bahwa pengembangan keterampilan dan kepuasan kerja karyawan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas layanan.

Tabel 2

Estimasi Regresi Dampak Efisiensi Operasional dan SDM pada Kinerja Keuangan PDAM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob,
C	1,302336	0,226208	5,757248	0,0000
X1 (Operasi Tingkat Kehilangan Air)	0,002702	0,006100	0,443007	0,6582
X2 (Ratio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi)	-0,003596	0,009565	-0,375931	0,7073
Y1 (Pelayanan)	2,47E-05	2,11E-06	11,69218	0,0000

Sumber: Data diolah

Dalam Model 2, hubungan antara X1 dan X2 dengan Y2 (Kinerja Keuangan) tidak signifikan, ditunjukkan dengan koefisien yang mendekati nol dan probabilitas yang tinggi (X1 dengan p-value 0,6582 dan X2 dengan p-value 0,7073). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Shi & Mena (2023) dan Wardhani & Supratiwi (2023), yang menyatakan bahwa efisiensi operasional mempengaruhi kinerja keuangan secara positif. Dalam kasus ini, mungkin terdapat faktor lain yang tidak tercakup dalam model yang mempengaruhi kinerja keuangan, atau mungkin efeknya memerlukan waktu yang lebih lama untuk termanifestasi.

Namun, Y1 (Pelayanan) menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan Y2, dengan koefisien 2,47E-05 dan t-statistik yang sangat tinggi (11,69218), menandakan bahwa peningkatan dalam kualitas layanan berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Ini mendukung temuan Rajani et al. (2023) dan Le et al. (2022) yang mengaitkan peningkatan kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih baik.

Kesimpulannya, kedua model menggarisbawahi pentingnya kualitas layanan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Namun, hasil regresi menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan investasi SDM mungkin tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kinerja keuangan dalam jangka pendek, meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kualitas layanan. Ini menegaskan kompleksitas hubungan antara operasi, SDM, layanan,

dan kinerja finansial serta pentingnya mempertimbangkan waktu dan dinamika yang lebih luas dalam mengukur dampak intervensi manajerial.

5. SIMPULAN

Penelitian ini telah secara sistematis menganalisis pengaruh efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas pelayanan dan kinerja keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dari hasil analisis regresi yang dilakukan, beberapa temuan kunci dapat disimpulkan.

Pertama, ada hubungan yang signifikan dan positif antara efisiensi operasional, khususnya dalam pengurangan tingkat kehilangan air, dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam manajemen operasional dapat langsung mempengaruhi peningkatan layanan kepada pelanggan. Ini sejalan dengan literatur yang ada dan mengukuhkan teori bahwa efisiensi operasional merupakan elemen penting dalam menyediakan layanan berkualitas.

Kedua, investasi dalam pengembangan SDM, seperti diperlihatkan melalui ratio diklat pegawai dan peningkatan kompetensi, berkontribusi positif terhadap kualitas pelayanan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset kritis yang dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif.

Ketiga, dalam kaitannya dengan kinerja keuangan PDAM, hubungan antara efisiensi operasional dan pengelolaan SDM tidak menunjukkan signifikansi statistik, menunjukkan bahwa mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi atau bahwa hasil dari investasi tersebut mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat. Namun, kualitas layanan terbukti sebagai faktor mediasi yang kuat dalam hubungan antara operasi dan SDM dengan kinerja keuangan, menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas.

Studi ini memberikan wawasan yang berharga untuk PDAM dalam merumuskan strategi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan operasi serta pengelolaan SDM. Dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas layanan, PDAM tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan pentingnya investasi dalam teknologi yang mempromosikan efisiensi operasional dan program pengembangan karyawan yang terfokus pada peningkatan kompetensi dan kepuasan kerja.

Penelitian ini memperkaya literatur dengan menyediakan bukti empiris mengenai dinamika internal PDAM dan hubungannya dengan kualitas layanan dan kinerja keuangan. Rekomendasi untuk praktik manajerial termasuk penerapan prinsip-prinsip lean management, inisiatif peningkatan keterampilan SDM, dan strategi peningkatan layanan yang berorientasi pada pelanggan. Melalui pendekatan holistik ini, PDAM dapat menavigasi tantangan operasional dan finansial dengan lebih efektif, sambil terus memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kantor PDAM Kota Pontianak, yang dengan murah hati telah menyediakan data yang sangat berharga untuk penelitian ini. Akses ke data tersebut telah memungkinkan penelitian ini untuk melakukan analisis yang mendalam dan menghasilkan wawasan yang signifikan tentang operasional dan kinerja keuangan dalam konteks penyediaan layanan air bersih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang tidak hanya memberikan dukungan dana tetapi juga sebagai institusi yang memberikan dukungan intelektual dan sumber daya yang telah sangat membantu dalam penyelesaian riset ini. Dukungan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek di bidang ekonomi dan manajemen sumber daya air.

Kedua institusi ini telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi keberhasilan penelitian ini, dan untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, M. F. A., Norhisham, S., Abudeyab, N. H. Z. I. A., Saad, N. M., Azlan, N. N. I. M., Shkuri, N. S. M., & Mohamad, A. M. (2022). Evaluating the Quality of Service of Bus Performance in Johor Bahru. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 971(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/971/1/012016>
- Ben Ammar, S., Loukil, T. M., & Keita, M. (2022). Multicriteria evaluation of pharmaceutical logistics performance: Case of Sahloul teaching hospital center pharmacy, Sousse. 2022 14th International Colloquium of Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA), 1–8. <https://doi.org/10.1109/LOGISTIQUA55056.2022.9938053>
- Cardoso, B. J., Amaral, A. R., Gaspar, A. R., & Gomes, Á. (2023). Exploring energy efficiency barriers and drivers In the Portuguese water sector. *Energy*, 284, 128725. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128725>
- Dutta, D., Vedak, C., & Joseph, V. (2024). New hire performance: identifying critical traits for hospitality industry. *Tourism Review*, 79(1), 69–84. <https://doi.org/10.1108/TR-11-2022-0565>
- Jo, J., Chadwick, C., & Han, J. H. (2024). How the human resource (HR) function adds strategic value: A relational perspective of the HR function. *Human Resource Management*, 63(1), 5–23. <https://doi.org/10.1002/hrm.22184>
- Kaushal, N., Kaurav, R. P. S., Sivathanu, B., & Kaushik, N. (2023). Artificial intelligence and HRM: identifying future research Agenda using systematic literature review and bibliometric analysis. *Management Review Quarterly*, 73(2), 455–493. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00249-2>
- Le, Y., Oka, M., & Kato, H. (2022). Efficiencies of the urban railway lines incorporating financial performance and in-vehicle congestion in the Tokyo Metropolitan Area. *Transport Policy*, 116, 343–354. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.12.017>
- Petrovska, I., Safronova, O., Mital, O., Ometsynska, N., Moroz, V., Vidomenko, O., Lebedynets, I., Shostakovska, A., Maistrenko, Y., & Nosyriev, O. (2021). Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6(13 (114)), 29–38. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.247943>
- Rajani, R. L., Heggde, G. S., Kumar, R., & Bangwal, D. (2023). Demand management approaches in services sector and influence on company performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 72(10), 2808–2837. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2022-0080>
- Rodríguez y Silva, F., & González-Cabán, A. (2016). Contribution of suppression difficulty and lessons learned in forecasting fire suppression operations productivity: A methodological approach. *Journal of Forest Economics*, 25, 149–159. <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2016.10.002>
- Shi, W., & Mena, C. (2023). Supply Chain Resilience Assessment With Financial Considerations: A Bayesian Network-Based Method. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 70(6), 2241–2256. <https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3066600>

- Vafae-Najar, A., Delshad, M. H., Pourhaji, R., Tabesh, H., & Pourhaji, F. (2023). Burnout syndrome and related factors among health team employees. *Work*, 76(4), 1493–1499. <https://doi.org/10.3233/WOR-220485>
- Vomberg, A., & Wies, S. (2022). Panel Data Analysis: A Non-technical Introduction for Marketing Researchers. In *Handbook of Market Research* (pp. 411–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_19
- Wardhani, D. K., & Supratiwi, W. (2023). Characteristics of a Good Board of Directors for Indonesian SOEs Performance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jieb.v38i1.4410>

**PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER,
DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT**

Tony Kurniadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak-Indonesia

ABSTRACT

Pemerintah sebagai *stakeholder* memegang peran penting dalam mengatur dan menjaga kokohnya pondasi perekonomian. Selain itu pemerintah juga memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah tercermin dalam berbagai regulasi untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatannya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk konsumsi pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga berperan dalam kebijakan penanaman modal pihak swasta berupa investasi. Sehingga alur dan bentuk kebijakan berupa penerimaan dan investasi swasta ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas hubungan antara pendapatan asli daerah, dana transfer serta investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan dapat memberikan gambaran berupa analisa praktis berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan dan ditabulasi. Tulisan ini juga merupakan gagasan awal dalam pengembangan penelitian penulis yang akan datang.

JEL : O11, O38, H50.

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi & IPM.*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan reflektor utama dalam melihat *outlook* perekonomian secara makro. Pertambahan output yang dapat dihasilkan dalam suatu perekonomian ini merupakan cerminan yang sering digunakan untuk melihat proses kegiatan pembangunan. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi (Putra, 2018). Negara-negara didunia berlomba-lomba melakukan rangkaian proses pembangunan guna menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mengarah kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, pembangunan ekonomi mensyaratkan peningkatan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Karena bisa saja terjadi kondisi dimana suatu perekonomian mencatat nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Istilah tersebut biasa dikenal dengan istilah pertumbuhan tanpa pembangunan (*the growth without development*) (Jaffrelot, 2015). Maka dari itu, selain memperhatikan pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan pada pembangunan yang dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur taraf hidup masyarakat melalui 3 (tiga) aspek utama, yakni Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. IPM dapat memproksikan kesejahteraan sosial masyarakat, dimana UNDP (2014) dalam Van Den Bergh & Botzen (2018) menyatakan bahwa IPM merupakan proksi terbaik

dalam menjelaskan dimensi penting dalam kesejahteraan masyarakat pada negara-negara berkembang, bahkan negara-negara miskin di dunia. Dapat kita dilihat dinegara-negara berkembang bahwa selain pertumbuhan yang tinggi, masalah sosial seperti pendidikan dan kesehatan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah negara-negara berkembang. Amartya Sen dalam Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa terdapat penekanan yang begitu jelas terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah sebagai kasus “Pertumbuhan tanpa Pembangunan”. Sehingga, penting halnya untuk mengukur faktor-faktor yang mendorong kesejahteraan masyarakat melalui IPM maupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Di Indonesia, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dinilai telah berjalan dengan baik yang terlihat dari perkembangan angka pertumbuhan maupun IPM tiap tahunnya. Namun jika kita mengulik lebih lanjut pada tiap-tiap provinsi, IPM di provinsi Kalimantan Barat secara umum masih tergolong sedang, namun dinyatakan sebagai IPM terendah ke-5 di Indonesia dan paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Kalimantan. Hal ini menjadi sebuah fenomena anomali, karena letak Provinsi Kalimantan Barat yang strategis dan ditunjang dengan potensi sumber daya yang melimpah di wilayah ini, namun masih tergolong pada IPM rendah diantara provinsi lainnya. Bahkan, jika ditarik garis tengah dalam membedakan Indonesia bagian timur dan bagian barat, Provinsi Kalimantan merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bagian barat yang termasuk dalam IPM kategori sedang/menengah. Sedangkan provinsi lain pada Indonesia bagian barat mencatat nilai IPM dengan kategori tinggi. Berbeda dengan IPM, pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat menunjukkan nilai yang cukup baik dan diatas rata-rata Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan IPM tentu perlu untuk ditemukan dan diuji secara ilmiah atas pengaruhnya. Terutama, faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan (stakeholders), guna menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan kedepan guna mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM daerahnya. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia tahun 2004, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menjalankan regulasi bagi daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk pengalihfungsian wewenang tersebut ialah diberikannya mandat bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan asli yang terdapat didaerahnya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD terdiri dari 4 (empat) pendapatan utama, yakni : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, diketahui bahwa PAD tertinggi di Kalimantan Barat terdapat di Kota Pontianak tahun 2019 sebesar Rp. 478,79 Milyar, sedangkan PAD terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2011 sebesar Rp. 8,47 Milyar. Bentuk-bentuk PAD sebagai penerimaan yang dilimpahkan di daerah merupakan sumber penerimaan yang diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerahnya. Sehingga, PAD diprediksi memiliki pengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan IPM. Manek & Badradin (2017); Silia & Harsono (2021); Yasin (2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, ternyata selama ini bentuk penerimaan dari PAD belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal yang diperlukan pemerintah daerah dalam pembangunan di daerahnya. Sehingga diberlakukan kebijakan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk membantu pembangunan daerah yang terbatas jika hanya mengharapkan PAD. Dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan tertinggi di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Ketapang tahun 2021

sebesar Rp. 2.116,58 Milyar, sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2011 sebesar Rp. 334,05 Milyar. Kondisi yang terjadi dilapangan bahkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum masih bergantung pada dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini dikenal dengan istilah flypaper effect, dimana pendapatan daerah berupa dana transfer lebih besar daripada PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya (Yacoub & Lestari, 2019). Sehingga komposisi dana transfer juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Anwar et al., 2016) dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Sisilia & Harsono, 2021; Williantara & Budiasih, 2016).

Selain intervensi pemerintah melalui komponen pendapatan yang kemudian dibelanjakan dalam bentuk pengeluaran publik, pemerintah juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendatangkan dana pihak ketiga, yakni penanaman modal atau investasi. Diketahui bahwa Investasi yang direfleksikan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tertinggi di Kalimantan Barat terdapat di Kota Pontianak tahun 2019 sebesar Rp. 7,99 Trilyun, sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2011 sebesar Rp. 450,34 Milyar. Pemerintah sebagai stakeholders memiliki peran yang penting dalam proses mendatangkan investor hingga proses persetujuan dan perizinan kegiatan investasi yang akan dilakukan dalam suatu daerah. Sehingga investasi merupakan salah satu variabel yang tak kalah penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Masiku et al., 2017) dan juga kesejahteraan bagi masyarakat daerah atas investasi yang digelontorkan (Feriyanto, 2016; Masiku et al., 2017).

Teori Peacock-Wiseman dan Hukum Wagner menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator perekonomian. Sehingga turun naiknya aktivitas ekonomi serta tercipta atau tidaknya kesejahteraan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berupa implementasi kebijakan fiskal yang diberlakukan. Kebijakan fiskal tersebut berupa pengelolaan anggaran keuangan, yakni pendapatan maupun pengeluaran yang dialkukan akan berdampak kegiatan ekonomi secara umum. Selain itu, teori-teori investasi berupa teori neo-klasik dan teori Harrod-Domar juga menyatakan peran penting investasi yang dapat diciptakan pemerintah sehingga dapat mendongkrang perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana PAD bertujuan guna memberikan kebebasan bagi daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah sendiri, dimana semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017). PAD merupakan salah satu indikator dalam melihat kemampuan fiskal daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Komposisi PAD terhadap penerimaan daerah yang besar menunjukkan semakin besar pula tanggungjawab pemerintah daerah dan dapat dikatakan telah menunjukkan kemandirian. Dan sebaliknya, dimana semakin kecil komposisi PAD

terhadap penerimaan daerah, dapat dinyatakan terjadinya ketergantungan daerah yang cukup besar terhadap pusat.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi di satu pihak adalah untuk mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di pihak lain dengan mendesentralisasikan kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Menurut Firdausy (2017) terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu wilayah, yang pertama adalah teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berkaitan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah. Proses produksi dari industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan hasilnya diekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita melalui penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut. Teori kedua yakni teori kedaerahan, teori ini sering digunakan untuk daerah perbelanjaan atau pengembangan yang dianggap paling tepat di suatu daerah. Terakhir terdapat teori daya tarik industri, dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah di Indonesia sering muncul pertanyaan mengenai jenis industri apa yang cocok untuk dikembangkan di suatu daerah.

2.2. Dana Transfer

Penyelenggaraan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukan Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran Dana Perimbangan dan Bagian Anggaran Dana Otsus dan Penyesuaian, mekanisme kerja diubah dengan menggunakan Transfer ke Daerah.

Dana transfer atau dana perimbangan pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang kemudian dialokasikan ke tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer atau perimbangan terdiri dari dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah, dana alokasi umum yang merupakan komponen terbesar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut UU No 1 Tahun 2022, Dana transfer atau yang kemudian disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Kebijakan TKD mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional serta peraturan undang-undang terkait, sejalan dengan rencana kerja pemerintah.

2.3. Investasi

Investasi ialah setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan hasil di masa depan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang, modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Peningkatan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa depan.

Mankiw (2021) mendefinisikan investasi sebagai komoditas yang dibeli untuk digunakan di masa mendatang. Lebih lanjut, mankiw menyatakan bahwa investasi meliputi barang-barang yang

dibeli dan akan digunakan untuk masa depan. Teori ekonomi mendefinisikan investasi atau investasi riil sebagai penambahan dan pembelian barang modal dan peralatan produksi, dengan tujuan untuk menambah barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Samuelson & Nordhaus, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMDN ialah kegiatan menanam modal guna melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2.4. Kesejahteraan

Secara umum, teori mengenai kesejahteraan dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert & Hahnel, 2017). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraaannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Seorang ekonom Jerman, Adolf Wagner mengemukakan teori yang lebih dikenal dengan Hukum Wagner (*Wagner's Law*). Dalam Hukum Wager, dinyatakan bahwa ukuran pemerintah akan sejalan dengan pembangunan yang dilakukan. Konsep yang sering disebut sebagai "hukum peningkatan aktivitas pemerintah" menitikberatkan pada ekspansi yang terjadi secara absolut maupun relatif dari sektor publik (termasuk pemerintah pusat maupun daerah serta perusahaan publik) sebagai dampak pertumbuhan pada sektor swasta (Lamartina & Zaghini, 2011). Pada dasarnya, Hukum Wagner menjelaskan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi. Secara luas, Hukum Wagner merujuk pada perubahan positif dalam jangka panjang antara hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sementara secara spesifik, dalam Hukum Wagner dinyatakan bahwa elastisitas dari pengeluaran pemerintah merupakan hal yang sukar untuk dipisahkan dari PDB.

Gagasan utama dibalik Hukum Wagner (Lamartina & Zaghini, 2011) adalah barang dan jasa yang diciptakan oleh pemerintah sebagai penyedia barang publik (termasuk redistribusi seperti transfer daerah) akan meningkatkan industrialisasi suatu perekonomian atau negara. Hal ini didasarkan bahwa dengan terjadinya pembangunan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, akan terjadi hal-hal seperti (Bird (1971) dalam Lamartina & Zaghini (2011)): (1) Fungsi pemerintah yang bersifat administrasi dan protektif akan tergantikan oleh aktivitas publik yang lebih privat; (2) Terdapat permintaan akan

penyediaan barang dan jasa bersifat sosial & budaya; (3) Intervensi oleh pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mengelola monopoli alami dan untuk memastikan kelancaran operasi kekuatan pasar.

Hukum Wager yang dikembangkan pada abad ke-19 tersebut, kemudian didukung oleh Keynes (1936) dalam Magazzino et al., (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor eksogen yang dapat menjadi salah satu instrument kebijakan untuk mempengaruhi pertumbuhan. Dasar dari pemikiran ini adalah pada saat terjadi The Great Depression pada tahun 1930, Keynes Sebagian mastermind dari kaum Keynesian menyerukan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai regulator perlu dilakukan sebagai Langkah mitigasi berupa kebijakan-kebijakan publik, baik fiskal maupun moneter, yang dapat diberlakukan. Kebijakan fiskal yang bertumpu pada peran pemerintah sebagai penggerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memberikan gagasan pemerintah dapat mengontrol kondisi ekonomi menuju kemaslahatan seluruh masyarakat.

Peacock and Wiseman (1961) dalam Magazzino et al (2015) menyampaikan pemikiran mengenai efek perpindahan (*displacement effect*), yang menurut mereka selama masa perang tarif pajak ditingkatkan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan, mempertahankan peningkatan pengeluaran pertahanan. Teori Wiseman-Peacock yang dikenal dengan Wiseman-Peacock Hypotesis memusatkan perhatian pada pola belanja publik yang kemudian menyimpulkan bahwa belanja publik tidak meningkat secara mulus dan terus-menerus, namun secara perlahan atau seperti langkah yang teratur namun pasti. Dasar teori ini adalah bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi dalam membayarkan pajak.

Berlandaskan dari Hukum Wagner mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, diduga bahwa belanja pemerintah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer atau Dana Perimbangan dapat merefleksikan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan erat hubungannya dengan peningkatan derajat hidup atau kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga demikian, diharapkan semakin tinggi pengeluaran pemerintah dengan meningkatnya PAD dan Dana Transfer, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu pos pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah otonom suatu daerah, PAD tak lepas dari dominasi pendapatan pajak berupa pajak daerah (Kusuma & Wirawati, 2013; Takumah & Iyke, 2017). Terjadinya perkembangan ekonomi menunjukkan penambahan total produksi yang dapat dihasilkan suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan total output produksi ini mengisyaratkan terjadinya aktivitas ekonomi yang gencar-gencarnya yang berimbas pada peningkatan pemungutan pajak oleh pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Teori Pertumbuhan Endogen yang diprakarsai oleh Romer (1990) dalam Takumah & Iyke (2017) yang menyatakan bahwa adanya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan.

Dana Transfer terbesar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan bertujuan guna membantu otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan layanan dan pada akhirnya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu komponen perhitungan besar kecilnya Dana Transfer adalah “Celah Fiskal” yang memasukan unsur PDRB perkapita didalamnya yang erat hubungannya dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Sehingga demikian selain PAD, diharapkan Dana Transfer yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan perkembangan ekonomi daerah yang ditujukan, dapat merefleksikan perkembangan ekonomi daerah dan menguji teori Hukum Wagner di Indonesia.

3. METODA PENELITIAN

Data dan argumentasi yang disusun dalam makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dan data sekunder yang relevan seperti penelitian mengenai PAD, Dana Transfer dan Investasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui IPM di Provinsi Kalimantan Barat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi

Pendapatan Asli daerah diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi yang direfleksikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PAD yang mampu dikumpulkan oleh pemerintah daerah otonom, diharapkan dapat berdampak pada perekonomian daerahnya. Adapun data PAD pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Data PAD Kab/Kota Kalbar Tahun 2011-2021 (dalam Milyar Rp)

No	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sambas	31,75	44,2	46,44	119,49	85,58	98,26	200,32	127,66	148,85	129,68	148,14
2	Bengkayang	15,46	17,89	22,82	37,59	39,46	42,68	45,59	50,53	51,96	54,41	62,81
3	Landak	20,64	29,67	33,89	85,69	46,77	57,18	124,37	78,98	92,87	104,64	97,87
4	Mempawah	22,23	26,02	41,31	60,34	54,18	65,09	71,8	75,77	87,58	98,62	96,15
5	Sanggau	35,38	43,6	61,55	82,39	83,71	93,33	151,92	117,5	117,49	117,92	129,73
6	Ketapang	43,44	64,85	131,49	110,3	121,94	134,96	168,04	190,36	195,24	231,28	291
7	Sintang	53,67	49,9	67,4	96,28	103,99	108,41	113,17	240,58	172,28	134,83	176,52
8	Kapuas Hulu	24,73	31,53	31,13	80,9	69,73	67,14	131,22	76	79,98	79,17	78,66
9	Sekadau	19,77	18,36	35,55	34,45	33,51	36,6	72,78	59,09	45,36	46,98	45,14
10	Melawi	9,76	12,28	20,17	27,2	29,94	34,13	67,2	40,84	40,58	30,87	56,17
11	Kayong Utara	8,47	55,41	11,02	17,45	13,18	10,81	36,49	27,21	28,6	39,53	34,41
12	Kubu Raya	55,58	44,2	64,28	97,41	86,47	101,31	152,02	184,53	172,84	151,01	160,89
13	Kota Pontianak	151,14	208,63	265,27	298,77	334,71	389,37	476,05	440,36	478,79	403,18	413,4
14	Kota Singkawang	35,35	38,83	51,33	90,01	98,26	103,26	132,1	130,86	166,2	154,27	175,46

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka (BPS), 2020, Diolah.

PAD terbesar terjadi di Kota Pontianak yang mencapai Rp. 413,4 Milyar (Tahun 2021) dan terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara hanya sebesar Rp. 8,58 Milyar (Tahun 2011). Kondisi PAD terbesar di Kota Pontianak menjadi wajar karena sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak memiliki sumber pendapatan yang paling besar sebagai daerah yang lebih maju dan berkembang daripada daerah lainnya. Sumber-sumber penerimaan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), pajak hiburan, pajak hotel dan restoran dengan intensitas yang cukup tinggi, pajak reklame, serta pajak-pajak lain yang membuat Kota Pontianak lebih dominan dari daerah lain karena keunggulannya sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat. Sedangkan pada Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah termuda di Kalimantan Barat, sehingga posisi PAD yang rendah dan tertinggal dari daerah lainnya yang telah berdiri terlebih dahulu. Ditambah luasnya yang hanya 3,7% dari total luas provinsi, Kayong Utara masih perlu mengejar ketertinggalannya dalam hal akumulasi PAD dibanding daerah lain di Kalimantan Barat.

PAD masing-masing daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat jika dilihat mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah di Kalimantan Barat terus menerus berusaha menggali potensi penerimaan asli dari daerahnya, dengan terus mengelola sumber-sumber penerimaan secara mandiri. Bentuk-bentuk penerimaan PAD seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Terdapat berbagai langkah yang dapat digunakan pemerintah daerah berupa kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan potensi pendapatannya, namun secara umum ada dua cara untuk memaksimalkan peningkatan PAD yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi dengan cermat agar target penerimaan dapat mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Firdausy, 2017).

Berbagai hal mungkin telah dilakukan pemerintah daerah dalam menggenjot PAD daerahnya. Bentuk-bentuk kebijakan seperti intensifikasi pajak-pajak daerah, pengelolaan piutang perpajakan daerah, updating database perpajakan daerah, pembentukan dan atau optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki, dan bentuk-bentuk kebijakan lain yang telah dilakukan. Berbagai kebijakan yang dapat berdampak pada penerimaan asli daerah ini merupakan langkah-langkah yang baik dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upayanya mencapai kondisi otonomi yang ideal dan kemandirian fiskal daerahnya.

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya (Sillia & Harsono, 2021). Menurut Yasin (2020), PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Bahkan, tingginya penerimaan PAD bagi pemerintah daerah merefleksikan semakin baiknya kemandirian fiskal daerah tersebut (Manek & Badrudin, 2016). Seperti pendapat Baldrice (2017) dalam Sillia & Harsono (2021) yang menyatakan bahwa sektor PAD memegang peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu bentuk penerimaan daerah, PAD dapat digunakan untuk membiayai program mandiri daerah seperti pengentasan kemiskinan, beasiswa bagi keluarga yang membutuhkan hingga penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan. Semakin baiknya kualitas PAD pemerintah daerah, maka kemandirian daerah dalam menjalankan pembangunan akan semakin memadai pula.

4.2. Peranan Dana Perimbangan terhadap Pembangunan Ekonomi

Dana Perimbangan diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi yang direfleksikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi Dana perimbangan atau dana transfer yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, diharapkan dapat berdampak pada perekonomian daerahnya. Adapun data dana transfer pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Data Dana Perimbangan Kab/Kota Kalbar Tahun 2011-2021 (dalam Milyar Rp)

No Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Sambas	651,39	749,77	857,72	912,72	997,11	554,51	1.380,65	1.425,14	1.513,53	1.377,70	1.482,96
2 Bengkayang	429,27	494,18	573,79	617,48	701,94	879,58	986,49	866,77	965,19	865,63	884,36
3 Landak	508,27	590,14	668,67	718,44	793,61	989,58	990,67	989,81	982,05	974,26	1.079,33
4 Mempawah	431,02	474,1	535,69	578,06	700,31	871,43	839,57	874,15	856,88	788,62	815,18
5 Sanggau	631,36	736,95	830,92	912,44	921,34	1.057,56	1.181,38	1.173,27	1.393,87	1.187,28	1.359,79
6 Ketapang	855,41	991,16	1.145,30	1.313,09	1.393,65	1.693,65	1.765,08	1.810,34	1.983,29	1.838,60	2.116,58
7 Sintang	689	780,05	924,95	1.003,35	1.146,46	1.496,78	1.699,19	1.600,29	1.651,85	1.592,77	1.643,14
8 Kapuas Hulu	758,23	817,43	958,42	1.028,09	1.109,07	1.516,82	1.516,92	1.530,82	1.657,79	1.478,33	1.569,06
9 Sekadau	366,94	448,05	494,05	516,6	536,88	707,5	738,93	751,25	737,49	757,83	731,99
10 Melawi	419,84	478,85	592,66	720,28	747,73	876,32	944,48	943,69	1.039,72	714,36	960,88
11 Kayong Utara	334,05	378,22	431,2	470,61	518,41	624,62	683,89	636,57	688,27	635,17	751,36
12 Kubu Raya	568,78	656,35	774,98	841,72	891,95	1.135,28	1.142,22	1.277,09	1.227,09	965	1.197,24
13 Kota Pontianak	542,39	659,55	699,88	727,27	731,74	895,54	913,21	959,31	1.002,55	896,32	912,75
14 Kota Singkawang	368,56	436,39	517,7	539,31	554,51	641,27	642,41	659,51	664,59	582,92	606,28

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka (BPS), 2020, Diolah.

Dana Perimbangan terbesar terjadi di Kabupaten Ketapang yang mencapai Rp. 2,11 Trilyun (Tahun 2021) dan terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara hanya sebesar Rp. 334,05 Milyar (Tahun 2011). Kabupaten Ketapang mendapatkan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan alokasi yang cukup besar, hal ini dikarenakan selain merupakan daerah terluas di Provinsi Kalimantan Barat, celah fiskal sebagai salah satu komponen dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) juga menjadi pendorong besarnya nilai dana transfer di Kabupaten Ketapang. Penggunaan dana transfer di Kabupaten Ketapang dioptimalkan guna menuntaskan agenda pembangunan daerah, sekaligus memperkuat fondasi bagi rencana-rencana pembangunan Kabupaten Ketapang di masa yang akan datang. Sedangkan dana transfer terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara, sama halnya seperti yang telah dijelaskan diatas, berbagai faktor pendukung rendahnya pembangunan di daerah ini salah satunya karena daerah termuda dan pemekaran dari Kabupaten Ketapang, sehingga fiskal daerah yang relatif rendah sangat memungkinkan terjadi di daerah ini.

Dana Perimbangan masing-masing daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap penerimaan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau dikenal dengan fenomena Flypapper effect. Terjadinya flypaper effect ini dikarenakan pemerintah daerah terlalu menggantungkan proksi dana transfer atau dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah baik dalam belanja modal ataupun untuk pembangunan daerah di tiap tahunnya dibandingkan PAD nya.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus serta Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kemudian dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk setiap jenis transfer kepada Daerah disertai rincian alokasi tiap daerah.

Guntara (2014) dalam Sisilia & Harsono (2021) menyatakan bahwa salah satu komponen dana perimbangan yakni DAU berguna dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur disetiap daerah sehingga diharapkan terjadinya pemerataan pertumbuhan di daerah. Menurut Wiliantara & Budiasih (2016), secara teori komponen dana perimbangan lain berupa DAK, ditujukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai belanja pemerintah daerah yang bersifat khusus, seperti belanja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup. Adapun tujuan alokasi belanja tersebut ialah meminimalkan ketidakmerataan infrastruktur publik antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Bantuan pemerintah pusat memang sangat diperlukan dalam menggenjot perekonomian daerah, terutama pada daerah yang sedang berkembang dan belum dapat menggantungkan sumber pendapatan penuh pada PAD. Karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peran anggaran negara sangat penting dan krusial. Oleh karena itu desain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan, dimana didalamnya telah termasuk pada transfer daerah. Sehingga demikian, dana perimbangan atau dana transfer akan sangat berguna dan membantu daerah menuju kondisi optimal pembangunan.

4.3. Peran Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi

Investasi diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi yang direfleksikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi investasi yang masuk dalam suatu daerah, diharapkan dapat berdampak pada perekonomian daerahnya. Adapun data investasi pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Data PMTB Kab/Kota Kalbar Tahun 2011-2021 (dalam Juta Rp) ADHB

No	Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sambas	2.535.591	2.743.266	2.808.565	3.116.007	3.307.116	3.372.463	3.411.632	3.442.160	3.447.660	3.368.402	3.520.647
2	Bengkayang	1.202.348	1.279.965	1.291.747	1.414.458	1.483.666	1.512.622	1.534.381	1.578.960	1.597.009	1.572.569	1.651.043
3	Landak	1.328.331	1.417.137	1.423.126	1.535.182	1.585.928	1.607.609	1.650.888	1.676.246	1.709.491	1.694.086	1.725.788
4	Mempawah	844.922	907.899	933.398	971.409	1.020.281	1.062.350	1.087.361	1.133.332	1.208.702	1.220.508	1.265.483
5	Sanggau	3.258.304	3.483.723	3.525.535	3.712.873	3.957.521	4.062.916	4.112.421	4.187.206	4.264.752	4.080.219	4.117.899
6	Ketapang	3.589.404	3.790.809	3.806.986	4.461.706	5.464.092	5.471.824	5.676.221	5.733.397	5.961.146	5.603.468	5.665.145
7	Sintang	2.430.660	2.607.809	2.623.320	2.881.464	3.021.144	3.082.442	3.182.336	3.268.902	3.312.430	3.202.870	3.299.596
8	Kapas Hulu	1.521.640	1.595.648	1.612.954	1.750.021	1.825.311	1.861.729	1.921.143	1.953.625	1.971.835	1.905.215	2.002.192
9	Sekadau	889.870	944.150	983.381	1.052.788	1.133.647	1.192.474	1.246.388	1.313.575	1.362.893	1.340.422	1.415.268
10	Melawi	661.877	713.851	720.830	765.984	819.353	872.665	867.779	917.059	936.315	926.213	981.455
11	Kayong Utara	450.343	489.996	526.859	567.547	611.971	644.036	670.249	699.344	725.472	700.959	737.478
12	Kubu Raya	3.826.371	4.226.937	4.456.796	4.888.496	5.263.155	5.411.247	5.657.504	5.942.343	6.119.345	6.006.758	6.324.709
13	Kota Pontianak	30.026.171	32.320.292	33.044.477	36.145.685	38.205.249	38.402.217	39.297.728	40.474.310	41.406.838	40.933.571	42.770.905
14	Kota Singkawang	1.620.195	1.765.206	1.908.269	2.080.799	2.281.886	2.350.957	2.441.742	2.535.057	2.628.677	2.520.680	2.652.924

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka (BPS), 2020.

PMTB terbesar terjadi di Kota Pontianak yang mencapai Rp. 42,7 Triliun (Tahun 2021) dan terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara hanya sebesar Rp. 450 Milyar (Tahun 2011). Sama seperti yang telah dijelaskan diatas, Kota Pontianak memiliki keunggulan sebagai ibukota provinsi, yang mendatangkan investasi yang cukup besar di daerah ini. Sebagai sebuah ibukota dengan padatnya mobilitas, investasi dalam bidang penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa tentunya sangat berkembang pesat di kota ini. Berbanding terbalik dengan Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kabupaten termuda sehingga iklim investasi belum terlalu terbangun dengan baik di daerah ini.

PMTB masing-masing daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat terus meningkat setiap tahun, hal ini mengindikasikan iklim investasi di Kalimantan terus meningkat dari waktu ke waktu. Investasi akan mendatangkan multiplier effect bagi daerah, berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan hingga membantu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi berupa penanaman modal yang tinggi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, yang mana kemudian akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi juga akan memperkuat iklim bisnis. Investasi atau penanaman modal yang dilakukan akan meningkatkan dan menumbuhkan bisnis-bisnis baru seperti UMKM, yang kemudian dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi investasi, diharapkan pembangunan ekonomi dapat semakin memperkokoh pondasi perekonomian dan terus bergerak maju.

Salah satu teori dalam membahas investasi ialah teori neo klasik, dimana teori ini berpendapat bahwa PMA memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara tuan rumah. Fakta menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke negara tuan rumah mendorong modal domestik untuk menggunakannya untuk berbagai bisnis. Teori investasi menurut Harrod Domar ialah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat investasi, dimana semakin tinggi tingkat investasi semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai (Sukirno, 2015).

Feriyanto (2016) menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi, khususnya pada IPM. Menurutnya pemerintah daerah harus terus melakukan perbaikan iklim

investasi agar investor dan jumlah investasi semakin meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta tenaga kerja yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam memperbaiki iklim investasi. Penanaman modal atau investasi yang baik juga akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan serta memperkuat kemandirian perekonomian daerah.

4.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhalisan dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat diartikan bahwa indikator pembangunan ekonomi mengalami kenaikan. Adapun data pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. Data Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Kalbar Tahun 2011-2021

No Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Sambas	5,80	5,90	6,17	5,4	4,78	5,24	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,37
2 Bengkayang	5,65	5,87	5,9	4,02	3,96	5,15	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33
3 Landak	6,90	5,42	5,2	4,93	5,11	5,28	5,17	4,92	4,88	-0,71	4,89
4 Mempawah	4,86	4,06	5,44	6	5,6	5,99	5,87	5,76	5,78	0,18	4,1
5 Sanggau	4,61	6,03	5,98	3,26	3,15	5,34	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19
6 Ketapang	7,98	4,65	4,72	2,76	5,53	7,97	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23
7 Sintang	5,45	5,60	6,47	5,36	4,65	5,28	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,8
8 Kapuas Hulu	4,56	4,75	5,23	3,98	4,67	5,28	5,39	4,66	3,8	-2,43	4,43
9 Sekadau	5,73	6,21	6,52	6,09	5,75	5,93	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31
10 Melawi	6,54	6,22	4,85	4,73	4,61	4,75	4,7	5,25	4,41	-1,11	4,54
11 Kayong Utara	5,93	5,78	5,25	5,65	5,03	5,98	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59
12 Kubu Raya	6,51	6,61	6,49	6,37	6,21	6,37	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18
13 Kota Pontianak	5,88	7,77	7,83	5,94	4,84	5,08	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,6
14 Kota Singkawang	6,46	6,64	6,6	6,61	6,18	5,17	5,38	4,64	4,41	-2,51	4,82

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka (BPS), 2020.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami trend fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,7% setiap tahunnya. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata masih dibawah 5%. Hal ini terjadi diduga karena perekonomian global sedang menuju perbaikan pasca pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat semakin baiknya pertumbuhan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Perekonomian global memang sedang mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, dengan semakin meningkatnya kepercayaan produsen dan konsumen, dimana investasi meningkat diiringi dengan permintaan barang dan jasa juga meningkat.

Selain pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi reflektor pembangunan ekonomi, sumber daya manusia juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat efisiensi dan produktivitas. Selain untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, Morse (2023) juga menyatakan bahwa IPM dapat sebagai tolak ukur kualitas kehidupan (*quality of life*) dan kesejahteraan (*well-being*) negara-negara berkembang. Adapun data IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. Data IPM Kab/Kota Kalbar Tahun 2011-2021

No Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Sambas	60,57	61,53	62,47	63,28	64,14	64,94	65,92	66,61	67,02	67,03	67,1
2 Bengkayang	62,94	63,42	63,99	64,4	64,65	65,45	65,99	66,85	67,57	67,87	68,04
3 Landak	61,67	62,38	62,72	63,59	64,12	64,58	64,93	65,45	65,96	65,98	66,21
4 Mempawah	59,95	60,75	62,09	62,78	63,37	63,84	64	64,9	65,5	65,74	66,03
5 Sanggau	60,96	61,39	61,72	62,06	63,05	63,9	64,61	65,15	65,67	65,77	66,2
6 Ketapang	61,47	62,04	62,85	63,27	64,03	64,74	65,71	66,41	67,16	67,17	67,43
7 Sintang	60,8	61,66	62,64	63,19	64,18	64,78	65,16	66,07	66,7	66,88	66,93
8 Kapuas Hulu	60,83	61,85	62,63	62,9	63,73	63,83	64,18	65,03	65,65	65,69	65,75
9 Sekadau	59,76	60,14	61,02	61,98	62,34	62,52	63,04	63,69	64,34	64,76	64,93
10 Melawi	61,18	61,58	62,27	62,89	63,78	64,25	64,43	65,05	65,54	65,55	65,87
11 Kayong Utara	56,58	57,53	57,92	58,52	60,09	60,87	61,52	61,82	62,66	62,68	62,9
12 Kubu Raya	62,56	63,42	63,94	64,52	65,02	65,54	66,31	67,23	67,76	67,95	68,16
13 Kota Pontianak	75,08	75,55	75,98	76,63	77,52	77,63	77,93	78,56	79,35	79,44	79,93
14 Kota Singkawang	67,5	68,54	69,13	69,84	70,03	70,1	70,25	71,08	71,72	71,94	72,11

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka (BPS), 2020.

IPM di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perbaikan tersebut berupa peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat, hingga tersedianya akses pendidikan maupun kesehatan yang mudah. Bahkan, 2 Kota di Kalimantan Barat telah berhasil masuk kedalam kategori IPM tinggi, sedangkan Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Barat masih tergolong dalam kategori IPM sedang. Hal ini membuktikan pembangunan ekonomi dan manusia di Kalimantan Barat telah terjadi dengan baik dan akan terus diupayakan lebih baik lagi kedepannya.

Tabel 6. Korelasi Antar Variabel

Variabel	Korelasi
PAD & PE	-0,390
PAD & IPM	0,957
D. Transfer & PE	-0,335
D. Transfer & IPM	0,965
Investasi & PE	-0,420
Investasi & IPM	0,980

Sumber : Data Olahan, 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar variabel, pertumbuhan PAD, Dana Transfer dan Investasi memiliki hubungan yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan positif terhadap IPM. Jika dilihat dari nilai korelasi, PAD, Dana Transfer dan Investasi memiliki kekuatan hubungan yang moderat terhadap pertumbuhan ekonomi ($>-.30 - 0,49$), serta memiliki kekuatan hubungan yang mendekati sempurna terhadap pertumbuhan ekonomi ($>0,90$). Hal ini dapat terjadi karena diduga data pertumbuhan ekonomi terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan variabel lain yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga korelasi atau hubungan variabel lebih kuat mengarah ke pembangunan ekonomi dan manusia yang direfleksikan oleh IPM, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

5. SIMPULAN

Kenaikan PAD, Dana Perimbangan dan Investasi di Kalimantan Barat searah atau bergerak linier dengan Kenaikan IPM, namun tidak dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti secara deskriptif atau pengamatan data langsung, variabel-variabel tersebut memiliki hubungan atau arah yang negatif terhadap pertumbuhan dan positif terhadap IPM. Adapun jika digali lebih lanjut, hanya

Kabupaten Mempawah & Sanggau yang mencatat pertumbuhan positif di masa pandemi (masing-masing sebesar 0,18% dan 0,71%), disaat Kabupaten/Kota lain mengalami resesi.

Berdasarkan klasifikasi IPM, Per tahun 2021 tidak terdapat Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dengan IPM rendah (<60), dimana seluruh Kabupaten di Kalimantan Barat berada pada kategori IPM sedang (60-70), sedangkan 2 Kota yakni Kota Pontianak dan Kota Singkawang telah masuk dalam golongan kategori IPM tinggi (70-80). Hal ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi sedang gencar-gencar dilakukan di Kalimantan Barat, dimana seluruh kabupaten/kota telah keluar dari zona IPM rendah dan berangsur-angsur menuju IPM tinggi maupun sangat tinggi.

Terakhir, ditemukan bahwa masih terjadi ketimpangan antara PAD dan Dana Perimbangan, sehingga terjadi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer pusat dan terjadinya fenomena *Flypaper effect* (kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan pembiayaan untuk belanja daerah lebih tinggi berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri).

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, M., & Hahnel, R. (2017). 1. Traditional Welfare Theory. *Quiet Revolution in Welfare Economics*, 13–32. <https://doi.org/10.1515/9781400887057-005/HTML>
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Dau, Dak, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 218–232. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12377>
- BPS. (2021). Istilah - oleh Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=28&Istilah_sort=keyword_ind.desc
- Feriyanto, N. (2016). The effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i1.537>
- Firdausy, M.C. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaffrelot, C. (2015). What Gujarat Model? - Growth without Development - And with Socio-Political Polarisation. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 38(4), 820–838. <https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1087456>
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544–560.
- Lamartina, S., & Zaghini, A. (2011). Increasing Public Expenditure: Wagner's Law in OECD Countries. *German Economic Review*, 12(2), 149–164. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0475.2010.00517.X>
- Magazzino, C., Giolli, L., & Mele, M. (2015). Wagner's law and peacock and wiseman's displacement effect in european union countries: A panel data study. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 812–819. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijefi/issue/31970/352191>
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Mankiw, G.N. (2021). *Principles of Macroeconomics 9th Edition*. Boston L Cengage Learning.

- Masiku, Y., Rochaida, E., & Wijaya, A. (2017). Pengaruh Investasi Pertambangan dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Barat. *FORUM EKONOMI*, 19(1). <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2116>
- Morse, S. (2023). Quality of Life, Well-Being and the Human Development Index: A Media Narrative for the Developed World?. *Social Indicators Research*, 170, 1035–1058. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03230-6>
- Samuelson, P.A. & Nordhaus W.D. (2015). *Makro Ekonomi : Edisi Keempat Belas*. Jakarta : Erlangga.
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Takumah, W., & Iyke, B. N. (2017). The links between economic growth and tax revenue in Ghana: An empirical investigation. *International Journal of Sustainable Economy*, 9(1), 34–55. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2017.080856>
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development - 12th Edition*. In Pearson Education, Inc.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070–2070.
- Van Den Bergh, J. C., & Botzen, W. W. (2018). Global impact of a climate treaty if the Human Development Index replaces GDP as a welfare proxy. *Climate Policy*, 18(1), 76-85. DOI: 10.1080/14693062.2016.1227954
- Yacoub, Y., & Lestari, N. (2019). Flypaper Effect in Indonesia: The Case of Kalimantan. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 4(4), 116–121. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2019.4.4(1))
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465-472. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung : Implikasi Pada Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Thesis, Bandung: Pascasarjana ITB
- Jhingan, ML. (2008). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMANDIRIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI BENGKAYANG

Sabinus Beni¹, Veneranda Rini Hapsari², Benedhikta Kikky Vuspitasari³

Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuna, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkayang. Latar belakang penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial seperti PKH. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana PKH dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat. Masalah utama yang diidentifikasi adalah sejauh mana bantuan yang diberikan oleh PKH mampu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga dan sejauh mana keluarga penerima manfaat dapat mengelola sumber daya tersebut secara mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Responden penelitian melibatkan keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pangan, serta membantu dalam pembentukan usaha kecil. Meskipun demikian, tantangan masih muncul terkait pengelolaan dan pemanfaatan bantuan secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan PKH dan memberikan panduan untuk peningkatan efektivitas program serupa di masa depan, khususnya di konteks geografis seperti Kabupaten Bengkayang.

Keywords: *Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan, Perbatasan*

1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial. Di Kabupaten Bengkayang, program ini telah menjadi bagian integral dari strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui PKH, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Meskipun adanya PKH, masih terdapat permasalahan yang perlu dievaluasi. Pertama, sejauh mana bantuan PKH dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat. Kedua, sejauh mana keluarga penerima manfaat mampu mengelola sumber daya yang diterimanya secara mandiri. Adanya permasalahan ini menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap dampak nyata PKH terhadap kemandirian keluarga.

Rumusan masalah utama penelitian ini adalah sejauh mana dampak positif PKH terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkayang. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang diterimanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana PKH dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkayang.

Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program ini.

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif, menitikberatkan pada wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi keluarga penerima manfaat terhadap PKH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dampak program serupa di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bengkayang.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan PKH di Kabupaten Bengkayang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak program, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas PKH. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan dan implementasi program serupa di masa depan, terutama di konteks geografis yang serupa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, evaluasi terhadap program-program bantuan sosial seperti PKH menjadi krusial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak PKH terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan program serupa di masa depan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial (Zasri et al., 2020). Penerapan program ini memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pangan. Meskipun begitu, untuk memahami secara menyeluruh dampak jangka panjang dan memaksimalkan potensi perbaikan, diperlukan evaluasi terus-menerus.

Studi terdahulu (Norsanti & Safitri, 2019) menggambarkan bahwa PKH berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan di kalangan keluarga penerima manfaat. Bantuan finansial dari program ini mendorong keluarga untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan formal. Bantuan finansial mendukung biaya perawatan kesehatan, meminimalkan risiko penyakit, dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Ini mencerminkan pentingnya aspek kesehatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (Putra & Pujiyanto, 2020).

Berdasarkan temuan penelitian, PKH juga berhasil meningkatkan akses keluarga terhadap pangan yang bergizi (Beni et al., 2019). Dengan dukungan finansial, keluarga dapat memperoleh pangan berkualitas, mengurangi tingkat malnutrisi, dan meningkatkan status gizi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Meskipun temuan studi sebelumnya menunjukkan dampak positif PKH, penting untuk menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan. Dampak jangka panjang perlu dipahami lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Evaluasi terus-menerus dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat (Rohima et al., 2018).

Evaluasi yang berkesinambungan juga memberikan peluang untuk perbaikan program. Dengan memahami tantangan dan keberhasilan yang teridentifikasi, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan PKH agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata keluarga (Kementerian Sosial, 2018). Perbaikan ini dapat melibatkan peningkatan mekanisme distribusi, peningkatan jumlah bantuan, atau penyediaan program pelatihan untuk pemanfaatan optimal bantuan. Secara keseluruhan, PKH telah membuktikan diri sebagai inisiatif yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, tantangan dan

peluang perbaikan tetap hadir. Evaluasi terus-menerus menjadi kunci untuk memahami dampak jangka panjang, memaksimalkan efektivitas, dan memastikan bahwa PKH terus berperan sebagai pilar penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Indonesia (Beni et al., 2018).

2.2. Kesejahteraan Keluarga

Teori kesejahteraan keluarga yang diperkenalkan oleh (Rosni, 2012) memberikan landasan konseptual yang kaya untuk memahami dimensi-dimensi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Teori ini mengenali beberapa elemen kunci, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pangan, sebagai komponen utama dalam penilaian kesejahteraan keluarga. Elemen-elemen ini dianggap sebagai indikator yang saling terkait dan saling mempengaruhi, menciptakan suatu kerangka kerja holistik dalam memahami kondisi kesejahteraan keluarga (Kusumaningrum, 2014).

1) Dimensi Ekonomi

Aspek ekonomi dalam teori ini menyoroti pentingnya stabilitas finansial dan akses terhadap sumber daya ekonomi sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan finansial diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap sumber daya ekonomi yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan landasan ekonomi yang lebih stabil (Susianti, 2019).

2) Dimensi Pendidikan

Teori kesejahteraan keluarga mengakui pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Melalui PKH, peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan anak-anak keluarga penerima manfaat memiliki peluang yang setara dalam mencapai potensi penuh mereka. Dukungan finansial dari program ini membantu mengatasi hambatan ekonomi yang mungkin menghambat akses Pendidikan (Utomo, 2023).

3) Dimensi Kesehatan

Aspek kesehatan dalam teori ini menekankan bahwa kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari kondisi kesehatan anggota keluarga. PKH, dengan menyediakan bantuan finansial, memberikan akses lebih besar terhadap layanan kesehatan yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Dengan demikian, program ini membantu menciptakan landasan kesehatan yang lebih kuat di dalam keluarga (Mulyana & Nasution, 2019).

4) Dimensi Pangan

Teori kesejahteraan keluarga juga mengakui bahwa akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui PKH, bantuan finansial memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, mengurangi risiko malnutrisi, dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga (Mulyana & Nasution, 2019).

2.3. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Bantuan Sosial

Studi oleh (Wibhisana, 2021) menekankan peran penting bantuan sosial, khususnya dalam konteks PKH, dalam memberdayakan ekonomi keluarga. Bantuan finansial dari program ini tidak hanya memberikan akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan peluang bagi keluarga untuk mengembangkan inisiatif ekonomi mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi ini dihasilkan dari kemampuan keluarga untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya finansial dengan lebih baik (Prasetyo, 2015).

Penelitian oleh (Beni & Manggu, 2020) mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi program bantuan sosial, termasuk PKH. Salah satu tantangan yang signifikan adalah pengelolaan dan pemanfaatan bantuan secara optimal oleh penerima manfaat. Hal ini menekankan perlunya perhatian khusus dalam perancangan program, termasuk strategi edukasi dan pendampingan,

untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar memberikan dampak yang diinginkan (Hapsari et al., 2020).

Pendekatan kualitatif dalam evaluasi program sosial, seperti yang diungkapkan oleh (Widiyarini, 2018), memberikan kemampuan untuk memahami dampak program secara mendalam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami pengalaman dan persepsi keluarga penerima manfaat PKH. Pendekatan ini memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual terhadap dampak program, membantu mengidentifikasi area keberhasilan dan potensi perbaikan (Vuspitasari et al., 2021).

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemandirian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkayang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan konteks sosial keluarga secara holistik. Populasi penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Bengkayang. Sampel penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi dalam hal karakteristik sosial-ekonomi dan geografis. Jumlah sampel ditentukan dengan prinsip kejenuhan, di mana penelitian terus dilakukan hingga data yang diperoleh sudah mencapai kejenuhan atau munculnya pola yang konsisten.

Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota keluarga penerima manfaat PKH untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka dengan program ini. Pertanyaan akan difokuskan pada aspek kemandirian keluarga, peningkatan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya. Observasi langsung dilakukan untuk memahami konteks tempat tinggal keluarga, gaya hidup, dan pola pengeluaran. Observasi juga mencakup interaksi keluarga dengan bantuan yang diterima dari PKH. Dokumen terkait PKH, seperti laporan pelaksanaan program dan data penerima manfaat, akan dianalisis untuk mendapatkan konteks dan pemahaman tambahan.

Proses Analisis Data, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Langkah-langkah analisis melibatkan pengkodean terbuka, pembentukan tema, dan interpretasi hasil. Pemahaman mendalam tentang dampak PKH terhadap kemandirian keluarga akan dihasilkan dari integrasi temuan kualitatif. Penelitian ini akan memastikan aspek-aspek etika penelitian, seperti kerahasiaan informasi, partisipasi sukarela, dan persetujuan informan. Identitas informan akan dirahasiakan, dan partisipasi mereka akan didasarkan pada persetujuan informir yang dijelaskan secara rinci.

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi data, yaitu penggunaan beberapa sumber data dan metode pengumpulan data. Reliabilitas akan diperhatikan melalui keterlibatan peneliti yang konsisten, pencatatan yang teliti, dan penggunaan kode analisis yang konsisten. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan utama, didukung oleh kutipan langsung dari partisipan dan analisis mendalam. Presentasi hasil juga akan mempertimbangkan implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan program PKH di Kabupaten Bengkayang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berikut ini dapat disajikan hasil temuan penelitian pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bengkayang:

1. Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses keluarga penerima manfaat terhadap pendidikan, kesehatan,

dan pangan. Bantuan yang diberikan secara finansial telah mendorong keluarga untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan, dan meningkatkan aspek pangan dalam keluarga.

2. Peningkatan Kemampuan Ekonomi

Penerima manfaat PKH melaporkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi keluarga mereka. Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk membantu pembentukan usaha kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini mencerminkan kontribusi PKH dalam membuka peluang ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

3. Tantangan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan

Meskipun terdapat dampak positif, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi keluarga penerima manfaat PKH. Terdapat kesulitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan secara optimal. Beberapa keluarga mengalami kendala dalam merencanakan dan mengalokasikan dana bantuan dengan bijak, yang memunculkan kebutuhan akan pendampingan atau pelatihan pengelolaan keuangan.

Pembahasan berdasarkan Teori Kesejahteraan Keluarga

1. Dimensi Ekonomi

Teori kesejahteraan keluarga menyoroti pentingnya dimensi ekonomi dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori tersebut, di mana PKH berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut memberikan akses tambahan terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

2. Dimensi Pendidikan

Aspek pendidikan sebagai salah satu dimensi kesejahteraan keluarga juga terlihat dalam penelitian ini. PKH memberikan insentif finansial yang mendorong keluarga untuk menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan anak-anak mereka. Peningkatan akses pendidikan ini dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3. Dimensi Kesehatan dan Pangan

PKH juga berkontribusi pada dimensi kesehatan dan pangan keluarga. Bantuan finansial membantu keluarga memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan dan meningkatkan akses terhadap pangan yang sehat. Namun, penting untuk mencatat bahwa tantangan masih ada, dan perlu adanya strategi tambahan untuk memastikan pengelolaan sumber daya ini secara optimal.

Rekomendasi

Penguatan Pendampingan: Melihat tantangan dalam pengelolaan bantuan, disarankan untuk memperkuat program pendampingan. Pelatihan pengelolaan keuangan dan pembentukan usaha kecil dapat menjadi bagian dari strategi ini. Evaluasi Periodik: Perlunya evaluasi periodik terhadap program PKH untuk memastikan keberlanjutan dampak positif. Ini melibatkan pemantauan efektivitas bantuan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan evaluasi. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau pelaku usaha lokal, dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan mengatasi hambatan ekonomi.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa PKH berkontribusi pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkayang. Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan bantuan perlu diperhatikan untuk memaksimalkan dampak positif. Implikasi kebijakan dan rekomendasi ini diharapkan dapat membantu perbaikan program PKH dan memberikan panduan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkayang, khususnya KPM PKH di Kecamatan Lumar atas partisipasinya dan terlaksananya penelitian ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosiokonsepsia*, 9(2), 162–170.
- Beni, S., Manggu, B., & Sadewo, Y. D. (2019). Counseling Of Family Financial Management Literacy Program Keluarga Harapan Beneficiaries. *Diseminasi*, 1(2), 83–88.
- Beni, S., Manggu, B., & Sensusiana. (2018). Modal Sosial Sebagai Suatu Aspek Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *JURKAMI*, 3(1), 8–24. <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/341>
- Hapsari, V. R., Usman, U., & Ewid, A. (2020). Pendampingan Peluang Kewirausahaan Pada Masyarakat Dusun Sekinyak Dalam Bidang Pariwisata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v3i1.629>
- Kementerian Sosial, R. (2018). *Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha* (K. S. R. I. Program Keluarga Harapan (ed.); 1st ed.). Kementerian Sosial.
- Kusumaningrum, S. P. (2014). Identifikasi Peran Modal Sosial Koperasi Dalam Mendorong Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sidogiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1–94.
- Mulyana, M., & Nasution, R. T. S. (2019). Pemberdayaan Industri Kecil Permen Kelapa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4(1), 51–60. <http://ejournal.ipdn.ac.id/IPDPP/article/view/848>
- Norsanti, N., & Safitri, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v4i1.2335>
- Prasetyo. (2015). *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Wordpress.Com. <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>
- Putra, G. W., & Pujiyanto, P. (2020). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v5i1.3898>
- Rohima, S., Muklis, & Marisa, F. (2018). Inisiasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Penjahit Di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 28.
- Rosni. (2012). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 1–8.
- Susianti. (2019). Pemberdayaan Wanita Di Sektor Informal Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Keluarga: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kelitbangan*, 7(1), 31–47. <http://journalbalitbangdalamampung.org>
- Utomo, H. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dalam Menumbuhkan Minat Mahasiswa

- Menjadi Wirausahawan. *Journal on Education*, 05(03), 8211–8221.
- Vuspitasari, B. K., Deffrinica, D., & Siahaan, S. V. B. (2021). Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 25(1), 181–187. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1132>
- Wibhisana, Y. P. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 31–45. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1741/pdf>
- Widiyarini. (2018). Mengurangi Pengangguran Terdidik Dengan Meningkatkan Semangat Kewirausahaan Melalui Pelatihan Jasa Laundry. *Jurnal Sosio E-Kons*, 10(3), 199–206.
- Zasri, Y. Y., Abdullah, A., Hidayat, M., & Ismail, N. (2020). Analisa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Perubahan Perilaku Kesehatan Ibu Anak (KIA) pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(2), 1–7. <http://202.4.186.66/JIK/article/view/19574%0Ahttp://202.4.186.66/JIK/article/download/19574/13467>

INVESTIGASI TEORI HECKSCHER-OHLIN DAN HIPOTESIS LINDER PADA NILAI EKSPOR INDONESIA

Yanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

Teori H-O (Heckscher-Ohlin) yang mendasari teori perdagangan internasional adalah adanya kesamaan selera di antara kedua negara. Hal inilah yang dikritik oleh ilmuwan Swedia, Staffan Brensstatm Linder yang mengemukakan teori Linder dimana selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk. Oleh karena itu teori Linder mencerminkan sisi permintaan suatu produk sedangkan teori H-O mencerminkan sisi penawaran suatu produk. Faktor sumber daya dan intensitas faktor mendorong suatu negara untuk memproduksi barang yang diminati sehingga muncul ekspor. Oleh karena itu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pangsa ekspor Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data panel tahunan 2001 sampai 2022 dengan 5 mitra dagang utama, yaitu Thailand, Singapura, Filipina, Singapura dan Vietnam. Data ekspor bersumber dari publikasi BPS; sementara data GDP, GDP per kapita, kurs, dan inflasi adalah bersumber dari publikasi Bank Dunia atau situs <https://data.worldbank.org/indicator/>. Data jarak antar ibukota negara diperoleh dari situs <https://www.distance.to>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel GDP (Y_j), GDP per kapita (y_j), jarak (D_{ij}), perbedaan GDP per kapita (dy) dan derajat keterbukaan (T/Y) adalah signifikan mempengaruhi ekspor Indonesia ke mitra dagang; sementara pengaruh variabel nilai tukar (ER_j) dan inflasi (IHK_j) adalah tidak signifikan.

Kata kunci: ekspor, Teori H-O, Hipotesis Linder

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perdagangan Indonesia telah menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor yang telah berkontribusi terhadap peningkatan ini. Salah satunya adalah ekonomi Indonesia yang terus berkembang, didukung oleh populasi yang besar dan berkembang serta sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, kebijakan perdagangan yang proaktif dan upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra telah membantu dalam meningkatkan perdagangan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan berbagai program untuk memfasilitasi ekspor dan impor, serta mengurangi hambatan perdagangan, seperti penyederhanaan prosedur bea cukai dan perbaikan infrastruktur logistik. Peningkatan konektivitas global dan kemajuan teknologi informasi juga telah berdampak positif terhadap perdagangan Indonesia. Kemudahan akses ke pasar internasional melalui platform digital dan peningkatan komunikasi serta transportasi internasional telah membantu memperluas pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia.

Pertumbuhan perdagangan Indonesia yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dapat dikaitkan dengan teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin (1933) menyatakan

bahwa perdagangan antar negara didasarkan pada perbedaan dalam faktor produksi yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Negara akan cenderung meng ekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan meng impor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan perdagangan yang signifikan dapat dijelaskan melalui perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, kelapa sawit, karet, dan produk pertanian lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan ekspor produk-produk komoditas tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di Indonesia juga telah meningkatkan permintaan domestik akan barang dan jasa, termasuk produk impor. Selain itu, kebijakan perdagangan yang proaktif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti pembebasan bea masuk, pengurangan hambatan perdagangan, dan promosi ekspor, juga telah membantu meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperkuat konektivitas global Indonesia dengan pasar internasional. Platform digital dan infrastruktur logistik yang semakin baik telah memudahkan akses bagi produsen dan eksportir Indonesia ke pasar internasional, serta memungkinkan mereka untuk mencari peluang baru dalam perdagangan.

Pertumbuhan perdagangan Indonesia yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dapat juga dikaitkan dengan hipotesis Linder (1961). Hipotesis Linder menyatakan bahwa negara-negara cenderung berdagang dengan negara-negara lain yang memiliki preferensi konsumen yang serupa. Artinya, negara-negara yang memiliki permintaan domestik yang mirip cenderung untuk berdagang satu sama lain, karena mereka memiliki preferensi konsumen yang serupa terhadap jenis produk tertentu. Pertumbuhan perdagangan yang signifikan dapat dilihat dari peningkatan konsumsi domestik yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat. Permintaan domestik yang kuat untuk berbagai jenis produk konsumen, seperti elektronik, otomotif, pakaian, makanan, dan minuman, telah mendorong peningkatan produksi dan ekspor produk-produk tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan keragaman budaya yang kaya, memiliki preferensi konsumen yang beragam. Produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia yang beragam, baik dari segi harga, kualitas, dan keberagaman produk, memiliki potensi untuk diekspor dan memperoleh pangsa pasar di dalam negeri maupun di pasar internasional. Namun, dalam menghadapi persaingan global, Indonesia juga perlu terus meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan daya saing untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dan menghadapi tantangan perdagangan internasional yang dinamis. Perlu juga diingat bahwa preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu, sehingga penyesuaian terhadap tren pasar global dan beragamnya preferensi konsumen menjadi faktor kunci dalam menghadapi perubahan dalam perdagangan internasional.

Penelitian terhadap ekspor Indonesia perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi penting yang menjadi penentu dalam permintaan dari mitra dagang Indonesia. Oleh karena itu penelitian ingin menganalisis faktor-faktor atau determinan dari ekspor Indonesia, terutama pada kelima tujuan utama ekspor di negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Kajian ekspor dari sisi permintaan dapat menjadi hal yang menarik dalam memahami mobilitas barang ke negara lain, karena ekspor tidak semata terjadi hanya karena daya beli, tetapi juga dapat terjadi karena hal yang lain seperti daya saing.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori perdagangan internasional yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi antara lain adalah teori keunggulan komparatif dan teori *endowment factors*. David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan dalam keadaan free trade, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang absolute disadvantage-nya lebih kecil (sebagai keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditas yang absolute disadvantage-nya lebih besar (sebagai ketidakunggulan komparatif) (Salvatore, 2013).

Heckscher-Ohlin (1933) mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan endowment. Perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan tersebut menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya (Leamer, 1995).

Pendekatan *heterodox* memfokuskan pada sisi permintaan, yaitu yang menyatakan bahwa ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan adanya konstrain pertumbuhan ekonomi dan perbedaan nilai tukar (Thirlwall, 2003). Pendekatan ini memfokuskan pada sisi permintaan, dimana pertumbuhan ekspor merupakan fungsi dari pertumbuhan pendapatan luar negeri dan kompetitif harga. Kompetitif harga merupakan fungsi dari pertumbuhan tingkat upah dan produktivitas, pertumbuhan produktivitas merupakan fungsi dari pertumbuhan output. Ini yang dinamakan Virtuous Circle Models of Export-Led Growth (lingkaran surga), yang mana hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi merupakan sirkuler dan kumulatif; dimana ekspor meningkatkan output yang menyebabkan produktivitas tinggi, produktivitas menyebabkan produk menjadi lebih kompetitif dan ekspor meningkat.

Dari sisi pendapatan, bila pendapatan suatu negara besar, maka akan menjadi pangsa pasar bagi barang impor, sehingga dapat diasumsikan bahwa permintaan impornya juga akan tinggi. Hal ini yang dinyatakan dalam hipotesis Linder (1961) yaitu perdagangan internasional akan terjadi antara dua negara yang memiliki selera dan preferensi yang sama. Selera dan preferensi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tertentu yang ada di negara-negara tersebut.

Beberapa penelitian terkait seperti penelitian oleh Fukunari dan Hyun-Hoon (2006) menunjukkan bahwa PDB, jarak geografis, jarak relatif, kedekatan, indeks keterbukaan, dan bahasa, berpengaruh terhadap perdagangan bilateral. Selanjutnya penelitian oleh Tang dan Wang (2005) dengan model gravitasi menunjukkan terdapat hubungan PDB, jarak, bahasa, dan karakteristik lain dari partner dagang terhadap perdagangan (ekspor) China. Kemudian penelitian oleh Zhengan (2005) menggunakan data panel dalam model gravitasi menunjukkan bahwa secara empiris mendukung *New Trade Theory* dan *Heckscher-Ohlin Theory*, dimana faktor PDB, baik secara absolut maupun secara relatif, berpengaruh positif terhadap volume perdagangan; termasuk juga variabel pengembangannya yaitu *trade complementarity index*. Sementara jarak berpengaruh negatif.

3. METODA PENELITIAN

Bentuk Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian dari data yang diolah dengan menggunakan pendekatan regresi (hubungan sebab-akibat).

Penelitian ini merujuk pada model ekspor Rahman (2003), sebagai berikut:

$$\log X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \log Y_j \pm \beta_2 \log y_j - \beta_3 \log D_{ij} \pm \beta_4 \log dy_{ij} + \beta_5 \log ER_j + \beta_6 IHK_j + \beta_7 (T/Y)_j + \varepsilon_{ij}$$

Dimana:

X_{ij} = ekspor negara i ke j

Y_j = GDP negara j

y_j = GDP per kapita negara j

D_{ij} = jarak ibu kota negara i ke j

dy_{ij} = perbedaan GDP per kapita antara negara i dan j

ER_{ij} = nilai tukar (kurs) negara j (per US\$)

IHK_j = inflasi negara j

T/Y_j = derajat keterbukaan negara j (ratio perdagangan–GDP)

Hipotesis:

- (1) Diharapkan koefisien β_1 , β_5 , β_6 dan β_7 adalah positif.
- (2) Diharapkan koefisien β_3 adalah negatif.
- (3) Koefisien β_2 , dan β_4 dapat bernilai positif atau negatif. GDP per kapita β_2 positif menunjukkan suatu negara menikmati skala ekonomi, sementara bernilai negatif sebagai dampak dari *absorption* (penyerapan) atau mengurangi ekspor. β_4 positif menurut H-O *theory*, dan negatif menurut Linder.

Penelitian ini menggunakan data panel tahunan 2001 sampai 2022 dengan 5 mitra dagang utama, yaitu Thailand, Singapura, Filipina, Singapura dan Vietnam. Data ekspor bersumber dari publikasi BPS; sementara data GDP, GDP per kapita, kurs, dan inflasi adalah bersumber dari publikasi Bank Dunia atau situs <https://data.worldbank.org/indicator/>. Data jarak antar ibukota negara diperoleh dari situs <https://www.distance.to>.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi dengan dari faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia ke mitra dagang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Estimasi Ekspor Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57,9653	11,9509	-4,8503	0,0000
LOG(Yj)	3,2195	0,6208	5,1863	0,0000
LOG(yj)	-2,6839	0,7281	-3,6862	0,0005
LOG(Dij)	1,6122	0,6418	2,5121	0,0144
LOG(dy)	0,1409	0,0600	2,3459	0,0219
LOG(T/Y)	1,5489	0,1914	8,0939	0,0000
LOG(ERj)	-0,1195	0,2539	-0,4705	0,6395
IHK	0,0019	0,0037	0,5052	0,6151

Sumber: Data diolah

Estimasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaruh variabel GDP (Yj) GDP per kapita (yj), jarak (Dij), perbedaan GDP per kapita (dy) dan derajat keterbukaan (T/Y) adalah signifikan

mempengaruhi ekspor Indonesia ke mitra dagang; sementara pengaruh variabel nilai tukar (ERj) dan inflasi (IHKj) adalah tidak signifikan mempengaruhi ekspor Indonesia ke mitra dagang.

Faktor GDP yang mempengaruhi nilai ekspor Indonesia dan berslope positif dapat diinterpretasikan bahwa bila GDP negara mitra dagang meningkat 1% maka akan meningkatkan nilai ekspor rata-rata sebesar 3,2%. Hubungan yang positif ini menunjukkan pengaruh yang elastis.

Selanjutnya, faktor GDP mempengaruhi nilai ekspor Indonesia dan berslope negatif yang berarti bila GDP per kapita negara mitra dagang meningkat 1% maka akan menurunkan nilai ekspor rata-rata sebesar 2,7%. Hubungan yang negatif ini menunjukkan pengaruh yang juga elastis sebagai dampak dari *absorption* (penyerapan) atau mengurangi ekspor. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan atau daya beli di negara mitra dagang dapat memicu penurunan dalam volume atau nilai ekspor yang diterima Indonesia.

Faktor jarak relatif mempengaruhi nilai ekspor impor Indonesia dengan tingkat elastisitas yang juga positif. Hal ini berarti, bila jarak relatif meningkat 1%, maka akan meningkatkan nilai perdagangan rata-rata sebesar 1,6%. Fenomena positif ini tampaknya bertentangan dengan teori yang umumnya menyatakan bahwa jarak adalah hambatan dalam perdagangan internasional. Namun, dengan memfokuskan tujuan ekspor dan impor Indonesia pada negara-negara dalam kawasan regional ASEAN, perbedaan jarak tidak begitu signifikan; dan kerjasama regional yang diperlihatkan oleh ASEAN telah mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang mungkin timbul akibat jarak geografis.

Faktor perbedaan GDP per kapita adalah signifikan mempengaruhi nilai ekspor yang menunjukkan tingkat elastisitas yang positif. Hal ini berarti bila perbedaan GDP per kapita meningkat 1%, maka akan meningkatkan nilai ekspor rata-rata sebesar 0,1% (inelastis). Hubungan yang positif ini mendukung teori H-O dan menolak hipotesis Linder, yang berarti perdagangan yang dilakukan sesuai dengan kelimpahan sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya faktor keterbukaan ekonomi yang signifikan menunjukkan bila keterbukaan ekonomi meningkat 1%, maka akan meningkatkan nilai ekspor rata-rata sebesar 1,5% (elastis).

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengingat faktor GDP dan GDP per kapita memiliki pengaruh tanda yang berbeda terhadap nilai ekspor, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami secara spesifik sektor-sektor ekonomi yang paling terpengaruh. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan nilai ekspor.

Faktor jarak relatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ekspor, mempertimbangkan strategi pengembangan dan diversifikasi produk ekspor dapat menjadi kunci. Pemerintah dan pelaku bisnis dapat memfokuskan upaya pada sektor-sektor yang memiliki daya saing lebih tinggi dan meminimalkan dampak jarak relatif.

Dengan temuan yang mendukung Teori H-O dan menolak hipotesis Linder, penting untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang mendukung spesialisasi produksi sesuai dengan kelimpahan sumber daya. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan, dan dengan tingkat elastisitas yang positif, pemerintah dapat menjaga dan meningkatkan keterbukaan ekonomi. Namun, penting untuk mengelola keterbukaan ini dengan hati-hati, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pendukung diterapkan.

Meskipun faktor kurs dan inflasi mitra dagang tidak signifikan dalam pengaruh langsung terhadap nilai ekspor dan impor, perusahaan dan pelaku bisnis dapat mengadopsi strategi manajemen

risiko terhadap fluktuasi kurs dan inflasi. Ini dapat melibatkan penggunaan instrumen keuangan atau penyesuaian kontrak yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukunari K. and Hyun-Hoon L. (2006). *The Gravity in International Trade in Services*. Keio University, Japan – Kangwon National University, Korea.
- Heckscher, E., & Ohlin, B. (1933). *International and Inter-Regional Trade*. Cambridge: Harvard University Press.
- Leamer, E.E. (1995). *The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice*. Princeton Studies in International Finance.
- Linder, S. B. (1961). *An Essay on Trade and Transformation*. Almqvist & Wiksell
- Rahman, M.M. (2003). A Panel Data Analysis of Bangladesh's Trade: The Gravity Model Approach. University of Sydney, Australia.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics*. Wiley.
- Thirlwall, A.P. (2003). Trade, Balance of Payments and Exchange Rate Policy in Developing Countries. *Oeconomicus*, Vol. 7.
- Tang Yihong and Wang Weiwei. 2005. "An Analysis of Trade Potential between China and ASEAN within China-ASEAN FTA". University of International Business and Economics (UIBE), China.
- Zhengang Zhu. 2005. "A Gravity Model of China's Trade Flows", *Recent Developments in The China Economy*.

**Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura**

ISSN 2986-920X



9

772986

920054